

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021

RKPD DIY 2021



BAPPEDA DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦿꦤꦤ꧀ꦥꦼꦧꦁꦸꦤ꧀ꦢꦺꦫꦲꦏꦼ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Email: bappeda@jogjaprov.go.id

RKPD DIY 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021



2021

R K P D DIY

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦿꦤꦤ꧀ꦥꦼꦧꦁꦸꦤ꧀ꦢꦺꦫꦲꦏꦼ
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦺꦫꦲꦶꦱꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 20);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017 - 2022.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat.

- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB 1 : PENDAHULUAN
 - b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
 - f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - h. BAB 8 : PENUTUP

- (2) Rincian uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2021 menjadi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

RINCIAN URAIAN RKPD TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Hubungan Antardokumen.....	9
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	63
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	233
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	263
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	366
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	367
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	401
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	401
3.1.1 PDRB dan Struktur Ekonomi Periode 2015-2019	401
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	403
3.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB	404
3.1.4 Inflasi	405
3.1.5 ICOR.....	406
3.1.6 Ketenagakerjaan.....	407
3.1.7 Kemiskinan	408
3.1.8 Ketimpangan Regional	408
3.1.9 Ketimpangan Pendapatan.....	409
3.1.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020.....	410
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	415

3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	416
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	425
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	433
3.2.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	437
3.2.5	Strategi Keuangan Daerah	438
BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	443
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	443
4.2	Perumusan Tema RKPD 2021	450
4.2.1	Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2021	450
4.2.2	Internalisasi Tema dan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah 2021 dengan Tema RKPD DIY tahun 2021	457
4.2.3	Internalisasi Paradigma Abad Samudra Hindia dalam Visi-Misi Gubernur DIY dengan Tema RKPD Tahun 2021: Kawasan Selatan Sebagai Basis Kewilayahan yang diperhatikan	457
4.2.4	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tema RKPD Tahun 2021	458
4.2.5	Internalisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	461
4.2.6	Tema RKPD DIY 2021	462
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	463
4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2021	467
4.4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Nasional	467
4.4.2	Pendekatan Tematik	468
4.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	472
4.5.1	Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	473
4.5.2	Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD	474
4.5.3	Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	486
BAB 5	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	513
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2021	513
5.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	513
5.1.2	Nilai PDRB	513
5.1.3	Kemiskinan	513
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2021	514
5.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	514
5.2.2	Nilai PDRB	514
5.2.3	Kemiskinan	515
5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2021	516
5.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	516
5.3.2	Nilai PDRB	517
5.3.3	Kemiskinan	517
5.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2021	518
5.4.1	Indeks Pembangunan Manusia	519

5.4.2	Nilai PDRB	519
5.4.3	Kemiskinan	519
5.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2021	520
5.5.1	Indeks Pembangunan Manusia	520
5.5.2	Nilai PDRB	520
5.5.3	Kemiskinan	521
5.6	Pendekatan Fokus Tematik	521
5.6.1	Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan	521
5.6.2	Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah	531
5.6.3	Program/ Kegiatan Tematik Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan	537
5.6.4	Program/ Kegiatan Tematik Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	540
BAB 6	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	555
6.1	Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD DIY 2021	555
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	556
	Dinas Kesehatan	572
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	583
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	602
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	611
	Satuan Polisi Pamong Praja	620
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	628
	Dinas Sosial	636
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	655
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	666
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	676
	Dinas Perhubungan	692
	Dinas Komunikasi dan Informatika	703
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	715
	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	726
	Dinas Kebudayaan	736
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	740
	Dinas Kelautan dan Perikanan	749
	Dinas Pariwisata	758
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	770
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	788
	Sekretariat Daerah	805
	Biro Tata Pemerintahan	808
	Biro Hukum	818
	Biro Bina Mental Spiritual	826
	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	835
	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	842

Biro Organisasi	862
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	876
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	883
Badan Penghubung Daerah	888
Sekretariat DPRD	895
Inspektorat	905
Paniradya Kaistimewan	916
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	921
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	942
Badan Kepegawaian Daerah	962
Badan Pendidikan dan Pelatihan	972
Urusan Kelembagaan	980
Urusan Kebudayaan	994
Urusan Pertanahan	1019
Urusan Tata Ruang	1031
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	1041
BAB 8 PENUTUP	1061

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis	15
Tabel 2-2	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY.....	15
Tabel 2-3	Debit Rerata Sungai di DIY.....	22
Tabel 2-4	Penggunaan Lahan DIY	26
Tabel 2-5	Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Lindung dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	28
Tabel 2-6	Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	29
Tabel 2-7	Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY	32
Tabel 2-8	Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2014 – 2018	35
Tabel 2-9	Korban Bencana DIY Tahun 2015 – 2019	35
Tabel 2-10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015- 2019 dalam persen	39
Tabel 2-11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Tipe Daerah, 2015-2019.....	39
Tabel 2-12	Garis Kemiskinan DIY dan Indonesia Menurut Tipe Daerah Tahun 2015-2019	40
Tabel 2-13	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan <i>non</i> Makanan Menurut Tipe Daerah September 2019 (%)	41
Tabel 2-14	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Juta Rp).....	42
Tabel 2-15	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (%)	44
Tabel 2-16	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (%)	44
Tabel 2-17	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 2-18	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	47
Tabel 2-19	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019.....	48
Tabel 2-20	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019.....	51

Tabel 2-21	Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di DIY (%), 2014-2018.....	51
Tabel 2-22	Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Usia di DIY (%), 2014-2018.....	52
Tabel 2-23	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2015-2019.....	52
Tabel 2-24	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2015 - 2019.....	58
Tabel 2-25	SDM Olahraga DIY Tahun 2017	62
Tabel 2-26	Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di DIY, Tahun 2015-2019.....	63
Tabel 2-27	Persentase Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA Berakreditasi A di DIY Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 2-28	Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, SMP, SMA, SMK DIY Tahun 2014 - 2018.....	68
Tabel 2-29	Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD - SMA Sederajat di DIY Tahun 2015-2018.....	68
Tabel 2-30	Jumlah Sekolah di DIY yang Memiliki Laboratorium Komputer Tahun 2014 - 2018.....	69
Tabel 2-31	Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 2-32	Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 2-33	Layanan di BTKP DIY dan Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2018.....	71
Tabel 2-34	Temuan Kasus Berdasarkan Tahun Penemuan 2014-2019	74
Tabel 2-35	Jenis Penyakit Tidak Menular dengan Prevalensi Tinggi.....	76
Tabel 2-36	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup DIY Tahun 2014-2018.....	78
Tabel 2-37	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di DIY Tahun 2017	79
Tabel 2-38	Daerah Irigasi di DIY	81
Tabel 2-39	Prasarana Irigasi/Pengairan	81
Tabel 2-40	Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY 2018	82
Tabel 2-41	Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2018	86
Tabel 2-42	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2018.....	87
Tabel 2-43	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2018.....	88
Tabel 2-44	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan per Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018	89

Tabel 2-45	Daftar Ruas Jalan Provinsi.....	90
Tabel 2-46	Kondisi Jalan Provinsi 2019	91
Tabel 2-47	Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan	96
Tabel 2-48	Kondisi Gatra Ketahanan Nasional di DIY	97
Tabel 2-49	Perkembangan Indeks Variabel IDI D.I. Yogyakarta, 2017-2018	99
Tabel 2-50	Perkembangan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY tahun 2017 - 2019.....	102
Tabel 2-51	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY Tahun 2015-2019.....	105
Tabel 2-52	Data PSKS yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Kualitas di DIY Tahun 2015-2019	106
Tabel 2-53	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2015 – 2019	106
Tabel 2-54	Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2015 - 2019	108
Tabel 2-55	Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2016 - 2018.....	109
Tabel 2-56	Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2016 – 2019	111
Tabel 2-57	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2015 – 2019.....	112
Tabel 2-58	Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2018.....	117
Tabel 2-59	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Februari 2017- Februari 2019	118
Tabel 2-60	Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2019	120
Tabel 2-61	Data Jumlah Tenaga Kerja Terlatih dan Jenis Pelatihannya	121
Tabel 2-62	Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY 2013 - 2018	124
Tabel 2-63	Capaian IDG DIY Tahun 2015-2019	124
Tabel 2-64	Jumlah Desa Prima Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019	125
Tabel 2-65	Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 – 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	127
Tabel 2-66	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2017-2019.....	129
Tabel 2-67	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Lokasi pada Tahun 2017	131

Tabel 2-68	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten s.d Tahun 2019.....	140
Tabel 2-69	Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai di DIY tahun 2018.....	141
Tabel 2-70	Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY tahun 2018.....	142
Tabel 2-71	Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversinya.....	143
Tabel 2-72	Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Jumlah Penduduk yang telah Melakukan Perekaman KTP EL di DIY, 2014-2018.....	144
Tabel 2-73	Jumlah Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta, 2018	144
Tabel 2-74	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2017-September 2019	146
Tabel 2-75	Posyandu Aktif di DIY Tahun 2018.....	147
Tabel 2-76	Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2017.....	148
Tabel 2-77	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035.....	151
Tabel 2-78	<i>Unmet Need</i> KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019	152
Tabel 2-79	Angka Perceraian di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018	153
Tabel 2-80	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017	154
Tabel 2-81	Jumlah Penumpang Perkotaan (Trans Jogja) Terangkut Tahun 2015-2019.....	156
Tabel 2-82	Perangkingan Urutan Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi.....	157
Tabel 2-83	Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi 2018..	158
Tabel 2-84	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019	160
Tabel 2-85	Perkembangan Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019.....	160
Tabel 2-86	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2014-2019.....	161
Tabel 2-87	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2014-2019.....	162
Tabel 2-88	Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2018.....	163
Tabel 2-89	Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	164
Tabel 2-90	Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	164
Tabel 2-91	10 Besar Provinsi dengan Indeks Daya Saing Tertinggi di Indonesia Hasil Kajian Asia Competitiveness Institute.....	165
Tabel 2-92	Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017.....	166

Tabel 2-93	Capaian Prestasi Atlet DIY di Ajang Kompetisi Olahraga.....	167
Tabel 2-94	Fasilitas Olahraga di DIY	167
Tabel 2-95	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga serta Sarana bagi Pemuda di DIY.....	169
Tabel 2-96	Budaya Benda di DIY.....	174
Tabel 2-97	Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY	175
Tabel 2-98	Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2019....	177
Tabel 2-99	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2019...	179
Tabel 2-100	Organisasi Seni dan Budaya di DIY	183
Tabel 2-101	Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017	183
Tabel 2-102	Peringkat TGM Kabupaten/Kota di DIY	184
Tabel 2-103	Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2019	185
Tabel 2-104	Data Kearsipan di DIY 2015-2019.....	187
Tabel 2-105	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY	195
Tabel 2-106	Lama Tinggal Wisatawan.....	196
Tabel 2-107	Jumlah Usaha Perjalanan Wisata	196
Tabel 2-108	Luas Lahan Sawah Beririgasi dan <i>non</i> Irigasi di DIY	197
Tabel 2-109	Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2019	198
Tabel 2-110	Perkembangan Produksi Hortikultura DIY Tahun 2015-2019 (dalam ton).....	198
Tabel 2-111	Populasi Ternak di DIY per Kelompok Ternak (dalam ekor), Tahun 2015-2019.....	200
Tabel 2-112	Komoditas Perkebunan Strategis (dalam hektar), Tahun 2015-2018.....	200
Tabel 2-113	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2018.....	201
Tabel 2-114	Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2015-2019.....	203
Tabel 2-115	Data Status Permohonan WIUP	206
Tabel 2-116	IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi.....	206
Tabel 2-117	Data Jenis Energi Baru Terbarukan 2015 – 2018.....	209
Tabel 2-118	Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2017 - 2019	210
Tabel 2-119	Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2018	211
Tabel 2-120	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2018.....	211
Tabel 2-121	Perkembangan Ekspor di DIY Tahun 2014-2018.....	212
Tabel 2-122	Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2015-2019 (dalam Juta US \$).....	212

Tabel 2-123	Persentase Kontribusi Ekspor <i>non</i> Migas Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2018	213
Tabel 2-124	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2018	214
Tabel 2-125	Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2018	215
Tabel 2-126	Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2018.....	217
Tabel 2-127	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2018.....	217
Tabel 2-128	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2018.....	218
Tabel 2-129	Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2018.....	219
Tabel 2-130	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017.....	220
Tabel 2-131	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2016.....	220
Tabel 2-132	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2015.....	221
Tabel 2-133	Pendapatan Daerah DIY.....	228
Tabel 2-134	Jumlah aset yang di Pengguna dan Pengelola.....	228
Tabel 2-135	Jumlah Aset yang Dioptimalkan	228
Tabel 2-136	Penjagaan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY, 2019-2022	230
Tabel 2-137	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2015-2019	234
Tabel 2-138	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2015-2019	235
Tabel 2-139	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2015-2019	235
Tabel 2-140	Nilai Tukar Petani (NTP) 2015-2019.....	237
Tabel 2-141	Distribusi Presentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%), 2015-2019.....	240
Tabel 2-142	Daftar Rencana Strategis Pengembangan Kawasan di Yogyakarta	241
Tabel 2-143	Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY	245
Tabel 2-144	Langganan Bandwidth Pemda DIY	245
Tabel 2-145	Jumlah Penumpang Trans Jogja 2015-2019.....	251
Tabel 2-146	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	253
Tabel 2-147	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan	254

Tabel 2-148	Jumlah Tindak Pidama Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2019	254
Tabel 2-149	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY.....	255
Tabel 2-150	Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2015-2019.....	256
Tabel 2-151	Data Tindak Pidana Narkoba di DIY	257
Tabel 2-152	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama	260
Tabel 2-153	Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	264
Tabel 2-154	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2019 terhadap target Akhir RPJMD	266
Tabel 2-155	Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2019.....	268
Tabel 2-156	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2019	270
Tabel 2-157	Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.....	280
Tabel 3-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)	405
Tabel 3-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (%).....	405
Tabel 3-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019	408
Tabel 3-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019	408
Tabel 3-5	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020	410
Tabel 3-6	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2021	416
Tabel 3-7	Perbandingan Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2021	419
Tabel 4-1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	448
Tabel 4-2	Penyandingan Cascading RPJMD, Tematik dan Kriteria Program.	453
Tabel 4-3	Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022	459
Tabel 4-4	Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022	460
Tabel 4-5	Rumusan Prioritas Daerah.....	463
Tabel 4-6	Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	465

Tabel 5-1	Program/Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan	522
Tabel 5-2	Program/Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah	532
Tabel 5-3	Program/Kegiatan Tematik Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan.....	538
Tabel 5-4	Program/Kegiatan Tematik Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	541
Tabel 6-1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021	555
Tabel 7-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta	1041
Tabel 7-2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta	1043

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY	6
Gambar 1-2	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah.....	10
Gambar 2-1	Peta Administrasi DIY	14
Gambar 2-2	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	14
Gambar 2-3	Peta Morfologi DIY.....	18
Gambar 2-4	Peta Geologi DIY.....	19
Gambar 2-5	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah.....	20
Gambar 2-6	Peta Aliran Sungai DIY.....	21
Gambar 2-7	Peta Curah Hujan DIY	24
Gambar 2-8	Peta Penggunaan Lahan DIY	27
Gambar 2-9	Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019-2039	28
Gambar 2-10	Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019-2039	32
Gambar 2-11	Peta Rawan Bencana DIY.....	34
Gambar 2-12	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia	36
Gambar 2-13	Peta Kepadatan Penduduk DIY	37
Gambar 2-14	Tingkat Kemiskinan DIY dan Nasional tahun 2015-2019	38
Gambar 2-15	Indeks Keparahman dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY, Tahun 2015 - 2019	42
Gambar 2-16	Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2015-2019.....	45
Gambar 2-17	<i>Indeks Williamson</i> DIY, Tahun 2015-2019	46
Gambar 2-18	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2015-2019.....	48
Gambar 2-19	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY (Tahun), 2015-2019.....	53
Gambar 2-20	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2018-2019.....	54
Gambar 2-21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2015 - 2019	55

Gambar 2-22	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2015-2019.....	56
Gambar 2-23	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017	57
Gambar 2-24	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY (Tahun), 2015-2019.....	58
Gambar 2-25	Potensi Budaya DIY Tahun 2018.....	60
Gambar 2-26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2019	64
Gambar 2-27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2019.....	65
Gambar 2-28	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) DIY Tahun 2017	74
Gambar 2-29	Pengetahuan Tentang AIDS/HIV Menurut Provinsi	75
Gambar 2-30	Perkembangan Jumlah Kasus Malaria DIY Tahun 2015-2019	75
Gambar 2-31	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017.....	80
Gambar 2-32	Grafik Indeks Demokrasi Indonesia DIY 2009-2018.....	98
Gambar 2-33	Grafik Perkembangan Aspek IDI DIY 2009-2018	98
Gambar 2-34	Grafik Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba DIY 2013 - 2018	100
Gambar 2-35	Proporsi Disabilitas Usia Produktif di Indonesia Tahun 2018..	103
Gambar 2-36	Grafik Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2019.....	110
Gambar 2-37	Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2019.....	113
Gambar 2-38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2019	114
Gambar 2-39	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2019.....	115
Gambar 2-40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota 2019.....	115
Gambar 2-41	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2018 (%)	116
Gambar 2-42	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Februari 2018-Februari 2020 (%).....	118
Gambar 2-43	TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019	119
Gambar 2-44	Grafik Jumlah Ketersediaan Pangan Perkapita di DIY Tahun 2015-2019	133
Gambar 2-45	Grafik Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2015-2019.....	133

Gambar 2-46	Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2015-2019.....	134
Gambar 2-47	Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2014-2019	134
Gambar 2-48	Grafik Jumlah Perkembangan Konsumsi Enerdi Penduduk DIY Tahun 2015-2019.....	135
Gambar 2-49	Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY Tahun 2015-2019	136
Gambar 2-50	Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2015-2019.....	137
Gambar 2-51	Persentase penduduk Miskin di DIY, September 2012- Maret 2019.....	145
Gambar 2-52	Perubahan TFR di DIY Berdasarkan SDKI	150
Gambar 2-53	Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Menurut SK Gub DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya....	181
Gambar 2-54	Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2018	189
Gambar 2-55	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2015-2019	190
Gambar 2-56	Grafik Perkembangan Armada Penangkapan Ikan DIY Tahun 2015-2019	191
Gambar 2-57	Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2015 – 2019.....	192
Gambar 2-58	Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2015-2019	193
Gambar 2-59	Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2015-2019.....	194
Gambar 2-60	Perkembangan Populasi Ternak DIY Tahun 2014-2018 (dalam animal unit).....	199
Gambar 2-61	Persentase Deviden BUMD terhadap Penyetaraan Modal, 2015-2017	229
Gambar 2-62	Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2015-2019	237
Gambar 2-63	Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2015-2019	238
Gambar 2-64	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2015-2019.....	239
Gambar 2-65	Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY	247
Gambar 2-66	Rencana sistem jaringan jalan.....	248
Gambar 2-67	Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR	249
Gambar 2-68	Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya	249
Gambar 2-69	Sistem Operasional Bus Trans Jogja	250
Gambar 2-70	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi.....	258
Gambar 2-71	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal di DIY.....	261
Gambar 2-72	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja	262

Gambar 3-1	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2015-2019	401
Gambar 3-2	Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015 - 2019	402
Gambar 3-3	Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019.....	403
Gambar 3-4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019	403
Gambar 3-5	Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2019 menurut Sektor (%)	404
Gambar 3-6	Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019	406
Gambar 3-7	Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2015-2019	406
Gambar 3-8	Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2018.....	407
Gambar 3-9	Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019	409
Gambar 3-10	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2016 – 2020.....	409
Gambar 3-11	Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY.....	439
Gambar 4-1	Arsitektur Kinerja RPJMD DIY 2017-2022 Cascade Perencanaan	452

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Khusus untuk DIY, pembangunan juga membawa mandat pelaksanaan keistimewaan DIY yang tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada semangat *renaissance* dan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Mengacu visi pembangunan jangka panjang DIY yang akan dicapai pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 berada pada tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, yang berada pada tahapan lima tahun keempat dari (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Seperti halnya dengan daerah lain, DIY juga menghadapi kompleksitas permasalahan di berbagai sektor dan kepentingan, di samping itu DIY juga harus mewujudkan cita-cita akhir pembangunan yang harus dicapai yaitu berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur. Oleh karenanya proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas.

Terkait dengan input pembangunan, proses pembangunan juga mempertimbangkan optimalisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah setempat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hal-hal tersebut telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di DIY untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DIY.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;

- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

 - a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

 - 1) Pengolahan data dan informasi.
 - 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
 - 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
 - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
 - 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
 - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
 - 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
 - 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
 - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
 - 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
 - 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
 - b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
 - 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
 - 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
 - 5) Rencana program prioritas daerah.
- 3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

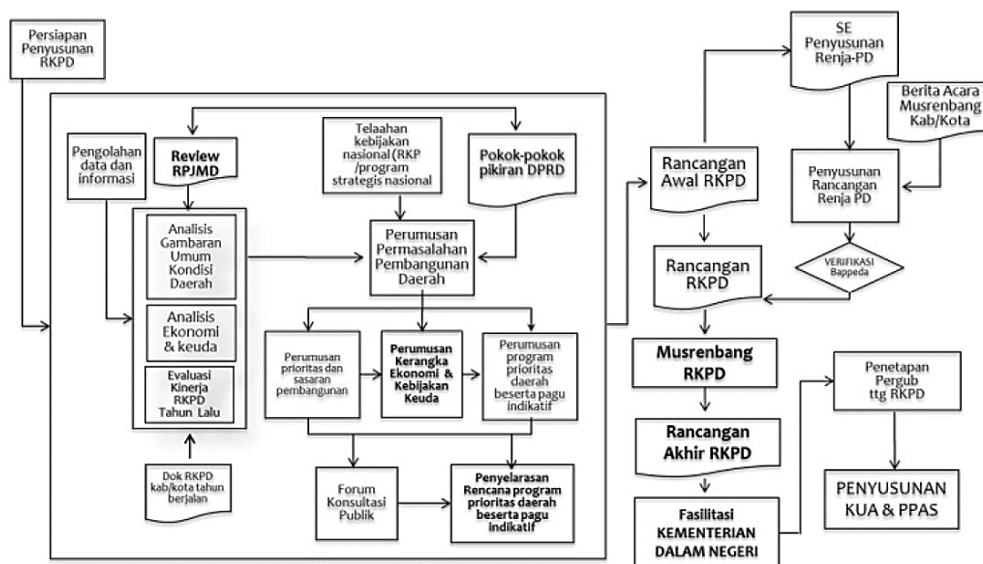
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan RKP. Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD DIY 2017 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

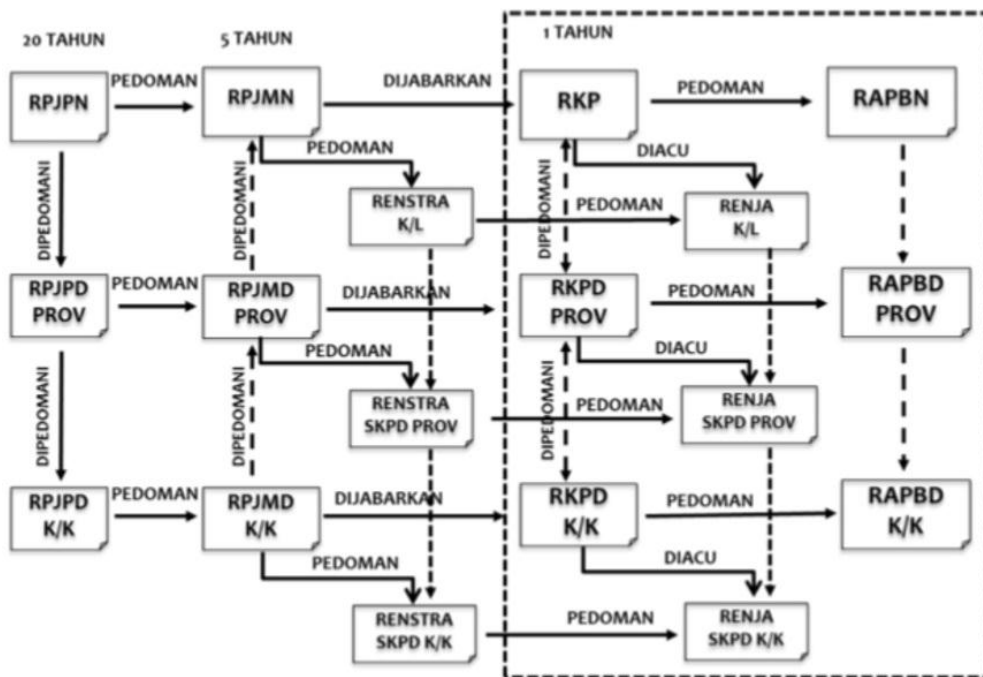
- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12)
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3)
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 117);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

1.3 Hubungan Antardokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat kondisi geografi daerah, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, rancangan kerangka keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Badan/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
5. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Memuat mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan DIY.
6. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun dengan

memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.
8. Bab VIII Penutup

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

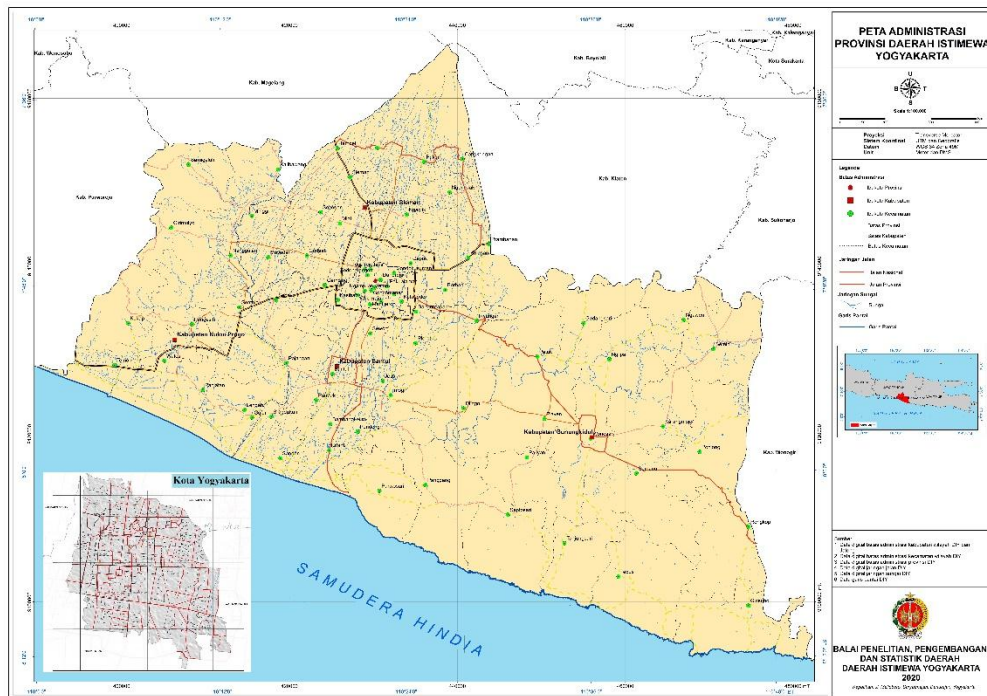
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Secara astronomis, DIY terletak diantara $7^{\circ}33'-8^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}00'-110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara geografis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia.

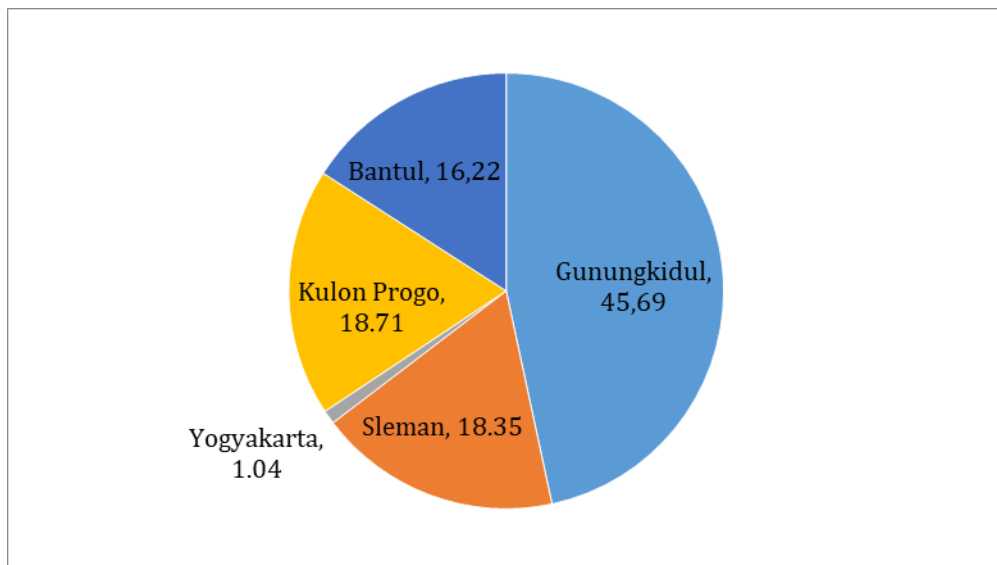
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan daerah setingkat provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Secara pemerintahan, wilayah kabupaten/kota DIY dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo serta Kota Yogyakarta. Sementara struktur pemerintah di bawah kabupaten/kota meliputi 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan. Wilayah kabupaten/kota di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,04% yang secara lengkap perbandingan luasan antara wilayah disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pesisir	Lembah /DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
Kulon Progo	Wates	1	88	10	-	22	6
Bantul	Bantul	1	75	5	-	13	6
Gunungkidul	Wonosari	1	144	18	2	55	8
Sleman	Sleman	1	86	-	-	15	7
KotaYogyakarta	Yogyakarta	1	45	-	-	-	4
DIY	Yogyakarta	7	438	33	0	105	331

Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2018

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2-2 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo
			Watupayungsiyung
			Watupanjang
			Watunglambor
			Watuganten Lor
			Watuganten Kidul
			Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog
			Jungwok
			Watutopi
			Ngusalan
		Tileng	Kalong
			Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gununggandul
			Godeg
			Baron
			Layar
			Krokoh

2.1.1.1.3 Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

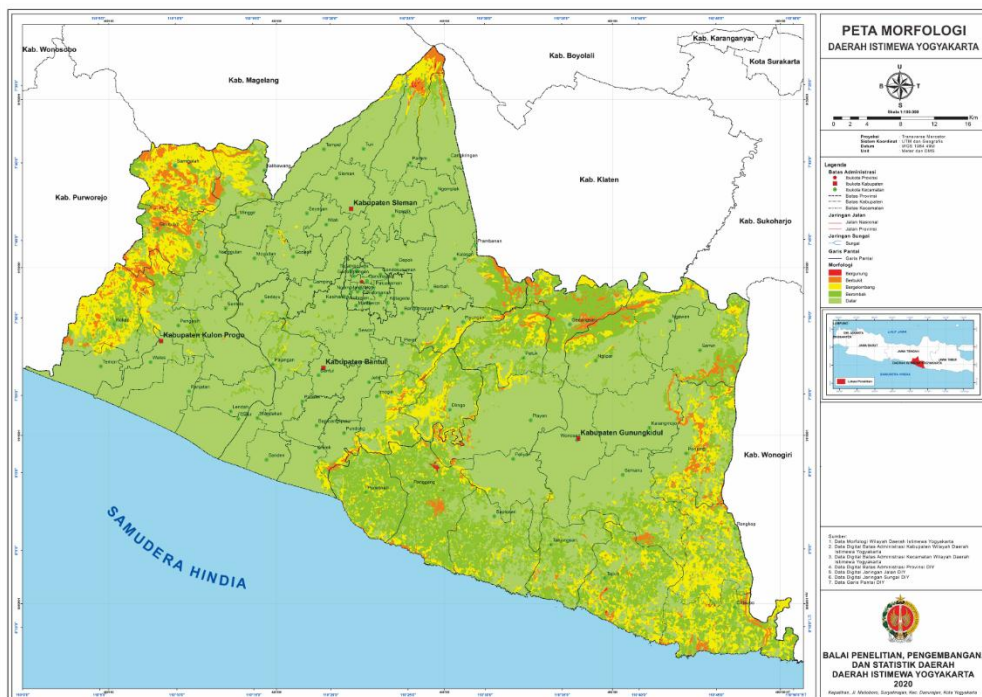
c. Unit Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25$ km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81$ km², ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62$ km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan

satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25$ km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



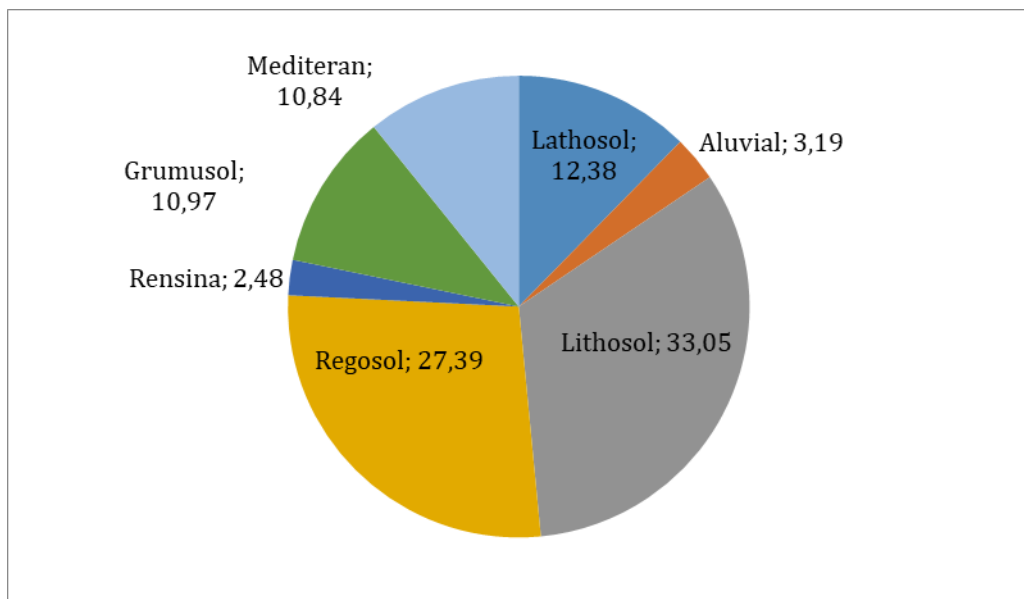
Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-3 Peta Morfologi DIY

2.1.1.1.4 Geologi

Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{bk}), dan Formasi Mandalika (Tm_{wl}).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Gambar 2-5 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah

2.1.1.1.5 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini:



Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-6 Peta Aliran Sungai DIY

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Hindia melalui wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah:

- DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu:

- Mayor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah *mayor* aquifer adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- Minor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer : Formasi Wates, Gumuk pasir.
- Poor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah poor aquifer adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesit tua.
- Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah: Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-3 Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	1,26	148,45	0,03	120,83	0,60	149,50	0,35	209,79	0,35	246,8
Sungai Bedog (Guwosari)	2,66	12,71	1,75	10,36	0,44	10,85	0,95	15,84	0,33	17,32
Sungai Code (Kaloran)	1,09	3,71	0,99	2,76	0,25	4,26	0,51	4,16	0,57	3,91
Sungai Winongo (Padokan)	0,21	5,01	0,26	4,59	0,53	7,17	0,27	6,94	0,16	7,68
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,43	2,67	0,26	2,48	0,42	2,46	0,22	2,35	0,31	5,25
Sungai Opak (Pulo)	0,02	0,89	0,05	0,74	0,07	1,52	0,10	2,70	0,29	1,36

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2018

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk sungai bawah tanah (SBT) Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari.

CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah (CAT) yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

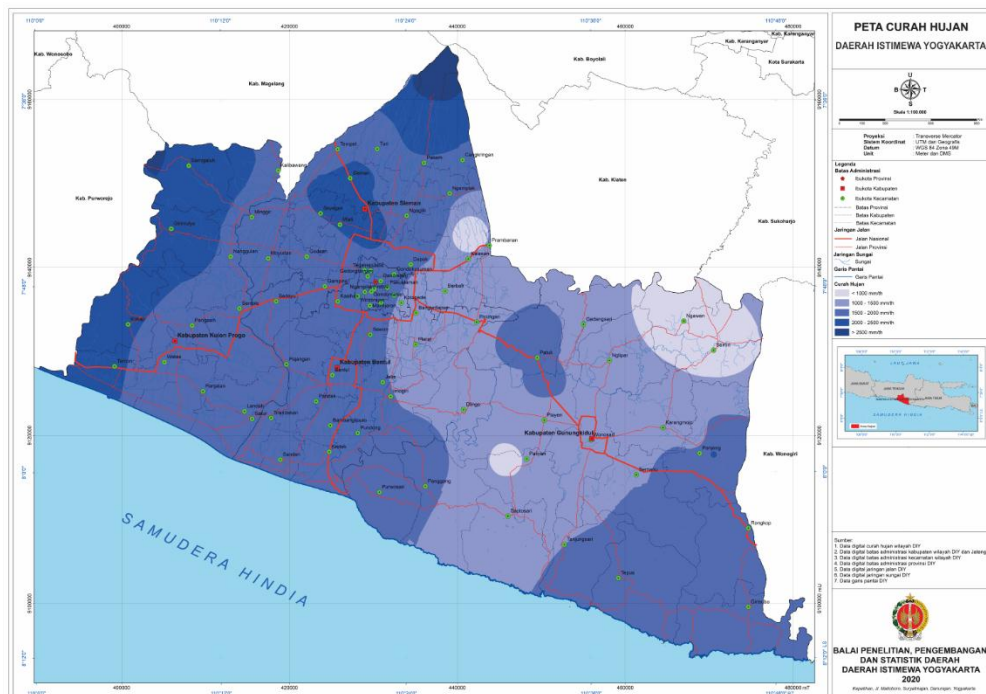
2.1.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumber daya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Hindia, terjadi banyak penguapan air laut yang menyebabkan udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2019, DIY tercatat memiliki: a). suhu udara

minimum 23,3°C dan maksimum 28,90°C; b). jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak 500 mm³ pada bulan Januari dan terendah sebanyak 0 mm³ pada bulan Juni - Oktober; c). kelembaban udara minimum 54,0% dan maksimum 92 d). tekanan udara antara 997 mb – 988,2 mb; e). kecepatan angin minimum 1 knot dan maksimum 7 knot (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2020).



Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-7 Peta Curah Hujan DIY

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun kabupaten/kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi meningkat yang diukur dari

perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang.

Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY. Target kinerja sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian tahun 2019 mengalami peningkatan dan melampaui target. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya sebesar 78,85%. Capaian ini 95,58% dari target kinerja akhir RPJMD tahun 2022 sebanyak 82,5%. Capaian tersebut menjadikan kinerja untuk IKU DIY tahun 2019 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, serta aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2019 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 sebesar 77,05%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 78,85% atau melebihi target tahun 2019 yaitu 78,00% sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 101,09%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2019 sebesar 95,58%. Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pemantauan dianalisis dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas Kawasan lindung dan luas Kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang

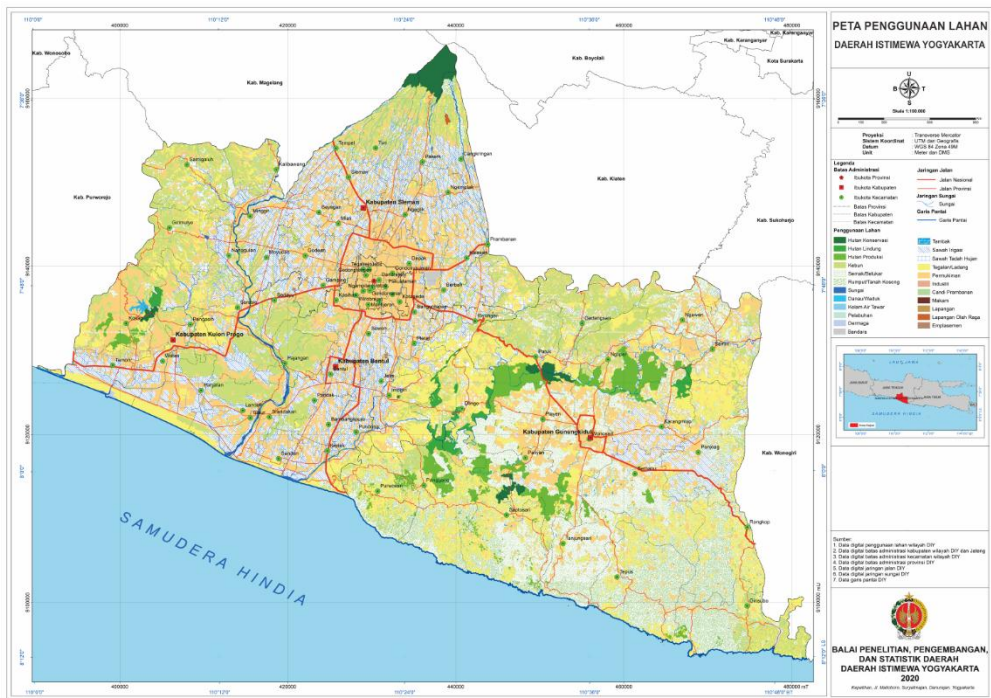
Kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat tiga klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses superimpose antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2019. Kesesuaian pemanfaatan ruang pada

kawasan lindung di DIY sebesar 86,55% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,45%. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 78,38%, belum terwujud sebesar 16,28%, dan tidak sesuai sebesar 5,35%. Penggunaan lahan lainnya selebihnya terdiri dari bandara, candi, danau/waduk, dermaga, emplasemen, industri, kolam, lapangan, makam, pelabuhan, tanah kosong, sungai dan tambak, seperti tabel berikut :

Tabel 2-4 Penggunaan Lahan DIY

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bandara	295,08	0,093
Candi Prambanan	32,51	0,010
Danau/Waduk	253,91	0,080
Dermaga	70,16	0,022
Emplasemen	137,70	0,043
Hutan Konservasi	3.072,71	0,968
Hutan Lindung	2.201,22	0,694
Hutan Produksi	9.307,24	2,933
Industri	35,82	0,011
Kebun	46.639,26	14,696
Kolam Air Tawar	39,61	0,012
Lapangan	1,63	0,001
Lapangan Olah Raga	111,49	0,035
Makam	40,46	0,013
Pelabuhan	2,04	0,001
Permukiman	87.383,83	27,535
Rumput/Tanah Kosong	993,36	0,313
Sawah Irigasi	55.057,48	17,349
Sawah Tadah Hujan	2.980,14	0,939
Semak/Belukar	63.189,68	19,912
Sungai	2.574,73	0,811
Tambak	102,41	0,032
Tegalan/Ladang	42.827,38	13,495
Grand Total	317.349,88	100,000

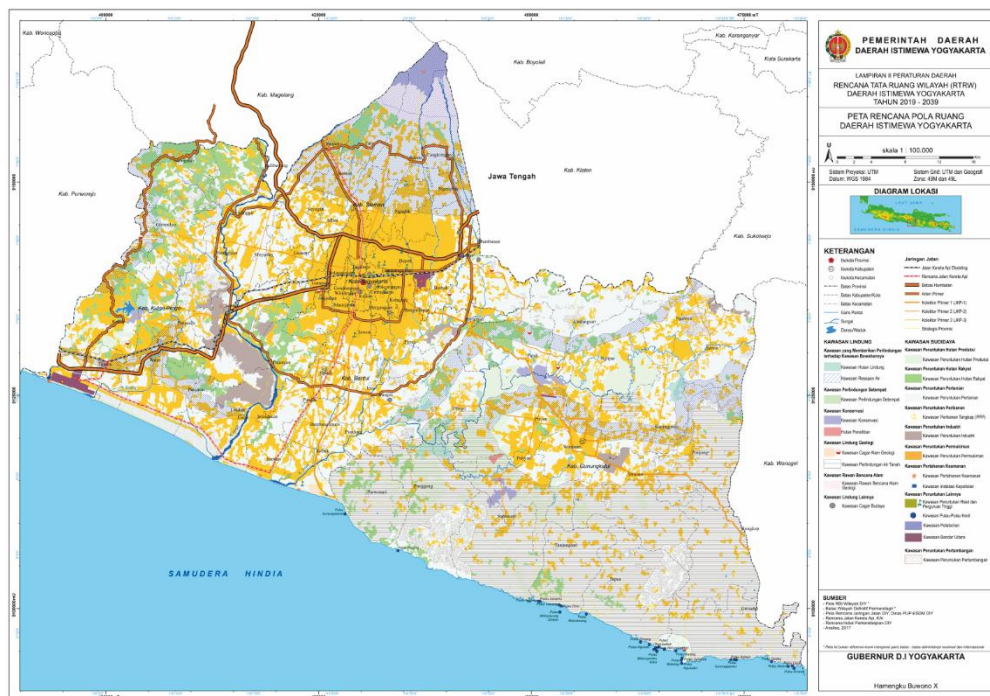
Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020



Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-8 Peta Penggunaan Lahan DIY

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, kesesuaian penggunaan lahan di DIY pada tahun 2017 terhadap pola ruang RTRW DIY Perda Nomor 2 tahun 2010 seluas 205.504,6 Ha, atau sebesar 64,79% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering. Kesesuaian pemanfaatan ruang secara detil ditunjukkan dalam tabel berikut:



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 - 2039

Gambar 2-9 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019-2039

Tabel 2-5 Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Lindung dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Grand Total
Cagar Alam	124,5	1163,8	1288,3
Cagar Alam Geologi	64432,9	20700,3	85133,2
Cagar Budaya	13,5	283,4	296,9
Hutan-Lindung	5020,0	39636,4	44656,4
Sekitar-danau/waduk	1001,2	111,4	1112,6
Sempadan Pantai	752,1	427,7	1179,8
Sempadan Sungai	6976,0	5791,3	12767,2
Sempadan Waduk	46,5	155,7	202,2
Taman Ht Ry & HL	1456,9	3,9	1460,9
Waduk Tinalah	162,0	109,6	271,7
Kawasan Resapan Air	36645,7	0,0	36645,7
Total	116631,3	68383,6	185014,9
Persentase	63,04%	36,96%	

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG			
		Luas			
		Sesuai (Ha)	Belum Terwujud (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	Total
1	Kawasan Taman Hutan Raya	612.684	0	2.502	615.186
2	Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	1865.285	0	0.160	1865.446
3	Kawasan Taman Wisata Alam	0.988	0	0.047	1.035
4	Kawasan Cagar Alam	11.822	0	0.055	11.877
5	Kawasan Suaka Margasatwa	608.009	0	11.577	619.587
6	Kawasan Hutan Penelitian	101.460	0	0.184	101.644
7	Kawasan Cagar Alam Geologi	144.316	0	0.863	145.179
8	Kawasan Sempadan Waduk	72.195	0	0.004	72.199
9	Kawasan Sempadan Pantai	1027.568	0	283.539	1311.106
10	Kawasan Sempadan Sungai	4041.735	0	1413.670	5455.405
11	Kawasan Rawan Bencana Geologi	2619.176	0	736.686	3355.862
12	Kawasan Hutan Lindung	2282.418	0	12.508	2294.926
13	Sungai	151.188	0	0.000	151.188
14	Danau/Waduk	2307.553	0	0.000	2307.553
Total		15846.39707	0	2461.795	18308.192

Sumber: Dinas Pertanahan dan tata Ruang DIY, 2020

Tabel 2-6 Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG			
		Luas			
		Sesuai (Ha)	Belum Terwujud (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	Total
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	11996.76899	1398.260	115.740	13510.770
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	14213.15548	2906.431	2021.200	19140.787
3	Kawasan peruntukan Industri	75.82246259	3556.931	1957.041	5589.795
4	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	56191.78604	9794.076	207.439	66193.302
5	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	15961.58127	5045.938	36.670	21044.189

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG			
		Luas			
		Sesuai (Ha)	Belum Terwujud (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	Total
6	Kawasan Peruntukan Perkebunan	14868.20275	3698.548	2900.348	21467.099
7	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	42854.65632	4201.351	3769.869	50825.876
8	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	77606.97687	17822.202	4985.965	100415.144
9	Kawasan Peruntukan Bandar Udara	639.7736	253.260	0.361	893.395
10	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	14.2551	8.818	0.000	23.073
11	Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi	22.1977262	0.000	3.757	25.954
Total		234445.1766	48685.816	15998.391	299129.383
Rekap Kesesuaian Keseluruhan		250291.574	48685.816	18460.186	317437.576

Sumber: Dinas Pertanahan dan tata Ruang DIY, 2020

Berdasarkan tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,55% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,45%. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 78,38%, belum terwujud sebesar 16,28% dan tidak sesuai sebesar 5,35%.

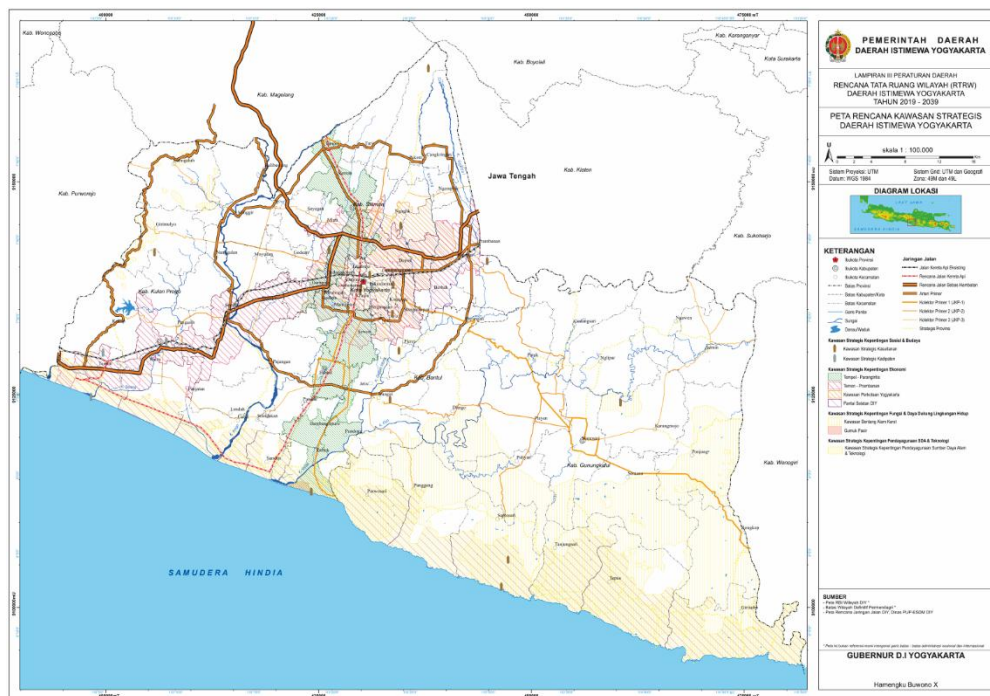
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta *Aerotropolis* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 - 2039

Gambar 2-10 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019-2039

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2018 – 2022 dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di wilayah DIY sebagai berikut:

Tabel 2-7 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

Sumber: Kajian Rencana Pengurangan Risiko Bencana DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas resiko bahaya di DIY berada pada rentang kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

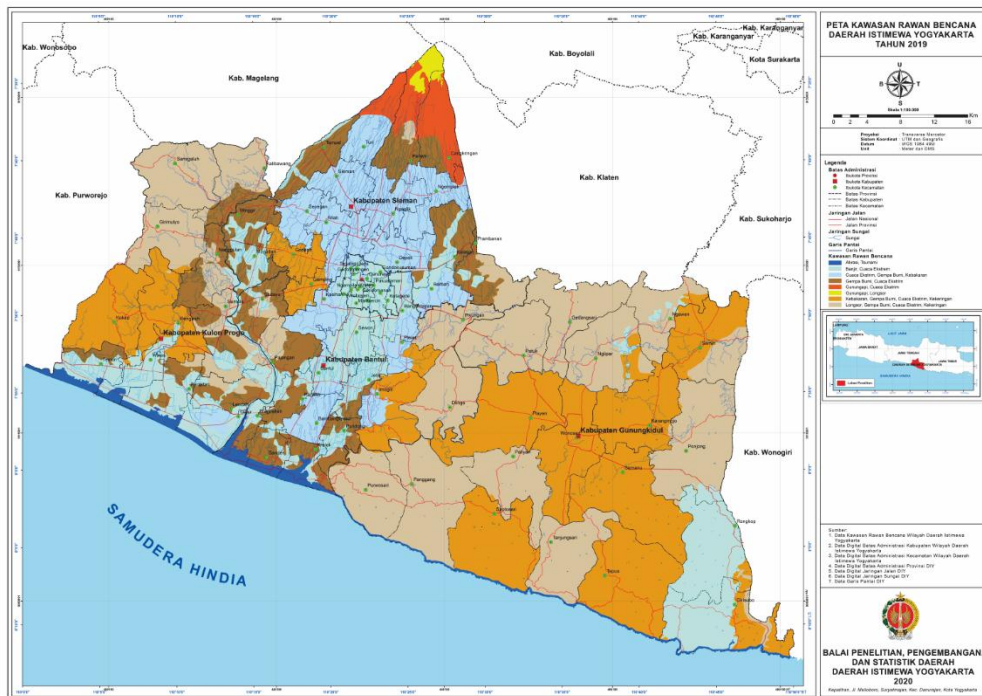
Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor *nonalam* antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan *nonalam*, selama ini masih relatif kecil.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada

wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar Samudera Hindia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-11 Peta Rawan Bencana DIY

Selama tahun 2015-2019, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah kebakaran hutan/lahan, tanah longsor dan banjir. Pada tahun 2017 sebanyak 897 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun

2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing anginribut 27 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada tahun 2019, korban meninggal bencana alam sebanyak 15 dan luka-luka 50 orang.

Tabel 2-8 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2014 – 2018

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Longsor	78,00	141,00	879,00	27,00	506,00	kali/tahun
2	Banjir	94,00	33,00	14,00	1,00	12,00	kali/tahun
3	Angin Ribut	80,00	99,00	89,00	31,00	168,00	kali/tahun
4	Kebakaran	34,00	150,00	343,00	8,00	343,00	kali/tahun
5	Gempa Bumi	3,00	n/a	7,00	0,00	15,00	kali/tahun
6	Gunung Meletus	n/a	n/a	n/a	12,00	4,00	kali/tahun
7	Tsunami	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00	kali/tahun
8	Badai	n/a	16,00	n/a	0,00	0,00	kali/tahun
9	Kebakaran Hutan	1,00	n/a	n/a	1,00	199,00	kali/tahun
10	Kekeringan	1,00	n/a	1,00	0,00	1,00	kali/tahun

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2020

Tabel 2-9 Korban Bencana DIY Tahun 2015 – 2019

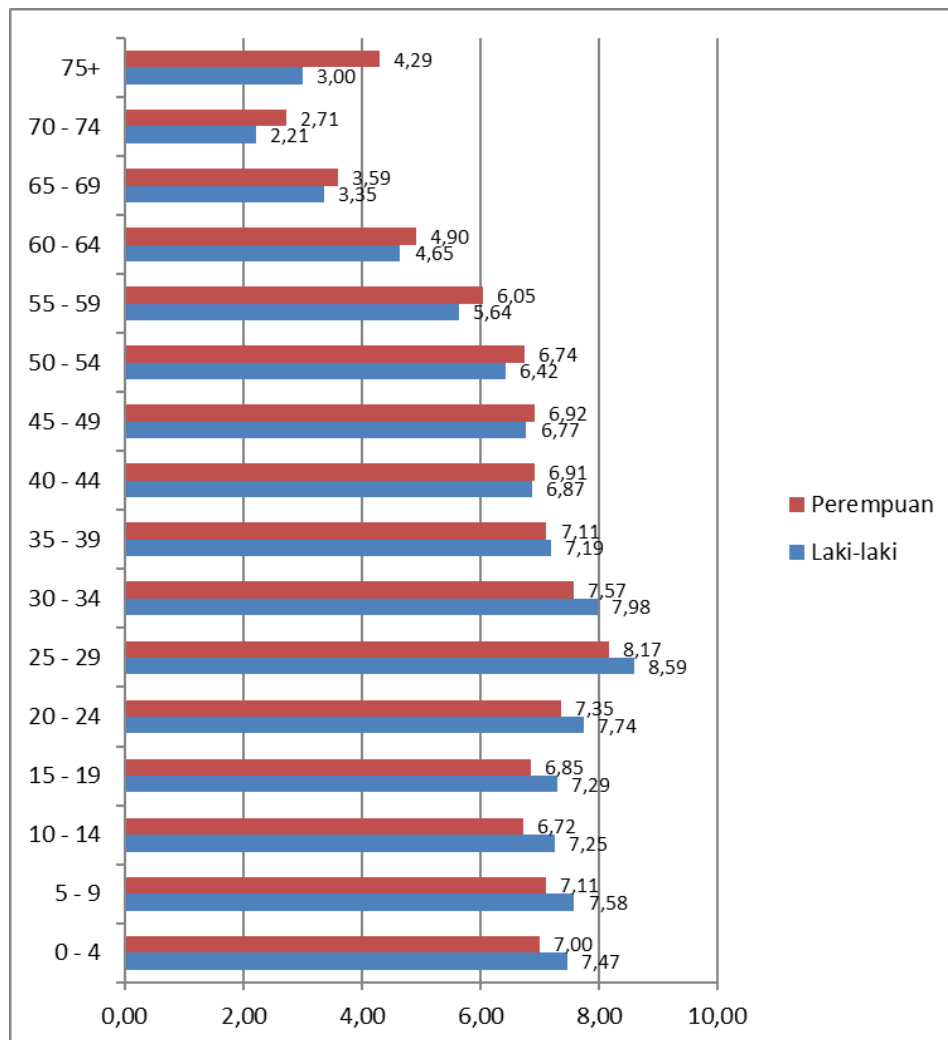
No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meninggal	4	6	10	4	13	Orang
2	Luka-Luka	21	5	11	23	50	Orang

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2020

2.1.1.4 Demografi

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2019 adalah 1.206 jiwa/km² yang meningkat dari 1.199 jiwa/km² di tahun 2018. Terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara wilayah di DIY. Wilayah terpadat adalah Kota Yogyakarta meskipun jumlah penduduknya tersedikit kedua selama dua tahun terakhir. Kepadatannya pun mengalami peningkatan dari 13.163 jiwa/km² menjadi 13.290 jiwa/km². Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan kepadatan dari sebanyak 498 jiwa/km² tahun 2018 yang naik menjadi 500 jiwa/km² di tahun 2019. Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY berusia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun sekitar 16,76% dari seluruh penduduk dan usia 20-34 tahun sekitar 15,55%.

Kondisi sumber daya manusia tersebut mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut:

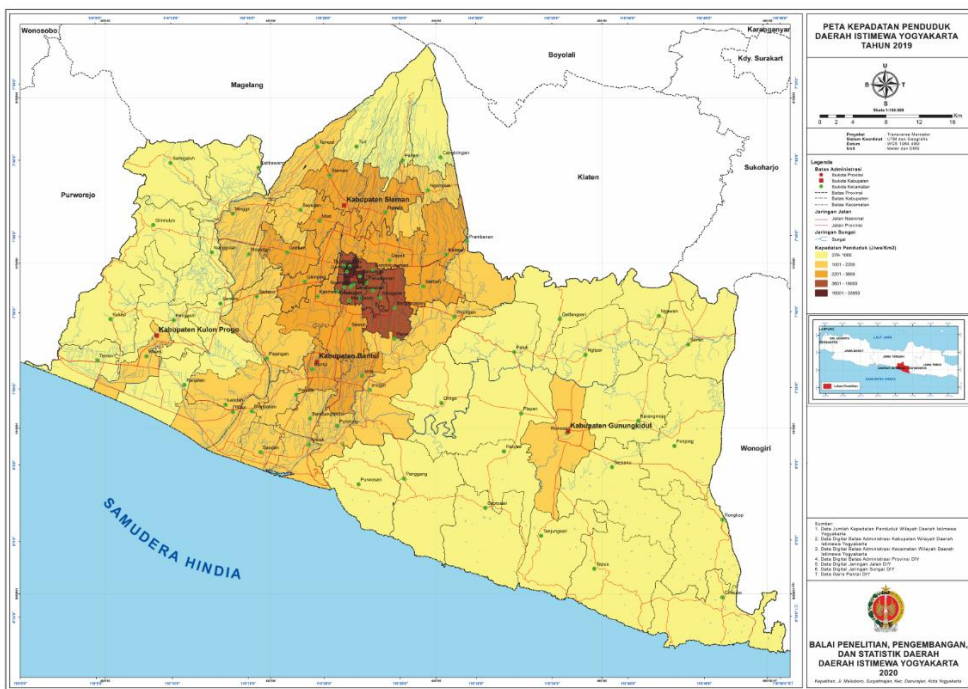


Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2-12 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2018), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2010 – 2017 sebesar 1,17, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,98 dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,22.

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2017 mencapai 1.181 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut: 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.007 jiwa per km², 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.076 jiwa per km², 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.964 jiwa per km², 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 719 jiwa per km², dan 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 491 jiwa per km².



Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

Gambar 2-13 Peta Kepadatan Penduduk DIY

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

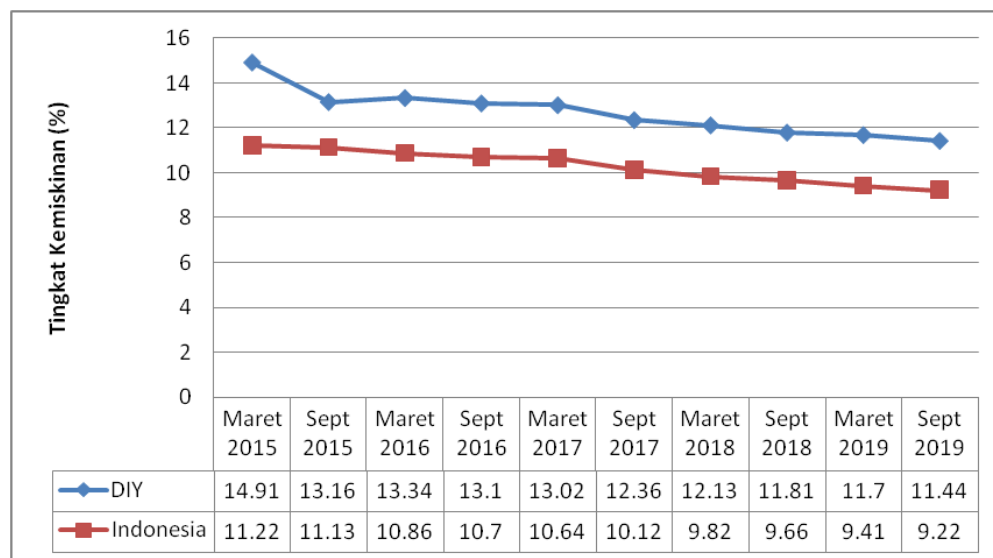
Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan

perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.1.1 Penduduk Miskin

Meskipun cenderung menurun dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di DIY yang mencapai 11,44% pada September tahun 2019 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,22%).

Penurunan kemiskinan DIY diduga mempunyai kaitan erat dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan lebih tinggi dibandingkan nasional. Selain itu, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Dengan terkendalinya harga maka diduga daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mereka mampu mengkonsumsi aneka barang dan jasa.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015-2020

Gambar 2-14 Tingkat Kemiskinan DIY dan Nasional tahun 2015-2019

Apabila dilihat antarkabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul berada di atas rata-rata

tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 2-10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015- 2019 dalam persen

Nama Wilayah	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)
DIY	14,91	13,34	13,02	12,13	11,7
Kulon Progo	21,40	20,30	20,03	18,30	17,39
Bantul	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92
Gunung Kidul	21,73	19,34	18,65	17,12	16,61
Sleman	9,46	8,21	8,13	7,65	7,41
Kota Yogyakarta	8,75	7,70	7,64	6,98	6,84

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2015 hingga 2019. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan. Tahun 2019 (September) terdapat sekitar 10,62% penduduk miskin di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 298,74 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 142,15 ribu jiwa (13,67%). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Tipe Daerah, 2015-2019

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2015	329,65	13,43	220,57	17,85
September 2015	292,64	11,93	192,91	15,62
Maret 2016	297,71	11,71	197,23	16,63
September 2016	301,25	11,68	187,58	16,27
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86
Maret 2018	305,24	11,03	154,86	15,12
September 2018	298,47	10,73	151,78	14,71
Maret 2019	304,66	10,89	143,81	13,89

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
September 2019	298,74	10,62	142,15	13,67

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015–2020

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan *non*Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan *non*Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2-12 Garis Kemiskinan DIY dan Indonesia Menurut Tipe Daerah Tahun 2015-2019

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
Maret 2015	347.787	312.249
September 2015	359.470	324.386
Maret 2016	364.786	331.308
September 2016	370.510	337.230
Maret 2017	385.308	348.061
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015 – 2019

Empat komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras walaupun dengan

komposisi yang berbeda-beda. Sementara itu, Beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2-13 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan *non*Makanan Menurut Tipe Daerah September 2019 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Garis Kemiskinan Makanan			
Beras	17,23	Beras	20,43
Rokok kretek filter	6,64	Rokok kretek filter	4,89
Telur ayam ras	5,47	Telur ayam ras	4,15
Susu bubuk	3,86	Daging ayam ras	3,22
Telur ayam ras	3,82	Tahu	3,01
Garis Kemiskinan <i>non</i> Makanan			
Perumahan	7,18	Perumahan	8,51
Bensin	7,12	Bensin	4,15
Listrik	2,82	Kayu Bakar	1,60
Pendidikan	2,11	Pendidikan	1,49
Kesehatan	1,03	Listrik	1,13

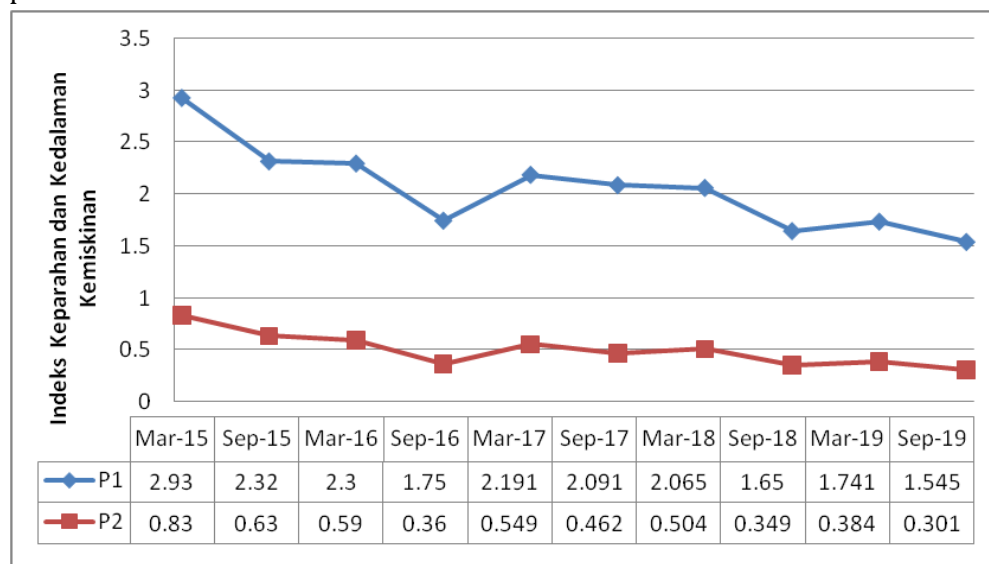
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan adanya penurunan. Pada September 2018, indeks P1 tercatat sebesar 1,65. Pada September 2019, nilai indeks P1 turun menjadi 1,545. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahan Kemiskinan juga cenderung menurun meskipun tidak secepat penurunan Indeks Kedalaman pada rentang waktu yang sama. Pada September 2019, Indeks P2 di DIY mengalami menurun menjadi 0,301 dari 0,349 dari September 2018. Penurunan tingkat Keparahan menunjukkan

bahwa tingkat kesenjangan di antara penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2-15 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY, Tahun 2015 - 2019

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB DIY selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101,440 triliun dan pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 141,400 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2-14 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.793.840	11.456.173	11.933.401	12.708.219	13.255.030
Pertambangan dan Penggalian	573.133	593.156	615.943	687.661	722.620
Industri Pengolahan	13.303.468	14.547.753	15.636.603	16.869.996	18.172.380
Pengadaan	118.012	141.794	173.689	186.513	202.280

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Listrik dan Gas					
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109.697	114.765	121.272	128.125	139.650
Konstruksi	9.499.917	10.286.734	11.303.630	13.354.792	15.715.5330
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.342.646	9.332.038	10.241.621	11.156.434	11.981.010
Transportasi dan Pergudangan	5.763.846	6.251.304	6.783.681	7.469.964	7.975.660
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.383.402	11.255.100	12.304.099	13.273.486	14.636.460
Informasi dan Komunikasi	8.244.242	8.957.494	9.789.586	10.523.890	11.283.230
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.022.438	4.334.288	4.640.944	5.106.466	5.649.250
Real Estate	7.116.820	7.808.289	8.382.668	9.022.612	9.895.070
Jasa Perusahaan	1.048.359	1.115.194	1.207.970	1.309.148	1.437.500
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.379.232	9.217.108	10.213.350	10.949.666	11.631.330
Jasa Pendidikan	8.598.744	9.013.442	9.711.308	10.533.809	11.508.230
Jasa Kesehatan & kegiatan Sosial	2.553.551	2.759.865	3.004.112	3.220.940	3.535.220
Jasa Lainnya	2.589.171	2.824.990	3.109.029	3.375.735	3.659.740
PDRB	101.440.518	109.962.487	119.128.906	129.874.458	141.400.180

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

* angka sementara

** angka sangat sementara

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, selain diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan *output*, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode tahun 2015-2019 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh rata-rata sebesar 7,59%. Nilai PDRB per kapita tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 25,572 juta, kemudian meningkat sebesar Rp. 9,22 juta (36,06%) hingga mencapai Rp. 36,795 juta di tahun 2019.

Tabel 2-15 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	101.440.518	110.009.487	119.172.906	129.877.458	141.400.180
Penduduk pertengahan tahun (orang) 1)	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872	3.842.198
PDRB per kapita ADH Berlaku: (juta rupiah)	27.572	29.553	31.666	34.152	36.795
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH berlaku (%)	8,01	7,18	7,15	7,85	7,74

Keterangan: 1) Hasil Backstacking dan Proyeksi SP 2010

*) Angka sementara

**)Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita dalam periode 2015 hingga 2019 tumbuh rata-rata sebesar 4,45%. PDRB per kapita tahun 2019 meningkat sebesar 19,8% dibandingkan tahun 2015. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2-16 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	83.474.452	87.688.200	92.302.022	98.026.564	104.469.363
Penduduk pertengahan tahun (orang) 1)	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872	3.842.198
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	22,688	23,566	24,534	25,777	27,190
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	3,75	3,87	4,11	5,07	5,48

Keterangan: 1) Hasil Backstacking dan Proyeksi SP 2010

*) Angka sementara

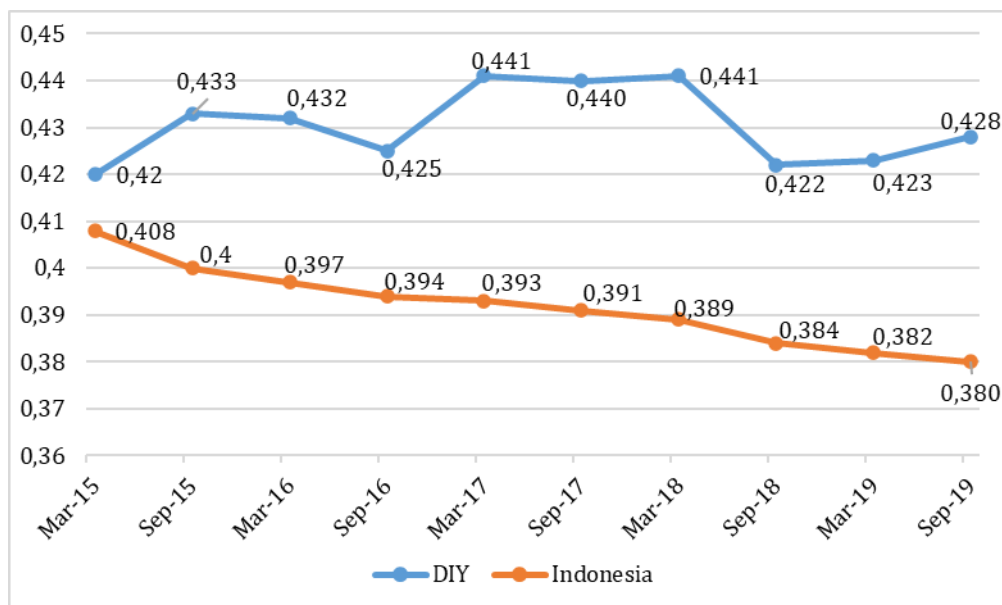
**)Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

2.1.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Dan Ketimpangan Regional

Angka Rasio *Gini* DIY menurut kriteria Bank Dunia masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pada bulan Maret 2019 ketimpangan

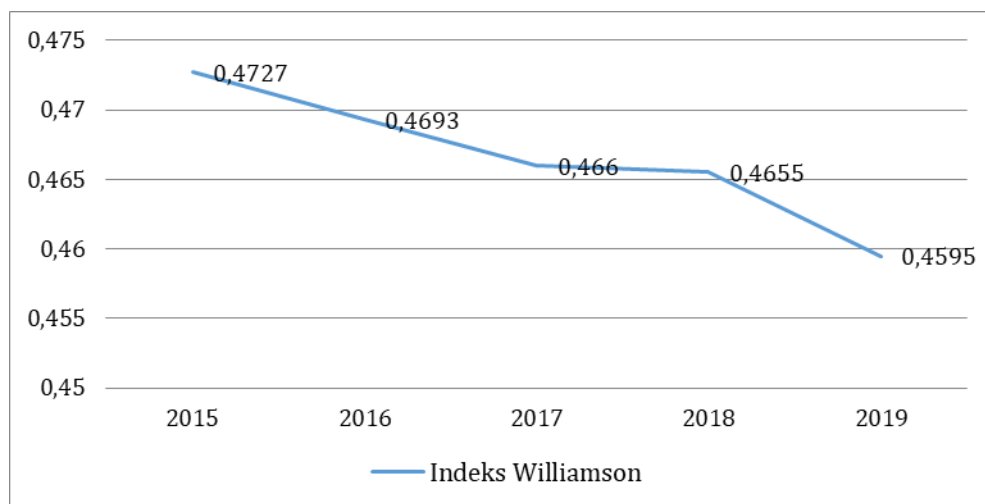
pendapatan DIY menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan menurunnya angka Rasio *Gini* sebesar 0,018 poin dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Sebelumnya perkembangan rasio gini DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cenderung meningkat dan secara umum namun masih di atas rata-rata nasional.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-16 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2015-2019

Indeks Williamson pada periode 2015-2019 menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan 0,0033 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.



Keterangan: *) Angka sementara
 Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2-17 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2019 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-17 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2015-2019

Kabupaten /Kota	2015	2016	2017	2018*)	2019***)
Kulonprogo	7.671.548	8.312.455	9.063.335	10.281.013	12.016.934
Bantul	19.325.203	20.919.336	22.633.737	24.480.270	26.345.477
Gunungkidul	13.798.657	14.980.281	16.199.842	17.538.629	18.889.873
Sleman	33.826.505	36.937.043	40.063.434	43.803.585	47.580.784
Kota Yogyakarta	26.791.936	28.895.413	31.309.045	33.818.853	36.559.057
D I Y	101.440.518	110.009.486	119.172.905	129.877.458	141.400.183

Keterangan: *) Angka sementara ***)Angka sangat sementara
 sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

2.1.2.1.4 Laju Inflasi

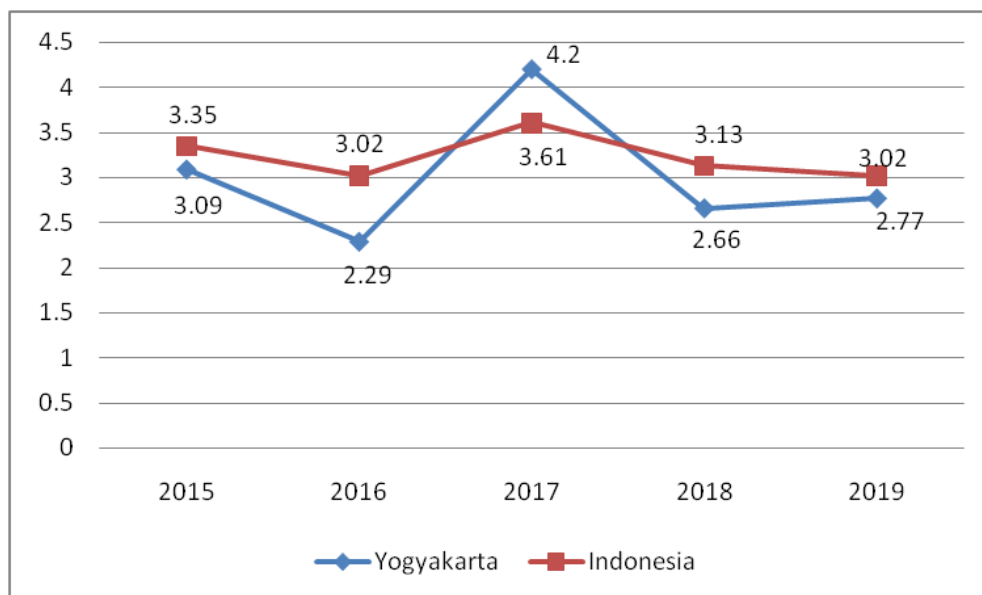
Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2-18 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jan	0,13	0,53	1,24	0,55	0,42
Feb	-0,40	-0,09	0,36	-0,05	-0,08
Mar	0,15	0,02	-0,06	0,15	0,26
Apr	0,38	-0,16	0,28	0,10	0,46
Mei	0,36	0,08	0,33	0,08	0,42
Jun	0,35	0,43	0,69	0,46	0,25
Jul	0,63	0,94	0,43	0,56	0,05
Agt	0,33	-0,04	-0,45	-0,26	0,07
Sep	0,04	-0,16	0,13	-0,11	-0,07
Okt	0,01	0,05	0,16	0,13	0,18
Nov	0,13	0,32	0,2	0,46	0,31
Des	0,96	0,35	0,9	0,57	0,46
Inflasi Tahunan	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-18 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2015-2019

Pola inflasi tahunan Yogyakarta selama tahun 2015-2019 selalu dapat dikendalikan lebih rendah daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan -8,07% selama lima tahun terakhir.

Kelompok bahan makanan masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2019. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2019 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel 2-19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	4,64	4,77	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,04	3,84	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	4,41	1,64	5,63	2,43	2,08
4	Sandang	5,87	3,04	3,84	3,61	5,51
5	Kesehatan	4,21	4,17	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	1,36	2,40	2,81	3,34	3,92

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
7	Transportasi & komunikasi	-2,51	-2,06	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Sementara itu, terdapat kelompok pengeluaran yang inflasinya mengalami titik tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, yaitu kelompok Kesehatan. Bila melihat rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa kelompok transportasi dan komunikasi mengalami kecenderungan penurunan terbesar, yaitu -158,59%. Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar yang sebagian besar merupakan komponen yang harganya diatur oleh pemerintah mempunyai kecenderungan meningkat inflasinya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,27%.

Di sisi lain, bila melihat inflasi menurut komponen, dapat diketahui bahwa Inflasi komponen inti dan komponen yang harganya diatur pemerintah dari tahun ke tahun (Desember 2018 – Desember 2019) masing-masing mengalami inflasi sebesar 3,13% dan 0,66%, sementara komponen yang bergejolak mengalami inflasi sebesar 3,86%.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja.

Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota.

Dilihat dari capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, Pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu

Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antarkabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan pemeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY.

Berdasarkan perkembangan data Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Lebih lanjut, hasil identifikasi terhadap penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA diantaranya menunjukkan bahwa 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP dan 7% berstatus putus sekolah. Hal ini berarti masih diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas.

Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari dua (2) indikator, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Perkembangan angka kematian bayi berfluktuatif selama periode 2000-2017 sehingga perlu perhatian lebih mendalam tentang penyebab kenaikan dan penurunannya sebagai bahan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang. Sementara itu, capaian angka harapan hidup DIY pada tahun 2019 tercatat paling tinggi. Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian angka harapan hidup harus diiringi dengan upaya untuk menyediakan fasilitas dan menetapkan peraturan terkait kesejahteraan penduduk lanjut usia.

Rasio penduduk bekerja terhadap angkatan kerja selama 2015-2019 relatif tidak berubah secara signifikan tetapi terdapat penurunan capaian pada tahun 2018 kemudian hanya sedikit meningkat di tahun 2019. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan penambahan angkatan kerja tidak diikuti penambahan lapangan pekerjaan sehingga terdapat peningkatan jumlah pengangguran.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dari sisi pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Secara umum, angka IPM DIY mengalami kenaikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015 IPM DIY mencapai 77,59 naik menjadi 79,99 tahun 2019. Capaian IPM tahun 2019 merupakan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta (80,76).

Capaian nilai IPM menurut kabupaten/kota di DIY bervariasi. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki nilai IPM tertinggi diikuti oleh

Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019, IPM Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul berstatus sangat tinggi sedangkan Kulon Progo masuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, Gunungkidul dengan nilai IPM 69,96 berada pada kategori sedang.

Berdasarkan perkembangan nilai IPM tersebut dapat diketahui juga bahwa dari tahun 2018 ke 2019 nilai IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat mengalami pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat masing-masing sebesar 0,72 poin dan 0,68 poin.

Tabel 2-20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65
Kabupaten Bantul	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01
Kabupaten Kulon Progo	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44
Kabupaten Gunungkidul	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96
Kabupaten Sleman	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85
DIY	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99

Sumber : BPS Provinsi DIY 2020

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 AMH tercatat sebesar 94,44% naik menjadi 94,83% tahun 2018. Menurut kelompok jenis kelamin, AMH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2018 AMH laki-laki tercatat sebesar 97,09% sedangkan AMH perempuan sebesar 92,66%.

Tabel 2-21 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di DIY (%), 2014-2018

Angka Melek Huruf	2014	2015	2016	2017	2018
Laki-Laki	96,99	97,35	97,21	97,34	97,09
Perempuan	91,98	91,78	92,07	92,05	92,66
Total	94,44	94,50	94,59	94,64	94,83

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2018

Menurut kelompok usia, AMH tertinggi berada pada kelompok usia 15-44 tahun. Sementara itu, kelompok usia 45 tahun keatas cenderung memiliki AMH paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk yang tidak melek huruf banyak dialami oleh penduduk usia lanjut, fenomena ini dipengaruhi oleh

besarnya komposisi penduduk usia tua. Namun demikian, AMH penduduk berusia tua akan cenderung meningkat secara alami.

Tabel 2-22 Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Usia di DIY (%), 2014-2018

Angka Melek Huruf	2014	2015	2016	2017	2018
15+ Tahun	94,44	94,5	94,59	94,64	94,83
15-44 Tahun	99,91	99,81	99,87	99,8	99,91
45+ Tahun	86,29	87,2	87,37	87,62	87,94

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2018

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Selama 2015-2019 perkembangan capaian angka HLS DIY cenderung memiliki tren yang meningkat meskipun relatif kecil. Kenaikan angka HLS tersebut berarti bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2015 angka HLS DIY mencapai 15,03 tahun meningkat sebesar 0,55 poin menjadi 15,58 tahun tahun 2019. Capaian 2019 tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D3 atau D4.

Menurut kabupaten/kota, angka HLS tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Capaian angka HLS Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman relatif tinggi dan berada di atas capaian provinsi sedangkan capaian tiga kabupaten lainnya masih di bawah capaian provinsi. Tahun 2019, angka HLS Kota Yogyakarta mencapai 17,28 tahun, Kabupaten Sleman 16,72 tahun, Kabupaten Bantul 15,15 tahun, Kabupaten Kulon Progo 14,25 tahun dan Kabupaten Gunungkidul 12,96 tahun.

Tabel 2-23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2015-2019

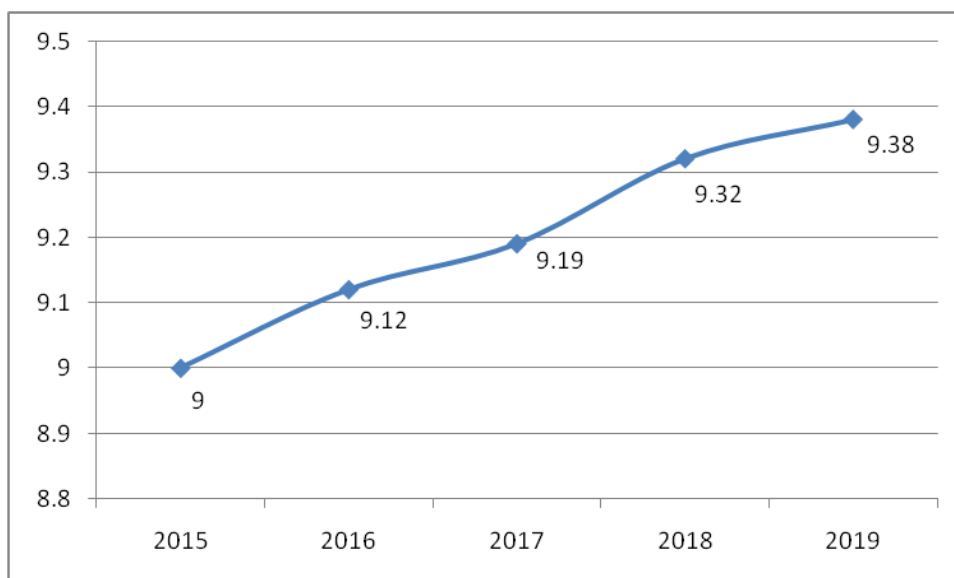
Kabupaten/kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	13.55	13.97	14.23	14.24	14.25
Bantul	14.72	14.73	14.74	15.03	15.15
Gunungkidul	12.92	12.93	12.94	12.95	12.96
Sleman	15.77	16.08	16.48	16.71	16.72
Kota Yogyakarta	16.32	16.81	16.82	17.05	17.28
DIY	15.03	15.23	15.42	15.56	15.58

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan perkembangan capaian angka HLS tersebut diketahui bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan pendidikan. Capaian angka HLS DIY dapat ditingkatkan dengan mendukung Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman untuk mempertahankan dan meningkatkan capaiannya serta fokus mendorong pembangunan pendidikan pada tiga kabupaten lainnya terutama Kabupaten Gunungkidul.

2.1.2.2.4 Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian angka RLS tahun 2015 yaitu 9 tahun naik mencapai 9,38 tahun pada tahun 2019. Capaian tahun 2019 tersebut berarti bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk DIY usia 25 tahun ke atas mencapai 9,38 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP.

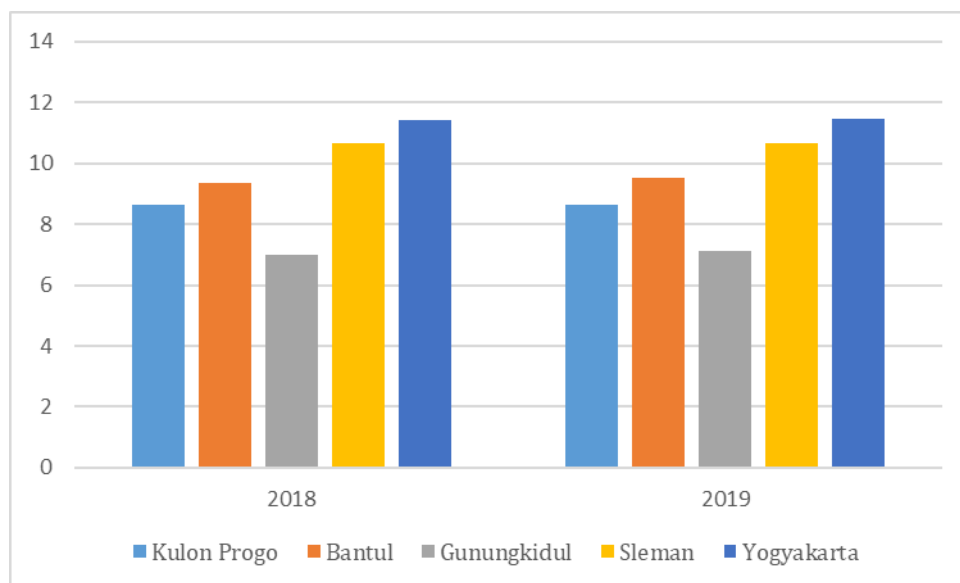


Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY (Tahun), 2015-2019

Angka RLS kabupaten/kota menunjukkan capaian yang bervariasi. Namun secara umum, capaian RLS seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian angka RLS tertinggi tahun 2019 terdapat pada Kota Yogyakarta (11,45 tahun) diikuti

capaian Kabupaten Sleman (10,67 tahun), Kabupaten Bantul (9,54 tahun), Kabupaten Kulon Progo (8,66 tahun) dan terendah capaian Kabupaten Gunungkidul (7,13 tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Yogyakarta menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang menengah, sedangkan rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Perkembangan capaian RLS tersebut menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

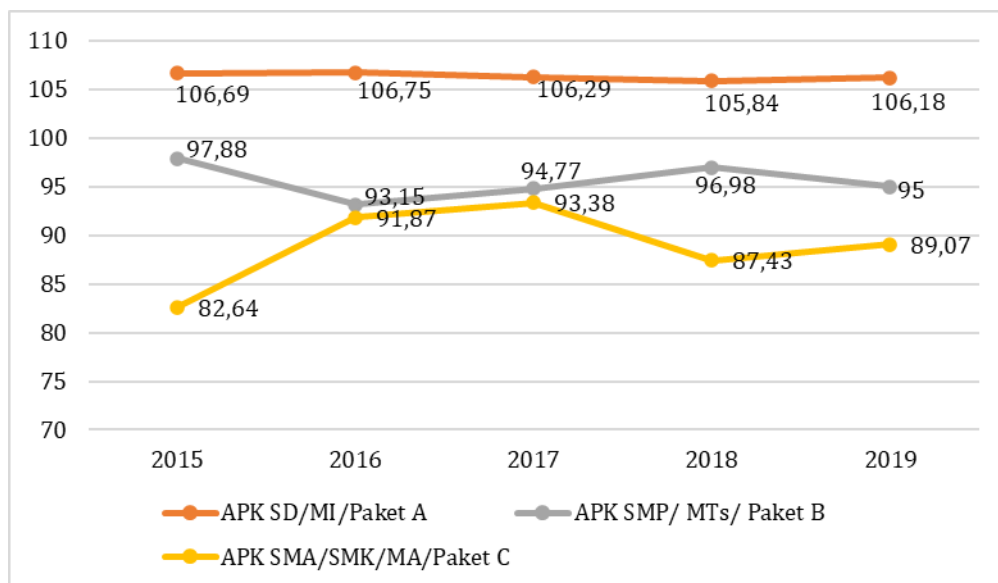
Gambar 2-20 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2018-2019

2.1.2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator pembangunan pendidikan yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi capaian APK semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Perkembangan APK DIY menurut jenjang pendidikan bervariasi. Capaian APK jenjang SD/MI/ sederajat lebih tinggi dibandingkan capaian pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dan SMA/SMK/MA/ Paket C. Selama kurun 2015-2019 APK jenjang SD/MI/ sederajat memiliki tren menurun. Pada tahun 2015 APK SD sederajat mencapai 106,69% turun menjadi 106,28% pada tahun 2019. Sementara itu, APK SMP sederajat dan SMA sederajat cenderung berfluktuasi.

Namun pada tahun 2019, capaian APK SMP sederajat mengalami kenaikan penurunan dari 96,98% menjadi 95% sedangkan APK SMA sederajat mengalami kenaikan dari 87,43% menjadi 89,07%.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

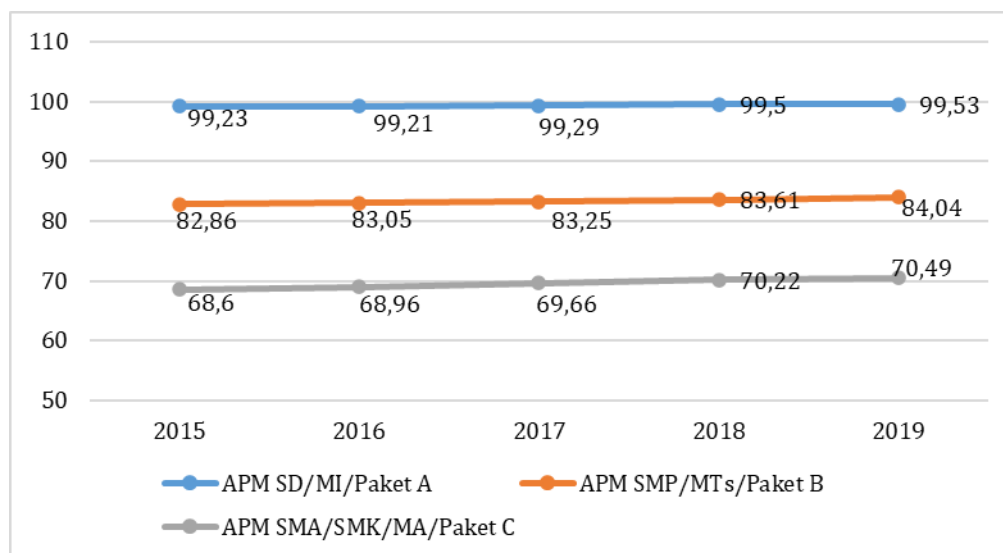
Gambar 2-21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2015 - 2019

Capaian APK SD sederajat berada di atas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang bersekolah pendidikan SD (7-12 tahun) tetapi mencakup penduduk berusia di atas 12 tahun dan di bawah 7 tahun. Capaian APK tidak mencerminkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua. Sementara itu, APK jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat berada di bawah 100% berarti bahwa jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tersebut proporsinya kurang dari jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut.

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.

Perkembangan APM semua jenjang pendidikan di DIY selama 2015-2019 memiliki pola yang sama dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, APM SD sederajat mencapai 99,53%, APM SMP sederajat mencapai 84,04% dan APM SMA sederajat sebesar 70,49%. Capaian APM SD sederajat 99,53% menunjukkan bahwa masih ada 0,047% penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah di jenjang SLTP. Sementara itu, capaian APM SMP sederajat dan SMA sederajat berarti bahwa masih ada 15,96% penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SMP dan terdapat 29,51% penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA sederajat teridentifikasi bahwa sebesar 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP, 7,4% bersekolah pada jenjang perguruan tinggi dan 7% berstatus putus sekolah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

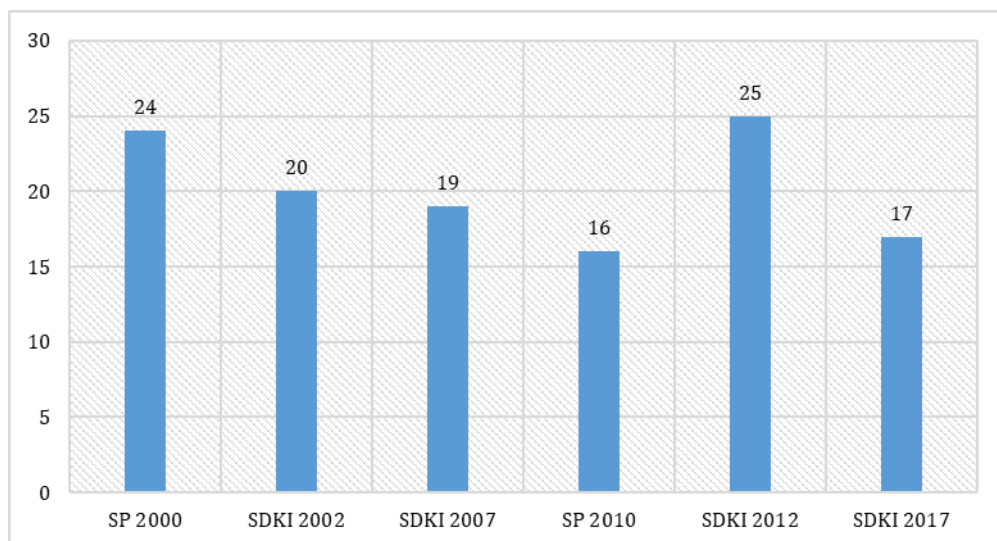
Gambar 2-22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2015-2019

Berdasarkan perkembangan data APM menurut jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian APM pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berkemauan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi serta upaya-upaya untuk menambah fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang

mampu agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi perlu ditingkatkan.

2.1.2.2.7 Jumlah Kematian Bayi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum adalah angka kematian bayi. Perkembangan angka kematian bayi di DIY dari tahun 2000 hingga 2017 berfluktuasi. Data dari Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 menunjukkan bahwa angka kematian bayi sebesar 24 kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 mencapai 16. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 terjadi kenaikan angka kematian bayi yang mencapai 25 tetapi kemudian pada tahun 2017 tercatat turun menjadi 17. Angka kematian bayi sebesar 17 berarti bahwa terdapat 17 kasus kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Gambar 2-23 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017

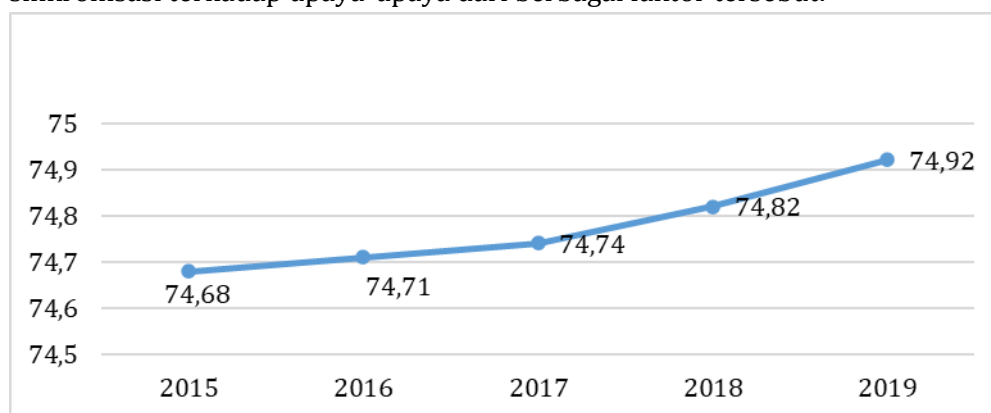
Perkembangan angka kematian bayi yang fluktuatif tersebut perlu diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut apa penyebab kenaikan dan penurunannya sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang.

2.1.2.2.8 Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (life

expectancy at birth) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Dari 74,68 tahun di tahun 2015 meningkat menjadi 74,92 tahun di tahun 2019. Angka 74,92 tahun tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2019 hingga akhir hayatnya. Capaian AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-24 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY (Tahun), 2015-2019

2.1.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

Tabel 2-24 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2015 - 2019

Ketenagakerjaan	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	1.971,46	2.099,44	2.117,19	2.191,74	2.203,92
Bekerja (Ribuan Orang)	1.891,22	2.042,40	2.053,17	2.118,39	2.134,75
Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	95,93	97,28	96,98	96,65	96,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019 diolah.

Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dari 96,65% tahun 2018 menjadi

96,69% namun masih tetap dibawah capain pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 97,28% da 96,98%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa penambahan angkatan kerja tidak diikuti penambahan lapangan pekerjaan sehingga meskipun jumlah orang bekerja mengalami peningkatan, jumlah pengangguran juga meningkat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

2.1.2.3.1 Budaya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggariskan bahwa Kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Hal ini ditegaskan dalam Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, bahwa kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip : keterbukaan terhadap budaya lain; kemampuan mengolah budaya; kesadaran dialogis; kepribadian kuat; kesinambungan; dan kesatuan budaya mandiri.

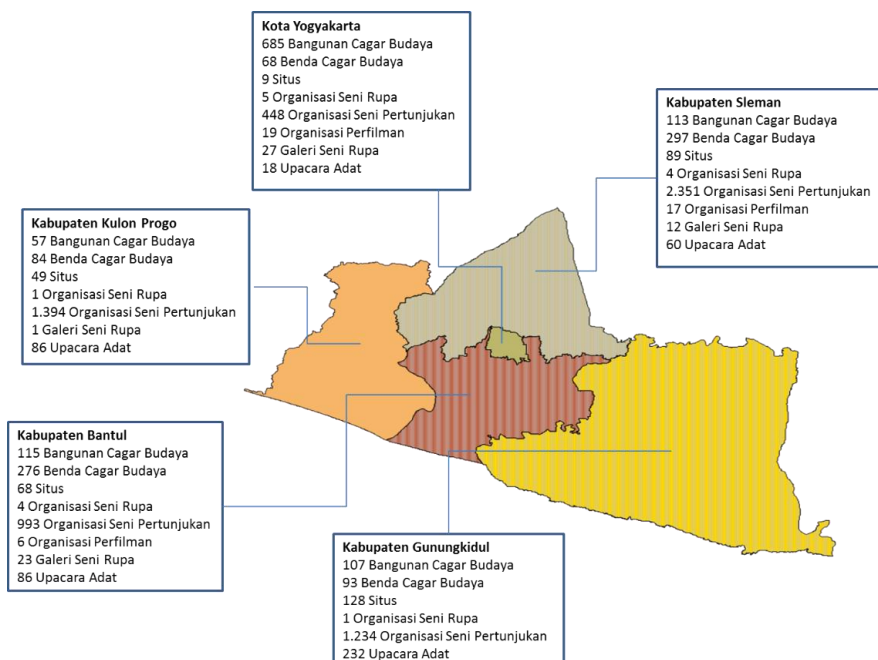
Tujuan dari pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemeliharaan Kebudayaan dilakukan sebagai upaya mempertahankan Objek Kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara : penyebarluasan; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi

kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata.

Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai *adiluhung* seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh*, *Ora Mingkuh* telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa.

Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya di DIY nampak pada jumlah dan keragaman potensi budaya yang ada baik budaya benda maupun budaya tak benda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan peran serta semua pihak terutama masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya di DIY. Dinas Kebudayaan DIY mencatat terdapat ribuan potensi budaya di DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Sumber: Statistik Budaya, Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Gambar 2-25 Potensi Budaya DIY Tahun 2018

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperanaktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti : Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinarga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival *Godong Opo-Opo* di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jatidiri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.1.2.3.2 Olah Raga

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan,

kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain.

Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Majunya perkembangan daerah dapat dilihat dari majunya perkembangan olah raga di daerah. Kalau olah raga maju, tentunya daerah tersebut pasti maju dengan baik.

2.1.2.3.2.1 Sumber Daya Manusia Dan Olah Raga

Tabel 2-25 SDM Olahraga DIY Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Pelatih	Wasit	Pembina	Klub Olahraga	Atlet
1	Kota Yogyakarta	109	56	80	120	621
2	Kab Bantul	150	100	1	45	805
3	Kabupaten Gunungkidul	106	95	76	78	589
4	Kab Kulon Progo	218	136	42	134	515
5	Kab Sleman	210	141	120	130	765
	DIY	793	528	319	507	3295

Sumber : <https://www.bpo-diy.or.id/sport/crclub.php>

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu menembus posisi 10 besar PON ke XIX di Jabar dengan perolehan total medali sebanyak 56 medali. Rinciannya yakni 16 medali emas, 15 medali perak dan 25 medali perunggu. Prestasi atlet DIY diajang PON ke XIX memang dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah medali emas yang diperoleh pada PON ke XIX mampu melampaui jumlah medali emas yang ditargetkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY sebanyak 15 medali emas. DIY mendapat rangking 9, dengan prestasi 7 emas, 6 perak, 18 perunggu.

2.1.2.3.2.2 Sarana Dan Prasarana Olahraga

Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua desa memiliki prasarana dan sarana olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-

masing tingkat pemerintahan. Prasarana dan sarana keolahragaan belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi.

Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang.

Tabel 2-26 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di DIY, Tahun 2015-2019

Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah klub olahraga	1.197	1.205	1.207	1.207	1.207
Jumlah gedung olahraga	1.267	1.275	1.280	1.280	1.280

Sumber: Jogja Dataku, 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

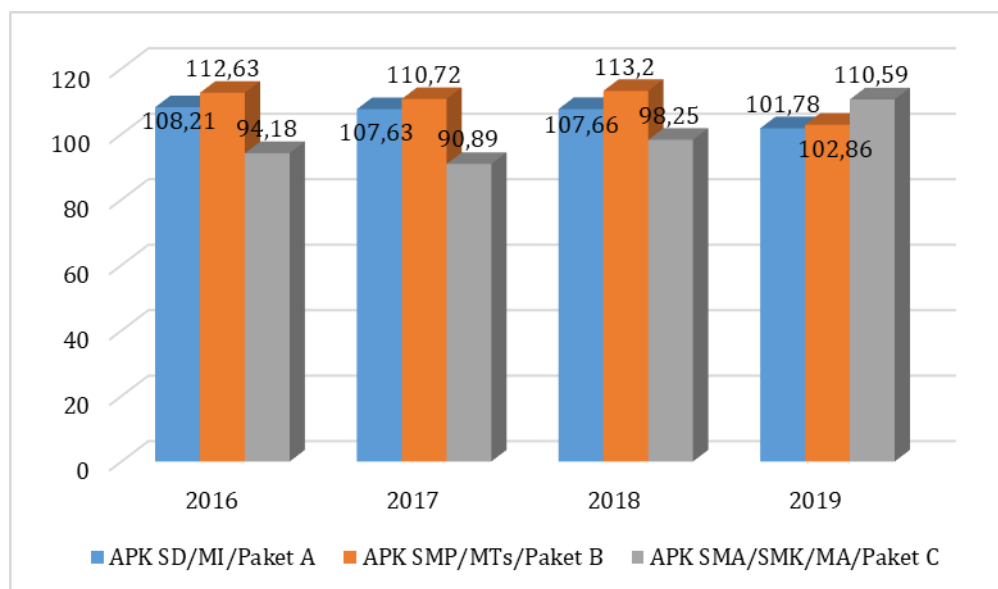
2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Peran pendidikan sangat strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan sebagai sebuah investasi SDM memberikan berbagai manfaat bagi individu maupun pembangunan sebuah bangsa secara keseluruhan. Melalui pendidikan, seseorang mendapatkan bekal kemampuan intelektual baik psikomotorik, kognitif, maupun afektif yang bermanfaat dalam menjawab beragam tantangan kehidupan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan.

Dalam konteks DIY, pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan SDM diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (*jalmâ kang utâmâ*), berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di DIY.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan *non*Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: BPPSD DIY, 2020

Gambar 2-26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2019

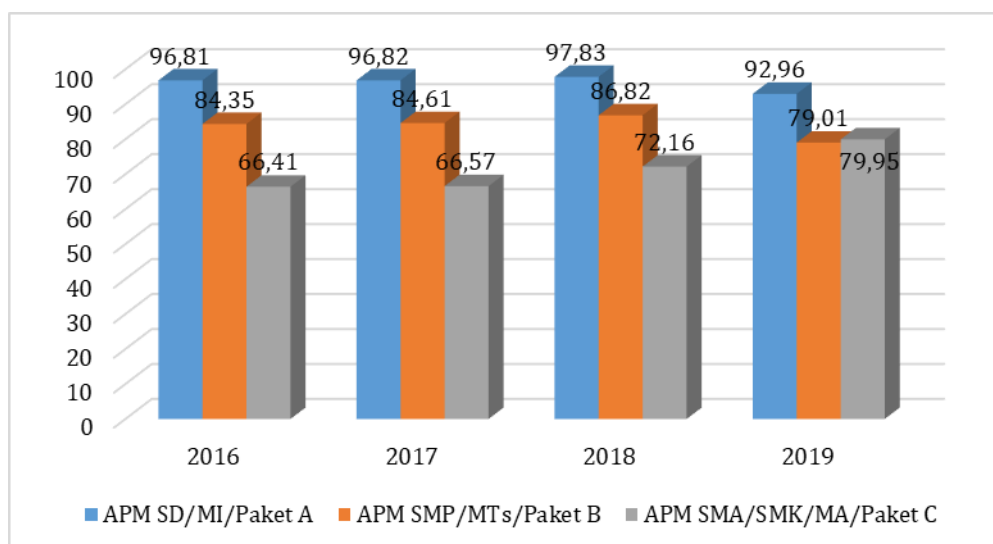
Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2019 capaian APK SD/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di DIY lebih dari 100%, sedangkan APK SMA/SMK/MA/Paket C mencapai angka 100% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda DIY mampu menampung

penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Peran Pemda DIY berhasil dalam memberikan akses bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

2.1.3.1.1.2 Angka Partispasi Murni

Partispasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partispasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partispasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian APM DIY tingkat SD, SMP dan SMA periode 2016 sampai dengan periode 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPPSD DIY, 2020

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Partispasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2019

Capaian APM DIY Tahun 2019 mengalami peningkatan 7,79 poin pada jenjang pendidikan SLTA dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada jenjang SD dan SLTP mengalami penurunan dengan poin yang cukup signifikan.

Data capaian APM menunjukkan bahwa selisih capaian APM dengan angka ideal akan semakin besar pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Ini berarti, semakin tinggi jenjang pendidikan maka proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah semakin besar. Penyelenggaraan program akselerasi pada beberapa sekolah menjadi salah satu penyebab dari selisih ini. Program ini memungkinkan siswa berprestasi untuk mempercepat proses pendidikannya sehingga dapat lulus pada masing-masing jenjang tersebut satu tahun lebih awal. Akibatnya, jumlah siswa yang terlalu cepat bersekolah pada jenjang pendidikan selanjutnya semakin tinggi.

Perkembangan pembangunan pendidikan saat ini seperti penerapan sistem zonasi, perkembangan IT dalam proses pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Dalam menjawab tantangan tersebut kebutuhan akan penyediaan infrastruktur pendidikan yang aksesibel dan memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, serta penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada budaya lokal merupakan hal yang membutuhkan intervensi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menjawab tantangan tersebut antara lain:

- a) Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem zonasi sekolah dibutuhkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di DIY. Kualitas layanan pendidikan diukur dengan akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis akreditasi sekolah DIY ditemukan bahwa standar pembiayaan adalah komponen yang memiliki nilai rata-rata tertinggi pada semua satuan pendidikan di tiap kabupaten/kota. Pada jenjang SD capaian akreditasi tertinggi di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Pada Jenjang SMP capaian akreditasi tertinggi di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Capaian akreditasi tertinggi pada jenjang SMA/SMK di Kabupaten Bantul, sedangkan yang terendah di Kabupaten Sleman.

Tabel 2-27 Persentase Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA Berakreditasi A di DIY Tahun 2014-2018

Kab/Kota	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
SD						
Kota Yogyakarta	%	79,17	87,50	89,29	89,29	89,29
Kab. Bantul	%	48,72	59,95	69,13	78,32	80,36
Kab. Kulon Progo	%	13,70	23,84	43,29	53,70	57,53
Kab. Gunungkidul	%	26,76	34,72	53,71	56,06	56,24
Kab. Sleman	%	36,13	43,39	58,85	63,50	66,67
SMP						
Kota Yogyakarta	%	74,24	75,76	75,76	75,76	77,27
Kab. Bantul	%	66,37	67,26	70,80	71,68	71,68
Kab. Kulon Progo	%	62,03	64,56	65,82	64,56	64,56
Kab. Gunungkidul	%	51,77	53,19	59,57	60,28	60,28
Kab. Sleman	%	68,57	71,43	73,57	72,86	73,57
SMA						
Kota Yogyakarta	%	71,88	75,00	75,00	75,00	75,00
Kab. Bantul	%	74,47	80,85	80,85	76,60	76,60
Kab. Kulon Progo	%	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Kab. Gunungkidul	%	48,39	51,61	64,52	67,74	67,74
Kab. Sleman	%	52,31	52,31	53,85	56,92	55,38

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu segera memperbaiki standar nasional pendidikan yang masih rendah nilainya. Untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan perlu dilakukan perbaikan metode mengajar guru agar siswa mampu menyerap dengan baik materi maupun keterampilan yang diajarkan. Standar proses dapat ditingkatkan melalui perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan penguasaan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Peningkatan standar sarana dan prasarana dilakukan dengan meratakan alat bantu media pembelajaran pada tiap sekolah dan terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan media dan alat bantu belajar.

- b) Salah satu faktor pendukung proses pembelajaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu input yang menunjang dalam pengembangan pengetahuan dan ketrampilan siswa didik, sarana dan prasarana pendidikan harus disiapkan dengan cermat dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa Standar Sarana dan

Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan meliputi peralatan pendidikan, perabotan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta peralatan penunjang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Dalam konteks DIY, ketersediaan ruang kelas pada jenjang SD sampai dengan SMA/SMK telah memenuhi standar (maksimum 32 peserta didik per kelas), namun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan maupun berat. Dalam konteks DIY, ketersediaan ruang kelas pada jenjang SD sampai dengan SMA/SMK telah memenuhi standar (maksimum ruang kelas sebesar 32 peserta didik per kelas), namun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.

Tabel 2-28 Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, SMP, SMA, SMK DIY Tahun 2014 – 2018

Rasio Siswa per Ruang Kelas	2014	2015	2016	2017	2018*
SD	22	22	22	22	21
SMP	29	28	27	27	27
SMA	25	25	26	26	26
SMK	31	30	31	31	29

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2018 * Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018

Tabel 2-29 Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD – SMA Sederajat di DIY Tahun 2015-2018

Jenjang Sekolah	2015			2016			2017			2018		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
MI	683	265	75	763	263	70	833	252	64	842	221	69
SD	11.274	2.586	620	11.037	1.949	386	11.404	1.732	353	11.358	1.795	346
MTs	10.591	2.321	545	850	93	26	899	77	14	871	69	24
SMP	4.239	276	77	4.242	388	62	3.894	759	73	3.891	801	121
SMA	1.937	124	16	1.946	124	4	1.977	149	35	1.973	132	13
SMK	2.482	99	32	2.606	115	22	2.672	136	20	2.644	202	28
MA	502	15	-	538	11	4	2.672	136	20	585	19	2

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

Dari data yang ada sebagian besar sudah memenuhi standar nasional tetapi masih terdapat permasalahan terkait adanya ruang sekolah yang rusak

berat karena faktor bencana/letak geografis. Hal ini harus menjadi prioritas dalam penanganan pembangunan pendidikan terutama fokus pada ruang kelas yang kondisinya rusak berat karena selain kenyamanan dalam belajar, juga terkait dengan aspek keselamatan insan pembelajar.

Selain penyediaan ruang kelas yang representatif, penyediaan sarana komputer yang memadai dan bermutu juga merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan sarana pendidikan yang lengkap dan bermutu, kualitas pembelajaran akan semakin baik dan motivasi belajar siswa akan meningkat. Hal itu akan meningkatkan daya serap yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk jenjang SD lebih dari 55% memiliki laboratorium komputer, sedangkan untuk jenjang SMP sudah mencapai 91% lebih yang memiliki laboratorium komputer meskipun masih terdapat komputer yang sudah tidak memenuhi standar pembelajaran.

Tabel 2-30 Jumlah Sekolah di DIY yang Memiliki Laboratorium Komputer Tahun 2014 - 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet	1.960	1.704	1.845	1.902	2.166

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

- c) Keberhasilan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Untuk itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya dalam pengajaran. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dipenuhi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Pengakuan formal terhadap profesionalitas guru diberikan dalam bentuk sertifikasi.

Persentase guru yang bersertifikasi di DIY rata-rata sudah lebih dari 50% guru dan mengalami kenaikan tiap tahun. Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase guru yang tersertifikasi, Pemerintah Daerah DIY mendorong dengan:

- 1) Pendataan sertifikasi guru;
- 2) Pendidikan guru dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Pendidikan guru dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar.

Tabel 2-31 Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2014-2018

Jenjang Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018*
SD	46,09	44,12	43,46	51,28	51,90
SMP	58,52	59,98	59,35	65,92	69
SMA	65,53	63,31	60,83	59,52	67,80
SMK	43,07	41,39	41,52	47,25	55,30

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2018

- d) Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan diri seseorang untuk berkontribusi dalam semua aspek pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas dan kompetensi dalam menghadapi kompetisi di dunia kerja. Berbagai upaya dilakukan sektor pendidikan seperti kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan *life skill* yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dunia kerja.

Upaya tersebut dilaksanakan berdasar kondisi penyerapan peserta didik dalam dunia kerja dilihat dari lulusan SMK yang diterima di dunia kerja serta lulusan kursus, pelatihan, magang, dan kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja sebagaimana digambarkan berikut:

Tabel 2-32 Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2014-2018

Lulusan pendidikan informal/formal yang memasuki dunia kerja	2014	2015	2016	2017	2018
Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	73,18	73,18	86,49	76,94	n/a*
Lulusan SMK diterima di dunia kerja	48,82	45,22	44,16	51,08	54,63

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

- e) Perkembangan teknologi informasi (TI) memberikan pengaruh yang besar dalam semua aspek pembangunan termasuk sektor pendidikan. Keberadaan TI selain bermanfaat dalam mengupdate informasi dan pengetahuan global, juga sebagai sarana untuk menunjang proses belajar mengajar itu sendiri. Manfaat dari TI dalam sektor pendidikan antara lain: a) memungkinkan untuk diselenggarakannya pendidikan terbuka dan jarak jauh, b) berbagi sumber daya dan informasi antar penyelenggara pendidikan, dan c) penggunaan media interaktif dalam proses belajar mengajar.

Dinas Dikpora DIY melalui Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP) telah menyediakan beberapa layanan teknologi pendidikan yang

aksesibel bagi guru dan siswa dalam penyediaan informasi pendidikan sekaligus media interaktif pendukung pembelajaran. Akan tetapi penyediaan layanan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh guru dan siswa di DIY. Pada tahun 2018, dari total 39.596 guru di DIY baru sebanyak 4.675 guru (11,81%) yang memanfaatkan layanan BTKP dan dari 572.703 siswa di DIY baru sebanyak 23.274 siswa (4,06%) yang memanfaatkan layanan BTKP.

Tabel 2-33 Layanan di BTKP DIY dan Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2018

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH GURU PARTISIPASI	JUMLAH SISWA PARTISIPASI
1	Diseminasi	500	500
2	Kihajar	237	978
3	Bimbingan Teknis	1586	0
4	Lokakarya	100	0
5	Buletin dan Warta Guru	74	0
6	Mobile Learning Service	300	200
7	Layanan Jogjabelajar	1878	21596
TOTAL GURU PARTISIPASI			4.675
TOTAL GURU DIY			39.596
PROSENTASE PENGGUNA LAYANAN			11.81%
TOTAL SISWA PARTISIPASI			23.274
TOTAL SISWA DIY			572.703
PROSENTASE PENGGUNA LAYANAN			4.06%

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

Persentase pengguna layanan BTKP masih rendah dikarenakan siswa dan guru yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kegiatan berbasis TI di BTKP masih sangat terbatas. Namun, aplikasi atau produk yang dikembangkan oleh BTKP telah banyak digunakan oleh siswa dan guru di luar peserta kegiatan di BTKP.

Guru memiliki kompetensi yang bagus dan inovatif dalam menerapkan media berbasis komputer ditunjukkan dengan keterampilan dan inovasi media yang sudah digunakan guru dalam pembelajaran tematik. Guru cenderung memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di kelas dengan mengintegrasikan media melalui jaringan internet yang sudah disediakan oleh sekolah sehingga guru lebih mudah mengakses materi maupun jenis media berbasis komputer lainnya.

- f) Pendidikan dan kebudayaan merupakan aspek utama dalam pembangunan SDM di DIY untuk menciptakan ‘manusia yang utama’ (*jalmâ kang utâmâ*). Pendidikan berperan dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat

DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera, dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya.

Pendidikan berbasis budaya merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Berdasarkan data jumlah sekolah di DIY yang telah menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya kategori maju sebanyak 25,34% dari 446 sekolah SLB, SMA dan SMK.

- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang salah satunya terkait dengan urusan pendidikan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan.

Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Data dari Dinas Dikpora DIY menyebutkan bahwa masih terdapat 1.592 anak berkebutuhan khusus di DIY yang belum mengakses layanan pendidikan. Beberapa faktor penyebabnya selain akses juga disebabkan oleh keluarga dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, pengembangan kurikulum, pengembangan manajemen sekolah, serta peningkatan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak siswa berkebutuhan khusus.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan sebuah investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan DIY yang tercermin melalui capaian komponen pembangunan kesehatan dalam Indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) DIY merupakan yang terbaik secara nasional dengan capaian 74,74 tahun di tahun 2017 dan selalu meningkat dari kurun 2010 sampai dengan 2017 (BPS DIY, 2018). Capaian tersebut tidak berarti pembangunan kesehatan DIY tanpa permasalahan. Beberapa indikator kesehatan masih memerlukan perhatian khusus.

2.1.3.1.2.1 **Pengendalian Penyakit Menular**

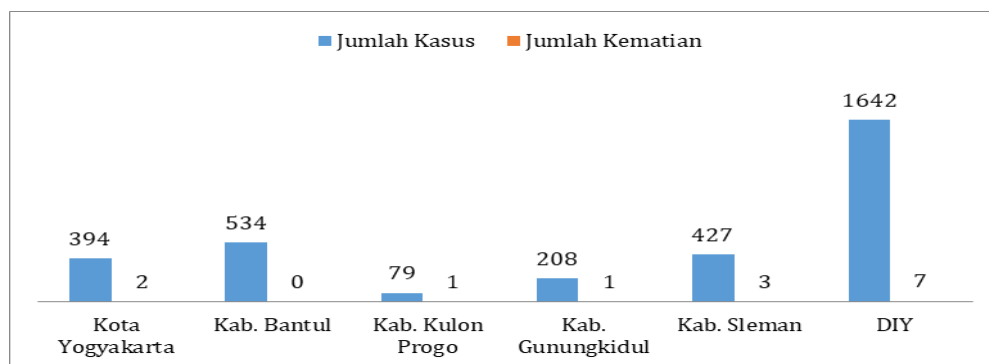
Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian di DIY karena angka prevalensinya diatas angka nasional berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 adalah Hepatitis. Prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosis dokter di DIY Tahun 2013 adalah sekitar 0,1% dan di Tahun 2018 meningkat sebesar 400% menjadi 0,4. Angka prevalensi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi nasional yang sekitar 0,2.

Penanganan Penyakit menular lain seperti TBC di Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisi ini terlihat pada angka kesembuhan TBC sebesar 85,56 % meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 84,37 %. (Dinas Kesehatan DIY, Profil Kesehatan DIY 2017). Beberapa penyakit menular masih memerlukan perhatian khusus karena angka kejadiannya yang tergolong tinggi seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV AIDS, dan Malaria.

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Menurut World Health Organization (WHO), Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* yang terinfeksi salah satu dari empat tipe virus *dengue* dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai *leukopenia*, ruam, *limfadenopati*, *trombositopenia* dan *diathesis hemoragik*.

DIY tergolong daerah dengan tingkat kejadian kasus yang tinggi. Data dari Dinas Kesehatan DIY menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terjadi 1.642 kasus dengan 7 kasus kematian akibat DBD.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Gambar 2-28 Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) DIY Tahun 2017

Angka kematian akibat DBD tercatat fluktuatif dari kurun 2014 – 2017. Pada tahun 2014, kasus kematian akibat DBD tercatat sejumlah 13 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sejumlah 35 orang, kemudian menurun pada tahun 2016 sejumlah 31 orang dan di tahun 2017 sebesar 7 orang.

b. Penyakit HIV/AIDS

Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena sangat turunnya kekebalan tubuh penderita HIV dan merupakan stadium akhir dari HIV. Penularan penyakit ini di DIY tidak bisa dianggap sepele sebab temuan kasus HIV setiap tahunnya tidak menunjukkan penurunan dan penderitanya berasal dari berbagai pekerjaan dan kelompok usia. Berdasarkan data dari KPA tahun 2018 empat jenis golongan pekerjaan terbesar yang menderita HIV/AIDS adalah profesional *non*medis, wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan pelajar.

Tabel 2-34 Temuan Kasus Berdasarkan Tahun Penemuan 2014-2019

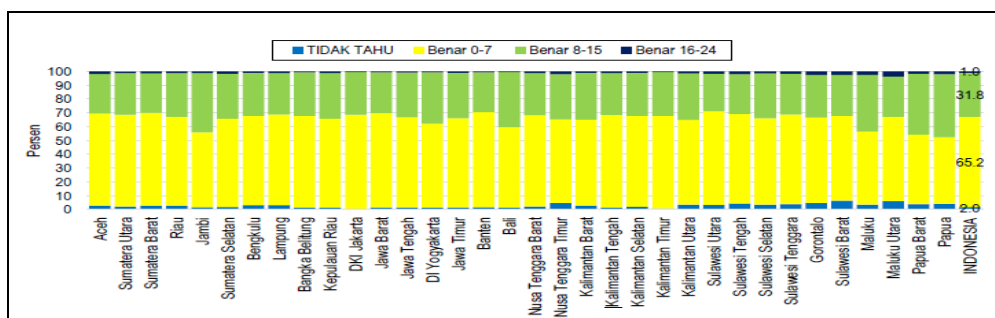
Tahun	AIDS	HIV
2014	199	532
2015	3.078	1.230
2016	209	542
2017	27	324
2018	1.647	4.781
2019	1.726	4.586

Sumber: Dinkes DIY, 2020

Kasus HIV/AIDS baru yang terjadi setiap tahun dan dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut diduga salah satu penyebabnya adalah pengetahuan

tentang HIV/AIDS. Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat DIY terhadap AIDS/HIV di bawah angka nasional.

Akumulasi kasus HIV/AIDS dilihat dari data Dinas Kesehatan DIY sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2019, tercatat kasus HIV sebanyak 4.586 kasus, dan 1.726 diantaranya telah memasuki fase AIDS.

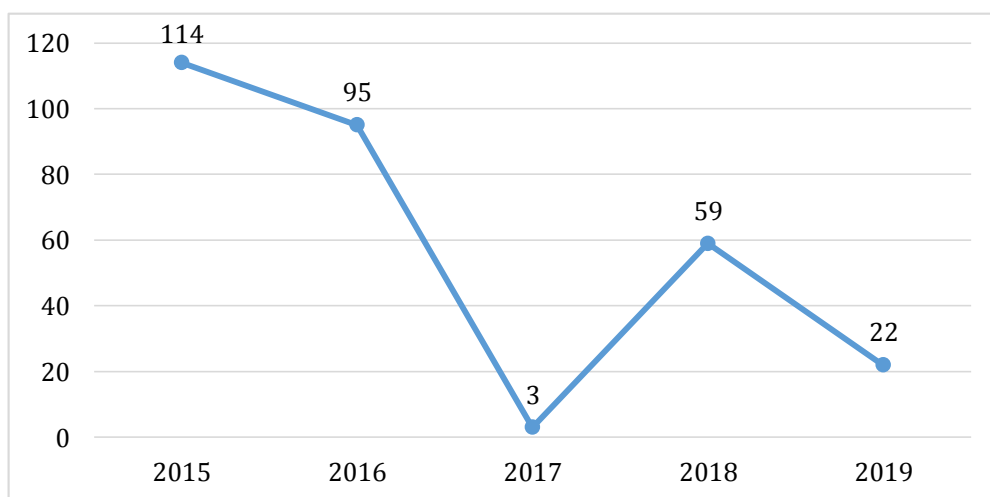


Sumber: Hasil Laporan Riskesdas 2018

Gambar 2-29 Pengetahuan Tentang AIDS/HIV Menurut Provinsi

c. Malaria

Kasus malaria yang terjadi di DIY hanya terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan penyebaran pada 6 kecamatan. Kasus terbanyak ada di Kecamatan Kokap (71 kasus) dan yang paling sedikit di Kecamatan Sentolo (1 kasus). Perkembangan kasus malaria dalam kurun 2015-2019 di DIY adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2019

Gambar 2-30 Perkembangan Jumlah Kasus Malaria DIY Tahun 2015-2019

Penyebab Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah endemis malaria dikarenakan kondisi topografi dari perbukitan menoreh dimana dijumpai nyamuk *anopheles* sebagai vektor dari penyakit ini. Posisi perbukitan menoreh yang berada pada perbatasan daerah (Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo), membutuhkan intervensi yang sinergis dari masing-masing daerah untuk mewujudkan eliminasi malaria.

2.1.3.1.2.2 Penyakit Tidak Menular

Prevalensi penyakit tidak menular layak mendapat perhatian sebab ini merupakan gambaran perilaku hidup sehat masyarakat di DIY. Jenis penyakit tidak menular di DIY yang memiliki angka prevalensi tinggi atau diatas angka nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-35 Jenis Penyakit Tidak Menular dengan Prevalensi Tinggi

Penyakit	Prevalensi DIY*	Prevalensi Nasional	Satuan	Posisi Nasional
Asma	4,5	2,4	persen	1
Kanker	4,9	1,8	Permil	1
Stroke	14,6	10,9	Permil	2
Ginjal Kronis	>3,8	3,8	Permil	12
Diabetes Melitus	2,6	2	Persen	3
Jantung	1,5<DIY<2,2	1,5	Persen	3
Hipertensi	8,8<DIY<13,5	8,8	Persen	4
ART dengan Gangguan Jiwa Skizofrenia	10,36	7	Permil	2

Sumber: Riset Kesehatan Daerah 2018, diolah

Penyakit tidak menular terkait erat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat. Kondisi ini juga dialami oleh DIY dimana capaian prevalensi beberapa penyakit tidak menular sebanding dengan capaian PHBS DIY. DIY telah memiliki indikator untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan PHBS di tingkat rumah tangga. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, penerapan PHBS di tingkat rumah tangga baru mencapai 45,32%. Indikator PHBS yang masih perlu perhatian adalah perilaku merokok.

Pada tahun 2016 pemerintah meluncurkan sebuah gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Pada tahun 2017, gerakan ini mendapatkan payung hukum melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas dengan harapan gerakan ini didukung oleh kebijakan lintas sektor dan menjadi aksi bersama.

Germas meliputi beberapa kegiatan yaitu: a) Peningkatan aktifitas fisik, b) Peningkatan perilaku hidup sehat, c) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, d) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, e) Peningkatan kualitas lingkungan, dan f) Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pemda DIY telah memiliki panduan dalam penyelenggaraan Germas yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari. Penyusunan RAD tersebut bertujuan untuk: a) meningkatkan kapasitas, komitmen dan keperansertaan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas; b) menggali, mengkaji dan menerapkan nilai serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Germas; c) membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas; serta d) mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.1.3.1.2.3 Status Gizi Balita

Permasalahan terkait status gizi balita di DIY adalah stunting. *Stunting* atau balita pendek merupakan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan di kemudian hari anak bertubuh lebih pendek dari teman seusianya atau sewajarnya. *Stunting* merupakan indikasi adanya kekurangan gizi pada balita dan apabila tidak segera tertolong akan berdampak buruk pada kecerdasan anak. Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita di DIY mengalami penurunan yang sebelumnya di tahun 2013 sebesar 27,5% menjadi sebesar 21,5%. Pencapaian penurunan stunting ini merupakan peringkat dua secara nasional setelah DKI Jakarta yang mencapai 17,7%. Sedangkan angka nasional untuk *stunting* adalah 30,8%. Penurunan angka *stunting* ini tentu saja kabar gembira namun angka 21,5% yang berarti 1 dari 5 anak di DIY adalah stunting cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut karena anak *stunting* akan memiliki fisik yang lemah, mudah sakit dan memiliki kecerdasan yang kurang. Dengan demikian ini adalah ancaman bagi kualitas daya saing dan produktivitas di masa mendatang. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus dan penanganan secara terpadu antar pihak agar angka *stunting* terus menurun.

2.1.3.1.2.4 Tingkat Kematian (*Mortalitas*) Ibu dan Bayi

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. AKB menjadi indikasi penting dari tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena bayi sangat rentan dengan keadaan kesehatan dan kesejahteraan yang rendah. Merujuk pada target Sustainable Development Goals (SDGs) pada indikator AKB sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup, AKB DIY di bawah angka tersebut meskipun jumlah kematian bayi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2014-2018. Berikut potret jumlah kematian bayi dalam kurun waktu 2014-2018 di DIY.

Tabel 2-36 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup DIY Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kematian Bayi	405	370	278	313	318
Jumlah Kelahiran Hidup	45.592	46.029	43.026	42.348	43.005
Prosentase	8.9	8	6.5	7.4	7.4

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2019

Penyebab umum kematian bayi di DIY adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sepsis, dan asfiksia pada saat lahir.

b. Angka Kematian Ibu

1. Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI merupakan indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga upaya penurunan AKI masih menjadi fokus. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Di DIY sendiri perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 29 – 36 kasus kematian ibu. Tahun 2015 kasus kematian ibu sebanyak 29 kasus. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu sebanyak 39 kasus. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus kematian ibu menjadi 34 kasus, sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 36 Kasus.

2.1.3.1.2.5 Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah DIY meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh Puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan rujukan diampu oleh Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Dari 121 Puskesmas Induk yang terdapat di DIY, pada tahun 2018 seluruhnya telah terakreditasi dengan kategori akreditasi yang beragam dari dasar sampai utama.

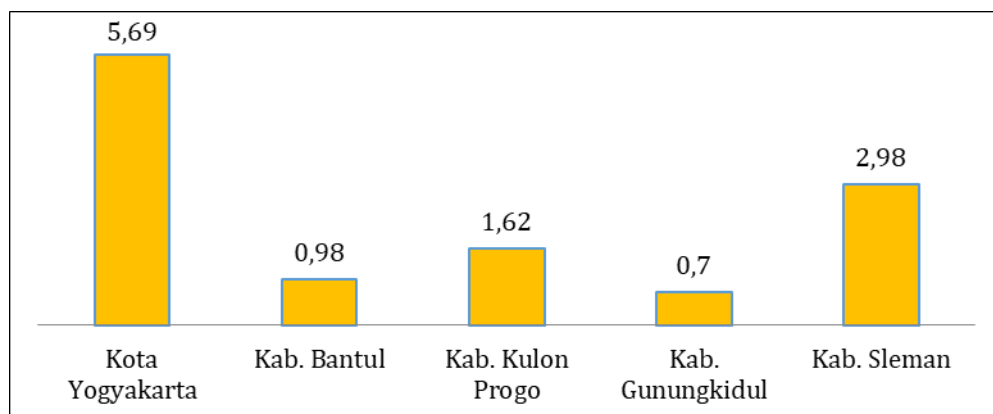
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rujukan, jumlah Rumah Sakit yang ada di DIY berjumlah 76 Rumah Sakit yang terdiri dari 54 RS Umum dan 22 RS Khusus. Jumlah Rumah Sakit berdasarkan kelas di DIY dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-37 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di DIY Tahun 2017

Kelas RS	RS Umum	RS Khusus	Jumlah
Kelas A	1	2	3
Kelas B	10	1	11
Kelas C	6	19	25
Kelas D	37	0	37
Jumlah	54	22	76

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Long of Stay (LOS) untuk Rumah Sakit di DIY sebesar 2,81 hari dengan rasio tempat tidur sebesar 2,23 yang berarti bahwa 1000 penduduk DIY dilayani dengan 2,23 tempat tidur. Meskipun sudah masuk dalam kategori ideal, akan tetapi untuk distribusi per wilayah masih terjadi ketimpangan. Dari 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, terdapat 3 kabupaten (Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul) dengan sebaran rendah. Sebaran rasio tempat tidur rumah sakit di DIY dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Gambar 2-31 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017

Terkait beroperasinya *Yogyakarta International Airport* (YIA) atau Bandar Udara Internasional Yogyakarta, perlu adanya antisipasi terhadap kejadian-kejadian kegawatdaruratan yang juga berstandar internasional. Untuk itu perlu adanya fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan tersebut baik dari aspek fisik, peralatan, tenaga kesehatan, maupun manajemen pengelolaannya. Selain itu perlu adanya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam memberikan respon yang cepat terhadap kejadian-kejadian kegawatdaruratan.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

2.1.3.1.3.1 Urusan Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Arah kebijakan pembangunan sub urusan sumber daya air (SDA) harus bisa menjawab isu strategis yang berkembang ditingkat lokal yang dalam masa 5 tahun keduanya pasca keistimewaan mengangkat tema “Menyongsong Abad Samudra Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, serta mengikuti arah kebijakan nasional terkait pembangunan sektor sumber daya air, antara lain target *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Nawacita.

Sub urusan SDA dalam lingkup kegiatan pemda DIY adalah melaksanakan ketugasan di dalam peningkatan kinerja sistem irigasi, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan penambahan kapasitas air baku. Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dalam mencapai ketahanan pangan yaitu untuk melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Layanan penyediaan air irigasi di DIY tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, namun dilakukan juga oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi berdasarkan luasan daerah irigasi. Daerah irigasi di DIY Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2-38 Daerah Irigasi di DIY

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI Air Tanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	GunungKidul	182	55	-	237	7.722
5	Sleman	853	-	75	928	25.814
6	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7	Kota Yogyakarta	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber: Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY sebesar 12.158 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI yang merupakan DI permukaan. DI kewenangan Pemda DIY terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota sejumlah 35 DI dengan luas 4.909 Ha dan daerah irigasi utuh di Kabupaten sejumlah 6 DI dengan luas 9.078 Ha.

Tabel 2-39 Prasarana Irigasi/Pengairan

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Non Teknis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	m
2	Teknis	171.562,72	169.082,72	255.874,18	255.874,18	255.874,18 *	m
3	Primer	57.192,24	57.192,24	78.589,59	78.589,59	78.589,59 *	m
4	Sekunder	114.390,48	111.890,48	177.284,59	177.284,59	177.284,59 *	M
5	Tersier	171.582,72	417.559,39	906.198,08	906.198,08	906.198,08 *	M
6	Luas Irigasi	13.987,19	13.987,00	12.158,11	12.158,11	12.158,11 *	Ha

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	3	4	5	6	7	8	9
7	Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik	45.532,32	44.219,39	93.096,04	93.096,04	119.826,87 *	M
8	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	26,54	31,02	35,77	35,77	n/a	%
9	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	4.348,06	4.339,26	4.348,98	4.348,98	5.466,75 *	Ha
*) Sementara n/a Tidak ada							

Sumber : BPPSD 2019

Dari tabel Prasarana Irigasi/Pengairan di atas, terlihat bahwa luas irigasi dari tahun ketahun mengalami penurunan luasan. Meski demikian pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sarana irigasi sehingga dalam kondisi yang baik, sehingga di harapkan dapat meningkatkan persentase luasan irigasi dalam kondisi yang baik. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke *non*pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke *non*padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel 2-40 Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY 2018

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA	Luas Sesuai Permen PUPR 14/2015	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	INDEKS JARINGAN IRIGASI	TINGKAT KONDISI (BS, B, S, J)	INDEKS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN (B, RR, RS, RB)
			(Ha)	(m)	(%)		(%)	
1	Tirtorejo/Grembyangan	DIY/Sleman-Bantul		8.424	73,00	S	27,00	RS
2	Semoya	Sleman-Bantul		1.606	74,90	S	25,10	RS
3	Kucir	Sleman-Bantul		2.299	72,80	S	27,20	RS
4	Kuton	Sleman-Bantul		2.357	72,40	S	27,60	RS
5	Madugondo	Sleman-Bantul		3.361	73,10	S	26,90	RS
6	Dadapan	Sleman-		1.572	72,70	S	27,30	RS

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA	Luas Sesuai Permen PUPR 14/2015	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	INDEKS JARINGAN IRIGASI	TINGKAT KONDISI (BS, B, S, J)	INDEKS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN (B, RR, RS, RB)
			(Ha)	(m)	(%)		(%)	
		Bantul						
7	Pulodadi	Sleman-Bantul		5.329	72,90	S	27,10	RS
8	Glendongan	Sleman-Bantul		3.611	72,30	S	27,70	RS
9	Klampok	Sleman-Bantul		4.424	72,00	S	28,00	RS
10	Sekarsuli	Sleman-Bantul		2.678	72,50	S	27,50	RS
11	Nologaten	Sleman - Kota		2.896	71,90	S	28,10	RS
12	Ngebruk	Sleman - Kota		2.964	72,30	S	27,70	RS
13	Trini	Sleman-Kota		5.237	72,51	S	27,49	RS
14	Cokro Bedog	Sleman-Bantul		2.075	73,40	S	26,60	RS
15	Gamping	Sleman-Bantul		5.267	73,50	S	26,50	RS
16	Brongkol	Sleman-Bantul		3.654	73,20	S	26,80	RS
17	Tumut	Sleman-Bantul		1.100	71,72	S	28,28	RS
18	Timoho	Sleman-Bantul		3.362	72,80	S	27,20	RS
19	Engkuk-engkukan	Sleman-Bantul		1.897	73,74	S	26,26	RS
20	Sambeng	Sleman-Bantul		6.030	71,74	S	28,26	RS
21	Mojo	Sleman-Bantul		2.474	71,00	S	29,00	RS
22	Sembuh	Sleman-Bantul		799	75,80	S	24,20	RS
23	Ponggok	Sleman-Bantul		1.922	76,90	S	23,10	RS
24	Kanoman	Kota - Bantul		2.870	70,80	S	29,20	RS
25	Tanjung	Kota - Bantul		232	68,18	S	31,82	RS
26	Bangeran	Kota - Bantul		3.940	79,10	B	20,90	RS
27	Mrican	Kota - Bantul		5.143	72,50	S	27,50	RS
28	Sidomulyo	Kota-Bantul		5.214	78,72	S	21,28	RS
29	Prangkok	Sleman - Bantul		1.329	71,30	S	28,70	RS
30	Sidoraharjo	Sleman-Bantul		3.547	73,10	S	26,90	RS

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA	Luas Sesuai Permen PUPR 14/2015	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	INDEKS JARINGAN IRIGASI	TINGKAT KONDISI (BS, B, S, J)	INDEKS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN (B, RR, RS, RB)
			(Ha)	(m)	(%)		(%)	
31	Madean	Sleman-Bantul		7.228	69,20	S	30,80	RS
32	Pogung	Sleman - Kota		6.176	72,30	S	27,70	RS
33	Minggiran	Kota - Bantul		2.242	68,64	S	31,36	RS
34	Mendungan	Kota - Bantul		1.505	67,91	S	32,09	RS
35	Mergangsan	Kota - Bantul		2.541	71,30	S	28,70	RS
36	Blawong	Bantul		14.554	65,84	S	34,16	RS
37	Pendowo	Bantul		19.696	61,78	S	38,22	RS
38	Pijenan	Bantul		39.214	53,70	J	46,30	RB
40	Simo	Gunungkidul		17.867	77,75	S	22,25	RS
39	Payaman	Gunungkidul		9.281	70,73	S	29,27	RS
41	Sapon	Kulon Progo		37.968	76,11	S	23,89	RS
RERATA					71,90		28,10	RS
TOTAL			3.987	55.883				

Sumber : Dinas PUP ESDM, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kondisi saluran irigasi dalam kondisi sedang sehingga untuk melayani daerah irigasi saluran masih dapat berfungsi dengan baik.

Kebijakan Pemda DIY dalam penyediaan air baku dilakukan melalui pembangunan embung yang berfungsi sebagai penampung air sekaligus untuk mempertahankan stabilitas muka air tanah dan dengan sumur bor. Pembangunan embung telah dimulai pada tahun 2005 dan terus ditambah sampai tahun 2018 telah dibangun 24 embung yang tersebar di beberapa kabupaten di DIY. Di dalam pencapaian target RPJMD pada penyediaan air baku sebesar 2.100 Liter/detik juga didukung dari pembangunan bendung Kamijoro, SPAM Regional Kebon Agung, SPAM Regional Karangtalun dan sumur bor dari bidang ESDM. Capaian pada akhir tahun 2017 adalah debit air baku sebesar 2.168,73 liter/detik. Tahun 2018 ditargetkan penambahan debit air baku sebesar 35 liter/detik adapun realisasinya hanya sebesar 16,10 liter/detik dengan rincian:

- Pembangunan 6 Unit Embung dengan dana APBD kabupaten Bantul sebanyak 5 buah dan di Kulonprogo 1 buah dengan debit kumulatif sebesar 0,41 liter/detik.

- b. Pembangunan 1 Unit Embung di daerah Playen Gunung Kidul di hutan wanagama dengan dana APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan kapasitas debit sebesar 7 liter/detik.
- c. Pembangunan 8 Unit Sumur Bor dengan dana APBD DIY melalui dengan kapasitas debit sebesar 8,68 liter/detik. Pembangunan dilakukan antara lain di:
 - 1. Kabupaten Gunung Kidul yaitu diantaranya: Patuk (0,5 lt/det), Gedangsari (0,6 lt/det), Semin (0,5 lt/det), Playen (0,78 lt/det);
 - 2. Kabupaten Bantul: Karangkulon Wukirsari (1,6 lt/det), Lemahrubuh Selopamioro (1,6 lt/det), Jetis Selopamioro (1,7 lt/det), Seropan Dlingo (1,4 lt/det);

2.1.3.1.3.1.2 Sub Urusan Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Pada akhir tahun 2018 jumlah rumah tangga DIY sebanyak 1.202.240 Rumah tangga (BSD, 2018). Melalui Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional dan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman serta dukungan APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2018 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 1.103.295 Rumah tangga atau 91,77% dari jumlah rumah tangga DIY. Sampai dengan akhir tahun 2018 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,51 % dari target sebesar 86,98% Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah tercapai dengan presentase sebesar 97,48%. Data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2-41 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2018

No	Kab	Pelayanan PDAM		Pelayanan <i>non</i> PDAM						Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan
		SR	Jumlah Jiwa	SR SPAMDes	Jumlah Jiwa	SR PAMS IMAS	Jumlah Jiwa	HU	Jumlah Jiwa	
1	Sleman	32.929	214.039	21.690	108.450	868	4.340	847	42.350	369.179
2	Kulon Progo	27.545	212.097	6.442	32.210	5136	25.680	349	17.450	287.437
3	Bantul	30.982	198.285	6.155	30.775	6843	34.215	93	4.650	267.925
4	Gunung Kidul	47.268	401.778	22.641	113.205	2162	10.810	179	8.950	534.743
5	Kota YK	28.857	155.828	-	-	-	-	-	-	-
DI Yogyakarta		167.581	1.182.026	56.928	284.640	15.009	75.045	1.468	73.400	1.459.283

Sumber: Satker PSPAM DI Yogyakarta, 2018

Sebagai penunjang penyediaan air minum dianggarkan dengan APBN, serta dilakukan melalui:

1. Pembangunan IPA SPAM Regional Kartamantul kapasitas 200 liter/detik dan JDU termasuk jaringan perpipaan distribusi utama, Rencana jumlah penduduk yang akan dilayani program ini berjumlah 350.000 jiwa.
2. Optimalisasi SPAM Kawasan Kalibawang, Kab. Kulon Progo dengan jaringan pipa dia.300mm, sepanjang 8.300 m.
3. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Panjatan Kab. Kulonprogo, berupa pemasangan pipa distribusi utama 300mm dan 250 mm, Reservoir 500 m³.
4. Pembangunan jaringan perpipaan Dlingo, berupa pemasangan pipa distribusi utama ø100mm sepanjang 2.202 m.

2.1.3.1.3.1.3 Sub Urusan Air Limbah

Penyediaan layanan Limbah DIY disediakan oleh sistem terpusat melalui IPAL Sewon, sistem komunal dan sistem setempat. Sistem terpusat IPAL Sewon berlokasi di Sewon, Bantul melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri wilayah Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam

mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi off site system dan on site system berupa individual atau komunal.

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah melewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga di KPY telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon beserta jaringan perpipaanya. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program Program Pengelolan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional. Pada tahun 2018, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota dan dukungan APBD DIY berupa pembangunan pipa lateral, pipa service berserta operasi pemeliharaannya dan APBD Kabupaten/Kota jumlah sambungan rumah yang terpasang secara kumulatif mencapai 23.821 SR. Jumlah sambungan rumah air limbah cair rumah tangga pada sistem IPAL terpusat sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-42 Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2018

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kota Yogyakarta	17.768
2	Kabupaten Bantul	2.776
3	Kabupaten Sleman	3.277
Jumlah Total		23.821

Sumber: Dinas PUP ESDM 2018

Data cakupan pelayanan air limbah domestik DIY disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 2-43 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Sanitasi Layak						Jumlah
				SPALD- Setempat				SPALD –Terpusat		
				Sistem Individual		Sistem Komunal		SPALD-T Permukiman	SPALD-T Perkotaan	
		BABS	Cublul/ Tangki Septik Individual Tidak Layak	Jamban Keluarga dgn Tangki Septick Aman	Memiliki Akses ke jamban bersama "layak"	MCK Komunal	Tangki Septick Komunal (5-10 KK)	IPAL Komunal	Sambungan Rumah yang Berfungsi	
		(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
1	Yogyakarta	-	1.211	105.093	4.295	957	128	2.271	17.768	131.723
2	Sleman	-	9.482	284.738	17.285	114	-	14.791	2.776	329.186
3	Bantul	-	48.542	246.134	7.376	-	-	12.463	3.277	317.792
4	Kulonprogo	-	18.477	91.982	8.357	-	26	3.525		122.367
5	Gunungkidul	-	32.622	141.685	19.632	-	-	2.969	-	196.908
		-	110.334	869.632	56.945	1.071	154	36.019	23.821	1.097.976

Sumber: Dinas PUP ESDM 2018

Untuk menambah kapasitas cakupan layanan Air Limbah pada tahun 2018 dilakukan melalui pembangunan IPAL Komunal dan peningkatan infrastruktur yang sudah ada antara lain:

1. Pembangunan SPAL Kawasan Berbah Sleman, memiliki kapasitas 390m³/hari dan mampu melayani 1000SR dengan cakupan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Berbah, dengan capaian 200 SR.
2. Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat IPAL Sewon Kab. Bantul, berupa Penambahan peralatan mekanikal dan elektrik IPAL Sewon, optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Pembangunan Gedung laboratorium
3. Pembangunan jaringan pipa induk di Jl. Kaliurang (575 m).

4. Pembangunan Sanimas Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulonprogo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

2.1.3.1.3.1.4 Sub Urusan Persampahan

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA Sanitary Landfill Kulon Progo dan TPA Sanitary Landfill Gunungkidul. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan DIY dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2-44 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan per Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk 2019 (SM 1)	Timbunan Sampah	Pengelolaan Mandiri		3R (TPS3R+Bank Sampah, dll)		Volume Sampah yang terangkut ke TPA	
			(m3/ hari)	(%)	(m3/ hari)	(%)	(m3/ hari)	(%)	(m3/ hari)
1	Kabupaten Bantul	945.441	1940.75	4.28	83	10.68	91.39	24.5	476.48
2	Kabupaten Gunungkidul	768.523	1950.15	22.76	443.86	29.5	51.8	9.43	183.82
3	Kabupaten Kulon Progo	447.007	779.98	23.99	187.1	7.64	30.2	23.08	180
4	Kabupaten Sleman	1.070.913	2648.73	9.18	243.17	19.14	279.33	29.01	768.46
5	Kota Yogyakarta	413.603	1477.44	25.74	380.26	1.82	26.89	70.74	1045.11
Jumlah		3.645.487	8797.05	15.2	1337.39	5.45	479.61	30.17	2653.87

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi DI Yogyakarta, Satker PSPLP DIY, 2018; * data jumlah penduduk dari Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019.

Data semester 1 2019 penduduk DIY sejumlah 3.645.487 Jiwa (Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2019). Melalui program penanganan sanitasi, Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sejumlah 3.486.074 jiwa atau sama dengan 96,39% dari jumlah penduduk DIY. Selain melalui program APBD, peningkatan penduduk berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan APBN, yaitu:

1. Peningkatan Kinerja TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul, berupa perluasan areal TPA seluas 3000 m² yang diharapkan dapat memperpanjang umur TPA dengan kinerja 125 m³/hari.

2. Peningkatan Kinerja TPA Banyuroto Kabupaten Kulonprogo, berupa perkuatan retainingwall dan pembangunan jembatan timbang agar TPA dapat berfungsi optimal dengan kinerja 70-90 m³/hari.
3. Pembangunan TPS 3R di Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo, ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2.1.3.1.3.1.5 Sub Urusan Drainase

Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Penyelesaian permasalahan genangan di KPY bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pada tahun 2016 kegiatan perencanaan penanganan genangan dilakukan untuk menghasilkan perencanaan penanganan genangan di KPY secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan.

Jumlah genangan pada KPY berdasarkan hasil Identifikasi dan Evaluasi Penanganan Genangan di KPY oleh Bidang Cipta Karya pada tahun 2016 sebanyak 57 titik yaitu 29 titik lokasi (sisa target RPJMD 2013 s.d. 2017) dan 28 titik lokasi genangan baru. Sampai dengan tahun 2018 baru tertangani 2 titik yaitu di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan Jalan Kaliurang Simpang MM UGM, Sleman.

2.1.3.1.3.1.6 Sub Urusan Jalan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional. Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi tahun 2019.

Tabel 2-45 Daftar Ruas Jalan Provinsi

No	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1	Kota Yogyakarta	-
2	Kabupaten Bantul	162,150
3	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5	Kabupaten Sleman	116,320
	Total Panjang Ruas Jalan	760,450

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

Di DIY telah terbangun jaringan Jalan Provinsi sepanjang 760,45 Km dan jembatan sejumlah 249 buah sepanjang 5.752 m. Sampai dengan tahun 2019 persentase jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) telah mencapai 73,48% atau sepanjang 558,81 km. Pencapaian jalan dalam kondisi mantap tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan peningkatan jalan yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-46 Kondisi Jalan Provinsi 2019

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jalan Baik	231,41	244,92	304,41	333,21	357,37	Km
2	Jalan Sedang	226,59	214,66	245,10	221,33	201,45	Km
3	Jalan kondisi mantap	458,00	459,57	549,51	554,53	558,81	Km
4	Jalan Rusak Sedang	141,69	151,48	148,23	140,37	143,99	Km
5	Jalan Rusak Berat	19,66	8,30	62,72	65,55	57,65	Km
6	Jalan kondisi tidak mantap	161,35	159,78	210,95	205,92	201,64	Km
7	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	73,95	74,20	72,26	72,92	73,48	%

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2020

Sampai dengan akhir tahun 2018 pengembangan aksesibilitas jalan di wilayah DIY difokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan Jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) dan pembangunan Jalan Prambanan – Gading. Pembangunan Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela) sejalan dengan konsep “*Among Tani Dagang Layar*” yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) sepanjang 116,07 KM. Pembangunan JJLS dilaksanakan secara bersama - sama oleh Pemda DIY (melalui Dana Kesetimewaan DIY untuk penyediaan lahan) dan Kementerian PUPR (melalui dana APBN untuk pembangunan fisik konstruksi).

Pembangunan jalan Prambanan – Gading (Prambanan – Gayamharjo (Jembatan Sembada Handayani) – Tawang (Ngoro Oro) – Ngalang – Nguwot – Gading) sepanjang 28 KM merupakan jalur alternatif jalan nasional Yogyakarta – Piyungan – Patuk – Gading – Wonosari. Pembangunan ruas jalan Prambanan – Gading dilaksanakan bersama oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman (untuk penyediaan lahan) dan Pemda DIY (melalui APBD dan Dana Keistimewaan DIY untuk pembangunan fisik konstruksi).

Panjang jalan yang telah terbangun sampai dengan tahun 2018 adalah sepanjang 970,81 KM atau 97,46% dari kebutuhan panjang jalan yang direncanakan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi sepanjang 996,16 Km (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 247,91 Km, Jalan Provinsi sepanjang 716,90 KM dan jalan Prambanan – Gading yang terbangun sepanjang 6 Km, sehingga masih terdapat 25,35 KM panjang jalan yang perlu dibangun dari target yang direncanakan. Capaian tersebut (97,46% pada akhir tahun 2018) telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017 – 2022 sebesar 103,37% dari target sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah mencapai 97,46%.

2.1.3.1.3.1.7 Sub Urusan Jasa Konstruksi

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sektor Jasa Konstruksi meliputi : penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah : dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain yaitu: meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di DIY bertujuan, juga untuk mewujudkan infrastruktur yang memiliki nilai manfaat terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, selain untuk memenuhi mandat tersebut. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dilakukan dengan :

- 1) pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- 2) penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;
- 3) pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja : Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Hingga akhir tahun 2018 kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi sebesar 63,26 % (bobot 50%) dan kinerja Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi sebesar 70,42% (bobot 50%), sehingga kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencapai 66,84%. Capaian ini telah melampaui target sebesar 140,16% dari target sebesar 47,69%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - a) Jumlah tenaga ahli bersertifikat sd. Tahun 2018 sebanyak 1.226 orang.
 - b) Jumlah orang yang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 413.298 orang.
 - c) Jumlah kegiatan pengembangan muatan materi sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 56 kegiatan.
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi
Capaian indikator kinerja Pelayanan Jasa Pengujian pada tahun 2018 sebesar 2.360 LHU.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi masih harus dilakukan peningkatan dalam mendukung indikator sasaran nilai akuntabilitas pemerintah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan uji laboratorium yaitu akreditasi parameter. Laboratorium pengujian bahan bangunan memiliki 55 parameter dan laboratorium pengujian tanah dan batuan memiliki 45 parameter. Dari 100 parameter tersebut baru terakreditasi sebanyak 22 parameter.

2.1.3.1.3.2 **Urusan Penataan Ruang**

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti yang tersebut pada pasal 3, bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan penataan ruang meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang mana masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional, provinsi, kabupaten kota dan Kawasan lainnya.

Adapun tujuan penataan ruang di DIY adalah mewujudkan DIY sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor, berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan untuk Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan arah kebijakan penyusunan dokumen rencana tata ruang, penetapan dokumen rencana tata ruang, penguatan kelembagaan penataan ruang daerah, penyebaran informasi penataan Ruang dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten /Kota.

Selanjutnya untuk strategi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dengan arah kebijakan sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal), mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah dan sektoral, mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, menyusun instrument pengendalian pemanfaatan ruang dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang.

Adapun kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2018 mengalami peningkatan dan melampaui target, dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi meningkat capaiannya sebesar 77,05%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 93,39% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 82,5%, sehingga kinerja untuk IKU DIY tahun 2018 masuk dalam kriteria tinggi. Capaian ini menjadi tantangan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perwujudan program pemanfaatan ruang dan berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dalam Pasal 97, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pada tahap pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan. Dalam hal penetapan tersebut, pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam pasal 98 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten/Kota, yang berarti sesuai dengan arahan lokasi permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW terkait;
- b. Sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang wilayah, maupun menurut Peraturan Menteri PU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Memiliki prasarana dan sarana dasar serta utilitas umum yang baik kondisi dan kualitasnya, atau minimal memenuhi Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Memenuhi kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah, atau berpedoman pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
- e. Memenuhi kualitas bangunan yang baik sesuai dengan SNI yang terkait;
- f. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berkesinambungan.

Di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan telah ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota yang juga telah dilengkapi dengan profil kawasan kumuh. SK Bupati tersebut yaitu:

- a. SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

- b. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019.
- c. SK Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019.
- d. SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul.
- e. SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Penanganan kumuh sesuai dengan “Gerakan Nasional 100-0-100” yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dilakukan melalui identifikasi sampai dengan penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota di DIY. Perkembangan lokasi kawasan kumuh sepanjang tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-47 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan

No	Item	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lokasi Pemukiman Kumuh	107,00	107,00	93,00	81,00	35,00	Lokasi

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2020

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Pada tahun 2018 terdapat backlog hunian sebesar 481.852 unit (BPS, 2018) (Kepemilikan : 294.285 unit dan Penghunian : 127.567 unit), *backlog*

RTLH 65.578 unit. Untuk mengurangi *backlog* kepemilikan tersebut dilakukan penyediaan rumah swadaya dan rumah umum serta peningkatan kualitas RTLH. Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat juga memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini. Penanganan RTLH tahun 2018 sebanyak 7.722 didanai melalui anggaran DAK, BSPS, APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan CSR. Sehingga tahun 2018 target penduduk dengan hunian yang layak telah mencapai 95,79% atau sejumlah 1.151.593 Rumah tangga dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 yang sebesar 97,50%, telah tercapai 98,24% dari total rumah tangga DIY yaitu sebanyak 1.202.240 jiwa (BSD, 2018).

2.1.3.1.5 Urusan Ketenteraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Nasional di Daerah, ukuran yang menggambarkan ketahanan daerah pada *hasta-gatra* (8 gatra) ketahanan nasional yang meliputi: 3 (tiga) Gatra Alamiah berupa geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai "modal dasar" pembangunan dan 5 (lima) Gatra Sosial (dinamis) berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan (Hankam). Pada tahun 2018, DIY memiliki nilai indeks 3,085 (sangat baik) dan menempati ranking 1 se-Indonesia. Kondisi pada 8 gatra ketahanan nasional di DIY terdapat dalam tabel di bawah ini.

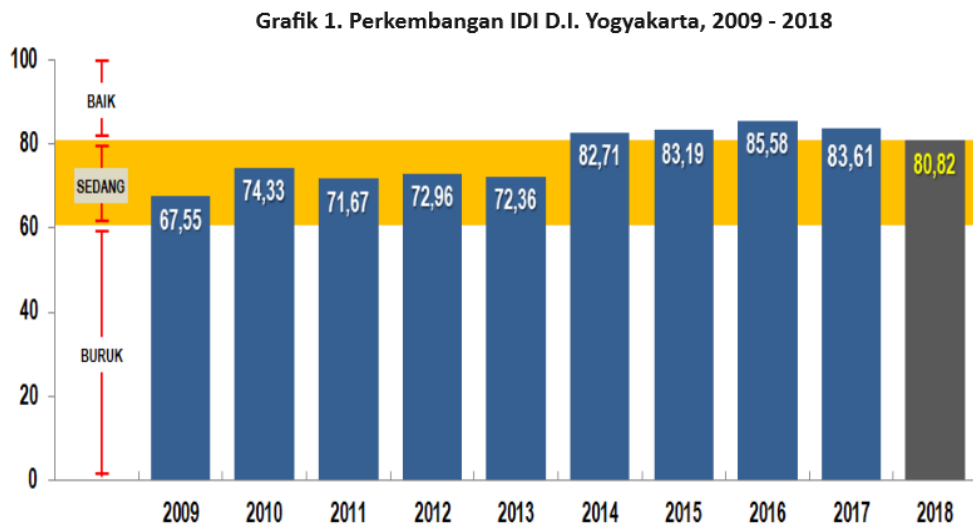
Tabel 2-48 Kondisi Gatra Ketahanan Nasional di DIY

Gatra	Rangking Nasional	Skor Indeks
Geografi	8	3,27
Demografi	3	3,45
Sumber Kekayaan Alam	24	2,13
Ideologi	1	2,94
Politik	1	3,45
Ekonomi	16	2,87
Sosial Budaya	3	3,08
Pertahanan dan Keamanan	5	2,8

Sumber: Labkurtannas Lemhannas RI, 2018

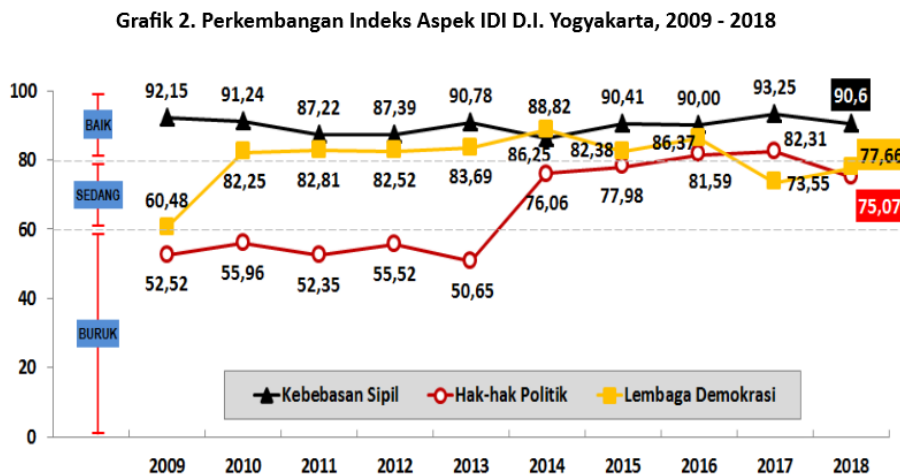
Sementara itu, perkembangan capaian IDI selama periode 2013-2018 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 capaian IDI DIY mencapai 72,36 kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 83,61 pada tahun 2016. Pada tahun 2018 (yang dirilis pada Oktober 2018), Angka IDI DIY tercatat sebesar 80,82 turun sebesar 1,97 poin dibandingkan capaian tahun

sebelumnya tetapi masih berada dalam kategori “baik”. Dari 3 aspek penilaian IDI, 2 aspek mengalami peningkatan, yaitu Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik dan 1 aspek mengalami penurunan drastis, yaitu Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi.



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 48/08/34/Th XXI, 1 Agustus 2019 (Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018)

Gambar 2-32 Grafik Indeks Demokrasi Indonesia DIY 2009-2018



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 48/08/34/Th XXI, 1 Agustus 2019 (Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018)

Gambar 2-33 Grafik Perkembangan Aspek IDI DIY 2009-2018

Jika dilihat dari Indeks variabel IDI, terdapat enam variabel penyusun IDI DIY yang mengalami peningkatan dan tiga variabel yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Tiga variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah Kebebasan berpendapat, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Peradilan yang Independen. Penurunan tiga variabel tersebut cukup signifikan sehingga menurunkan nilai IDI secara keseluruhan.

Tabel 2-49 Perkembangan Indeks Variabel IDI D.I. Yogyakarta, 2017-2018

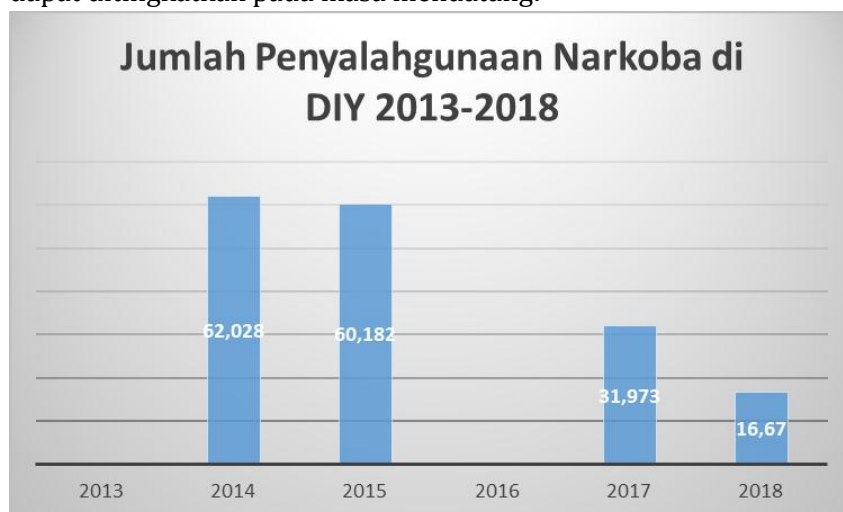
Aspek	Variabel	2017	2018	Perubahan
Kebebasan Sipil	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00	0,00
	Kebebasan Berpendapat	61,09	83,33	22,24
	Kebebasan Berkeyakinan	94,63	86,56	-8,07
	Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00	0,00
Hak-hak Politik	Hak Memilih dan Dipilih	78,20	78,78	0,58
	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	86,41	74,36	-12,05
Lembaga Demokrasi	Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	97,47	0,00
	Peran DPRD	79,33	50,06	-29,27
	Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	40,60	46,62	6,02
	Peradilan yang Independen	62,50	100,00	37,50

Sumber: BPS RI, 2018

Dari hasil pencapaian IDI DIY pada tahun 2018 terdapat 17 indikator dari 28 indikator yang mendapatkan penilaian dengan kategori “baik”, yaitu indikator dengan nilai capaian di atas 80. Indikator-indikator dengan kategori “baik” tersebut adalah: a. Indikator 1, Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (nilai 100,00). b. Indikator 2, Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (nilai 100,00). c. Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (nilai 87,50). d. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama (nilai 95,65). e. Indikator 6, Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya (nilai 87,50). f. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya (nilai 100,00). g. Indikator 9, Tindakan atau pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya (nilai 100,00). h. Indikator 10, Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena

alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya (nilai 100,00). i. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat (nilai 100,00). j. Indikator 14, Voters turnout (nilai 80,02). k. Indikator 18, Keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu (nilai 100,00). l. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara (nilai 94,94). m. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (nilai 100,00). n. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik (nilai 100,00). o. Indikator 25, Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN (nilai 92,11). p. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial (nilai 100,00). q. Indikator 28, Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polri (nilai 100,00).

Namun demikian, pada tahun 2018, terdapat lima indikator dengan kategori “buruk” atau indikator dengan nilai pencapaian di bawah 60. Indikator-indikator dengan nilai di bawah 60 tersebut adalah: a. Indikator 7, Ancaman atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (nilai 50,00) b. Indikator 15, Persentase anggota perempuan DPRD provinsi (nilai 48,48). c. Indikator 20, Besaran alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan (nilai 54,17). d. Indikator 22, Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif (nilai 21,43). e. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (nilai 8,33). Dalam rangka meningkatkan kehidupan berdemokrasi di DIY, maka perlu dilakukan upaya khusus terkait dengan kelima indikator tersebut agar dapat ditingkatkan pada masa mendatang.



Sumber: BNN, 2018(Bakesbangpol)

*) 2013 dan 2016 tidak ada survey

Gambar 2-34 Grafik Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba DIY 2013 - 2018

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN), perkembangan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di DIY menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 kasus penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 62.028 orang. Selama periode 2015-2017, terjadi penurunan signifikan kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu sebesar 46,87% atau sebanyak 28.209 orang dari 60.182 orang tahun 2015 menjadi 31.973 orang tahun 2017.

Angka prevalensi dan jumlah penyalahgunaan narkoba di DIY juga mengalami penurunan.

Provinsi	Prevalensi 2014 (%)	Prevalensi 2017 (%)
Jawa Tengah	1.94	1.16
DI Yogya	2.24	1.19
Jawa Timur	1.99	1.72

Sumber: BNN, 2018(Bakesbangpol)

*) 2013 dan 2016 tidak ada survey

Angka penurunan prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun 2014 s/d 2017 tercatat sebesar 1,05%. Penurunan angka prevelansi penggunaan narkoba ini masih harus di dukung dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental dimana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya *New Psychoactive Substances* atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ditempuh melalui pengembangan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) . Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.1.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2-50 Perkembangan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY tahun 2017 - 2019

No	Jenis PMKS	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	1.309	762	762*
2	Anak Terlantar	13.960	11.009	11.009*
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	219	101	101
4	Anak Jalanan	348	67	67*
5	Anak dengan Kedisabilitasan	2.983	1.931	1.931
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	11	11	11
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	101	6	6
8	Lanjut Usia Terlantar	45.765	42.417	42.417*
9	Penyandang Disabilitas	26.547	27.094	29.025*
10	Tuna Susila	406	290	290*
11	Gelandangan	236	190	190*
12	Pengemis	170	134	134*
13	Pemulung	511	467	467*
14	Kelompok Minoritas	1.168	2.313	2313
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	170	247	247*
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	3.104	3.712	3.712*
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	500	466	466*
18	Korban <i>Trafficking</i>	2	2	2
19	Korban Tindak Kekerasan	829	762	762*
20	Pekerja Migran Bermasalah	361	303	303*
21	Korban Bencana Alam	433	61	61*
22	Korban Bencana Sosial	29	0	0*
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.405	12.454	12.454*
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.943	4.960	4.960*
25	Keluarga Fakir Miskin	367.540 (PBDT 2015)	550.868 (BDT up date Mei 2018)	550.868*

Sumber: Dinas Sosial DIY 2019

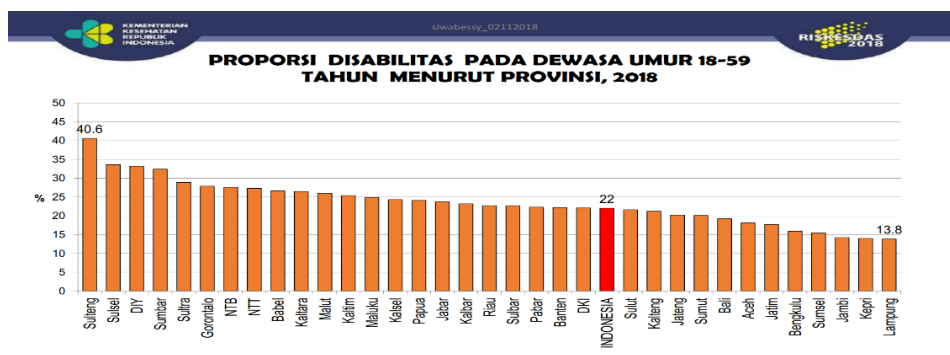
Data PMKS di DIY dari tahun 2017-2018 terus mengalami peningkatan pada Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan Fakir Miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan

untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

Layanan publik tersedia bagi semua warga masyarakat termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Beberapa hambatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain: hambatan *arsitektural*, hambatan informasi dan komunikasi, hambatan internal diri penyandang disabilitas sendiri dan kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas, yang secara keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik.

Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan atau hambatan untuk melakukan aktifitas. Penyandang disabilitas terdiri dari disabilitas fisik : (tubuh, netra, rungu, wicara), penyandang disabilitas mental : (mental retardasi dan eks psikotik), dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda. Penyandang disabilitas tahun 2017 sebanyak 26.547 orang dan di tahun 2018 sebanyak 27.094 orang. Peningkatan ini disebabkan kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen dan kondisi kedisabilitasan dari lahir. Tahun 2019 penyandang disabilitas mengalami kenaikan menjadi 29.025 orang.

ada aspek pekerjaan, menurut data Riskesdas 2018, di DIY proporsi Penyandang Disabilitas Usia Produktif cukup tinggi, berada di urutan ke-3 nasional. Pada aspek pekerjaan, menurut data Riskesdas 2018, di DIY proporsi Penyandang Disabilitas Usia Produktif cukup tinggi, berada di urutan ke-3 nasional.



Sumber : Riskesdas 2018

Gambar 2-35 Proporsi Disabilitas Usia Produktif di Indonesia Tahun 2018

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas pada usia produktif (18-59) Nasional berada pada angka 22 % dimana angka untuk DIY lebih tinggi (di atas 30 %). Akan tetapi pemberdayaan penyandang

disabilitas di DIY masih belum optimal, karena baru terdapat 20 perusahaan di DIY (Desember 2018) yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Menurut UU No 8 thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2 memuat tentang kewajiban Pemerintah/pemerintah Daerah, BUMN/BUMD untuk memperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sedangkan untuk perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari seluruh karyawan.

Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga rentan mengalami masalah sosial, antara lain perilaku seks menyimpang (Gay, Waria dan Lesbian). Kelompok Minoritas di DIY mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana data tahun 2015-2016 sebanyak 1.541 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 1.168 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 2.313 kasus.

Permasalahan yang terjadi pada Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah kesulitan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal. Sehingga data tahun 2017 sebanyak 170 orang meningkat menjadi 247 orang pada tahun 2018.

Terkait HIV/AIDS, pada tahun 2014 berjumlah 2.045 dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebanyak 3.491 orang. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2.834 orang. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 3.104 dan meningkat kembali di tahun 2018 dengan jumlah 3.712 orang. Pada Triwulan IV Tahun anggaran Tahun 2019, data sementara menunjukkan bahwa jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih sama dengan tahun 2018 yaitu 3.712 orang .

Fakir Miskin di DIY terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015-2017 menggunakan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 sebanyak 367.540 keluarga miskin dan mengalami peningkatan jumlah fakir miskin di DIY tahun 2018 sebanyak 550.868 keluarga berdasarkan data dari PBDT 2015 yang sudah di update per Mei 2018. Pada Triwulan IV Tahun 2019, dengan menggunakan dari BDT jumlah kemiskinan masih tetap yaitu 550.868. Intervensi terhadap fakir miskin sudah banyak dilakukan melalui perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin yang sudah tidak produktif, dan bagi mereka yang masih

produktif diintervensi melalui pemberdayaan sosial dalam bentuk pelatihan berusaha dan bantuan permodalan.

2.1.3.1.6.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2-51 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY Tahun 2015-2019

No	Jenis PSKS	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	35	35	34	36	36
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	4.534	4.767	4.960	5.020	5.020
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	837	1.034	1.058	1.030	1.030
4	LKS / Orsos	403	370	372	381	381
5	Karang Taruna Desa/Kel	438	438	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	14	12	11	12	12
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	138	163	193	223	223
8	Penyuluh Sosial	5	5	59	53	53
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	78	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	42	42	42	45	45

Sumber: Dinas Sosial DIY 2020

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial. Data PSKS di DIY dari tahun 2015-2019 secara umum mengalami peningkatan karena pembinaan terhadap PSKS terus dilakukan dan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial juga meningkat.

Tabel 2-52 Data PSKS yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Kualitas di DIY Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				Satuan
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PSKS	6.974	7.274	7.349	7.349	Orang
2	PSKS Yang Tertangani	10	8	7	7	Jenis
3	PSKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas	6.974	7.274	7.349	7.349	Orang
4	PSKS Yang Diberikan Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas	2.140	1.940	2.211	2.211	Orang
5	Prosentase PSKS yang memperoleh Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas (%)	30,69	26,67	30,09	30,09	persen

Sumber : Dinas Sosial 2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya PSKS yang mendapatkan bantuan untuk Peningkatan Kapasitas dan Kualitas dari tahun ke tahun. Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas PSKS terlihat meningkat dari tahun 2017 sebanyak 1.940 orang menjadi 2.211 orang di tahun 2018.

2.1.3.1.6.3 Panti sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial apabila dilihat dari aspek lokusnya, lazim dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti dan di luar panti. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-53 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2015 - 2019

No	Nama Balai / Panti	Daya Tampung				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	BRPTD	185	185	185	185	185
2	BRSBKL					

No	Nama Balai / Panti	Daya Tampung				
		2015	2016	2017	2018	2019
	a. Gepeng	50	50	50	50	50
	b. Eks psikotik	100	100	100	250	250
3	BPRSW	50	60	60	60	60
4	BPSTW	214	214	214	214	230
5	BRSPA	140	120	120	140	140
6	BPRSR	100	100	100	80	80

Sumber: Dinas Sosial DIY 2020

Tabel di atas menunjukkan daya tampung di 6 Balai/Panti sosial milik Dinas Sosial DIY. Dalam realitanya masih ada Balai yang menampung lebih dari pada kapasitas yang seharusnya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di Balai/ Panti Sosial terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Kurangnya SDM dimana jumlah pekerja sosial rasionya cukup kecil dalam penanganan klien di antaranya:
 - a. jumlah pramu sosial BRSBKL hanya 13 orang untuk mendampingi 250 eks psikotik, tugas mereka setiap harinya melayani warga binaan sosial eks psikotik. Idealnya 1 pramu sosial mendampingi 10 eks psikotik
 - b. Pekerja Sosial di BRSBKL 6 orang yang harus menangani Gelandangan dan eks psikotik berjumlah total 300 orang.
 - c. Pekerja Sosial di BPRSR 4 orang menangani ABH dan Remaja Terlantar sebanyak 80 orang.
 - d. Pekerja sosial di BRSPA sebanyak 4 orang dan menangani Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus sebanyak 140 anak.
 - e. Pekerja sosial BRTPD 4 orang menangani Penyandang Disabilitas sebanyak 185 orang.
 - f. Pekerja sosial BPRSW 5 orang menangani Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Korban Tindak Kekerasan sebanyak 60 orang.
 - g. Pekerja sosial BPSTW sebanyak 3 orang dan menangani Lanjut Usia Terlantar sebanyak 230 orang.
2. Kondisi bangunan balai mengalami kerusakan ringan dan sedang;
3. Keterbatasan ruang wisma di BPRSW untuk penanganan warga binaan tindak kekerasan yang memiliki anak balita;
4. Klien BRSBKL mengalami kesulitan mendapatkan identitas kependudukan ;
5. Kurangnya peralatan CCTV pada BPRSR guna memantau/mengawasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti, selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat/*nonpemerintah*. Dari data Dinas Sosial tahun 2019, Panti *nonpemerintah* di DIY berjumlah 130 panti, yang terdiri dari Kabupaten Sleman terdapat 46 Panti, Kabupaten Bantul sebanyak 27 Panti, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 25 Panti, Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 17 Panti dan Kota Yogyakarta sebanyak 15 Panti.

2.1.3.1.6.4 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan cenderung lebih sedikit dari pada Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, berikut penghitungan persentase PMKS yang memperoleh bantuan.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan =	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	x
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	100 %

Tabel 2-54 Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2015 - 2019

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan	27.332	22.624	13.278	19.087	19.087	Orang
2	Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	477.683	486.087	484.050	660.627	660.627	Orang
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	5.72	4.65	2.74	2.89	2.89	persen

Sumber : Dinas Sosial 2019, diolah

Berdasarkan penghitungan rumus, dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa terjadi penurunan dari tahun 2015 sebesar 5,72 % menjadi 4,65 % di tahun 2016, dan terdapat trend penurunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Persentase tersebut masih sangat kecil untuk PMKS yang memperoleh bantuan di DIY. Bantuan dari pemerintah tersebut berupa bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), permakanaan, Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Hidup (Jadup).

Data Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan di DIY tahun 2015-2019 yang dimaksud adalah PMKS yang memperoleh bantuan dari APBD dan APBN dari tahun 2015-2019.

2.1.3.1.6.5 Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel data di bawah ini menunjukkan persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Jenis PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar yaitu lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Peran provinsi dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bentuk afirmasi terhadap penyelesaian permasalahan PMKS sesuai kemampuan keuangan daerah. Di samping itu kewenangan pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terhadap PMKS di luar panti merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2-55 Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2016 - 2018

No	Sub Elemen	Tahun			Satuan
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	6.561	75.295	75.295	orang
2	Populasi PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	72.419	75.295	75.295	orang
3	Persentase PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	9,06	7,95	7,95	persen

Sumber : Dinas Sosial DIY 2019

2.1.3.1.6.6 Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya lokal. Tujuan WKSBM yaitu: (1)Meningkatnya kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, (2)Meningkatnya peran aktif masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, dan (3)Terciptanya pelembagaan kesejahteraan sosial oleh kelompok masyarakat secara berkelanjutan di tingkat lokal.



Sumber: Dinas Sosial 2019

Gambar 2-36 Grafik Persentase WKSMB yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2019

Model pelayanan sosial berbasis masyarakat melalui WKSMB sebagai salah satu program pemerintah daerah DIY, dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya PMKS di tingkat lokal wilayah. Model pelayanan ini dengan cara menghimpun potensi daya dan dana masyarakat untuk, oleh, dan dari masyarakat sendiri. WKSMB ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal. Di DIY WKSMB aktif berperan dalam membantu kemajuan masyarakatnya dan aktif menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun mencapai 100 %.

2.1.3.1.6.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Perangkat daerah yang menjadi leading sector penanggulangan bencana di DIY adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, sedangkan untuk bantuan sosial kepada korban bencana adalah Dinas Sosial DIY. Berikut data Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2-56 Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2016 – 2019

Indikator	Tahun				Ket
	2016	2017	2018	2019	
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.050	433	61	2.690	KK
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.050	433	61	2.690	KK
Persentase (%) korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	Persen

Sumber : Dinas Sosial 2019

Jumlah Korban Bencana pada tahun 2019 adalah 2.690 kk, dari jumlah tersebut semuanya atau 100% telah menerima bantuan sosial pada masa tanggap darurat.

2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga menjadi salah satu fokus RPKD tahun 2021. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global, dan dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Berikut ini akan diuraikan kondisi umum pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY.

2.1.3.1.7.1 Urusan Penduduk Usia Kerja (PUK)

International Labor Organization (ILO) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan tenaga kerja menyebabkan terjadinya pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2013–2018, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 2,882 juta orang dan data sementara pada tahun 2019 diperoleh data PUK DIY mencapai 2,987 juta orang.

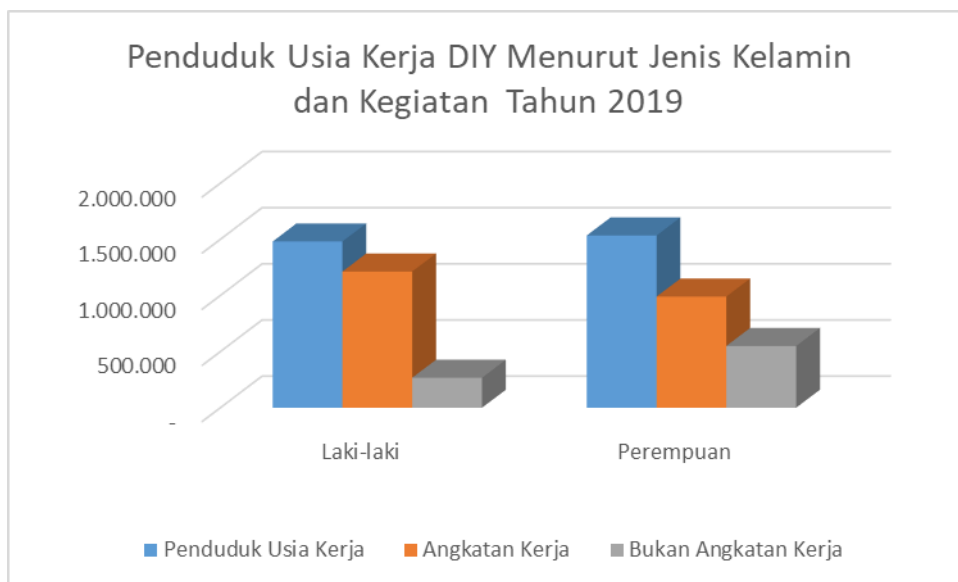
Penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya. Lebih dari 90% dari angkatan kerja tersebut merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30% dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2-57 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2015 – 2019

JENIS KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	2.882,98	2.099,44	2.117,19	2.191,74	2.203,92
- Bekerja	1.891,22	2.042,40	2.053,17	2.118,39	2.134,75
- Penganggur	80,25	57,04	64,02	73,35	69,17
Bukan Angkatan Kerja*)	911,517	807,436	823,03	795,59	817,73
- Sekolah	297,972	264,858	456,92	247,191	265,78
- Rumah Tangga	475,397	400,382	261,08	452,31	453,38
- Lainnya	138,148	142,196	105,03	96,287	98,57
PENDUDUK USIA KERJA	2.882,980	2.904,301	2.939,003	2.987,330	3.021,65
TPAK (Persen)	68,38	71,96	71,52	73,37	72,94
TPT(Persen)	4,07	2,72	3,02	3,35	3,14

Sumber: BPS, Statistik DIY 2020

Ditinjau dari aspek gender, Penduduk Usia Kerja perempuan berjumlah 1,523 juta atau sebesar 51% dari keseluruhan penduduk usia kerja lebih tinggi lebih tinggi dari data jumlah penduduk usia kerja laki-laki yaitu sebanyak 1,463 juta atau 49%.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2019

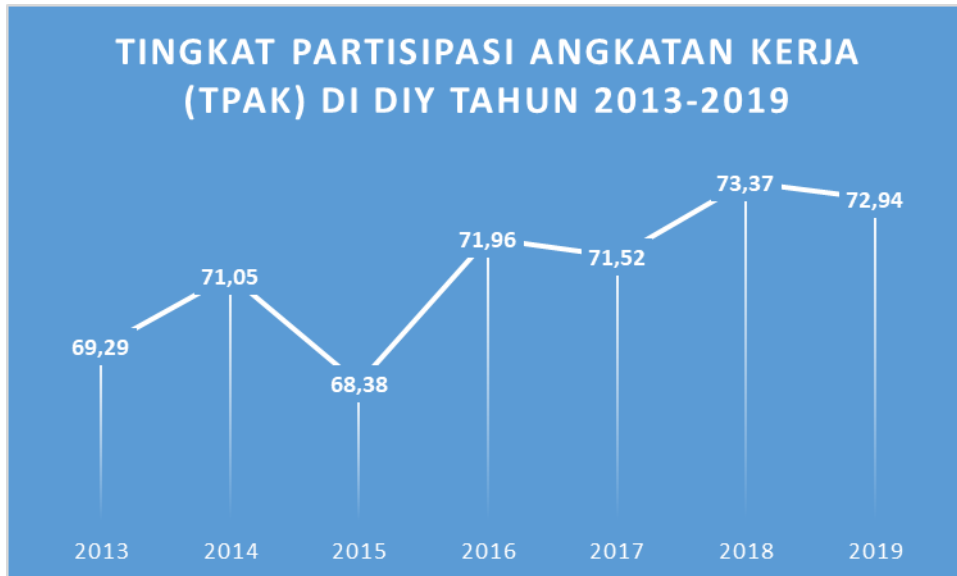
Gambar 2-37 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2019

2.1.3.1.7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dihitung dari persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Manfaat TPAK adalah untuk menghitung potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TPAK DIY pada periode 2013 hingga 2019 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2013, TPAK DIY adalah sebesar 69,29%, TPAK terendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 68,38%. Pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan, dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan . Tahun 2018 TPAK DIY mencapai angka sebesar 73,37%. Angka TPAK sebesar 73,37% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun

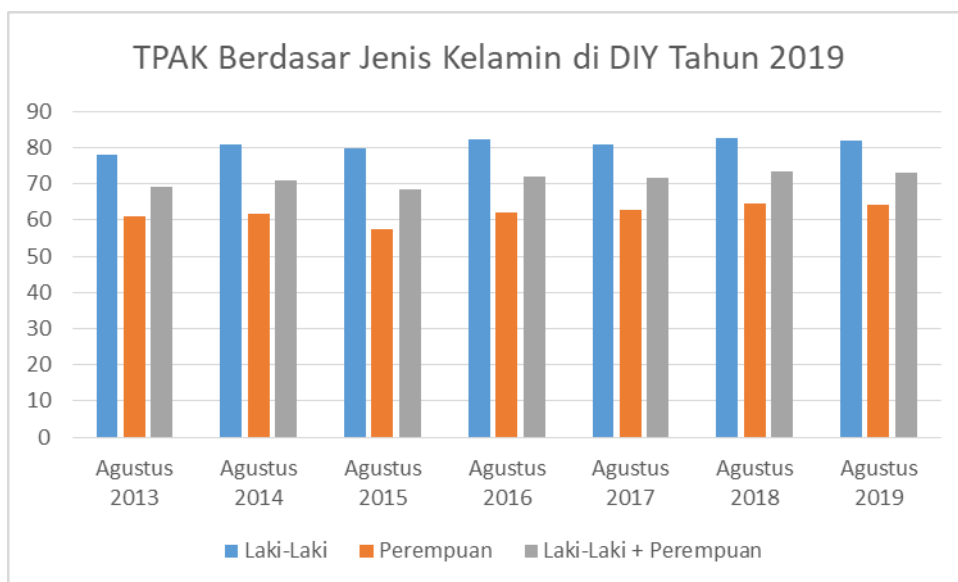
ke atas) 73 orang adalah angkatan kerja. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2017) yaitu 71,52%. TPAK 2019 DIY sampai dengan November 2019, menurun dari tahun 2018 yaitu: 72,94%.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik November 2013 s.d November 2019

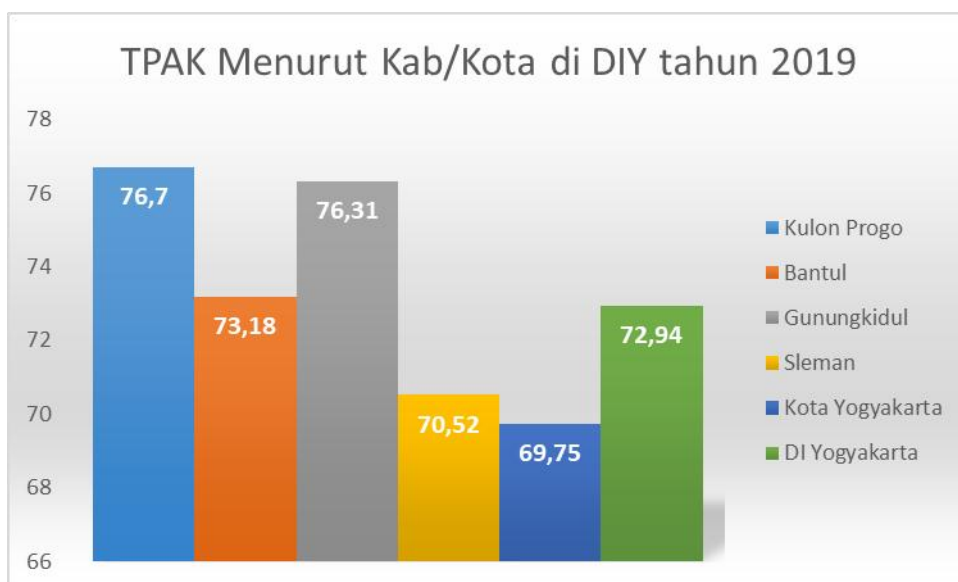
Gambar 2-38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2019

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat kecenderungan TPAK TPAK perempuan lebih rendah dari TPAK laki-laki. Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82%) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-64%). Fenomena ini menunjukkan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian di DIY lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Agustus 2018 mencapai sekitar 82,69%, sementara TPAK perempuan sebesar 64,42%.



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2019, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-39 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2019



Sumber: BRS November 2019, BPS Provinsi DIY

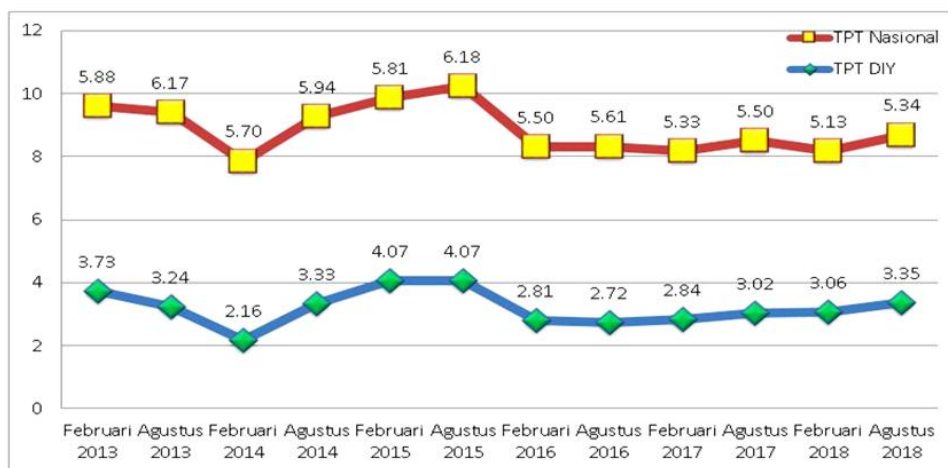
Gambar 2-40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota 2019

TPAK berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa TPAK tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 76,70 persen diikuti masing-masing oleh

Gunungkidul sebesar 76,31 persen, Kabupaten Bantul 73,18 persen, Sleman 70,52 persen dan terendah di Kota Yogyakarta 69,75 persen.

2.1.3.1.7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dari tahun 2015-2018 selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan TPT nasional. TPT didefinisikan sebagai penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada tahun 2015 mencapai 4,07%. Pada tahun 2016 TPT mengalami penurunan cukup drastis yaitu menjadi 2,72 % dan cenderung meningkat pada periode berikutnya hingga mencapai 3,35% pada tahun 2018. Angka ini mengandung pengertian bahwa terdapat sekitar 3 orang penganggur dari 100 angkatan kerja DIY.



Sumber : BRS November 2013 - 2018, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-41 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2018 (%)

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

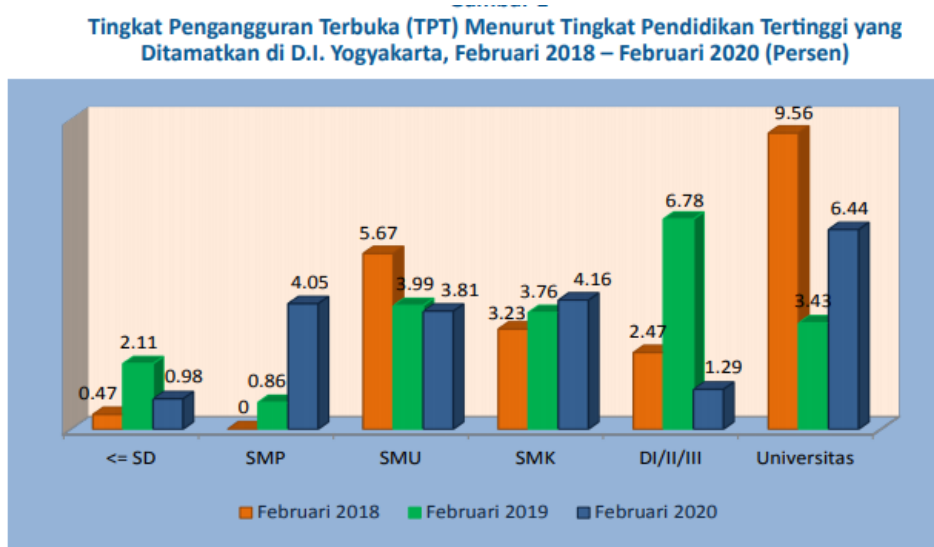
Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari TPT Perempuan. TPT laki-laki sampai dengan akhir Februari 2018 adalah sebesar 2,88 sedangkan TPT perempuan sebesar 3,8. Berdasarkan kelompok

umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, yaitu antara 20-24 tahun.

Tabel 2-58 Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2018

Gol . Umur	Agustus 2014			Agustus 2015			Agustus 2016			Februari 2017			Februari 2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	27,14	13,27	21,59	27,14	13,27	21,59	31,79	0,00	20,53	5,29	4,83	5,10	0,00	10,08	4,24
20-24	9,34	11,22	10,19	9,34	11,22	10,19	12,35	8,37	1,41	6,67	15,81	10,86	12,58	17,85	14,75
25-29	8,30	5,07	6,91	8,30	5,07	6,91	5,39	0,00	3,27	3,93	4,95	4,35	6,61	14,51	9,84
30-34	1,80	2,56	2,11	1,80	2,56	2,11	5,03	1,83	3,64	3,08	0,00	1,82	5,36	0,00	3,21
35-39	1,43	1,17	1,33	1,43	1,17	1,33	3,86	0,00	2,19	1,41	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
40-44	1,06	0,73	0,90	1,06	0,73	0,90	0,00	2,06	0,84	2,69	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
45-49	2,74	0,50	1,75	2,74	0,50	1,75	0,00	1,84	0,82	1,47	1,56	1,51	1,49	,00	0,79
50+	1,28	0,47	0,90	1,16	0,74	0,98	0,00	0,49	0,23	2,09	1,46	1,80	0,00	0,00	0,00
DIY	3,88	2,65	3,33	3,72	4,54	4,07	3,68	1,50	2,72	2,86	2,81	2,84	2,88	3,28	3,06

Sumber :BRS November 2013 - 2018, BPS DIY



Gambar 2-42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Februari 2018-Februari 2020 (%)

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan sesuai pada gambar di atas, TPT tertinggi pada Februari 2020 adalah lulusan tingkat perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. TPT pada tingkat perguruan tinggi sebesar 6,44 persen, diikuti tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 4,16 persen, dan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 4,05 persen. Sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 0,98 persen. Dengan kata lain, ada penawaran kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Perguruan tinggi dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah SD ke bawah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

Tabel 2-59 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Februari 2017- Februari 2019

Tingkat Pendidikan	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018	Agustus 2018	Februari 2019
1 ≤ SD	3,74	1,08	0,47	0,74	0,74
2 SMP	2,05	1,83	0,00	2,10	2,10
3 SMA	9,71	4,39	5,67	2,87	2,87
4 SMK	3,57	4,38	3,23	4,91	4,91
5 Universitas	4,81	4,9	9,56	8,28	8,28

Sumber: BPS Provinsi DIY, BRS Februari 2019 dan Sakernas 2019

TPT tertinggi di D.I. Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 4,80 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 3,93 persen dan Kabupaten Bantul

3,06 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besar wilayah perkotaan pada suatu daerah maka semakin menurunnya penawaran tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran yang disebabkan sulitnya untuk masuk ke lapangan kerja di wilayah perkotaan. Hal ini karena lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan persyaratan tertentu.



Sumber: BPS DIY, BRS November 2019 dan Sakernas 2019

Gambar 2-43 TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019

2.1.3.1.7.4 Hubungan Industrial

Hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu aspek penentu iklim berusaha di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan industrial menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan ketenagakerjaan. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Pengaturan hubungan industrial ini dilakukan untuk mencegah timbulnya dampak buruk akibat perbedaan pendapat atau bahkan konflik dalam hubungan kerja. Sarana Hubungan industrial dilaksanakan melalui Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja, Lembaga Tripartit, Bipartit, Organisasi Pengusaha, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan Peraturan Ketenagakerjaan. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha.

Di DIY, pemahaman dan pelaksanaan hubungan industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering dijumpai adanya masalah perselisihan hubungan industrial. Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial di DIY dapat diamati dari masih sedikitnya perangkat hubungan industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang sudah melapor di Disnakertrans DIY sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-60 Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2019

Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Perangkat Hubungan Industrial			
		WNI	WNA	Kecil < 25 org	Sedang (26-99 org)	Besar (> 100 org)	PP	PKB	SP	Lbg. Tripartit
DIY	-	-	-	-	-	-	40	5	--	--
Kota YK	1.689	67.889	42	1.110	392	187	56	4	120	52
Sleman	1.624	105.750	143	951	449	224	395	20	71	62
Bantul	701	44.138	125	416	216	69	112	6	42	24
Kulon Progo	301	8.694	3	247	51	12	--	--	--	--
Gunung Kidul	295	5.471	1	230	57	8	--	--	--	--
Jumlah	4.619	23.2212	314	2.954	1.165	500	603	35	233	138

Keterangan: PP= Peraturan Perusahaan; PKB= Perjanjian Kerja Bersama; SP= Serikat Pekerja

Sumber: Disnakertrans DIY, 2020

Dari total 4.619 perusahaan yang lapor di Disnakertrans, baru kurang lebih 20,46 persen atau hanya 945 perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan hanya 6,95 persen atau hanya 321 perusahaan yang melaksanakan Perjanjian kerja Bersama. Sedangkan perusahaan yang mempunyai Serikat Pekerja (SP) hanya 422 perusahaan atau hanya 9,14 persen. Sehubungan dengan hal itu perlu adanya pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan baik di tingkat Pemda maupun kabupaten/kota, apalagi dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 tugas pengawas ketenagakerjaan telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi.

2.1.3.1.7.5 Data Pelatihan

Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi sumber daya manusia (SDM) di sektor manufaktur untuk memiliki keahlian yang sesuai

dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, diperlukan pelaksanaan program peningkatan keterampilan (*up-skilling*) atau pembaruan keterampilan (*reskilling*) para tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia industri saat ini.

Di dalam roadmap *Making Indonesia 4.0*, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Talent menjadi kunci atau faktor penting untuk kesuksesan implementasi industri 4.0, salah satunya dengan penguatan sekolah vokasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuat *Grand Design* Pelatihan Vokasi. Pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk tenaga kerja atau pencari kerja mengikuti pelatihan baik di Balai Latihan Kerja (BLK), industri, atau program magang yang diharapkan bisa masuk ke pasar kerja dan berwirausaha.

Namun pada kenyataannya Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini dinilai belum cukup untuk menyiapkan usia kerja menghadapi era revolusi industri 4.0. Saat ini, era industri berbasis teknologi memang sangat penting bagi keberlangsungan usaha agar dapat bersaing secara maksimal. Sampai dengan saat ini BLK belum memiliki program khusus untuk menghadapi era industrialisasi berbasis teknologi. Sehingga dikhawatirkan, tanpa penguasaan teknologi semacam ini, nantinya masyarakat di usia kerja akan kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini di mana Kejuruan atau program pelatihan yang ada di BLK masih belum mengadopsi kebutuhan industrialisasi berbasis teknologi.

Tabel 2-61 Data Jumlah Tenaga Kerja Terlatih dan Jenis Pelatihannya

Kejuruan	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih					Jumlah
	BLKPP DIY	BLK Gunung Kidul	BLK Bantul	BLK Sleman	BLK Kulonprogo	
Otomotif	152	128	176	224	96	766
Teknik Listrik	68	32	64	128	-	292
Aneka Kerajinan	548	-	-	-	-	548
Perhotelan	500	-	-	-	-	500
Tataniaga	120	-	-	-	-	120
Bahasa Asing	56	-	-	-	-	56
Teknologi Mekanik	32	-	-	-	-	32
Elektronika	88	-	-	96	64	248
Teknik Las	64	64	80	64	80	352
Teknik Refrigerasi Komersial	-	32	64	48	80	224
Bangunan	-	48	64	64	132	308
TIK	-	128	96	272	192	688

Kejuruan	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih					Jumlah
	BLKPP DIY	BLK Gunung Kidul	BLK Bantul	BLK Sleman	BLK Kulonprogo	
Garmen	-	128	112	202	80	522
Pengolahan hasil Pertanian	-	48	48	80	192	368
Teknik Ukir Kayu	-	48	-	-	-	48
Bisnis dan Manajemen	-	-	64	32	144	240
Tata Boga	-	-	96	122	64	282
Desain Batik	-	-	16	-	48	64
Teknik Manufaktur	-	-	-	64	16	80
Tata Kecantikan	-	-	-	112	48	160
Kebandarudaraan	-	-	-	-	160	160
Jumlah	1.628	656	880	1.508	1.396	6.068

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan kaum perempuan di DIY telah lama diupayakan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di DIY memperlihatkan upaya pemberdayaan kaum perempuan sudah mulai dilakukan. Oleh karena itu, wajar kiranya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di DIY hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik daripada rata-rata nasional.

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan anak. Terlebih, kedua hal ini menjadi agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian besar karena merupakan bentuk pengejawantahan dari Nawacita, khususnya sub agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat yang berbunyi “melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal”.

Lebih lanjut, pengkajian mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, proporsi kursi perempuan dalam lembaga perwakilan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, dan angka kekerasan terhadap perempuan di DIY.

2.1.3.1.8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi adil yang ingin diwujudkan dalam visi pembangunan nasional ditandai dengan adanya persamaan peranan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Pada tahun 2014, dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM yang selanjutnya mempengaruhi metodologi penghitungan IPG. Perubahan ini membawa konsekuensi perubahan interpretasi angka IPG. Dengan adanya metodologi penghitungan baru, perbandingan angka IPG dengan IPM untuk melihat indikasi tentang adanya kesenjangan gender tidak lagi diperlukan. Hal ini dikarenakan kondisi ideal kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dinilai dengan angka 100. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari jarak antara angka IPG dengan nilai 100.

Pada tahun 2018 IPG DIY berada pada angka 94,73. Ini berarti IPG DIY mengalami kenaikan sebesar 0,34 bila dibandingkan dengan IPG DIY tahun 2017 yang tercatat berada pada angka 94,31. Dengan angka ini, IPG DIY berada pada urutan tertinggi kedua nasional setelah Provinsi Sulawesi Utara yang menempati tempat teratas dan secara konsisten selama kurun waktu 2013-2018 terus berada di atas rata-rata nasional. Hal ini berarti bahwa kapabilitas pembangunan perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak selama kurun waktu tersebut lebih baik dari capaian nasional. Sedangkan IPG DIY pada tahun 2016 menurun pada angka 94,0 dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 94,39. Meskipun secara rata-rata masih tinggi dan di atas IPG Nasional yaitu di angka 90,96 di tahun 2017, namun dapat dinyatakan bahwa DIY masih belum dapat mewujudkan

tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender secara paripurna.

IPG di DIY manakala dilihat per kabupaten/kota menunjukkan capaian antara Kabupaten Gunungkidul tertinggal dengan 4 kabupaten/kota lain di DIY. IPG kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 2013-2018 berada di bawah rata-rata provinsi, atau yang paling kecil capaiannya. Oleh sebab itu, Pemerintah DIY perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Gunungkidul. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat di DIY perlu dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Tabel 2-62 Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY 2013 - 2018

Lokasi	IPG					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Yogyakarta	98,48	99,27	98,78	n/a	98,26	98.48
Sleman	95,50	96,09	96,08	n/a	95,62	96.01
Kulon Progo	94,23	94,65	94,73	n/a	94,93	95.03
Bantul	94,33	94,41	94,42	n/a	94,98	95.11
Gunungkidul	81,76	82,27	83,10	n/a	84,03	84.59
DIY	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39	94.73
Indonesia	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96	90.99

Sumber : Kementerian PP & PA. 2018

2.1.3.1.8.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG di DIY tahun 2019 manakala dilihat per kabupaten/kota menunjukkan kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY, sedangkan tiga kabupaten lain yakni kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul di bawah rata-rata di provinsi.

Tabel 2-63 Capaian IDG DIY Tahun 2015-2019

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sleman	77,61	-	79.51	-	-
Kota Yogyakarta	79,33	-	78.94	-	-
Gunungkidul	64,48	-	68.7	-	-
Kulon Progo	67,26	-	68.42	-	-

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bantul	61,77	-	61,99	-	-
INDONESIA	70,83	71,39	71,74	-	-
D I YOGYAKARTA	68,75	66,96	69,37	69,37*	69,37*

Sumber : Kementerian PP & PA. 2019 diolah

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa ketimpangan IDG terjadi antar daerah. Lokus prioritas intervensi untuk meningkatkan IDG perlu dilakukan di Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta.

Hingga saat ini Pemda DIY telah menyelenggarakan banyak program yang mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Pemda DIY menginisiasi 70 kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan dengan nama Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dilakukan pada tahun 2008-2017. Pengembangan Desa PRIMA merupakan alternatif upaya peningkatan taraf hidup perempuan dengan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari berbagai instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan. Melalui cara ini diharapkan perempuan dari keluarga miskin di DIY dapat menjadi sosok yang lebih mandiri sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikannya dalam keluarga. Selain itu, demi mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, Pemda DIY dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pun telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan di seluruh kecamatan di DIY. Dalam acara tersebut, para peserta pelatihan diberikan materi yang berkaitan dengan strategi pencalonan, strategi kampanye, strategi meraih dan mengawal suara, serta teknik menyusun kebijakan pembangunan yang berkeadilan.

Tabel 2-64 Jumlah Desa Prima Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Desa Prima	4,00	10,00	70,00	85,00	102,00	Desa
1.1	Kota Yogyakarta	0,00	0,00	3,00	4,00	5,00	Desa
1.2	Kab. Bantul	1,00	3,00	14,00	20,00	26,00	Desa
1.3	Kab. Kulon Progo	1,00	2,00	17,00	20,00	24,00	Desa
1.4	Kab. Gunungkidul	2,00	4,00	25,00	26,00	30,00	Desa
1.5	Kab. Sleman	0,00	1,00	11,00	15,00	17,00	Desa

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2020

2.1.3.1.8.3 Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di lingkungan birokrasi diperlukan untuk mengawal pembangunan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY lebih responsif gender. Keterwakilan idealnya bukan hanya pada aparatur di garda terdepan, namun juga pada level pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan pada posisi strategis ini diperlukan agar kaum perempuan dapat menyuarakan aspirasi kaumnya sehingga kebijakan pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DIY dapat mengatasi berbagai permasalahan spesifik gender yang dihadapi oleh warga perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

2.1.3.1.8.4 Proporsi Perempuan Dalam Lembaga Perwakilan

Data anggota legislatif perempuan di DIY maupun Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa wilayah ini belum berhasil mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) yang mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%. Pada Pemilu 2014, proporsi tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terdapat di DPRD Kabupaten Sleman yakni sebesar 26%, disusul DPRD Kota Yogyakarta dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 25%, DPRD Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,50%, DPRD Kabupaten Gunung Kidul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 15,5%, dan DPRD Kabupaten Bantul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 6,67%. Sementara, rata-rata proporsi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY hanya berada pada angka 12,73%. Proporsi tersebut cenderung tetap pada tahun-tahun selanjutnya. Perubahan terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan kenaikan proporsi sehingga mencapai angka 18,42% pada tahun 2016 namun kembali turun pada tahun 2017 dan stagnan pada tahun 2018 di angka 17,50%. di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terjadi perubahan proporsi yaitu masih pada angka 6,82%. Pada Kabupaten Gunungkidul capaian proporsi keterwakilan perempuan pada tahun 2016 berada pada angka 13,33% dan naik di tahun 2017 di angka 15,56% dan pada tahun 2018 stagnan di angka 15,56%. Kenaikan terjadi di DPRD DIY pada tahun 2018, dari angka 12,73% di tahun 2017 meningkat menjadi 14,55% di tahun 2018.

Tabel 2-65 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 - 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	DPRD	TAHUN	JUMLAH		%P
			L	P	
1.	DPRD Kulon Progo	2014	33	7	17,50
		2015	33	7	17,50
		2016	31	7	18,42
		2017	33	7	17,50
		2018	33	7	17,50
2.	DPRD Bantul	2014	42	3	6,67
		2015	42	3	6,67
		2016	42	3	6,67
		2017	41	3	6,82
		2018	41	3	6,82
3.	DPRD Gunungkidul	2014	38	7	15,50
		2015	39	6	13,33
		2016	38	6	13,64
		2017	38	7	15,56
		2018	38	7	15,56
4.	DPRD Sleman	2014	37	13	26,00
		2015	37	13	26,00
		2016	37	13	26,00
		2017	38	12	24,00
		2018	38	12	24,00
5.	DPRD Yogyakarta	2014	30	10	25,00
		2015	30	10	25,00
		2016	30	10	25,00
		2017	31	9	22,50
		2018	31	9	22,50
6	DPRD DIY	2014	48	7	12,73
		2015	48	7	12,73
		2016	48	7	12,73
		2017	48	7	12,73
		2018	47	8	14,55

Sumber: BPPM, 2019

Selain tingkat elektabilitas yang rendah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah masih adanya keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi lebih dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa strategi untuk menumbuhkan kesadaran dan strategi pembelajaran politik bagi warga perempuan di DIY masih diperlukan sehingga selanjutnya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di DIY dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.1.3.1.8.5 Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di DIY semakin memperlihatkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Beberapa sektor ekonomi yang strategis pun kini banyak bertumpu pada peran perempuan. Namun, persoalan gender masih acap kali dijumpai. *Gender stereotype* bahwa laki-laki adalah pencari nafkah yang utama dan bahwa beberapa pekerjaan hanya patut dilakukan oleh laki-laki menyebabkan banyak perempuan bekerja tanpa mendapatkan bayaran dan lebih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja.

Partisipasi perempuan sebagai karyawan dan wirausaha telah menunjukkan geliat yang positif. Bahkan, jumlah perempuan pelaku wirausaha sudah melebihi jumlah wirausaha laki-laki. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa mayoritas pekerja tidak dibayar di DIY adalah perempuan. Kondisi ini berarti Pemerintah Daerah DIY perlu berupaya lebih serius dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan, disamping terus berikhtiar mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

2.1.3.1.8.6 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2017-2019

Hal yang paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah tindak kekerasan berbasis gender. Meskipun tindakan ini sering kali dipakai dengan alasan tindakan pendisiplinan, namun nalar di balik tindakan kekerasan ini sering kali menggambarkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan di DIY masih rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY yang mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama 2018. Hasilnya, terdapat 1.344 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 439 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2018. Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan angka kasus kekerasan pada anak di DIY. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain terus melakukan berbagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi melindungi kaum perempuan berbagai tindak kekerasan, dan Pemda DIY pun perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak agar upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan dapat berjalan secara komprehensif.

Tabel 2-66 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2017-2019

Sub Elemen				Satuan
	2017	2018	2019	
Kulon Progo				
Laki-laki				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	17,00	16,00	23,00	Kasus
18 - 25 Th	1,00	-	1,00	Kasus
25 Th Keatas	2,00	-	0,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	10,00	7,00	12,00	Kasus
Tempat Kerja	4,00	3,00	4,00	Kasus
Lainnya	6,00	6,00	8,00	Kasus
Perempuan				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	19,00	18,00	46,00	Kasus
18 - 25 Th	8,00	24,00	27,00	Kasus
25 Th Keatas	14,00	29,00	28,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	30,00	52,00	76,00	Kasus
Tempat Kerja	2,00	1,00	4,00	Kasus
Lainnya	9,00	18,00	21,00	Kasus
Bantul				
Laki-laki				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	24,00	32,00	49,00	Kasus
18 - 25 Th	4,00	2,00	4,00	Kasus
25 Th Keatas	4,00	5,00	7,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	16,00	23,00	31,00	Kasus
Tempat Kerja	4,00	5,00	13,00	Kasus
Lainnya	-	-	16,00	Kasus
Perempuan				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	30,00	48,00	98,00	Kasus
18 - 25 Th	19,00	20,00	59,00	Kasus
25 Th Keatas	82,00	102,00	157,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	90,00	138,00	233,00	Kasus
Tempat Kerja	7,00	9,00	12,00	Kasus
Lainnya	34,00	23,00	69,00	Kasus
Gunungkidul				
Laki-laki				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	10,00	6,00	3,00	Kasus
18 - 25 Th	2,00	-	0,00	Kasus
25 Th Keatas	2,00	1,00	2,00	Kasus

Sub Elemen				Satuan
	2017	2018	2019	
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	10,00	4,00	4,00	Kasus
Tempat Kerja	3,00	2,00	0,00	Kasus
Lainnya	1,00	1,00	1,00	Kasus
Perempuan				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	17,00	29,00	15,00	Kasus
18 - 25 Th	9,00	1,00	10,00	Kasus
25 Th Keatas	17,00	19,00	20,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	27,00	35,00	40,00	Kasus
Tempat Kerja	6,00	3,00	1,00	Kasus
Laki-laki	10,00	11,00	4,00	Kasus
Sleman				
Laki-laki				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	60,00	56,00	69,00	Kasus
18 - 25 Th	6,00	5,00	1,00	Kasus
25 Th Keatas	14,00	24,00	10,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	43,00	70,00	42,00	Kasus
Tempat Kerja	14,00	8,00	15,00	Kasus
Lainnya	23,00	7,00	23,00	Kasus
Perempuan				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	79,00	138,00	108,00	Kasus
18 - 25 Th	39,00	50,00	124,00	Kasus
25 Th Keatas	155,00	194,00	291,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	211,00	275,00	352,00	Kasus
Tempat Kerja	17,00	64,00	20,00	Kasus
Lainnya	45,00	43,00	151,00	Kasus
Kota Yogyakarta				
Laki-laki				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	20,00	12,00	28,00	Kasus
18 - 25 Th	2,00	1,00	1,00	Kasus
25 Th Keatas	6,00	6,00	8,00	Kasus
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	16,00	10,00	19,00	Kasus
Tempat Kerja	9,00	6,00	12,00	Kasus
Lainnya	2,00	3,00	6,00	Kasus
Perempuan				
Kelompok Umur				
0 - 17 Th	50,00	53,00	55,00	Kasus
18 - 25 Th	79,00	88,00	73,00	Kasus
25 Th Keatas	342,00	299,00	152,00	Kasus

Sub Elemen				Satuan
	2017	2018	2019	
Tempat Kejadian				
Rumah Tangga	275,00	380,00	210,00	Kasus
Tempat Kerja	15,00	22,00	15,00	Kasus
Lainnya	43,00	38,00	55,00	Kasus

Sumber Data : BPPSD Bappeda DIY

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak dilakukan oleh laki-laki dan pelaku tersebut merupakan orang-orang terdekat dari korban. Pada Tahun 2017, jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 258 dilakukan oleh laki-laki dan 34 dilakukan oleh perempuan. Dari 258 pelaku tersebut, sebanyak 158 pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, baik orang tua, keluarga atau pasangan menikah.

Tabel 2-67 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Lokasi pada Tahun 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	2017					
			PELAKU					
			Pekerjaan		Hubungan dengan Korban			
			Tdk Bekerj a	Bekerj a	Oran g Tua	Keluar ga	Suami/ Istri	Lainn ya
1.	Kulonprogo	Laki-laki	1	3	1	0	1	2
		Perempuan	0	0	0	0	0	0
2.	Bantul	Laki-laki	12	27	2	0	19	18
		Perempuan	0	1	0	0	0	1
3.	Gunungkidul	Laki-laki	1	12	0	0	8	5
		Perempuan	3	0	0	0	0	3
4.	Sleman	Laki-laki	11	26	1	1	12	23
		Perempuan	1	2	1	1	1	0
5.	Yogyakarta	Laki-laki	5	27	2	1	20	9
		Perempuan	2	2	0	0	0	4
6	Provinsi	Laki-laki	16	117	11	2	77	43
		Perempuan	11	12	8	0	9	6
Jumlah		Laki-laki	46	212	17	4	137	100
		Perempuan	17	17	9	1	10	14
		Total	63	229	26	5	147	114

Sumber Data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, 2018

2.1.3.1.9 Urusan Pangan

Kondisi Umum

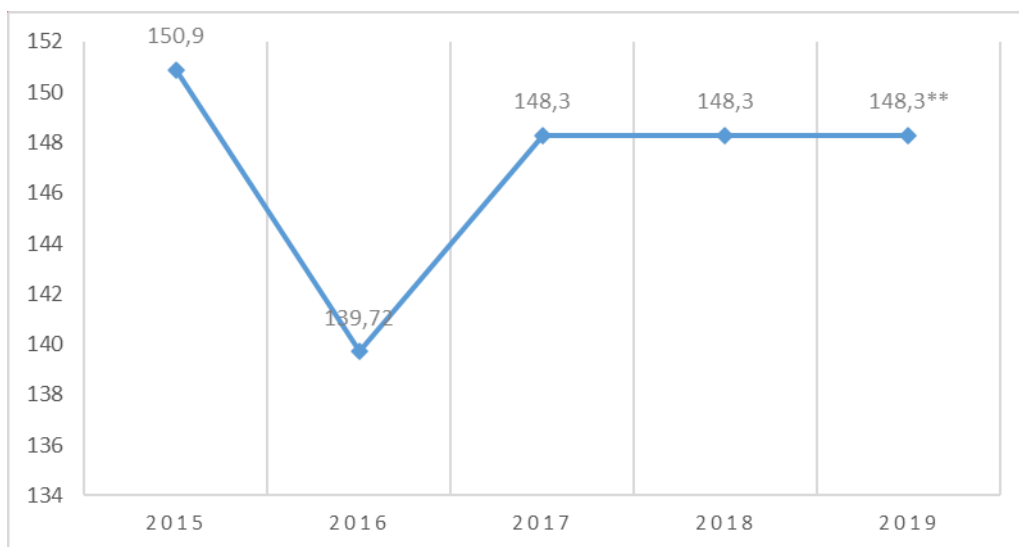
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pangan meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memastikan terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat empat jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, panganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2.1.3.1.9.1 Ketersediaan Pangan

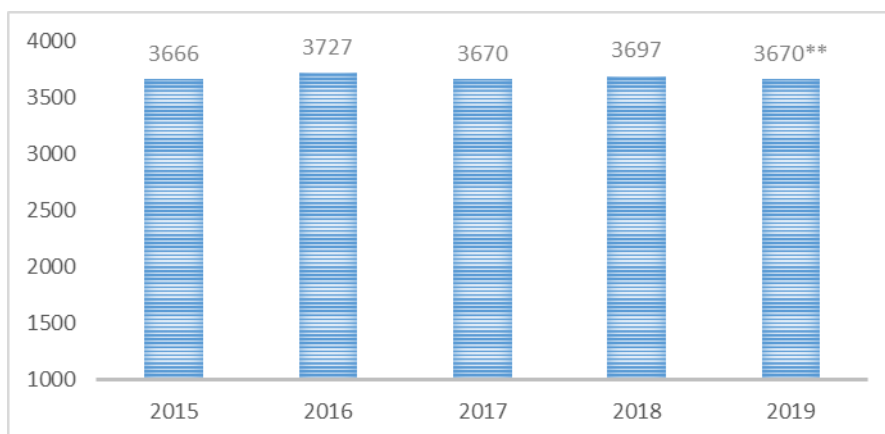
Tingkat ketersediaan pangan hingga tiap individu pada suatu wilayah diketahui melalui indikator ketersediaan pangan perkapita. Sedangkan ketersediaan pangan per kapita diperoleh dari ketersediaan bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan pangan perkapita tahun 2019 (angka sangat sementara) sebesar 148,3 kal/kap/hari, sama dengan pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan dalam periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sebesar 0,32%. Hal ini diduga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang kurang diimbangi dengan penyediaan pangan produksi dalam daerah.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

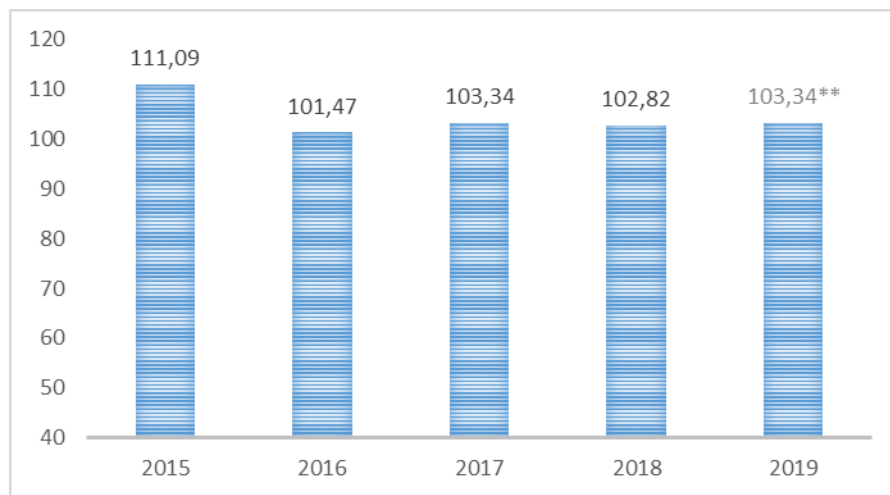
Gambar 2-44 Grafik Jumlah Ketersediaan Pangan Perkapita di DIY Tahun 2015-2019

Persyaratan standar ketersediaan pangan yang ditetapkan oleh FAO terdiri dari ketersediaan energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari. Adapun ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2019 sebesar 3.670 KKal/kapita/hari. Sedangkan untuk protein ketersediannya sudah mencapai 103,34 gram/kapita/hari. Mengacu pada hal tersebut, maka ketersediaan energi dan protein DIY dapat dikatakan telah jauh melebihi standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

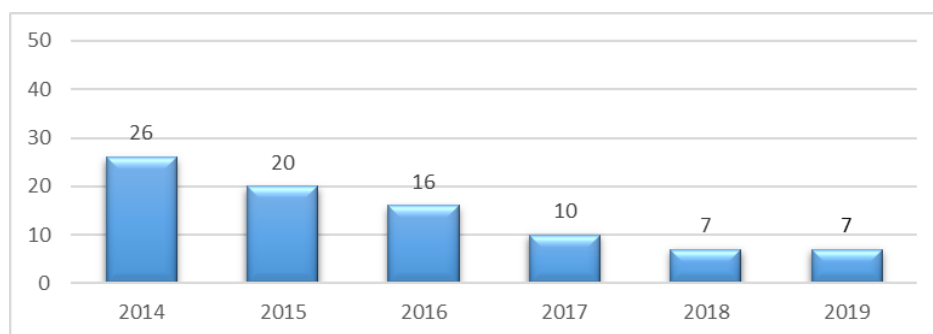
Gambar 2-45 Grafik Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-46 Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2015-2019

Tingkat kerawanan pangan pada tingkat desa dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 20 desa pada tahun 2015, menjadi 7 desa rawan pangan pada tahun 2019. Desa rawan pangan di DIY sebagian besar disebabkan oleh aspek akses pangan yang terkait erat dengan kemiskinan. Desa-desanya rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 2 desa (Trimurti dan Guwosari), Kabupaten Kulon Progo 3 desa (Kalirejo, Banjarsari, dan Kebonharjo), dan Kabupaten Gunungkidul 2 desa (Tegalrejo dan Watugajah). Berbagai intervensi kegiatan telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan, diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan keuangan desa, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

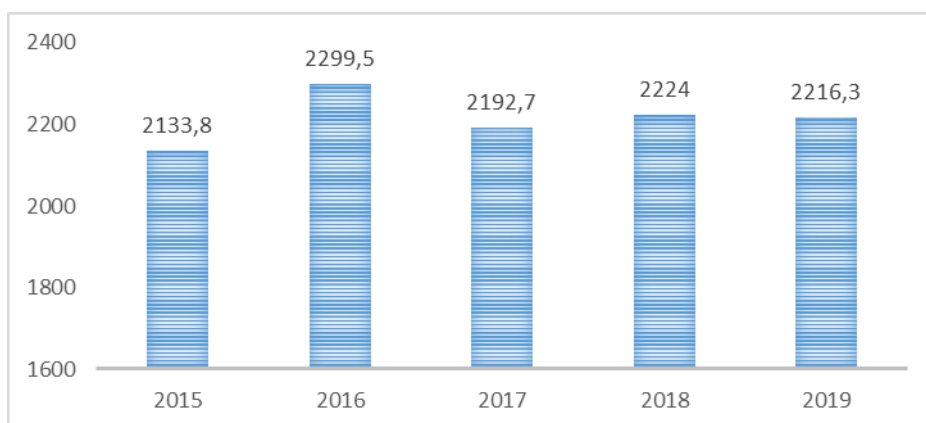
Gambar 2-47 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2014-2019

2.1.3.1.9.2 Distribusi Pangan

Distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat sudah dilaksanakan secara baik di DIY. Pasokan bahan pangan juga terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dilaksanakan melalui fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat untuk wilayah yang surplus bahan pangan serta Lembaga Akses Pangan Masyarakat untuk daerah rawan pangan. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar dilakukan melalui koordinasi dengan OPD terkait bersama BULOG. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mendukung stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

2.1.3.1.9.3 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

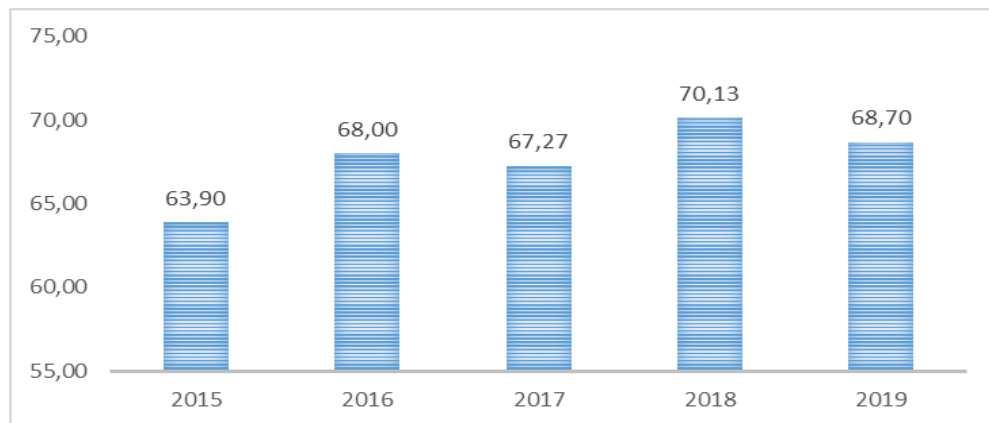
Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Pada tahun 2019, tercatat jumlah konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.216,30 Kkal/kapita/hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi energi di DIY telah melampaui standar yang ditetapkan. Meskipun angka tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2299,5 Kkal/kapita/hari, namun konsumsi energi penduduk DIY dapat dikatakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-48 Grafik Jumlah Perkembangan Konsumsi Enerdi Penduduk DIY Tahun 2015-2019

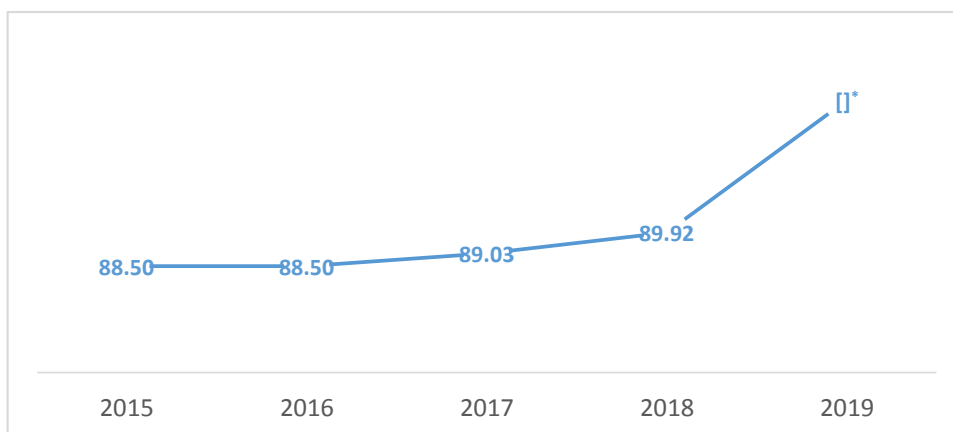
Angka Kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari. Nilai konsumsi protein penduduk DIY selama lima tahun terakhir telah melampaui standar dan relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk DIY dalam mengkonsumsi sumber protein seperti daging, telur, susu juga terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat pula diasumsikan bahwa daya beli masyarakat meningkat.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-49 Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY Tahun 2015-2019

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan tingkat dan kualitas konsumsi pangan suatu daerah. Pada tahun 2019, skor PPH DIY berada pada angka 95,50 (angka sementara). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan yang berada di bawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-50 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2015-2019

Tingkat konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian, diikuti dengan kelompok pangan hewani. Meskipun skor PPH kelompok pangan sayur dan buah sudah terbilang cukup tinggi, namun ternyata masih jauh di bawah standar yang ditentukan. Selain itu, konsumsi pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah/biji berminyak juga tercatat kurang dari jumlah yang dianjurkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam rangka penganekaragaman pangan, terutama berbasis sumberdaya pangan lokal DIY.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek keamanan pangan. Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Permasalahan terkait keamanan pangan disebabkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

2.1.3.1.10 Urusan Pertanahan

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah Otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY

juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Urusan pertanahan di DIY bersifat khusus karena merupakan daerah bekas Swapraja. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggaduhuh (atau anggaduhuh) melalui serat kekancingan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang Pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam UU No 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 urusan Pertanahan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau

untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedang yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Sampai dengan tahun 2019 pada posisi bulan Januari, jumlah total bidang tanah SG, PAG hasil inventarisasi sebanyak 13.944 bidang tanah, yang telah didaftarkan sebanyak 7928 bidang dan yang telah terbit sertifikatnya sebanyak 3177 bidang. Sedang yang belum terbit sertifikatnya sebanyak 4751 bidang. Adapun untuk proses pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten dirinci seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2-68 Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten s.d Tahun 2019

N O	KAB/	INVENTARISASI			PENDAFTARAN							TERBIT SERTIFIKAT							BELUM TERBIT SERTIFIKAT							Belum Terbit Sertifikat Diperbandingkan Dengan Hasil Inventarisasi	K e t
	KOTA	SG	P A G	JM L B I D	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	JM L	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	JM L	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	JM L		
		BID	B I D																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (6-13)	21 (7-14)	22 (8-15)	23 (9-16)	24 (10-17)	25 (11-18)	26	27 (5-19)	28
1	Yogya	338	68	406	45	166	75	50	70	50	456	45	116	72	50	45	0	328	0	50	3	0	25	50	128	78	
2	Bantul	3432	0	3432	0	171	1367	300	350	359	2547	0	168	1313	151	0	0	1632	0	3	54	149	350	359	915	1800	
3	Kulon Progo	1286	288	1574	0	216	176	240	350	400	1382	0	215	2	0	0	0	217	0	1	174	240	350	400	1165	1357	
4	Gunungkidul	4046	0	4046	0	54	300	300	250	750	1654	0	54	300	300	0	0	654	0	0	0	0	250	750	1000	3392	
5	Sleman	4486	0	4486	0	137	252	250	250	1000	1889	0	93	89	164	0	0	346	0	44	163	86	250	1000	1543	4140	
	Jumlah	13588	356	13944	45	744	2170	1140	1270	2559	7928	45	646	1776	665	45	0	3177	0	98	394	475	1225	2559	4751	10767	

2.1.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Pemerintah Daerah DIY dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 untuk urusan lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari 3 indeks yaitu:

$$\text{IKLH Provinsi} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

1. Indeks Kualitas Air (IKA), berupa hasil pengukuran kualitas air di 10 sungai untuk 7 parameter yaitu DO, TSS, BOD, COD, Total *Fosfat*, *Fecal Coli* dan Total *Coliform*. Sungai yang menjadi lokasi pengukuran yaitu S. Winongo, S. Code, S. Gajah Wong, S. Tambakbayan, S. Kuning, S. Konteng, S. Bedog, S. Beli, S. Bulus, dan S. Oyo.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), berupa hasil pengukuran kualitas udara pada kawasan transportasi, industri, perkantoran/komersial, dan permukiman untuk 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), berupa hasil pengukuran luas tutupan lahan berupa hutan dan vegetasi.

2.1.3.1.11.1 Indeks Kualitas Air

IKA didapatkan melalui pengukuran 7 parameter kualitas air yang dilakukan 3 kali dalam setahun yaitu bulan Februari mewakili musim hujan, bulan Mei mewakili perubahan dua musim dan bulan Agustus mewakili musim kemarau. Dalam tiap periode pengukuran diambil sampel di 50 titik sehingga data yang ada sebanyak 150 titik.

Tabel 2-69 Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai di DIY tahun 2018

Nama Sungai	Nilai IKA					
	2016	2017	2018	Feb 2018 (Hujan)	Mei 2018 (Peralihan)	Agu 2018 (Kemarau)
Winongo	32,50	33,33	37,50	32,50	35,00	45,00
Code	35,83	33,33	41,67	35,00	45,00	45,00
Gajahwong	33,33	31,67	38,33	30,00	37,50	47,50
Tambakbayan	31,67	40,00	35	30,00	30,00	45,00
Kuning	33,33	33,33	36,67	30,00	40,00	40,00
Konteng	31,67	36,67	43,33	40,00	45,00	45,00
Bedog	27,33	31,33	43,33	38,00	46,00	46,00
Belik	14,44	27,78	43,33	36,66	43,33	50,00
Bulus	23,33	43,33	50,00	50,00	50,00	50,00
Oyo	28,33	28,33	33,33	30,00	35,00	35,00
Rerata	29,18	33,91	40,25	35,22	40,68	44,85

Sumber: Laporan IKLH DIY tahun 2018

Dari pemantauan 10 sungai di DIY, IKA semakin meningkat dari sebesar 29,18 pada tahun 2016 menjadi 33,91 pada tahun 2018 dan 40,25 pada tahun

2018. Hasil pemantauan tahun 2018 periode Februari, Mei dan Agustus tahun 2018, dapat dilihat bahwa indeks kualitas air terus mengalami kenaikan dari musim hujan (Februari) menuju musim peralihan (Mei) dan musim kemarau (Agustus). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya kadar parameter pencemar air sungai dari point source dan non point source.

2.1.3.1.11.2 Indeks Kualitas Udara

IKU didapatkan melalui pengukuran 2 parameter kualitas udara (SO₂ dan NO₂) dengan menggunakan metode Passive Sampler dengan titik pemantauan di kawasan transportasi, industri, perkantoran/komersial, dan permukiman. SO₂ bersumber dari emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan sulfur, sedangkan NO₂ bersumber dari emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.

Tabel 2-70 Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY tahun 2018

No	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
			Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
			µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³
1	KULON PROGO (3401)	Transportasi	17,90	15,00	<2,57	3,09
		Industri	8,10	5,10	<2,57	4,03
		Pemukiman	8,40	7,50	<2,57	3,32
		Perkantoran/ Komersial	9,80	9,40	<2,57	5,57
2	BANTUL (3402)	Transportasi	17,90	15,40	7,71	11,07
		Industri	27,40	23,30	5,72	9,09
		Pemukiman	11,30	9,30	5,14	4,01
		Perkantoran/ Komersial	11,30	12,90	<2,57	5,63
3	GUNUNG KIDUL (3403)	Transportasi	11,00	8,40	33,39	13,47
		Industri	11,40	2,20	<2,57	13,06
		Pemukiman	7,30	8,90	22,29	8,06
		Perkantoran/ Komersial	11,10	3,40	10,70	8,97
4	SLEMAN (3404)	Transportasi	21,40	25,30	12,85	9,02
		Industri	12,00	9,20	38,69	13,58
		Pemukiman	14,10	12,20	<2,57	7,14
		Perkantoran/ Komersial	8,00	9,70	3,02	11,68
5	KOTA Yogyakarta (3471)	Transportasi	21,00	23,40	4,86	3,86
		Industri	20,50	25,60	4,38	4,06
		Pemukiman	21,30	24,20	11,56	10,60
		Perkantoran/ Komersial	22,80	17,90	<2,57	3,24
		Rata - rata	14.06		8.32	

Berdasarkan pemantauan kualitas udara passive sampler, diperoleh kadar NO₂ sebesar 14,06 µg/Nm³ (Baku Mutu 40 µg/Nm³) dan kadar SO₂ sebesar 8,32 µg/Nm³ (Baku Mutu 20 µg/Nm³). Selanjutnya melalui konversi diperoleh IKU DIY tahun 2018 sebesar 84,24 tidak mencapai target tahun 2018

sebesar 87,06 dan menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 88,08. Penurunan IKU ini dapat disebabkan kenaikan emisi dari transportasi dan industri serta belum optimalnya penyerapan emisi melalui peningkatan tutupan vegetasi. Kenaikan emisi kendaraan bermotor dapat disebabkan kurangnya pemeliharaan rutin mesin serta penggunaan bahan bakar beroktan rendah mengandung timbal yang menghasilkan pembakaran tidak sempurna dan emisi NO₂ lebih tinggi. Kenaikan emisi industri dapat disebabkan belum optimalnya penerapan teknologi untuk mengurangi serta jenis bahan bakar yang kurang baik kualitasnya.

2.1.3.1.11.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

IKTL didapatkan dari perhitungan tutupan vegetasi dibandingkan dengan luas wilayah administrasi. Jenis tutupan vegetasi yang dapat dihitung adalah hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak, ruang terbuka hijau perkotaan dan taman keanekaragaman hayati, dengan melalui konversi untuk jenis tutupan vegetasi selain hutan.

Rumus perhitungan IKTL adalah :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Angka 84,3 adalah nilai konstanta yang merupakan persentase luasan tutupan vegetasi ideal.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2018 adalah sebesar 60,68 melebihi target dalam RPJMD 55,5. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Data tutupan vegetasi di DIY, sebagai berikut:

Tabel 2-71 Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversinya

Jenis tutupan vegetasi	Luas (Ha)	Faktor konversi	Hasil Konversi
Hutan Negara	19.133,89	1	19.133,89
Hutan Rakyat	78.400,27	1	78.400,27
Perkebunan	64.491,91	0,4	25.796,76
Pertanian lahan kering	38.620,00	0,1	3.862,00
Kebun campuran	162,00	0,4	64,80
Semak dan RTH	9.818,78	0,6	5.891,27
Taman Kehati	16,80	0,6	10,08
JUMLAH	210.643,65		133.159,072
LUAS DIY	318.600,00		

Sumber data : BLH DIY dan Dishutbun DIY tahun 2019

2.1.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hasil kinerja pada urusan tersebut menjadi dasar untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan.

Selama periode 2014-2018, cakupan perekaman penduduk KTP-EL di DIY sudah baik dimana capaiannya di atas 90% dan lebih tinggi dibanding cakupan nasional.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.763.181 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.616.568 orang. Sementara itu, jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.728.559 orang atau sebesar 98,75%

Tabel 2-72 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Jumlah Penduduk yang telah Melakukan Perekaman KTP EL di DIY, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2014	3.551.679	2.598.163	2.464.342	94,85%
2015	3.595.256	2.785.718	2.569.245	92,23%
2016	3.587.758	2.717.385	2.640.612	97,17%
2017	3.606.111	2.754.232	2.695.705	97,88%
2018	3.616.568	2.763.181	2.728.559	98,75%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019

Pada tahun 2018, dari jumlah anak usia di bawah 18 tahun di DIY sebanyak 856.464 anak memiliki akta dan sebanyak 58.442 anak belum memiliki akta. Jumlah anak yang tidak berakta sebagian besar berada di Kabupaten Sleman (28.050 anak) diikuti Kabupaten Gunungkidul (14.330 anak), Kabupaten Bantul (8.293 anak), Kota Yogyakarta (5.532 anak), dan Kabupaten Kulon Progo (2.237 anak). Penyebab dari masalah tidak memiliki akta antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2-73 Jumlah Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak (usia di bawah 18 Tahun)	Memiliki Akta		Belum Memiliki Akta	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Kulon Progo	110.567	108.330	97,98	2.237	2,02
Bantul	238.968	230.675	96,53	8.293	3,47
Gunungkidul	176.079	161.749	91,86	14.330	8,14

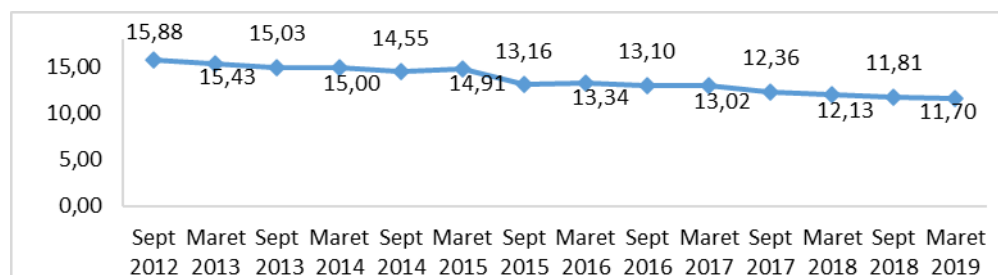
Kabupaten/Kota	Jumlah Anak (usia di bawah 18 Tahun)	Memiliki Akta		Belum Memiliki Akta	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Sleman	274.549	246.499	89,78	28.050	10,22
Kota Yogyakarta	114.743	109.211	95,18	5.532	4,82
Total	914.906	856.464	93,61	58.442	6,39

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019

2.1.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga menjadi kewajiban pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat di DIY dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pertama adalah masih tingginya angka kemiskinan di DIY, yang bahkan berada di atas rata-rata nasional. Selama periode September 2012 sampai dengan Maret 2019, persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta berkurang dari 15,88 persen menjadi 11,70 persen.



Gambar 2-51 Persentase penduduk Miskin di DIY, September 2012- Maret 2019

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 298,74 ribu orang atau lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 142,15 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, angkanya mencapai 13,67. Adapun persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,62 persen.

Tabel 2-74 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2017-September 2019

**Tabel 3.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Tipe Daerah, September 2018 - September 2019**

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
<u>Perkotaan</u>		
September 2018	298,47	10,73
Maret 2019	304,66	10,89
September 2019	298,74	10,62
<u>Perdesaan</u>		
September 2018	151,78	14,71
Maret 2019	143,81	13,89
September 2019	142,15	13,67
<u>Kota+Desa</u>		
September 2018	450,25	11,81
Maret 2019	448,47	11,70
September 2019	440,89	11,44

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Masalah selanjutnya terkait pemberdayaan masyarakat yang harus dihadapi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program karena pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

2.1.3.1.13.1 Lembaga pemberdayaan masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah tergambar melalui jumlah LPM aktif di masyarakat.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pemda DIY melibatkan LPM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya kegiatan revitalisasi *Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta* (Segoro Amarto) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan Revitalisasi *Segoro Amarto* dilakukan sejak tahun 2018 di enam kelurahan di Kota Yogyakarta (Gedongkiwo, Terban, Prenggan, Pandeyan, Prawirodirjan, Pringgokusuman) dengan konsep community development penguatan kegotongroyongan melalui usaha ekonomi berbasis komunitas. Sedangkan peran LPM dalam kegiatan fasilitasi TMMD adalah dengan pembelanjaan bantuan hibah Pemda DIY dalam wujud bahan material untuk pembangunan fisik melalui program TMMD.

2.1.3.1.13.2 Posyandu aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masuk dalam ranah pemberdayaan masyarakat karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan diprakarsai oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2-75 Posyandu Aktif di DIY Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Mandiri	Purnama	Madya	Pratama	Total	Posyandu aktif (strata Mandiri dan Purnama)	Persentase
1	Kota Yogyakarta	78	43	455	47	623	121	19,42
2	Kabupaten Bantul	390	523	188	40	1141	913	80,02
3	Kabupaten Sleman	648	608	183	53	1492	1256	84,18
4	Kabupaten Kulon Progo	604	226	110	22	962	830	86,28
5	Kabupaten Gunungkidul	660	586	221	0	1467	1246	84,94

Sumber: BPPM DIY, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Posyandu yang aktif di DIY rata-rata cukup tinggi, di atas 80%. Persentase posyandu aktif paling tinggi di

Kabupaten Kulon Progo dengan angka 86,28%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sedangkan persentase posyandu aktif paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu pada angka 19,42%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Kota Yogyakarta agar meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif Posyandu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

2.1.3.1.13.3 PKK Aktif

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Gerakan PKK merupakan sebuah gerakan yang memberdayakan perempuan sebagai kekuatan penggerak keluarga. Gerakan ini dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan. TP PKK pada level daerah diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah.

Cakupan PKK aktif di DIY sejak tahun 2016 menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-76 Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Yogyakarta	60	60	100
Bantul	93	93	100
Kulonprogo	101	101	100
Gunungkidul	163	163	100
Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber: BPPM pada Dataku, 2018

Gerakan PKK menjangkau keluarga melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10–20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina sepuluh rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini selanjutnya disampaikan kepada kelompok PKK setingkat di atasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

2.1.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan harus meletakkan penduduk sebagai target dan juga sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

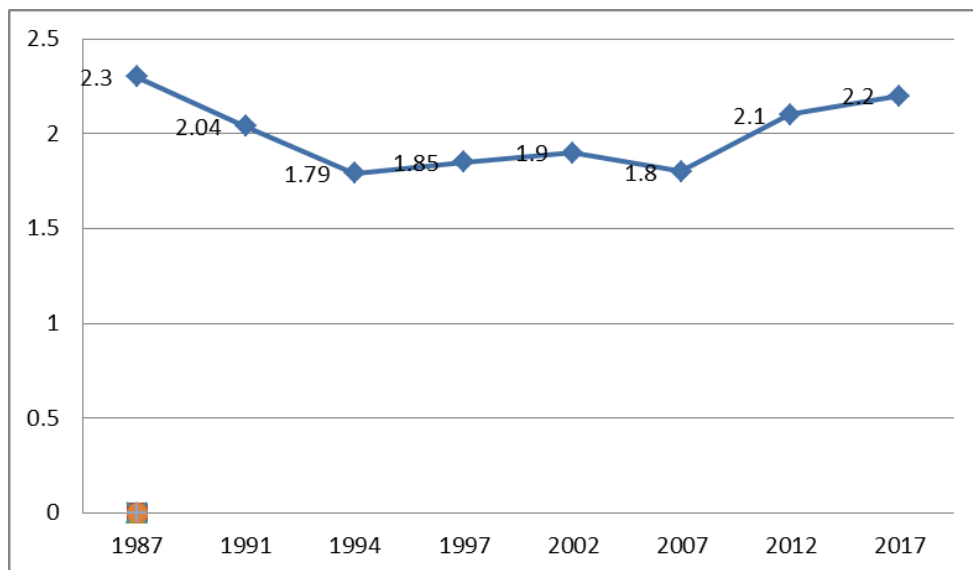
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, sebagai turunan UU No 52/2009, pasal 5 menyebutkan bahwa arah kebijakan nasional perkembangan kependudukan mencakup 4 hal pokok, yaitu (a) menjamin tercapainya bonus demografi, (b) meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi, (c) memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga, dan (d) memperkuat gotong royong berbasis keluarga. Diantara keempat hal tersebut, dua diantaranya terkait dengan bonus demografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perpres No 153 Tahun 2014 tentang *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan sebagai turunan dari UU No 52 Tahun 2009, kebijakan kependudukan dibagi menjadi 5 (lima) kluster, yaitu :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan pengendalian kuantitas penduduk, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB dan unmet need.

2.1.3.1.14.1 Angka Fertilisasi dan *Total Fertility Rate*

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan pencapaian angka kelahiran yang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2017. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Angka TFR 2,2 dipandang oleh ahli kependudukan masih dalam kategori on track dalam menuju penduduk tumbuh seimbang, tetapi perlu intervensi agar angka TFR tidak terus meningkat dan menyebabkan deviasi terhadap target RPJMD DIY untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dengan TFR 2,1.



Sumber: SDKI 1987-2017

Gambar 2-52 Perubahan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

2.1.3.1.14.2 Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1 persen dari total keseluruhan penduduk dan

diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6 persen pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6 persen akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

Tabel 2-77 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Penduduk						
Laki-laki	1710,9	1818,8	1921,6	2013,2	2090,7	2153,8
Perempuan	1756,6	1860,4	1960,7	2051,4	2129,5	2194,7
Total	3467,5	3679,2	3882,3	4064,6	4220,2	4348,5
Komposisi Umur						
0-14	22,1	21,8	21,5	20,9	19,8	18,6
15-64	68,6	69,0	68,7	68,1	67,7	67,4
65+	9,3	9,2	9,8	11,0	12,5	14,0
DR	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4
Fertilitas						
TFR	1,91	1,87	1,82	1,75	1,69	1,62
GRR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
NRR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
CBR	15,2	14,7	13,9	12,8	12	11,4
Jumlah Kelahiran (000)	52,6	53,9	54	52,1	50,5	49,7
Mortalitas						
e0 Laki-laki	72,4	72,9	73,2	73,5	73,6	73,7
e0 Perempuan	76,1	76,5	76,8	77,2	77,2	77,3
e0 L + P	74,2	74,6	75	75,2	75,4	75,5
IMR Laki-laki	16,2	14,8	13,8	13,3	13	12,7
IMR Perempuan	11	10,4	9,9	9,6	9,5	9,4
IMR L+P	13,7	12,7	11,9	11,5	11,2	11,1
CDR	8	7,9	8	8,3	8,8	9,6
Jumlah Kematian	27,7	29	30,9	33,6	37,2	41,7
Migrasi						
Net Migration Rate	4,7	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa angka ketergantungan atau dependency ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015 tetapi diproyeksikan meningkat hingga tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan ini disebabkan karena peningkatan

penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

2.1.3.1.14.3 *Unmet Need*

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KBnya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, mereka memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan *unmet need* DIY tahun 2016. Pada tahun 2016 *unmet need* DIY adalah 8,01 persen. Kemudian pada tahun 2017 *unmet need* DIY tercatat 10,08 persen. Meningkatnya capaian *unmet need* DIY menandakan semakin menurunnya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin sulitnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi di DIY. Untuk itu, masih dibutuhkan upaya ekstra keras dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi DIY. Hal ini karena *unmet need* berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi tidak aman.

Tabel 2-78 *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019

Lokasi	<i>Unmet Need</i>				
	2015	2016	2017	2018	2019
DIY	7,73	8,01	10,08	9,94	10,01
Kulon Progo	7,16	6,84	13,32	10,25	9,42
Bantul	5,72	5,87	8,42	9,76	10,55
Gunungkidul	8,27	7,93	8,43	8,80	9,48
Sleman	8,68	9,73	10,64	9,50	9,04
Kota Yogyakarta	10,39	11,40	13,72	15,14	14,15

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY Tahun 2020

2.1.3.1.14.4 Ketahanan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencari jalan penyelesaian banyak masalah di dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, keluarga memberi corak pada masyarakat dan di dalamnya dikembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Baik buruknya SDM dan juga masyarakat, ikut ditentukan oleh bagaimana keluarga. Keluarga juga merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan anggotanya dan masyarakatnya. Keluarga juga merupakan wahana utama untuk penyelesaian banyak masalah yang dialami oleh individu.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam lingkungan, masyarakat dan bangsa. Di Indonesia, pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Ketahanan Keluarga menjadi salah satu sub-urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyelenggarakannya. ketahanan keluarga perlu ditingkatkan di dalam pembangunan keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan menuju terciptanya keluarga yang sejahtera dan tantangan era globalisasi.

Dalam hal ketahanan keluarga, hal yang menjadi permasalahan utama adalah perceraian. Perceraian pasangan menikah akan memberikan dampak baik bagi pasangan tersebut, anak, maupun dampak sosial di masyarakat. Tabel berikut menunjukkan bahwa angka perceraian di DIY masih sangat tinggi. Meskipun data perceraian tahun 2014 – 2017 menunjukkan tren penurunan di masing-masing kabupaten/kota (kecuali Bantul), namun penurunan tersebut belum signifikan dan masih sangat tinggi.

Tabel 2-79 Angka Perceraian di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

No.	Kab/Kota	2014		2016		2017		2018		Trend
		PA	PN	PA	PN	PA	PN	PA	PA	
1	Kulon progo	611	10	582	11	514	25	602	12	Turun
2	Bantul	1381	41	1240	-	1279	43	1423	39	Naik

No.	Kab/Kota	2014		2016		2017		2018		Trend
		PA	PN	PA	PN	PA	PN	PA	PA	
3	Gunung kidul	1557	27	1447	24	1303	33	1254	28	Turun
4	Sleman	1389	91	1360	119	1516	-	1267	132	Turun
5	Yogyakarta	660	33	592	87	548	80	564	72	Turun
6	D I Yogyakarta	5589	202	5221	241	5160	181	5110	283	Turun

Sumber : BPPM DIY, 2019

2.1.3.1.14.5 Perkawinan Usia Anak

Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.

Perkawinan usia anak merupakan masalah serius di mana akan berujung pada kehamilan anak, yang selanjutnya, anak akan melahirkan anak. Kehamilan atau persalinan pada usia sangat dini akan berisiko si ibu mempunyai anak terlalu banyak dan jarak antara kehamilan yang terlalu dekat. Ini terjadi karena mereka memiliki masa usia subur yang lebih panjang dibandingkan bila mereka menikah pada usia dewasa. Selain masalah kesehatan, pernikahan usia anak akan membawa dampak atau permasalahan dalam hal pemenuhan hak anak baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, norma sosial budaya dan keluarga didominasi oleh peran ayah. Norma itu, misalnya, pemahaman atau rasa malu jika anak perempuan mereka terlambat menikah atau menikahkan cepat untuk menghindari perzinahan.

Perkawinan usia anak diketahui dari adanya putusan pengadilan agama tentang dispensasi kawin. Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dispensasi kawin di DIY masih sangat tinggi, meskipun trend nya menurun. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2-80 Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017

No.	PA	DISPENSASI KAWIN				Trend
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.	PA Wates	54	45	41	38	Turun
2.	PA Bantul	131	116	87	69	Turun

No.	PA	DISPENSASI KAWIN				Trend
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3.	PA Wonosari	141	109	79	65	Turun
4.	PA Sleman	115	122	103	89	Turun
5.	PA Yogyakarta	41	26	36	33	Turun
6	D.I. Yogyakarta	482	418	346	294	Turun

Sumber: BPPM DIY, 2019

2.1.3.1.15 Urusan Perhubungan

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya. RPJMD DIY Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2018 hingga 2022 sehingga Rancangan RKPD Tahun 2021 harus disusun dengan memperhatikan target indikator yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan sektor transportasi dalam RPJMD 2017-2022 bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, bandara dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaanya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY (*impact*).

Dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, sektor perhubungan masuk dalam misi ke-1 dan mempunyai sasaran pembangunan pemerintah daerah untuk menurunkannya kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan indikator prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni:

- Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum;
- Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan pada kawasan prioritas;
- Keselamatan Transportasi;
- Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Penyediaan layanan angkutan umum merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas orang maupun barang. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi

di jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pelayanan angkutan umum dalam trayek diselenggarakan untuk melayani perkotaan dan kota-kota sekitarnya. Pemerintah Daerah DIY melalui layanan Trans Jogja dengan konsep *buy the service*-nya diselenggarakan untuk melayani kawasan perkotaan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sampai dengan tahun 2019 cakupan layanan Trans Jogja telah menjangkau 23 kecamatan dari keseluruhan 25 kecamatan di area Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan operasionalisasi 128 armada pada 17 jalur. Selain layanan Trans Jogja tersebut, masih terdapat operator swasta yang melayani angkutan perkotaan reguler.

Sampai dengan tahun 2019, penumpang yang terlayani oleh angkutan umum perkotaan oleh Trans Jogja adalah sebagai berikut.

Tabel 2-81 Jumlah Penumpang Perkotaan (Trans Jogja) Terangkut Tahun 2015-2019

Sub Elemen	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penumpang/hari	9.335,00	8.824,00	7.321,00	8.056,00	7.150,00
Penumpang/tahun	6.468.678,00	6.409.205,00	5.317.484,00	5.880.610,00	5.282.737,00

Sumber : BPPSD Bappeda DIY, 2020

Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Berdasarkan Perpres Nomor 98 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Bandar Udara Internasional Yogyakarta (*Yogyakarta Internasional Airport / YIA*) di Kabupaten Kulon Progo yang mulai beroperasi pada bulan April tahun 2019, maka perlu dipersiapkan moda transportasi yang mendukung konektivitas dari Kota Yogyakarta, serta kawasan-kawasan pariwisata dan budaya menuju Bandar Udara atau sebaliknya melalui perencanaan multimoda. Selanjutnya untuk mendukung operasional penuh YIA pada tahun 2020 perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung khususnya pada jaringan pergerakan dan infrastruktur dasar.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan umum dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, telah dilakukan penanganan pada kawasan-kawasan prioritas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sampai dengan tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems). Dalam konsep ATCS beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2018 telah terpasang 78 unit ATCS di wilayah Perkotaan DIY yang dianggarkan melalui APBD DIY sebanyak 58 unit dan APBD Kota Yogyakarta sebanyak 20 unit. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini didukung dengan sinyal bus priority sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal bus priority. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Dalam rangka penurunan rasio kecelakaan di wilayah DIY, telah dilakukan Studi tentang Daerah Rawan Kecelakaan yang ditindaklanjuti dengan penanganan pada daerah yang berpotensi menimbulkan kecelakaan melalui penerapan manajemen rekayasa dan pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas pada kawasan tersebut. Berdasarkan dari analisis hasil identifikasi data IRSMS maka penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dengan kriteria Blackspot banyaknya kejadian kecelakaan per km untuk nilai tertinggi di tiap kabupaten yaitu:

Tabel 2-82 Perangkingan Urutan Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi

Ruas Jalan	Kabupaten	Panjang Jalan	ΣKejadian Kecelakaan	ΣKejadian laka/km	Ranking
Yogyakarta - Barongan	Bantul	9,80	75	7,65	1
Gading - Playen	Gunung Kidul	2,95	17	5,76	2
Denggung - Wonorejo	Sleman	2,50	3	1,20	3
Sentolo - Brosot	Kulonprogo	16,85	4	0,24	4

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2018

Dalam rangka mendukung integrasi pelayanan angkutan umum di DIY, sampai dengan tahun 2018 terbangun *Transfer Point/Park and Ride* di Gamping dan Dongkelan sebagai simpul integrasi antar moda angkutan umum perkotaan

dan AKDP. *Transfer Point/Park and Ride* di DIY sampai berakhirnya RPJMD DIY tahun 2017 – 2022 ditargetkan ada penambahan pada 3 lokasi.

2.1.3.1.16 Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pada era digital sekarang ini, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik level Provinsi di apresiasi oleh Komisi Infomrasi Pusat. Namun demikian, menurut table dibawah ini DIY dipandang masih perlu meningkatkan akses keterbukaan informasi dimaksud:

Tabel 2-83 Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi 2018

Rank	Nama Badan Publik	Kualifikasi
1	Jawa Tengah	Informatif
2	DKI Jakarta	Informatif
3	Kalimantan Barat	Informatif
4	Jawa Barat	Informatif
5	Aceh	Menuju Informatif
6	Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
7	Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
8	Sumatera Barat	Menuju Informatif
9	Sumatera Selatan	Menuju Informatif
10	Jawa Timur	Cukup Informatif
11	Kalimantan Timur	Cukup Informatif
12	Banten	Cukup Informatif
13	Sumatera Utara	Cukup Informatif
14	Papua	Cukup Informatif
15	Bali	Cukup Informatif
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurang Informatif

Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2018 (Diskominfo)

DIY mendapatkan penilaian kualifikasi kurang informatif karena peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kurang optimal. Selain itu, DIY belum memiliki website PPID Pemda yang dikelola mandiri. Sementara itu, keterbukaan informasi menjadi kontrol terhadap fungsi badan publik bagi masyarakat terutama sebagai pengguna layanan. Informasi yang terbuka menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas badan publik bekerja. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing badan publik beserta aparatur yang ada di dalamnya menentukan arus informasi bekerja sebagaimana mestinya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY mengadopsi konsep smart city/region dan menyesuaikannya menjadi smart province. Orientasi kepada warga dan masyarakat, pendekatan

komprehensivitas, dan cara inovatif berbasis TIK menjadi landasan untuk mengembangkan solusi-solusi bagi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh DIY. Dalam pandangan ini, konsep smart province diposisikan sebagai akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022. Sebagai akselerator artinya konsep smart province yang diterapkan harus mengacu pada spesifikasi RPJMD DIY 2017-2022, serta mencari peluang-peluang untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD secara lebih cerdas (smart).

Meskipun dalam lansekap konsep smart city/province sudah ada best practices yang dapat diadopsi untuk penerapannya di DIY, Pemerintah Daerah DIY mengadopsi konsep smart province secara kritis dan menyesuaikannya dengan kondisi khas DIY. Hal ini penting dilakukan karena: 1) secara formal, DIY diakui sebagai daerah istimewa menurut Undang-Undang nomor 13/2012 yang membedakannya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dan 2) secara faktual, implementasi konsep smart province harus benar-benar terinternalisasi dalam keseharian semua pihak yang terlibat. Internalisasi hanya akan efektif jika konsep smart province memiliki ciri yang sama dengan identitas yang dimiliki oleh segenap komponen pemangku kepentingan di DIY.

Implementasi Jogja Smart Province dalam periode RPJMD 2017-2022 mendapat penguatan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tantangan pelaksanaannya di DIY adalah dalam upaya meningkatkan maturitas (tingkat kematangan/kemantapan) kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dari Jogja Smart Province sebagai wujud dari SPBE di DIY.

2.1.3.1.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang kegiatan perekonomian di DIY. Data sensus ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 98,36% dari total usaha ekonomi di DIY. Sementara itu, Koperasi merupakan bentuk usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dasar diarahkan untuk menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai keterbatasan bagi Koperasi dan UKM dalam menghadapi perkembangan perekonomian daerah maupun nasional.

Terdapat penurunan koperasi aktif dari tahun 2018 sebesar 1.926 menjadi 1.722 pada tahun 2019, sedangkan koperasi pasif berjumlah 196. Tingginya jumlah koperasi pasif disebabkan kurangnya kesadaran koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Volume usaha koperasi pada tahun 2019 tercatat sebesar 4.325.218 juta rupiah, menurun dibandingkan volume usaha pada tahun 2018 sebesar 4.394.362 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja volume usaha masih rawan berfluktuasi. Pembinaan koperasi masih perlu ditingkatkan mengingat belum seluruh koperasi menyelenggarakan RAT. Dari 1.918 koperasi di DIY, baru sekitar 69% yang menyelenggarakan RAT.

Tabel 2-84 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Koperasi Aktif	2.369	2.427	1.782	1.926	1.722
Koperasi Pasif	316	311	598	63	196
Koperasi Beku	-	-	-	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568,00
Modal Luar (Rp Juta)	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343,00
Volume Usaha (Rp Juta)	3.599.547	4.473.800	3.679.342	4.394.362	4.325.218,00

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Berdasarkan jenis usaha, Koperasi di DIY didominasi oleh Koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam. Gabungan kedua jenis koperasi ini memberikan kontribusi sebesar 74% dari total koperasi. Sementara itu, koperasi jasa masih relatif kecil jumlahnya, namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dari 105 unit menjadi 117 unit koperasi.

Tabel 2-85 Perkembangan Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019

Jenis Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Koperasi Produsen	311	314	273	212	232
Koperasi Konsumen	1.286	1.283	1.073	882	851
Koperasi Jasa	124	128	121	105	117
Koperasi Simpan Pinjam	773	806	711	658	575
Koperasi Pemasaran	191	207	202	132	143

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2019 mengalami pertambahan sebesar 2.206 unit usaha dari semula 259.581 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 262.130.000 unit usaha pada tahun 2019.

Apabila dinilai dari aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,5% dari total UKM di DIY dengan jumlah usaha sebanyak 74.695 unit usaha, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (25,8%), sektor Industri *non*Pertanian (23,8%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,9%).

Tabel 2-86 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2014-2019

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aneka Usaha	47.808	49.923	51.780	54.649	56.753	57.312
2	Perdagangan	63.026	65.610	68.054	69.486	73.970	74.695
3	Industri Pertanian	59.977	62.519	64.857	64.523	67.007	67.665
4	Industri <i>non</i> Pertanian	49.892	51.995	53.928	59.559	61.851	62.458
	Jumlah	220.703	230.047	238.619	248.217	259.581	262.130

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Sementara apabila diukur dari aspek skala usaha, pada tahun 2019 kelompok usaha mikro mendominasi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jumlah 143.385 unit usaha (54,7%) dari total jumlah UKM di DIY. Diikuti oleh kelompok usaha kecil 65.533 unit (25%), kelompok usaha menengah 39.581 unit (15,1%), dan yang terkecil berasal dari sektor usaha besar dengan persentase sebesar 13.631 unit (5,20%). Hal tersebut menunjukkan peran strategis usaha mikro dan kecil dalam struktur perekonomian DIY di mana sekitar 79,80% unit bisnis di DIY merupakan usaha mikro dan kecil. Keberadaan UMKM dirasa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Selain itu, UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Meskipun memiliki jumlah unit usaha yang cukup besar, jika dilihat dari nilai omsetnya, total omset Usaha Kecil masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa selain menumbuhkan kuantitas usaha kecil, perlu adanya upaya peningkatan kelas dari UKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM, total omset usaha mikro di DIY mencapai 8,1 Milyar dan usaha kecil mencapai 29,5 milyar. Sementara itu, untuk usaha kelas menengah mencapai 109 milyar dan usaha besar mencapai 683,5 milyar

Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2014-2019

No	Skala Usaha	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	120.725	125.836	130.525	135.799	141.991	143.385
2	Usaha Kecil	55.176	57.512	59.655	62.041	64.896	65.533
3	Usaha Menengah	33.326	34.737	36.031	37.472	39.196	39.581
4	Usaha Besar	11.476	11.962	12.408	12.904	13.498	13.631
	Jumlah	220.703	230.047	238.619	248.216	259.581	262.130

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Penumbuhan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah perlu didorong dan diarahkan agar segera membentuk atau tergabung dalam sebuah wadah koperasi karena kedepannya peran koperasi akan dioptimalkan sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan hasil produksi sektor UKM termasuk pengadaan bahan baku.

2.1.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal adalah salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan penanaman modal dapat berupa pembukaan kegiatan industri baru atau perluasan kegiatan usaha seperti peremajaan dan penambahan alat-alat produksi. Kegiatan investasi juga dapat diwujudkan dengan pembelian-pembelian teknologi baru yang menjadikan proses produksi menjadi lebih efisien atau meningkat produktifitasnya. Dengan adanya tambahan investasi, produksi barang atau jasa yang dihasilkan suatu daerah menjadi bertambah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan luas wilayah yang terbatas, investasi di DIY harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasiskan keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2019 secara kumulatif total investasi tumbuh cukup signifikan. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2019 adalah Rp26,593 trilyun. Pertumbuhan investasi yang meningkat pesat

tersebut dikarenakan adanya aktivitas konstruksi pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo. Kegiatan pembangunan bandara di Kulon Progo ini secara umum memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi DIY. Pada tahapan selanjutnya, dengan beroperasionalnya bandara baru ini diharapkan dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal di DIY secara khusus di Kulon Progo.

Tabel 2-88 Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2018

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422.	7,61
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.281	12.853.974.374	776.312.710	6,42
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56,18

Sumber: BPPSD DIY 2019

Peningkatan pertumbuhan nilai realisasi investasi DIY pada tahun 2018 mengubah peta persebaran nilai realisasi investasi apabila dilihat dari segi lokasi investasi di kabupaten/kota. Lokasi bandara baru yang ada di Kabupaten Kulon Progo menjadikan Kabupaten Kulon Progo kini menempati posisi ketiga nilai realisasi investasi se-DIY dengan nilai realisasi investasi total sebesar Rp. 5.771.863.000.000. Namun demikian, kondisi untuk realisasi investasi di empat wilayah lain masih relatif sama dengan kondisi lima tahun terakhir yaitu dengan realisasi investasi total tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Dari tabel di bawah akan terlihat kesenjangan nilai realisasi investasi di DIY masih cukup tinggi.

Pemerataan investasi menjadi penting mengingat kegiatan investasi akan diikuti dengan pembukaan kesempatan kerja. Sampai dengan tahun 2018, tenaga kerja Indonesia yang terserap dalam kegiatan investasi di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul masih tertinggal. Investasi di wilayah Sleman dan Bantul yang kebanyakan adalah di sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kegiatan investasi PMDN di Sleman misalnya, mampu menyerap tenaga kerja hingga 15.979 orang. Sementara itu, kegiatan investasi PMDN di Gunungkidul baru bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 694 orang.

Tabel 2-89 Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Rencana				Realisasi			
		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	Yogyakarta	123	2.339.012	18.593	66	55	1.970.531	7.049	11
2	Sleman	74	3.218.310	21.392	74	67	3.364.303	15.979	6
3	Bantul	29	773.237	22.404	7	26	409.824	6.585	1
4	Kulon Progo	36	4.298.806	9.261	6	18	5.093.777	750	0
5	Gunungkidul	16	341.760	1.878	8	13	110.727	694	1
	Jumlah	278	10.971.125	73.528	161	179	10.949.162	31.057	19

Sumber: BKPM DIY, 2019

Investasi pada Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi karena didorong oleh aktivitas pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Pada tahun 2019, kegiatan investasi masih dititikberatkan pada pembangunan konstruksi yang bersifat padat modal. Selanjutnya, setelah pembangunan konstruksi diselesaikan dan Bandara YIA beroperasi penuh, diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat terrealisasi sesuai rencana.

Tabel 2-90 Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Rencana				Realisasi			
		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	Yogyakarta	67	3.327.787	6.281	118	47	4.267.773	3.403	39
2	Sleman	116	3.241.623	16.390	164	74	3.351.861	7.786	67
3	Bantul	64	619.191	14.843	134	49	668.764	13.966	96
4	Kulon Progo	10	289.217	2.198	16	9	678.086	2.340	12
5	Gunungkidul	10	283.079	6.507	37	10	160.024	1.166	4
	Jumlah	267	7.760.897	46.219	469	189	9.126.508	28.661	218

Sumber: BKPM DIY, 2019

Isu lain yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan persaingan antar daerah. Didorong oleh kesadaran akan pentingnya kegiatan investasi, saat ini tiap-tiap daerah berupaya mempromosikan potensi wilayahnya. Indeks daya saing yang dikeluarkan *Asia Competitiveness Institute* dapat menjadi indikator seberapa kuatnya DIY dalam bersaing dengan daerah lain dalam hal penciptaan iklim investasi yang menarik. Pada tahun 2017, DIY menempati peringkat ke 9 atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai peringkat ke 6. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, daya saing DIY masih relatif tertinggal. Aspek stabilitas makro ekonomi serta kondisi keuangan, tenaga kerja dan iklim bisnis yang dinilai masih relatif tertinggal dengan provinsi lain.

Tabel 2-91 10 Besar Provinsi dengan Indeks Daya Saing Tertinggi di Indonesia Hasil Kajian Asia Competitiveness Institute

Peringkat				Provinsi	Skor
2014	2015	2016	2017		
1	1	1	1	DKI Jakarta	3.459
2	2	2	2	East Java	1.723
3	3	5	3	East Kalimantan (inc.North Kalimantan)	1.303
4	5	3	4	Central Java	1.035
5	4	4	5	West Java	0.946
12	9	11	6	Banten	0.741
14	12	7	7	Bali	0.687
7	10	6	8	South Sulawesi	0.557
6	6	10	9	DI Yogyakarta	0.423
11	7	12	10	Riau Islands	0.399

Sumber: Asia Competitiveness Institute, 2018

2.1.3.1.19 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Sektor olahraga dan pemuda mengajarkan nilai-nilai positif seperti kreatif, disiplin, tanggung jawab, kritis, sportif, kompetitif dan mendukung pembentukan karakter manusia. Keolahragaan dan kepemudaan yang dikelola dan dibina dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan psikologis yang merupakan landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa sektor tersebut merupakan instrumen yang ampuh untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual.

Dari sisi sosial diakui bahwa sektor keolahragaan merupakan sebuah aktivitas dinilai potensial untuk memperkuat integrasi daerah. Keolahragaan mengajarkan dari sebuah kelompok kecil seperti misalnya sebuah tim sepakbola, sebuah komitmen bersama pada satu tujuan bersama yang dapat ditingkatkan ke tingkat kerjasama dalam cakupan yang lebih besar seperti kehidupan bermasyarakat sebuah daerah. Itulah sebabnya keolahragaan, seperti yang sering kita alami dalam olah raga kompetitif, dipandang ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan di bidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Olahraga dalam konteks pembinaan keolahragaan di DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia khususnya untuk mencetak atlet-atlet yang berbakat. Pada tahun 2017, DIY melakukan pembinaan sebanyak 210 atlet adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2-92 Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017

Cabang Olahraga	Jumlah Atlet
Atlet Angkat Besi	2
Atlet Atletik	12
Atlet Bola Basket Putra	12
Atlet Bola Basket Putri	12
Atlet Bola Voli Putra	12
Atlet Bola Voli Putri	12
Atlet Bulutangkis	8
Atlet Dayung	4
Atlet Gulat	4
Atlet Judo	9
Atlet Karate	6
Atlet Panahan	18
Atlet Pencak Silat	17
Atlet Renang	8
Atlet Senam	4
Atlet Sepak Bola	18
Atlet Sepak Takraw	17
Atlet Tae Kwon Do	12
Atlet Tarung Drajat	7
Atlet Tennis	8
Atlet Tinju	4
Atlet Voli Pasir Putra	2
Atlet Voli Pasir Putri	2
Grand Total	210

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Pembinaan olahraga yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi atlet di daerah sehingga mampu bersaing dalam even-even olahraga baik di level lokal sekaligus

mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Berikut capaian prestasi atlet DIY di ajang kompetisi olahraga:

Tabel 2-93 Capaian Prestasi Atlet DIY di Ajang Kompetisi Olahraga

Prestasi Atlet pada Kejuaraan POPWIL					
Tahun	2010	2012	2014	2016	2018
Tuan Rumah	Jawa Tengah	Banten	Bali	DIY	Surakarta
Jumlah Medali	-	29	20	34	20
*) Jumlah Cabor yang dipertandingkan ada 8 Cabang Olahraga (Bola Voli Indoor, Tenis Lapangan, Bola Basket, Tenis Meja, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Pencak Silat, Sepak Takraw)					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan POPNAS					
Tahun	2009	2011	2013	2015	2017
Tuan Rumah	DIY	Riau	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah
Jumlah Medali	30	30	18	26	31
*) Jumlah Cabor yang dipertandingkan ada 21 Cabor					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan PEPARNAS					
Tahun	2011	2013	2015	2017	
Tuan Rumah	Riau	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	
Jumlah Medali	13	12	17	20	
Prestasi Atlet pada Kejuaraan Nasional antar PPLP					
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Medali	19	22	16	26	32
*) Cabor yang di PPLP kan ada 5 Cabor (Atletik, Voli Pasir, Panahan, Pencak Silat dan Balap Sepeda)					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan ASEAN School					
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Tuan Rumah	Vietnam	Brunei	Thailand	Singapura	Malaysia
Jumlah Atlet DIY				5	
Medali				2	

Sumber : Disdikpora DIY, 2019

Penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mengembangkan sektor olahraga baik skala/taraf nasional maupun internasional. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sangat penting untuk menunjang prestasi bagi atlet-atlet daerah di DIY, maka hal ini seharusnya juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah diantaranya penyelesaian Stadion Mandala Krida (pembangunan tribun VIP dan pengadaan elektrifikasi).

Tabel 2-94 Fasilitas Olahraga di DIY

Tipe Standard		Nama Fasilitas Olahraga	
1	Internasional	1	Stadion Mandala Krida
		2	GOR Amongraga
2	Nasional	1	Stadion Mandala Krida

Tipe Standard		Nama Fasilitas Olahraga	
		2	GOR Amongraga
		3	Gedung Graha Wana Bhaktiyasa
		4	Circuit BMX Youth Centre
		5	Gelanggang Pemuda Sorowajan
		6	Lapangan Panahan Jalan Kenari

Sumber : Disdikpora DIY, 2019

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir dan bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa di masa depan, untuk itu karakter pemuda Indonesia harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini.

Undang-Undang no. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembangunan di bidang kepemudaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pengelolaan sektor pemuda tidak kalah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena diyakini bahwa produksi sumber daya manusia dihasilkan pada tahap usia produktif antara 16-30 tahun (pemuda). Beberapa ahli telah menyampaikan bahwa pengelolaan kepemudaan merupakan modal SDM (human capital) sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola human capital dengan baik. Upaya pengelolaan kepemudaan dilakukan dengan pembinaan kelompok pemuda yang meliputi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Tabel 2-95 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga serta Sarana bagi Pemuda di DIY

Uraian	Tahun				Satuan
	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Klub Olahraga	1.205	1.207	1.207	1.207	Buah
Jumlah Organisasi Pemuda	40	50	74	74	Buah
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	11	12	11	11	Buah
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	Buah

Sumber : BPPSD 2019

Generasi muda merupakan penerus perjuangan bangsa yang wajib dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka pembinaan/ pengembangan/ pemberdayaan terhadap pemuda menjadi hal yang sangat penting guna memberikan motivasi dan arahan bagi pemuda agar lebih giat berprestasi. Pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Pembinaan pemuda bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui keluarga, sekolah, maupun kegiatan di masyarakat.

2.1.3.1.20 Urusan Statistik

Data dan informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan adalah salah satu unsur penting untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil. Data dan informasi dibutuhkan pada semua tahapan manajemen pembangunan. Pada tahap perencanaan, data yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi yang dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami masalah pembangunan. Sedangkan pada tahap pengendalian, data dan informasi dalam rangka melakukan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Proses pengumpulan

sampai dengan penyediaan data dan informasi merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu institusi pendidikan, instansi/perusahaan dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Sesuai amanat Perdaas Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY pasal 11 huruf a : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik; Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pada Bappeda dibentuk UPT pada Badan yaitu Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah;

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program Pengembangan Statistik Daerah melalui kegiatan Penyediaan Data Statistik serta Penyajian dan Informasi Data Statistik yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Bappeda DIY.

Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel masih menjadi salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Pemda melaksanakan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data yang dibutuhkan. Upaya peningkatan kualitas data DIY dalam rangka menyasar isu strategis tersebut

menghadapi beberapa masalah baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Lebih lanjut lagi, permasalahan terkait urusan statistik dalam mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan maupun pengendalian pembangunan daerah karena beberapa data dirilis oleh sumber data pada saat yang tidak selaras dengan agenda pembangunan serta beberapa data ketersediaannya bergantung pada pihak di luar kewenangan Pemerintah;
- b. Pada beberapa data, terdapat perbedaan nilai antar data yang dihasilkan oleh beberapa sumber data. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan metodologi, waktu pengambilan data dan definisinya.

Pemda telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah pengampu data agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik serta menyediakan data proyeksi;
2. Membentuk UPT yang secara khusus menangani kegiatan teknis terkait statistik daerah di Perangkat Daerah Bappeda DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Mewujudkan kebijakan satu data pembangunan untuk dalam rangka menyediakan satu data base pembangunan yang dapat diacu oleh berbagai pemangku kepentingan yang membutuhkan data dengan menyediakan data seragam untuk menghindari duplikasi dan redundansi data.

2.1.3.1.21 Urusan Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data / informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Urusan persandian bersama dengan urusan komunikasi dan informasi berperan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah DIY melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2019, urusan persandian di DIY diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi DIY dimana sebelumnya diampu oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY.

Urusan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi DIY dituangkan melalui program pengembangan aplikasi informatika dan persandian yang dilaksanakan pada kegiatan pengelolaan persandian. Pada era digitalisasi saat ini, urusan persandian memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan data dan informasi pemerintah yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara dan bangsa. Untuk memenuhi layanan urusan persandian di DIY masih diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang persandian dan teknologi informasi serta peralatan persandian sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara.

2.1.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan atas keberagaman warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi sebagai bentuk identitas bangsa di tengah peradaban dunia. Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa diperlukan upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang merdeka. Nilai-nilai *adiluhung* seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY.

Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti nilai-nilai luhur Kerajaan

Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (associate cultural landscape) merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina; serta kebudayaan Nusantara. Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari awal sejarah hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten.

Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten sarat dengan karsa dan karya berupa kebudayaan benda maupun kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta sehingga perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Kebudayaan sebagai mainstream di segala bidang telah menjadi spirit pembangunan di DIY terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan. Kemajuan kebudayaan terus berpacu dengan dinamika perkotaan dan masyarakatnya yang terus diuji ketahanan budayanya oleh arus perubahan,

2.1.3.1.22.1 Budaya Benda

Para ahli sejarah membagi fase-fase perjalanan peradaban di DIY dalam periode prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Kasultanan Yogyakarta, Kolonial, dan Pasca Kemerdekaan (Kontemporer). Setiap fase peradaban meninggalkan simbol-simbol eksistensi sebagai warisan budaya benda (tangible cultural heritage). Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Upaya awal perlindungan cagar budaya dilakukan dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38.A/2014 tentang cagar budaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua objek benda yang bernilai sejarah dan kebudayaan atau sering di sebut sebagai warisan budaya dapat terpelihara dengan baik. Penemuan kembali cagar budaya masih dimungkinkan, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar. Kapitalisme, laju demografi, dan kekuatan alam yang sangat ekstrem akan dapat menggerus aset-aset budaya bendawi dan kekuatan ketahanan budaya masyarakat DIY.

Tabel 2-96 Budaya Benda di DIY

Aset Budaya	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Struktur				0	34	34	34
Situs	176	184	343	339	343	343	737
Benda Cagar Budaya	762	763	764	807	808	834	1734
Bangunan Cagar Budaya	947	877	881	1042	1041	1082	1582
Kawasan cagar budaya	13	13	15	17	17	17	25
Jumlah Budaya Benda	1898	1837	2003	2205	2243	2310	4112

Sumber: www.jogjabudaya.com, 2020

Untuk menjaga kelestarian warisan budaya benda dari ancaman kerusakan alamiah dan dinamika perkotaan, pada tahun 2019 dilakukan sejumlah kegiatan pelestarian dan pengelolaan. Obyek sasaran pelestarian dan pengelolaan sebanyak 619 buah yang terdiri dari 12 struktur cagar budaya, 25 situs, 487 Benda Cagar Budaya, 88 Bangunan Cagar Budaya, dan 7 kawasan Cagar Budaya.

Pada Tahun 2019, yang paling menonjol dalam pelestarian dan pengelolaan Warisan Budaya adalah Rehabilitasi Beteng Kraton Yogyakarta, Rehabilitasi Bioskop Permata, dan Pengajuan Yogyakarta sebagai Kota Warisan Dunia ke UNESCO. Serangkaian kegiatan ini di harapkan semakin meneguhkan keistimewaan DIY.

Selain perlindungan fisik, telah dilakukan perlindungan hukum melalui Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Perlindungan hukum diperlukan agar terjadi kepastian dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya,

Tabel 2-97 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	
8	Kawasan Pleret	Bantul	
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

No	Kawasan Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
			Yogyakarta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.278/M/2014 Tentang Satuan Ruang Geografis Prambanan.
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	Kep. Mendikbud 157/M/1998
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

Sumber: www.jogjabudaya.com; Dinas Kebudayaan DIY

2.1.3.1.22.2 Budaya Tak Benda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2009 telah melakukan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia. Karya budaya yang ditetapkan meliputi: a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa; b) seni pertunjukan; c) adat istiadat; d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; e) ritus dan perayaan; serta f) kemahiran kerajinan tradisional.

Tujuan dari penetapan tersebut adalah: a) untuk menjamin dan melindungi warisan budaya takbenda Indonesia yang merupakan milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan; b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa; c) meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia; d) meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya warisan budaya tak benda; e) saling menghargai terhadap warisan budaya bangsa; dan f) mempromosikan warisan budaya tak benda bangsa Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai Kesejarahan

Sejarah sebagai sebuah catatan peradaban suatu bangsa berkontribusi dalam membentuk identitas suatu bangsa sekaligus memberikan informasi yang menggugah kesadaran untuk melakukan tindakan demi masa depan yang lebih baik. Upaya-upaya pelestarian nilai kesejarahan merupakan hal penting agar tetap tersampaikan pada generasi mendatang.

Berbagai peristiwa sejarah baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda yang tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya .

Tabel 2-98 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2019

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70	70	70	90
Museum	42	42	43	47	47	47	47	46
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21	21	21	51
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130	144	144	206
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509	509	509	714

Sumber: www.jogjabudaya.com, 2020

Permuseuman

Lembaga atau wadah permanen yang melaksanakan fungsi pelestarian dan menyajikan berbagai koleksi dan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi berada di tangan museum. Museum dapat bermakna sebagai lembaga tempat penyimpanan, perawatan, serta pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum juga merupakan lembaga *nonprofit* yang terbuka untuk umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan edukasi kultural, serta rekreasi,

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional. Sejumlah 14% museum di Indonesia berada di DIY. Salah satu museum tersebut adalah Museum Negeri Sonobudoyo yang merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan memiliki koleksi terbanyak kedua setelah Museum Nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi Museum Negeri Sonobudoyo dilakukan secara *multiyears*. Museum di DIY cenderung bertambah dan berkembang dengan baik serta makin menarik untuk di kunjungi. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, sampai tahun 2019

tercatat ada 47 museum. Asosiasi museum di DIY disebut BARAHMUS yang merupakan paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 36 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY yaitu Museum Negeri Sonobudoyo dan Museum Purbakala Pleret. Museum yang berada di bawah naungan Kemendikbud adalah Museum Benteng Vredeburch dan Museum Perjuangan, sedangkan museum di bawah naungan TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman, Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTK, dan Museum Gedung Bank Indonesia. Beberapa museum yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY yaitu Museum Gunung Merapi (Pekab Sleman), Museum Bale Agung (Pekab Kulon Progo), Museum Padepokan Sumber Karahayon (Pekab Bantul), dan Museum Taman Pintar (Pekot Yogyakarta).

Beberapa museum juga dikembangkan oleh lembaga pendidikan di DIY. UGM memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama; UNY memiliki Museum Pendidikan Indonesia; UPN Veteran memiliki Museum Geoteknologi Mineral yang mengembangkan penelitian tentang geohéritage, dan UII memiliki Museum Candi Kimpulan.

Pemajuan museum di DIY dilakukan dengan rehabilitasi fisik museum, fasilitasi konservasi benda koleksi museum, pendampingan museum melalui tenaga edukator dan duta museum, serta festival museum.

Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Peradaban baru yang hendak diwujudkan bagi masyarakat DIY yang memiliki keunggulan dalam nilai mental dan tata laku adalah peradaban yang dijiwai dan digerakkan oleh visi akbar yang dilandasi filosofi universal "*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*", yang di dalamnya terkandung kewajiban Tri Satyâ Brâtâ. Pertama, *rahayuning buwânâ kapurbâ waskitaning manungsâ* (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), harmoni hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia (*world*) sebagai kewajiban "*Hamangku Buwânâ*", maupun seluruh alam semesta (*universe*) sebagai kewajiban "*Hamêngku Bawânâ*".

Kedua, *darmaning manungsâ mahanani rahayuning nêgârâ* (tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu

"*Hamêngku Nagârâ*". Ketiga, *rahayuning manungsâ dumadi karânâ kamanungsané* (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri).

Dapat dimengerti jika filosofi tersebut menyandang misi akbar bagi manusia dalam tiga substansi, yaitu: "*Hamêngku Nagârâ, Hamangku Buwânâ, Hamêngku Bawânâ*". Kewajiban "*Hamêngku Nagârâ*" karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan eksistensi negara dan pemerintahan yang mengaturnya agar tidak terjadi seling-surup dan saling-silang antarmanusia.

Basis keunggulan sebuah bangsa, atau komunitas ialah manusia yang unggul spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab *Sutasoma*, kitab *Nêgarakêrtagama*, *Sêrat Cênthini*, candi Borobudur, dan candi Prambanan. Manusia-manusia unggul itulah kini yang menghasilkan invensi di bidang sains dan teknologi, inovasi di bidang industri, *masterpiece* di bidang seni, serta tata kelola yang baik di bidang pemerintahan.

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya serta telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan beragam wujud adat istiadat dan tradisinya. Tercatat terdapat 479 upacara adat, 35 tradisi, dan 69 permainan tradisional yang masih ada walaupun dilaksanakan tidak secara merata. Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi. Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi *nguras enceh* atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, dan jamasan kereta pusaka.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival, baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan. Setiap perwakilan dari lima kabupaten/kota di DIY menampilkan upacara adat yang menjadi tradisi di masing-masing wilayah.

Tabel 2-99 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2019

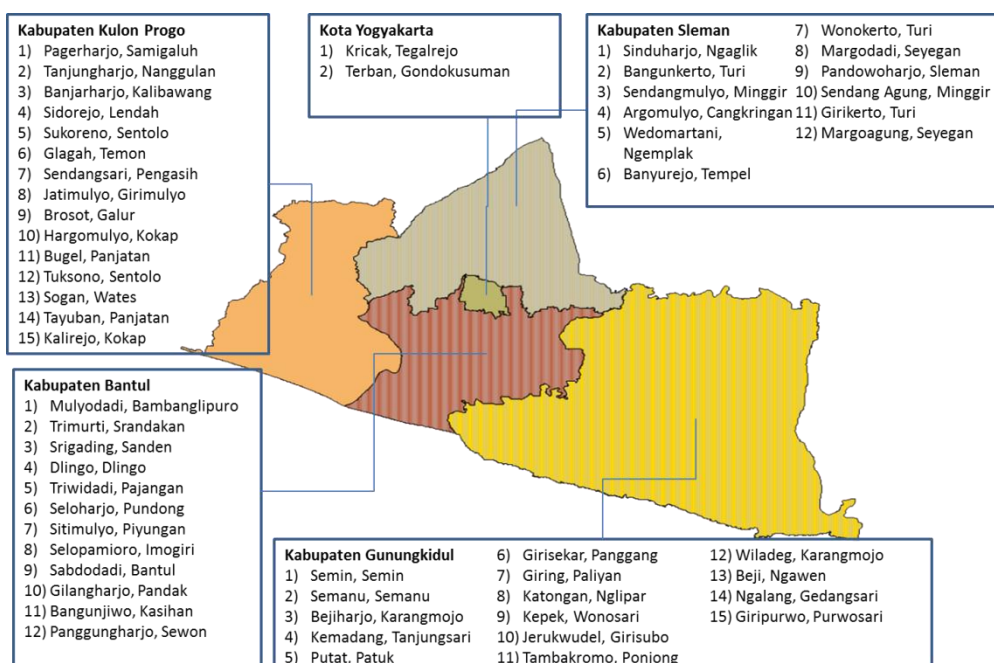
Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Upacara Adat	447	447	459	473	475	478	479	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35	35	35	47
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58	58	58	80

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cerita rakyat	33	33	33	33	33	33	80	65

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY (www.jogjabudaya.com), 2020

Desa Budaya

Desa/Kelurahan Budaya merupakan desa/kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, penataan ruang, dan warisan budaya. DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan desa/kelurahan budaya meliputi: a) peningkatan manajemen, b) peningkatan wawasan dan ketrampilan teknis, c) Dukungan promosi dan informasi, d) fasilitasi sarana dan prasarana, e) fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi, f) pengkajian pengembangan, dan g) pendampingan tenaga teknis. Pada tahun 2016 telah terbentuk tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya.



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Gambar 2-53 Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Menurut SK Gub DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya

Kesenian

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, baik berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, seni perfilman, maupun campuran berbagai bentuk dan ragam. Semua kegiatan berkesenian berakar pada rasa dan diwujudkan untuk melayani rasa, yakni rasa keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Beberapa tahun terakhir semarak event seni sangat menonjol di DIY. Perhelatan seni dapat disaksikan di lingkungan kraton, kampus, kampung maupun keprajan dalam bentuk lomba, festival, karnaval dan pameran sebagai wadah kreativitas dan inovasi seni masyarakat. Bentuk-bentuk seni yang biasanya berkembang di kraton dan hanya dipertunjukkan bagi kalangan tertentu, kini sudah dapat disaksikan oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajagan terhadap ruang budaya tradisional berupa Festival Kebudayaan

Yogyakarta dilakukan untuk memberi ruang bagi seni tradisional. Festival ini diproyeksikan agar menjadi *event* yang lebih spektakuler.

Kerjasama dengan kelompok orkestra dari luar negeri mampu menghasilkan konser musik kolaborasi. Musik jazz yang dianggap hanya konsumsi orang kelas menengah atas sudah merambah ke pedesaan melalui *event* Ngayogjazz. Seni rupa pun mengalami perkembangan pesat. Para seniman seni rupa telah menunjukkan kiprahnya dalam dunia internasional dengan berusaha menerobos *event-event* seni rupa di luar negeri.

Karya seni yang telah menjadi warisan budaya dunia adalah batik, keris, wayang, dan gamelan. Selain sebagai karya seni, warisan karya tersebut juga merupakan pusaka Indonesia yang diakui dunia internasional. Wayang kulit sebagai seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa telah diakui UNESCO pada tahun 2008. Keris diakui dunia pada tahun 2005, Batik tercatat dalam daftar UNESCO pada tahun 2009, sedangkan Gamelan diakui dunia internasional sebagai karya budaya Indonesia pada tahun 2014, bersamaan dengan penetapan Sekaten.

Seni yang saat ini berkembang pesat di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik skala nasional maupun internasional, antara lain film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak dirindukan, Java Heat, dan The Philosophers yang mengambil lokasi di kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul antara lain: Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon. Pada tahun 2016 Film yang diproduksi Dinas Kebudayaan terdiri dari Film Dokumenter (Jamu (Saking Wingking Mengajeng), Jogja Kembali, Sosrokusuman), dan Film Fiksi (Happy Family, Kleang Kabur Kanginan, Ruah).

Kelompok pembuat film di DIY memiliki latar belakang yang beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi. Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi. Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY. Beberapa komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub berbasis kampus adalah UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY. Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus antara lain: De Javu, Kinoki, Montase, Rumah Sinema, dan Forum Film Dokumenter. Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi antara lain Limaenam Films, Studio Kasat Mata, dan Fourcolours Films.

DIY diuntungkan dengan keberadaan 111 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang. Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni. Selain untuk mencari pendapatan, film bagi kelompok pembuat film di DIY merupakan ungkapan seni budaya. Hasil produksi film di DIY tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta. Film produksi DIY lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional. Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan pameran yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak. Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya. Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun pameran yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda.

Tabel 2-100 Organisasi Seni dan Budaya di DIY

Aset Budaya	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
organisasi seni rupa	8	16	17	17	17	17	15	29
org seni pertunjukan	4231	5226	5241	5434	5543	6361	6420	8836
org perfilman	12	42	42	42	42	42	42	44
lembaga budaya	105	105	82	98	180	181	78	151
lembaga pendidikan budaya	31	32	43	49	49	49	49	66
Desa/kelurahan budaya	32	32	32	43	43	56	56	57
Organisasi kepercayaan	90	94	94	112	120	137	135	140

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2020

Tabel 2-101 Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tokoh Seniman Budayawan	486	486	487	489	496	504	504	510
Penghargaan seniman Budayawan	260	275	290	295	351	271	271	284

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. Event-event internasional yang selalu diikuti oleh DIY antara lain melalui Bienalle, Sister Province, Europhalia, dan MSO.

2.1.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan memiliki peran strategis di tengah masyarakat karena selain fungsi informatif, perpustakaan juga memiliki fungsi edukatif. Sebagai agen informasi, pendidikan sekaligus kebudayaan, penyediaan perpustakaan yang memadai (baik secara kualitas dan kuantitas) menjadi hal mutlak dalam meningkatkan frekuensi kunjungan pemustaka. Hal ini terkait dengan permasalahan masih rendahnya minat baca di Indonesia.

Menurut penilaian *World's Most Literate Nations Ranked*, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang dilibatkan (Central Connecticut State University, 2016). Survey ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu literacy achievement test dan literate behavior characteristics.

Untuk kategori tingkat literasi orang dewasa, skor nasional Indonesia adalah 99.4. Tingkat literasi diartikan sebagai kemampuan memahami pernyataan sederhana di kehidupan sehari-hari baik secara tertulis maupun lisan (*United Nations Development Programme*, 2016). Jika dilihat dari minat baca nasional, DIY memiliki minat baca 91,00 % atau ranking 4 setelah Riau (94,01%), DKI (93,10%) dan Bali (92,44%).

Sedangkan dari hasil Kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) oleh Perpustakaan Nasional RI dan BPAD Tahun 2018, Skor TGM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 46,13. Angka ini merupakan rerata dari TGM di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota dan angka ini lebih tinggi dari TGM Nasional tahun 2017 sebesar 36,48 pada tahun 2017.

Tingkat kegemaran membaca tertinggi menurut kabupaten/kota di DIY dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo dengan skor 50,86 dan terendah di Gunungkidul dengan skor 39,00.

Tabel 2-102 Peringkat TGM Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/Kota	TGM
1	Kulon Progo	50,86
2	Sleman	50,51
3	Bantul	48,03
4	Yogyakarta	42,24
5	Gunungkidul	39,00

Sumber: Kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) DIY Tahun 2018

Upaya-upaya untuk meningkatkan budaya baca di Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus dilakukan. Kampanye sedekah buku, gerakan membaca, bedah buku, inovasi pelayanan, kerjasama dengan lembaga lain dan

peningkatan penyediaan sarana prasarana terus diusahakan agar masyarakat DIY memiliki budaya baca. Dalam mendukung gerakan literasi ini perpustakaan memegang peran yang sangat penting. Data jumlah perpustakaan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-103 Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2019

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Perpustakaan	4.515,00	3.990,00	3.357,00	3.456,00	3.455,00	Unit
2	Perpustakaan Desa	-	-	447,00	438,00	437,00	Unit
3	Perpustakaan Sekolah						
4	SD	-	-	1.694,00	1.966,00	1.966,00	Unit
5	SMP	-	-	482,00	526,00	526,00	Unit
6	SMA	-	-	407,00	425,00	425,00	Unit
7	Perpustakaan Instansi	-	-	95,00	95,00	95,00	Unit
8	Perpustakaan Tempat Ibadah	-	-	n/a	n/a	n/a	Unit
9	Jumlah perpustakaan umum tingkat Pemda DIY	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
10	Jumlah perpustakaan umum tingkat kabupaten/kot a	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Unit
11	Jumlah perpustakaan desa kabupaten/kot a	447,00	447,00	447,00	438,00	437,00	Unit
12	Kabupaten Kulon Progo	93,00	93,00	91,00	88,00	88,00	Unit
13	Kabupaten Bantul	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Unit
14	Kabupaten Gunungkidul	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	Unit
15	Kabupaten Sleman	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	Unit
16	Kota Yogyakarta	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Unit
*) Sementara n/a Tidak ada							

Sumber: BPAD DIY 2019

Dari data tersebut sebanyak 142 unit perpustakaan sudah terakreditasi dan sisanya sebanyak 3.495 unit perpustakaan belum terakreditasi. Jika dilihat persentasenya, perpustakaan yang sudah terakreditasi di DIY masih sangat kecil, masih sekitar 4% dari keseluruhan perpustakaan yang ada di DIY. Perpustakaan yang memadai diukur dengan perpustakaan yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan. Dengan demikian masih terdapat lebih dari 96% perpustakaan bisa dikatakan belum memadai. Untuk itu diperlukan adanya stimulasi untuk akselerasi peningkatan kualitas perpustakaan sehingga memenuhi standar.

Tantangan terbesar pada masa sekarang adalah perkembangan perilaku membaca literatur digital seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Kehadiran layanan pustaka digital menjadi mutlak diselenggarakan untuk memudahkan pembaca dalam mengakses koleksi buku digital. Untuk menjawab tantangan tersebut BPAD DIY meluncurkan layanan pustaka digital i-Jogja di mana pembaca bisa meminjam buku dalam bentuk digital yang dikoleksi oleh Grhatama Pustaka. Tantangan berikutnya adalah pengembangan konten dan koleksi dalam aplikasi tersebut baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat DIY.

Jogja Library for All (JLA) merupakan jaringan berbagai perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan secara online bagi masyarakat, beranggotakan 39 perpustakaan pemerintah dan Lembaga Pendidikan yang memungkinkan saling silang layanan pustaka. Jaringan yang sebenarnya memiliki peran strategis ini dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Komitmen berjejaring dari anggota JLA tidak dibarengi dengan pelaksanaannya di lapangan, dari 39 anggota baru 4 perpustakaan yang sudah bekerjasama dalam layanan saling silang pustaka di tahun 2018.

2.1.3.1.24 Urusan Kearsipan

Arsip sebagai sebuah informasi yang terekam dari sebuah kegiatan atau peristiwa merupakan sumber informasi obyektif dalam berbagai bidang yang dapat meningkatkan kesadaran nasional dan pemahaman jati diri bangsa. Melalui arsip dapat dipelajari dinamika perubahan yang terjadi sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ke depan.

Berdasarkan jenisnya, arsip terdiri dari arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis sendiri dibagi menjadi dua yaitu dinamis aktif dan dinamis inaktif.

Arsip dinamis aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi sedangkan arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang sudah berkurang frekuensi penggunaannya. Pemusnahan arsip merupakan suatu fase dalam manajemen kearsipan yang kedudukannya pada siklus hidup arsip (*archive life cycle*) merupakan jembatan lain bagi akhir riwayat arsip dinamis yang tidak masuk dalam kategori arsip permanen. Secara teoritis, kurang lebih sembilan puluh persen arsip dinamis akan dimusnahkan dan hanya sekitar sepuluh persen yang dipermanenkan menjadi arsip statis.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Nasional dan/atau lembaga kearsipan. Oleh karena itu arsip statis tidak dikelola oleh pencipta melainkan oleh lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis dilakukan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan pelayanan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Untuk lingkup DIY, khasanah arsip yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY meliputi khasanah arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Data kearsipan DIY dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-104 Data Kearsipan di DIY 2015-2019

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan arsip secara baku	20,00	295,00	34,00	36,00	37,00	Unit
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7,00	2,00	4,00	5,00	5,00	Kegiatan
3	Jumlah Arsiparis	15,00	80,00	87,00	91,00	84,00	Orang
4	Kabupaten Kulon Progo	3,00	3,00	3,00	10,00	11,00	Orang
5	Kabupaten Bantul	18,00	17,00	15,00	15,00	14,00	Orang
6	Kabupaten Gunungkidul	10,00	7,00	16,00	14,00	13,00	Orang
7	Kabupaten Sleman	21,00	22,00	16,00	20,00	21,00	Orang
8	Kota Yogyakarta	21,00	20,00	16,00	14,00	13,00	Orang
9	Jumlah Arsip yang	695,00	1.297,00	5.205,00	5.500,00	6.605,00	Berkas

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
	dimanfaatkan						
10	Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	1.357,00	1.217,00	36.979,00	81.145,00	82.177,00	Orang
*) Sementara n/a Tidak ada							

Sumber: BPAD DIY, 2019

Keberhasilan Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola kearsipan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat dalam ANRI AWARD pada Tahun 2017 sebagai Juara I Lembaga Kearsipan daerah Terbaik nasional. Penyadaran publik akan nilai kandungan arsip beserta penyelamatan fisiknya terus dilakukan melalui pameran, workshop, publikasi buku naskah sumber. Meskipun sudah mendapatkan apresiasi secara nasional terkait urusan kearsipan, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam hal pengelolaan, penyediaan sarana layanan arsip, hingga aspek pemanfaatannya.

2.1.3.2 FOKUS LAYANAN PILIHAN

2.1.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

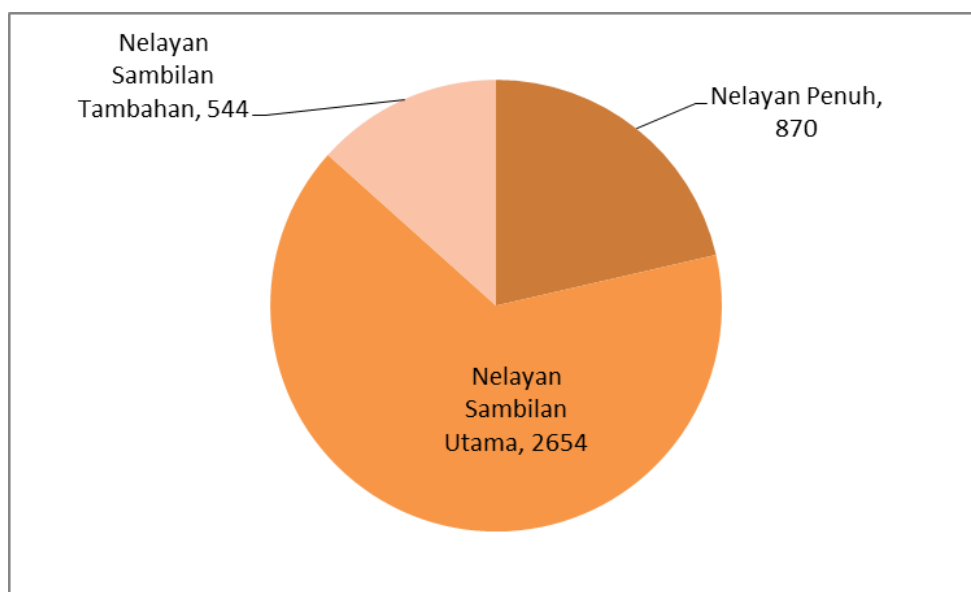
Kondisi alam DIY di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sangat berpengaruh terhadap ketersediaan ikan serta usaha di bidang perikanan di DIY. Panjang pantai di DIY sepanjang 113 Km membentang dari ujung barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan di ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Pantai di DIY berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Dengan kondisi alam yang dimiliki tersebut,

DIY mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang besar. Potensi perikanan tangkap lestari di laut di selatan DIY mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan potensi yang lebih luas di Samudera Hindia mencapai 906.340 ton per tahun.

Dukungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sangat berperan terhadap Perikanan tangkap laut di DIY, salah satunya keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul sangat penting dan ada 18 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya. Kondisi cuaca dan perairan laut yang berubah-ubah setiap tahunnya berpengaruh terhadap Produksi perikanan tangkap laut. Serta keberadaan Pelabuhan Perikanan

Tanjung Adikarto yang belum beroperasi, diproyeksikan sebagai sentra perikanan tangkap juga berpengaruh pada belum optimalnya produksi perikanan tangkap DIY.

Keberadaan nelayan andon yang datang dari luar DIY dan mendaratkan ikannya di pangkalan pendaratan ikan di wilayah DIY menjadi pesaing bagi nelayan asli DIY. Ada tiga tipe nelayan di DIY yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan penuh merupakan nelayan yang dijadikan sebagai profesi dan tidak memiliki keahlian lain. nelayan sambilan utama adalah Orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Nelayan sambilan tambahan merupakan orang yang memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan. Di DIY nelayan sambilan utama masih mendominasi dengan jumlah 2.654 orang. Hal ini berarti walaupun sebagian besar pendapatannya diperoleh dari hasil penangkapan ikan di laut, namun masih memiliki pekerjaan lain selain nelayan, seperti bertani.

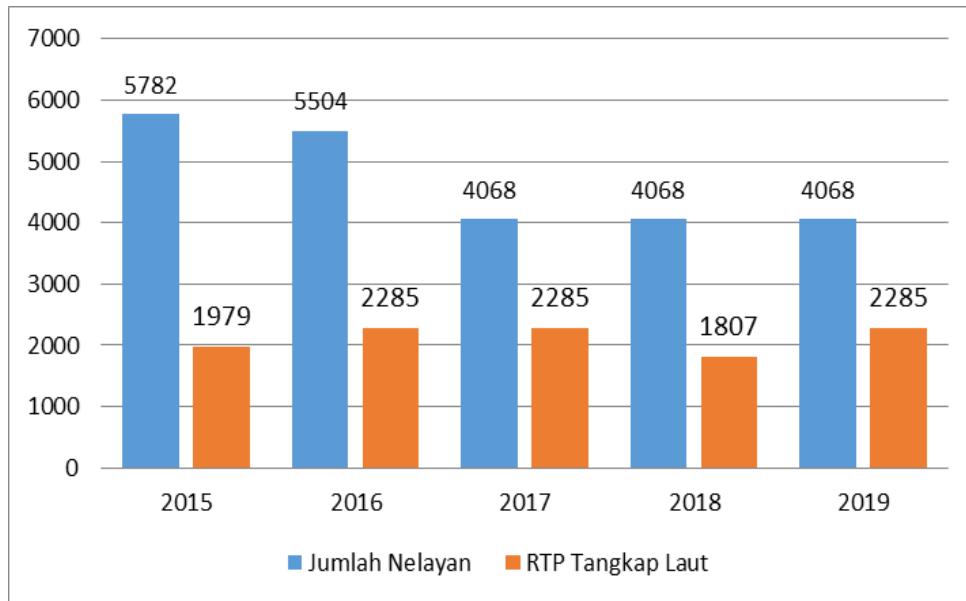


Sumber : Dataku 2019

Gambar 2-54 Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2018

Jumlah nelayan DIY selama lima tahun terakhir cenderung menurun bahkan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah nelayan mengalami stagnan sebanyak 4.068 orang. Namun, bila dirinci lebih lanjut, terlihat bahwa

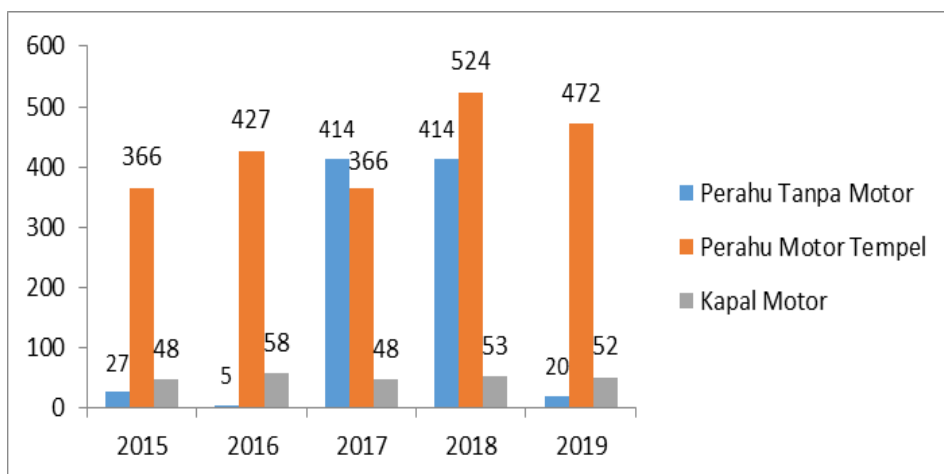
jumlah nelayan penuh dan nelayan sambilan utama cenderung meningkat. Nelayan sambilan tambahan terus menurun bila dibandingkan dengan perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap Laut, dapat diketahui bahwa jumlah RTP cenderung meningkat.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-55 Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2015-2019

Armada kapal penangkapan ikan DIY didominasi oleh perahu tanpa motor yang mencapai 50%. Perahu tanpa motor meningkat sangat signifikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 keberadaan perahu motor tempel lebih dominan, keberadaanya dari segi keamanan dilaut lebih baik dibandingkan dengan Perahu tanpa motor. Jumlah kapal penangkap ikan inkamina yang berkapasitas 30 GT (*Gross Ton*) tahun 2018 sebanyak sembilan kapal yang beroperasi.

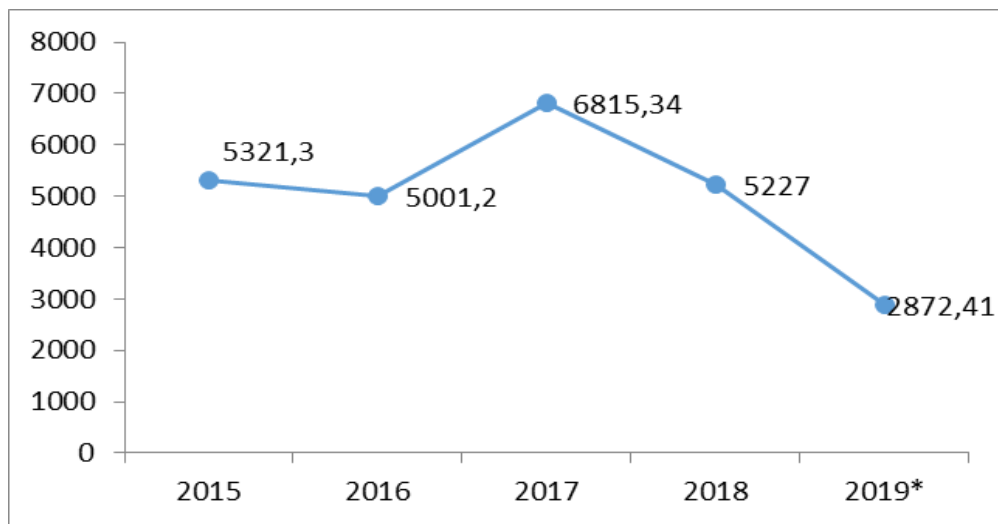


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-56 Grafik Perkembangan Armada Penangkapan Ikan DIY Tahun 2015-2019

Selain perikanan tangkap dilaut, produksi perikanan tangkap DIY juga didukung oleh produksi perikanan tangkap perairan umum (PU) di telaga, sungai dan waduk. Di DIY hampir mencapai 95% penangkapan ikan di sungai mendominasi produksi perairan umum, komoditas yang banyak ditangkap adalah nila dan lele.

Pola perkembangan produksi perikanan tangkap laut DIY cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir hal ini juga terjadi pada produksi perikanan tangkap perairan umum (PU). Hal ini dikarenakan produksi perikanan tangkap laut mendominasi sumbangan terhadap produksi perikanan tangkap secara keseluruhan. Perkembangan produksi perikanan tangkap DIY disajikan dalam grafik di bawah ini



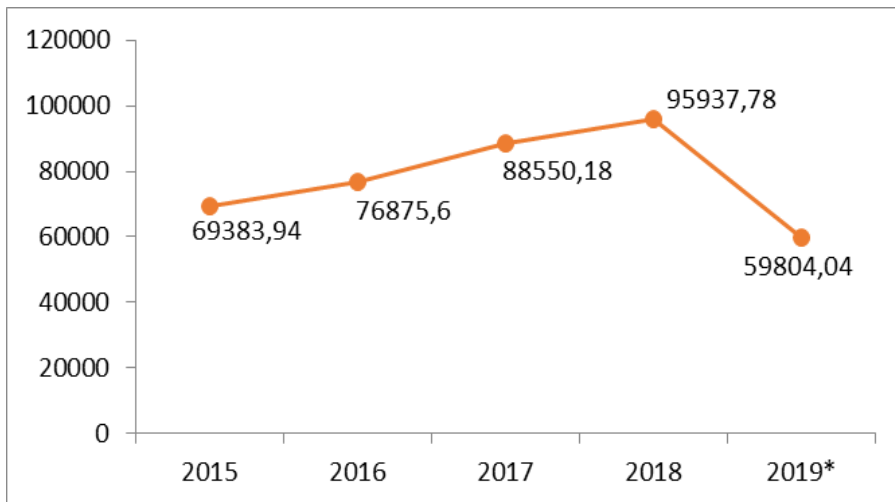
Sumber : Dataku, 2019

Gambar 2-57 Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2015 – 2019

DIY juga memiliki luas daratan yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan perikanan darat, baik air tawar maupun air payau. Budidaya perikanan air tawar didominasi oleh budidaya sistem kolam, baik kolam permanen atau kolam terpal yang mencapai lebih dari 96% kontribusi produksi perikanan budidaya. budidaya perikanan air tawar juga memanfaatkan sawah dengan sistem tumpangsari atau dikenal dengan minapadi dan udang galah padi (ugadi) selain di kolam. Sementara itu, budidaya di air payau dilakukan di tambak yang merupakan kontributor terbesar kedua produksi perikanan budidaya DIY.

Lele merupakan komoditas yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan pembudidayaannya yang relatif lebih mudah serta permintaan untuk konsumsi yang tinggi sehingga harganya stabil. Selain lele, komoditas nila dan gurami juga penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di kolam. Sementara itu, komoditas udang vaname merupakan hasil produksi budidaya air payau di tambak.

Produksi perikanan budidaya dalam lima tahun terakhir terus meningkat namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup berarti. Untuk mengetahui data produksi perikanan budidaya di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.

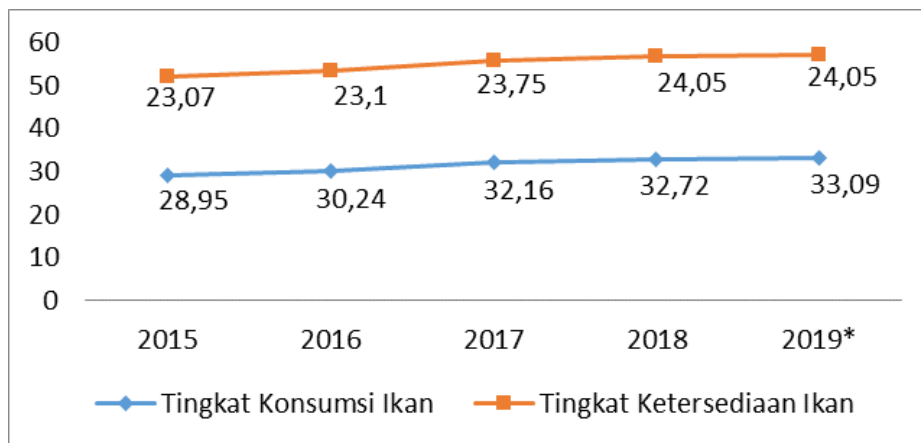


Sumber : Dataku, 2019

Gambar 2-58 Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2015-2019

Ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam periode 2015 hingga 2017. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan.

Penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan ikan. Peningkatan konsumsi ikan sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan.



Sumber : Dataku, 2019

Gambar 2-59 Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2015-2019

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Sesuai dengan Visi Pembangunan DIY, pembangunan pariwisata dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan DIY. Tercermin dalam lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB DIY, sektor ini menempati peringkat ke-3 dalam struktur perekonomian DIY atau sebesar 10,22%. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2018 sektor ini tumbuh mencapai 6,77% atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisatawan nusantara. Pada tahun 2019 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 6.549.281 orang terdiri dari wisatawan mancanegara sebesar 433.027 orang dan wisatawan nusantara sebesar 6.116.354 wisatawan orang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 meningkat sebanyak 16.655 orang atau 4% jika dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan sebesar 16 % atau sebanyak 843.635 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2-105 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

	2015	2016	2017	2018	2019
Wisman	308.485	355.313	397.951	416.372	433.027
Wisnus	3.813.720	4.194.261	4.831.347	5.272.719	6.116.354
Total	4.122.205	4.549.574	5.229.298	5.689.093	6.549.281

Sumber : Dinas Pariwisata DIY Tahun 2019

Hal yang harus menjadi perhatian DIY bahwa dalam pengembangan *event* atau festival pariwisata DIY perlu berorientasi pada daya tarik yang berkelas dunia Sektor pariwisata tengah menjadi sektor yang diusung oleh berbagai daerah. Persaingan antar daerah tentu menjadi tantangan bagi DIY dalam menempatkan posisinya sebagai tujuan pariwisata favorit. Di sisi lain tentu saja persaingan antar daerah ini juga memunculkan inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata baik yang berupa objek wisata maupun penyelenggaraan atraksi. Dalam *Calendar of Event* tahun 2020 yang dirilis Kementerian Pariwisata melalui proses seleksi dan kurasi, event di DIY yang masuk dalam COE hanya ada sejumlah 2 *event*. Jumlah tersebut lebih rendah dari Bali yang mencapai 5 *event* atau Jawa Tengah dengan 5 *event* dan Jawa Barat 5 *event*.

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di DIY pada tahun 2019 mencapai 2,16 hari dan lama tinggal wisatawan nusantara mencapai mencapai 1,9 hari. Beroperasinya bandara baru diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di tahun-tahun mendatang seiring meningkatnya frekuensi penerbangan langsung dari luar negeri. Dengan demikian wisatawan mancanegara yang datang ke DIY tidak tergantung dengan paket wisata dari Bali dan Jakarta atau daerah lainnya.

Lama tinggal wisatawan yang menunjukkan rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan di DIY baik untuk wisman mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk wisnus mengalami sedikit penurunan. Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2019. Penyelenggaraan event pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September, memperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas di Eropa dan Amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY. Meskipun lama tinggal wisatawan mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian tersebut masih relatif rendah. Rata-rata nasional untuk lama tinggal mencapai 2,8 hari. Selain itu, daerah

tujuan wisata lain seperti Bali mampu mencapai lebih dari 3 hari untuk Wisman.

Tabel 2-106 Lama Tinggal Wisatawan

Tahun	Wisman	Wisnus
2015	2,07	1,85
2016	2,00	1,95
2017	2,13	1,98
2018	2,15	1,99
2019	2,16	1,90

Sumber : Dinas Pariwisata DIY Tahun 2019

Jumlah Usaha Perjalanan Wisata belum tersebar secara merata di kabupaten/Kota di DIY, jumlah Usaha Perjalanan Pariwisata untuk tahun 2019 sebanyak 695. Perkembangan kepariwisataan menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa keterbatasan serta tantangan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan. Sebagai contoh antisipasi terhadap perkembangan dengan dioperasikan bandara baru *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kulon Progo namun jumlah Usaha Perjalanan Wisata masih terbatas berjumlah 17 usaha. Keterbatasan usaha Perjalanan wisata terutama dirasakan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 305 usaha dan Kota Yogyakarta 194 usaha.

Tabel 2-107 Jumlah Usaha Perjalanan Wisata

Kabupaten/ Kota	Biro Perjalanan / Wisata	Cabang Biro Perjalanan/Wisata	Agen Perjalanan Wisata
Sleman	269	19	17
Bantul	85	0	59
Kulon Progo	5	0	12
Gunungkidul	23	0	0
Kota Yogyakarta	180	0	14

2.1.3.2.3 Urusan Pertanian

2.1.3.2.3.1 Sub Sektor Pertanian

Kontribusi sektor pertanian PDRB DIY pada sampai dengan triwulan III tahun 2019 masih merupakan salah satu yang terbesar dengan sumbangan 9,79%. Namun kontribusinya cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015 hingga triwulan III Tahun 2019, bahkan tergeser menjadi kontributor terbesar keempat pada triwulan III tahun 2019. Penurunan kontribusi pertanian selain disebabkan oleh kurangnya daya saing dan nilai

tambah produk pertanian, juga disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke *non*pertanian. Alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan sawah beririgasi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pada Tahun 2017 terjadi penurunan luas sawah yang signifikan, hal disebabkan adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan pembangunan bandara baru di Kulon Progo dan pengembangan kawasan di sekitarnya. Namun pada tahun 2018 terjadi kenaikan luas sawah beririgasi sebesar 501 Ha dikarenakan adanya penambahan irigasi baru karena tersedianya jaringan irigasi primer sekunder, selain itu juga adanya pemanfaatan lahan bawah tegakan sehingga ada penambahan luasan dan berdampak pada pengurangan luasan sawah *non*irigasi, selain hal tersebut di Kabupaten Kulonprogo juga ada kegiatan cetak sawah baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-108 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan *non*Irigasi di DIY

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Sawah Beririgasi	45.976	45.880	42.877	43.378	43.378
Sawah <i>non</i> Irigasi	9.449	9.412	9.897	8.926	8.926

Sumber : Dinas Pertanian dan KP, 2019

Produksi tanaman pangan DIY mengalami kecenderungan peningkatan pada kurun waktu 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan 3,71%. Ketiga komoditas strategis, yaitu padi dan kedelai cenderung menurun selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar -4,56% dan -56,06%. Sedangkan jagung mengalami kecenderungan meningkat, walaupun rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun hanya 0,08%. Sementara itu, komoditas yang cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun adalah kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Pada tahun 2018 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 19.580 ton namun, untuk tahun 2019 khususnya produksi padi sawah mengalami peningkatan sebesar 21.453 ton namun untuk produksi padi ladang mengalami penurunan produksi sebesar 9.172 ton . Produksi padi sawah pada tahun 2018 merupakan yang terendah dalam lima tahun, sedangkan sebaliknya produksi padi ladang justru yang tertinggi dalam lima tahun.

Untuk produksi kedelai, dan kacang tanah mengalami peningkatan pada tahun 2018 dikarenakan curah hujan yang cukup namun di 2019 mengalami penurunan produksi karena musim kemarau yang relatif lebih panjang.

Demikian juga untuk komoditas kacang hijau dan ubi jalar mengalami penurunan cukup signifikan baik ditahun 2018 maupun 2019.

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-109 Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2019

No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Padi Sawah	746.810	712.285	678.530	637.003	652.456
2	Padi Ladang	198.326	170.417	202.576	214.887	205.715
	Total Padi	945.136	882.702	881.106	851.890	858.180
3	Jagung	299.084	310.257	311.764	309.221	342.442
4	Kedelai	18.822	16.763	8.656	10.931	7.143
5	Kacang Tanah	83.300	75.816	79.907	80.172	75.276
6	Kacang Hijau	230	289	301	376	188
7	Ubi Kayu	873.362	1.125.375	1.025.641	890.898	1.063.179
8	Ubi Jalar	6.070	3.256	5.289	4.113	3.940

Sumber: Dinas Pertanian dan KP, 2019

*) angka sementara

Produksi tanaman hortikultura di DIY dalam periode 2015 hingga 2019 cenderung meningkat, jika dilihat produksi selama lima tahun maka komoditas cabai besar, cabai rawit, bawang merah, mangga, jahe menunjukkan trend yang semakin meningkat, sedangkan durian, pisang, anggrek, dan manggis trennya cenderung menurun. Namun untuk tahun produksi 2017 ke tahun 2018 komoditas jahe mengalami penurunan sebesar 3.090 ton, sedangkan komoditas lainnya mengalami kenaikan.

Tabel 2-110 Perkembangan Produksi Hortikultura DIY Tahun 2015-2019 (dalam ton)

No	Komoditas Hortikultura Strategis	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Cabai Besar	Ton	17.759	23.387	24.168	29.516	34.443	12.138
2	Cabai Rawit	Ton	3.167	3.276	4.527	8.386	10.147	4.411
3	Bawang Merah	Ton	12.359	8.798	8.898	13.980	14.949	3.054
4	Pisang	Ton	56.062	51.218	52.416	40.920	45.066	5.286
5	Jahe	Ton	3.373	4.617	4.917	8.546	5.456	4.187
6	Mangga	Ton	49.667	36.740	19.613	32.237	49.666	8.121
7	Durian	Ton	7.894	8.355	8.327	6.767	7.894	4.591
8	Manggis	Ton	2.122	2.165	2.153	1.802	2.123	1.077
9	Anggrek	Tangkai	78.977	64.595	47.174	27.437	78.977	34.396

No	Komoditas Hortikultura Strategis	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
10	Salak	Ton	75.751	73.283	77.805	37.913	90.296	21.5388

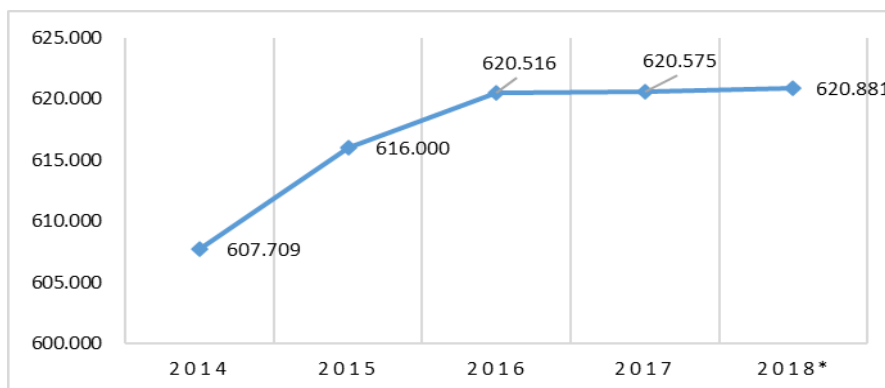
*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP, 2019

Komoditas cabe besar merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim. Sementara itu, kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

2.1.3.2.3.2 Sub Sektor Peternakan

Jumlah populasi ternak dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 cenderung meningkat, komoditas kelompok ternak besar dan ternak kecil cenderung. Produksi kelompok ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2018 bahkan merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir. Sementara kelompok ternak unggas cenderung meningkat dalam periode 2014 hingga 2018 dikarenakan kebutuhan unggas sebagai salah satu sumber pangan terus bertambah.



*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-60 Perkembangan Populasi Ternak DIY Tahun 2014-2018 (dalam animal unit)

Tabel 2-111 Populasi Ternak di DIY per Kelompok Ternak (dalam ekor), Tahun 2015-2019

Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019*)
Ternak Besar	307.418	311.766	316.740	246.434	231.313
Ternak Kecil	576.697	585.622	612.641	70.115	65.814
Ternak Unggas	15.047.604	15.465.288	16.071.142	304.331	282.744

*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh Sapi Potong yang banyak dikembangkan di Gunungkidul. Sementara kambing yang juga banyak dihasilkan di Gunungkidul juga merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil. Di sisi lain, ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar di DIY. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap semua kelompok ternak begitu juga di tahun 2019 hal ini terjadi dikarenakan banyak ternak yang keluar daerah terutama untuk komoditas sapi potong. Kelahiran dan ternak masuk ke DIY tidak seimbang dengan keluarnya ternak dari DIY.

2.1.3.2.3.3 Sub Sektor Perkebunan

Produksi perkebunan DIY dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -4,36%. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke komoditas lain, serta penurunan produksi beberapa komoditas strategis, seperti kopi dan tebu.

Tabel 2-112 Komoditas Perkebunan Strategis (dalam hektar), Tahun 2015-2018

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2015	2016	2017	2018	2019*)
Kelapa	58.725,92	54.606,52	47.318,93	47.369,49	45.789,91
Kakao	766,00	584,67	2.933,75	1.773,22	1.851,08
Kopi	567,90	421,29	277,78	482,92	479,12
Tembakau	2.540,79	1.608,96	1.896,12	888,15	964,02
Tebu	11.251,80	10.206,37	7.988,90	10.418,12	10.652,94

*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Sementara bila dilihat lebih rinci, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan

di DIY pada tahun 2019 dengan peranan melebihi 75%. Sedangkan komoditas strategis kakao merupakan penyumbang terbesar kedua, hal ini disebabkan peningkatan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2017 namun untuk tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan produksi. Di sisi lain, komoditas tebu produksinya terus menurun dalam lima tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2018 mencapai produksi terendah sebesar 6.731,8 ton.

2.1.3.2.4 Urusan Kehutanan

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY tahun 2018, wilayah hutan DIY pada tahun 2018 seluas 97.534,22 Ha yang terdiri atas hutan rakyat seluas 78.400,27 Ha dan hutan negara seluas 19.133,95 Ha. Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 60,61% dari luas hutan total di DIY dan didominasi oleh hutan rakyat seluas 45,23% dari luas hutan total DIY. Luas hutan rakyat di Gunungkidul meningkat pada tahun 2018 seluas 1.540,91 Ha dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kontribusi hutan di kabupaten Bantul dan Kulon Progo terhadap total luas hutan DIY justru menurun dibanding tahun 2017. Kontribusi luas hutan di Bantul menurun dari 10,11% menjadi 9,87% dan kontribusi hutan di Kulon Progo menurun dari 22,85% menjadi 22,39%.

Tabel 2-113 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2018

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total Hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,50	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
Hutan di DIY	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100,00

Sumber : analisis data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2018

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah kabupaten. Kabupaten Gunungkidul memiliki luasan terbesar, yaitu 78,40% dari luas hutan negara DIY (termasuk 1.773 ha yang merupakan hutan AB). Sementara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo memiliki kontribusi terhadap luas hutan negara DIY masing-masing sebesar 5,41%, 10,72%, dan 5,47%.

Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.519,470 Ha, Hutan lindung 2.297,61 Ha, Hutan konservasi 3.316,87 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar

alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2014–2019 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak. Luas hutan yang terbakar terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 0,710 hektar. Sedangkan pada kasus pencurian kayu, angka tertinggi terjadi pada tahun 2014, sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencurian kayu tercatat sebanyak 46 kasus. Angka ini menurun 10 kasus jika dibandingkan tahun 2018 dimana terjadi 56 kasus pencurian kayu. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Selain pencurian kayu, hutan di DIY masih menghadapi persoalan tekanan sosial masyarakat. Masalah mendasar di kawasan hutan disebabkan ketidakjelasan batas kawasan, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi. Di sisi lain, pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk keperluan pertanian, permukiman maupun sektor lain di luar kepentingan sektor kehutanan juga menimbulkan tekanan terhadap hutan.

Sementara itu, DIY masih memiliki lahan kritis di kawasan hutan yang tersebar di empat kabupaten dengan luasan paling besar berada di Gunungkidul (± 18.000 ha). Lahan kritis antara lain disebabkan faktor alam, seperti yang terjadi di Gunungkidul, terutama bagian Selatan yang strukturnya didominasi bebatuan kapur. Tren wisata alam yang terus berkembang di DIY menjadikan jasa lingkungan yang berasal dari sektor kehutanan berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di DIY. Selama tahun 2018, realisasi pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan mencapai Rp 2.260.603.250,00 yang berasal dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 1.962.831.125,00.

Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga disumbang oleh produksi minyak kayu putih dimana pada tahun 2019 produksinya dapat melampaui target yaitu sebesar 39.323 liter dari target 39.316 liter. Untuk tahun 2019 ada perubahan target literanya yang semula 44.285 menjadi 39.316 hal ini dikarenakan adanya pergantian boiler dan perbaikan peralatan lainnya.. Jumlah produksi minyak kayu putih dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-114 Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019*)	39.316	39.323	9.887.974.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Pengelolaan hutan di DIY tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya melalui peningkatan produksinya saja tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosialnya agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari sehingga pemanfaatan hutan menjadi lebih optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi sumberdaya mineral (ESDM) merupakan urusan pilihan dan terbagi menjadi 5 sub urusan, yaitu ; geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

2.1.3.2.5.1 Sub Urusan Geologi

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa dalam sub urusan geologi, pemerintah daerah provinsi mempunyai ketugasan:

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, terdapat 3 Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di DIY yakni CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates, dan CAT Wonosari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan Pemda DIY adalah terhadap cekungan air tanah yang berada dalam provinsi saja, meliputi CAT Yogyakarta-Sleman yang mempunyai luasan 916 km² dan liputannya meliputi Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Progo serta CAT Wates dengan luasan 150 km² yang berlokasi di Kab. Kulon Progo.

Pelaksanaan sub urusan geologi di DIY terkait dengan air tanah dimaksudkan untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah yang diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata-rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28 meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35 meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81 meter (6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 6,46% pada musim hujan terbasah dan sebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musim kemarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut di atas, rerata muka air

tanah di CAT Yogyakarta – Sleman tahun 2015 masih <20% terhadap tebal rata-rata akuifer sesuai target tahun 2015. Kondisi ini juga dapat dipertahankan hingga tahun 2018, di mana penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata-rata akuifer.

Pada tahun 2018 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan:

- Pembangunan 160 unit sumur resapan untuk imbuhan air tanah;
- Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;
- Pemeliharaan/perbaikan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam;
- Pengaturan Pelaksanaan dewatering sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman;
- Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air Tanah di CAT Yogyakarta – Sleman.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air (daerah rawan kekeringan) Pemda DIY melakukan pembangunan sumur bor. Kegiatan ini mendukung capaian target indikator RPJMD DIY 2017-2022 yaitu cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air. Pada tahun 2019 telah dibangun 5 sumur bor di Kabupaten Gunungkidul dan 4 sumur bor di Kabupaten Bantul. Hingga tahun 2018 Pemda DIY telah membangun sumur bor di 75 dusun dari 245 dusun yang merupakan daerah rawan kekeringan.

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan air tanah dan geologi yang telah diterbitkan oleh KP2TSP berupa Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Surat Izin Pengeboran Air Tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan akan dikenakan berupa pemberian sanksi administratif. Di tahun 2018 telah diterbitkan 6 izin pengusahaan air tanah dengan status perpanjangan 2 izin di Kota Yogyakarta dan 4 izin baru di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

2.1.3.2.5.2 Sub Urusan Mineral dan Batubara

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Hal ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB DIY. Tertib ijin dan pelaksanaan ijin pertambangan merupakan salah satu hal yang dilakukan Pemda DIY untuk mengeliminir persoalan lingkungan dan tata ruang sebagai dampak dari aktivitas pertambangan.

Wilayah DIY secara potensi alam tidak banyak memiliki potensi tambang yang besar, sebagian besar potensi yang dimanfaatkan adalah mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, batu, kerikil dan lainnya. Dalam pelaksanaan tertib perijinan, dapat terlihat bahwa sebanyak 268 dari 733 pemohon WIUP sudah mendapatkan ijin, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi persyaratan perijinan yang dibutuhkan.

Tabel 2-115 Data Status Permohonan WIUP

No	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH PERMOHONAN	WIUP
			SK PERSETUJUAN WIUP
1	Kabupaten Kulon Progo	415	149
2	Kabupaten Gunungkidul	79	31
3	Kabupaten Sleman	157	42
4	Kabupaten Bantul	68	25
5	Lintas Kabupaten	14	21
TOTAL		733	268

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Berdasarkan data yang ada sampai dengan Desember 2019, terdapat 212 Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi yang telah diterbitkan oleh Pemda DIY, sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi telah dikeluarkan sebanyak 70 ijin.

Tabel 2-116 IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi

IUP EKSPLORASI (Prov)		IUP OPERASI PRODUKSI (Prov & Kab) Kab = 9; Prov = 61	
DARAT	SUNGAI	DARAT	SUNGAI
110	102	38	32
212		70	

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (permen ESDM No 26 Tahun 2018), dengan tujuan Peningkatan Perizinan Pengusahaan Pertambangan yaitu IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Untuk penjualan,

IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.1.3.2.5.3 Sub Urusan Ketenagalistrikan

Sasaran pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Listrik dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga berakses listrik dan indikator capaian program Penduduk berakses energi dan Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan di masyarakat dapat dipenuhi melalui penyediaan listrik serta pemenuhan akan bahan bakar minyak dan gas di masyarakat.

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik. Pada tahun 2019 sebanyak 1.316.752 Rumah Tangga memiliki akses listrik. Rumah Tangga berakses listrik adalah rumah tangga yang telah menikmati listrik baik dari PLN (yang ber KWH meter) maupun *non*PLN. Sumber listrik *non*PLN bisa dari menyalur, PLTS dan sumber lainnya. Peningkatan Rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dicapai dengan memperhatikan 3 aspek keselamatan ketenagalistrikan, yaitu aman, andal dan ramah lingkungan.

Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau menyalur dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan berupa pemasangan instalasi listrik 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA. Sampai dengan akhir tahun 2018 sudah ada 6.577 rumah tangga miskin berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dari total 61.999 rumah tangga miskin yang terdapat dalam

Basis Data Terpadu TNP2K 2015. Pelaksanaan penyediaan SR untuk masyarakat miskin di DIY, direncanakan pemasangan SR sampai dengan tahun 2019 dengan target menuntaskan rumah tangga yang belum berlistrik sama sekali. Selanjutnya mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 akan dilakukan pemasangan SR bagi rumah tangga yang masih menyalur (belum memiliki meteran sendiri).

Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Selain itu, mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Dalam rangka melaksanakan penghematan energi dan pelaksanaan konservasi maka, Pemda DIY melakukan konservasi energi melalui kegiatan audit energi. Kegiatan audit energi ini dimaksudkan untuk mendorong organisasai pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penerapan konservasi energi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan energi dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dan berbagai inovasi pada skala ekonomis. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Audit Energi yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 di 52 unit bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri berfokus pada segi kelistrikan (power quality), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

2.1.3.2.5.4 Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY yang dilakukan pada tahun 2015 hingga saat ini melalui optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY.

Tabel 2-117 Data Jenis Energi Baru Terbarukan 2015 – 2018

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG							
			2015		2016		2017		2018	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE
PLTS	10M Wp	301	200 kWp	0,32	253 kwp	0,4048	258 kwp	0,4128	258 kwp	0,4128
PLTMH	2MW	817	882 kW	358	882 kW	358	882 kW	358	882 kW	358
PLT Bayu	100 MW	165.920	131 kW	24,6	131 kW	24,60	131 kW	24,60	131 kW	24,60
PLT Bagasse	3.6 MVA / 2.5 MW	929	3.6 MVA / 2.5 MW	873	3.6 MVA / 2.5 MW	873	3.6 MVA / 2.5 MW	873	3.6 MVA / 2.5 MW	873
PLT Sampah	30 MW	9,04	5 kW	2	5 kW	2	5 kW	2	5 kW	2
Bioethanol	36 Juta Liter	18.060	5 juta	2.508	5 juta	2508	5 juta	2508	5 juta	2508
Biogas Ternak Sapi	15,000 unit	2.768	1.500 Unit	328	2.100 Unit	459,20	2.425 Unit	530,2667	2.979 Unit	651.408
Biogas Sanitasi	500 unit	92	100 Unit	11	100 Unit	11	100 Unit	11	100 Unit	11
Biogas Ampas Tahu	500 Unit	91	10 Unit	2	10 Unit	2	10 Unit	2	10 Unit	2
Biomassa Pellet	1,500 Ton	548	600 Ton	219	600 Ton	219	600 Ton	219	600 Ton	219
DME	20 Lokasi (kajian)		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi	
Total Energi (TOE)	98.567		4.388		4.457,20		4.528,28		4.649,42	

sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

2.1.3.2.6 Urusan Perdagangan

DIY sebagai pusat kegiatan pariwisata dan pendidikan mendorong munculnya permintaan atas layanan sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Tercatat dalam sensus ekonomi 2016, sektor usaha perdagangan besar dan eceran

mendominasi jumlah Usaha Mikro dan Kecil dengan persentase mencapai 35,4%. Secara makro, sektor perdagangan menempati urutan ke lima dalam struktur PDRB DIY dan tumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Di bandingkan dengan tahun 2014 yang kontribusinya mencapai 8,3% terhadap total PDRB DIY, pada tahun 2019 kontribusi sektor ini meningkat menjadi 8,47%.

Perkembangan sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peningkatan jumlah SIUP maupun TDP ini menunjukkan dua hal yaitu perkembangan unit usaha dan kepedulian pelaku usaha untuk mencatatkan kegiatannya dalam perijinan formal. Tercatat pada tahun 2017 sampai dengan triwulan tiga 2019 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY mengalami pertumbuhan. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2018 tercatat sebanyak 52.199 SIUP dan pada 2019 tercatat sebanyak 52.323 SIUP. Dilihat dari golongan usahanya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 84,99%, sementara persentase terkecil dimiliki oleh golongan pengusaha besar dengan persentase sebesar 2,16%.

Tabel 2-118 Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2017 - 2019

No	Golongan Usaha	2017	2016	2017	2018	2019
1	Pengusaha Besar	1.116	1.094	1.116	1.125	1.130
2	Pengusaha Menengah	3.070	2.872	3.070	3.235	3.259
3	Pengusaha Kecil	44.763	42.217	44.763	44.404	44.473
4	Pengusaha Mikro	3.095	2.334	3.095	3.435	3.461
Jumlah		48.517	52.044	52.044	52.199	52.323

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 4,57% tiap tahunnya. Realisasi jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) DIY Per Kabupaten/Kota pada tahun 2018 sebanyak 56.011 unit, tumbuh sebesar 2,12% dari tahun sebelumnya. Mayoritas TDP pada tahun 2018 dimiliki oleh pengusaha di Kota Yogyakarta sebesar 28,82%, diikuti oleh pengusaha di Kab. Sleman (27,82%), dan pengusaha di Kab. Bantul (22,59%).

Tabel 2-119 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2018

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bantul	9.571	10.152	10.627	11.163	12.130	12.653
2	Sleman	13.308	13.815	14.294	14.737	15.243	15.584
3	Kulonprogo	3.875	3.880	4.598	5.316	5.796	5.824
4	Gunungkidul	5.144	5.430	5.578	5.676	5.791	5.808
5	Yogyakarta	13.689	14.448	14.879	15.250	15.888	16.142
Jumlah		45.587	47.725	49.976	52.142	54.848	56.011

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya pasar sebagai sarana perdagangan. Keberadaan pasar baik toko modern maupun tradisional mempunyai tiga fungsi utama dalam perdagangan yaitu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana promosi. Jumlah sarana perdagangan di DIY mengalami pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Tercatat jumlah toko modern yang berdiri hingga tahun 2018 sejumlah 825 unit, tumbuh sebesar 0,85% dibanding tahun sebelumnya. Namun untuk pasar tradisional tidak ada kenaikan dari tahun 2016, tetap sejumlah 349 unit. Oleh karena itu, kedepannya upaya revitalisasi pasar harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atau pasar tradisional yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Program revitalisasi pasar dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni fisik dan *nonfisik*. Secara fisik, pengelolaan pasar perlu didorong dalam hal kebersihan, kenyamanan, penataan los hingga keamanan. Sementara itu, secara *nonfisik* perlu didorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pedagang. Pedagang diharapkan memahami cara pengelolaan keuangan untuk meningkatkan transaksi hingga mendapatkan permodalan dari perbankan.

Tabel 2-120 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2018

Jenis Toko	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toko Modern	644	661	710	777	818	825
Pasar Tradisional	532	361	361	349	349	349
Jumlah	1.176	1.022	1.071	1.126	1.167	1.174

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Perkembangan yang positif juga ditunjukkan pada sisi perdagangan luar negeri DIY. Secara umum, perkembangan ekspor di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Tercatat, Nilai Ekspor DIY pada tahun 2019 sebesar 370,22 Juta US\$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 32,2 Juta US\$ atau sebesar 9,53% jika dibandingkan pada tahun 2018. Peningkatan ekspor DIY didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, STK Sintetis, kerajinan kertas, dan kerajinan kayu. Sementara tujuan utama ekspor komoditas DIY tahun 2018 adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Australia dan Perancis.

Tabel 2-121 Perkembangan Ekspor di DIY Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Volume (Juta kg)	57,51	56,9	57,01	59,24	53,57
Nilai (Juta US \$)	233,25	242,47	252,18	296,61	338,02
Komoditi	166	110	88	78	88
Negara	114	115	112	112	115
Eksportir	310	325	286	314	360

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Tabel 2-122 Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2015-2019 (dalam Juta US \$)

No	Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pakaian Jadi Tekstil	56.88	48.55	67.17	87.77	88.49
2	Mebel Kayu	54.52	47.04	59.07	64.54	52.34
3	Sarung Tangan Kulit	26.37	31.11	42.63	36.03	26.38
4	Biji Vanila	0.5	1.61	10.45	27.37	-
5	Minyak Atsiri	15	27.41	23.01	25.65	-
6	STK Sintetis	9.47	9.13	10.33	12.79	12.03
7	Kerajinan Kayu	10.65	7.15	8.39	7.87	6.58
8	Produk Tekstil Lainnya	3.23	10.83	8.54	6.85	1.96
9	Kerajinan Kertas	3.76	4.81	9.15	5.77	7.57
10	Kerajinan Batu	5.13	5.13	5.13	5.13	3.87
Sub Total		165.08	180.38	187.64	238.74	199.2
Komoditi lainnya		76.27	62.09	64.54	57.87	51.60
Total		236.22	242.47	252.18	296.61	250.82

Sumber: BPPSD DIY, 2020

Meskipun ekspor DIY tumbuh secara positif, namun jika dibandingkan dengan angka ekspor nasional, nilai ekspor DIY masih relatif kecil. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor DIY terhadap total ekspor *nonmigas* nasional hanya 0.01%. Nilai tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. DIY menempati urutan ke 30.

Sebagai perbandingan. capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi Bali yang mencapai 0.18% atau Jawa Tengah yang mencapai 3.77%.

Tabel 2-123 Persentase Kontribusi Ekspor *nonMigas* Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2018

N o	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor <i>nonMigas</i>	No	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor <i>nonMigas</i>
1	D K I JAKARTA	33,44	18	SULAWESI SELATAN	0,71
2	JAWA TIMUR	11,72	19	KALIMANTAN BARAT	0,62
3	KALIMANTAN TIMUR	9,66	20	SULAWESI UTARA	0,41
4	R I A U	8,16	21	KALIMANTAN TENGAH	0,29
5	RIAU ISLANDS	5,51	22	B A L I	0,19
6	SUMATERA UTARA	5,41	23	MALUKU UTARA	0,42
7	KALIMANTAN SELATAN	5,38	24	SULAWESI TENGGARA	0,5
8	JAWA TENGAH	3,92	25	KALIMANTAN UTARA	0,18
9	LAMPUNG	2,04	26	BENGKULU	0,08
10	SUMATERA SELATAN	2,08	27	NANGROE ACEH DARUSALAM	0,09
11	PAPUA	2,51	28	JAWA BARAT	0,04
12	SULAWESI TENGAH	2,42	29	NUSA TENGGARA TIMUR	0,01
13	SUMATERA BARAT	0,99	30	D.I. YOGYAKARTA	0,01
14	BANTEN	1,29	31	PAPUA BARAT	0,01
15	BANGKA BELITUNG	0,97	32	GORONTALO	0,02
16	J A M B I	0,65	33	M A L U K U	0
17	NUSA TENGGARA BARAT	0,28	34	SULAWESI BARAT	0

Sumber: Kementerian Perdagangan, Tahun 2019

2.1.3.2.7 Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB DIY. Pada tahun 2019, kontribusi industri pengolahan mencapai 12,85%. Namun demikian, peran sektor ini mulai mengalami perlambatan terutama karena perekonomian DIY sudah bergerak ke arah sektor-sektor tersier yaitu jasa-jasa. Tahun 2019 sektor industri pengolahan tumbuh positif pada angka 5,73% atau lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai sebesar 6,60%.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penopang utama sektor industri di DIY. Jumlah IKM DIY yang terdiri dari industri pangan, sandang dan

kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan pada tahun 2018 adalah sebanyak 94.840 unit usaha atau mengalami peningkatan sebesar 3.98% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebanyak 91.214 unit usaha. IKM DIY didominasi oleh industri pangan dan industri kerajinan. Secara keseluruhan IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebanyak 351.425 tenaga kerja pada tahun 2018 atau meningkat 6.33% dari tahun 2017 yang menyerap sebanyak 330.508 tenaga kerja.

Tabel 2-124 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Unit Usaha	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214	94.840
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	310.173	318.858	326.669	333.980	330.508	351.425
Nilai Investasi (Rp Juta)	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.208.563	1.943.721
Nilai Produksi (Rp Juta)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.257	12.749.270
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Juta)	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2018 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp7,3 triliun. Sementara itu, Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 12.7 triliun. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp5,4 triliun pada tahun 2017. Nilai tambah tersebut meningkat cukup pesat sebesar 44,58% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun ada peningkatan daya saing pada produk DIY dibanding pesaingnya. Kedepannya untuk mempertahankan daya saing tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi antara lain melalui penguatan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual serta peningkatan inovasi teknologi terapan yang dapat diaplikasikan secara komersial.

Industri-industri berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Tercatat ada sebanyak 313 sentra IKM yang tersebar di kabupaten/kota wilayah DIY dengan jumlah unit usaha sebanyak 17.866 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 55.891 orang. Jumlah sentra terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dengan persentase sebesar 30,67%. diikuti oleh

Kabupaten Bantul (24,92%). Kabupaten Gunungkidul (21,41%), Kabupaten Sleman (16,61%), dan persentase terkecil dimiliki oleh Kota Yogyakarta (6,39%). Apabila ditilik dari kapasitas produksinya, Kabupaten Sleman memiliki persentase tertinggi sebesar 205.587.035 unit (55,54%) dengan nilai investasi sebesar 146.999.860 ribu rupiah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Hal tersebut menandakan sentra IKM di Kabupaten Sleman lebih maju apabila dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lain. Kedepannya Kabupaten/Kota lainnya agar dapat mengikuti jejak Kabupaten Sleman dengan peningkatan investasinya akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 2-125 Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Sentra	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi (Unit)
1	Kota Yogyakarta	20	340	1,884	22,367,922	3,924,900
2	Sleman	55	4,163	12,087	149,953,273	206,215,591
3	Bantul	78	5,745	15,658	27,333,455	11,404,687
4	Kulon Progo	96	6,244	19,148	141,197,110	130,590,829
5	Gunung Kidul	71	2,430	8,258	50,178,447	23,894,218
	Jumlah	320	18,922	57,035	391,030,208	379,030,225

Industri pengolahan di DIY didominasi oleh industri makanan dan kerajinan. Namun demikian, setiap kabupaten/kota memiliki karakter potensi industri masing-masing. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 golongan usaha industri yang cukup dominan di Bantul adalah industri makanan, industri barang dari kayu, industri pakaian jadi, industri gerabah, dan industri tekstil. Pada umumnya, industri yang berkembang di Bantul merupakan industri kerajinan lokal yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat tapi memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh industri berbasis pertanian (agroindustri) dan industri makanan. Usaha industri yang cukup strategis bagi Gunungkidul adalah pengolahan barang dari kayu, anyaman bambu, dan lainnya.

Jenis usaha industri yang paling banyak di Kabupaten Kulon Progo adalah industri gula kelapa/gula jawa/gula merah/gula semut. Usaha industri ini menggunakan bahan baku utama dari nira/aren kelapa lokal yang banyak diusahakan di wilayah Kulon Progo. Sentra jenis usaha ini banyak dijumpai di wilayah kecamatan Kokap dan kecamatan lain seperti Girimulyo, Lendah, dan

Kalibawang. Meskipun seringnya adalah usaha sampingan, permintaan ekspor komoditas ini cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan jenis industri makanan. Selanjutnya, untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, perekonomian sudah didominasi oleh sektor jasa seperti penyediaan jasa akomodasi, transportasi dan perdagangan. Namun demikian, beberapa industri makanan masih cukup banyak ditemui di kawasan perkotaan seperti industri bakpia di kawasan Pathuk.

2.1.3.2.8 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi semestinya memberikan manfaat bagi dua daerah yang terlibat. Bagi daerah tujuan, dengan adanya transmigrasi maka potensi lahan yang sebelumnya belum tergarap dapat bernilai tambah oleh aktivitas pertanian atau perkebunan yang dilakukan oleh para transmigran. Sementara itu, bagi DIY penyelenggaraan transmigrasi menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja atau keterbatasan lahan untuk dibudidaya. Secara nasional kegiatan transmigrasi juga berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana, sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran juga telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme KSAD (Kerjasama Antar Daerah). Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun dengan kecenderungan yang semakin menurun.

Tabel 2-126 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2018

KAB/KOTA	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ani mo	Pendaftar	Ani mo	Pendaftar	Ani mo	Pendaftar	Ani mo	Pendaftar	Ani mo	Pendaftar	Ani mo	Pendaftar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
Yogyakarta	74	48	59	39	71	47	55	41	64	42	71	47
Sleman	465	465	468	468	281	281	286	286	50	28	50	28
Bantul	260	130	334	167	210	105	172	81	76	4	50	28
Kulon Progo	312	122	338	133	343	137	270	117	165	91	164	89
Gunungkidul	104	50	155	98	40	30	70	44	29	7	29	7
Jumlah	1.215	815	1.354	905	945	600	853	569	384	172	384	199

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Menurunnya animo juga sejalan dengan menurunnya kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selama kurun 2013-2018, Pemerintah DIY memberangkatkan transmigran sebanyak 647 KK terdiri dari 2.015 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2013 hingga 2018 mayoritas transmigran berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah 206 KK atau 643 jiwa, sedangkan terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 62 KK (192 jiwa). Angka ini jika dilihat per tahun cenderung fluktuatif. Fluktuasi disebabkan besaran kuota yang didapatkan oleh Pemda DIY dari pemerintah pusat berbeda dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013-2018 masing-masing besaran kuota adalah 150, 70, 116, 80, 48, dan 87 KK.

Tabel 2-127 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun												Total	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	15	46	5	15	12	39	10	33	7	21	10	30	62	192
Sleman	10	31	11	36	22	82	9	27	7	22	23	72	97	307
Bantul	53	168	23	73	40	128	25	75	12	37	28	95	206	643
Kulon Progo	47	138	19	65	27	85	16	48	16	43	16	44	177	541
Gunungkidul	25	75	12	41	15	56	20	64	6	21	10	28	105	332
JUMLAH	150	458	70	230	116	390	80	247	48	144	87	269	647	2015

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigran asal DIY selama tahun 2013 hingga 2017. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan

mencapai 153 KK. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan pada periode tahun 2013-2018 cenderung menurun, bahkan pada tahun 2016 dan 2018 tidak ada transmigran ke Sumatera Selatan. Hal ini karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif lain yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2016 ada 3 lokasi tujuan alternatif transmigran asal DIY yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dengan proporsi terbanyak di Kalimantan Utara (62,5%) dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK. Pada tahun 2017, lokasi alternatif tujuan transmigrasi difokuskan pada Pulau Sulawesi yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo; sedangkan pada tahun 2018 terdapat empat lokasi alternative baru yaitu Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Dari 14 lokasi tujuan transmigrasi pada kurun waktu 2013-2018 terdapat 3 lokasi yang hanya sekali menjadi tujuan transmigrasi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung.

Tabel 2-128 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2018

Daerah Tujuan	Tahun											
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,6)	25	(21,6)	-	-	18	(37,5)	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(11,5)
Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(11,5)
Kalimantan Barat	10	(6,7)	15	(21,4)	-	-	10	(12,5)	-	-	8	(9,2)
Kalimantan Tengah	25	(16,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,1)	50	(62,5)	-	-	27	(31)
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	20	(25,0)	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(11,5)
Sulawesi Selatan	15	(10,0)	-	-	25	(21,6)	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	10	(6,7)	25	(35,7)	16	(13,8)	-	-	12	(25)	5	(5,7)
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5,7)
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(18,75)	4	(4,6)
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(18,75)	8	(9,2)
Bangka Belitung	-	-	10	(14,3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	150	(100)	70	(100)	116	(100)	80	(100)	48	(100)	87	(100)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Pada tahun 2018, terdapat 9 lokasi tujuan transmigrasi yaitu Sumatera Barat (10 KK), Aceh (10 KK), Kalimantan Barat (8 KK), Kalimantan Utara (27 KK), Kalimantan Timur (10 KK), Sulawesi Tenggara (5 KK), Sulawesi Barat (5 KK), Sulawesi Tengah (4 KK), dan Gorontalo (8 KK). Adapun rincian alokasi penempatan sebagai berikut.

Tabel 2-129 Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2018

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Sigulai, Kab. Siemeuleu, Aceh	0	0	0	0	0	0	4	8	6	19	10	27
Padang Tarok SP 1, Kab. Sijunjung, Sumbar	3	7	4	15	3	9	0	0	0	0	10	31
Keladen, Kab. Paser, Kaltim	2	6	3	8	5	13	0	0	0	0	10	27
Tanjung Satai SP 3, Kab. Kayong Utara, Kalbar	0	0	0	0	4	19	2	7	2	5	8	31
Tanjung Buka SP 6B, Kab. Bulungan, Kaltara	5	17	15	47	7	23	0	0	0	0	27	87
Kabera, KAB Morowali, Sulawesi Tengah	0	0	1	2	3	11	0	0	0	0	4	13
Raimuna, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	2	9	3	10	0	0	5	19
Salondeang, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	3	8	2	4	5	12
Bukit Aren, Kab Bukit Aren, Gorontalo	0	0	0	0	1	2	3	9	0	0	4	11
Sandalan, Kab. Pohuwato, Gorontalo	0	0	0	0	3	9	1	2	0	0	4	11

Tabel 2-130 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Kabera, Kab. Morowali, Sulteng	0	0	2	7	2	6	3	7	2	6	9	26
Parudongka, Kab. Konawe, Sultra	2	8	0	0	5	17	5	17	0	0	12	42
Bukit Aren, Kab. Gorontalo, Gorontalo	2	5	3	9	2	3	2	3	0	0	9	20
Kaban Agung, Kab. Lahat, Sumsel	3	8	0	0	0	0	3	9	4	15	10	32
Simpang Tiga SPS, Ogan Komering Ilir, Sumsel	0	0	2	6	3	11	3	7	0	0	8	24
JUMLAH	7	21	7	22	12	37	16	43	6	21	48	144

Tabel 2-131 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2016

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
PROV. SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	--	5	-	-	5	-
PROVINSI RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV. SUMATERA SELATAN	5	-	6	-	9	-	13		14	-	47	-
PROV. KALIMANTAN UTARA	5	-	9		15	-	11	-	10	-	50	-
PROV. GORONTALO	3	-	6	-	17	-	4	-	-	-	30	-
PROV. KALIMANTAN BARAT	-	-	3	-	5	-	7	-	5	-	20	-
PROV. SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
PROV. SULAWESI BARAT	-	-	-	-	4	-	4	-	8	-	16	-
Jumlah	13		24		50		52		37		176	

Tabel 2-132 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2015

NOM OR	LOKASI PROYEK	TANGGAL PENAMPUNGAN	KABUPATEN / KOTA										JUMLAH REALISASI	
			KOTA		SLEMAN		BANTUL		K.PROGO		GN.KIDUL			
			Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Laeya, Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara	5 - 7 Nopember 2015	-	-	-	-	5	16	5	18	-	-	10	34
2	Anauwa, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara	5 - 7 Nopember 2015	-	-	3	11	3	10	-	-	-	-	6	21
3	Tanjung Buka SP 6, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	9 - 11 Nopember 2015	5	20	10	39	15	47	10	32	10	37	50	175
4	Mahalona SP 4, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan	17 - 19 Desember 2015	3	8	3	11	6	20	5	17	-	-	17	56
5	Watu, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan	17 - 19 Desember 2015	1	2	2	7	3	9	2	3	-	-	8	21
6	Simpang Tiga SP 2, Kab. OKI, Sumsel	20 - 22 Desember 2015	3	9	4	14	8	26	5	15	5	19	25	83
J U M L A H			12	39	22	82	40	128	27	85	15	56	116	390

Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, penjajakan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi dan melakukan penjajakan pelaksanaan transmigrasi lokal.

2.1.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan,

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada gubernur,

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Pimpinan : Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-subbagian; dan
- d. kelompok jabatan fungsional,

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,

2.1.3.3.2 Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD DIY merupakan unsur fasilitasi DPRD DIY yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Urusan Sekretariat DPRD dituangkan dalam 9 program dan 19 kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran, yaitu a). meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD serta b). terfasilitasinya kinerja DPRD. Pada sasaran pertama, indikator sasarannya adalah skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD dan skor indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD. Sementara itu, pada sasaran kedua indikator yang digunakan adalah persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2019, capaian indikator sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian kualitas layanan pada urusan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan urusan ini tidak hanya berasal dari faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan demikian, perlu koordinasi dan sinergisitas yang baik dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan yang muncul dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2.1.3.3.3 Urusan Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan clean government di jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu,

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu,

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akandicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien,

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY Tahun 2019 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan
- c. Kegiatan pengusutan
- d. Melakukan Evaluasi LAKIP

- e. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- f. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Pencermatan RKA SKPD
- d. Consulting dan Quality Assurance
- e. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname
- f. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja, Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome,

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan, Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat DIY pada 2019 telah melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

2.1.3.3.4 Urusan Perencanaan

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dengan menggunakan landasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan harus berorientasi pada proses dan substansi. Perencanaan yang berorientasi pada proses dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Keseluruhan pendekatan perencanaan tersebut secara kontinyu telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Di samping perencanaan yang berorientasi pada proses. mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tersebut. perencanaan pembangunan juga harus berorientasi pada substansi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik. integratif. dan spasial. Dengan pendekatan ini. perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pelaksanaan perencanaan pembangunan harus menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan spasial yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.1.3.3.5 Urusan Keuangan

Secara umum Pendapatan daerah DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016. pendapatan daerah tercatat sebanyak 3.899 triliun rupiah naik menjadi 5.431 triliun rupiah tahun 2018. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nominal juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.673 triliun rupiah naik menjadi 2.082 triliun rupiah tahun 2019. Jika dilihat

dari persentase perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah memiliki tren yang menurun dibandingkan persentase tahun 2016 dan 2018.

Tabel 2-133 Pendapatan Daerah DIY

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Pendapatan Daerah	3.899.192.985 .313.51	5.085.241.219. 288.27	5.431.677.219. 464.27	5.699.328.932. 440.50
Pendapatan Asli Daerah	1.673.749.196 .521.51	1.851.973.396. 065.27	2.031.019.470. 595.27	2.082.767.034. 434.50
PAD terhadap Pendapatan Daerah	42.93%	36.42%	37.39%	36.54

Sumber: BPKA DIY, 2020

Total jumlah aset mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal tersebut berasal dari kenaikan jumlah aset pengguna. Pada tahun 2016 total jumlah aset tercatat sebanyak 488.045 yang terdiri dari aset pengelola 2.306 dan aset pengguna 485.739 kemudian naik menjadi sebanyak 2.754.383 tahun 2017 yang didominasi oleh aset pengguna sebanyak 2.752.072.

Tabel 2-134 Jumlah aset yang di Pengguna dan Pengelola

Uraian	2016		2017	
	Jml Barang	Rp	Jml Barang	Rp
Pengelola	2,306	364,064,954,564	2,311	325,612,339,256
Pengguna	485,739	6,831,533,305,131	2,752,072	8,601,280,618,303
Total	488,045	7,195,598,259,695	2,754,383	8,926,892,957,559

Sumber: BPKA DIY, 2019

Berdasarkan jumlah aset yang dioptimalkan selama 2016-2017. aset berupa tanah tidak mengalami perubahan. Sementara itu. kenaikan jumlah aset yang dioptimalkan pada periode tersebut berasal dari peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Secara total pada tahun 2016 jumlah aset dioptimalkan sebanyak 267 aset dengan nilai 259.106 miliar rupiah dan tahun 2017 sebanyak 352 aset dengan nilai 261.216 miliar rupiah.

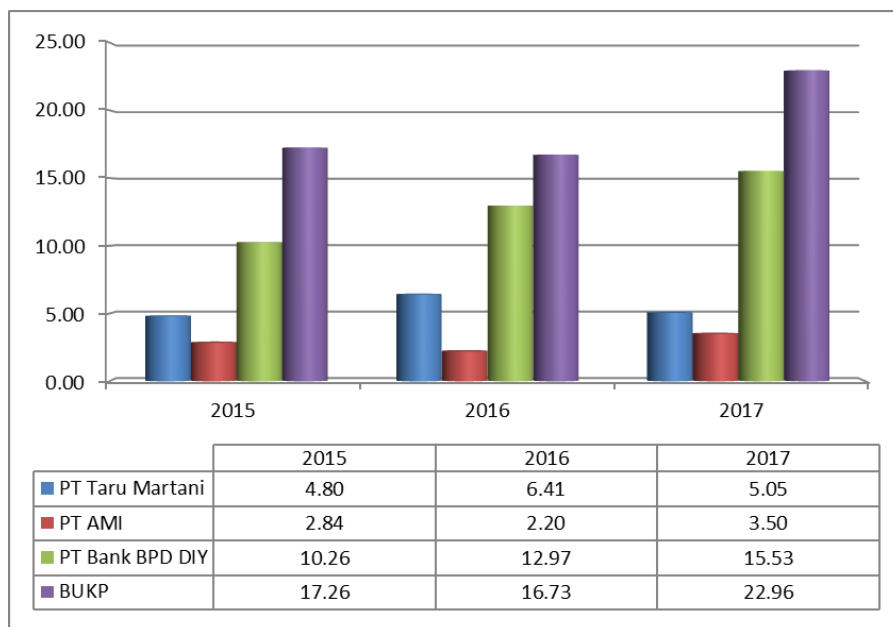
Tabel 2-135 Jumlah Aset yang Dioptimalkan

No	Jenis Aset	2016		2017	
		Jml	Rp	Jml	Rp
1	Tanah	191	180,160,573,382.00	191	180,160,573,382.00
2	Peralatan Dan Mesin	14	1,146,200,000.00	98	3,199,771,212.00
3	Gedung Dan Bangunan	62	77,800,090,637.00	63	77,855,952,637.00
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0	-	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	0	-	0	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	0	-

No	Jenis Aset	2016		2017	
		Jml	Rp	Jml	Rp
	Total	267	259,106,864,019.00	352	261,216,297,231.00

Sumber: BPKA DIY, 2019

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari laba BUMD. yaitu PT Taru Martani. PR AMI. PT Bank BPD DIY. dan BUKP. Persentase deviden masing-masing BUMD terhadap penyetaraan modal bervariasi. Persentase terbesar terdapat pada BUKP dan terkecil terdapat pada PT AMI. Pada tahun 2017. persentase deviden BUKP terhadap penyetaraan modalnya sebesar 22.96%. diikuti PT Bank BPD DIY sebesar 15.53%. PT Taru Martani sebesar 5.05%. dan PT AMI sebesar 3.50%.



Sumber: BPKA DIY, 2019

Gambar 2-61 Persentase Deviden BUMD terhadap Penyetaraan Modal, 2015-2017

2.1.3.3.6 Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal yang penting diperhatikan sebagai bentuk antisipatif agar tidak menjadi permasalahan yang mendalam adalah kebutuhan pengadaan ASN karena diindikasikan terdapat gap antara jumlah ASN yang ada terhadap kebutuhan. Disamping itu, terdapat

kecenderungan meningkatnya jumlah pensiun selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019, jumlah ASN yang purna tugas sebanyak 749 orang dengan rincian 686 JFT dan 63 struktural. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 842 pensiunan yang terdiri dari 742 JFT dan 100 struktural.

Tabel 2-136 Penjagaan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY, 2019-2022

Penjagaan Pensiun	2019	2020	2021	2022
Jabatan Fungsional Tertentu	686	742	772	689
Jabatan Struktural	63	100	112	89

Sumber: BKD DIY, 2019

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menandai momentum peningkatan profesionalisme birokrasi. UU ASN mengamanatkan pengembangan ASN melalui pendekatan merit system. Problem saat ini, Pemda belum memiliki prosedur sistematis (pola karir) yang mampu menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen ASN secara terencana dan sistematis adalah manajemen talenta atau talent management.

Pemda DIY merumuskan kebijakan Manajemen Talenta sebagai bagian dari Kebijakan Strategis untuk Sektor Aparatur. Dalam manajemen talenta. Pemda DIY menyiapkan database potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, dan Pengawas melalui penilaian Potensi dan Kompetensi (talent pool). Penilaian potensi dan kompetensi PNS melalui Assessment Center bukan hanya sekedar untuk promosi jabatan. melainkan berfungsi untuk mengetahui profil individual competence serta standar kompetensi jabatan dari masing-masing PNS. Adanya database profil potensi dan kompetensi masing-masing PNS ini akan memudahkan untuk perencanaan pengembangan SDM kedepan serta rentetan panjang seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang kosong tidak lagi diperlukan.

Permasalahan utama yang terdeteksi yaitu masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme serta belum sesuai kebutuhan atau penempatan dalam jabatan, kinerja/produktivitas yang belum optimal, integritas PNS, serta sistem remunerasi yang belum layak dan belum berbasis penilaian kinerja. Manajemen ASN dengan PNS sebagai unsur utamanya merupakan lokomotif untuk menggerakkan reformasi birokrasi. Karena itu, prasyarat reformasi birokrasi adalah adanya pengelolaan PNS yang efektif dan efisien. Salah satunya dengan menciptakan pengelolaan kepegawaian yang

berbasis merit. Dengan adanya reformasi birokrasi maka diharapkan akan mampu tercipta tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, UU ASN telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen ASN. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang berintegritas dan profesional.

Salah satu upaya pembinaan profesionalitas PNS adalah melalui pengukuran yang jelas tentang aspek-aspek kemampuan kerja PNS sesuai dengan kebutuhan dalam setiap jabatan yang diembannya. Jika merujuk pada tugas dan fungsi organisasi, masih banyak perilaku kompetensi pekerjaan di lingkungan PNS yang belum terstandarisasi. Pemetaan ASN yang meliputi informasi ASN yang berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif diperlukan untuk mempermudah pemerintah dalam pendayagunaan pegawai ASN. Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM aparatur tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (*competency based human resource development*) tapi lebih mengarah kepada pengembangan *talent pool* atau *talent based human resource development* yang akan mampu menghasilkan tidak hanya birokrat yang profesional tapi juga birokrat yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana tuntutan masyarakat dan amanat peraturan perundangan, maka dibutuhkan berbagai upaya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi yang efektif antar pengambil kebijakan dan antar pelaksana diklat aparatur sehingga program-program diklat lebih terintegrasi dan dijamin mutu pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dengan demikian ASN akan menjadi sumber daya utama pembangunan daerah serta dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang terumuskan di dalam RPJPD dan RPJMD.

2.1.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program/kegiatan Litbang yang lebih efektif menunjang pembangunan daerah, membutuhkan upaya peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berbobot pula, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pemecahan masalah-

masalah dalam pencapaian tujuan, Hal ini perlu disadari bersama, bahwa program/kegiatan pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk tujuan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam lingkungan masyarakat bangsa.

Dalam kerangka mewujudkan fungsi dan tugas bidang kelitbangan, peranan Unit Litbang Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memfasilitasi berbagai langkah kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja kelitbangan di daerah, Dalam hal ini, upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan seharusnya dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan litbang satu pintu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disadari bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi berkaitan masalah bidang kelitbangan, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik berkenaan eksistensi dan peran litbang, Dalam hal ini, eksistensi dan peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbangan dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDA,

Terbitnya Perpres No 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, berimplikasi pada munculnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa). Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemda, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Masterplan* MP3EI 2011-2025 diperlukan penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan, Dengan adanya penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa), maka daerah-daerah diharapkan dapat mewujudkan interaksi kemitraan yang strategis diantara pelaku-pelaku inovasi (pemerintah, pebisnis, akademisi, dan masyarakat) dalam membangun sistem inovasi,

Sementara itu, kebijakan-kebijakan regulatif dan perangkat instrumen pendukung kebijakan di bidang Litbang dan Ristek secara umum belum kondusif dapat dimplementasikan secara efektif di daerah-daerah, Hal tersebut kiranya tidak dapat dipisahkan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul di kalangan aparatur daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah, Dalam

kondisi demikian sesungguhnya pula berhubungan erat dengan persoalan masih kurangnya informasi karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kelitbangan dan ristek,

Di sisi lain, terdapat banyak potensi kelitbangan di wilayah DIY baik berupa kelembagaan litbang, lemlit, serta sumberdaya manusia tenaga ahli/peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan inovasi yang sangat kreatif. Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena bermunculannya beragam hasil-hasil kajian teknologi tepat guna, produk inovasi baru dan industri kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Saat ini, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Daya saing daerah mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah. Selain itu juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Investasi merupakan salah satu aspek yang penting agar daya saing daerah meningkat. Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Tingkat pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu tolok ukur dalam kemampuan ekonomi daerah. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi maka akan semakin memperkuat kemampuan ekonomi daerah. Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2019 di DIY tercatat sebesar Rp. 1.339.726,00 per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar 40,79%. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, kemampuan ekonomi di DIY cenderung mengalami penguatan. Dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 928.601,00 menjadi Rp.

1.339.726,00 atau mengalami kenaikan sebesar 44,27%. Secara lebih rinci, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di DIY dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-137 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2015-2019

Tahun	Makanan	nonMakanan	Jumlah
2015	365.011	563.590	928.601
2016	434.005	636.958	1.070.963
2017	490.249	649.918	1.140.167
2018	529.012	773.649	1.302.661
2019	546.445	793.281	1.339.726

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di DIY terus menerus mengalami peningkatan. Peningkatan terkecil terjadi di tahun 2017, yang hanya meningkat sebesar 7,3%. Pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan dua komponen pengeluaran yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran *nonmakanan*. Pengeluaran makanan dikelompokkan atas konsumsi: (1) padi-padian; (2) Umbi-umbian; (3) Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang; (4) Daging; (5) Telur dan susu; (6) Sayur-sayuran; (7) Kacang-kacangan; (8) Buah-buahan; (9) Minyak dan kelapa; (10) Bahan minuman; (11) Bumbu-bumbuan; (12) Konsumsi lainnya; (13) Makanan dan minuman jadi; (14) Rokok. Sedangkan pada pengeluaran *nonmakanan* meliputi: (1) perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti bahan bakar, penerangan, air; (2) Aneka barang dan jasa; (3) Pakaian, alas kaki dan tutup kepala; (4) barang tahan lama; (5) pajak, pungutan dan asuransi; (6) Keperluan pesta dan upacara adat.

Dalam kelompok makanan, kelompok makanan dan minuman jadi mendominasi pengeluaran perkapita dalam periode lima tahun terakhir dengan rata-rata proporsi sebesar 40,09%. Sementara itu, kelompok umbi-umbian mempunyai proporsi terkecil dengan rata-rata sebesar 0,74% selama lima tahun terakhir. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah proporsi pengeluaran untuk rokok yang berperan cukup besar dengan rata-rata sebesar 8,36%, merupakan proporsi terbesar ketiga pengeluaran kelompok makanan.

Tabel 2-138 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2015-2019

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padi-padian/Cereals	46.511	47.429	47.207	49.912	50.993
Umbi-umbian/Tubers	2.424	3.482	3.736	3.640	4.178
Ikan/Fish	13.867	16.731	20.514	21.675	22.374
Daging/Meat	16.906	21.616	25.014	23.206	24.650
Telur dan susu/Eggs and Milk	28.568	33.593	34.384	38.319	37.513
Sayur-sayuran/Vegetables	21.137	28.201	38.705	35.801	32.911
Kacang-kacangan/Legumes	11.152	12.667	11.480	12.748	11.932
Buah-buahan/Fruits	21.028	21.610	25.326	32.146	33.270
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	10.483	11.179	12.144	11.548	11.491
Bahan minuman	14.146	17.106	19.021	19.981	18.483
Bumbu-bumbuan	5.302	6.561	7.126	7.982	8.109
Konsumsi lainnya	7.593	8.146	9.656	9.412	8.931
Makanan dan minuman jadi	132.648	163.943	195.819	225.328	239.818
Rokok	33.246	41.741	40.118	38.314	41.792
	365.011	434.005	490.250	530.012	546.445

Sumber : DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Apabila dilihat dari kelompok *nonmakanan*, dalam rentang waktu lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019 lebih dominan pada kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan rata-rata proporsi terhadap seluruh pengeluaran *nonmakanan* selama lima tahun sebesar 44,67%. Komoditas selanjutnya adalah barang dan jasa termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan biaya kesehatan, rata-rata proporsi komoditas barang dan jasa terhadap seluruh pengeluaran *nonmakanan* selama lima tahun sebesar 29,42%. Sehingga dapat diketahui bahwa 74,08% pengeluaran konsumsi *nonmakanan* adalah untuk perumahan, barang dan jasa. Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi *nonmakanan* sebagian besar diperuntukkan guna pemenuhan hak dasar. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan per komoditas dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-139 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2015-2019

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	247,836	290,937	272,554	320,573	344.935
Barang-Barang & Jasa	165,253	186,740	182,383	213,622	223.712
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	26,368	30,884	30,439	33,635	35.151
Barang Tahan Lama	75,981	69,848	10,702	133,611	106.507

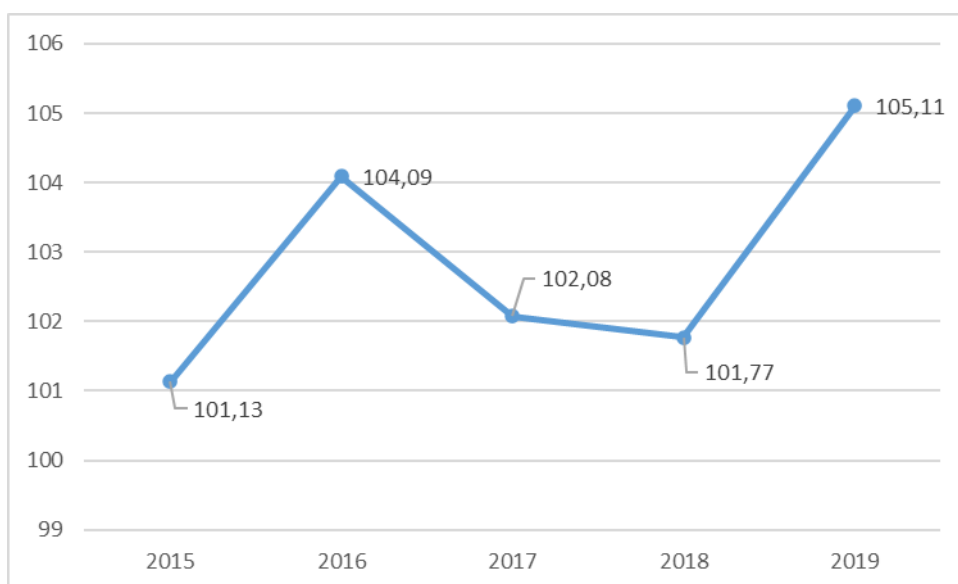
Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	29,583	32,976	43,492	45,811	46.893
Keperluan pesta dan upacara	18,569	25,573	19,348	26,397	36.084
	563,590	636,958	649,918	773,649	793.281

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah)

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan oleh petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP dapat dihitung dengan membandingkan faktor. NTP dapat dihitung dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). Jika nilai NTP lebih besar dari 100, maka pada periode tersebut relatif lebih baik. Jika NTP lebih kecil dari 100 artinya terjadi penurunan daya beli petani. Sehingga semakin tinggi NTP menunjukkan bahwa petani menikmati selisih antara penjualan komoditas dengan biaya produksi.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) di DIY mengalami fluktuatif. NTP tahun 2019 sebesar 105,11 naik 3,98% dari periode tahun 2015 yang mencapai nilai 101,13. NTP terkecil 101,13 terjadi pada tahun 2015 kemudian berangsur naik di tahun 2016 menjadi 104,09 namun di tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 102,08.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 diolah

Gambar 2-62 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2015-2019

Apabila mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. IT dan IB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

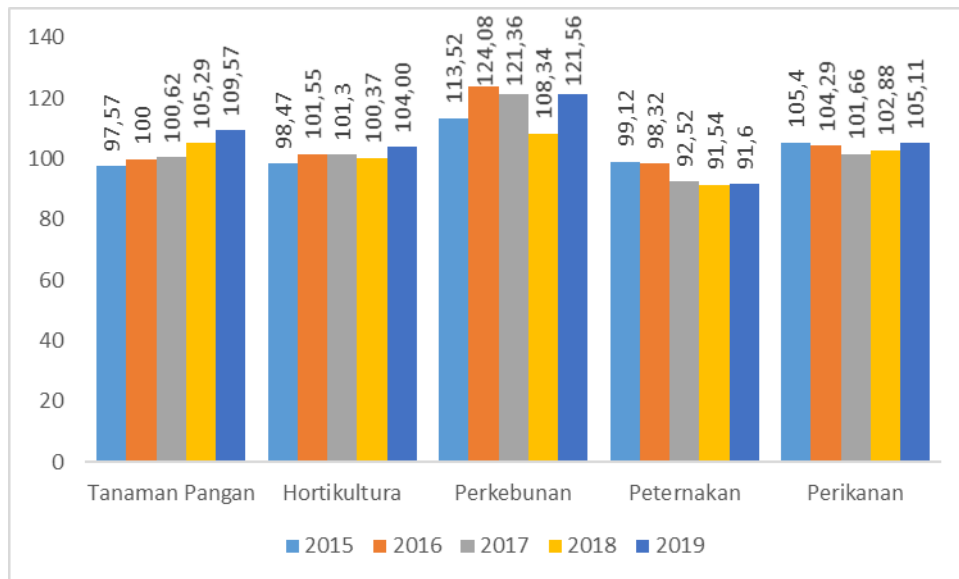
Tabel 2-140 Nilai Tukar Petani (NTP) 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
IT	119,51	128,07	129,82	131,32	141,49
IB	118,15	123,04	127,17	130,32	134,59
Rasio	101,13	104,09	102,08	100,77	105,11

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020 ,diolah

Jika dilihat lebih lanjut pada sub sektor pertanian, pada tahun 2019 dapat dilihat sub sektor perkebunan mempunyai NTP terbesar yaitu 121,56. Hal ini berarti, petani yang bekerja pada sub sektor perkebunan dapat diasumsikan bahwa kesejahteraannya relatif lebih besar dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Urutan kedua yang mempunyai angka NTP terbesar pada tahun 2019 adalah sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 109,57 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 105,29. Sub sektor peternakan masih mempunyai NTP terkecil diantara sub sektor lainnya selama 4 tahun

terakhir. Sub sektor ini adalah satu-satunya yang angka NTP kurang dari 100, yang artinya peningkatan pengeluaran yang harus dibayarkan oleh petani lebih cepat dibandingkan dengan penerimaannya, sehingga petani yang bekerja pada sub sektor perkebunan mengalami defisit.

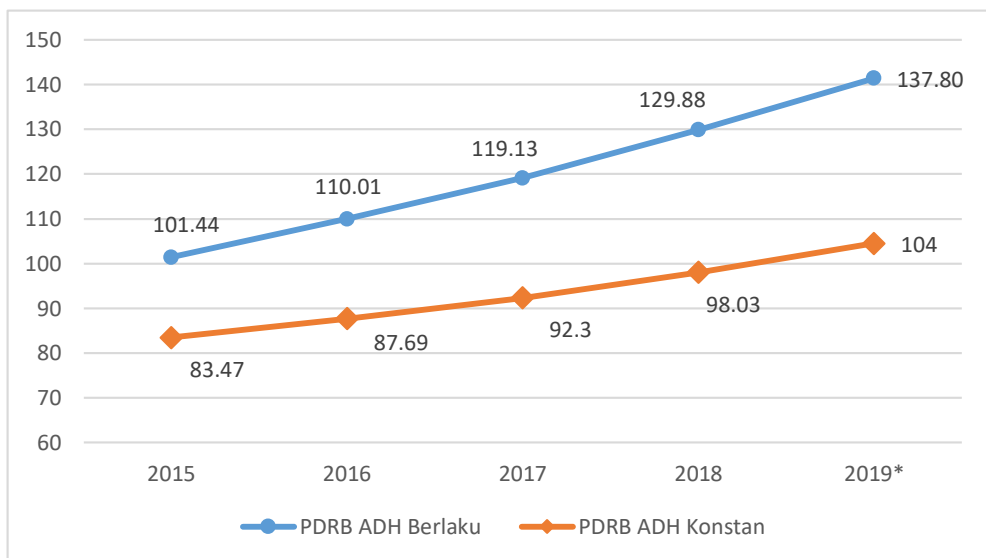


Sumber: BPS Provinsi DIY 2020, diolah

Gambar 2-63 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2015-2019

2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi perekonomian di DIY selama kurun waktu 2015-2019 selalu meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar 101,44 triliun rupiah atas dasar harga berlaku berhasil meningkat sebesar 36,36 triliun rupiah menjadi 137,80 triliun rupiah. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar 83,47 triliun rupiah berhasil meningkat sebesar 20,53 triliun rupiah menjadi 104 triliun rupiah di tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-64 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2015-2019

Dilihat dari jenis lapangan usaha, tiga sektor yang kontribusinya terbesar dalam PDRB DIY adalah industri pengolahan, konstruksi dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 12,85%. Sedangkan sektor konstruksi dan penyediaan akomodasi makan dan minum berturut-turut sebesar 11,11% dan 10,35%. Peningkatan kontribusi sektor konstruksi yang sangat tajam mampu menggeser sektor pertanian, yang semula di tahun 2017 berada pada urutan ketiga, sejak tahun 2018 turun menjadi urutan keempat.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor ekonomi andalan di DIY mengingat posisi kontribusinya yang selalu masuk dalam tiga besar. Hal ini sangat wajar karena DIY merupakan salah satu icon pariwisata di Indonesia. Banyak tujuan wisata yang dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Tujuan wisata yang sering dikunjungi meliputi wisata pantai, situs sejarah, situs budaya, Malioboro, kuliner, dan sebagainya. Puncak peningkatan pada sektor ini biasanya terjadi saat musim liburan tiba.

Tabel 2-141 Distribusi Presentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%), 2015-2019

Sub Elemen	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	10,64	10,42	10,02	9,79	9,37
Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51
Industri Pengolahan	13,11	13,23	13,13	12,99	12,85
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,15	0,14	0,14
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	9,37	9,35	9,49	10,28	11,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	8,45	8,58	8,59	8,47
Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,68	5,69	5,75	5,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	10,23	10,33	10,22	10,35
Informasi dan Komunikasi	8,13	8,15	8,21	8,10	7,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,97	3,94	3,90	3,93	4,00
Real Estat	7,02	7,10	7,03	6,95	7,00
Jasa Perusahaan	1,03	1,01	1,02	1,01	1,02
Administrasi Pemerintahan,Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	8,26	8,38	8,57	8,43	8,23
Jasa Pendidikan	8,48	8,19	8,14	8,11	8,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,52	2,51	2,52	2,48	2,50
Jasa Lainnya	2,55	2,57	2,61	2,60	2,59

Selain aspek distribusi, kinerja ekonomi DIY juga dapat dilihat dari pertumbuhan sektoral. Lapangan usaha konstruksi masih berada pada urutan tertinggi dengan laju pertumbuhan 14,39%. Di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB DIY besar, namun mengalami laju pertumbuhan terkecil dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 1,03%.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Pengembangan Kawasan

Sejumlah kawasan ditetapkan dalam rangka mendorong investasi, baik domestik maupun asing. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan infrastruktur dimana kawasan ini dipersiapkan dalam rangka mewujudkan kawasan industri dan bandara baru *Yogyakarta International Airport*. Kawasan industri yang telah ditetapkan terdiri dari kawasan Piyungan, Sedayu dan Sentolo. Sebagai daerah yang tidak terlalu banyak memiliki sumber daya alam, DIY menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utamanya. Kawasan budaya dan pariwisata berpotensi untuk pengembangan investasi industri kreatif seperti film, fotografi, desain dan arsitek. Sedangkan kawasan

pendidikan dapat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan riset dan pengembangan. Berikut beberapa daftar rencana strategis Pengembangan Kawasan di Yogyakarta:

Tabel 2-142 Daftar Rencana Strategis Pengembangan Kawasan di Yogyakarta

No	Kawasan	Sektor
1	Bandara Internasional (YIA)	Infrastuktur
2	Daerah Sentra Industri Kerajinan Bantul	Ekonomi Kreatif
3	Industri Pengolahan Kakao	Pangan dan Hasil Bumi
4	Industri Pengolahan Salak Pondoh	Pangan dan Hasil Bumi
5	Industri Tepung Ikan	Pangan dan Hasil Bumi
6	Kawasan Industri Piyungan Bantul	Infrastuktur
7	Kawasan Industri Sentolo	Infrastuktur
8	Edu-Tourism Museum Gunung Merapi (MGM)	Pendidikan
9	Kawasan Peruntukan Industri Sentolo	Infrastuktur
10	Kawasan Peruntukan Industri Pertanian	Pangan dan Hasil Bumi
11	Kawasan Peruntukan Industri Sedayu	Infrastuktur
12	Kawasan Wisata Nglanggeran	Budaya dan Pariwisata
13	Mineral Andesit	Energi
14	Mineral Batu Gamping	Energi
15	Mineral Marmer	Energi
16	Obyek Wisata Tematik Desa Sumberarum	Budaya dan Pariwisata
17	Pariwisata Geopark / Karst Gunungsewu	Budaya dan Pariwisata
18	Pariwisata Pantai Di Kabupaten Bantul	Budaya dan Pariwisata
19	Pariwisata Pantai Di Kab Gunung Kidul	Budaya dan Pariwisata
20	Pelabuhan Tanjung Adikarto	Infrastuktur
21	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Energi
22	Pengembangan Fasilitas Pendidikan	Pendidikan
23	Pengembangan Lahan Wedi Kengser	Pangan dan Hasil Bumi
24	Pengembangan Wisata Puncak Suroloyo	Budaya dan Pariwisata
25	Pengembangan Pariwisata Waduk Sermo	Budaya dan Pariwisata
26	Pengembangan Seed Center Krisan	Pangan dan Hasil Bumi
27	Pengolahan Kayu Jati	Pangan dan Hasil Bumi
28	Pengolahan Kelapa Terpadu	Pangan dan Hasil Bumi
29	Pengolahan Padi, Cabai & Bawang Merah	Pangan dan Hasil Bumi
30	Pengolahan Ubi Kayu	Pangan dan Hasil Bumi
31	Perikanan Tangkap	Pangan dan Hasil Bumi
32	Peternakan Dan Penggemukan Sapi	Pangan dan Hasil Bumi
33	Peternakan Kambing Peranakan Etawa	Pangan dan Hasil Bumi
34	Power Plant	Energi
35	Sentra Kerajinan Sleman	Ekonomi Kreatif
36	Taman Hutan Raya Bunder	Pendidikan

No	Kawasan	Sektor
37	Water Plant	Energi
38	Wediombo Resort	Budaya dan Pariwisata
39	Wisata Dirgantara Pantai Depok	Budaya dan Pariwisata
40	XT – Square	Budaya dan Pariwisata

2.1.4.2.2 Pengembangan Jaringan Jalan

Di DIY telah terbangun 247,91 km jalan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya. Sementara itu, jaringan jalan Provinsi di DIY sepanjang 619,34 km dengan 459,57 km (74,20%) dalam kondisi mantap. Semenjak tahun 2016 melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, terjadi perubahan panjang ruas jalan provinsi menjadi 760,45 km. Hal tersebut terjadi karena beberapa ruas jalan Provinsi menjadi jalan Nasional dan ruas jalan Kabupaten menjadi ruas jalan Provinsi. Sampai dengan tahun 2019 kondisi jalan Provinsi dengan kondisi mantap sepanjang 558,81 km atau sekitar 73,48%.

Pemerintah DIY telah mendesain Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di DIY yang meliputi:

1. Penyelesaian pembangunan JJLS yang melalui Kabupaten Kulon Pogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul direncanakan untuk mendukung Kawasan Selatan DIY dan bandara baru *Yogyakarta Internatioanal Airport* dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemda DIY menggagas JJLS sebagai pintu masuk ke wilayah DIY sehingga Pemda DIY membuka akses pintu masuk dari sisi selatan DIY.
2. Pembangunan Bedah Menoreh untuk pengembangan wilayah Kulon Progo bagian utara dalam peningkatan jalan konektivitas bandara baru ke KSPN Borobudur yang terdiri dari ruas jalan Sentolo – Nanggulan – Dekso – Klangan dan ruas jalan Temon – Tegalsari – Samigaluh – Suroloyo – Klangan.
3. Jogja Outer Ring Road sepanjang 113,34 km untuk menghubungkan sisi utara dan sisi selatan DIY yakni Bantul dan Sleman dengan titik temu ada di Sentolo, Kulon Progo.
4. Pengembangan ruas jalan Prambanan – Gading dalam rangka mengembangkan konektivitas antar KSPN Prambanan – KSPN Karst Gunungkidul serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui ruas tersebut.

5. Jalan bebas hambatan dengan ruas Yogyakarta – Temon – Cilacap yang melalui Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo. Ruas Yogyakarta – Bawen melalui Kabupaten Sleman dan Ruas Yogyakarta – Solo yang melalui Kabupaten Sleman.

Di tahun 2019, pemda DIY telah membangun jalan layang (*fly over*) Kentungan untuk memecah kemacetan di area tersebut yang kian parah.

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam mendukung daya saing daerah.

Pengelompokan sistem infrastruktur dapat dibedakan menjadi:

- a. Kelompok keairan
- b. Kelompok distribusi dan produksi energi
- c. Kelompok komunikasi
- d. Kelompok transportasi (jalan, rel)

Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

2.1.4.2.3 Penyediaan Air Minum

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan air baku untuk minum juga mengalami peningkatan. Dalam 6 tahun mendatang, diproyeksikan jumlah penduduk di DIY mencapai 6 juta jiwa.

Sampai dengan akhir tahun 2014, DIY baru bisa menyediakan kurang lebih 2,5 meter kubik per detik air bersih bagi seluruh masyarakat DIY. Diprediksi hingga tahun 2030, masyarakat DIY masih membutuhkan kira-kira 9 meter kubik sehingga masih kekurangan 6 sampai 7 meter kubik kebutuhan air baku untuk minum tersebut.

Sampai dengan tahun 2019, presentase penduduk berakses air minum mencapai 91,32%. Angka tahun 2019 yang menunjukkan terjadinya penurunan disebabkan adanya perbedaan meta indikator. Upaya yang telah dilakukan Pemda DIY untuk mencapai target penduduk berakses air minum yaitu melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa yang terlayani dan distribusi air mengalir). Diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.

Pemerintah Pusat telah mengupayakan dalam penyediaan air baku dengan memanfaatkan air Sungai Progo sebagai sumber SPAM Regional Kartamantul. Pada tahap pertama telah dibangun intake yang menyediakan air baku sebesar 400 liter/ detik dan dimanfaatkan untuk SPAM subsistem Bantar yang melayani Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman dan sebagian Kabupaten Bantul. Pengembangan tahap kedua dilakukan dengan membangun intake dengan kapasitas 300 liter/ detik yang akan melayani sub sistem Kebonagung. Pembangunan berupa instalasi pengolahan air, dua buah reservoir dengan kapasitas 2.000 m³ dan 1.000 m³, booster 500 m³, jaringan perpipaan sepanjang 18 km dan 12 km untuk melayani 160.000 jiwa yang tersebar pada 5 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dan 3 Kecamatan di Kabupaten Bantul.

Tahun 2018 Pemerintah Pusat telah menyelesaikan pembangunan Bendung Kamijoro yang mulai dibangun pada tahun 2016. Bendung Kamijoro sebagai sumber air baku dengan kapasitas 500 liter/ detik untuk melayani SPAM KAPET Kulon Progo diharapkan mampu memberikan fasilitas ketersediaan air di wilayah Kulon Progo meliputi Galur, Lendah, Sebagian Sentolo, sebagian Panjatan, sebagian Wates, Kawasan Industri Baja, Pelabuhan, NYIA dan kawasan industri Pajangan di Kabupaten Bantul.

2.1.4.2.4 Penyediaan Komunikasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Saat ini ada lebih dari 2.700

komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY di 253 titik (termasuk 118 titik baru SMU/SMK Negeri). Adapun rincian jalur koneksi di 253 titik yang terhubung dengan jaringan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1. 114 titik menggunakan jalur Fiber Optik (FO)
2. 88 titik menggunakan jalur *Wireless*
3. 51 titik menggunakan VPN (SMUN/SMKN dan Banhubda di Jakarta)

Sesuai rencana awal, pemasangan jaringan Fiber Optik hanya dilaksanakan pada instansi yang berada di dalam kota tetapi seiring kebutuhan jaringan, instansi di pinggiran kota juga dipasang koneksi Fiber Optik terutama untuk kebutuhan internet di SMUN/SMKN yang membutuhkan *bandwidth* rata-rata 200 Mbps untuk keperluan pembelajaran di sekolah.

Tabel 2-143 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanah	Kabel Udara	Total
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017		702	
2018		11.575	11.575
2019		4.450	4.450
Total	37.243	42.888	80.131

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, 2020

Sedangkan untuk *bandwidth* internet, besarnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 2015, Pemda DIY hanya menggunakan 1 ISP saja untuk mensuplai kebutuhan *bandwidth*, tetapi sejak tahun 2015 menggunakan 2 ISP. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi putus *bandwidth* pada 1 ISP masih bisa dibackup ISP yang lainnya sehingga ketersediaan *bandwidth* internet terutama untuk Data Center Pemda DIY tidak akan pernah terputus selama 1 x 24 jam. Alokasi *bandwidth* internet diatur oleh Dinas Kominfo Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika ke instansi Pemda DIY disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat komputer yang ada.

Tabel 2-144 Langganan Bandwidth Pemda DIY

Tahun	Besaran Bandwidth (Mbps)			Anggaran (Rp)
	JMN	G Media	Total	
2015	155	190	345	3.116.208.260
2016	190	220	410	3.195.931.200

Tahun	Besaran Bandwidth (Mbps)			Anggaran (Rp)
	JMN	G Media	Total	
2017	300	350	650	3.486.470.400
2018	400	400	800	3.526.798.000
2019	500	500	1.000	3.759.996.000
2020	3.600	3.500	7.100	9.687.600.000

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, 2020

Rencana kegiatan jaringan tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan pemeliharaan jaringan Fiber Optik OPD pemda DIY
2. Melaksanakan pemeliharaan jaringan *Wireless* OPD pemda DIY
3. Melaksanakan pemeliharaan jaringan intranet OPD di Kompleks Kepatihan
4. Pengadaan Interkoneksi OPD Pemda:
 - Pemasangan jaringan baru di 4 OPD dan 43 SMU/SMK Negeri
 - Sebanyak 22 titik menggunakan jaringan *wireless* dan 21 titik menggunakan jaringan fiber optic. Disamping itu juga akan melakukan interkoneksi jaringan Fiber Optik dengan semua kabupaten dan kota serta kantor Ditlantas Polda DIY untuk pembangunan system tilang elektronik.
 - Revitalisasi peralatan jaringan di NOC Pemda DIY
 - Peralatan jaringan saat ini hanya bisa mengampu *bandwidth* internet di bawah 1 Gbps, sedangkan pada tahun 2019 *bandwidth* Pemda DIY diperkirakan lebih dari 1 Gbps untuk itu perlu dilakukan revitalisasi peralatan jaringan. Pada tahun 2019 Pemda DIY mensuplai *bandwidth* desa di kabupaten bantul, kabupaten sleman dan kota Yogyakarta, sehingga setiap desa akan mendapat alokasi *bandwidth* 10 Mbps melalui Dinas Kominfo pada masing-masing kab/kota.
 - Sentralisasi WIFI terpadu di kompleks kepatihan (50 titik)
 - Untuk mempermudah layanan koneksi internet dan keamanan informasi.
 - Pemasangan CCTV di kompleks kepatihan (30 titik)
 - Untuk pencegahan dan pengawasan keamanan di kompleks kepatihan

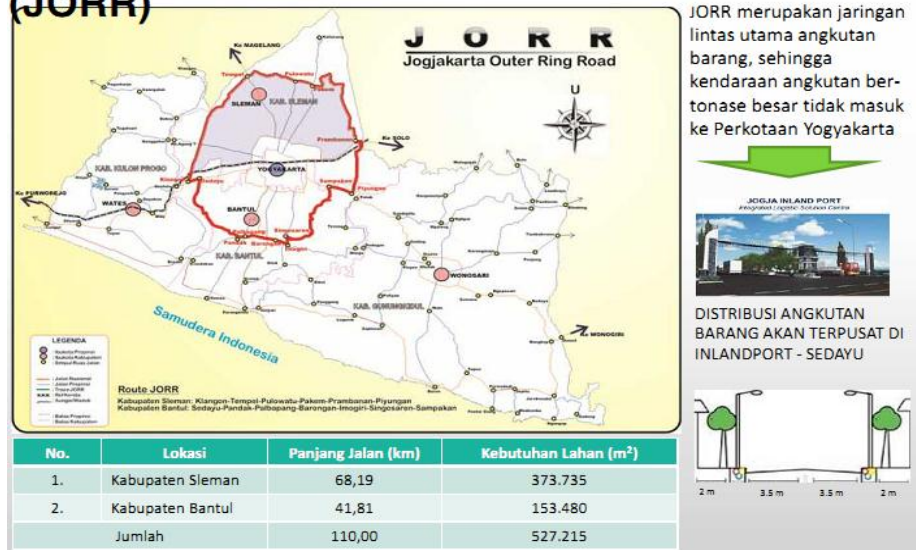
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Prambanan – Kawasan Gunung Api Purba – KSPN Karst Gunungkidul, disamping untuk membuka akses perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul serta dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitan ekonomi di area yang dilalui.



Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-66 Rencana sistem jaringan jalan

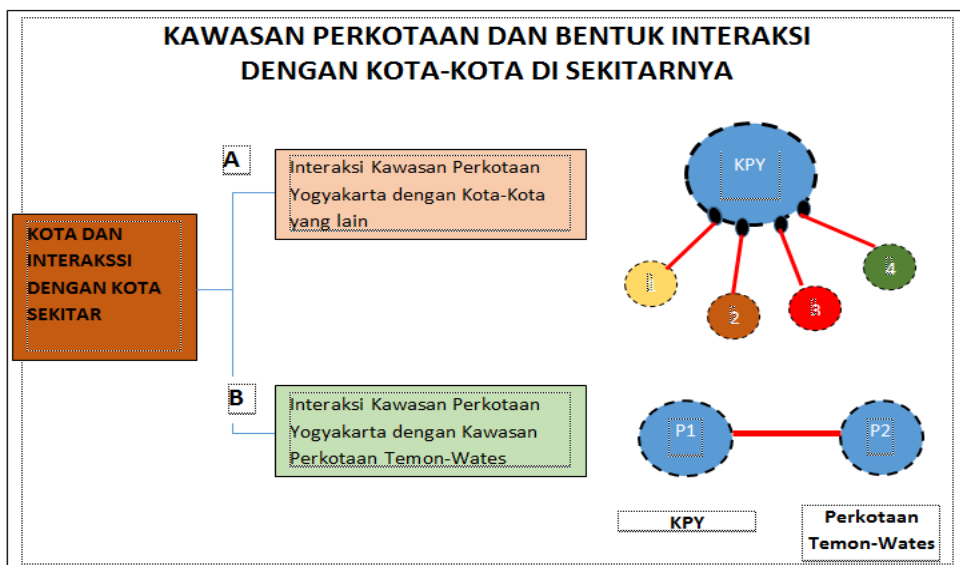
Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)



Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-67 Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR

2.1.4.2.5.2 Pengembangan Sarana Transportasi

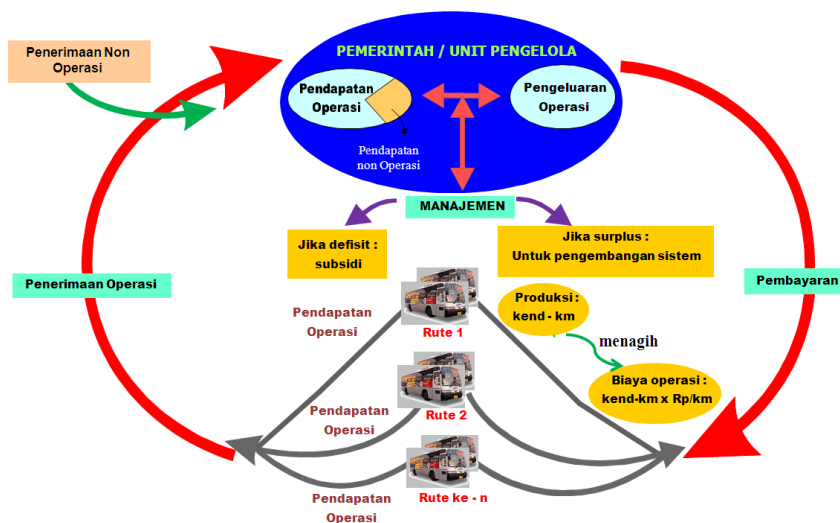


Gambar 2-68 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di DIY direncanakan dengan pengembangan interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang masa kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Untuk pemenuhan kebutuhan transportasi perkotaan di kawasan Perkotaan Yogyakarta Pemda DIY telah menyelenggarakan angkutan dengan konsep dasar layanan *"buy the service"*. Konsep layanan *"buy the service"* ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.

Operasionalisasi Bus Trans Jogja oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melewati tahun ketujuh. Sejak dioperasikan pada 18 Februari 2008, Bus Trans Jogja telah melalui babak baru sistem dan manajemen angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan sistem baru yang disebut *Buy the Service* atau sistem pembelian pelayanan menggantikan sistem angkutan umum lama yang berbasis setoran.



Gambar 2-69 Sistem Operasional Bus Trans Jogja

Pada awal beroperasinya Trans Jogja, Februari 2008, Trans Jogja beroperasi dengan 6 (enam) trayek sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 132/KEP/2007 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 54 bus disediakan untuk dapat melayani 6 (enam) jalur tersebut dengan kepemilikan armada sejumlah 34 bus milik PT. Jogja Tugu Trans selaku operator dan 20 bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari hibah APBN. Sampai dengan tahun 2017 Trans Jogja sudah memiliki 128 armada dan melayani 17 jalur. Namun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja cenderung menurun.

Tabel 2-145 Jumlah Penumpang Trans Jogja 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah penumpang/hari
1.	2015	6.468.678
2.	2016	6.409.205
3.	2017	5.317.484
4.	2018	5.880.610
5.	2019	5.282.737

Sumber : UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY, 2020

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan feeder. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan *feeder* salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

2.1.4.2.6 Distribusi Dan Produksi Energi

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Umum Energi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan energi di tingkat daerah.

Pemda DIY pada tahun 2018 menargetkan dapat menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan Rencana Umum Energi Daerah DIY.

Kebutuhan tenaga listrik di DIY dipasok dari Perusahaan Listrik Negara Sistem Jawa Madura Bali. Kebutuhan tenaga listrik di DIY diperkirakan mencapai 5,722 GWh pada tahun 2025 dan untuk melayani kebutuhan tersebut, PLN telah merencanakan pengembangan 2 (dua) Gardu Induk baru dengan kapasitas 240 MVA dalam rangka memenuhi target penyediaan sebesar 660 MVA.

Rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2019 tercatat sebesar 99,99%. Dalam rangka mencapai target KEN dan RUEN yakni rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2020 maka perlu upaya penyediaan listrik berupa pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Potensi energi baru terbarukan yang ada di DIY cukup terbatas dan beberapa sudah terbangun untuk menghasilkan tenaga listrik dalam skala kecil. Mempertimbangkan kondisi tersebut Pemda DIY akan mengoptimalkan pengembangan energi skala kecil dari potensi yang tersedia untuk meningkatkan target bauran energi bersumber dari EBT.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi. Dalam upaya mencapai target KEN dan RUEN yakni elastisitas energi di bawah 1 pada tahun 2025, penghematan energi harus dilakukan dan dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar, yaitu 1.466,53 GWH di tahun 2016. Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor *nonekonomi* seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak

kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi keamanan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di DIY.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Keamanan yang terjadi di suatu wilayah akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas termasuk dalam melakukan usaha ekonomi produktif. Tindak kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian di DIY selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan meskipun berfluktuasi. Pada tahun 2015 terdapat 7.195 tindak kejahatan yang dilaporkan. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2018, tindak kejahatan yang dilaporkan berturut-turut menurun menjadi 6.766 kasus, 5.194 kasus, dan 4.471 kasus. Pada tahun 2019, tindak kejahatan kembali menurun menjadi 4.290 kasus.

Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014, jumlah tindak pidana kejahatan yang dilaporkan di semua wilayah DIY menunjukkan adanya penurunan kecuali di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman yang mengalami kenaikan. Penurunan yang paling signifikan terjadi di Kota Yogyakarta, dimana jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan sebesar 49,12%. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan paling banyak ada di Kabupaten Sleman yaitu mencapai 1939 kasus

Tabel 2-146 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	453	449	426	441	443
Bantul	955	977	891	796	937
Gunungkidul	362	353	273	287	271
Sleman	3.478	3.185	2.408	2.615	2.204
Yogyakarta	1.947	1.802	1.196	1.178	744
Jumlah	7.195	6.766	5.194	5.317	4.599

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa daerah Sleman dan Kota Yogyakarta secara konsisten merupakan wilayah dengan tingkat pelaporan kejahatan yang tinggi. Hal ini terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi yang sejalan dengan berbagai permasalahan sosial.

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan tersebut, sebesar 64,69% kasus diselesaikan pada tahun 2019. Angka ini meningkat dibandingkan angka pada tahun 2015 sebesar 48,64%. Presentase penyelesaian tindak kejahatan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak kejahatan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2-147 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Res. Kulon Progo	161	215	206	214	234
Res. Bantul	486	587	580	505	466
Res. Gunungkidul	171	204	147	158	159
Res. Sleman	771	950	915	878	719
Rest. Yogyakarta	936	848	807	680	645
Mapolda DIY	538	696	646	459	394
Jumlah	3.063	3.500	3.301	2.894	2.617

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Apabila dilihat presentase di tiap Kabupaten/Kota, sejak tahun 2018 Kabupaten Bantul mempunyai persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Sleman secara bergantian mempunyai persentase penyelesaian tindak pidana terendah dalam periode tiga tahun terakhir.

Dilihat dari jenis tindak pidana, dapat diketahui bahwa tindak pidana DIY didominasi oleh tindak pidana konvensional, terutama pencurian dan penipuan. Namun jenis kejahatan tersebut cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, tindak pidana transnasional khususnya penyalahgunaan narkoba justru cenderung mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada tindak pidana terhadap kekayaan negara yang meningkat signifikan pada tahun 2019 dibanding tahun 2015. Kasus terbanyak pidana kekayaan negara meliputi korupsi dan migas/BBM.

Tabel 2-148 Jumlah Tindak Pidana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2019

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindak Pidana Konvensional	6.101	2.957	4.759	4.318	3.725
2	Tindak Pidana Transnasional	485	293	412	768	545
3	Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara	5	14	20	14	20

Sumber: Polda DIY, 2020

Kondisi keamanan dapat dilihat dari selang waktu kejahatan. Selang waktu kejahatan merupakan interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan bahwa kondisi keamanan semakin membaik. Pada tahun 2019, selang waktu tindak kejahatan di DIY adalah 1 jam 54 menit, artinya setiap 1 jam 54 menit terjadi 1 kasus tindakan kejahatan baru DIY. Kondisi ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 1 jam 23 menit 24 detik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan di DIY semakin membaik.

Indikator lain yang dapat menunjukkan kondisi keamanan di suatu wilayah adalah rasio terkena tindak kejahatan. Setiap penduduk memiliki rasio tersebut yang menggambarkan bahwa semakin besar resiko semakin tidak amannya suatu wilayah. Pada tahun 2019, resiko penduduk terkena tindak pidana di DIY sebanyak 127 per 100.000 penduduk. Artinya, setiap 100.000 penduduk di DIY, sebanyak 127 orang beresiko menjadi korban tindak kejahatan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, resiko terkena tindak kejahatan tersebut menunjukkan adanya penurunan sangat signifikan. Atau dengan kata lain, tingkat keamanan di DIY semakin membaik. Jika dilihat di masing-masing Kabupaten/Kota, resiko menjadi korban tindak kejahatan terendah di Kabupaten Gunungkidul (hingga 8 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2019). Sedangkan untuk rasio tertinggi terjadi pergeseran dimana sejak 2015 hingga 2018 penduduk Kota Yogyakarta mempunyai resiko menjadi korban tindak kejahatan terbesar, namun pada tahun 2019 justru Kabupaten Sleman yang mempunyai resiko tindak kejahatan tertinggi.

Tabel 2-149 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	104	103	96	98	13
Bantul	104	106	96	85	26
Gunungkidul	48	47	36	38	8
Sleman	209	200	230	246	61
Yogyakarta	473	438	291	285	21
D.I.Yogyakarta	200	188	145	146	127

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Kejadian unjuk rasa yang berjalan dengan damai menjadikan stabilitas keamanan di suatu wilayah. Secara umum, unjuk rasa di DIY relatif berjalan lancar dan tertib dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang berarti. Aksi unjuk rasa pada tahun 2019 sebanyak 35 kali, lebih rendah dibandingkan

dengan tahun 2018 yang mencapai 155 kali. Kelompok yang melakukan unjuk rasa ini diantaranya adalah mahasiswa, Ormas/LSM, buruh, parpol dan masyarakat umum bertempat di kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor DPRD, Gedung Agung, Rumah Dinas Bupati, dll. Selain tempat-tempat tersebut, unjuk rasa juga sering dilakukan di jalan umum seperti bundaran UGM, titik nol kilometer, simpang tiga UIN, Tugu Jogja, dll. Tuntutan yang diajukan sebagian besar adalah kebijakan-kebijakan yang dirasa belum tepat. Unjuk rasa dengan massa yang banyak seringkali harus penutupan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan di beberapa titik lokasi unjuk rasa tersebut.

Tabel 2-150 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2015	204
2016	106
2017	207
2018	155
2019*	35

**angka sementara*

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

2.1.4.3.3 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Secara umum, investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung pada daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi salah satunya bergantung pada kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Membangun iklim usaha tidak hanya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga diperlukan peran dari DPRD. Peran DPRD disini dari mempromosikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan yang pro terhadap usaha. Kebijakan yang pro usaha adalah kebijakan yang mendukung percepatan proses investasi yang sehat di daerah baik yang dari masyarakat daerah, luar daerah, maupun luar negeri. Disinilah peran DPRD dituntut lebih punya kepekaan dalam melaksanakan fungsi legislasi melalui pembuatan perda yang dapat mendukung iklim usaha.

Kebijakan di DIY yang mendukung iklim usaha diantaranya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan *non*Perizinan Terpadu Satu Pintu yang pada intinya memberikan layanan kepada pelaku usaha bahwa

pelayanan perizinan dari proses permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan terpadu satu pintu di satu tempat saja. Sementara itu Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan menarik minat investasi dengan memberikan insentif pajak atau retribusi daerah serta pemberian fasilitas kemudahan lainnya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah. Perda tersebut saat ini sedang dalam proses pembahasan perubahan, terutama terkait dengan jenis usaha yang diberikan insentif dan kemudahan, serta bentuk insentif yang diusulkan untuk ditambahkan berupa bantuan riset, fasilitas pelatihan, dan bunga pinjaman rendah bagi UMKM.

Selain itu juga telah diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil yang secara umum bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di Daerah yang meliputi aspek akses pendanaan, perizinan usaha, dukungan kelembagaan dan bantuan sarana prasarana.

2.1.4.3.4 Tindak Pidana Narkoba

Jumlah tindak pidana Narkoba selama tahun 2018 sebanyak 468 kasus dan dapat diselesaikan 415 kasus (88,67%) meliputi Mapolda: lapor 113 kasus, selesai 119 kasus, Polres Bantul: lapor 78 kasus selesai 58 kasus, Polresta Yogyakarta: lapor 124 kasus, selesai 114 kasus, Polres Sleman: lapor 67 kasus, selesai 69 kasus, Polres Gunungkidul lapor: 48 kasus, selesai 25 kasus dan Polres Kulonprogo: lapor 40 kasus, selesai 30 kasus.

Tabel 2-151 Data Tindak Pidana Narkoba di DIY

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Res. Kulon Progo	21	24	49	36	40
Res. Bantul	88	85	115	80	76
Res. Gunungkidul	14	49	31	36	48
Res. Sleman	58	57	81	66	67
Resta. Yogyakarta	99	104	139	67	124
Mapolda DIY	109	107	78	100	113
Jumlah	389	426	493	385	468

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

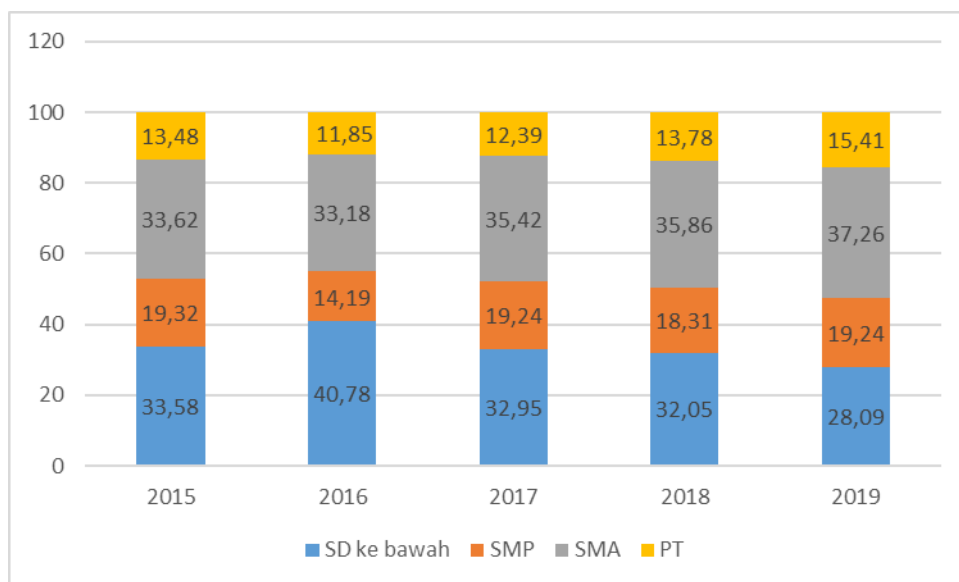
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik maupun mental menjadi modal suatu daerah dalam memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu asset pembanguna yang sangat penting dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDM yang terampil, inovatif, kompetitif bisa menaikkan daya saing daerah.

2.1.4.4.1 Pendidikan

Daya saing suatu daerah tidak bisa dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta ketrampilan/keahlian yang tinggi. Output atau bukti sah untuk mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan ditunjukkan dengan keberadaan ijazah. Ijazah merupakan salah satu syarat formal untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan atau memilih jenis-jenis pekerjaan yang lebih baik. Ini akan berimplikasi pada perbaikan dan peningkatan penghasilan sehingga berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.



Sumber: DIY Dalam Angka 2020

Gambar 2-70 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi

Predikat kota pendidikan masih melekat bagi DIY. Beragamnya sarana pendidikan yang ada, memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Dalam periode enam

tahun terakhir semakin banyak penduduk yang telah mengenyam pendidikan tingkat menengah ke atas. Proporsi terbesar penduduk merupakan tamatan SD ke bawah dengan rata-rata 33,49% selama lima tahun terakhir. Namun, kecenderungan penduduk berijazah SD ke bawah terus menurun dan lulusan Perguruan Tinggi makin meningkat terjadi dalam periode 2015-2019.

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

Persebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang mendiami wilayah dengan topografi yang berbeda antar kabupaten memberikan keragaman lapangan pekerjaan penduduk. Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di DIY pada Agustus 2019 sebesar 3,021 juta orang dan dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja di DIY sebanyak 2,204 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sebanyak 2,135 juta orang adalah bekerja dan 69,17 ribu orang adalah menganggur.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, TPAK di DIY cenderung mengalami kenaikan, namun pada Agustus 2019 TPAK di DIY sebesar 72,94%, mengalami penurunan sebesar 0,43% poin dibandingkan Agustus 2018. Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya diberikan pada laki-laki sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir TPAK laki-laki cenderung mengalami kenaikan meskipun fluktuatif. Pada tahun 2105 TPAK laki-laki sebesar 79,95% , setahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 82,24% di tahun 2016. Namun pada tahun 2017, TPAK laki-laki mengalami penurunan menjadi 80,72% dan di tahun 2018 kembali merangkak naik menjadi 82,69. Di tahun 2019 TPAK laki-laki kembali turun sebesar 0,74% poin menjadi 81,95%. Sementara itu, TPAK perempuan cenderung mengalami kenaikan terus menerus pada 5 tahun terakhir ini, hanya saja pada tahun 2019, TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,14% poin menjadi 64,28% dari tahun sebelumnya yang mencapai 64,42%.

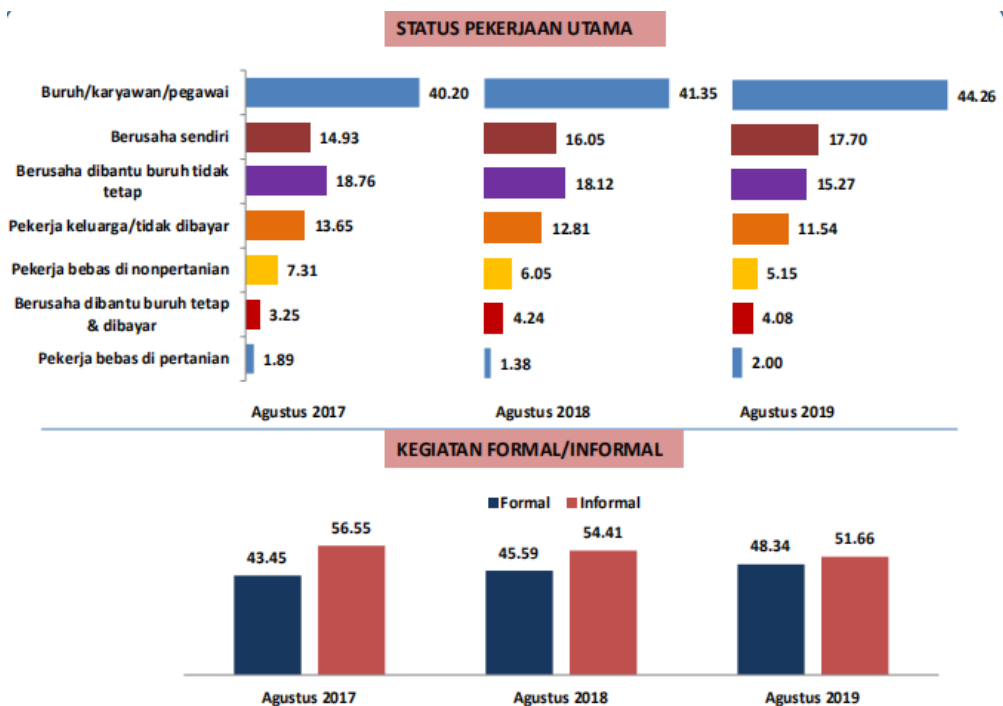
Tabel 2-152 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
	persen	persen	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,07	2,81	3,02	3,35	3,14
Perkotaan	4,55	3,54	3,61	4,07	3,78
Perdesaan	3,02	1,32	1,66	1,60	1,52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,38	71,96	71,52	73,37	72,94
Laki-laki	79,95	82,24	80,72	82,69	81,95
Perempuan	57,30	62,10	62,69	64,42	64,28

Sumber: Sakernas DIY Agustus 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja masih perlu ditingkatkan untuk menekan tingkat laju pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh TPT yang bergerak naik dari 2,81% pada tahun 2016 menjadi 3,02% pada Agustus 2017 dan kembali naik menjadi 3,35% pada Agustus 2018, kemudian turun menjadi 3,14 % pada Agustus 2019. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2019, TPT di daerah perkotaan sebesar 3,78%, sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 1,52%.

Penduduk DIY yang bekerja pada Agustus 2019, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (44,26%). Diikuti berusaha sendiri (17,70 %) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (15,27%). Sementara penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian memiliki persentase terkecil yaitu 2%, dan yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap sebesar 4,08%. Dalam setahun terakhir (Agustus 2018-Agustus 2019), peningkatan persentase penduduk bekerja tertinggi pada status buruh/karyawan/pegawai sebesar 2,91 % poin, diikuti status berusaha sendiri sebesar 1,65% poin. Penurunan terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,85% poin, pekerja keluarga/ tidak dibayar sebesar 1,28 % poin, dan pekerja bebas di *non*pertanian sebesar 0,9% poin.



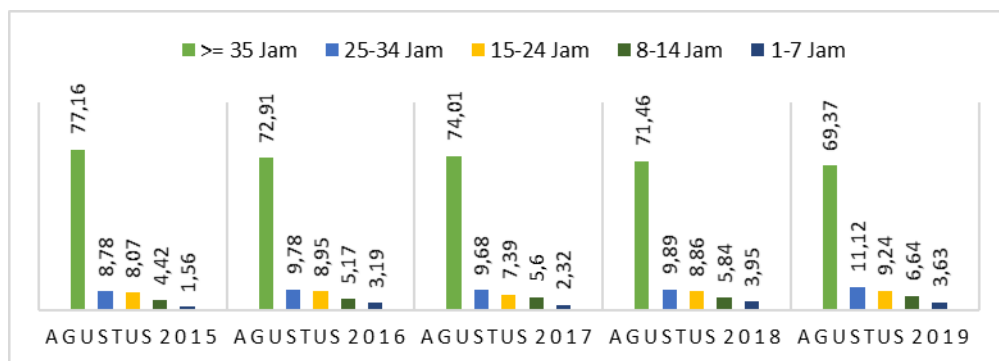
Sumber: Sakernas DIY, Agustus 2019

Gambar 2-71 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal di DIY.

Kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya masuk dalam kategori pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, pada Agustus 2019 ada sebanyak 1,032 juta orang (48,34%) bekerja pada kegiatan formal, dan sebanyak 1,103 juta orang (51,66 %) bekerja pada kegiatan informal. Dalam setahun terakhir (Agustus 2018-Agustus 2019), jumlah pekerja informal turun sebesar 2,75 persen poin jika dibandingkan pada Agustus 2018 sebesar 54,41 persen.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini diindikasikan dari jam kerja yang rendah. Dilihat dari proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja, dalam waktu 5 tahun terakhir persentase tertinggi adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) pada Agustus 2019 sebesar 69,37%. Nilai ini merupakan paling kecil dalam 5 tahun

terakhir. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 3,63 %. 2 tahun belakangan dari tahun 2018 dan 2019, pekerja dengan jam kerja 1-7 jam cenderung lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja dengan waktu kerja diatas 35 jam seminggu. Dalam setahun terkahir ini, pekerja penuh mengalami penurunan sebesar 2,09 % poin. Sedangkan pekerja tidak penuh adalah penduduk yang bekerja dengan waktu kerja kurang dari 35 jam seminggu. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (tidak berusaha mencari pekerjaan lain) dan pekerja setengah penganggur (masih mau bekerja apabila ada tawaran pekerjaan lain). Di DIY selama 5 tahun terakhir, sebagian merupakan pekerja penuh.



Gambar 2-72 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

2.1.4.4.3 Rasio Ketergantungan

Untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif dapat digunakan Rasio Ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan

rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Penduduk berusia produktif adalah penduduk angkatan kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun, penduduk ini secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga merupakan kelompok penduduk dengan usia tidak produktif, hal ini dikarenakan sudah melewati masa pensiun dan sudah tidak bekerja lagi.

Selama lima tahun terakhir, angka dependency ratio di DIY belum mengalami perubahan yang begitu signifikan. Tahun 2015, angka rasio ketergantungan DIY berada pada nilai 45,05% mengalami kecenderungan meningkat hingga tahun 2019 menjadi 45,23% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak produktif. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan penduduk usia lanjut namun kecepatan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak secepat usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam pemenuhan layanan bagi lansia secara komprehensif untuk menciptakan lansia yang sehat dan produktif. Rasio ketergantungan di DIY disebabkan karena karena peningkatan penduduk usia lanjut yang tidak disertai dengan kecepatan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam pemenuhan layanan bagi lansia secara komprehensif untuk menciptakan lansia yang sehat dan produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2019 bermuara pada sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian dari sasaran pembangunan selama tahun 2019 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY.

Tabel 2-153 Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target dalam PK Tahun 2020
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,72	79,99	99,10	81,08
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,02	70,15*	100,19	70,12
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,3846	0,4280	88,71	0,3776
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	10,19	11,44	87,73	9,11
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,68	13,10	112,16	11,72
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,26	6,60	125,48	5,29
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	60,51	61,05	100,89	62,44
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	78	78,85	101,09	79,5
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	30,42	31,53	103,65	40,69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target dalam PK Tahun 2020
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4552	0,4469*	101,82	0,4524
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	A (>80 sd. 90)	AA (90,28)	150	A
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	73,91	96,15	130,09	82,61
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	9.419	10.729	113,91	13.419

Ket: *) angka sementara

Capaian kinerja 2019 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022, sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 14 indikator sasaran Pemda, 3 indikator belum tercapai atau masih di bawah target yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan Angka Kemiskinan. Sedangkan realisasi sasaran kinerja Pemda DIY terhadap target tahun berjalan, yang memiliki persentase capaian lebih dari 100%, sebanyak 11 indikator.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2-154 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2019 terhadap target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	79,99	81,68	97,93
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,15	70,32	99,76
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,428	0,3635	82,26
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	11,44	7,00	36,57
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	13,10	12,04	108,80
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,60	5,34	123,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	61,05	66,15	92,29
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	78,85	82,5	95,58
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	31,53	54,44	57,92
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4469	0,4489	100,45
6	Meningkatnya Kapasitas Tata	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas	nilai	90,28	A	100,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
	Kelola Pemerintahan	Pemerintah (AKIP)		(AA)		
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	96,15	91,3	105,31
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	10.729	21.877	49,04

Capaian sasaran pembangunan pada tahun 2019 didukung oleh kinerja pada level Program Pembangunan Daerah (Program Pemda). Desain Program Pemda di DIY merupakan program-program yang bersifat lintas sektor dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terdapat 12 Program Pemda yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang diukur dengan 34 indikator.

Tabel 2-155 Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2019

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	11,49	26,63
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,66	15,58
		Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	205	245
		Presentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	persen	6,71	25,15*
2	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	tahun	75,20	74,92
3	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab/ Kota	3	2
		Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	persen	21,17	25,00
		<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,10	1,8
		Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kalurahan	42	42
		Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	Angka	10,99	16,50
4	Program penanggulangan kemiskinan	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	persen	0,30	0,30
		Jumlah penduduk miskin	(ribu jiwa)	376.260	440.890
		Pengeluaran per kapita masyarakat	(juta Rp/Th)	13.813,00	16.077*
5	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	12,21	12,32
		Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	persen	13,41	17,00
6	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	persen	43,00	41,04
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,60	3,14

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Desa	5,00	0
7	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	36,40	38,65
		Indeks kualitas udara	Angka Indeks	87,73	85,25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,18	59,70
		Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	155	148,53
8	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	persen	75,20	75,88
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,23	39,75
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi	persen	67,00	79,84
10	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	sedang	sedang
		Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	9.818.077.561,33	18.277.128.626,00
		Nilai eksternal pelayanan publik	Nilai	8,60	8,5*
		Nilai internal integritas organisasi (4,16)	Nilai	4,30	5,14*
		Nilai eksternal persepsi korupsi (5,21)	Nilai	5,60	5,96*
11	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	-	-
		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	persen	25	25
12	Program Fasilitas Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	prosentase Tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	persen	46,51	50,08
		Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	-	-	-

Ket: *) Data sementara

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 pada level pemerintah daerah, didukung secara optimal oleh kinerja pada jenjang di bawahnya yaitu pada level perangkat daerah. Berikut ini disajikan rekapitulasi capaian kinerja perangkat daerah di DIY beserta kinerja program-program di bawahnya yang menggambarkan kinerja pelaksanaan urusan pembangunan di DIY.

Tabel 2-156 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	71	72,5	102,11	BPBD
2	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	80	90,72	113,4	Setwan
3	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96	105,65	110,05	
4	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur. (persen)	79,5	88,41	111,21	BKD
5	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan.	Nilai Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan. (skor)	91	91	100	Bandiklat
6	Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	Rerata Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan. (desa/kel).	330	334	101,81	Satpol PP
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	82	90,07	109,84	Inspektorat

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	Internal.	Pemeriksaan.(%)				
8	Terfasilita sinya Kinerja Parampara Praja.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja. (persen)	72	86,02	119,47	Panirad ya
9	Meningkat nya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan.	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan. (persen)	97,9	98,58	100,69	
10	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. (persen)	79,7	80,86	101,46	
11	Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi. (peringkat)	7	9	71,43	Diskomi nfo
12	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan (persen)	86	90,255	104,95	Biro UHP
13	Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah (persen)	82	82,33	100,4	
14	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (persen)	100	100	100	Biro Hukum
15	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan	100	100	100	

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	layanan informasi produk hukum	layanan informasi produk hukum (persen)				
16	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien (persen)	79,7	115,60	145,04	Biro Organisasi
17	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau (unit)	10	69	690	
18	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan (persen)	100	120,68	120,68	Biro Tapem
19	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK (perangkat daerah)	7	7	100	
20	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya (angka)	3,03	3,14	103,63	Bankesb angpol
21	Meningkatnya kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah (%)	87	88,44	101,66	Bahubd a
22	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	100	100	100	BPKA
23	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	6.234.617.858,00	7.107.452.565,00	114	
24	Meningkatkan kualitas daya	Jumlah lulusan pelatihan yang	1050	1115	106,19	Disnake rtrans

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	saing tenaga kerja	ditempatkan (orang)				
25	Terwujudnya Kesempatan Kerja	Jumlah kesempatan kerja (orang)	2.020.452	2.134.750	105,66	
26	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial (kasus)	20	22	110	
27	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) (juta rupiah)	322.136	301.500*	93,59	Dislautkan
28	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi (persen)	30	30	100	
29	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (juta rupiah)	7.112.249	7.006.750*	98,52	DPKP
30	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,22	95,5	105,85	
31	Pemenuhan Pangan Masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan(Persen)	40,29	40,79	98,76	
32	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan) (Juta Rp)	8.528.946	8.643.438	101,34	Disperindag
33	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan) (Juta Rp)	13.143.131	13.201.887	100,45	
34	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan	nilai omzet koperasi tahun n (Juta Rupiah)	3.716.227	4.325.218	116,38	Diskop UKM

RKPD DIY 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	UMKM					
35		Meningkatnya nilai omset UKM yang dibina (milyar rupiah)	10.692	10.783	100,85	
36	Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM (persen)	0,3	0,3	100	
37	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (juta rupiah)	9.855.064	10.217.677	103,67	Dispar
38	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	spending money wisatawan (rupiah)	7.672.683	10.437.575	136,04	
39	Meningkatnya realisasi investasi	nilai PMTB dalam PDRB DIY tahun n	38.698.221	49.519.128	127,96	DPPM
40	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal)	83	87.86	105,85	
41	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 (persen)	85	100	117,65	Biro Adm Pereko
42	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (persen)	84	95,95	114,2	BAPPED A
43	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan (%)	44,92	45,27	100,78	Dishub
44	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	91,47	92,29	102,12	DLHK

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
45	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	742060	1.086.970	146,48	DPUPES DM
46	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Jumlah penduduk berakses sanitasi (%)	91,58	96,62	105,51	
47	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum (%)	88,71	91,30	102,92	
48	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi (%)	84	84,14	100,17	
49	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan (%)	95,76	97,56	101,88	
50	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	60,41	64,8	107,26	
51	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak (%)	95,49	96,66	101,22	
52	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik (%)	95,6	99,99	104,59	
53	Meningkatnya Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang (izin)	49	57	116,33	DPTR
54	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	64,66	70,61	109,20	
55	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100	100	100	
56	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	27,69	28,26	102,06	

RKPD DIY 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	keistimewaan					
57	Meningkatnya fasilitas tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	persentase fasilitas tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	46,51	50,08	107,68	
58	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan <i>non</i> pemerintah	Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan <i>non</i> Pemerintah yang Ditindaklanjuti	65	66,67	102,57	Biro PIPWP2
59	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan <i>nondiskriminatif</i>	Rata-rata hasil ujian nasional SMA (Rerata nilai ujian SMA)	58,03	63,63	109,65	Disdikpora
60		Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Rerata nilai ujian SMK)	57,89	55,33	95,58	
61		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah(%)	97,25	97,27	100,02	
62		Capaian APK Pendidikan Menengah (%)	96,72	96,73	100,01	
63		Capaian APK Pendidikan Khusus (%)	81,78	82,37	100,72	
64	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (%)	10	10,02	100,2	
65	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga (peringkat)	9	7	100	
66	Terwujudnya Perilaku Sadar	Persentase Puskesmas	100	100	100	Dinkes

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
	Sehat	Melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga (%)				
67	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi (%)	67,18	73,28	109	
68	Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan (%)	74,8	74,8	100	
69	Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa (%)	60	76	127	
70	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)	40,97	42,17	102,93	Dinsos
71	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	51,57	51,72	100,29	Disbud
72	Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan (buah)	618	638	103	
73		Meningkatnya kinerja	5,71	11	193	

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
		pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum (%)				
74		Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya (%)	5,79	6,77	117	
75		Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY (%)	4,28	4,93	115	
76	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,47	0,5	94	DP3AP2
77	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur menikah pertama perempuan	24,4	24,61	100,86	
78	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98	98,05	100,05	
79	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan (%)	24	24,83	103,45	DPAD
80	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi.	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan (berkas)	6300	6605	104,84	
81	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)	75	91,7	122,27	Biro Bintel
82	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi	Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan	4	4	100	Biro Bermas

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d. TW IV 2019			OPD
			Target	Realisasi	Persentase	
83	Kebijakan Penguatan dan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat	pemberdayaan masyarakat (buah)				
		lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan (Lembaga)	4	4	100	

Dari total 83 indikator perangkat daerah yang ditetapkan, sebanyak 81 indikator telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019. Indikator perangkat daerah yang tidak memenuhi target yaitu: Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi (Dinas Kominfo), Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Dinas Dikpora) dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak (Dinas P3AP2).

Tabel 2-157 Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
					Urusan Pemerintahan Wajib																
1	1				Pendidikan																
					Program Pendidikan Menengah	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A (%)	83.00	3,734,994,321,000	83.55	225,332,369,018	80.30	472,141,117,000	83.55	1,145,449,500	104.05	0.24	83.55	414,801,593,839	100.66	11.11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45.00		55.00		40.00		0		0.00		0.00		0.00		
						Angka Putus Sekolah (%)	0.17		0.11		0.20		0.11		145.00		0.11		135.29		
					Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A (%)	65.38	102,550,043,500	84.81	23,480,863,900	52.56	20,810,021,300	84.81	1,264,693,700	161.36	6.08	84.81	48,221,073,134	129.72	47.02	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Persentase Jumlah medali pada	13.00		9.00		5.00		0		0.00		0.00		0.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus (%)															
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB (%)	99.62	95,617, 411,500	99.94	12,515,5 82,196	99.56	15,436,71 2,000	99.94	31,160, 850	100.38	0.20	99.94	30,039,0 22,434	100.32	31.42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	65.00		56.00		57.00		0		0.00		0.00		0.00		
					Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87.68	132,229 ,328,00 0	87.49	46,570,8 69,854	87.54	13,933,96 9,000	87.49	2,508,5 50,000	99.94	18.00	87.49	86,863,2 71,520	99.78	65.69	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95.00	17,028, 065,241	74.46	3,903,28 6,950	81.00	3,616,294 ,000	74.46	335,727 ,100.00	91.93	9.28	74.46	8,221,58 3,963	78.38	48.28	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan	Peserta didik yang mendapatkan	2148.00	29,615,	2,175.0	7,584,34	2080.00	7,389,155	245	1,107,6	11.78	14.99	245.00	15,843,2	11.41	53.50	Dinas Pendidikan,

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pendidikan Teknik	layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)		733,000	0	3,221		,000		94,351. 00				75,311			Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta (%)	91.03	6,011,8 75,000	85.90	1,299,38 3,600	86.90	1,676,635 ,000	85.9	134,912 ,500.00	98.85	8.05	85.90	36,395,7 98,027	94.36	605.40	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul (%)	84.97	6,661,2 14,000	78.82	1,150,09 2,500	80.67	1,856,587 ,000	78.82	89,688, 000	97.71	4.83	78.82	45,991,8 22,301	92.76	690.44	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87.41	7,187,0 90,000	87.14	898,448, 600	83.22	1,049,025 ,000	87.14	162,817 ,350	104.71	15.52	87.14	34,297,7 35,343	99.69	477.21	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo	81.67	5,309,7 76,000	86.79	1,271,25 9,800	75.67	1,929,522 ,000	86.79	146,808 ,300	114.70	7.61	86.79	22,723,5 96,890	106.27	427.96	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(%)															
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Sleman (%)	88.33	7,187,052,000	84.62	916,738,589	85.00	1,796,223,000	84.62	38,850,000	99.55	2.16	84.62	36,147,300,090	95.80	502.95	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2		2			Kesehatan																
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat (%)	41.22	14,418,205,000	40.75	3,973,940,090	40.06	9,358,632,000	6.68	357,229,383	16.67	3.817111123	6.68	7,043,839,141	16.21	48.85	Dinas Kesehatan
						Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58.21		68.60		54.66		54.66		100.00		54.66		93.90		
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular (%)	62.84	15,581,850,000	70.43	2,838,323,604	58.92	2,879,702,000	58.92	261,744,350	100.00	9.089285975	58.92	5,304,197,714	93.76	34.04	Dinas Kesehatan
					Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan	54.85	613,142,637,000	44.02	3,198,215,800	48.08	418,479,000	44.47	61,168,800	92.49	14.61693418	44.47	5,976,255,798	81.08	0.97	Dinas Kesehatan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						lainnya sesuai standar pelayanan (%)															
					Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan (%)	80.19	4,209,442,600	51.20	696,096,481	62.32	793,680,000	62.32	247,865,307	100.00	31.22987942	62.32	1,744,113,154	77.72	41.43	Dinas Kesehatan
						Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86.48		73.14		76.79		73.9		96.24		73.90		85.45		
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat (layanan)	15.00	17,688,960,000	11.00	11,021,706,682	13.00	13,543,204,000	14	1,145,369,048	107.69	8.457149785	14.00	17,044,513,120	93.33	96.36	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD	Persentase Mantan yang meningkat	68.00	20,215,954,000	78.46	17,023,259,986	64.00	6,308,694,432	66	1,027,784,645	103.13	16.29155852	66.00	25,275,652,033	97.06	125.03	Dinas Kesehatan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Bapelkes	kompetensinya (%)															
					Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%)	100.00	174,257,719,000	100.00	32,669,998,415	100.00	39,973,855,760	100.00	3,932,185,440	100.00	9.836893052	100.00	83,354,188,060	100.00	47.83	Dinas Kesehatan
						Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	27.00		22.00		25.00		23		92.00		23.00		85.19		
					Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%)	90.00	104,824,381,000	94.18	21,748,817,892	88.00	24,367,786,869	97.38	2,892,155,109	110.66	11.86876397	97.38	46,818,926,658	108.20	44.66	RSJ GRHASIA
						Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%)	1.00		-		3.00		0.00		200.00		0.00		200.00		
						Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (%)	90.00		84.00		86.00		86.00		100.00		86.00		95.56		
						Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan	80.00		79.88		75.00		79.88		106.51		79.88		99.85		

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)					Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)					Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020					Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2					3					4					5					6					7					8					9 = 8/7 x 100%					10 = 6 + 8					11=10/5 x100%					12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(%)															
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	Angka keberhasilan pengobatan (sucess rate) TB (%)	86.00	64,391, 186,000	84.87	16,581,2 83,704	84.00	18,635,42 2,571	84	1,898,3 02,699	100.00	10.19	84.00	33,357,1 59,850	97.67	51.80	RS Paru Respira
						Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1.00		0.76		1.50		1.5		100.00		1.50		50.00		
						Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (orang)	80.00		142.00		80.00		80		100.00		80.00		100.00		
						Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60.00		45.91		60.00		60		100.00		60.00		100.00		
						Length of stay (LOS) (hari)	5.00		2.89		5.00		5		100.00		5.00		100.00		
3	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
					Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari)	NA	24,420, 975,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	569.00	9,566,10 8,840	NA	39.17	DPU ESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ketersediaan air curah yang dikelola (SR)	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16750.00	3,587,675,825	NA	0.00	DPU ESDM
						Layanan sistem air limbah yang terpusat yang dikelola (SR)	NA	6,214,811,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23821.00	2,061,192,960	NA	33.17	DPU ESDM
					Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah (L/detik)	NA	61,100,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	212.30	49,880,985,589	NA	81.64	DPU ESDM
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	NA	17,000,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.00	15,866,847,250	NA	93.33	DPU ESDM
						Peningkatan kinerja pengembangan sistem air limbah terpusat (%)	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93.92	194,638,000	NA	0.00	DPU ESDM
					Program Pengembangan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi (%)	NA	15,878,450,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.09	843,121,400	NA	5.31	DPU ESDM
						Penambahan kapasitas air baku	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71.90	2,158,82	NA	0.00	DPU ESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(ltr/dtk)												6,500			
						Penanganan titik genangan (lokasi)	NA	6,650,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.00	5,436,520,500	NA	81.75	DPU ESDM
					Program Pengelolaan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan sistem kinerja irigasi (%)	NA	23,661,550,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66.50	15,326,179,841	NA	64.77	DPU ESDM
						Pemenuhan ketersediaan air baku (L/det)	NA	14,439,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41.05	14,553,203,800	NA	100.79	DPU ESDM
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780000.00	91,727,500,000	608.00	7,707,299,700	660.00	24,365,703,536	607.65	184,374,200	92.06818182	0.756695573	607.65	7,891,673,900	0.08		DPU ESDM
						Penanganan lokasi genangan (lokasi)	6.00	50,288,000,000	1.00		1.00		0		0		0.00		0.00		DPU ESDM
						Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	274000.00	31,727,500,000	24,225.00		25200.00		25018		99.27777778		25018.00		91.31		DPU ESDM
					Program Pengelolaan dan Pengembangan	Pengelolaan air curah pada SPAM regional	1150.00	264,700	546.00	3,406,93	750.00	17,820,26	200	1,011,0	26.6666	6	200.00	4,418,02	17.39	1.67	DPU ESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Sistem Penyediaan Air Minum	(L/det)		,000,000		1,000		6,000		89,160	6667			0,160			
						Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110074.00			91,447.00	91174.00		91447		100.2994275		91447.00		83.08		DPU ESDM
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan air baku (L/det)	348.00	105,111,800,000	403.86	17,797,741,733	19.50	6,188,480,000	0	429,421,490	0	7	0.00	18,227,163,223	0.00	17.34	DPU ESDM
						Pengelolaan Air baku (L/det)	84.00	91,205,875,200	54.31		62.40		54.31		87.03525641	#DIV/0!	54.31	-	64.65	0.00	DPU ESDM
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77.20	125,219,406,250	72.31	19,341,946,028	74.50	25,031,850,000	72.31	549,615,500	97.06040268	2.195664723	72.31	549,615,500	93.67	0.23	DPU ESDM
						Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan	87.00	116,947,631,250	73.48		77.82		73.48		94.4230275		73.48		84.46		DPU ESDM

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemda DIY (%)															
		Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	75.26	675,670,084,744	73.48	125,441,851,650	74.06	134,060,369,000	73.48	3,016,739,940	99.2168512	2.250284676	73.48	3,016,739,940	97.63	0.45	DPU ESDM
			Penambahan jaringan jalan baru (%)	100.00	212,500,000,000	35.67		46.99		35.67		75.90976804		35.67		35.67		DPU ESDM
		Program Pelayanan Jasa dan Jasa Pengujian Pembinaan Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	27,666,495	NA	2,282,557,097	NA		NA	112,134,000	NA	6	63.26	3,789,089,424	NA	34.52	DPU ESDM
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99.14	8,360,262,000	64.12		75.13	1,923,237,000	65.99		87.83		65.99		66.56		DPU ESDM
			Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (%)	NA	2,587,097,200	NA		NA		NA		NA		NA				DPU ESDM
			Sertifikat/ laporan hasil uji yang	5544.00	18,916,1286.0			800.00		47		5.875		47.00		0.85		DPU ESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						diterbitkan (LHU)		233,823	0												
					Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan Tata Ruang (%)	N/A	3,100,0 00,000	NA	775,614, 445	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63.77	317,356, 856	N/A	10.24	Dinas PTR
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang	98.99	2,700,0 00,000	57.06		72.63	344,215,0 00	67.71	41,775, 500	93.23	12	67.71	41,775,5 00	68.40	1.55	
					Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang (%)	N/A	N/A	NA	1,715,48 1,101	NA	N/A	NA	N/A	NA	N/A	27.85	279,129, 732	N/A	N/A	Dinas PTR
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan tata	89.98	7,380,0 00,000	75.88		882.73	676,068,0 00	75.88	59,780, 000	8.60	9	75.88	59,780,0 00	84.33	0.81	

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ruang															
4		4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
					Program pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Pengurangan RTLH (%)	NA	64,353, 632,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.73	29,103,2 38,541	NA	45.22	DPU ESDM
						Penyediaan kawasan pengembangan perumahan(%)	NA	800,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.22	1,193,45 5,090	NA	149.18	DPU ESDM
						Penanganan Kawasan kumuh (%)	NA	35,553, 632,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46.13	27,493,7 05,345	NA	77.33	DPU ESDM
						Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (%)	NA	16,000, 000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.00	17,882,3 56,700	NA	111.76	DPU ESDM
					Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan RTLH (%)	53.78	298,229 ,500,00 0	36,78	53,700,8 40,870	32.43	46,218,00 8,000	38.86	71,576, 750	120	0.15486 7665	38.86	53,772,4 17,620	72.26		DPU ESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW (%)	20.00	127,627,500,000	8,91		12.00		8.91		74		8.91		44.55		
						Cakupan penangan kawasan kumuh 9%)	100.00	-	67,69		72.16		68.94		96		68.94		68.94		
					Program Penyelenggara Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (titik)	212.00	79,500,000,000	269	42,924,110,134	48.00	49,283,050,000	0	18,480,000	-	0	0.00	18,480,000	0.00	0.01	
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (titik)	128.00	69,000,000,000	52		32.00		-		-		0.00		0.00		
5	5				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana (desa)	301.00	14,327,854,520	25.00	6,366,273,703	25.00	6,276,153,700	5	1,006,117,200	20	16.03079287	5.00	12,420,550,941	1.66	86.69	BPBD

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (sekolah)	181.00		25.00		25.00		25		100		25.00		13.81		
					Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana (menit)	10.00	30,038, 025,190	15.53	6,797,98 8,500	14.00	8,378,031 ,500	14	280,160 ,850	100.00	3.34	14.00	16,314,6 69,600	60.00	54.31	BPBD
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca bencana	85.00	13,585, 050,273	99.00	58,897,5 14,676	75.00	11,684,08 7,413	75	210,371 ,000	100.00	1.80	75.00	63,370,0 97,306	88.24	466.47	BPBD
					Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.92	15,164, 174,165	3.03	3,217,37 8,600	2.89	3,765,869 ,000	3.03	171,279 ,500	104.84	4.55	3.03	7,465,67 7,950	103.77	49.23	Bakesbangpol
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.36	16,771, 911,057	3.43	993,827, 350	3.33	713,425,0 00	3.43	84,215, 200	103.00	11.80	3.43	1,382,19 0,200	102.08	8.24	Bakesbangpol
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.90	1,437,6 65,000	3.05	798,472, 590	2.88	200,810,0 00	3.05	50,801, 000	105.90	25.30	3.05	849,273, 590	105.17	59.07	Bakesbangpol

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentaraman Masyarakat	Persentase gangguan tubum tranmas yang tertangani (%)	75.00	6,374,0 66,000	41,74	1,136,50 6,816	50.00	1,566,259 ,000	0	430,975 ,621	0.00	27.52	0.00	3,179,73 3,937	0.00	49.89	Satpol PP
					Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55.00	12,253, 219,800	42,69	4,022,63 7,026	30.00	789,259,0 00	0	154,372 ,750	0.00	19.56	0.00	8,730,81 6,680	0.00	71.25	Satpol PP
					Program Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (%)	80.00	2,975,3 91,255	72,16	2,166,20 6,180	75.00	900,206,0 00	0	253,109 ,500	0.00	28.12	0.00	3,275,35 4,680	0.00	110.08	Satpol PP
6				6	Sosial																
					Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, dan Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung,	6.70	17,852, 212,525	8,58	4,438,00 4,140	5.91	6,128,662 ,000	2.06	905,821 ,883	34.86	14.7800 9202	2.06	9,280,26 7,141	30.75	51.98	Dinas Sosial

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat (%)															
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	50.85	11,157, 545,500	67,57	1,560,21 7,703	67.60	6,007,705 ,600	10.22	350,073 ,600	15.12	5,827,07 648	10.22	3,718,60 6,753	20.10	33.33	Dinas Sosial
						Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga	NA	NA	NA		NA		NA		NA		0.23		NA		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						meningkat ekonominya (%)															
					Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat (%)	1.01	16,372, 612,000	1,26	4,843,47 1,050	1.01	6,525,917 ,500	0	1,377,5 56,200	0.00	21.1090 0421	0.00	6,221,02 7,250	0.00	38.00	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak- haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)	27.65	6,897,4 66,177	25,29	1,226,66 5,450	25.88	2,500,871 ,000	5.88	888,232 ,529	22.72	35.5169 2706	5.88	2,114,89 7,979	21.27	30.66	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (%)	48.33	3,748,5 89,269	43.33	1,371,81 0,048	45.00	1,420,102 ,000	0	289,879 ,240	0.00	20.4125 6473	0.00	1,661,68 9,288	0.00	44.33	Dinas Sosial

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat (%)	14.80	3,203,392,111	14.20	1,838,060,217	14.40	2,440,415,500	3.2	545,505,011	22.22	22.35295633	3.20	2,383,565,228	21.62	74.41	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (%)	85.00	3,206,432,081	77,5	724,186,000	80.00	1,432,187,000	6.25	600,771,700	7.81	41.94785318	6.25	1,324,957,700	7.35	41.32	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (%)	47.33	4,935,484,106	34,36	2,544,855,664	39.76	1,498,848,000	0	628,654,162	0.00	42	0.00	3,173,509,826	0.00	64.30	Dinas Sosial
					Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan	100.00	2,852,9	107,48	612,378,	100.00	1,080,540	107.48	360,749,000	107.48	33	100.00	973,127,	100.00	34.11	Dinas Sosial

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dasar dan hak-haknya (%)		91,662		400		,400						400			
					Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)	51.60	20,163,021,500	51,72	5,393,762,242	51.58	3,407,608,000	29.66	631,864,500	57.50	19	51.58	11,876,125,557	99.96	58.90	Dinas Sosial
7		7			Ketengakerjaan																
					Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial (perusahaan)	1688.00	2,724,586,800	1,426	804,986,800	1488.00	815,636,000	1433	183,439,630	96.30	22.49037929	1433.00	1,624,937,235	84.89	59.64	Disnakertrans
					Program Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja (%)	64.00	2,130,749,000	64,29	1,102,266,900	62.00	540,600,000	64.29	101,221,000	103.69	18.72382538	64.29	1,669,889,675	100.45	78.37	Disnakertrans

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)	533.00	3,122,3 56,000	406.00	971,874, 600	443.00	800,831,0 00	410	359,818 ,637	92.55	44.9306 579	410.00	2,072,99 0,537	76.92	66.39	Disnakertran s
					Program Pembinaan pelatihan standarisasi dan pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan (orang)	2000.00	5,491,9 77,000	418.00	1,735,53 0,550	400.00	1,112,282 ,000	80	160,276 ,500	20.00	14.4097 0006	80.00	3,417,45 5,600	4.00	62.23	Disnakertran s
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (lembaga)	90.00		77.00		82.00		77		93.90		77.00		85.56		
					Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9.52	25,176, 543,000	3,88	1,017,71 0,000	5.71	6,539,762 ,000	3.88	93,821, 200	67.95	1.43	3.88	6,838,07 6,155	40.76	27.16	
8			8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
					Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	70.00	1,430,583,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71.42	1,277,847,025	102.03	89.32	BPPM
					Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85.00	4,591,206,000	80.54	773,818,373	76.00	1,546,839,000	58.75	194,552,900	77.30	12,577,498	58.75	968,371,273	69.12	21.09	DPPPA&DAL DUK
					Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34.25	920,631,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.08	1,854,208,950	102.42	201.41	BPPM
					Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34.45	5,685,871,000	35.90	3,642,557,250	34.38	2,573,849,000	35.9	295,133,895	104.421	11,466,359	35.90	3,937,691,145	104.21	69.25	DPPPA&DAL DUK
9				9	Pangan																
					Program Peningkatan Akses dan Ketersediaan Pangan	Cadangan Pangan (ton)	537.00	1,368,175,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	672.63	1,281,266,542	125.26	93.65	BKPP

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (gr/kapita/tahun)	32.00	250,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	48.00	832,209,371	150.00	332.88	BKPP
						Konsumsi Sayur Meningkatkan (gr/kapita/tahun)	234.00		NA		NA		NA	NA	NA	NA	228.00		97.44		
					Program Peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Presentase peningkatan dan konsumsi energi (%)	0.40	9,200,000,000	0.69	2,038,147,856	0.08	1,452,694,250	0.69	130,121,500	862.5	8.957253049	0.69	2,168,269,356	172.50	23.57	DPKP
					Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0.00	4,700,000,000	4.00	492,029,400	4.00	309,590,000	4	39,359,000	100	12.71326593	4.00	531,388,400	#DIV/0!	11.31	DPKP
10	10				Pertanahan																
					Program tertib administrasi pertanahan	Layanan adm pertanahan sesuai peraturan perundangan (%)	100.00	2,700,000,000	100	239,671,100	100.00	32,426,000	25	8,500,000	25	26.21353235	25.00	401,864,600	25.00	14.88	Dinas PTR
11	11				Lingkungan Hidup																
					Pogram pengkajian dan Penataan Lingkungan	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin	NA	1,979,3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41.25	1,918,60	NA	96.93	BLH

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Hidup	lingkungan daNAtau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)		32,000										7,575			
						Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)	100.00		NA		NA		NA		NA		0.00		0.00		BLH
					Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan daNAtau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	56.25	11,000, 000,000	38,75	1,156,24 1,060	48.75	984,437,0 00	12.5	75,677, 500	25.64	7.68738 8832	12.50	1,231,91 8,560	22.22	11.20	DLHK
						Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)	100.00		10		100.00		18.75		18.75		18.75		18.75		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kadar 7 parameter tercemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Coli, Tinja, Total Koli) dan dua kadar parameter pencemaran udara SO2 dan NO2	NA	2,350,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kadar 7 parameter pencemaran air (TSS=21,48 mg/l; BOD=4,84 mg/l; COD=11,77 mg/l; Fosfat=0,74 mg/l; DO=6,08 mg/l; Koli Tinja=4897.5 MPN/100ml; Total Koli=9497.67 MPN/1	2,777,031,996	NA	1.18	BLH

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						sungai (lokasi)															
						Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota (usaha/kegiatan)	80.00		65.00		70.00		0		0		0.00		0.00		
					Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	NA	1,870,6 68,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.00	3,919,58 0,404	NA	2.10	BLH
					Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3.00	10,650, 000,000	6.00	2,112,41 7,841	3.00	2,230,037 ,000	0	84,581, 300	0	3,79282 0478	0.00	2,196,99 9,141	0.00	20.63	DLHK
					Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	NA	725,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60.86	4,848,58 6,832	NA	668.77	DLHK
					Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175.00	24,248, 033,709	166	4,164,00 9,958	165.00	2,369,123 ,250	0	50,558, 500	0	2,13405 9509	0.00	9,182,57 4,668	0.00	37.87	DLHK
						Persentase penurunan	0.50		0.3		0.10		0		0		0.00		0.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kerusakan hutan (%)															
					Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	780.00	42,000, 000,000	538,4	8,395,96 4,760	660.00	9,150,000 ,000	655	956,615 ,500	99.2424	10.4548 1421	655.00	9,352,58 0,260	83.97	22.27	DLHK
12	12				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																
					Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) (%)	87.97	3,525,4 50,000	97,87	2,105,75 6,496	86.10	1,420,155 ,000	97.87	408,168 ,867	113.67	28.7411 4917	97.87	4,670,53 7,486	111.25	132.48	Biro Tata Pemerintahan
13	13				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (Lembaga)	4.00	2,997,3 71,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.00	1,703,15 1,990	100.00	56.82	BPPM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong-royong (jumlah)	8.00	900,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.00	703,543,400	100.00	78.17	BPPM
14	14				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1.17	250,210,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.05	237,922,200	89.74	95.09	BPPM
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1.17	808,386,000	1,14	697,742,350	1.17	773,464,000	1.14	107,622,500	102.5641026	13.91435154	1.14	805,364,850	102.56	99.63	DPPPA & DALDUK
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.00	251,486,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1,157,645,300	100.00	460.32	BPPM
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.00	3,820,420,000	0,0013	1,690,385,006	0.0013	2,294,148,500	0.0013	240,270,500	100	10.47318864	0.00	1,930,655,506	100.00	166.77	DPPPA & DALDUK
15	15				Perhubungan																

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengembangan keselamatan transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15		N/A	19.01	Dishub
						Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0.90		20,001		0.94		91,737,000	0	0.789650438	2.00		222.33	56.51		
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.76		N/A	1.99	Dishub
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	N/A		NA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71.00		NA		Dishub
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian	N/A		NA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.00		N/A		Dishub
						Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82.41		76,70		80.35		104,909,468	124.46	4.640479063	100.00		121.34	5.14	Dishub	

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Yogyakarta															
					Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang terlayani Angkutan Umum (orang/hari)	N/A	1,673,816,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8119.00	1,498,531,380	N/A	89.53	Dishub
					Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi dan perpakiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perpakiran (orang/hari)	4700.00	8,900,000,000	7,005	1,617,250,460	4600.00	3,008,859,000	6597	45,026,999	143.4130435	1496480859	6597.00	1,662,277,459	140.36	18.68	Dishub
						Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	830.00		104	791.00			104		13.14791403		104.00		12.53		Dishub
16	16				Komunikasi dan Informatika																
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (%)	80.00	11,035,916,171	69,71	3,405,640,250	70.00	1,673,976,500	69	338,183,500	98.571	20.20240428	69.00	6,852,131,483	86.25	62.09	Dinas Kominfo
					Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan	62.50	9,088,119,400	25	4,647,329,389	37.50	2,170,720,000	25	366,968,850	66.667	16.90539775	25.00	7,426,194,541	40.00	81.71	Dinas Kominfo

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Informasi yang Berbasis TIK															
					Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (%)	90.50	45,235,414,180	98,42	7,323,345,150	80.50	920,565,000	76.5	137431600	95.031	14.92904901	76.50	14,609,537,404	84.53	32.30	Dinas Kominfo
17	17				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
					Program Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	96.49	8,355,000,000	83.403	4,622,797,704	87.516	17,372,356,889	83.884	200,607,500	95.85	1.154751202	83.88	8,206,518,504	86.94	98.22	Dinas Koperasi
					Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	1295.00	6,550,000,000	749.00	1,362,741,000	899.00	1,309,224,900	749	131,601,000	83.31	10.05182532	749.00	1,494,342,000	57.84	22.81	Dinas Koperasi
					Program Pengembangan Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp juta)	2066336.00	6,000,000,000	2.317409	3,241,910,768	2046177.00	3,346,431,000	2317409	21,591,000	113.26	0.645194836	2317409.00	3,263,501,768	112.15	54.39	Dinas Koperasi
					Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n	NA	550,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2473645.00	2,360,34	NA	4.29	Dinas Koperasi

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(RpRibu)		,000										7,504			
					Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	241362 86250.0	14,050, 000,000	15,870, 000,000	392,336, 388	182505 000000.0	320,595,0 00	161200 00000	35,988, 500	88.33	11.2255 3377	161200 00000.0	428,324, 888	66.79	3.05	Dinas Koperasi
					Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan (%)	18.82	200,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.53	275,879, 500	103.77	100.00	Dinas Koperasi
					Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal (%)	22.16	250,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.16	240,873, 100	100.00	100.00	Dinas Koperasi
18	18				Penanaman Modal																
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	179082 4.00	5,850,0 00,000	391,531 ,332	1,361,78 9,439	103635 600	369,297,7 50	391531 332	15,069, 750	377.796 1743	4.08065 037	391531 332.00	1,376,85 9,189	21863.1 9	23.54	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang	719692. 00	750,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	194761 1.10	734,174,	2.71	97.89	BKPM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)		,000										693			
					Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (Rp Juta)	918963.00	4,954,000,000	2,557,793	1,095,746,613	820644.00	888,908,750	0	19,173,000	0.00	2.156914306	0.00	1,114,919,613	0.00	22.51	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (RpJuta)	758857.00	877,843,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6652446.00	1,013,693,946	8.77	1.15	BKPM
					Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55.00	1,000,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	77.41	92,380,000	1.41	0.09	BKPM
					Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100.00	8,650,000,000	94	1,188,037,155	97.00	308,118,000	94	115,282,500	96.91	37.41504878	94.00	1,303,319,655	94.00	15.07	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%)	94.00	2,725,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141.00	2,096,468,450	150.00	76.93	Kantor PPTSP

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Kemudahan berusaha dan Pelayanan Pengaduan	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1.00	9,300,000,000	5	905,476,868	3.00	553,782,000	5	31,592,500	33.33	5.704862202	5.00	937,069,368	-300.00	10.08	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		19			Kepemudaan dan Olahraga																
					Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30.00	29,791,565,000	24,34	8,699,534,674	26.00	7,191,794,000	24.34	401,715,884	93.61538462	5.585753485	24.34	9,101,250,558	81.13	30.55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan (sentra)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.00	10,075,143,762	NA	NA	
					Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7.00	203,273,672,000	20	6,816,955,360	6.00	68,793,114,000	0	1,149,962,060	0	1.671623791	0.00	47,880,566,214	0.00	23.55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS (medali)	13.00		31		12.00		31		258.3333333		31.00		238.46		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
20	20				Statistik																
					Program Pengembangan statistik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100.00	7,703,31,293	100	2,101,458,497	100.00	1,542,910,000	100	34,885,000	100	2.260987355	100.00	2,516,571,610	100.00	32.67	BAPPEDA (BSD)
						Tingkat kepuasan pelanggan	72.00		83.28		69.00		83.28		120.6956522		83.28		115.67		
21	21				Persandian																
					Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100.00	2,463,365,000			0.00				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	456,606,150	0.00	18.54	Dinas Kominfo
					Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100.00	707,679,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	456,606,150	100.00	64.52	Biro Umum dan Protokol

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		22			Kebudayaan																
					Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemuhan elayanan administrasi perkantoran	100.00	22,310, 873,000	100	1,997,58 1,543	100.00	8,365,623 ,400	100	373,701 ,796	100	4.46711 2349	100.00	4,110,41 7,331	100.00	18.42	Dinas Kebudayaan
					Program Peningkatan Saranaa dan Prasarana Aparatur	Persentase pemuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	4,232,5 94,000	100	476,906, 792	100.00	950,010,0 00	100	77,891, 800	100	8.19905 0536	100.00	1,166,23 7,647	100.00	27.55	Dinas Kebudayaan
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00	1,746,7 13,000	100	181,116, 150	100.00	162,537,0 00	100	25,092, 000	100	15.4377 1572	100.00	460,357, 360	100.00	26.36	Dinas Kebudayaan
23		23			Perpustakaan																
					Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	jumlah perpustakaan yang terstandar	69.00	6,162,2 86,582	39	2,398,20 1,650	49.00	2,742,721 ,000	39	810709 400	79.59	29.56	39.00	5,420,34 1,025	56.52	87.96	DPAD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
					Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (exp)	50870.00	10,228,218,343	10,174	2,328,273,892	10174.00	1,850,097,000	100	327,786,000	0.98	17.72	100.00	4,917,807,742	0.20	48.08	DPAD
					Program Layanan Perpustakaan	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	30000.00	20,084,537,428	6,000	3,259,834,348	6000.00	4,793,897,000	100	780,994,394	1.67	16.29	100.00	8,491,266,097	0.33	42.28	DPAD
						Meningkatnya kualitas layanan JLA (perpus)	8.00		5		6.00		4		66.67		4.00		50.00		
24	24				Kearsipan																
					Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	4000.00	987,354,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4000.00	945,595,550	100.00	95.77	DPAD
					Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	32000.00	3,479,974,496	8,000	838,496,850	8000.00	691,659,000	100	120,788,600	1.25	17.46	100.00	959,285,450	0.31	27.57	DPAD
					Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	130.00	3,696,479,908	70	662,587,849	90.00	694,842,000	70	61,182,500	77.78	8.81	70.00	1,777,993,149	53.85	48.10	DPAD

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(OPD/UPTD)															
					Urusan Pemerintah Pilihan																
1	1				Kelautan dan Perikanan																
					Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	89700.0 0	13,850, 000,000	89,648	3,734,61 7,800	89500.0 0	3,099,987 ,120	35845	723,281 ,620	40.0502 7933	23.3317 621	35845.0 0	6,779,38 9,120	39.96	48.95	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	7063.00	13,260, 700,000	6,276	1,586,00 8,550	6481.00	2,149,305 ,520	1298	174,732 ,500	20.0277 7349	8.12971 9036	1298.00	2,791,22 1,770	18.38	21.05	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	8201.00	886,800 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8242.00	2,568,34 0,184	100.50	289.62	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/ta hun) Produksi	26.05	8,700,0 00,000	30.18	3,990,93 9,342	25.21	3,558,445 ,500	0	433,438 ,000	0	12.1805 4344	0.00	4,424,37 7,342	0.00	50.85	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih kan yang bersertifikat (juta ekor)	31.30	2,650,0 00,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.46	2,644,67 9,300	99.80	1.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	90.00	14,300,000,000	87	3,428,410,193	86.00	3,075,975,820	0	1,122,795,980	0	37	0.00	4,551,206,173	0.00	31.83	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Konservasi Ekosistem dan Pengawasan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	70.00	7,250,000,000	18	791,335,548	14.00	835,764,750	0	150,268,800	0	17.98	0.00	2,108,494,648	0.00	29.08	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50.00		10		10.00		0	0	0	0.00	0.00		0.00		Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36.73	2,950,000,000	54,61	166,264,294	34.78	236,644,000	6.8	21,487,250	19.55146636	9	6.80	334,770,244	18.51	11.35	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2				Pariwisata																

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	837709 9.00	16,350,000,000	6,243,762	3,353,026,992	654232 7.00	2,622,220,000	143156 7	85,194,500	21.88	3.25	143156 7.00	6,751,808,576	17.09	41.30	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250.00	4,620,000,000	121	615,786,100	150.00	1,084,435,000	121	125,267,000	80.67	11.55	121.00	1,460,841,600	48.40	31.62	Dinas Pariwisata
					Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23.04	10,200,000,000	17.03	2,992,591,100	19.61	2,758,762,000	15.01	118,062,000	76.54	4.28	15.01	6,190,637,775	65.15	60.69	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	2.45	77,000,000,000	2.15	19,610,767,511	2.22	10,124,082,000	2.22	51,655,000	100.00	0.51	2.22	42,299,375,961	90.61	54.93	Dinas Pariwisata
3	3				Pertanian																
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	220976 9.00	50,853,760,800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	221004 6.00	45,152,087,122	100.01	88.79	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	231350 0.00	26,932,000,000	2.313.182	1,867,008,475	231305 0.00	8,688,304,700	549313.34	279,148,498	23.75	3.21	549313.34	2,146,156,973	23.74	7.97	Dinas Pertanian dan Ketahanan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																					Pangan
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	396375.00	2,885,902,200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	396406.00	2,866,875,860	100.01	99.34	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	402750.00	12,692,000,000	398.5	1,563,190,790	399550.00	617,385,280	90042.21	42,813,500	22.54	6.93	90042.21	1,606,004,290	22.36	12.65	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	620869.00	450,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	620881.00	739,297,125	100.00	5.82	Dinas Pertanian
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	628870.00	13,600,000,000	582,377	2,322,271,550	624872.00	2,700,425,000	586253	135,099,000	93.82	5.002879176	586253.00	2,457,370,550	93.22	18.07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68740.00	2,605,490,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66507.50	2,478,159,390	96.75	95.11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	69290.00	9,713,000	69,137	1,501,770	69015.00	968,185,200	25695.74	106,248,000	37.23	10.97	25695.74	1,608,020	37.08	16.56	Dinas Pertanian dan Ketahanan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								00,000		8,065		50						6,065			Pangan
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)		450,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300.00	438,332,200	NA	97.41	Dinas Pertanian
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76.00	4,400,000,000	73.00	648,930,750	74.00	526,894,480	73.2	64,871,480	98.91891892	12	73.20	713,802,230	96.32	16.22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengembangan Perbenihan	Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (benih)	81440.00	1,421,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	124417.60	1,343,131,627	152.77	94.52	Dinas Pertanian
					Pengembangan perbenihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	91.00	7,694,000,000	85.00	1,908,019,653	87.00	1,821,468,750	15.53	562,469,950	17.85057471	31	15.53	2,470,489,603	17.07	32.11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan	500.00	200,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	502.44	170,818,252	100.49	85.41	Dinas Pertanian

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Hortikultura (hektar)															
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	900.00	2,150,000,000	605.29	373,886,400	700.00	41,114,800	102	2,560,000	14.5714 2857	6	102.00	376,446,400	11.33	17.51	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95.00	265,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99.91	264,604,700	105.17	99.85	Dinas Pertanian
					Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95.00	2,070,000,000	95.00	431,204,100	95.00	244,751,000	97.92	84,255,500	103.073 6842	34	97.92	515,459,600	103.07	24.90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	Produksi bibit ternak (ekor)	50.00	3,776,455,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52.00	3,882,084,447	104.00	102.80	Dinas Pertanian
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98.00	18,900,000,000	92.31	4,038,960,487	94.00	3,593,998,560	34	213,983,000	36.1702 1277	6	34.00	4,252,943,487	34.69	22.50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		4			Kehutanan																
					Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Persentase kawasan hutan tertata(%)	92.32	4,165,0 00,000	88,03	704,239, 720	89.40	915,448,0 00	88.03	974405 00	98.4675 6152	10.64	88.03	801,680, 220	95.35	19.25	DLHK
						Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	8.00		9,76		2.00		0		0		0.00		0.00		
					Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.60	280,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86.60	638,199, 000	100.00	227.93	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	0.10	5,453,6 70,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.65	5,469,58 8,911	4650.00	100.29	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan hutan sumber daya	86.66	30,008, 000,000	86,66	7,772,21 7,464	86.64	8,932,665 ,400	86.665	384287 872	100.028 855	4	86.67	8,156,50 5,336	100.01	27.18	DLHK
					Konservasi dan	Persentase Penurunan	0.10	2,336,2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.14	4,012,97	140.00	171.77	Dinas Kehutanan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					perlindungan Hutan	kerusakan hutan (%)		41,100										0,830			dan Perkebunan
					Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase hutan konservasi terkelola(%)	77.09	3,642,872,000	75,91	1,332,739,400	76.62	1,218,626,750		47527500	0	3.90	0.00	1,380,266,900	0.00	37.89	DLHK
					Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000.00	3,368,673,000	580,648	549,008,000	330000.00	513,432,000	0	223229600	0	43.48	0.00	772,237,600	0.00	22.92	DLHK
5	5				Energi dan Sumber Daya Alam																
					Program pengaturan dan pengembangan energi, air tanah, geologi dan pertambangan	Penduduk berakses energi (%)	N/A	40,255,370,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.95	23,698,874,818	NA	58.87	Dinas PUPESDM
						Penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		75.00		N/A		
						rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		20.00		N/A		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral (ijin)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		5.00		N/A		
						Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan (RT)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		6577.00		N/A		
					Program penyelenggaraan Energi dan kelistrikan	Penambahan jumlah rumah yang menikmati listrik (RT)	13848.00	56,953,964,800	8,168	7,487,799,064	9848.00	10,781,806,000	8168	30,007,000	82.94	0	8168.00	7,517,806,064	58.98	13.20	Dinas PUPESDM
						bangunan/ gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi (unit)	92.00		62		72.00		62		86.11		62.00		67.39		Dinas PUPESDM
						penambahan ijin ketenagalistrikan sesuai ketentuan (ijin)	75.00		17		45.00		11		24.44		11.00		14.67		Dinas PUPESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program pengelolaan air tanah dan geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	82.00	55,918,053,000	85	8,592,943,344	76.00	14,675,340,000	85	62,314,500	111.8421053	0	85.00	62,314,500	103.66	0.11	Dinas PUPESDM
						rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	< 20		20		20.00		20		100		20.00		#VALUE!		Dinas PUPESDM
						penambahan jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (ijin)	75.00		21		45.00		8		17.77777778		8.00		10.67		Dinas PUPESDM
					Program Pengelolaan pertambangan	Penambahan jumlah usaha pertambangan yang baik dan benar (ijin)	40.00	12,747,140,000	8	2,829,397,514	26.00	1,752,465,500	5	60,087,000	19.23076923	3	5.00	2,889,484,514	12.50	22.67	Dinas PUPESDM
						Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan (%)	7.80		7.6		7.60		7.59		99.86842105		7.59		97.31		Dinas PUPESDM
					program pengwasan dan pengendalian energi,	Tertib ijin usaha pertambangan (ijin)	12.00	3,898,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00	2,780,12	100.00	71.32	Dinas PUPESDM

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					geologi, air tanah dan pertambangan	Tertib ijin pengusahaan air tanah (ijin)	15.00	00,000	N/A		N/A		N/A		N/A		15.00	7,232	100.00		Dinas PUPESDM
						Tertib ijin ketenagalistrikan (ijin)	15.00		N/A		N/A		N/A		N/A		15.00		100.00		Dinas PUPESDM
6	6				Perdagangan																
					Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327.48	12,300,000,000	344,8	1,243,883,964	314.76	1,634,258,500	100.9	52,030,500	32.06	3.18	100.90	3,297,439,939	30.81	26.81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Milyar)	2.50	58,100,000,000	1,95	3,036,706,726	1.95	1,703,299,000	0.00118	62,214,000	0.06	3.65	0.00	5,250,930,526	0.05	9.04	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (%)	5.46	4,300,000,000	5,69	541,142,456	5.55	502,079,000	1.72	139,725,000	30.99	27.83	1.72	1,283,288,348	31.50	29.84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	7				Perindustrian																

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PeningkatanTeknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATG) yang dimanfaatkan	30.00	4,350,000,000	28	977,321,760	24.00	318,395,280	28	149,802,981	116.67	47	28.00	1,127,124,741	93.33	25.91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					PeningkatanTeknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18.00	900,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.00	876,864,138	100.00	97.43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	13773585.00	13,500,000,000	4.238.619.128	4,622,797,704	13238739.00	5,165,050,000	13041848	787579940	98.51276621	15	13041848.00	5,410,377,644	94.69	40.08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	2632754.00	300,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2637845.34	295,717,200	100.19	98.57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	10091909.00	2,975,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9684292.77	3,489,031,000	95.96	117.28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau	180.00	1,650,000	100	299,265,000	120.00	1,155,500,000	100	157,095,904	83.33	13.60	100.00	456,361,000	55.56	27.66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Sentra yang dibina		00,000		897		,000						801			Perdagangan
8	8				Transmigrasi																
					Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran (orang)	53950.0 0	22,154, 357,800	12,191	3,858,78 2,600	10790	2,772,618 ,000	2132	416324 000	19.76	15.0155 557	2132.00	9,129,14 6,570	3.95	41.21	Disnakertran s
						Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi (KK)	NA		NA		NA		NA		NA		40.00		NA		
					Penunjang Urusan																
					Keistimewaan																
	1				Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																
					Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada	100.00	1.500.0 00.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Gubernur	waktunya(%)															
		2			Kelembagaan Pemerintah Daerah																
					Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)	NA	16,632,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		88.00		86,5	3,241,597,169	87.00	3,520,763,000	0	447,986,900	0	12.72	0.00	3,689,584,069	0.00	22183.65	
					Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY(%)	79.00	3,985,000,000	77,6	936,173,500	78.00	2,589,790,000	0	56,202,500	0	2.17	0.00	992,376,000	0.00	24.90	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95.00	4,800,000,000	75	2,843,835,800	80.00	595,000,000	0	49,858,400	0	8.38	0.00	2,893,694,200	0.00	72.61	Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang	95.00	6,500,000,000	75	302,936,500	80.00	726,500,000	0	49,850,400	0	6.86	0.00	352,786,900	0.00	7.35	Paniradyo Kaistimewan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Kebudayaan	berkualitas															
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	95.00	6,500,000,000	75	680,099,100	80.00	1,195,000,000	0	121,968,900	0	10.21	0.00	802,068,000	0.00	12.34	Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100.00	15,721,412,000	100	401,239,210	100.00	3,881,366,500	0	378,744,675	0	10	0.00	3,399,434,578	0.00	21.62	Paniradyo Kaistimewan
						Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan ur. Keist	75.00		67		69.00		0		0		0.00		0.00		
					Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60.00	2,603,588,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan	60.00	1,878,0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Keistimewaan	terpenuhi		00,000													
					Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100.00	4,461,0 00,000	100	333,824, 300					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	333,824, 300	0.00	7.48	Sekretariat Daerah (biro Organisasi)
					Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	78.00	10,500, 000,000	72	1,277,64 7,910	74.00	1,500,000 ,000	0	197,997 ,200	-	13.20	0.00	2,820,99 3,760	0.00	26.87	Paniradyo Kaistimewan
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95.00	4,210,0 00,000	93	963,676, 200	94.00	1,696,999 ,400	0	81,176, 000	-	4.78	0.00	1,044,85 2,200	0.00	24.82	Paniradyo Kaistimewan
			3		Kebudayaan																
					Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah direvitalisasi (tema)	15.00	206,243 ,944,00 0	11	15,742,8 18,499	12.00	41,097,66 0,800	0	1,798,3 43,700	0	4.38	0.00	37,996,2 12,422	0.00	18.42	Dinas Kebudayaan
						Jumlah sumber sejarah, karya bahasa sastra , koleksi permuseuman yang direvitalisasi	NA		NA		NA		NA		NA		1.47		NA		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dibanding yang tercatat (%)															
						Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15.00		6		9.00		0				0.00		0.00		
						Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.70		0,55		0.06		0				0.37		52.86		
					Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	2000.00	14,883, 200,000			200.00	21,002,51 1,800	100	147,040 ,350	50	1	100.00	2,203,93 5,068	5.00	14.81	Dinas Kebudayaan
					Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.90	61,765, 280,000	0,9	41,105,4 71,867	0.70	12,193,34 7,840	0.8	322,169 ,722	114.29	3	0.80	49,008,9 99,801	88.89	79.35	Dinas Kebudayaan
						Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh	91.27		100,09						#DIV/0!		0.00		0.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						koleksi (%)															
					Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15.17	450,337 ,309,68 1	12,32	38,606,6 16,594	13.20	40,396,00 2,560	0	3,532,9 05,460	0	9	0.00	80,203,3 70,774	0.00	17.81	Dinas Kebudayaan
					Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya (%)	12.79	762,000 ,000,00 0	6,77	15,623,5 17,415		12,957,66 6,000		906,378 ,000	#DIV/0!	7	0.00	25,859,1 88,431	0.00	3.39	Dinas Kebudayaan
						Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2.00				0.00				#DIV/0!		0.00		0.00		
					Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100.00	40,184, 640,000	100	6,625,17 4,626	100.00	5,850,000 ,000	0	292,211 ,668	0	5.00	0.00	11,570,9 69,021	0.00	28.79	Dinas Kebudayaan
						Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya (%)	35.00		20		25.00		0		0		0.00		0.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	30.00	75,160, 160,000	15	5,434,15 7,380	20.00	20,789,68 1,100	0	2,067,7 82,000	0	9.94619 3932	0.00	12,906,4 48,730	0.00	17.17	Dinas Kebudayaan
					Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (%)	0.15	166,170 ,928,00 0		21,800,5 27,060		36,095,37 0,000		280780 00	#DIV/0!	0	0.00	22,199,7 34,495	0.00	13.36	Dinas Kebudayaan
						Pemanfaatan lahan pekarangan (Kab/Kota)	NA				NA		NA		NA		5.00		NA		
					Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter (%)	48.42	173,389 ,280,00 0	63	14,090,3 35,651		12,973,41 9,000			#DIV/0!	-	0.00	25,063,2 91,989	0.00	14.45	Dinas Kebudayaan
					Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	26.21	100,188 ,000,00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.21	63,152,0 22,745	100.00	63.03	Dinas Kebudayaan
					Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.81	69,800,	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.81	3,558,01	100.00	5.10	Dinas Kebudayaan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Budaya	(%)		000,000										6,750			
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	310.00		NA		NA		NA	NA	NA	NA	35.00		11.29		
						Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	NA		NA		NA		NA	NA	NA	NA	NA		NA		
					Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase nilai adat,tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	30.86	1,139,9 94,700, 800	27,35	9,784,31 1,623	28.49	85,712,60 0,000	0	209957 1850	0	2	0.00	11,883,8 83,473	0.00	1.04	Dinas Kebudayaan
						Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	2.06		2,14		1.93		0		0		0.00		0.00		
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	400.00		kesbang pol						#DIV/0!		0.00		0.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(kelompok)															
						Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	20.00		5		10.00		0		0		0.00		0.00		
		4			Pertanahan																
					Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7919.00	5,342,02 6,500	NA	NA	Dinas PTR
					Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang Tanah kasultanan/ kadipaten yang sudah didaftarkan (bidang)	13877.0	103,067 ,866,00 0	10,729	2,032,45 4,910	11419.0	5,640,417 ,000	10729	420,250 ,738	93.96	7.45	10729.0	7,794,73 2,148	77.31	7.56	Dinas PTR
						Dok. Tanah kasultanan/ kadipaten yang dipelihara (dokumen)	66.00		23		37.00		23		62.16		23.00		34.85		
						Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan/	40.00		60		55.00		60		109.09		60.00		150.00		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kadipaten (bidang)															
					Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Peningkatan pemanfaatan tanah desa (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.10	270,102, 000	NA	NA	Dinas PTR
						Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800.00	34,405, 270,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20.41	10,000, 000,000	12,5	2,032,45 4,910	10.20	3,005,769 ,000	12.5	179,441 ,000	122.549 0196	6	12.50	2,211,89 5,910	61.24	22.12	Dinas PTR
						persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti (%)	100.00		100		100.00		25		25		25.00		25.00		
					Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	Persentase realisasi pelaksanaan program ur. Pertanahan	100.00	1,367,2 52,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	1,470,76 3,800	100.00	107.57	Dinas PTR
					Program Sarpras Keistimewaan Urusan	Persentase pelayanan sarpras keist. Thd pelaks. Keg keist. Ur	100.00	2,200,0		283,000,					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	Dinas PTR

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pertanahan	pertanahan		00,000		000											
		5			Tata Ruang																
					Program Perencanaan Tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan/ Kadipaten	Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	17.78	35,650,000,000	36,11	4,156,836,785	NA	6,400,000,000	NA	145854980	NA	2.278984063	17.78	6,946,634,472	100.00	19.49	Dinas PTR
						Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	46.11		36,11	33.22			36.11		109		36.11		78.31		
					Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.44	103,244,879,803	NA	NA	Dinas PTR

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ruang strategis kasultanan dan kadipaten															
					Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase terwujudnya tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21.67	3,574,4 42,329, 719		4,156,83 6,785	0.00	504,216,8 11,000	0	474,629 ,560	#DIV/0!	0	0.00	107,876, 346,148	0.00	3.02	
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.78	291,418, 926	NA	NA	Dinas PTR
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan	70.00	4,400,0 00,000	60	839,121, 728	62.50	5,445,089 ,000	60	59,303, 405	96	1	60.00	1,189,84 4,059	85.71	27.04	

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dan kadipaten															
					Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan Urusan Tata Ruang	100.00	700,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	644,551,838	100.00	92.08	Dinas PTR
					Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tataruang	100.00	2,800,000,000		438,100,000	100.00	400,000,000	-	-	-	-	0.00	1,247,957,300	0.00	44.57	Dinas PTR
					Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang																
			1		Sekretariat Daerah																
					Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100.00	3,841,253,000	105,88	1,020,907,700	100.00	897,548,000	38.46	242,620,500	38.46	27	38.46	1,263,528,200	38.46	32.89	Biro Tata Pemerintahan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	NA	1,330,9 77,900	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	863,241, 100	NA	64.86	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100.00	2,882,4 86,500	100	856,547, 625	56.25	667,031,0 00	100	63,116, 500	177.777 7778	9.46	100.00	919,664, 125	100.00	31.91	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100.00	2,508,9 70,000	141,66	757,367, 448	100.00	357,018,0 00	33.33	22,814, 500	33.33	6.39	33.33	780,181, 948	33.33	31.10	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	NA	567,514 ,600	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180.00	586,624, 300	NA	103.37	Biro Tata Pemerintahan
					Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100.00	5,059,4 56,540	117	1,320,23 8,009	100.00	258,132,5 00	17.5	43,255, 000	17.50	16.76	17.50	2,445,29 4,184	17.50	48.33	Biro Hukum

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100.00	2,245,596,150	100	734,016,672	100.00	192,652,500	33.33	44794000	33.33	23.25	33.33	1,395,988,777	33.33	62.17	Biro Hukum
					Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100.00	2,505,368,300	100	1,136,871,343	100.00	664,168,500	34.62	160,765,250	34.62	24.21	34.62	1,849,479,179	34.62	73.82	Biro Hukum
					Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100.00	8,426,380,600	100	2,284,935,436	100.00	2,448,774,500	36.67	583,489,686	36.67	23.83	36.67	5,132,748,798	36.67	60.91	Biro Hukum
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area	80.00	2,873,442,000	100	693,800,427	76.00	154,966,000	0	56,048,500	0.00	36.17	0.00	749,848,927	0.00	26.10	Biro Organisasi

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							perubahan reformasi birokrasi															
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (inovasi)	1.00	6,563,055,500	77,6	1,522,212,046	1.00	824,142,000	0	94,551,000	0.00	11.47	0.00	2,581,519,308	0.00	39.33	Biro Organisasi
						Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81.00	2,856,550,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81.00	3,125,435,697	100.00	109.41	Biro Umum dan Protokol
						Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85.00	10,852,640,000	86,19	3,065,607,616	83.00	1,913,598,000	88.16	411,604,500	106.2168675	22	88.16	3,477,212,116	103.72	32.04	Biro Umum, Humas dan Protokol
						Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81.00	2,575,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81.00	2,465,499,708	100.00	95.75	Biro Umum dan Protokol

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85.00	7,181,0 90,000	86,29	2,922,11 4,929	83.00	2,917,817 ,000	89.06	193,825 ,000	107.301 2048	7	89.06	5,581,43 9,637	104.78	77.72	Biro Umum, Humas dan Protokol
					Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	270710. 00	2,242,9 88,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	943967. 00	1,628,76 3,276	348.70	72.62	Biro Umum dan Protokol
							309975. 00	6,887,2 10,000	814,185	2,121,31 2,135	283860. 00	1,256,527 ,000	391196	99,734, 000	137.813 0064	8	391196. 00	3,849,80 9,411	126.20	55.90	Biro Umum, Humas dan Protokol
					Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda (%)	84.00	526,832 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85.89	571,792, 120	102.25	108.53	Kantor Perwakilan Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (%)	0.88	2,429,4 50,000	85,44	588,940, 133	86.00	200,390,8 00	87.7	86,516, 500	101.98	43.17	87.70	675,456, 633	9965.91	27.80	Badan Penghubung Daerah
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya	78.00	900,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88.00	892,437, 818	112.82	99.16	Kantor Perwakilan Daerah

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						daerah															
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (event)	38.00	3,237,8 80,000	87,23	1,209,43 7,475	1.00	969,574,3 50	86.5	142700 00	8650.00	1.47	86.50	1,223,70 7,475	227.63	37.79	Badan Penghubung Daerah
					Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	40.00	2,830,0 00,000	40	208,725, 080	40.00	857,854,3 40	10	578545 00	25.00	6.74	10.00	616,102, 080	25.00	21.77	Biro Administrasi Perekonomi n dan SDA
					Pengelolaan Kebijakan Rekayasa PertumbuhanPerekono mian berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomia n berkeadilan yang enjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30.00	7,638,0 00,000	30	1,465,28 5,313	30.00	1,078,700 ,340	5	116558 000	16.67	10.81	5.00	2,887,37 0,800	16.67	37.80	Biro Administrasi Perekonomi n dan SDA

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30.00		30	1,460,000,000	30.00	598,560,000	5	989,600	16.67	1.65	5.00	414,170,292	16.67	28.37	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
					Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia (dok)	1.00	539,010,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.00	465,956,898	100.00	86.45	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan penguatan kelembagaan sumberdaya manusia (dok)	1.00	98,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.00	123,999,211	100.00	126.53	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah	Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (layanan)	4.00	7,508,966,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.00	7,599,251,841	100.00	101.20	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat (dok)	1.00	150,473,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.00	143,848,729	100.00	95.60	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan rekayasa sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	1.00	448,757,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.00	486,461,700	200.00	108.40	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti (dok)	8.00	65,153,381,000	3.00	6,188,260,600	2.00	15,058,617,500	2	883401000	100.0	5.9	2.00	7,071,661,600	25.00	10.85	Biro Bina Mental Spiritual
						Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (lembaga)	4.00		4.00		4.00				0.0		0.00		0.00		
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang	8.00	1,295,2	2.00	403,442,	2.00	457,849,0	2	127448500	100.0	27.8	2.00	530,890,	25.00	40.99	Biro Bina Mental

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat	ditindaklanjuti (dok)		71,000		100		00						600			Spiritual
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti (dok)	8.00	807,708 ,000	2.00	222,181, 600	2.00	459,596,0 00	1	603616 00	50.0	13.1	1.00	282,543, 200	12.50	34.98	Biro Bina Mental Spiritual
					Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan nonPemerintah							392,344,0 00	10	968500 0							
					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
					Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong (desa/kelurahan)	8.00	2,906,9 00,000				349,000,0 00	0	523725 00	#DIV/0!	15	0.00	52,372,5 00	0.00	1.80	Biro Bina Pemberdayaa n Masyarakat
					Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	16.00	4,332,2 54,000	4.00	899,735, 300	4.00	744,127,5 00	0	504280 00	0	7	0.00	950,163, 300	0.00	21.93	Biro Bina Pemberdayaa n Masyarakat

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (keg)	4.00	5,887,78,000	4.00	1,329,071,000	4.00	1,036,488,500	2	328,940,00	50	3	2.00	1,361,965,000	50.00	23.13	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
					Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	50.00	205,907,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50.00	200,425,000	100.00	97.34	Adpem
							80.00	2,650,000,000		790,428,700	65.00	1,087,704,000	50	23,334,750	76.92307692	2.15	50.00	1,014,188,450	62.50	38.27	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
					Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	50.00	200,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50.00	194,109,100	100.00	97.05	Adpem
							80.00	2,350,000,000	66,67	475,859,750	65.00	516,795,000	10	132,160,00	15.38461538	2.557300283	10.00	683,184,850	12.50	29.07	
					Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100.00	2,724,890,000	100	3,311,770,979	100.00	777,077,354	31	76,379,700	31	9.829098687	31.00	6,145,675,746	100.00	101.20	Adpem

N o	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2		Sekretariat DPRD												0.00	-			
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY (%)	95.00	155,880 ,183,50 0	35	24,204,7 98,431	95.00	45,337,63 9,000	19.96	4,184,6 94,574	21.01	9.23	19.96	59,796,0 94,219	21.01	38.36	Sekretariat DPRD
				Program Pengembangan Regulasi Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu (%)	98.00	52,230, 529,000	100	11,750,3 24,734	97.00	10,116,37 5,200	21.13	429,542 ,200	21.78	4.25	21.13	19,222,3 58,090	21.56	36.80	Sekretariat DPRD
				Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	96.00	3,867,6 00,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	3,071,49 2,700	104.17	79.42	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibili tas informasi dan publik	90.00	84,133, 375,500	96	16,555,8 52,314	85.00	18,629,92 4,220	84.79	3,062,0 46,683	99.75	16.44	84.79	37,297,0 29,909	94.21	44.33	Sekretariat DPRD

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						keprotokoleran.															
		3			Inspektorat																
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90,00	15,111, 945,701	90,04	7,639,30 9,146	85,00	5,920,024 ,000	77,53	1,250,0 94,125	91.2117 6471	21	77,53	8,889,40 3,271	86,14	0,09	Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90,00	29,532, 979,900	90,05		85,00		77,53		91.2117 6471		77,53		86,14		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90,00	29,532, 979,900	90,06		85,00		77,53		91.2117 6471		77,53		86,14		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	90,00	29,532, 979,900	90,07		85,00		77,53		91.2117 6471		77,53		86,14		Inspektorat
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA	5,506,5 22,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,42	7,017,49 0,598	NA	127,44	Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat	NA		NA		NA		NA		NA	NA	86,51		NA		

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					KDH	Daerah Sosial Budaya															
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA		NA		NA		NA		NA	NA	89.03		NA		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	NA		NA		NA		NA		NA	NA	91.20		NA		
			4		Perencanaan																
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100.00	13,440,795,000	100	2,110,602,603	100.00	2,181,647,000	100	151,921,250	100	7	100.00	5,696,381,714	100.00	42.38	BAPPEDA
						Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100.00		98		100.00		100		100		100.00		100.00		
					Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang	93.67	8,618,452,500	98,39	1,364,328,826	91.14	1,525,600,000	97.1	60,110,000	106.5393899	4	97.10	3,055,232,787	97.47	35.45	BAPPEDA

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Sosial Budaya															
						Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91.30	4,907,425,400	95,65	1,078,689,220	88.37	407,597,000	95.65	37,714,000	108.2380898	9	95.65	1,886,406,360	104.76	38.44	BAPPEDA
						Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92.96	5,405,324,836	100	625,222,068	91.00	289,103,500	97.14	75,255,500	106.7472527	26	97.14	1,556,328,498	104.50	28.79	BAPPEDA
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88.57	6,761,523,960	93	815,498,635	82.00	204,518,000	93.88	35,265,000	114.4878049	17	93.88	2,171,168,885	106.00	32.11	BAPPEDA
						Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92.00	11,400,608,000	96	1,782,126,520	90.00	1,880,134,500	88	435,918,500	97.7777778	23	88.00	4,286,299,665	100.70	37.60	BAPPEDA
							Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi	100.00		100		100.00		100		100		100.00		100.00		BAPPEDA

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						yang berlaku															
		5			Keuangan																
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	51.38	3,135,5 63,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57.08	2,687,56 7,510	111.09	85.71	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	60.06	15,692, 710,000	55,76	3,147,92 6,657	31.47	2,544,560 ,000	15.28		48.5541 7858	-	15.28	5,835,49 4,167	25.44	37.19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100.00	3,301,2 83,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	3,643,68 5,640	100.00	110.37	DPPKA
						2. Kesesuaian program dan	100.00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	100.00				

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kegiatan antara KUA dan PPAS APBD.															
					Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100.00	13,877,220,000	100	3,587,532,197	100.00	3,923,370,000	6	130,765,500	6	3	6.00	7,361,983,337	6.00	53.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100.00		100		100.00		6		6		6.00				
					Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD	100.00	2,119,050,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	2,030,314,922	100.00	95.81	DPPKA
							100.00	9,549,450,000	100	1,984,079,208	100.00	1,133,300,000	40	32,892,000	40	3	40.00	4,047,286,130	40.00	42.38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100.00	812,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	884,223,649	100.00	108.89	DPPKA

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							100.00	3,562,250,000	100	833,947,592	100.00	374,630,000	20	244329000	20	65.21874917	20.00	1,962,500,241	20.00	55.09	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100.00	1,417,656,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	1,663,275,494	100.00	117.33	DPPKA
							100.00	6,655,370,000	100	1,901,021,705	100.00	1,217,970,000	6.29	75,906,000	6.29	6	6.29	3,640,203,199	6.29	54.70	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	3.75	1,793,200,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.36	1,742,005,750	100.00	97.15	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	1.29	2,104,038,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.48	2,093,021,212	100.00	99.48	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	0.86	1,190,994,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.48	1,220,633,600	100.00	102.49	DPPKA

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3.80	1,173,9 18,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.63	1,144,16 2,150	100.00	97.47	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPP Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	3.29	2,462,6 42,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.23	2,091,13 3,700	100.00	84.91	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37,158, 446,429	7,111,4 60,000	28,583, 238,200	2,142,42 6,000	10,904, 924,328 .00	1,516,745 ,600	718657 1800	578,841 ,500	65.90	38	718657 1800.00	2,721,26 7,500	19.34	38.27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38,506, 977,121	7,877,9 12,000	58,759, 695,250	1,888,55 8,858	10,771, 392,391 .00	1,919,205 ,040	168839 01900	309850 000	156.75	16	168839 01900.0 0	2,198,40 8,858	43.85	27.91	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12,537, 252,508	4,093,0 32,000	19,488, 883,000	1,527,71 3,593	4,030,2 33,356. 00	1,283,649 ,040	290053 8500	297587 500	71.97	23	290053 8500.00	1,825,30 1,093	23.14	44.60	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12,381, 553,649	3,882,8 15,000	26,188, 490,200	1,548,94 0,150	29,272, 347,090	1,676,534 ,880	633904 9750	401460 500	21.66	24	633904 9750.00	1,950,40 0,650	51.20	50.23	Badan Pengelola Keuangan

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											.00										dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78,538,848,031	7,833,950,000	87,727,111,050	2,581,186,450	59836.00	2,473,106,600	10409056400	323483600	44.77	13	10409056400.00	2,904,670,050	13.25	37.08	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan asset yang dikelola sesuai dengan prosedur	100.00	4,497,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	4,473,108,878	100.00	99.47	DPPKA
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100.00	8,395,490,000	100	2,895,705,551	100.00	2,597,456,000	25128,006,000	128,006,000	25	5	25.00	3,023,711,551	25.00	36.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100.00	2,871,858,000	87,14	1,605,466,610	71.43	846,560,000	18,560,000	79.99440011	2	57.14	1,624,026,610	57.14	56.55	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		6			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
					Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan	1) Persentase Pegawai sesuai	85.00	11,615,	94,21	2,518,13	81.00	2,181,499	0423,429	0	19	0.00	5,518,83	0.00	47.51	BKD	

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)		607,831		7,420		,500		,500				1,122			
						2) Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	92.20		88,02		90.40		0		0		0.00		0.00		
					Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85.00	192,168 ,432,100	82,61	5,724,46 8,435	82.00	6,465,535 ,000	0	1,218,2 52,500	0	19	0.00	12,638,2 45,367	0.00	6.58	BKD
					Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93.00	9,173,2 90,355	96,84	2,535,00 0,704	91.00	758,967,0 00	0	43,613, 250	0	6	0.00	4,478,67 2,691	0.00	48.82	BKD
					Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	A(81, 26)	477,416 ,500	82,61	1,259,08 0,000	79.00	568,086,0 00	0	58,375, 750	0	10	0.00	1,439,86 9,734	0.00	301.60	BKD
					Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	49.76	9,857,6 31,831	24,60	2,671,63 2,327	45.47	1,260,606 ,000	0	65,404, 700	0	5	0.00	5,073,01 1,898	0.00	51.46	BKD

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pendidikan Penjenjangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20.00	29,023, 672,026	85,04	7,799,91 7,503	12.50	6,101,384 ,800	0	174,492 ,600	0	3	0.00	13,837,2 70,297	0.00	47.68	Badan Diklat
					Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20.00	11,758, 914,342	27,84	1,778,43 4,118	13.30	1,687,515 ,500	0	156,761 ,100	0	9	0.00	4,636,61 0,398	0.00	39.43	Badan Diklat
					Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	90.00	837,701 ,688	117,32	484,057, 800	84.00	93,686,50 0	0	9,857,6 00	0	11	0.00	689,874, 900	0.00	82.35	Badan Diklat
					Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	82.00	3,998,1 23,675	79,63	929,088, 891	79.00	886,562,0 00	0	49,664, 400	0	6	0.00	1,878,17 9,641	0.00	46.98	Badan Diklat
			7		Penelitian dan Pengembangan																
					Program Peneitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan dan penelitian	50.00	300,000 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50.00	593,582, 500	100.00	197.86	Biro Adpem

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Kick Off Meeting penyusunan RKPD DIY 2021 tanggal 4 Desember Tahun 2019, di Grand Dafam Rohan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh segenap pemangku kepentingan, perwakilan Kementerian, Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah DIY telah mengemukakan permasalahan-permasalahan pokok yang harus diperhatikan pada tahun perencanaan 2021 adalah sebagai berikut,

1. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal;
2. Kebijakan restrukturisasi organisasi dari Pusat;
3. Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya baik;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal;
5. Ketimpangan antar wilayah kab/kota masih tinggi;
6. Ketimpangan pendapatan antar individu masih tinggi;
7. Angka kemiskinan masih tinggi;
8. Daya saing daerah (ekspor luar negeri, investasi) relatif masih rendah;
9. Kontribusi sektor dominan (pertanian, industri pengolahan) belum optimal;
10. Tingginya konversi lahan pertanian ke *non*pertanian;
11. Tingkat pengangguran terbuka masih lebih tinggi dari target RPJMD;
12. Daya dukung lingkungan semakin menurun;
13. Penyediaan infrastruktur kawasan belum optimal;
14. Rencana tata ruang dan aktivitas perekonomian belum sesuai;
15. Data penyandang disabilitas tinggi;
16. Penyakit Tidak Menular (PTM) masih tinggi;
17. Kasus kekerasan perempuan dan anak serta pernikahan dini masih tinggi;
18. Kelembagaan ekonomi desa masih belum optimal;
19. Kualitas pendidik dan sarpras sekolah belum merata;
20. Minat baca dan budaya literasi masih rendah;

Sarana olahraga dengan standar nasional maupun internasional masih terbatas;

Selanjutnya permasalahan pokok yang telah disampaikan dalam Kick Off Meeting tersebut telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di DIY dan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Urusan Pendidikan

- a. Kurangnya kualitas layanan pendidikan di DIY yang diukur dengan akreditasi lembaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan menunjukkan sekolah menengah yang memenuhi Akreditasi A masih sebesar 67,43 % di tahun 2019. Sedangkan penilaian akreditasi 2019, masih ada sekolah yang mendapatkan predikat 'tidak terakreditasi' dan 'C' karena nilai yang rendah pada beberapa standar pendidikan, seperti standar proses, standar sarana prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Layanan pendidikan masih terkendala pada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dimana masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan ringan maupun berat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2017) masih terdapat 352 SD, 87 SMP, dan 75 SMA/SMK yang memiliki kelas dengan kerusakan berat.
- c. Kompetensi pendidikan merupakan kunci keberhasilan pada proses pendidikan. Guna memberikan layanan pendidikan yang optimal maka semua guru diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi (sertifikasi). Namun jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi masih rendah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga (2018) sebesar 51.3 % guru SD, 65.9 % guru SMP, 59.5 % guru SMA, dan 47.2 % guru SMK yang memenuhi standar kompetensi (memiliki sertifikasi guru).
- d. Kualitas layanan pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat keterserapan siswa di dunia kerja. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun *nonformal* dengan dunia kerja belum optimal. Hal ini terlihat dari data (2017), bahwa lulusan SMK yang diterima di dunia kerja sebesar 51.08 %, sedangkan lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja sebesar 76.94 %.
- e. Masih terdapatnya anak berkebutuhan khusus yang belum mengakses pendidikan. Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2017) sebanyak 1592 anak berkebutuhan khusus yang belum mengakses pendidikan.

- f. Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya. Tahun 2018 baru sebanyak 113 sekolah (25.34 %) yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju
- g. Berdasarkan penilaian akreditasi 2019 masih ada sekolah yang mendapatkan predikat 'tidak terakreditasi' dan 'C' karena nilai yang rendah pada beberapa standar pendidikan, seperti standar proses, standar sarana prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan
- h. Belum adanya desain dan proses pembelajaran baru pasca *covid 19* baik kurikulum, tata cara pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Saat ini satuan unit pendidikan masih menganggap kondisi ini sama. Mereka masih menjalankan pembelajaran *doing business asusual*, hanya diganti media pembelajarannya melalui *online*.
- i. Konsumsi teknologi informasi untuk sektor pendidikan akan makin meningkat, namun tenaga pendidikan belum sepenuhnya dapat menggugurkan teknologi informasi. Berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 11,81% guru dan 4,06% siswa yang memanfaatkan layanan pendidikan berbasis IT di DIY
- j. Minimnya muatan pembelajaran daring yang relevan dengan kurikulum. Sehingga muatan pembelajaran daring masih perlu terus diperbanyak dan disempurnakan agar lebih interaktif sehingga memungkinkan siswa dapat lebih terlibat (*engaged*) dalam proses pembelajaran. Pendidik diupayakan dapat mengenali teknologi informasi pada penguasaan konten, penyiapan implementasi, hingga dapat memproduksi konten mandiri yang bisa dibagikan ke komunitas pendidik, siswa dan orang tua;
- k. Implementasi konsep merdeka belajar sebagai bentuk adaptasi pendidikan dan sistem pengajaran yang paling relevan di era sekarang ini masih minim implementasinya;
- l. Pandemi *Covid 19* menurunkan daya beli masyarakat dan memicu terjadinya PHK, hal ini tentu berdampak pada terjadinya siswa putus sekolah.

2.3.1.1.2 Urusan Kesehatan

- a. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data Riskedas 2018 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 4,5% sementara angka Nasional 2,4%, untuk Hipertensi di DIY 10,7% dan angka nasional 8,4%, terkait kasus kanker, di DIY 10,7 per mil dan Nasional 8,4 per mil. Diperlukan peningkatan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat.

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 tahun 2016. Kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa.
- c. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan wabah terutama sebagai tindaklanjut penanganan *covid-19* di tahun 2021.
- d. Angka Stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan angka Stunting DIY sebesar 21,5% meskipun masih di bawah angka nasional pada angka 30,8 % tetapi capaian angka stunting DIY 2019 masih belum mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) DIY Pangan dan Gizi yaitu di angka 19%.
- e. Tingginya kasus HIV/AIDS. Kondisi ini terlihat pada penambahan jumlah kasus HIV sebesar 209 dan penderita AIDS sebesar 69 orang pada tahun 2019. Data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan akumulasi pengidap HIV AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 2019 sebanyak 4.990 orang, dimana 1.716 orang diantaranya telah positif AIDS. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.
- f. Prevalensi gangguan jiwa *Skizofrenia* di DIY masih tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka 10,36 per mil rumah tangga masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 7,0 per mil.
- g. Kawasan *aerotropolis* Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) perlu didukung dengan keberadaan fasilitas kesehatan yang memiliki manajemen internasional.
- h. Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 36 kasus kematian ibu dengan penyebab tertinggi adalah pendarahan. Salah satu faktornya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil.
- i. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya imunisasi (Data dari Dinas Kesehatan DIY tahun 2019 menunjukkan 1% dari populasi sasaran), dimana hal ini berisiko pada kekebalan kelompok masyarakat jika terjadi penularan.

2.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum semua penduduk berakses sanitasi layak. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak mencapai 3.713.040 jiwa (1.161.632 rumah tangga) atau sama dengan 96,62% dari jumlah penduduk DIY
- b. Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Regional sebesar 25.018 SR (sambungan rumah tangga) atau baru mencapai 2,85 % dari penduduk kawasan perkotaan Yogyakarta. Angka SR yang sudah terpasang tersebut sudah melebihi kapasitas rencana, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengolahan IPAL Sewon untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani.
- c. TPA Piyungan sudah melewati umur teknisnya dan sarana prasarana di TPA Piyungan sudah banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga untuk penanganan sampah di kawasan perkotaan Yogyakarta untuk masa mendatang diperlukan pengolahan sampah dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi lahan dan kondisi TPA nya. Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembebasan lahan seluas 4,1 Ha untuk pengembangan TPA Piyungan, sejalan dengan itu perlu adanya percepatan pelaksanaan optimalisasi/pengembangan TPA Piyungan melalui skema KPBU.
- d. Belum seluruh penduduk berakses air minum layak. Jumlah penduduk berakses air minum layak secara kumulatif mencapai 3.338.026 jiwa (1.153.726 rumah tangga) atau 91,30% dari jumlah rumah tangga DIY.
- e. Sampai dengan Tahun 2019 air curah yang didistribusikan ke PDAM Kab/Kota dari SPAM Kartamantul baru mencapai 265 liter/detik dari kapasitas 400 liter/detik. Hal ini diakibatkan sebagian sarana dan prasarana dalam kondisi yang memerlukan perbaikan/penggantian.
- f. Pemanfaatan dan pengelolaan air minum dari SPAM Kamijoro dilakukan melalui skema KPBU. Masih diperlukan lahan untuk pembangunan 2 Reservoir dan 1 Booster sebagai dukungan Pemerintah terhadap mekanisme KPBU di SPAM Kamijoro.
- g. Luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi baru mencapai 84,32% sehingga masa tanam belum bisa optimal di semua wilayah Daerah irigasi kewenangan DIY.
- h. Masih adanya konflik kepentingan pemakai air, antara petani ikan dan petani padi sehingga mengakibatkan alokasi air ke lahan sawah terganggu.

- i. Masih terdapat 14 titik genangan yang belum tertangani, dan 5 titik genangan yang belum tuntas dari 51 titik genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY). Penanganan Drainase dalam rangka mengurangi titik genangan belum dapat dilakukan secara optimal, karena dalam penanganan 1 titik genangan tidak cukup dalam satu kali pelaksanaan, antara lain penanganan permasalahan drainase di MM UGM dan Ngesti Harjo.
- j. Masih terdapat 201,65km atau 26,52% jalan provinsi dalam kondisi rusak berat dan sedang dari total keseluruhan panjang jalan 760,45 km berdasarkan data tahun 2019.
- k. Masih terdapat 48,99km dari total 116,07 km ruas Jalan Pantai Selatan dalam kondisi 2 lajur, sehingga diperlukan pembebasan lahan untuk memenuhi standar jalan 4 lajur. Dengan perkiraan kebutuhan luas tanah sebesar 558,91 m².
- l. Masih diperlukan penambahan aksesibilitas jaringan jalan baru sepanjang 24,35 kilometer, untuk meningkatkan konektivitas di DIY dalam rangka pengembangan wilayah bagian timur dan selatan.
- m. Jumlah Tenaga Konstruksi Terampil di DIY baru mencapai 1.503 orang dari jumlah rencana sebesar 2.406 orang.
- n. Baru 22 parameter pengujian yang sudah terakreditasi pada Laboratorium Bahan Bangunan serta Laboratorium Tanah dan Batuan dari 100 parameter secara keseluruhan.
- o. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ) di DIY yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul sejumlah 2 RDTR (Bagian Wilayah Perkotaan / BWP Kasihan dan BWP Sewon) dari target 3 RDTR. Sedangkan di Kabupaten Sleman belum menetapkan RDTR dari target 4 RDTR. Kabupaten Gunungkidul juga belum menetapkan RDTR dari rencana kebutuhan sebanyak 17 BWP. Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Kulon Progo yang belum menetapkan RDTR dari target sebanyak 12 BWP. Belum ditetapkannya RDTR dan PZ tersebut menjadi kendala dalam proses pengajuan perizinan.
- p. Kesesuaian pemanfaatan ruang baru mencapai 78,85 %. Hal ini disebabkan adanya pola dan struktur ruang yang belum terwujud sebesar 15,34 % dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang yang direncanakan sebesar 5,82 %.

2.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Masih perlunya penyelesaian peningkatan kualitas rumah layak huni sebesar 40.092, dari data dasar rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan kualitasnya sebanyak 65.578 Unit.
- b. Masih terdapat 312 hektar luasan kawasan kumuh yang belum tertangani dari 965,51 hektar.
- c. Belum terselesaikannya perijinan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pada rencana kawasan perumahan MBR.
- d. Pembangunan Bandara YIA belum dilengkapi dengan VVIP room. Pengerjaan VVIP yang telah dilakukan baru sampai tahap I berupa pembangunan fondasi bangunan.

2.3.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, angin kencang, kekeringan) di DIY. Sementara itu, sistem peringatan dini (early warning system) yang ada di DIY belum merata. EWS dan diseminasi informasi kebencanaan kepada masyarakat belum cukup dioptimalkan sebagai bagian dari mitigasi bencana guna meminimalisir adanya korban, kerusakan, dan kerugian sebagai dampak dari kejadian bencana.
- b. Obyek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah khususnya reklame yang ada di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan namun demikian Pemda DIY menghadapi kendala dalam proses penegakannya karena jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- c. Banyaknya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga atau perusahaan swasta tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam.
- d. Prevalensi penyalahguna narkoba di DIY masih cukup tinggi.
- e. Pesatnya dinamika perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi yang tanpa batas, heterogenitas masyarakat DIY, lebarnya kesenjangan sosial ekonomi, berkurangnya keteladanan pemangku kepentingan hingga degradasi moral masyarakat yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada sesama dan mempermudah munculnya permasalahan-permasalahan baru.

- f. Maraknya '*klithih*' di masyarakat serta masih adanya potensi konflik terkait keberagaman agama dan kesukuan juga masih belum bisa ditepis. Meningkatnya kenakalan anak/remaja/usia pelajar antara lain berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas berpotensi memperburuk citra DIY sebagai Pusat Pendidikan.
- g. Potensi kenaikan angka kriminalitas karena kenaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak krisis sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* serta pembebasan narapidana melalui kebijakan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* di lembaga pemasyarakatan.
- h. Situasi yang tidak pasti ditengah penyebaran *COVID-19* dan masa pemulihan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
- i. Pemberian bantuan sosial (program Jaring Pengaman Sosial) kepada msyarakat terdampak *COVID-19* yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.
- j. Pola pikir dan perilaku masyarakat yang mengabaikan protokol-protokol keselamatan dan kesehatan pada masa pemulihan kondisi pasca *COVID-19*.
- k. Pelanggaran terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* dan masa pemulihan

2.3.1.1.6 Urusan Sosial

- a. Belum optimalnya verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Potensi peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak dari pandemi *covid 19*.
- c. Permasalahan validasi data masyarakat yang terdampak bencana pandemi *covid 19*.
- d. Perbandingan data PMKS di DIY pada tahun 2018-2019 masih terdapat beberapa PMKS yang mengalami peningkatan. Dari 25 jenis PMKS di DIY, 11 diantaranya yang mengalami Peningkatan pada jenis PMKS Anak dengan Kedisabilitas, Anak Jalanan, Anak Korban Tindak Kekerasan, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Terlantar, Gelandangan, Korban Bencana Sosial, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Orang dengan HIV/AIDS, Penyandang Disabilitas, Pengemis, dan Pekerja Migrain Bermasalah Sosial. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa

mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya. Permasalahan PMKS yang dapat dibandingkan jenis kelaminnya menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak PMKS di wilayah DIY berjenis kelamin perempuan namun perbedaannya tidak cukup signifikan, dengan perbandingan 55,43% perempuan dan 45,57% Laki-laki.

- e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum optimal. Jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1 persen dari seluruh karyawan jumlah nya masih sangat sedikit.
- f. Masih banyak lansia terlantar yang hidup sebatang kara dan belum mendapat jaminan/perlindungan sosial. Data tahun 2019 menunjukkan angka Lanjut Usia Terlantar sebesar 37.442 orang
- g. Kerawanan sosial akibat permasalahan ekonomi selama masa pandemi *covid 19*.
- h. Banyak Penerima Bantuan PKH yang sudah dikeluarkan dari Program PKH tetapi masih dalam kondisi miskin dan belum mampu mandiri.
- i. Kurangnya fasilitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- j. Pada pelayanan melalui Balai ada sejumlah permasalahan diantaranya:
 - 1) Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada balai sosial.
 - 2) Sarana prasarana balai yang masih kurang dan mengalami kerusakan.
 - 3) Kurangnya SDM di balai sosial. Jumlah pekerja sosial di balai sosial rasio nya cukup kecil dibandingkan dengan klien yang harus dilayani sehingga pelayanan sosial kurang optimal.
 - 4) Kurangnya Fasilitas Pendukung Lainnya; Pada BRSBKL mengalami kesulitan untuk warga balai mendapatkan identitas kependudukan.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

- a. Tingkat pengangguran diperkirakan akan meingkat pada tahun 2020. Sampai dengan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka di DIY mencapai 3,38%. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,86%. Tingkat pengangguran tahun 2020 diperkirakan masih akan meningkat pada bulan-bulan selanjutnya.

- b. Permasalahan hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan masih akan dihadapi pada tahun 2021 terutama terkait dengan masalah pemutusan hubungan kerja atau pengupahan.
- c. Dilihat dari tren lapangan pekerjaan utama selama Februari 2019-Februari 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada Penyedia Akomodasi makan dan minum. Di sisi lain, sektor ini yang mengalami dampak terbesar akibat Pandemi *Covid-19*. Tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak mudah untuk beralih profesi. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang memberikan kapasitas bagi tenaga kerja untuk memulai atau melakukan pekerjaan lain.
- d. Tenaga kerja di DIY didominasi pada sektor informal. Data menunjukkan konsentrasi perusahaan ada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Jumlah tenaga kerja formal pada wilayah Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo hanya sebesar 26% dari total tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan lapangan kerja pada kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi.

2.3.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY masih tinggi. Data terakhir, target tahun 2019 dalam RPJMD untuk menekan prevalensi kekerasan hingga 0,45 belum tercapai. Angka ini berpotensi meningkat pada tahun 2020 khususnya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengingat bahwa beberapa fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan baik akibat adanya wabah *Covid-19*.
- b. Capaian IPG dan IDG yang belum optimal. IPG di DIY tahun 2018 berada pada angka 94,73. Dengan mengingat bahwa nilai ideal yang menunjukkan kesetaraan gender adalah 100, maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat kesenjangan gender di DIY dalam menikmati hasil pembangunan khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lebih lanjut, data IPG per kabupaten/kota menunjukkan Kabupaten Gunungkidul capaian IPG-nya pun di bawah rata-rata DIY, sedangkan 4 kabupaten/kota lain di DIY berada di atas rata-rata DIY. Dalam hal IDG, capaian IDG DIY tahun 2013-2018 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan apabila dilihat per kabupaten, capaian IDG tahun 2018 kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul di bawah rata-rata DIY.

- c. Belum terwujudnya komitmen partisipasi perempuan di legislatif. Keterwakilan perempuan yang diharapkan pada angka 30 persen, pada kenyataannya belum mencapai target. Pada tahun 2018 capaiannya tertinggi 24 persen di kabupaten Sleman, dan terendah sebesar 6,82 persen di kabupaten Bantul.
- d. Beban psikologis perempuan meningkat karena ada beban ganda mengajar anak dan bekerja di rumah pada masa pandemi *covid 19*.
- e. Belum ada SOP khusus alur pelayanan korban kekerasan pada saat terjadi kejadian luar biasa (termasuk protokol kesehatan).
- f. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik belum dapat berjalan secara optimal.
- g. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak diimbangi dengan literasi digital yang cukup.

2.3.1.2.3 Urusan Pangan

- a. Selama pandemi *covid-19*, rantai pasokan melambat dan berkurang. Kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah menyebabkan terbatasnya transportasi untuk mengangkut *input* maupun *output* pertanian. Dengan mobilitas yang terbatas maka pasokan pangan akan melambat dan rentan terjadi kerawanan pangan jika daerah tidak mampu menyediakan kebutuhan pangannya sendiri dan tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.
- b. Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras masih cukup tinggi. Tingkat konsumsi beras masyarakat masih tinggi, yaitu 92,7 kg/kapita/tahun. Oleh karenanya perlu ada upaya diversifikasi pangan.
- c. Belum optimalnya Skor PPH. Skor konsumsi kelompok pangan buah dan sayuran, umbi-umbian, serta kacang-kacangan masih lebih rendah dibandingkan nilai ideal. Skor konsumsi aktual buah dan sayuran sebesar 23,2 (skor ideal 30), umbi-umbian sebesar 1,4 (skor ideal 2,5) dan kacang-kacangan sebesar 7,2 (skor ideal 10).
- d. Belum optimalnya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik, terutama padi yang produksinya melimpah pada bulan Januari hingga April, namun produksinya relatif sedikit pada bulan September hingga Desember.
- e. Masih terdapat desa rawan pangan di DIY. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses dan ketersediaan pangan masyarakat karena tidak memiliki sumber produksi pangan, sehingga pemanfaatan pangan rendah. Sampai dengan tahun 2020 masih tersisa 4 desa rawan pangan. Dengan

adanya pandemi *covid-19* ada kemungkinan potensi desa rawan pangan mengalami kenaikan.

- f. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian karena pensiun. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa jumlah penyuluh PNS pada tahun 2018 sebanyak 256 orang, menurun dari jumlah tahun 2017 sebanyak 287 orang.
- g. Belum meratanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan. Hal ini terlihat dari belum semua pangan yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan keamanannya.

2.3.1.2.4 Urusan Pertanahan

- a. Pengajuan izin penetapan lokasi sebagian mengalami keterlambatan dikarenakan persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon kurang lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi permohonan.

2.3.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2019 sebesar 61,05 yang masih berada pada kategori cukup. Angka ini masih dibawah capaian nasional sebesar 71,67 dengan kategori baik. Sehingga kinerja pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan untuk menjadi kategori baik.
- b. Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 masih berada dalam kategori buruk yaitu sebesar 38,65 karena sumber pencemar sungai dari *point source* maupun *non point source* masih tinggi.
- c. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2019 sebesar 85,25, meningkat dari tahun 2018 sebesar 84,24. Meskipun terjadi peningkatan indeks, namun masih berada di bawah level nasional sebesar 86,80 pada tahun 2019 sehingga perlu dioptimalkan kembali.
- d. Terjadi penurunan angka IKTL dari 60,86 pada tahun 2018 menjadi 59,70 pada tahun 2019 karena alih-fungsi lahan hijau menjadi *nonhijau* yang terus berlangsung. Selain hal tersebut juga terjadi perubahan metode perhitungan dan kriteria jenis tutupan vegetasinya. Metode yang digunakan saat ini adalah metode citra satelit.
- e. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY masih rendah, yaitu sebanyak 31 dari 80 usaha/kegiatan yang taat (38,75 %). Pelayanan dan pengawasan dokumen lingkungan juga perlu ditingkatkan baik untuk dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL.

- f. Belum seluruh dokumen KLHS dapat divalidasi karena kualitas dokumen kajian lingkungan hidup belum memadai sehingga perlu terus ditingkatkan.
- g. Cakupan pengumpulan sampah di kawasan perkotaan Yogyakarta baru mencapai 623 ton/hari dengan rincian Kota Yogyakarta 261 ton/hari (41,89 %), Kabupaten Bantul 137 ton/hari (21,99 %) dan Kabupaten Sleman 225 ton/hari (36,11 %).
- h. Pengurangan timbulan sampah di kawasan perkotaan Yogyakarta baru mencapai 293 ton dengan pengurangan sampah melalui recycle dengan rincian Kota Yogyakarta 102 ton (34,81%) Kabupaten Bantul 153 ton (52,21%) dan Kabupaten Sleman 38 ton (12,96%).
- i. Operasional dan pemeliharaan sampah di TPA Regional Piyungan mengalami hambatan akibat daya tampung yang sudah melebihi kapasitas maksimal pada tahun 2019. Hal ini membuat sarana prasarana yang ada rentan mengalami kerusakan dikarenakan jam dan beban operasional yang melampaui kapasitas. Kondisi ini menyebabkan pelayanan sampah baru yang masuk tidak bisa dilakukan secara optimal sepanjang tahun.

2.3.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya ketertiban administrasi kependudukan yang ditandai dengan masih kurang optimalnya kepemilikan dokumen wajib kependudukan, utamanya: akta lahir, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, Akta/Surat Nikah, dan akta kematian. Pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi belum cukup optimal dan merata dalam mendukung kepemilikan dokumen kependudukan tersebut.
- b. Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri No. 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, dinyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- c. Adanya tuntutan perubahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, efisien, dan efektif melalui sistem online akibat dari perubahan pola

perilaku masyarakat karena adanya protokol keselamatan dan kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* dan pemulihan

2.3.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Problem kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dari data kemiskinan BPS 2019 Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan lebih tinggi dari wilayah perkotaan, walau secara jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi perkotaan daripada pedesaan.
- b. Keberadaan Posyandu aktif di wilayah DIY sudah cukup bagus diatas 80% hanya saja masih terdapat posyandu yang kurang aktif, sehingga perlu upaya mendorong revitalisasi peran Posyandu. Disamping itu pemenuhan kualitas kompetensi dan kompensasi bagi Kader Posyandu juga harus diperhatikan, sesuai pembagian kewenangan di tingkat pemerintahan.
- c. Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat diantaranya karena pengaruh budaya luar dan teknologi modern.
- d. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan masih harus terus dioptimalkan. Perlu peningkatan kapasitas pengurus karena vitalnya peran dalam tahap perencanaan dan pembangunan desa diantaranya Musrenbangdes, Musdes, Muskel dan tahapan pembangunan desa lainnya.
- e. Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi, menunjukkan angka 11,44 pada September 2019 (BRS BPS DIY) dibandingkan nasional 9,21.
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan secara optimal selama masa pandemi *covid 19*.
- g. Kelembagaan ekonomi desa kurang berfungsi optimal karena pembangunan desa selama tahun 2020 berfokus pada penanganan *covid 19*.

2.3.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Potensi peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur yang Tidak Ber-KB (Kelompok *Unmet Need*) karena akses pada pelayanan KB terhambat selama pandemi covid 19 tahun 2020. Terlebih, data menunjukkan bahwa angka *unmet need* DIY cenderung fluktuatif. 2016-2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan *unmet need* DIY tahun 2016. Pada tahun 2016 *unmet need* DIY adalah 8,01 persen. Kemudian pada tahun 2017 *unmet need* DIY tercatat naik menjadi 10,08 persen. Pada tahun 2018 angka ini turun kembali pada angka 9,94. Namun pada 2019, *Unmet need* kembali naik pada angka 10,11.

- b. Angka perceraian di DIY masih sangat tinggi. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan selama tahun 2019, telah diproses 5.719 kasus perceraian di DIY. Hal ini menunjukkan intervensi Pemerintah dalam hal ketahanan keluarga masih sangat diperlukan.
- c. Perkawinan usia anak di DIY masih sangat tinggi. Meskipun trend nya turun tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. Di tahun 2019 tercatat oleh Kanwil Kementerian Agama ada 271 laporan pernikahan di bawah umur.

2.3.1.2.9 Urusan Perhubungan

- a. Cakupan wilayah angkutan umum perkotaan yang dilayani dengan Trans Jogja baru mencakup 22 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan 17 jalur, dan menyisakan 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngemplak. Sedangkan hasil penilaian kualitas standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk angkutan umum pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai angka 45%.
- b. Direncanakan pada Tahun 2020 dengan melalui kegiatan Pemerintah Pusat akan dilakukan penambahan 3 trayek pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngemplak.
- c. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di DIY tidak semuanya beroperasi. Hal ini disebabkan masih menggunakan sistem setoran, sehingga memiliki kewajiban melayani rute yang telah ditetapkan secara tetap dan teratur sesuai dengan standar, dengan beban biaya yang cukup tinggi, sedangkan dari aspek jumlah penumpang mengalami penurunan.
- d. Belum adanya regulasi di tingkat daerah terkait angkutan sewa khusus (angkutan sewa khusus dalam jaringan (daring) seperti Taksi Online) untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus perihal penetapan jumlah kuota taksi daring. Regulasi daerah tersebut diharapkan dapat efektif menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian armada angkutan tidak dalam trayek agar beroperasi sesuai dengan ketentuan perizinan serta mendukung pariwisata di DIY. Penetapan regulasi di level pemerintah daerah terkendala oleh data yang belum disediakan pihak aplikator sebagai dasar penetapan kuota taksi daring.
- e. Kinerja layanan simpang dan ruas jalan pada perkotaan DIY berada dalam kondisi yang hampir tidak memadai yang dicerminkan dari angka V/C rasio pada beberapa simpang sudah melebihi 0,85 sehingga perlu upaya penanganan lintas sektor.

- f. Operasional Penuh Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) pada tahun 2020 belum sepenuhnya diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas pada jaringan pergerakan secara optimal terkait kelengkapan jalan pada ruas jalan dengan status jalan nasional.
- g. Terkait dengan operasionalisasi *Underpass* Bandara YIA, belum dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehubungan dengan lalu-lintas pada *In* dan *Out Underpass*, dimana masyarakat lokal sering melanggar rambu petunjuk yang ada, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
- h. Jumlah kejadian kecelakaan di DIY periode September 2018 – September 2019 berjumlah 5.927 dengan 1.529 kejadian kecelakaan diantaranya terjadi di jalan provinsi. Kejadian kecelakaan diantaranya terjadi di jalan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi pada ruas jalan provinsi ruas jalan Bantul – Srandakan, Kabupaten Bantul sebanyak 136 kejadian kecelakaan.

2.3.1.2.10 Urusan Komunikasi dan informatika

- a. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publik belum optimal karena tingkat keterbukaan informasi yang masih kurang. Masyarakat yang ingin mengakses informasi masih terkendala dengan prosedur yang panjang dan tidak mudah. Sementara itu, badan publik belum memahami sepenuhnya peranan pejabat PPID.
- b. Meningkatnya penyebaran informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*) terkait *COVID-19* yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh berita dan informasi yang benar, cepat, dan akurat terkait *COVID-19*.
- d. Pola komunikasi dan sikap kritis masyarakat menyikapi berita dan informasi dari pemerintah terkait *COVID-19*.
- e. Penyebaran Informasi terkait perkembangan kasus dan kebijakan penanganan *COVID-19* yang menjangkau seluruh masyarakat

2.3.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan Koperasi terutama terkait dengan upaya modernisasi koperasi. Koperasi dinilai belum mampu memanfaatkan aneka kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi saat ini dalam pengelolaan usahanya.
- b. Masih rendahnya koperasi produsen atau sektor riil. Koperasi di DIY didominasi oleh Koperasi Konsumen (44%) dan Koperasi Simpan Pinjam

(33%). Jumlah Koperasi Produsen cenderung mengalami penurunan. Pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa dalam perekonomian di DIY diperlukan keberadaan koperasi sektor riil yang kuat dan tangguh untuk menjaga ketahanan perekonomian lokal.

- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk Koperasi dan UKM. Berdasarkan data dari Sensus Ekonomi Lanjutan tahun 2016 (SE 2016-Lanjutan), Pengelolaan usaha mikro dan kecil masih sederhana. Baru sekitar 18,34% usaha mikro dan kecil yang menggunakan internet dan 9,04% usaha mikro dan kecil yang menggunakan komputer. Padahal pada masa pandemi covid-19, pelaku usaha yang dapat bertahan diantaranya didukung oleh penguasaan teknologi informasi sebagai sarana memasuki pasar digital.

2.3.1.2.12 Urusan Penanaman modal

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak pada penundaan kegiatan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha. Pada triwulan 1 tahun 2020 menunjukkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -7,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi di DIY pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh sektor konstruksi. Pengembangan industri pengolahan maupun sektor jasa masih dalam tahap perencanaan seperti pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan KSPN Borobudur-Yogyakarta. Tantangan sektor investasi adalah bagaimana menjalin kemitraan dan komitmen dunia usaha dan investor dalam mewujudkan kawasan strategis tersebut.
- b. Selain masih dibayangi penurunan minat investasi karena kondisi perekonomian global, tantangan investasi lainnya adalah masih adanya hambatan dalam realisasi investasi di DIY. Beberapa hambatan yang sering dikeluhkan calon investor antara lain kesiapan lahan, kesiapan regulasi tata ruang, ketersediaan sarana pendukung seperti energi dan air serta proses perijinan yang belum responsif. Oleh karena itu, diperlukan upaya konsolidasi dan perkuatan koordinasi antar pihak dalam menyiapkan dan menawarkan peluang-peluang investasi.
- c. Dalam hal pelayanan perizinan dan *nonperizinan* terkendala dengan belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi OSS dan aplikasi lain untuk percepatan pelayanan izin dan *nonizin*. Hal ini juga berkaitan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)masing-masing sektor yang masih belum berjalan.

2.3.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pandemi *Covid 19* berimbas pada penundaan berbagai kompetisi keolahragaan diantaranya PON Papua, POPNAS, dan PAPERNAS. Selain itu pandemi ini juga berdampak pada penghentian pembinaan dan pelatihan atlet yang akan berlaga di berbagai cabang olahraga. Dalam kondisi seperti ini, latihan dan tingkat performa fisik atlet menjadi kurang optimal dalam menghadapi PON Papua.
- b. Bencana *covid 19* meningkatkan tingkat pengangguran dan memproduksi tingkat kemiskinan di masyarakat. Kelompok usia produktif merupakan kelompok paling terdampak karena perlambatan perekonomian saat ini. Penumbuhan kewirausahaan pemuda berbasis digital merupakan salah satu program Pemda DIY yang dapat menjadi solusi kedepannya. Namun pada tingkat implementasinya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya pada pembinaan dan evaluasi program.
- c. Penumbuhan kewirausahaan pemuda Sentra pemberdayaan pemuda merupakan wadah untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) dimana pemerintah daerah perlu menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda. Saat ini DIY telah memiliki 46 sentra pemuda. Namun sejak tahun 2019, perkembangan jumlah sentra pemberdayaan pemuda di DIY mengalami stagnasi.

2.3.1.2.14 Urusan Statistik

- a. Implementasi sistem satu data pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan data dan analisis perencanaan pembangunan daerah belum optimal, dimana pada tahun 2019 masih terdapat data yang belum tersinkronisasi dengan baik.
- b. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan statistik yang diberikan baru mencapai 83,28%. Hal ini dikarenakan unsur sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan
- c. Ketersediaan hasil analisis yang merupakan kewenangan BPS mengalami ketidaksesuaian dengan jadwal perencanaan, misalnya hasil Analisis PDRB dan ICOR akan diperoleh sesuai dengan jadwal rilis antara Maret dan April, sedangkan hasil analisis tersebut dibutuhkan antara Januari dan Februari untuk penyusunan LKPJ dan RKPD.

- d. Data geospasial yang diproduksi di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY sebagian besar masih belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut.

2.3.1.2.15 Urusan Persandian

- a. Keterbatasan SDM Sandiman
- b. Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal.
- c. Belum adanya personil yang menjabat sebagai fungsional sandiman serta masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi.
- d. Peralatan Jaring Komunikasi Sandi di Perangkat Daerah Pemda DIY yang berasal dari BSSN sebagian besar mengalami kerusakan sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian dan juga kondisi sarana enkripsi data ke Kemendagri serta Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi mengingat pengadaan dilakukan sejak tahun 2011.
- e. Belum tersedianya *dashboard* pemantauan penggunaan HT Frekuensi UHF sehingga mobilisasi pengguna tidak dapat dipantau secara maksimal dan sarana kendaraan *mobile jamming* untuk mendukung kegiatan pengamanan VVIP dan VIP ataupun pengamanan terhadap unjuk rasa.
- f. Belum adanya tenaga operator komunikasi tetap untuk layanan telepon di lingkungan Pemda DIY.
- g. Perubahan rencana program dan kegiatan persandian karena realokasi anggaran APBD yang difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemik *COVID-19*

2.3.1.2.16 Urusan Kebudayaan

- a. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan. Terlihat dari keberadaaan warisan budaya dan cagar budaya yang kondisinya kurang baik karena baru 12,325% cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan ehingga intervensi dalam pemeliharaan dan pengembangan warisan dan cagar budaya masih sangat dibutuhkan. (capain kinerja disbud 2020).
- b. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur sehingga menjadi pandangan hidup masyarakat. Jumlah obyek kebudayaan yang direvitalisasi dan di reaktualisasi sesuai dengan kemajuan jaman belum

cukup banyak sehingga apresiasi masyarakat belum begitu tinggi 13,10% (dataku 2019).

- c. Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas. Perkembangan jaman menuntut museum untuk berubah/ transisi menuju museum virtual. Terlihat dari jumlah kunjungan museum yang masih belum meyakinkan (0,55, sengguh 2020)) dibanding dengan jumlah kunjungan di ODTW di di DIY.
- d. Masih belum optimalnya proses pengajuan, yogyakarta menuju warisan budaya dunia. Hal ini terlihat dari belum adanya kelembagaan khusus untuk pengelolaan kawasan yang diusulkan serta prioritas anggaran untuk mewujudkan hal tersebut.
- e. Belum optimalnya pembangunan taman budaya budaya sebagai pusat pembinaan seni di seluruh kabupaten. Hal ini terlihat dari masih 1 taman budaya yang sudah terbangun dan berfungsi dari rencana 4 taman budaya.
- f. Belum optimalnya sinkronisasi agenda budaya dengan agenda wisata, MICE, destinasi wisata, dan Desa/Kelurahan Budaya sehingga belum menjadi arus utama kunjungan wisatawan. Terlihat dari rendahnya kunjungan wisatawan nusantara dan asing dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh stake holder kebudayaan di desa budaya.

2.3.1.2.17 Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi. Dari total 4.237 perpustakaan yang terdapat di DIY, sampai dengan tahun 2019 tercatat baru terdapat 273 perpustakaan atau baru 6,4% perpustakaan yang sudah terakreditasi. Masih terdapat 3.964 atau 93,6% perpustakaan yang belum terakreditasi.
- b. Indeks literasi masyarakat DIY masih rendah di angka 23,16% walaupun diatas rata-rata nasional sebesar 10,12%. Pencapaian DIY dibawah Kalimantan Selatan dengan indeks literasi sebesar 59,91%.
- c. Belum optimalnya silang pinjam antar perpustakaan dalam *Jogja Libary for All. Jogja Library for All* (JLA) merupakan jaringan kerjasama antar perpustakaan di Yogyakarta yang antara lain dalam bentuk catalog bersama dan silang pinjam. Hingga saat ini terdapat 39 anggota perpustakaan yang tergabung dalam JLA sampai tahun 2019 baru 5 (lima) perpustakaan yang telah melakukan kerjasama silang pinjam yaitu perpustakaan UGM, UMY, UNY,UII dan DPAD.

- d. Tingginya koleksi langka yang belum diolah. Jumlah koleksi langka sebanyak 23.309 eks selesai diolah sebanyak 11.501 eks atau sebesar 49.34% sedangkan koleksi yang belum diolah sejumlah 11.808 eks atau 50.66 %. Hal tersebut dikarenakan terkendala SDM yang menguasai berbagai bahasa asing sesuai dengan bahasa pada koleksi yang dimiliki.
- e. Tidak semua penerbit terdaftar pada IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah penerbit yang ada di Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ke DPAD DIY.
- f. Berkaitan dengan wabah *COVID-19* semua layanan perpustakaan ditutup kecuali layanan pengembalian bahan pustaka dan bebas pustaka. Pemustaka diarahkan untuk mengakses berbagai bahan bacaan melalui aplikasi i-Jogja.
- g. Upaya peningkatan minat baca melalui berbagai kegiatan tidak bisa dilaksanakan demikian juga dengan pendampingan perpustakaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebatas konsultasi/diskusi melalui perangkat komunikasi/online.

2.3.1.2.18 Urusan Kearsipan

- a. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Hasil pembinaan kearsipan tahun 2019, dari 37 OPD dan 49 UPTD, terdapat 36 OPD dan 46 UPTD yang dapat dikategorikan memenuhi standard dan masih terdapat total 4 OPD/UPTD instansi atau sekitar 4,6% yang belum memenuhi standar
- b. Belum optimalnya sarana layanan arsip. Saat ini layanan arsip belum berjalan dengan optimal karena Gedung arsip di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1 belum bisa dipindahkan. Hasil penilaian arsip di OPD belum bisa dipindahkan karena penyimpanan arsip di DPAD sudah penuh. Saat ini terdapat sekitar 163 boks arsip dari 5 instansi meliputi BPKA, Dinkes, Biro Umum, Dinas Pertanian
- c. Belum optimalnya layanan arsip statis. Jumlah arsip yang dimanfaatkan 6.605 berkas sedangkan arsip yang sudah diolah sebanyak 65.468 berkas. Berarti baru sebesar 10,089 persen dari arsip yang diolah yang bisa dimanfaatkan
- d. Kondisi gedung arsip yang sudah tidak memungkinkan untuk tempat penyimpanan arsip dikarenakan makin banyaknya arsip yang diakuisisi dan diserahkan oleh Perangkat Daerah maupun Sekolah.
- e. Arsip statis yang belum terjamin keselamatannya dan rawan terkena bencana.

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Selama pandemi *covid-19*, terjadi produksi perikanan mengalami kesulitan dalam pemasaran karena permintaan pasar menurun, khususnya untuk perikanan budidaya air tawar, sedangkan untuk perikanan tangkap penjualannya normal karena telah memiliki pangsa pasar ekspor yang diambil dari eksportir dari Surabaya
- b. Belum dibangunnya breakwater untuk menghadang gelombang di alur masuk PPP Adikarto menyebabkan PPP Adikarto belum bisa beroperasi. Pengusulan pendanaan pembangunan breakwater sudah dilakukan namun karena keterbatasan anggaran dari pusat maka pembangunan belum dapat dilakukan, sementara pengusulan melalui mekanisme KPBU masih menunggu proses penawaran kepada investor, dengan adanya pandemi *covid 19* kemungkinan proses tersebut akan semakin mundur. Untuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka sebagai alternatif akan dikembangkan Pelabuhan Gesing di Gunungkidul
- c. Produksi perikanan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, sehingga menyebabkan rasio impor ikan antar daerah masih sekitar 15%.
- d. Penurunan lahan budidaya dan ketersediaan air. Selain itu harga pakan yang semakin mahal sehingga biaya produksi meningkat.
- e. Kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan. Jumlah kelompok budidaya perikanan pada tahun 2018 sejumlah 1.438 kelompok, namun kelompok yang bersertifikat CBIB baru 422 kelompok dan bersertifikat CPIB baru 28 kelompok.
- f. Masih rendahnya nilai tambah hasil olahan ikan. Hal ini ditunjukkan produksi ikan segar pada tahun 2018 sejumlah 102.432,65 ton, namun produk olahan ikan yang dihasilkan hanya 8.386,73 ton.
- g. Kaderisasi nelayan belum optimal karena minat masyarakat untuk melaut masih rendah.

2.3.1.3.2 Urusan Pariwisata

- a. Pasca pandemi *Covid-19*, diperkirakan terdapat perubahan perilaku wisatawan terutama Wisman yang akan menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Di sisi lain,

daya tarik dan industri pariwisata di DIY masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kualifikasi standar pelayanan yang diharapkan.

- b. Untuk mendukung pelayanan terhadap wisatawan diperlukan kapasitas SDM yang unggul. Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya kapasitas SDM pariwisata yang bersertifikasi skala internasional maupun nasional. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM agar pramuwisata kelas nasional dapat meningkat menjadi kelas internasional.
- c. Jika dilihat dari sisi kuantitas, perkembangan industri pariwisata masih belum mampu memanfaatkan momentum pengembangan bandara YIA dan kawasan strategis lainnya. Keterbatasan usaha jasa pariwisata terutama dirasakan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Kulon Progo sebagai lokasi bandara baru, hanya memiliki 17 Usaha Perjalanan Wisata. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 305 usaha.

2.3.1.3.3 Urusan Pertanian

- a. Selama pandemi *covid-19*, beberapa permasalahan sektor pertanian diantaranya:
 - 1. Terjadinya anomali harga produk pertanian di tingkat petani/peternak dengan di pasar. Saat pandemi *covid-19* hasil panen melimpah namun petani dan peternak mengalami kesulitan pemasaran karena permintaan menurun. Penurunan permintaan dari pembeli dikarenakan sebagian besar rumah makan, hotel dan tempat kuliner lainnya tutup. Akibatnya, produksi yang di pasarkan sebagian besar hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu ekspor beberapa komoditas juga berhenti karena adanya pembatasan dan penurunan permintaan dari negara tujuan.
 - 2. Kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani dalam mengakses informasi teknologi, sehingga digitalisasi sistem pertanian belum maksimal, utamanya dalam hal pemasaran. Digitalisasi sistem pertanian tidak hanya dapat diaplikasikan dalam pemasaran tapi dapat diterapkan mulai dari penentuan lahan, penentuan benih/bibit, pengelolaan tanaman, pengelolaan masa panen hingga pascapanen. Digitalisasi pertanian belum bisa menyeluruh karena banyak petani yang enggan untuk belajar dan menggunakan teknologi yang baru. Hal ini juga di pengaruhi oleh SDM pertanian yang ada banyak yang sudah berusia lanjut.

3. Ancaman serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Ancaman timbulnya serangan OPT maupun PHMS juga menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam produksi dan ketersediaan pangan saat ini. Adanya pembatasan sosial juga dapat menjadi hambatan dalam upaya pengendalian OPT maupun PHMS karena jika sampai terjadi serangan maka diperlukan upaya masif dengan melibatkan banyak orang.
4. Sebagian besar petani terutama yang bergerak di subsektor tanaman pangan rata-rata sudah berusia cukup tua sehingga lebih rentan terhadap *covid-19*.
 - b. Terjadinya konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi kawasan *non*pertanian dengan rata-rata 259 ha/tahun selama 5 tahun terakhir dikarenakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif.
 - c. Luas lahan petani yang sempit berdampak pada tidak efisiennya usaha pertanian dalam skala usaha sehingga peningkatan kesejahteraan petani menjadi rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan tahun 2019 sebesar 109,26.
 - d. Pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka peningkatan kemandirian pangan selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi namun juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
 - d. Kurangnya infrastruktur pertanian serta belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, dan alat mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani
 - e. Perubahan iklim berdampak terhadap serangan hama, penyakit tanaman/hewan, dan bencana banjir/kekeringan sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian.
 - f. Kurangnya lahan untuk usaha peternakan dan penanaman hijauan pakan ternak.
 - g. Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian semakin menurun. Adanya pandemi *covid-19* bisa menjadi momentum bagi generasi muda di DIY untuk melirik sektor pertanian dengan munculnya peluang-peluang bisnis di sektor pertanian dengan cara-cara baru yang menarik bagi kaum milenial.

2.3.1.3.4 Urusan Kehutanan

- a. Persentase kawasan hutan yang tertata baru mencapai angka 88,03 %. Hal ini disebabkan kejelasan tata batas hutan baru mencapai angka 398 Km dari total panjang batas hutan 544,43 Km serta Penyelesaian kasus tenurial baru mencapai angka 1389,73 Ha dari total luas hutan 1414,73 Ha.
- b. Pengelolaan hutan konservasi pada tahun 2019 belum optimal yaitu sebesar 75,91 %, perlu terus ditingkatkan.
- c. Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan belum optimal yaitu sebesar 86,66 %, dari total luas hutan 15.581 Ha, sudah dimanfaatkan 13.502,40 Ha.
- d. Jumlah usaha di bidang kehutanan yang bersertifikat masih sedikit yaitu sebanyak 45 usaha dengan penambahan sebanyak 4 usaha pada tahun 2019.
- e. Produksi hasil hutan menyumbang PDRB sektor kehutanan terdiri atas:
 - kayu bulat sebesar 154.210,56 m³ (yang berasal dari dalam kawasan hutan sebesar 4.932,34 m³ dan dari hutan rakyat sebesar 149.278,22 m³)
 - kayu olahan 21.265,93 m³
 - minyak kayu putih 39.323 liter
 - bambu 127.330 batang
 - pengelolaan jasa lingkungan di Hutan Mangunan, Klayar dan Ngingrong Mulo sebesar Rp. 2.454.374.875,00.Meskipun demikian perlu untuk dipotimalkan terkait dengan produksi hasil hutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- f. Kerusakan hutan masih terus terjadi dengan persentase sebesar 1,28 % pada tahun 2019 terdiri dari kebakaran seluas 200,1 Ha dan pencurian kayu di area seluas 0,11 Ha, sehingga kerusakan hutan 200,12 Ha dari luas total hutan negara 15.581 Ha.

2.3.1.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Persentase rumah tangga yang menikmati listrik belum 100%. Sampai dengan tahun 2019, baru sebesar 99,9 %, dengan penjabaran masih ada 1002 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan 52.446 rumah tangga yang belum menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.
- b. Masih terdapat rumah tangga miskin di DIY yang masih menyalur dan tidak sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Upaya Pemda mengurangi rumah tangga menyalur terbatas pada rumah tangga miskin yang masuk

dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- c. Bauran energi yang telah dicapai adalah 54,49% minyak bumi, 22,32% listrik, 13,1% gas bumi dan 10,05% energi baru terbarukan. Dalam hal bauran energi potensi EBT di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.
- d. Masih terdapat pengguna genset yang belum memiliki izin penyediaan tenaga listrik
- e. Rata-rata muka air tanah tahun 2019 mengalami penurunan pada musim kemarau dibandingkan dengan kondisi 2018 (turun antara 1 - 29 cm). Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh musim kemarau yang lebih panjang sehingga pasokan imbuhan air tanah sangat terbatas sedangkan tingkat kebutuhan dan penggunaan air semakin tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu upaya menjaga kondisi air tanah tetap dalam kategori aman (rerata muka air tanah <20% dari ketebalan akuifer), karena sistem penyediaan air bersih melalui air permukaan masih belum optimal dan secara keekonomian masih belum dapat bersaing dengan air tanah.
- f. Masih terdapat sekitar 130 dusun dari 228 dusun di wilayah DIY yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan intervensi pemenuhan kebutuhan air bersihnya melalui pembangunan sumur bor.

2.3.1.3.6 Urusan Perdagangan

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak secara langsung terhadap sektor perdagangan baik perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2020, pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY berkontraksi sampai dengan -0,05% (*year on year*). Meskipun ada peluang aktivitas perdagangan melalui pasar digital atau *marketplace*, namun tidak seluruh pelaku memiliki kapasitas memanfaatkan teknologi informasi. Data dari Sensus Ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa baru sekitar 18,34% pelaku usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan internet untuk usahanya.
- b. Gangguan perdagangan karena Pandemi *Covid-19* juga ada pada sisi perdagangan luar negeri. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, secara langsung juga berdampak pada berkurangnya permintaan atas produk-produk dari DIY. Di sisi lain, keberadaan bandara YIA semestinya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pintu keluar ekspor produk DIY. Selama ini kontribusi nilai ekspor DIY terhadap total ekspor *nonmigas* nasional masih relatif rendah yaitu hanya 0.01%. Nilai tersebut cukup rendah jika

dibandingkan dengan daerah lain. DIY menempati urutan ke 30. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi Bali yang mencapai 0,18% atau Jawa Tengah yang mencapai 3,77%.

- c. Masih adanya potensi fluktuasi harga kebutuhan pokok dan strategis pasca pandemi *Covid-19*. Pengamanan kebutuhan pokok dan strategis perlu dilakukan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Permasalahan mendasar yang perlu ditangani oleh sektor perdagangan adalah terkait dengan tata niaga barang kebutuhan pokok dan strategis. DIY masih memiliki ketergantungan atas produk dari luar DIY dan menghadapi jalur distribusi yang panjang dan tidak menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

2.3.1.3.7 Urusan Perindustrian

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak pada sektor industri. Dari sisi permintaan, berkurangnya daya beli serta pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada penurunan atas permintaan produk IKM. *Physical distancing* juga berdampak pada proses produksi yang terganggu. Data PDRB triwulan 1 tahun 2020 menunjukkan sektor industri pengolahan mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan sebesar -1,47% (*year on year*).
- b. Masih rendahnya standarisasi mutu produk IKM. Hanya 0,79% dari total seluruh industri skala kecil yang memiliki Sertifikat Skala Nasional dan Internasional seperti SNI atau ISO (SE 2016-Lanjutan). Selain itu, kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh IKM juga masih rendah. Hanya ada sekitar 0,5% pelaku industri kecil yang memiliki HKI (SE-2016 Lanjutan)
- c. Masih terbatasnya kemampuan SDM dan teknologi produksi. Mayoritas industri kecil di DIY masih menggunakan teknologi tradisional. Dari sisi pengelolaan, bentuk usaha adalah informal atau industri berbasis rumah tangga. Data Sensus Ekonomi menunjukkan Industri kecil di DIY didominasi dikelola oleh SDM dengan latar pendidikan SMP, SD atau tidak tamatan SD. Sementara itu, penguasaan teknologi informasi juga masih terbatas.

2.3.1.3.8 Urusan Ketransmigrasian

- a. Program transmigrasi ditempuh sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengiriman transmigrasi bergantung pada pemberian kuota transmigrasi dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2017 jumlah keluarga yang diberangkatkan ke luar Jawa mencapai 48 KK, lalu angka tersebut berkurang menjadi 36 KK pada tahun 2018 dan

meningkat lagi menjadi 50 KK pada tahun 2019. Pengiriman transmigrasi terhenti pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19*.

2.3.1.4 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.3.1.4.1 Sekretariat Daerah

- a. Asimetri kebutuhan bahan kebijakan dengan ketersediaan bahan rumusan kebijakan.
- b. Belum adanya peraturan turunan PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah yang mengatur tentang kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- c. Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan produk hukum daerah adalah proses fasilitasi dan evaluasi Raperda di Kementerian Dalam Negeri terlalu lama dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni paling lama 15 hari kerja sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penetapan Peraturan Daerah.
- d. Dalam menjalankan kebijakan maupun evaluasi atas kondisi riil di DIY masih ditemukan permasalahan, yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah, daya saing daerah relatif masih rendah, daya dukung lingkungan semakin menurun, dan kontribusi sektor dominan belum maksimal. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga keempat masalah besar di bidang perekonomian tersebut dapat terselesaikan pada akhir RPJMD 2017-2022.
- e. Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun 2019 tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi permasalahan dan agenda kebijakan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan.
- f. Perubahan kebijakan dan regulasi dari pusat yang sangat dinamis terkait penyelenggaraan pemerintah daerah menyebabkan ketidakpastian penataan kelembagaan perangkat daerah.

- g. Dalam penyelenggaraan fasilitasi Administrasi Pembangunan, masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu belum optimalnya peran aktif pihak *nonpemerintah* terkait pencapaian SDGs.
- h. Dengan *core business* berupa layanan kepada pimpinan dan tamu (Biro Umum, Humas, dan Protokol), tantangan terbesar yang dihadapi saat ini terletak pada volume kedatangan tamu yang tidak dapat diprediksi, terlebih dengan diperolehnya predikat AA atas SAKIP Pemda DIY. Dari segi pelayanan, terdapat tantangan besar sebagai frontliner pemberitaan informasi Pemda di era digital berupa tuntutan penyajian informasi secara akurat dan realtime, serta adanya celah dan peluang bagi peretas (*hacker*) untuk menyusup ke dalam laman resmi Pemda DIY.
- i. Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Keistimewaan adalah tingkat perbedaan pemahaman masyarakat terhadap implementasi keistimewaan serta perubahan regulasi dan penataan kelembagaan di pusat.
- j. Masih adanya penerima layanan (penginapan dan kendaraan dinas) yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah.
- k. Kurangnya daya tarik pengunjung pameran potensi DIY.
- l. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- m. Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh 2019 Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- n. Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY membutuhkan sistem peringatan dini bencana.
- o. Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.
- p. Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di DIY.
- q. Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY.
- r. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di DIY.

2.3.1.4.2 Sekretariat DPRD

- a. Kesenjangan kebutuhan fasilitasi DPRD dengan kapasitas fasilitasi Sekretariat DPRD.
- b. Proses fasilitasi maupun evaluasi Raperda dari Kementerian Dalam Negeri RI sesuai aturan adalah 14 hari kerja, akan tetapi pada kenyataannya hampir selalu melebihi 14 hari kerja, bahkan ada yang hampir 9 bulan baru terbit fasilitasi/evaluasi. Contohnya evaluasi setelah Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan: 1. Raperda yang dibutuhkan oleh Pemda DIY maupun masyarakat tidak bisa segera ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan, 2. Pergantian periode anggota Dewan menyebabkan tertundanya pembahasan hasil fasilitasi Raperda yang dibahas oleh Dewan periode sebelumnya.

2.3.1.4.3 Inspektorat

- a. Pergeseran dari paradigma *watchdog* ke paradigma *consulting* dan *quality assurance*
- b. Kendala yang ditemui Inspektorat DIY dalam menjalankan tugas selama tahun 2019 yaitu *progres* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, baik oleh BPK maupun Itjen Kemendagri, mengalami keterlambatan yang diakibatkan proses panjang di BPK dan Itjen Kemendari.
- c. Adanya peluang terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat penyebaran *COVID-19*.

2.3.1.4.4 Perencanaan

- a. Belum semua capaian program perangkat daerah sesuai dengan target yang direncanakan. Masih terdapat 3,57 % yang belum sesuai dengan target.
- b. Integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terwujud.

2.3.1.4.5 Keuangan

- a. Kurangnya kreatifitas OPD berpendapatan dalam optimalisasi pendapatan.
- b. Kurangnya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah.
- c. Belum ada inventarisasi aset secara lengkap dan menyeluruh.

- d. Optimalisasi pengelolaan aset daerah masih kurang.
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah masih menjadi permasalahan serius.
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pendapatan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- g. Persoalan BUMD pada umumnya adalah mengenai implementasi regulasi, pengelolaan BUMD yang cenderung kurang profesional, kurang optimal dalam memberikan pelayanan publik, dan kontribusi yang kurang optimal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- h. Informasi layanan pembayaran pajak belum terinformasikan ke seluruh wajib pajak.
- i. Informasi layanan obyek-obyek retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
- j. Aset-aset idle belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna atau kuasa pengguna barang.
- k. Penurunan pendapatan daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dampak dari pencegahan penyebaran *COVID-19* yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan anggaran untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemik *COVID-19* dan untuk pembangunan lainnya.

2.3.1.4.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Adanya kelembagaan baru berkaitan erat dengan ketersediaan aparatur. Terlebih lagi dengan jumlah arus purna tugas/pensiun ASN Pemda DIY khususnya Pejabat Struktural yang semakin tinggi, mengharuskan keterisian jabatan struktural yang kompeten dan juga penempatan aparatur sipil negara sesuai keahliannya. Untuk itu peranan *talent pool* harus lebih diperkuat lagi.
- b. Permasalahan yang terjadi pada Urusan Kepegawaian berkaitan erat dengan jumlah formasi CPNS yang disetujui oleh Kemenpan-RB yang mengakibatkan tidak seimbangnya komposisi pegawai dengan kebutuhan. Diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai.
- c. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu koordinasi dan kerjasama dengan lembaga diklat lain maupun akademisi/ perguruan tinggi di DIY yang kompeten. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pengajar pada dilat-diklat yang diselenggarakan.
- d. Perubahan rencana program dan kegiatan Tahun 2021 karena realokasi anggaran APBD yang difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi

masyarakat pasca pandemic *COVID-19*, diantaranya penundaan seleksi CPNS. Penundaan seleksi CPNS mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai karena banyak yang pensiun.

2.3.1.4.7 Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum semua hasil penelitian (65%) dapat digunakan untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan, karena belum mengacu *Grand Design* Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan) sehingga belum terjadi keselarasan dengan tema-tema pembangunan yang ditetapkan.

2.3.1.4.8 Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.1.5 Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)

2.3.1.5.1 Urusan Kelembagaan

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan Kelembagaan sebagai berikut:

- a. Munculnya sejumlah kendala kelembagaan pasca implementasi UU Keistimewaan, adanya tumpang tindih kebijakan dan peran diantara tiga lembaga (Kraton, Puro Pakualaman dan Pemerintah DIY)
- b. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), implementasi UU Keistimewaan membawa implikasi perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOTK) pada sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemda DIY.
- c. Perubahan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY dengan level dan kadar perubahan yang berbeda-beda
- d. Perubahan pola koordinasi antar OPD di lingkup Pemda DIY, perubahan ini meliputi intensifikasi koordinasi di antara sejumlah OPD.
- e. Pola hubungan OPD Pemda DIY dengan OPD Kabupaten Kota, perubahan ini meliputi intensifikasi koordinasi di antara sejumlah OPD Pemda DIY dengan OPD Kabupaten/Kota.
- f. Perubahan pola hubungan OPD Pemda DIY dengan Kraton/Kadipaten yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan sesuai dengan ketugasan masing-masing OPD.

2.3.1.5.2 Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) aspek permasalahan, meliputi permasalahan Kebudayaan; pariwisata; pendidikan; ekonomi dan ketahanan pangan; dan pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga.

- a. Aspek Kebudayaan
 - 1) Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan.
 - 2) Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya , adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur, dalam beberapa bagian pelaksanaan dianggap sebagai penyelenggaraan *event* semata.
 - 3) Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas
 - 4) Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup masyarakat , sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, adat istiadat dan tradisi, serta kesejarah purbakalaan
- b. Aspek Pariwisata
 - 1) Modifikasi kebudayaan dalam pariwisata melampaui daya dukung ekologi cenderung tidak berkelanjutan
- c. Aspek Pendidikan
 - 1) Kurangnya produksi pengetahuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan.
 - 2) Belum optimalnya pengembangan pendidikan budaya yang terintegrasi
 - 3) Belum terumuskannya formulasi habitus keistimewaan DIY yang terisistematisasi dan terlembagakan
- d. Aspek Ekonomi dan Ketahanan Pangan
 - 1) Belum optimalnya program Keistimewaan dalam mengakselerasi pencapaian kesejahteraan warga
 - 2) Belum optimalnya sinergisitas dan keberlanjutan tata kelola program among tani dagang layar
- e. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlindungan Warga
 - 1) Belum optimalnya program Jaga Warga
 - 2) Kerentanan Warga karena implementasi kebijakan yang bias pertumbuhan ekonomi

2.3.1.5.3 Urusan Tata Ruang

- a. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah memiliki dokumen rencana tata Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang pada 18 SRS.
- b. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah dilakukan penyusunan rencana tata ruang baru mencapai 12 SRS (66,67%) yaitu:
 - 1) Kraton
 - 2) Makam Raja-Raja Mataram Imogiri
 - 3) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak pada Koridor Malioboro
 - 4) Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede
 - 5) Masjid Pathok Nagoro
 - 6) Pantai Samas-Parangtritis
 - 7) Kotabaru
 - 8) Kerto -Pleret
 - 9) Perbukitan Menoreh
 - 10) Karst Gunungsewu
 - 11) Pantai Selatan Gunungkidul
 - 12) Puro Pakualaman
- c. Pemanfaatan ruang yang telah dilakukan pada 18 SRS baru mencapai 19,17 % sehingga masih perlu untuk ditingkatkan

2.3.1.5.4 Urusan Pertanahan

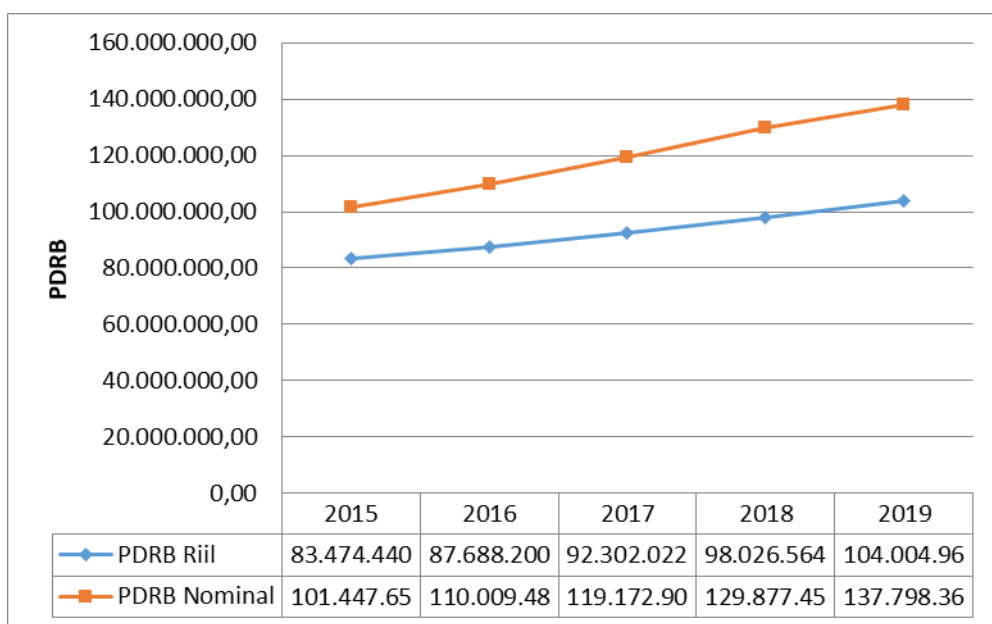
- a. Masih ada bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa pada tahun 2019 yang belum tersertifikasi sebanyak 9.100 bidang tanah (64,80%) dari jumlah bidang tanah yang terinventarisasi sebanyak 14.044, dimana pada tahun 2019 dari 10.729 bidang tanah yang didaftarkan baru tercapai 4.944 bidang tanah yang tersertifikasi, sehingga masih ada tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang belum dikelola dengan baik.
- b. Dari 392 Jumlah desa yang ada di DIY sampai dengan tahun 2019 baru 136 desa (34,69%) yang sudah memiliki Peraturan Desa terkait Pemanfaatan Tanah Desa.
- c. Jumlah permohonan kekancingan pada tahun 2019 sebanyak 282 berkas baru bisa diterbitkan surat rekomendasi sebanyak 106 berkas, hal ini dikarenakan berkas permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah yang diajukan oleh pemohon kurang lengkap.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 PDRB dan Struktur Ekonomi Periode 2015-2019

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,447 triliun rupiah meningkat menjadi 137,79 triliun rupiah pada tahun 2019.

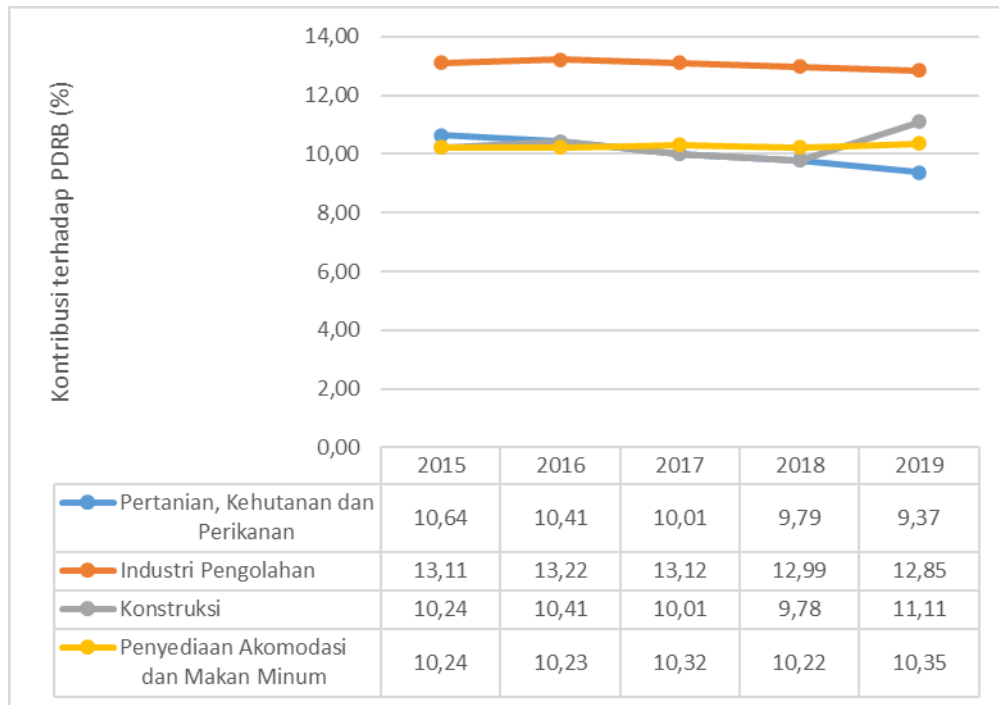


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2015-2019

Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2019 adalah sebesar 12,85%. Sementara itu, sektor

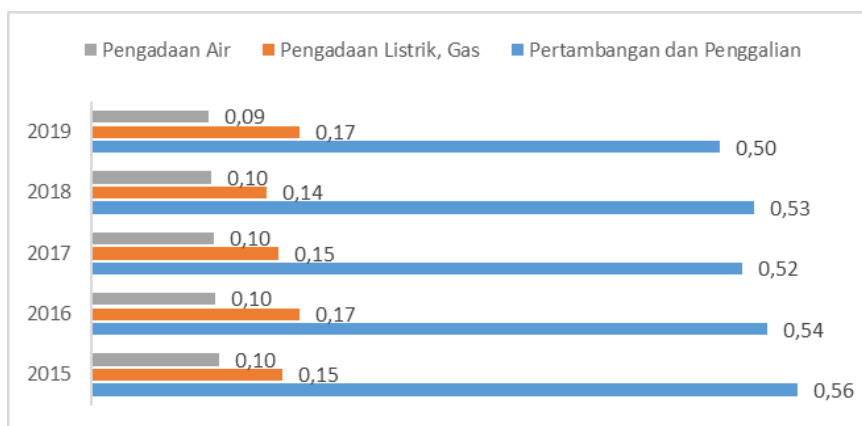
penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,35%, sektor konstruksi 11,11% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,37%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan. Sementara itu kontribusi sektor konstruksi meningkat di tahun 2018 dan 2019.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015 - 2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu,

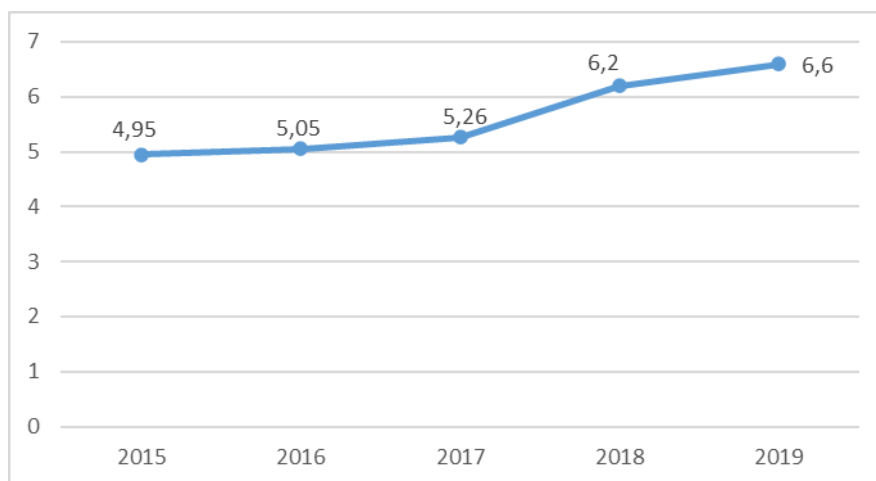


Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-3 Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat. Tingkat LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017. Pada akhir periode, LPE adalah 6,6%.

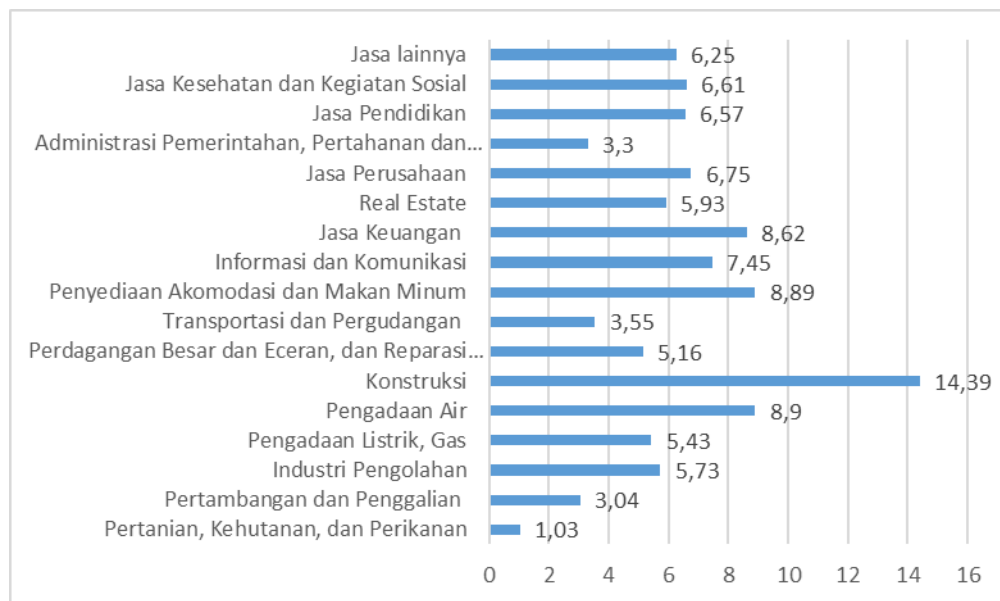


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada sektor konstruksi termasuk penyelesaian Bandara Udara *Yogyakarta International Airport* (YIA) dengan pertumbuhan sebesar 14,39%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2019 menurut Sektor (%)

3.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2015-2019, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari sebesar 62,730 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 92,459 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun, porsi nilai tersebut terhadap total nilai PDRB mengalami penurunan dari sebesar 67,75% pada tahun 2015 menjadi 65,39% pada tahun 2018.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Nilai PMTB pada tahun 2015 sebesar 30.798 triliun rupiah yang meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 49,159 triliun rupiah. Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2015 sebesar 17,214 triliun rupiah (16,97%) meningkat menjadi sebesar 22.458 triliun rupiah (15,88%) pada tahun 2018. Nilai ekspor luar negeri DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 8,970 triliun rupiah.

Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197	92.459.989
Konsumsi LNPRT	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
Konsumsi pemerintah	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113	22.458.454
PMTB	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678	49.519.128
Perubahan Inventori	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
Ekspor LN	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632	8.970.892
Impor LN	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068	6.934.236
Net Ekspor Antar daerah	-20.819.021	- 21.290.602	- 25.747.135	-28.469.631	-31.188.901
PDRB	101.447.650	110.098.341	119.172.906	129.877.458	141.400.183

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

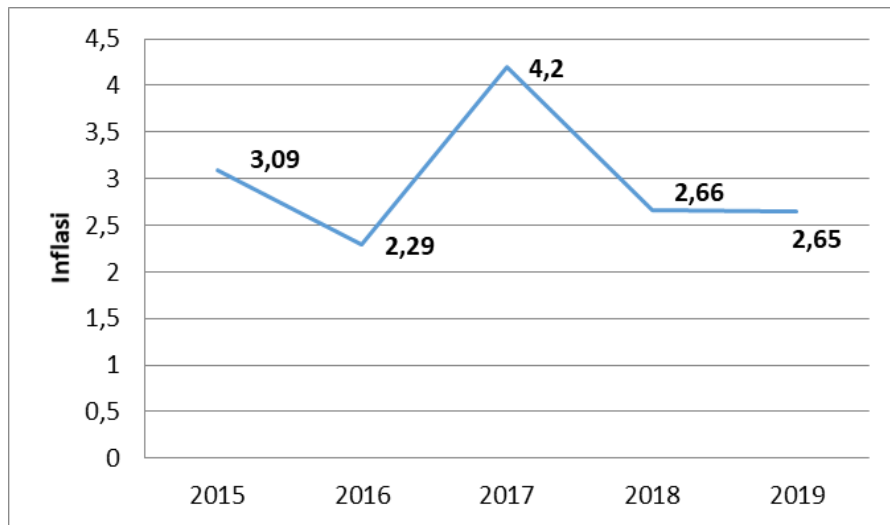
Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (%)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	67,75	67,66	68,55	66,80	65,39
Konsumsi LNPRT	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
Konsumsi pemerintah	16,97	16,76	16,64	16,44	15,88
PMTB	30,36	30,39	31,17	33,24	35,02
Perubahan Inventori	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
Ekspor LN	6,18	5,9	6,24	6,74	6,34
Impor LN	4,99	5,38	5,49	5,55	4,90
Net Ekspor Antar daerah	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92	-22,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

3.1.4 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun, 2017-2019. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,65%. Tingkat inflasi terendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 2,29%.

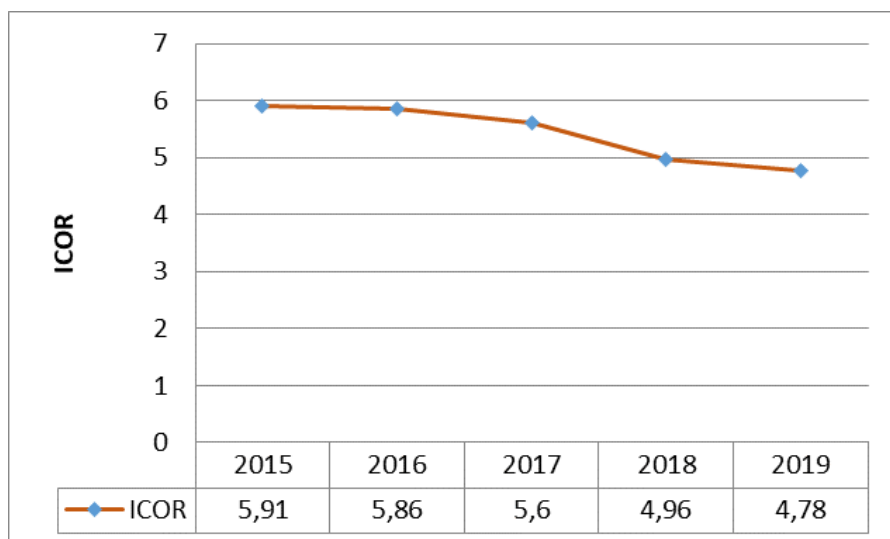


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019

3.1.5 ICOR

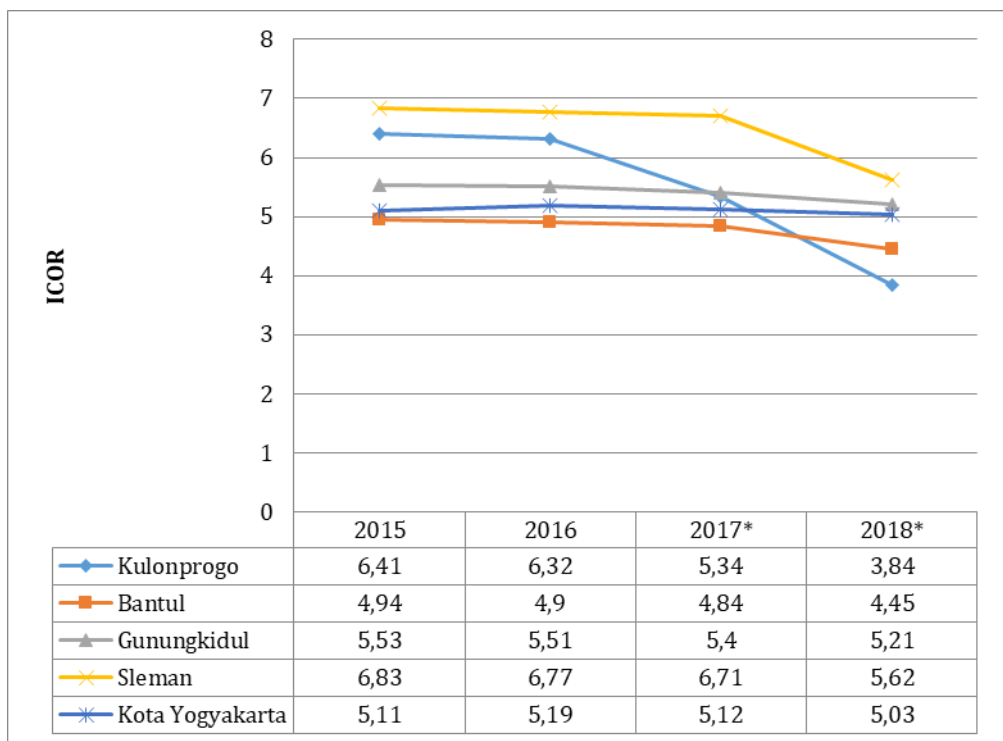
Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan efisiensi penggunaan investasi untuk menghasilkan *output*. Nilai ICOR turun dari 5.91 di tahun 2015 menjadi 4,78 di tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan, 2020

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2015-2019

Secara umum, tingkat ICOR semua daerah di DIY mengalami tren yang menurun terutama di Kabupaten Kulonprogo. Pada periode 2015 sampai 2018, daerah yang mencapai nilai ICOR tertinggi adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki nilai ICOR relatif tinggi dari kabupaten/kota lainnya karena jenis investasi yang ada bersifat padat modal dan lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum. Sementara itu, Kabupaten Bantul memiliki nilai ICOR yang relatif rendah karena lebih didominasi oleh sektor pertanian, industri kecil/rumah tangga, dan jasa akomodasi *nonbintang*.



sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 3-8 Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2018

3.1.6 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.106.908	2.107.286	2.203.920
Jumlah Penganggur Terbuka	80.245	57.036	64.019	73.350	69.170
TPT	4,07	2,72	3,02	3,35	3,14

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.203.920 orang dan meningkat sebanyak 96.634 orang dari 2.107.286 orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 69.170 pada tahun 2019 dari 73.350 di tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY di tahun 2019 .

3.1.7 Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 101,76 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019

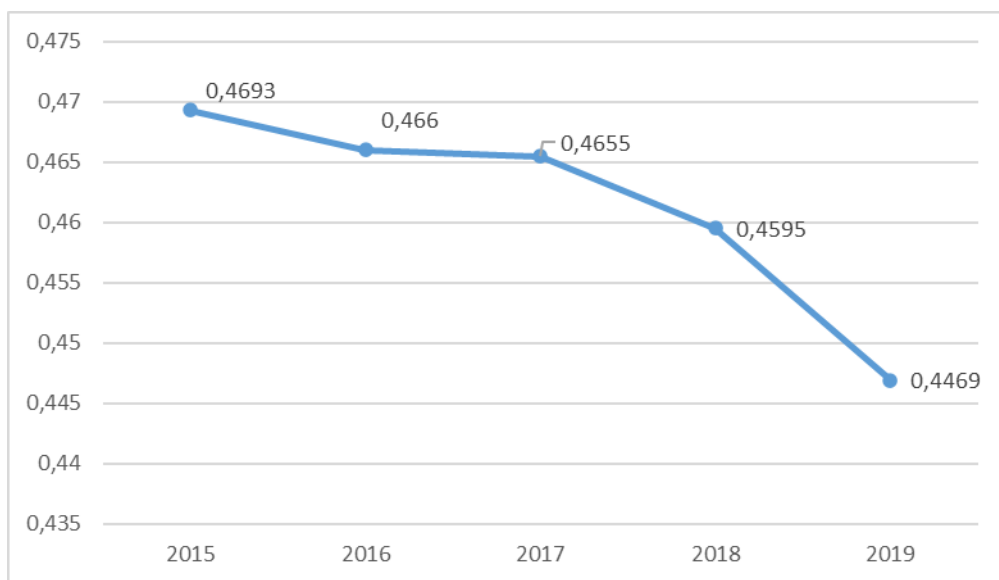
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	448.47
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,70% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

3.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson* (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2015-2019 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata.

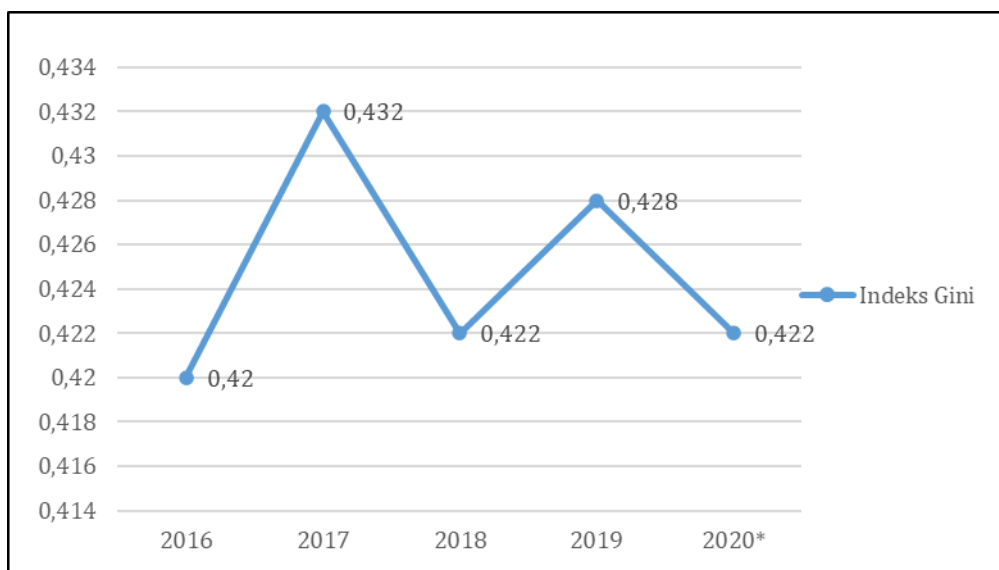


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-9 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019

3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Setelah tahun 2017, Rasio Gini relatif sama sampai tahun 2020 sebesar 0,422.



Sumber : Bappeda 2019

Keterangan: Angka 2020 adalah proyeksi

Gambar 3-10 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2016 – 2020

3.1.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global *Covid 19*. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 dan 2021 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 didasarkan pada perkembangan proses mitigasi kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam *output* daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum dan transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor diperkirakan tidak banyak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing*, penurunan ekspor karena melemahnya daya beli internasional.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3-5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020

No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	0,5	2,3	3,1	4,2	5,2	6,0
2.	Inflasi	2,7	2,5	2	3,2	3	2,7
3.	ICOR	9,25	7,89	7,29	6,46	5,71	5,11
4.	TPT	8,93	7,43	6,98	4,8	4,18	3,69
5.	Kemiskinan	13,37	12,71	12,42	11,6	11,5	11,47
6.	Indeks Gini	0,516	0,494	0,487	0,454	0,445	0,438
7.	Indeks Williamson	0,495	0,4842	0,4794	0,4728	0,4668	0,4620

Sumber : Bappeda, 2020

3.1.10.1 Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Penundaan pelaksanaan hampir semua proyek fisik pemerintah menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan sektor konstruksi yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang pertumbuhan tinggi di DIY. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan -8% untuk skenario pesimis, -6,1% untuk skenario

moderat dan -4% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,6% untuk skenario pesimis, 2,18% untuk skenario moderat dan 4,2% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,1% untuk skenario pesimis, 4,1% untuk skenario moderat dan 5,6% untuk skenario optimis. Selama pandemi *Covid 19*, diperkirakan terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke DIY yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan -0,5% untuk skenario pesimis, -0,2% untuk skenario moderat dan 3% untuk skenario optimis. Melemahnya aktivitas pariwisata dan perdagangan menyebabkan pelemahan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh -0,4% untuk skenario pesimis, -0,2% untuk skenario moderat dan 3,1% untuk skenario optimis.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2021 dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi dampak *Covid 19* di tahun 2020 dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Mitigasi pasca pandemi mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dalam melakukan berbagai macam program dan kegiatan intervensi meskipun kemampuan fiskal masih terkendala penerimaan pemerintah akibat dampak epidemi di tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat 1,5% untuk skenario pesimis, 2,92% untuk skenario moderat dan 3,12% untuk skenario optimis. Daya beli masyarakat juga meningkat dengan perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong pertumbuhan pengeluaran rumah tangga meningkat 3,1% untuk skenario pesimis, 5,78% untuk skenario moderat dan 6,67% untuk skenario optimis. Perbaikan kondisi nasional dan internasional diperkirakan dapat meningkatkan kinerja yang signifikan pada sektor pariwisata dan perdagangan luar daerah maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum diperkirakan 4,9% untuk skenario pesimis, 7,31% untuk skenario moderat dan 8,35% untuk skenario optimis. Sementara itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,1% untuk skenario pesimis, 4,1% untuk skenario moderat dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 3,9% untuk skenario pesimis, 4,59% untuk skenario moderat dan 6,39% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 4,5% untuk skenario pesimis, 7,31% untuk skenario moderat dan 8,35% untuk skenario optimis.

3.1.10.2 Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama empat tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektivitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi *Covid 19*. Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang menurun akan berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2% dengan rincian disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Perbaikan kondisi perekonomian tahun 2021 akan meningkatkan daya beli masyarakat namun tidak akan meningkatkan harga-harga secara umum karena dibarengi dengan peningkatan penawaran komoditas-komoditas dan upaya efektif dari TPID yang selama ini dapat menekan kenaikan tingkat harga.

3.1.10.3 ICOR

Rincian proyeksi ICOR tahun 2020 dan 2021 untuk tiga jenis skenario disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Nilai ICOR DIY selama tahun 2020 dan 2021 cenderung senantiasa menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang telah mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi proses produksi dengan ICOR di bawah 5. Peningkatan inefisiensi proses produksi di DIY terdampak *Covid* dipengaruhi antara lain oleh menurunnya kinerja sektor transportasi dengan masalah suplai bahan baku. Tingkat efisiensi produksi diharapkan dapat meningkat di tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kinerja sektor transportasi dan lancarnya suplai bahan baku.

3.1.10.4 TPT

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2020 diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak epidemi *Covid 19*. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan

minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar 50% dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Di tahun 2021, tingkat pengangguran diperkirakan mengalami penurunan. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor yang telah menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2021. Proyeksi rinci TPT tahun 2020 dan 2021 untuk tiga kelompok skenario disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Meskipun TPT menurun namun TPT belum dapat mencapai tingkat di tahun 2019 yang berada di bawah 3% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global belum mendekati kondisi sebelum pandemi *Covid 19* seperti kemungkinan masih melemahnya minat berwisata antar daerah atau antar negara dan daya beli masyarakat negara lain akibat pandemi.

3.1.10.5 Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 dan 2021 disajikan secara detail pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Tingkat kemiskinan di tahun 2020 dan 2021 akan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 yang telah turun menjadi 11,70%. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang melambat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan dapat menurun kembali sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian dengan meningkatnya penyerapan angkatan kerja terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta adanya peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak epidemi yang terutama ditujukan kepada warga miskin. Dengan mengasumsikan kontribusi kelompok masyarakat menengah ke bawah pada masa sebelum dan sesudah pandemi *Covid 19*, tingkat kemiskinan pasca pandemi di tahun 2021 tidak dapat mencapai tingkat yang telah dicapai di tahun 2019. Pengalaman historis penurunan tingkat kemiskinan sampai tahun 2019 adalah sekitar 0,66% sedangkan kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 adalah 1,67%, sehingga kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan di tahun 2021 sangat kecil karena kenaikan kemiskinan akibat pandemi jauh lebih tinggi dari rata-rata penurunan yang telah dicapai sebelum pandemic.

3.1.10.6 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 dan 2021 diperkirakan meningkat. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini terutama bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak epidemi *Covid 19* seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat serta dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Proyeksi rinci atas tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini tersajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Tingkat ketimpangan pendapatan di tahun 2021 tetap di atas capaian terakhir tahun 2019 mengingat kondisi tahun 2020 telah menyebabkan kenaikan sebesar 13,79% dari tahun 2019 yang sulit untuk diturunkan dengan kondisi kontribusi masyarakat dari kelompok menengah ke bawah di perekonomian DIY yang relatif tidak berubah dibandingkan masa sebelum pandemi dengan penurunan Indeks Gini hanya terjadi di tahun 2019 sebesar 4,08%.

3.1.10.7 Indeks Williamson

Dampak epidemi *Covid 19* pada berbagai pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan menyebabkan inisiatif untuk memperbaiki ketimpangan wilayah menghadapi masalah. Berbagai pembangunan fisik terutama proyek mega selama ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal, sebagai contoh pembangunan dan operasionalisasi YIA diharapkan dapat meningkatkan dinamika perekonomian khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan berbagai daerah tertinggal di wilayah lain. Pada tahun 2020, proyek-proyek pembangunan maupun pengembangan wilayah ditunda sehingga mendorong ketimpangan antar wilayah meningkat. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Melemahnya sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang

selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020. Dengan kondisi kontribusi perekonomian di masing-masing wilayah terhadap perekonomian DIY yang relatif tetap pada masa sebelum dan sesudah pandemi, ketimpangan wilayah di tahun 2021 menurun namun tingkat ketimpangannya tidak dapat mencapai tingkat pada masa sebelum pandemi. Hal itu disebabkan kenaikan ketimpangan antara wilayah di tahun 2020 sebesar rata-rata 6,63% sulit untuk diturunkan dengan penurunan rata-rata sesuai dengan pengalaman historis sebelumnya yaitu sebesar 1,63%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun *nonfisik*.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-6 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2021

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2019 (N-2)	APBD Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi Tahun 2021 (N)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	5.663.778.510.743,20	6.130.178.110.468,18	5,535,162,099,138.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.921.564.734.133,20	2.163.742.926.278,18	1.795.789.600.916,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.720.036.541.180,35	1.888.896.005.058,00	1.650.640.430.079,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.288.220.925,00	39.906.473.350,01	33.192.194.575,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.874.687.657,66	99.880.225.777,75	55.646.389.843,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.365.284.370,19	135.060.192.092,42	56.310.586.419,00
1.2	Dana Perimbangan	2.474.160.842.300,00	2.573.597.467.000,00	2.223.890.836.032,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	86.659.336.000,00	82.562.201.032,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.359.606.514.000,00	1.234.516.326.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258.000,00	1.127.331.617.000,00	906.812.309.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.268.052.934.310,00	1.392.837.717.190,00	1,515,481,662,190.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.515.100.000,00	8.853.500.000,00	7.576.500.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.258.831.799.000,00	1.383.204.198.000,00	1,507,125,143,000.00
1.3.5	Bantuan	706.035.310,00	780.019.190,00	780.019.190,00

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2019 (N-2)	APBD Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi Tahun 2021 (N)
1	2	3	4	5
	Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan	5.663.778.510.743,20	6.130.178.110.468,18	5,535,162,099,138.00
2	Belanja	5.968.673.012.642,25	6.494.711.413.219,80	5,811,294,417,219.45
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.186.737.950.794,45	3.867.254.822.813,80	2.458.034.706.798,45
2.1.1	Belanja Pegawai	1.416.494.422.321,00	1.709.790.268.636,40	1.699.787.456.717,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	83.066.925.534,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	671.906.016.500,00	790.599.679.410,40	19.415.200.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	2.492.000.000,00	500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemdes	704.917.367.626,25	769.906.467.540,60	676.299.377.521,60
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes	288.285.076.440,00	496.550.178.175,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	22.632.543.956,20	14.849.303.517,40	62.032.672.560,45
2.2	Belanja Langsung	2.781.935.061.847,80	2.627.456.590.406,00	3,353,259,710,421.00
2.2.1	Belanja Pegawai	292.934.140.331,80	103.907.107.262,80	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.341.878.364.015,00	1.432.988.048.845,20	
2.2.3	Belanja Modal	1.147.122.557.501,00	1.090.561.434.298,00	
	Jumlah Belanja	5.968.673.012.642,25	6.494.711.413.219,80	5,811,294,417,219.45
	Surplus/(Defisit)	(304.894.501.899,05)	(364.533.320.751,62)	(276.132.318.081,45)
3	Pembiayaan	304.894.501.899,05	364.533.320.751,62	276.132.318.081,45
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	485.334.501.899,05	543.163.302.751,62	398.632.318.081,45
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan	485.334.501.899,05	538.661.342.451,62	393.632.318.081,45

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2019 (N-2)	APBD Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi Tahun 2021 (N)
1	2	3	4	5
	Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	4.501.960.300,00	5.000.000.000,00
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	485.334.501.899,05	543.163.302.751,62	398.632.318.081,45
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	180.440.000.000,00	178.630.000.000,00	122.500.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	180.440.000.000,00	178.630.000.000,00	122.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2019 (N-2)	APBD Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi Tahun 2021 (N)
1	2	3	4	5
	Yang Belum Terselesaikan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	180.440.000.000,00	178.630.000.000,00	122.500.000.000,00
	Pembiayaan Neto	304.894.501.899,05	364.533.302.751,62	276.132.318.081,45
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	0,00	0,00	0,00

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan struktur keuangan daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dibandingkan dengan struktur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tabel berikut.

Tabel 3-7 Perbandingan Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2021

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
1	Pendapatan	5,535,162,099,138.00	1	Pendapatan	5,535,162,099,138.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.795.789.600.916,00	1.1	Pendapatan Asli Daerah	1,795,789,600,916.00
1.1.1	Pajak Daerah	1.650.640.430.079,00	1.1.1	Pajak Daerah	1,650,640,430,079.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.192.194.575,00	1.1.2	Retribusi Daerah	33,192,194,575.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.646.389.843,00	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55,646,389,843.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.310.586.419,00	1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56,310,586,419.00
1.2	Dana Perimbangan	2.223.890.836.032,00	1.2	Pendapatan Transfer	3,731,795,998,222.00

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	82.562.201.032,00	1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,648,453,778,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.234.516.326.000,00	1.2.1.1	Dana Perimbangan	2,141,328,635,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	906.812.309.000,00	1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1,234,516,326,000.00
			1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	0.00
			1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	1,234,516,326,000.00
			1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	906,812,309,000.00
			1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	0.00
			1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	906,812,309,000.00
			1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00
			1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	56,627,967,000.00
			1.2.1.4	Dana Keistimewaan	1,450,497,176,000.00
			1.2.1.5	Dana Desa	0,00
			1.2.2	Transfer Antar Daerah	83,342,220,222.00
			1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	82,562,201,032.00
			1.2.2.2	Bantuan Keuangan	780,019,190.00
			1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	780,019,190.00
			1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,515,481,662,190.00	1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.576.500.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	1.3.1	Hibah	7.576.500.000,00

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
1.3.2	Dana Darurat	0,00	1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,507,125,143,000.00			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00			
	Jumlah Pendapatan	5,535,162,099,138.00		Jumlah Pendapatan	5,535,162,099,138.00
2	Belanja	5,811,294,417,219.45	2	Belanja	5,811,294,417,219.45
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.458.034.706.798,45	2.1	Belanja Operasional	3,611,172,040,693.00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.699.787.456.717,00	2.1.1	Belanja Pegawai	1,699,787,456,717.00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,891,469,383,976.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	2.1.3	Belanja Bunga	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	19.415.200.000,00	2.1.4	Belanja Subsidi	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	2.1.5	Belanja Hibah	19,415,200,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemdes	676.299.377.521,60	2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes	0,00	2.2	Belanja Modal	1,403,840,326,445.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	62.032.672.560,45	2.2.1	Belanja Tanah	0,00
2.2	Belanja Langsung	3,353,259,710,421.00	2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
2.2.1	Belanja Pegawai		2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
2.2.3	Belanja Modal		2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00
			2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00
			2,3	Belanja Tidak Terduga	62,032,672,560.45
			2,4	Belanja Transfer	734,249,377,521.00
			2.4.1	Belanja Bagi Hasil	676,299,377,521.00
			2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	57,950,000,000.00
			2.4.2.1	Belanja Keuangan Antar-Daerah Provinsi	0,00
			2.4.2.2	Bantuan Keuangan Antar-Daerah Kabupaten/Kota	0,00
			2.4.2.3	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di Wilayahnya dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di luar Wilayahnya	57,950,000,000.00
			2.4.2.4	Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsinya dan/atau Daerah Provinsi Lainnya	0,00
			2.4.2.5	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.	0,00
	Jumlah Belanja	5,811,294,417,219.4		Jumlah Belanja	5,811,294,417,219.4

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
		5			5
	Surplus/ (Defisit)	(276.132.318.081,4 5)		Surplus/ (Defisit)	(276,132,318,081.4 5)
3	Pembiayaan	276.132.318.081,45	3	Pembiayaan	276,132,318,081.45
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	398.632.318.081,45	3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	398,632,318,081.45
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	393.632.318.081,45	3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	393,632,318,081.45
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	5.000.000.000,00			
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0.00			

Nomor Urut	Uraian Struktur Permendagri 13/2006	Proyeksi Tahun 2021	Nomor Urut	Uraian Struktur Pp 12/2019	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3	1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	398.632.318.081,45		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	398,632,318,081.45
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	122.500.000.000,00	3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	122,500,000,000.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	122.500.000.000,00	3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	122,500,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	0,00
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	0,00			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.500.000.000,00		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122,500,000,000.00
	Pembiayaan Neto	276,132,318,081.45		Pembiayaan Neto	276,132,318,081.45
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasianl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;

- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan *nonpajak* kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan *nonpajak*, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada *event* tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
 - 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
 - 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak

tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan *nonBank*.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah

Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari *Dealer/Main Dealer Otomotif*, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam melalui dana perimbangan akan berkisar 40% dan Dana yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar 27,74%. Pada tahun perencanaan 2021 proporsi pendapatan asli daerah berkisar 34%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

3.2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan dana yang bersumber dari pusat meliputi Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBHPajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangiketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Arah Kebijakan DBH Tahun 2021 adalah:

- mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
- menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan;
- memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Arah kebijakan DAU Tahun 2021 adalah:

- a. memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah *Covid-19* pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada pemulihan (*recovery*) perekonomian pasca bencana dampak *Covid-19* di daerah
- b. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.
- c. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU

Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun *nonfisik*, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) *nonFisik*.

Arah Kebijakan Pengalokasian DTK Tahun 2021 adalah

- a. memperkuat penanganan wabah *Covid-19* pada aspek medis, pembiayaan jarring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah;
- b. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas

3.2.2.1.2 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah:

- a. meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- b. memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta;
- c. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

3.2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2021 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut

3.2.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan

kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan *nonbank*, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS *online* berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
6. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

3.2.2.2.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena

tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (c) Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
- (d) Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1)Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Kerjasama dan Kemitraan; dan 4) Pemulihan Sosial Pasca Pandemi *Covid-19*. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 5) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Modal

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar output dan outcome kegiatan tercapai. Penyusunan output dan outcome pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Penganggaran SILPA untuk tahun 2021 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2021 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Total penyertaan modal pada tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020 dikarenakan fokus anggaran lebih diberikan untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi *Covid-19*. Penyertaan modal pada BUMD di tahun 2021 direncanakan bagi PT

Bank BPD DIY, Perusahaan Daerah Air Bersih (PD Air Bersih) dan Investasi Dana Bergulir.

Penambahan setoran modal pada PT Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Pemda DIY berkewajiban melakukan penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Berkaitan dengan PD Air Bersih. Pada tahun 2021 Pemda DIY diharuskan melakukan penyeteroran modal sebesar Rp12.500.000.000. Besaran penyertaan modal tersebut berdasarkan asumsi modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 maka 25% dari modal dasar tersebut harus disetorkan pada saat pendirian yakni sebesar Rp12.500.000.000,00 (pasal 33 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT).

3.2.5 Strategi Keuangan Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan meliputi 9 kawasan prioritas yaitu :

1. Penataan Kawasan Kraton,
2. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi,
3. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh
4. Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis,
5. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY,
6. Penataan Kawasan Puro Pakualaman
7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta
8. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

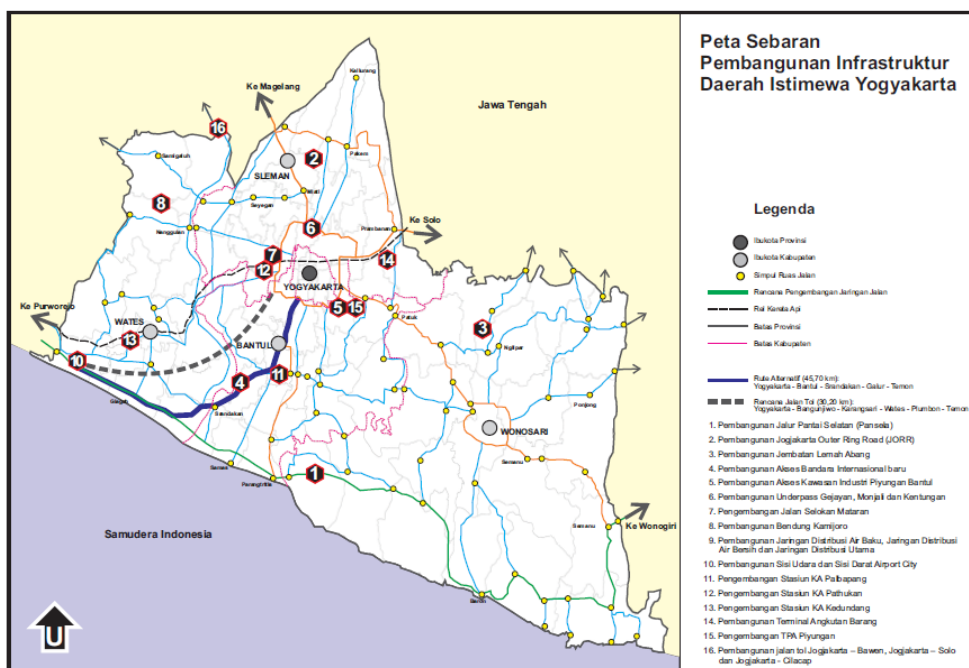
Dan 5 Infrastruktur prioritas yaitu :

1. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur

2. Pembangunan Underpass Kentungan (Selesai awal 2020)
3. Pembangunan Underpass Gejayan
4. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul
5. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Serta 3 Prioritas Strategi lainnya yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Yogyakarta Smart Province
2. Pembangunan International Hospital-RSUD Wates (Selesai awal 2020)
3. Pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP)



Sumber: Dokumen Kajian Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY

Gambar 3-11 Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives, PFI*), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM kita masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi sebagai berikut:

1. **Investasi Pemerintah.** Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).** Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.
3. **Investasi Swasta.** Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited*, *special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. ***Creative financing* sebagai pembiayaan alternatif adalah** sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. *Private Finance Initiative (PFI)*– *multi-year contract* 15 hingga 30 tahun;

- d. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment*;
- e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing* (ERP);
- f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
- g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

Di dalam skema pembiayaan infrastruktur memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh SKPD pengampu. Kriteria pembiayaan infrastruktur yang disusun pada periode 2017-2022, meliputi:

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah dengan ketimpangan infrastruktur cukup tinggi, perdesaan, dan perbatasan;
2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan *sharing* swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah (konstruksi) khususnya dalam pembiayaan *hybrid financing*;
3. Layak secara ekonomi dan finansial marjinal dengan skema pembiayaan dominan dari swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah yang dikerjasamakan/*sharing* pula dengan swasta lainnya dalam pelaksanaan konstruksi. Skema pembiayaan ini menggunakan skema *Public Private Partnership* (PPP) dengan dukungan pemerintah (VGF) atau *creative financing* lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain sebagainya;
4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta-swasta (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) yang dikerjasamakan melalui model *Public Private Partnership* (PPP) regular;
5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN/BUMD (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah dengan kondisi infrastruktur cukup baik atau pada wilayah perkotaan Yogyakarta. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 menyampaikan visi ***“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,”*** dan misi Panca Mulia yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022 yakni memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi

kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Tema visi Abad Samudera Hindia tersebut dilandasi dengan aspek kesejarahan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo (20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %); dimana angka kemiskinan DIY 12,36% (2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017).

Selain itu terdapat ketimpangan antarwilayah dimana PDRB Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menguasai 60% total PDRB DIY, sementara itu Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, hanya memiliki pangsa distribusi ekonomi sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat. Berkenaan dengan potensi kelautan kawasan selatan sebagai pengungkit kesejahteraan dapat dideskripsikan potensi sebagai berikut:

1. Perikanan tangkap laut, dimana terdapat nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun.
2. Ekosistem terumbu karang pada 7 lokasi di Kabupaten Gunungkidul
3. Ekosistem Mangrove seluas 61 Ha (2012) yang menjadi habitat berbagai satwa dan biota perairan.
4. Ekosistem Gumuk Pasir tipe Barkhan di pesisir Parangtritis
5. Pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY sejumlah 70 wisata pantai di DIY. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wedimbo-Sadeng dan sekitarnya.
6. Potensi energi baru terbarukan di kawasan pesisir antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 763,6 Kw, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,5kWh/m², serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar m/s.

Adapun tema misi “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”. Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah *mind set* dari *business as usual* menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki.

Etika, menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya

birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi- birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi ***"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*** kemudian dirumuskan Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi ***"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*** Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
7. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY telah diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.*** Rumusan ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
 - c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (*Gini Index*), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (*index williamson*).
 - d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.
2. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;** Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,
- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
 - b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.
- Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut:

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"							
N o.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017 (baseline)	2022 (akhir periode)
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ikatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,73	81,68
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,8	70,32
				1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini	0,4400	0.3635
					Persentase Angka Kemiskinan	12,36	7,0
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98	12,04
				1.4. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.	5.21	5.34
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56.65	66.15
					Kesesuaian Pemanfaatan	75	82.5

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"							
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017 (baseline)	2022 (akhir periode)
					Ruang		
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11.11	54.44
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0.4577	0.4489
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	2.1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	WTP A	WTP A
				2.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	N/A	91,30
				2.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	21.877

4.2 Perumusan Tema RKPD 2021

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan mempedomani kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2021. Selain itu juga melakukan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*),

4.2.1 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) adalah untuk *“penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”* RPJPD DIY Tahun 2005-2025 diwujudkan melalui pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD DIY 2017-2022. Dokumen RPJMD DIY 2017-2022 sendiri memiliki peran kritikal dan penting karena berada menjelang berakhirnya tahapan RPJPD DIY 2005-2025 yang hendak mewujudkan Visi Pembangunan berupa *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD DIY 2017-2022 dengan arah kebijakan umum pembangunan *“Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan”* yang meliputi:

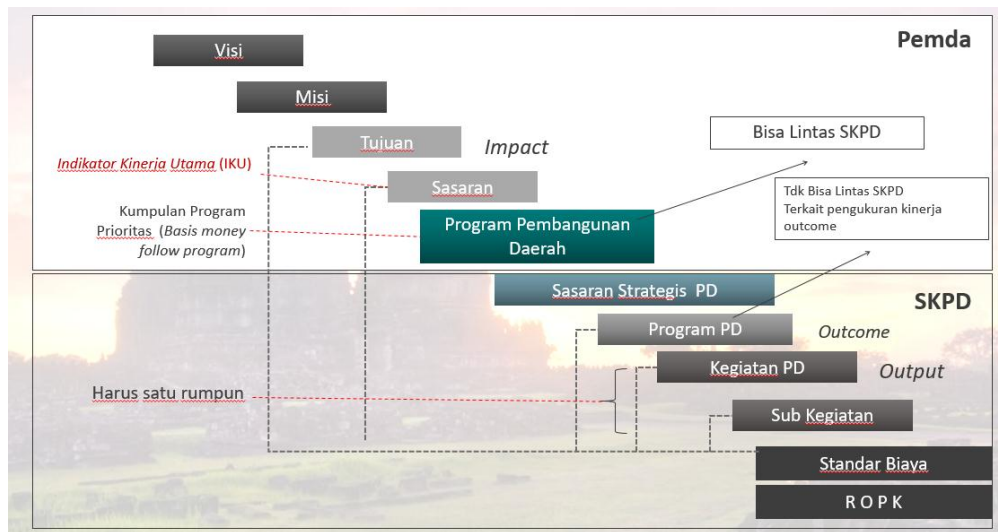
1. Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan
2. Mencari alternatif pembiayaan *nonpemerintah* melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
4. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender
5. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan
6. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
7. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin
8. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh
9. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk aman, berketahanan dan berkelanjutan mewujudkan pemukiman yang inklusif
10. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah
11. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
12. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru
13. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
14. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
16. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengurangan resiko bencana

Berangkat dari arah kebijakan tersebut tema RKPD DIY Tahun 2021 dapat mengandung kata kunci Mendayagunakan dan Memperkuat SDM Unggul (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur.

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa bagan alir visi misi hingga program perangkat daerah (*cascading*) yang menggambarkan bagaimana visi-misi tercapai dengan dukungan berjenjang secara terukur dan bagaimana organisasi perangkat daerah dibentuk untuk mendukung capaian visi misi (*vision driven organization*) dalam rangka mewujudkan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis program (*money follow program*; lihat Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017). Keberadaan Program Pembangunan Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Daerah DIY dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* dimana

terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan berikut,



Sumber : Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran. Bappeda DIY. 2018

Gambar 4-1 Arsitektur Kinerja RPJMD DIY 2017-2022 Cascade Perencanaan

Berkenaan dengan implementasi *cascading* dan arah kebijakan umum dalam RPJMD DIY untuk tahun 2021 tersebut dapat difokuskan lebih lanjut dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial sebagaimana kebijakan nasional terkait pendekatan perencanaan pembangunan dan (*lihat*. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017). Pendekatan tematik yang berangkat pada permasalahan-permasalahan daerah yang menjadi prioritas dan perlu segera diakslerasi yaitu Fokus Tematik. Pandemi *Covid-19* yang muncul pada tahun 2020 telah menyebabkan kondisi sosial ekonomi global, nasional dan daerah menjadi tidak menentu sehingga pada tahun 2021 fokus pemulihan sosial ekonomi tersebut perlu diakselerasi dalam Fokus Tematik. Fokus Tematik Tahun 2021 meliputi:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan.
4. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi *Covid-19*.

Fokus Tematik tersebut dapat dipetakan berdasarkan misi, sasaran dan Program Pembangunan Daerah serta alternatif strategi pada tahun 2021 sebagai berikut,

Tabel 4-2 Penyanggatan Cascading RPJMD, Tematik dan Kriteria Program.

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangun an Daerah	Alternatif Strategi
1.	Misi 1 : Meningkatk an Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupa n Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaba n	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		(1) Menyelengg ara-kan pendidikan berbasis entepreneu rship dan budaya (2) meningkatk an derajat kesehatan masyarakat fokus perlindunga n dan pelayanan lansia dan keluarga miskin
			Indeks Pembangun an Manusia (IPM) Target : 80,29 (2018) s/d 81,68 (2022)	a. Program Peningka tan Aksesibil itas dan Kualitas Pendidik an b. Program Peningka tan Usia Harapan Hidup	
			Indeks Pemberday aan Gender (IDG) Target: 69,91 (2018) s/d 70,32 (2022)	Program Pembanguna n Sosial Masyarakat	
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat		
			a. Indeks Gini Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022) b. Persent ase	Program Penanggulan gan Kemiskinan	

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangun an Daerah	Alternatif Strategi
			Angka Kemiskinan; Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)		
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
			Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi Target: 11,46 (2018) s/d 7 (2022)	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	
2.		Penurunan Ketimpangan Wilayah,	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah		(1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besa
Indeks Williamson Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)			Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan		
3.		Pemulihan Sosial Ekonomi pasca Pandemi Covid-19	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		(1) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk
a. Pertumbuhan			a. Program Pengembangan		

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangun an Daerah	Alternatif Strategi
			<p>Ekonomi</p> <p>Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)</p> <p>b. Kesesuai an Pemanfa atan Ruang</p> <p>Target: 76,5 (2018) s/d 82,5 (2022)</p> <p>c. IKLH (Indeks Kualitas Lingkun gan Hidup)</p> <p>Target: 58,58 (2018) s/d 66,15 (2022)</p>	<p>sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolaha n; Jasa)</p> <p>b. Program Peningkata n Keterpadu an Program Pemanfaat an Ruang</p> <p>c. Program Tata Kelola Lingkunga n Hidup dan Penanggul angan Bencana</p>	<p>menunjang pertumbuha n ekonomi berkelanjuta n</p> <p>(2) melakukan aktifitas pemulihan kondisi sosial ekonomi pada sektor kesehatan, pariwisata, industri dan investasi baik dari segi pelaku maupun sarpras pendukung.</p>
4.	Misi 2. Mewujudka n Tata Mewujudka n Tata Pemerintah an yang Demokratis	Kerjasama dan Kemitraan	<p>Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan</p> <p>Persentase capaian sasaran Pelaksanaa n Keistimewa an. Target: 65,22 (2019) s.d</p>	<p>Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah</p>	<p>Mencari alternatif pembiayaan pembangunan pemerintah dan nonpemerintah , (termasuk dalam hal optimalisasi aset-aset daerah)</p>

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangun an Daerah	Alternatif Strategi
			91,30 (2022)		
			Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa		
			bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan, Target: 7919 (2018) s.d 21877 (2022)	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	
			Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		
			a. Opini BPK Target: WTP (2018 s/d 2022)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	
			b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) Target: A (2018		

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangun an Daerah	Alternatif Strategi
			s/d 2022)		

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, Bappeda DIY, 2018. (diolah)

4.2.2 Internalisasi Tema dan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah 2021 dengan Tema RKPD DIY tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021) merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tema RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Munculnya pandemi global *Covid-19* yang mengakibatkan ketidakpastian perekonomian dunia dan nasional maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan pada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Tema tersebut telah diinternalisasi pada Tema RKPD DIY Tahun 2021 yang fokus pada penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi yang merupakan subjek dari pembangunan, disertai dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak *covid-19* terutama pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

4.2.3 Internalisasi Paradigma Abad Samudra Hindia dalam Visi-Misi Gubernur DIY dengan Tema RKPD Tahun 2021: Kawasan Selatan Sebagai Basis Kewilayahan yang diperhatikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* (RPJMD DIY 2017-2022). Visi tersebut berangkat dari tema pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022 *“Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”* dengan misi Panca Mulia untuk mewujudkan kemuliaan martabat tersebut. Dari aspek kewilayahan, tema *Menyongsong Abad Samudera Hindia* tersebut

mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Kawasan Selatan merupakan upaya untuk memberi perhatian pada basis kewilayahan tersebut untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sesuai SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan:

1. Terdapat 4 dari 9 Kawasan¹ yang menjadi prioritas kawasan di Kawasan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:
 - a. Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis
 - b. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY
 - c. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
 - d. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo
2. Terdapat 3 dari 5 Infrastruktur² yang menjadi prioritas antara lain :
 - a. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur
 - b. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul
 - c. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

Selain itu terdapat proyek infrastruktur prioritas lainnya yaitu, Pembangunan International Hospital – RSUD Wates yang telah selesai pada tahun 2020 dan Pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP).

4.2.4 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tema RKPD Tahun 2021

Tema RKPD DIY 2021 akan menselaraskan dengan perencanaan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

¹ Adapun 9 Kawasan tersebut selengkapnya antara lain (1) Penataan Kawasan Kraton, (2) Penataan Kawasan Sumbu Filosofi, (3) Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh (4) Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis, (5) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY, (6) Penataan Kawasan Puro Pakualaman (6) Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (7) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo (8) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

² Adapun 5 Infrastruktur prioritas selengkapnya adalah (1) Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur (2) Pembangunan Underpass Kentungan, (3) Pembangunan Underpass Gejayan (4) Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul (5) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Yogyakarta. Pelaksanaan lima kewenangan Keistimewaan DIY dalam UU 13 Tahun 2012 (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) tata ruang.

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY telah menuangkan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan RKPD yang melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman.³ Dalam RPJMD DIY 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah terkait, urusan keistimewaan terintegrasi pada Sasaran, Indikator Sasaran, Program Pemda, Sasaran Perangkat Daerah, dan Program Perangkat Daerah serta Kegiatan Perangkat Daerah. Aras keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan daerah DIY yang termuat dalam RPJMD DIY 2017-2022 dan akan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2020 yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut.

Tabel 4-3 Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
TUJUAN 1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka tunggal ika-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA

³ Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 59.

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban TUJUAN 1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka tunggal ika-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Sasaran ke-3 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Memelihara, mengembangkan dan mempromosikan khazanah budaya benda dan tak benda	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan. 2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan
Sasaran ke-4 Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pada indikator ke-4: Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	1. Sultan Ground (keprabon dan nonkeprabon) 2. Pakualaman Ground (keprabon dan nonkeprabon) 3. Satuan Ruang Lain yang memiliki nilai keistimewaan	Program Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Tabel 4-4 Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022

MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis TUJUAN 2 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Sasaran ke-7 Meningkatnya	Capaian	Capaian	Program	1. Terwujudnya

MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis TUJUAN 2 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	sasaran program keistimewaan	Pengelolaan Kelembagaan Daerah dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan
Sasaran ke-8 Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Fasilitasi pengelolaan yang terukur	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Penggunaan dana keistimewaan (danais) dalam rangka pelaksanaan Urusan Keistimewaan oleh Pemerintah Daerah DIY pada RKPD Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022. Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2021 merupakan bagian dari keseluruhan sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.5 Internalisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pemerintah Daerah DIY telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menyusun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 telah memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain :

1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
5. Tujuan 5 Kesenjangan Gender
6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Ketujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 dan dapat menjadi pedoman penajaman tema pembangunan DIY serta penyusunan prioritas pembangunan tahun 2021

4.2.6 Tema RKPD DIY 2021

Penyusunan tema pembangunan RKPD DIY 2021 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY 2021 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudra Hindia dalam visi misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2021 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen ini sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Munculnya Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 juga melandasi penentuan Tema RKPD DIY Tahun 2021 dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pandemi *Covid-19* berakhir pada Tahun 2020.

2. Pasca Pandemi *Covid-19* berakhir dilakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi di tahun 2021.
3. Proyek Infrastruktur Nasional tetap masuk di Tahun 2021

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tema RKPD DIY Tahun 2021 yaitu; ***“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY ”***

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Penguatan SDM Unggul

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan penguatan SDM unggul Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), SDM Unggul Kebudayaan, dan SDM Unggul Ekonomi.

2. Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemulihan Sosial Ekonomi merupakan obyek atau aktifitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak *Covid-19* dengan fokus pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Berdasarkan tema RKPD DIY 2021 *Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut,

Tabel 4-5 Rumusan Prioritas Daerah

No.	Tema RKPD DIY 2021	Prioritas Daerah	Fokus	Sasaran Daerah
1.	<i>Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY</i>	Pembangunan Manusia unggul	Pembangunan Manusia unggul difokuskan kepada pembangunan SDM dalam berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, ekonomi) agar semakin berkompeten dan unggul di masing-masing sektor serta merupakan tahapan mewujudkan visi RPJMD 2017- 2022 yaitu mewujudkan kemuliaan martabat manusia jogja	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM 1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

No.	Tema RKPD DIY 2021	Prioritas Daerah	Fokus	Sasaran Daerah
2.		Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perkonomian yang berkelanjutan difokuskan pada pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi <i>Covid-19</i> berakhir	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan 1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan
3.		Penguatan Infrastruktur Strtegis	Penguatan infrastruktur strategis difokuskan pada respon terhadap proyek strategis nasional dan daerah guna mendukung pengurangan ketimpangan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
4.		Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan difokuskan pada dukungan prioritas pembangunan melalui perbaikan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pengelolaan keistimewaan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RKP 2021. Pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021, Fokus Pembangunan diarahkan pada:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Keempat fokus pembangunan Tahun 2021 tersebut ditekankan pada empat dari tujuh prioritas nasional⁴, yaitu:

⁴ Prioritas Nasional tahun 2021 yaitu: PN1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN2; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN3; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN4; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN6;

1. PN 1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 3; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3. PN 5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. PN 6; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Hasil penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4-6 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PN3; meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
				1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
2	PN 4; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
3	PN1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
				1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PN7; Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PN6; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
5	PN 5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
				1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	
				1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
6	PN2; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
7	PN7;. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2021

4.4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Nasional

Berdasarkan RPJMD 2020-2024, Pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang berkaitan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa: kawasan ekonomi kreatif dan digital
2. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur dskt
3. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi: Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap- Yogyakarta, Jalan Lintas Pansela, KA Akses NYIA
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi
 - a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
 - b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri :
 - 1) Ekonomi Kreatif : di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur and Bali,

- 2) Tekstil di Jawa Barat, Jawa Tengah, kimia di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,
- 3) Manufaktur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,
- 4) Otomotif di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,
- 5) Konstruksi, pariwisata dan pertanian;
6. Pengembangan BLK di wilayah Jawa- Bali berjumlah 104 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung)
7. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali.

Selanjutnya memperhatikan hal tersebut dan dengan melihat rancangan RKPD serta hasil pembahasan usulan daerah pada Musrenbangnas terdapat beberapa indikasi proyek strategis nasional yang dilaksanakan di DIY tahun 2021, yaitu:

1. KEK Wisata Parangtritis-Samas;
2. Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo;
3. Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen;
4. Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur dan Bedah Menoreh;
5. Kereta Bandara YIA;
6. Penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto
7. Pembangunan JJLS Jembatan Kretek 2; Pembangunan Jalan Lok Wolulus (Kelok 18); Penyelesaian Pembangunan 2 jalur JJLS;
8. Pembangunan TPST Tambakboyo

Terhadap proyek-proyek strategis nasional tersebut Pemerintah Daerah DIY harus melakukan persiapan, baik itu yang terkait langsung dengan proyek maupun dampak pengembangan kawasan di sekitar lokasi pelaksanaan proyek.

4.4.2 Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik pada RKPD DIY 2021 dilaksanakan dalam rangka mengakslerasi dan permasalahan-permasalahan daerah yang menjadi prioritas dengan pendekatan tematik sebagai berikut,

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan, Tematik Kemiskinan diangkat sebagai agenda pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 berangkat dari angka kemiskinan DIY yang berada di atas rata-rata nasional dan sebaran masalah kemiskinan terutama pada kawasan

selatan yang tersebar pada 15 kecamatan miskin di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Pemerintah Daerah DIY memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB. Sebagaimana disebutkan dalam sasaran global SDGs/TPB, pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Tematik kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi (1) meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan, (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan (3) internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Penanggulangan kemiskinan selain meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, perlu penanganan ketimpangan pendapatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang disinergikan dengan pemerintah kab/kota dan desa. Percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menjadi target bersama sampai tingkat desa, dengan *sharing* target, kewenangan dan sumber daya. Perlu regulasi yang mendukung strategi tersebut yang harus disepakati bersama antara provinsi kabupaten/kota dan desa. Sasaran pengentasan masyarakat miskin dengan *sharing* kewenangan dan sumber daya sampai Tematik Kemiskinan

2. Penurunan Ketimpangan Wilayah

Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth - less pro poor* (kuadran

IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I). Rekomendas solusi terkait dengan penurunan ketimpangan ialah sebagai berikut:

- a. Memperluas sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,
- c. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah,

Tematik ketimpangan antar wilayah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Strategi RPJMD pertama yaitu meningkatkan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung dengan alternatif strategi ditahun pertama yaitu mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif; alternatif strategi ditahun kedua yaitu mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah; alternatif strategi tahun ketiga (2020) yaitu: mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar; Alternatif strategi tahun keempat yaitu memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi; dan alternatif strategi kelima yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan.

3. Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan.

Pembiayaan dalam arti sempit memberikan implikasi bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan *nonutang*. Sedangkan menutup defisit pada pembiayaan dalam arti luas implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing.

Tematik Pembiayaan Pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi mencari alternatif pembiayaan *nonpemerintah* melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

Strategi RPJMD yaitu Mencari alternatif pembiayaan *nonpemerintah* melalui kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha/swasta didukung dengan alternatif strategi ditahun pertama, kedua dan ketiga (2020) yaitu Mencari alternatif pembiayaan pembangunan pemerintah dan *nonpemerintah*; alternatif strategi tahun keempat: Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah; dan Alternatif strategi tahun kelima yaitu Mencari alternatif pembiayaan *nonpemerintah* melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

4. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi *Covid-19*

Corona Virus Disease atau *Covid-19* ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kasus terkonfirmasi positif pertama *Covid-19* di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 di Daerah Depok, Jawa Barat dan saat ini telah tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. DIY sendiri kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* telah mencapai angka 200 jiwa. Berdasarkan pola penyebaran *Covid-19* saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal *nonpertanian* relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. DIY sebagai salah satu daerah yang pertumbuhan ekonomi terbesar ditopang dari sektor *nonpertanian* tentu saja munculnya *Covid-19* ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari geliat pariwisata DIY mengalami penurunan pendapatan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan kerumunan untuk mencegah penularan *Covid-19* semakin meluas. Pandemi *Covid-19* diharapkan selesai di tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak dengan persiapan transformasi menuju kehidupan new normal setidaknya pada pola perilaku dan kehidupan masyarakat dan era platform digital dalam melakukan aktifitas kegiatan. Fokus pemulihan sosial ekonomi masyarakat akan ditekankan pada sektor kesehatan, pariwisata, industri dan investasi, serta perlindungan terhadap masyarakat rentan.

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) untuk RKPD DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mana,

- a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (pasal 153, huruf k).
- b. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses Proses penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dilaksanakan dengan proses awal berupa pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu, dan berbagai aspirasi lainnya, serta telaah terhadap APBD DIY tahun anggaran sebelumnya (pasal 178, ayat (1, 3)). Tahapan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dipungkasi dengan proses finalisasi/harmonisasi melalui forum ekspose yang bersifat terbuka, dimana hasil telaahan dirumuskan dalam daftar dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD (pasal 178, ayat (4)) berupa Keputusan DPRD DIY Nomor 59/K/ DPRD/ 2019 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
- c. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (pasal 178, ayat (5)). Penyampaian secara tepat waktu dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dimaksudkan agar aspirasi publik yang termuat di dalamnya dapat terintegrasi dengan dokumen-dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, RKA, dan RAPBD.
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran (pasal 178, ayat (2)).

- e. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD ((pasal 178, ayat (6)). DPRD DIY telah menindaklanjuti Keputusan DPRD DIY Nomor 59/K/ DPRD/ 2019 dengan melakukan input pokok-pokok pikiran DPRD mulai 6 s.d 22 Januari 2020, dan akan disempurnakan hingga 7 Februari 2020 melalui aplikasi e-planning Jogjaplan (<http://jogjaplan.com>), dimana setiap Pimpinan DPRD dan anggota DPRD DIY pada seluruh fraksi memiliki hak akses yang sama (berupa hak user-password, manual tata cara entri dan pendampingan teknis).

4.5.1 Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai Keputusan DPRD DIY Nomor 59/K/ DPRD/ 2019, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam proses serta kebijakan perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 meliputi:

1. Memberikan bahan, arahan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2021.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran Tahun 2021.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD DIY.
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY sebagai representasi masyarakat DIY.

Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat di DIY secara komprehensif.

4.5.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD

Menginjak tahun ketiga untuk mewujudkan Visi Gubernur DIY Tahun 2017-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, pada tahun 2020 masih mengangkat tiga issue strategis yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah DIY yaitu Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, serta Sumber dan Alokasi Dana Pembangunan. Ketiga issue tersebut secara tematik dituangkan dalam empat bidang permasalahan sebagai berikut:

4.5.2.1 Bidang Pemerintahan

Persoalan kebijakan pembangunan di DIY masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio Gini) dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah. Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesainya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.

Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam mendorong *good governance* dinilai masih perlu ditingkatkan. Prinsip transformasi kebijakan publik, khususnya dalam aksesibilitas *stakeholders*, pemerhati kebijakan, maupun masyarakat masih perlu diperbaiki. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat kemajuan pengelolaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan prinsip *sharing* informasi, *sharing* data, dan *sharing* kebijakan. Kemajuan teknologi informasi diyakini mampu mendorong perbaikan tata pemerintahan dimaksud.

Pemberdayaan aparatur pemerintah menjadi penting diperhatikan dengan tujuan aparatur mampu mengimplementasikan kebijakan publik dan tepat sasaran. Kendala sumberdaya aparatur harus segera diatasi dengan cara investasi pendidikan, pelatihan, maupun investasi perangkat informasi dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung kecepatan layanan publik dan partisipasi publik dalam kebijakan daerah.

Saat ini Pemerintah DIY terus berbenah diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yakni: *Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas*. Namun demikian, langkah- langkah yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini yang didasarkan pada capaian kinerja sasaran pemerintah daerah.

Sebagaimana hasil sementara yang disampaikan, untuk integritas organisasi dan nilai persepsi korupsi sudah pada hasil yang baik atau sesuai target, namun untuk nilai eksternal pelayanan publik masih kurang dari target (8,28) yang diharapkan (8,50). Dengan tidak tercapainya target terhadap nilai eksternal pelayanan publik menggambarkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan belum sesuai yang diharapkan. Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari berbagai dimensi:

- a. *Pola Pikir dan Budaya Kerja*, permasalahan yang sering ditemui adalah belum mampu menciptakan birokrat yang proporsional yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal. Implementasi Program Budaya Pemerintahan SATRIYA keberhasilan yang dicapai masih kurang maksimal. Hal itu disebabkan antara lain kurangnya pemahaman terhadap nilai filosofi luhur budaya pemerintahan SATRIYA yang bersumber dari kearifan lokal DIY,
- b. *Akuntabilitas Pemerintah*, dalam dimensi akuntabilitas masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Hal ini terbukti masih ditemukannya beberapa catatan atas hasil pemeriksaan BPK, walaupun opini yang diberikan adalah WTP. Dengan demikian sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan. Salah satu unsur pendukung akuntabilitas adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral,
- c. *Pelayanan Masyarakat*, Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara, dari capaian kinerja program masih ditemukan indikator pelayanan eksternal belum memenuhi target, walaupun hasil penilaian ORI menempatkan DIY pada zona hijau yang berarti tingkat kepatuhan tinggi,
- d. *Manajemen SDM*, Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, walaupun pemerintah DIY telah mendapatkan anugerah dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan predikat baik akan tetapi masih pada level III,
- e. *Peraturan perundangan*, Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi interpretasi, yang perlu diinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka tantangan kedepan adalah perlu membangun manajemen ASN yang mendukung pencapaian visi dan misi instansi dan memastikan identifikasi kebutuhan

pegawai lebih akurat, dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi instansi.

Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak mereka diterima menjadi pegawai sampai mereka *mengakhiri* masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjadi suatu keharusan didukung dengan membangun manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tantangan yang lain adalah menyusun kebijakan penggajian, *penghargaan* yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin untuk menjadi *reward and punishment* yang efektif dalam mendorong kinerja serta mengoptimalkan budaya kerja SATRIYA yang lebih produktif, serta menyiapkan para calon pemimpin yang dibutuhkan instansi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan membangun *talent pool* yang berkesinambungan melalui upaya peningkatan kapasitas pegawai secara konvensional maupun nonkonvensional.

4.5.2.2 Bidang Ekonomi

Menurut data BPS DIY (Feb, 2019), jumlah penduduk miskin DIY pada September 2018 sebanyak 450,25 ribu orang atau 11,81% terhadap total penduduknya. Garis kemiskinan di DIY pada September 2018 sebesar Rp414.899 per kapita per bulan. Dalam satu semester terakhir, garis kemiskinan meningkat 1,26% dari kondisi Maret 2018 yang besarnya Rp409.744 per kapita per bulan. Komoditi makanan masih mendominasi pembentukan Garis Kemiskinan dibandingkan dengan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2018, Garis Kemiskinan Makanan tercatat sebesar Rp296.077 per kapita per bulan dan kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,36%. Sementara pada saat yang sama, Garis Kemiskinan *nonMakanan* sebesar Rp118.822 per kapita per bulan dan berkontribusi sebesar 28,62% terhadap Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada periode September 2018 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan Maret 2018. Demikian juga halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengindikasikan semakin homogennya pengeluaran penduduk miskin. Sebaran penduduk miskin paling banyak di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY perlu mendorong sektor-sektor ekonomi untuk bisa tumbuh dan berkembang di kawasan pedesaan.

Berkenaan dengan angka kemiskinan dan keterkaitannya dengan pangan dan pertanian dapat tersebut dikemukakan permasalahan bidang ekonomi sebagai berikut:

4.5.2.2.1 Urusan Pangan

Permasalahan yang ditemui dalam urusan pangan antara lain:

1. Belum ada upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
2. Ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras masih tinggi.
3. Masih terdapat 7 desa rawan pangan (sama dengan 2016), yang disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena akibat kemiskinan masyarakat.
4. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar.
5. Minimnya jumlah penyuluh pertanian.
6. Belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan.

Untuk menjadi perhatian bersama, tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di DIY adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan sampai tingkat individu dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, yang berdampak positif pula pada kesehatan dan peningkatan kualitas SDM

4.5.2.2.2 Urusan Pertanian

Permasalahan yang ditemui dalam urusan ini antara lain

1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
2. Kecilnya status dan luas kepemilikan lahan
3. Tingginya alih fungsi lahan
4. Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan
5. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
6. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
7. Rendahnya NTP akibat rendahnya daya saing produk pertanian
8. Minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian semakin menurun
9. Populasi ternak mengalami penurunan, terutama pada komoditas strategis

4.5.2.2.3 Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

1. Masih minimnya tenaga kerja Handal;
2. Terbatasnya Lapangan Kerja Padat Karya;

3. Masih Tingginya Pengangguran Terdidik dan Angkatan kerja produktif;
4. Masih terbatas TKI merebut Pasaran kerja Luar;
5. Stagnasi Pembukaan Daerah transmigrasi Baru yang Produktif;
6. Masih terbatas, ketahanan ekonomi keluarga, melalui program transmigrasi

4.5.2.2.4 Urusan Kehutanan

Pada bidang perekonomian perlu juga menjadi perhatian terkait urusan pilihan Kehutanan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan
2. Hasil hutan produksi yang dikelola KPH Yogyakarta masih belum optimal
3. Masih terjadi kerusakan hutan akibat bencana alam, kebakaran hutan dan pembalakan liar
4. Belum tersedianya data potensi untuk pengembangan hutan rakyat
5. Potensi kerusakan hutan akibat dari banyaknya tingkat kunjungan wisata di sekitar hutan

4.5.2.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY
2. Pelabuhan Tanjung Adikarto dibutuhkan sebagai klaster pertumbuhan ekonomi
3. Keterbatasan SDM Kelautan dan Perikanan
4. Biaya operasional nelayan (BBM dan sarana pendingin es) cukup tinggi untuk distribusi hasil tangkapan yang terbatas dan dalam skala kecil
5. Penyediaan kebutuhan ikan di DIY masih bergantung pada pasokan dari luar
6. Konsumsi ikan masyarakat DIY relatif kecil dibandingkan dengan tingkat nasional

4.5.2.2.6 Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata yang menjadi andalan DIY tumbuh subur. Target jumlah wisatawan yang masuk ke DIY perlu dikoreksi karena pertumbuhan wisatawan yang cepat. Pemerintah daerah perlu mendorong gerakan inovasi wisata desa ataupun wisata yang memanfaatkan sumber daya alam seperti wisata hutan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan. Mendorong hutan dan sumberdaya alam lainnya untuk mendapatkan hasil dari jasa *non*hutan sangat penting, bahkan

pendapatan masyarakat sekitar hutan lebih tinggi dari sektor jasa wisata dibanding dengan hasil hutan itu sendiri.

Sektor ekonomi lain yang dikeluhkan adalah minimnya angka upah buruh di Yogyakarta dan investasi sektor formal. Minimnya upah buruh (UMR/UMK) mempengaruhi tingkat pendapatan buruh. Perlu perhatian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor perburuhan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga harus mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di DIY. Pemerintah Daerah perlu membangun kawasan-kawasan ekonomi diluar wilayah kota dan perbatasan kota.

4.5.2.3 Bidang Pembangunan

Kesenjangan ekonomi masyarakat pedesaan lebih tinggi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antara kota dan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu segera dilakukan untuk membuka aksesibilitas ekonomi masyarakat desa. Kesenjangan pembangunan menjadi persoalan utama dengan tujuan membuka jalur-jalur ekonomi masyarakat desa untuk segera bangkit dan berbenah.

Dalam program perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kawasan-kawasan pedesaan, khususnya kawasan yang berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah. Kondisi masyarakat perbatasan yang minim pembangunan infrastruktur mestinya mendapat perhatian lebih dengan tujuan untuk memudahkan aksesibilitas ekonomi untuk perkembangannya. Selama ini fasilitas jalan khususnya jalan desa banyak yang sudah rusak dan butuh perhatian.

Upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui jalur pembangunan sektoral, regional, maupun yang khusus masing-masing mengandung lima pokok perhatian, yaitu pengembangan kualitas manusianya, pengembangan sumberdaya sosial ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan pembangunan, dan penguatan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program pembangunan yang memberikan penekanan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat memiliki dimensi (ruang masalah) dan matranya (cakupan kewilayahan) sendiri, antara lain mencakup:

1. Program penanggulangan kemiskinan. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin kronis, dan matranya adalah kawasan/daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal; dan

2. Program jaring pengaman sosial. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin akibat krisis atau penduduk dengan kemiskinan yang parah, dan matranya adalah kawasan/wilayah daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal.

Berkenaan dengan bidang Pembangunan perlu menjadi perhatian masalah berdasarkan urusan sebagai berikut,

4.5.2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah, di Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten,
2. Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang dirasa masih jauh dari mencukupi. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar,
3. Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES
4. Pengendalian, pengawasan serta penertiban pemanfaatan bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal.
5. Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan.
6. Di bidang Jasa Kontruksi masih adanya mutu dan kualitas kontruksi yang sesuai standart, karena pembinaan yang selama ini dilakukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PU ESDM dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
7. Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) serta peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkan instrumen untuk pengendalian.
8. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi

lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif perlu segera dihentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kualitas lingkungan

9. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah, cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian.

4.5.2.3.2 Urusan Perumahan

Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Dan target sampai dengan 2017 sebesar 6,75%.. Adapun permasalahan pada Urusan Perumahan di DIY adalah, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni.

4.5.2.3.3 Urusan Perhubungan

1. Kemacetan. Faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta kurangnya penanganan dari pemerintah.

2. Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala.
3. Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.
4. Perlunya penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antar kecamatan dalam skala prioritas

4.5.2.3.4 Urusan Lingkungan Hidup

1. Pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.
2. Kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.

4.5.2.3.5 Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat.
2. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk
3. Terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.
4. Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD.
5. Sistem perencanaan (E-Planning) belum mengakomodir usulan yang sifatnya politis (dari DPRD)

4.5.2.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang mencapai angka 79.59 dari target 80.29 (realisasi 99.13%). Selain itu pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2018 mencapai rekor dengan angka pertumbuhan 6.2% lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Total APBD DIY tahun 2018 sebesar Rp5.544 Milyar dan agregat se-DIY sebesar Rp15.424 Milyar. Namun ada beberapa indikator penting yang setiap tahun menjadi catatan dan rekomendasi DPRD yakni Angka

Kemiskinan, Indeks Ketimpangan (Gini) dan Indeks Ketimpangan Wilayah (*Williamson*) yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta di ikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada faktor-faktor diluar kemampuan keuangan daerah yang perlu di perhatikan. Ketepatan startegi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

4.5.2.4.1 Urusan Pendidikan

Program wajib belajar 12 tahun perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Dan kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar UU 23 Tahun 2014. Dari masalah kuantitas, untuk sekolah menengah DPRD juga melihat masalah kualitas yang masih perlu di tingkatkan. Dari data jumlah pengangguran terbuka, yang pada tahun 2018 berjumlah 73.350 orang, bertambah 9.331 orang, jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 64.019 orang. Dan hal ini meningkatkan capaian TPT yang tahun 2018 sebesar 3.35% dari target 2.78% (realisasi 82.98%). Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun yang jumlahnya mencapai 89,59% naik jika dibandingkan dengan proporsi di tahun 2014 yang sebesar 78,80%. Dan pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah (SMA dan SMK) yakni 46,51%, sementara yang berpendidikan diploma dan sarjana mencapai 21,26%.

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Dilaporkan dalam LKPJ 2018 bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6567 pemuda menjadi 6784. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi kita.

Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan dan permasalahan peningkatan kualitas urusan pendidikan di DIY sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Sekolah ramah anak;
5. Pendidikan berbasis budaya;

6. Pemantapan budaya adilihung;
7. Riset budaya yang terbaru;
8. Antisipasi nilai-nilai budaya asing

4.5.2.4.2 Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan bertujuan untuk memperbaiki umur harapan hidup (UHH). UHH DIY termasuk tinggi, jika dibandingkan propinsi lain, yakni 74,87 tahun. Memang belum mencapai target yang diharapkan yakni 75.06 (realisasi 99.74%). Sejumlah parameter kesehatan terus diusahakan untuk diperbaiki, seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Pada tahun 2017 angka kasus kematian sebesar 313. Dan angka kematian balita 343 kasus. Untuk angka kematian ibu (AKI) tahun 2017 sebanyak 34 kasus. Tahun 2018 tidak ada laporan. Untuk angka prevalensi kurang energy protein (KEP) tahun 2018 sebesar 7.94% mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 8.26%

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika program dan kegiatan yang ada belum nampak hasilnya maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan;
2. Edukasi makanan sehat untuk keluarga dan siswa, belum terpadu antar *stakeholder*;
3. Perlunya pendampingan keluarga sehat
4. Kondisi RSUD & Puskesmas, yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta difabel/penyandang disabilitas.

4.5.2.4.3 Urusan Sosial

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin DIY dari target sebesar 484.947 dan tahun 2018 terealisasi sebesar 450.250 (realisasi sebesar 107,7%) perlu mendapatkan apresiasi. Walaupun secara prosentase jumlah penduduk miskin angka tersebut belum tercapai. Sebab sampai dengan September 2018 adalah 11.81% dari target 11.23%. Pemerintah DIY telah

melakukan terobosan yakni dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi dan jenjang ekonomi bagi keluarga fakir miskin dan RTSM Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan bantuan keuangan khusus merealisasikan 301 KPM PKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp 2.300.000.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi, apakah dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi wirausaha mandiri dan berapa nilai omset atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. Data jumlah penerima manfaat juga perlu disampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauhmana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Mengkondisikan DIY bebas Gepeng dan Anjal
2. Meminimalisasi, Peredaran dan bebas narkoba (keluarga, masyarakat sekolah)
3. Peningkatan peran kepemudaan, melalui program kewirausahaan;
4. Maksimalisasi dan Sosialisasi Peran kelembagaan sosial untuk masyarakat luas.

4.5.2.4.4 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menjadi perhatian terkait permasalahan/kebutuhan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perlindungan anak, belum maksimal
2. Masih terjadi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
3. Masih tingginya angka perceraian, Perlu maksimalisasi Edukasi Pra-Nikah;
4. Peningkatan kesetaraan Gender, masih Perlu Edukasi
5. Perlunya Pencegahan Nikah Usia Dini dikalangan Remaja;
6. Perlu Kampanye anti Pekerja anak-anak

4.5.3 Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berangkat dari permasalahan pembangunan di DIY dari sudut pandang DPRD disampaikan Rekomendasi dan Poko-Pokok Pikiran DPRD DIY dalam ringkasan sebagai berikut :

4.5.3.1 Bidang Pemerintahan

Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Gejolak sosial yang tak kunjung terselesaikan pasca pemilihan legislatif dan presiden.	Pembangunan program resolusi konflik seperti penguatan aparaturnya pemerintah, pembangunan wacana dalam masyarakat atau menumbuhkan forum-forum resolusi konflik dalam kelompok masyarakat atau kewargaan.
2	Munculnya sikap individual, penurunan relasi sosial, dan apatis masyarakat terhadap jalannya pemerintah dan lingkungan sosial masyarakat terutama pada generasi muda.	Melakukan tindakan preventif berupa pendidikan kewargaan bersama warga masyarakat atau kelompok sosial
3	Kemajuan teknologi meningkatkan kecerdasan pada generasi muda, tetapi mulai kehilangan etika sosial dalam masyarakat yang menyebabkan kenalakan remaja yang tak terkendalikan seperti "Klithih" sehingga menyebabkan keresahan masyarakat	Melakukan pembinaan terhadap generasi anak-anak, remaja dan kelompok kepemudaan untuk mendorong warga dan komunitas untuk mendorong kesadaran warga dan komunitas agar mengawal generasi muda dalam berkehidupan dan kesaan sosial
4	Potensi bencana alam lokal berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan kekeringan menjadi agenda sepanjang tahun	Penambahan program pendidikan kebencanaan bagi warga, khususnya program desa tanggap bencana

5	Potensi kebencanaan sering terjadi di DIY	Mewujudkan pemerintah tanggap bencana sebagai prioritas utama, meningkatkan kemampuan tanggap bencana dan solidaritas sosial pada masyarakat
---	---	--

Urusan Komunikasi dan Informatika		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang maju pesat pada era Revolusi Industri 4.0 menyebabkan akses informasi tak hanya sekadar gaya hidup, tetapi kebutuhan masyarakat karena pengetahuan internet mengubah pola pikir manusia	Investasi teknologi informasi dalam bidang pemerintahan khususnya mengenai berbagai <i>data base</i> yang bisa diakses masyarakat maupun stakeholders berupa pembangunan <i>data base digital online</i> atau pengadaan <i>server</i>
2	DIY masih kurang berinvestasi dalam teknologi informasi yang sangat diperlukan untuk berkembang dalam pemberian layanan	Pengembangan sistem informasi teknologi untuk kecepatan layanan, ketepatan layanan, efektivitas, dan efisiensi layanan, kecepatan informasi kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah
3	Minimnya investasi dan dukungan teknologi informasi untuk mendorong kemajuan tata kelola pemerintahan (pengembangan konsep data base terpadu tingkat D.I. Yogyakarta –Kabupaten/Kota)	Pemerintah daerah D.I.Yogyakarta berinvestasi dalam pengembangan <i>software</i> , pengadaan server terpadu, sistem dan base terpusat untuk layanan publik atau kebijakan lainnya dari tingkat D.I. Yogyakarta hingga Kabupaten/Kota

Urusan Keuangan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Kurangnya kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan meratanya layanan publik oleh aparaturnya daerah, khususnya OPD	Pengembangan dan peningkatan transparansi keuangan dan kebijakan publik melalui peningkatan kinerja dan kredibilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
2	Lambannya pelayanan masyarakat di tingkat desa	Penguatan layanan pada warga, khususnya desa untuk mengaplikasikan teknologi informasi dalam pemberian layanan
3	Kurangnya investasi pemerintah desa dalam investasi teknologi informasi	Investasi layanan informasi maupun administratif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Dilakukannya perluasan tata ruang dan wilayah pembangunan di selatan-selatan DIY	Ditetapkannya area-area konservasi, khususnya konservasi tanah dan air
2	Pembangunan bandara NYIA yang berdampak kepada kemajuan infrastruktur pembangunan daerah terkait perubahan kawasan ekonomi untuk investasi daerah	Perubahan kebijakan tata ruang dan wilayah menyangkut pertanahan dilaksanakan dengan arif dan bijaksana
3	Perubahan peruntukan kawasan, khususnya lahan produktif untuk ketahanan pangan dan area konservasi	Prinsip dasar perlindungan tanah-tanah produktif untuk ketahanan pangan tetap dilindungi dan ditetapkan sebagai jalur hijau

4	Belum terselesaikannya dokumen untuk peruntukan kawasan yang ada di DIY	Pelengkapan dokumen tata ruang dan peruntukannya di berbagai kawasan sebagai pijakan pembangunan kawasan harus segera diselesaikan

Urusan Keistimewaan DIY		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Belum terselesaikannya regulasi untuk mempercepat program-program Keistimewaan DIY atau otonomi khusus	Arah kebijakan pada penyusunan RKPD 2021 adalah Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI Yogyakarta
2	Kritik warga terhadap jalannya program dan kegiatan dalam koridor Keistimewaan DIY yang dirasa belum tepat sasaran karena masih banyak berupa infrastruktur kebudayaan dibandingkan dengan pembangunan nilai-nilai Keistimewaan DIY	Perwujudan pembangunan keistimewaan DIY dengan berlandaskan semangat keistimewaan untuk mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya, Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
3	Kurang maksimalnya proses penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan DIY	Arah kebijakan untuk Keistimewaan DIY bersifat pemberdayaan dan pembangunan nilai-nilai budaya DIY untuk menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan kewargaan. Pemerataan capaian program dan kegiatan agar bisa dinikmati oleh banyak warga atau komunitas kewargaan.

		Pengembangan teknologi dan informasi juga diperlukan dalam mendorong proses transparansi dan akuntabilitas
4	Bidang Keistimewaan Yogyakarta, masih banyak kritik muncul dari masyarakat tentang konsep perencanaan program dan kegiatan yang masih berkuat pada infrastruktur kebudayaan, tetapi belum mengarah pada pengembangan nilai-nilai kearifan lokal budaya Yogyakarta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu target <i>goal</i> Keistimewaan Yogyakarta	Mendorong pembangunan nilai-nilai kearifan lokal dan kesejahteraan warga dalam konteks program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta

Urusan Sekretariat Daerah		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Belum optimalnya sumberdaya aparatur pemerintahan (ASN) dalam membangun layanan publik ataupun dalam menjalankan tata kelola pemerintahan	Memperkuat sumberdaya ASN, khususnya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan, layanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik
2	Belum adanya system kebijakan berupa data terpadu untuk model <i>one map</i> dan <i>big data</i> sebagai pusat informasi layanan pemerintahan dan data base, khususnya kebijakan satu arah antara tingkat D.I Yogyakarta dan kabupaten/kota (seperti perijinan, data kemiskinan, dan lainnya)	Membangun system perencanaan dan penganggaran dalam membangun program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta yang mengakomodir multi stakeholders

4.5.3.2 Bidang Ekonomi

Urusan Pertanian		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif	Memberikan insentif pada pemilik hewan
2	Peningkatan produksi tanaman pangan belum berimplikasi pada kesejahteraan petani	Meningkatkan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon permintaan dan peluang pasar
3	Banyak komoditas penting belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY	Membuat sentrapengembangan komoditas pendukung industri pangan khas DIY (nangka, singkong, kacang hijau dan kedelai)
4	Peningkatan populasi ternak masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan ternak kepada rumah tangga miskin - Membuat sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak
5	Meningkatkan pemasaran hasil pertanian yang langsung bisa <i>aksesseble</i> terhadap konsumen	Memberikan bantuan ternak kepada rumah tangga miskin dan membuat sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak
6	Minimnya database hasil pertanian produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Mendidik petani muda untuk <i>aksesseble</i> terhadap teknologi informasi pemasaran dan mendorong penggunaan teknologi start up untuk petani lokal D.I. Yogyakarta - Membuat sisitem <i>data base</i> lahan pertanian produktif dan hasilnya untuk perlindungan terhadap lahan pertanian

7	Berkurangnya lahan produktif pertanian, menurunnya daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Proteksi atas lahan pertanian produktif, dan pemulihan kawasan konservasi tanah dan air - Mendorong program – program ketahanan pangan, peningkatan hasil pertanian, pengembangan teknologi pasca panen
---	---	--

Urusan Pangan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam, masih tergantung pada beras dan/ atau terigu	Masyarakat, terutama keluarga miskin, difasilitasi untuk dapat menghasilkan sendiri bahan pangan <i>non</i> beras dan/atau terigu
2	Di DIY masih ada Desa Rawan Pangan	Meningkatkan pengadaan bahan pangan dan memperlancar distribusi pangan sampai ke seluruh rumah tangga
3	Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) masih rendah	Perlu secara terus menerus dilakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang memiliki akses langsung ke masyarakat. Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan terutama di lingkungan pendidikan anak

Urusan Kelautan dan Perikanan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Pengembangan perikanan budidaya belum dilakukan secara optimal	Untuk meningkatkan produksi ikan budidaya, maka harus diperluas arealnya. Potensi sawah, tambak, jaring apung, dan tenaga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat pembudidayaan ikan. Lahan tambak udang puluhan hektar yang tergusur oleh area bandara di Kulonprogo harus segera dicarikan alternatif tempat yang lebih luas dan strategis.
2	Banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat ikan untuk pemenuhan gizi	Sosialisasi Gemar Makan Ikan harus terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat. Jalur pendidikan harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan sosialisasi kepada para siswa di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang memiliki halaman yang cukup, dapat juga dimanfaatkan untuk pembuatan kolam ikan.
3	Belum banyak kegiatan konservasi budidaya ikan di sungai, baik melalui keramba atau di alam liar sebagai pelestarian ikan endemik lokal	Perlu dilaksanakan perawatan atau konservasi sungai sungai di Yogyakarta dengan cara pendalaman sungai, perlindungan tanah sekitar sungai, konservasi kawasan hulu, dan penyebaran benih ikan endemik lokal sebagai upaya pelestarian ikan dan budidaya ikan alam liar.

Urusan Kehutanan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Produksi minyak kayu putih menurun	Untuk menjaga peran produk minyak kayu putih sebagai penyumbang PAD yang signifikan, maka harus terus dilakukan pengkayaan tegakan/populasi dan perluasan areal tanaman kayu putih produktif.
2	Pengelolaan hutan negara belum dilakukan secara optimal	Selain pinus, jati, dan kayu putih yang saat ini mendominasi populasi hutan negara, Pemda DIY perlu mempertimbangkan untuk menanam komoditas tanaman hutan lainnya, yang cepat tumbuh dan berproduksi, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan
3	Masyarakat sekitar hutan masih banyak yang belum sejahtera	Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus menjamin keamanan hutan dari tindakan pengrusakan maupun pencurian.
4	Area hutan konservasi makin berkurang	Mempertahankan dan menambah luasan hutan konservasi
5	Pengawasan, perlindungan dan pelestarian hutan.	Mempertahankan kawasan hutan di Yogyakarta, baik hutan rakyat, hutan negara, ataupun hutan dengan status kawasan lainnya.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Minat masyarakat terhadap koperasi sangat rendah karena dianggap kurang dapat bersaing dengan pelaku usaha <i>non</i> koperasi	Mendorong koperasi pada sektor riil
2	Rendahnya kapasitas dan kompetensi para pengurus dan pengelolanya	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi
3	Peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil dan sedikitnya usaha besar serta terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	Program pengembangan informasi teknologi untuk pemasaran
4	UMKM dan Koperasi tidak mampu bersaing di era ekonomi modern	Membangun industri kreatif, khususnya pengolahan hasil sumberdaya pedesaan yang berpijak pada kekuatan sumberdaya manusia

Urusan Penanaman Modal		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Pertumbuhan ekonomi di DIY masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang mencapai 12,15%	Penyusunan Rencana induk Penanaman Modal potensi lokal

2	Ketertinggalan DIY dalam menarik investor, dan masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saja	Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata terutama di daerah pesisir selatan
3	Kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan perizinan	Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih antar instansi
4	Minimnya investasi di kawasan pedesaan	Penciptaan kawasan industry pedesaan untuk memperkuat ekonomi pedesaan. (clusterisasi industry pedesaan)

Urusan Pariwisata		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 hanya sebesar 7% yang disebabkan oleh kemungkinan adanya kejenuhan wisatawan terhadap daya tarik wisata yang ada	Diperlukannya pengembangan pariwisata yang <i>sustainable tourism development</i>
2	Terjadi ketimpangan antarwilayah terhadap komposisi persentase kunjungan wisatawan	Diperlukannya penatanaan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi daya tarik wisata
3	Terjadinya penurunan lama tinggal wisatawan yang menyentuh angka 1,9 hari	Diperlukan aspek pemberdayaan berbasis komunitas dengan pendekatan desa wisata sehingga mendorong pelestarian lingkungan dan tradisi budaya lokal

Urusan Perdagangan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Perkembangan sarana perdagangan modern yang lebih pesat dibandingkan pasar tradisional	Pengembangan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat Pengelolaan sektor perdagangan akan tidak terjadi marjinalisasi pelaku usaha kecil

Urusan Perindustrian		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Partumbuhan industri lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB	Peningkatan nilai tambah produk lokal
2	Indusktri kreatif di DIY mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan sektor industri pengolahan sebagai sektor dominan di DIY dan didukung potensi sumberdaya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa - Memberikan dukungan komunitas intelektual di DIY untuk membuka peluang inovasi produk dan variasi

Urusan Perekonomian Penduduk		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Kesenjangan ekonomi desa – kota , Angka pengangguran terbuka tinggi dan UMR rendah.	Membuka investasi dengan sifat padat modal, padat karya dan ramah lingkungan, khususnya di kawasan pedesaan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat desa – kota

4.5.3.3 Bidang Pembangunan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	<p>Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawa Tengah di Kabupaten Gunungkidul Dengan kabupaten Wonogiri, kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten. Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari mencukupi. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar,</p> <p>Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES Pengendalian, pengawasan serta penertiban pemanfaatan bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal.</p> <p>Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara</p>	<p>peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil,</p> <p>pedalaman, perbatasan.</p> <p>pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (<i>pro- growth</i>), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (<i>pro-job</i>), dan mengentaskan kemiskinan (<i>pro-poor</i>). Upaya untuk Peningkatan jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga berakibat dapat meningkatkan segi sosial ekonomi. Terutama terfokus pada peningkatan jalan dan jembatan pedesaan.</p> <p>pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumberdaya air lainnya, maupun pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainnya serta upaya untuk pengendalian banjir.</p>

<p>kwantitatif maupun kualitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan.</p> <p>Di bidang Jasa Kontruksi masih adanya mutu dan kualitas kontruksi yang sesuai standart, karena pembinaan yang selama ini dilakukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PU ESDM dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.</p> <p>Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) serta peraturan Zonasi(PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkanya instrumen untuk pengendalian .</p> <p>Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kualitas lingkungan Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta</p>	<p>Pengembangan Sistem Pengelolaan air minum Pedesaan (SPAMDES) terutama bagi daerah daerah yang sering dilanda kekeringan.dalm rangka memperluas penyediaan air baku. Pengelolaan persampahan serta pengelolaan air limbah, terutama untuk limbah rumah tangga.</p> <p>Perencanaa tata ruang dalam rangka untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah RTRW untuk menghindari konversi lahan produktif dalam rangka mencegah gradasi ekosistem dan lain lain.</p>
---	---

	turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah, cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian.	
2	Penataan tata ruang yang belum optimal dan belum berkeadilan sosial	Membangun tata ruang pedesaan yang akses-able terhadap pengembangan ekonomi pedesaan
3	Kesenjangan infrastruktur pembangunan kota-desa	Mempercepat ketertinggalan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk keadilan sosial dan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi pedesaan

Urusan Perencanaan Pembangunan daerah		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	<p>Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat.</p> <p>Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/ pemangkasan berbagai usulan yang masuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembangunan ekonomi. - Perencanaan pengembangan wilayah. - Perencanaan pembangunan pemerintahan. - Pengembangan data dan informasi. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. - Perencanaan pengembangan wilayah tertinggal. - Perencanaan pembangunan ekonomi, serta pengembangan

	<p>Terjadi perubahan/ tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.</p> <p>Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD.</p> <p>Sistem perencanaan (<i>E-Planning</i>) belum mengakomodir usulan yang sifatnya politis (dari DPRD).</p>	<p>kawasan-kawasan perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi implementasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD). Evaluasi sistem <i>e-planning</i> yang belum terbuka bagi sistem perencanaan dari jalur politis (DPRD)
--	---	---

Urusan Perumahan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	<p>Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni.</p>	<p>Ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat untuk bersama sama dalam perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan, rencana dan program bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.</p> <p>Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni. Ditargetkan tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni dibawah 6%.</p>

Urusan Perhubungan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Kemacetan. Faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta kurangnya penanganan dari pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. - Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo.
2	Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. - Peningkatan pelayanan angkutan . - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
3	Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - management rekayasa lalu lintas. - pengendalian dan pengamanan lalu lintas. - pembangunan lampu penenrangan jalan, pagar pengaman jalan serta <i>traffic light</i> pada daerah daerah persimpangan yang padat .

		<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota antar propinsi maupun antar kota dalam propinsi terkait dengan keselamatan penumpang.
4	Penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antar kecamatan dalam skala prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan sistem transportasi massal serta penataan transportasi perkotaan. - Penambahan armada angkutan orang di jalan (bus transportasi) - pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. - penataan, pembinaan maupun pengendalian angkutan nonkendaraan bermotor.

Urusan Lingkungan Hidup		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. - perlindungan dan konservasi sumber daya alam. - peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2	Kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan ruang terbuka hijau.

		<ul style="list-style-type: none"> - kaderisasi lingkungan hidup - pengelolaan sampah mandiri.
3	Menurunnya daya dukung lingkungan karena dampak pembangunan (debit air permukaan setiap tahun menurun) dan menyebabkan air bersih mengalami kelangkaan. Bencana alam lokal (banjir dan kekeringan)	Menerapkan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan mengutamakan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan

4.5.3.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Urusan Pendidikan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Terdapat 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya.	Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun
2	Data penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat sd mencapai 30,81%, yang tamat SLTP 44,95%, dan yang tamat SLTA 24,24%. Penduduk usia 15 tahun yang tidak bekerja 32,27%, bekerja di sektor informal 46,37%, dan bekerja di sektor formal 21,37%. Terdapat korelasi antara data kemiskinan dan data pengangguran serta jumlah anak yang tidak diketahui status pendidikannya	Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya
3	Tingginya pengangguran usia muda dan usia produktif dimana didominasi oleh pendidikan menengah (SMA dan SMK) yaitu 46,51%	Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja

4	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di kawasan pendidikan	Penambahan infrastruktur pendidikan dan fasilitasi program belajar mengajar sekolah

Urusan Kesehatan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan Umur Harapan Hidup yang dilator belakang oleh parameter kesehatan. Oleh karena itu, parameter kesehatan harus diperbaiki. Sulitnya menekan angka kematian ibu, bayi dan balita disebabkan oleh kondisi 3T(terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapatkan pertolongan)	Meningkatkan layanan dasar kesehatan, berupa sarana Rumah Sakit dengan standar dan pemerataan tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan wilayah tertinggal untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk
2	Pada 2018 masih terdapat prevalensi penyakit menular (berada di bawah angka nasional), penyakit tidak menular (melebihi angka nasional), dan penyakit HIV AIDS dan TB yang terus bertambah	Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (Kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan berkecukupan kalori
3	Terjadinya kesenjangan di sarana pelayanan kesehatan	Peningkatan layanan posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia

4	Minimnya layanan rumah sakit dan puskesmas, khususnya dokter spesialis dan sarana rawat inap pasien di kawasan pedesaan dan perbatasan	Penambahan jumlah layanan rawat inap, rumah sakit dan dokter spesialis di kawasan pedesaan, khususnya dokter spesialis untuk memperpendek layanan kesehatan
---	--	---

Urusan Sosial		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Kemampuan DIY dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dengan realisasi sebesar 107.7%	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng, dan PMKS lainnya - Perbaikan data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/eksklusi)
2	Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan pemerintah terkait KPM PKH yang melalui tahap-tahap sehingga sudah bisa mandiri	Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk hasil yang baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel
3	Belum maksimalnya target dan capaian angka pengurangan kemiskinan yang ditargetkan	Perlu terobosan baru dan inovasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam mengurangi angka kemiskinan.
4	Minimnya program dan hibah sosial ke warga	

Urusan Kebudayaan		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Perintah UUK, di Bidang Budaya;	Peningkatan sosialisasi UUK dibidang Kebudayaan;
2	Secepatnya ada turunan regulasi terkait tentang Budaya, Peraturan Pelaksanaan	Menggali Nilai-nilai Orsinilitas Budaya DIY;
3	Perlu peningkatan Pemahaman pada masyarakat tentang UUK dibidang kebudayaan	Melakukan Penguatan Nilai-nilai Budaya Utama dlm seluruh aspek Kehidupan masyarakat DIY;
4	Kebudayaan masih dipahami dalam terminologi sempit.	Pengawalan & Peningkatan Fasilitas perekayasaan Budaya; Peningkatan fasilitas Maintenance dan Riset Budaya
5	Budaya, sebagai “Roh keistimewaan”	“Perumusan nilai-nilai Budaya”, sebagai Roh Jogja Istimewa
6	Melahirkan “Maskot Budaya” atau simbol Jogja Istimewa	Merumuskan identitas Budaya yang khas Yogyakarta.

Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Masih lemahnya Pemahaman regulasi tentang Kependudukan dan KB;	Peningkatan Fasilitas dalam rangka percepatan Implementasi UU No.52 tahun 2009

2	Masih rendahnya motivasi dan skill tenaga Lapangan yg terkait Pengendalian Penduduk & KB;	Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan dan KB;
3	Masih tingginya angka kelahiran dan Lajunya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian dan penurunan lajunya pertumbuhan Penduduk secara terpadu
4	Masih rendahnya minat Usia subur untuk memasang alat Kontrasepsi	Mendorong Penurunan angka kelahiran Total (TFR) dan Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
5	Berkurangnya peserta KB produktif;	Mendorong jumlah Peserta KB
6	Masih rendahnya Pemahaman tentang Reproduksi, dikalangan Usia Subur dan remaja.	Diperlukan langkah-langkah efektif utk Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS)

Urusan Transmigrasi		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Masih Ada Kesenjangan Pemahaman tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Transmigrasi;	Diperlukan pemahaman baru dan re-konseptualisasi terkait dengan Program Transmigrasi;
2	Masih minimnya kesiapan Calon Peserta Transmigrasi	Diperlukan Penyiapan dan pendekatan bari bg Calon Peserta Transmigrasi secara alamiah
3	Masih Ada mis komunikasi antara masyarakat calon Peserta dengan Pemerintah, selaku penyelenggara program	Perlu peningkatan sosialisasi dan pemahaman secara utuh dan mencerahkan Diperlukan langkah-langkah Public Hearing, dengan masyarakat lokasi tujuan, agar tercipta

		harmoni antar warga; dg warga pendatang
4	Terus Menurunnya animo masyarakat utk ambil bagian program Transimigrasi, baik secara mandiri atau langsung dikelola pemerintah	Peningkatan motivasi dan stimulant bagi Calon transmigrasi, agar memiliki kemauan dan tekad untuk bertansmigrasi
5	Masih lemahnya pengelolaan program secara profesional	Diperlukan langkah-langkah strategi untuk peningkatan pengeliolaan program secara profesional

4.5.3.5 Pokok-pokok Pikiran Spesifik Terkait Program Strategis

Program Strategis		
No.	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	159 dusun sulit air prioritas 1, 350an dusun sulit air prioritas 2, ratusan dusun sulit air prioritas 3. Daerah Sulit air tidak bisa dilakukan pengeboran sumur dalam	Dusun sulit air P1 harap selesai 2022 Dusun sulit air P2 dan P3 selesai maksimal 2024
2	Kemiskinan kondisi terbawah	<ul style="list-style-type: none"> - Diprioritaskan dengan program nyata dan anggaran memadai - Berkoordinasi dengan kabupaten/kota - Kelompok sulit diintervensi kecuali dengan program sosial pemerintah - Validasi data dan ketetapan program - Jumlah sekitar 4%

3	<p>Permasalahan RTLH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data tidak valid sehingga perlu verifikasi, sehingga anggaran 2019 tidak terlaksana 26M - Mekanisme yang sulit (karena berupa bantuan barang) 	Perlu dilakukan anggaran sesuai RPJMD dan mempermudah mekanisme
4	<p>Permasalahan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan rumah di DIY: 252000 unit, 60% merupakan MBR - Ketersediaan lahan yang wajar untuk MBR sulit karena harga lahan sangat tinggi - Anggaran 2019 tidak terlaksana 5 M, padahal dirintis sejak 2017 - Dukungan kebijakan perda RP3KP pemda sediakan 2000 HA lahan untuk perumahan, hanya ada 200 HA eksisting untuk MBR 	Proses dan penganggaran terkait MBR: penyediaan lahan dan pelaksanaan pembangunan prototype kawasan
5	<p>Penanganan masalah sosial remaja dan keluarga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan klitih yang sangat memprihatinkan - Masalah sosial keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program sebagai implementasi perda ketahanan keluarga dengan sasaran remaja dan orangtua dan melibatkan aparat - Dilakukan program khusus untuk remaja rawan kenakalan
6	<p>Pelayanan dan penjaminan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problem BPJS - Antrian Rumah sakit yang sangat lama - Tidak diketahuinya informasi aksesibilitas rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Jamkesos terkait anggaran dan kemudahan akses - Perbaikan pelayanan rumah sakit pada sistem rujukan dan antrian - Perbaikan sistem informasi - Perbaikan program promotif dan preventif
7	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan pendidikan untuk sekolah menengah atas - Kepastian pendidikan gratis untuk warga tidak mampu di sekolah negeri maupun swasta - Sarana prasarana pendidikan memadai

		<ul style="list-style-type: none"> - Perhatian pada pendidikan <i>nonformal</i>
8	Pernasalahan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di pedesaan melalui reduksi sampah dengan sistem swadaya masyarakat berbasis pedesaan/desa - Solusi pemusnahan sampah di TPST Piyungan
9	Masalah Becak Motor dan Kayuh	<ul style="list-style-type: none"> - Konversi becak listrik prototype - Konversi becak listrik sistematis secara missal - Angkutan wisata dengan integrasi sistem wisata perkotaan
10	Dana Keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi peran danais untuk pencapaian RPJMD - Pengalihan urusan yang bisa didanai danais - Pemerataan danais hingga desa dan dusun
11	Penyusunan dan Sistem Evaluasi RKPD/APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap program konsisten korelasinya dengan RKPD, secara terukur - Mohon target RPJMD tentang kemiskinan, ketimpangan, dan gini ratio, masing-masing disendirikan pengelompokan programnya karena belum tercapai RPJMD agar bisa dievaluasi - Poin-poin program kegiatan dibuat cascade atau bagan terkait hubungan dan kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD - Pimpinan DPRD mengevaluasi usulan berdasarkan pokok-pokok pikiran dan RPJMD sebelum dilakukan proses pembahasan APBD

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2021

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut,

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan masuk kategori tinggi bila diukur berdasar skala internasional. Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia. Pada tahun 2021, nilai IPM Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 86,97.

5.1.2 Nilai PDRB

Nilai PDRB pemerintah Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 30.843.840,89 pada tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022). Peningkatan kinerja ekonomi selama periode 2017 – 2022 antara lain didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana berupa proyek-proyek besar antara lain terkait Kawasan Malioboro, dan Kawasan Kota Baru (2018, KEKR BI Yogyakarta, 2018). Pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang tahun 2017 – 2022 adalah 5,51% per tahun.

5.1.3 Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022) ditargetkan turun menjadi 6,00%. Adapun proyeksi RPJMD Kota Yogyakarta sebesar 7,34% (2020). Data BPS tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,84% menurun sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya. Rendahnya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta disebabkan telah mencapai dasar (*hard core poverty*), dimana sudah semakin sedikit penduduk miskin yang bisa dilakukan intervensi. Selain itu, penduduk miskin yang akan disasar pun sudah semakin sulit karena telah mencapai dasarnya. Penduduk miskin yang berada di level menengah masih bisa dilakukan pemberdayaan. Seperti program-program pelatihan

untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kewirausahaan, dan sebagainya. Tetapi bagi penduduk miskin yang berada di level paling bawah, tidak mudah untuk membuat mereka menjadi produktif. Hal yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan dasar yang bersifat karikatif misalnya kelompok manula, penyandang penyakit kronis, dan sebagainya.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2021

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut,

5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2021, nilai IPM Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 81,08. Capaian nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, maka nilai IPM Kabupaten Bantul berada di atas Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo tetapi berada di bawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan dengan program/kegiatan yang

1. mendukung peningkatan pengeluaran riil perkapita misalnya berupa
 - a. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat.
 - b. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu.
 - c. Validasi data warga kurang mampu.
2. mendukung perluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin, pemenuhan pemenuhan standar nasional pendidikan serta mendorong peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini.

5.2.2 Nilai PDRB

Perekonomian Kabupaten Bantul ditargetkan memiliki nilai PDRB pada tahun 2021 sebesar 21.666.807,78 (RPJMD DIY 2017-2022). Pertumbuhan ekonomi Bantul didukung dengan pembangunan beberapa infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan Outer Ringroad dan akses menuju Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Kawasan Industri, Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan SPAM Regional, Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Stasiun *Interchange*. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan

ekonomi kabupaten Bantul sehingga mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022.

Selain itu, Bantul dapat mendorong pertumbuhan dengan

1. Peningkatan daya saing produk daerah.
2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat
3. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata.
4. Akselerasi pengembangan industri kreatif.
5. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
6. Pengembangan peternakan berbasis industri.
7. Peningkatan produksi perikanan.
8. Pengembangan investasi yang menghubungkan industri dengan klaster pendidikan. Industri pendukung tumbuhnya institusi pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.

5.2.3 Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 8,32 pada tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022). Kabupaten Bantul telah membuat perhitungan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 5 tahun mendatang. Merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2022, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 12,13%, Tahun 2019 sebesar 10,86%, tahun 2020 sebesar 9,59%, tahun 2021 sebesar 8,32 .

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 13,43%. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 12,92%. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.51 poin. Hasil ini menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah ini berada di peringkat ketiga setelah Kulon Progo dan Gunungkidul. Tingkat capaian penanggulangan kemiskinan ini masih bisa terus ditingkatkan. Peluang untuk melakukannya pun terbuka lebar sebab masih banyak masyarakat miskin yang dapat disasar dengan beragam intervensi.

Apabila ingin mencapai target penduduk miskin DIY sebesar 7% pada tahun 2022, total penurunan kemiskinan Kabupaten Bantul yang harus dicapai dalam 5 tahun sebesar 5.83%. Perincian laju penurunan kemiskinan

setiap tahunnya adalah 1.13% (tahun 2018), 1.44% (tahun 2019), 1.23% (tahun 2020), 1.04% (tahun 2021), dan 0.99% (tahun 2022).

Upaya kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Bantul di antaranya terkait,

1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan setempat
2. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, serta validasi data keluarga miskin
3. Implementasi Makaryo Mbangun Deso yang menjadi falsafah pembangunan desa di Bantul

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2021

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut,

5.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Kulon Progo senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berada di atas level IPM Nasional. Tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, IPM Kabupaten Kulon Progo masih relatif rendah. Pada tahun 2021, nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 74,88.

Dalam rangka meningkatkan IPM, Kabupaten Kulon Progo dapat melaksanakan intervensi kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter dengan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap;
2. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat ;
3. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;

5.3.2 Nilai PDRB

Nilai PDRB pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 9.425.908,70 pada tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022). Capaian Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo hingga tahun 2019 mencapai tingkat paling tinggi dibandingkan ke empat daerah lainnya mengingat besaran nilai investasi proyek fisik terakumulasi paling tinggi di Kulonprogo yang berupa Pembangunan Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan akses menuju YIA, Pembangunan SPAM Regional, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan Stasiun Interchange, Pembangunan Terminal Barang dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulonprogo sehingga mencapai rata-rata 6,06% per tahun selama periode 2017 – 2022. Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2016-2022, target pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tujuan dengan target 4,76 (2016) - 5,32 (2021). Dari data ditemukan bahwa sektor konstruksi menyumbang besarnya pertumbuhan ekonomi ini. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mengupayakan agar angka pertumbuhan yang besar ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian ketimpangan antar sektor ekonomi maupun ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diantisipasi.

5.3.3 Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 10,89 pada tahun 2021 turun dari 12,94% (2020; RPJMD DIY 2017-2022). Target kemiskinan Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari target yang ditetapkan DIY maupun Nasional, hal tersebut disebabkan karena tingkat kemiskinan di Kulon Progo sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan DIY maupun Nasional. Apabila dicermati, tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo per tahun sangatlah kecil walaupun telah dilakukan intervensi yang melibatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, maupun pihak swasta.

Alasan mengapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016 selalu berada di atas DIY antara lain disebabkan oleh kondisi alam yang tidak begitu mendukung dan kegiatan investasi yang masih relatif rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Namun dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, diperlukan penyesuaian target kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota DIY, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil perhitungan angka

kemiskinan yang dapat dijadikan proyeksi dalam rangka mendukung angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, maka untuk tahun 2018-2022 target kemiskinan yang harus dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah 17,03% pada tahun 2018, 14,98% pada tahun 2019, 12,94% pada tahun 2020, 10,89% pada tahun 2021, dan 8,85% pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut maka rerata laju penurunan kemiskinan tiap tahunnya sejak tahun 2018 adalah sebesar 2,04%

Apabila melihat arah pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dimana terdapat beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru internasional, Pelabuhan Tanjung Adikarta, dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan, target angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai. Selain itu, perlu adanya peningkatan skill (ketrampilan), peningkatan kualitas pendidikan yang memenuhi kualifikasi pasar kerja, perluasan lapangan pekerjaan yang melibatkan masyarakat sekitar, serta evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk melihat efektivitas program. Program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan. Strategi dalam rangka penurunan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan,

1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo;
2. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;
3. Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat ;
4. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif ;
5. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
6. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat ;
7. Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.

5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2021

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut,

5.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk Kabupaten Gunungkidul, dari faktor pembentuk IPM, pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM yang ada, diantara kabupaten/kota yang ada di DIY, pendidikan di Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan terbawah selain dari aspek pendapatan riil per kapita. Oleh karena itu, fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul harus menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal. Pada tahun 2021, nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul ditargetkan sebesar 71,12 atau paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY tetapi sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah Provinsi, perlu dilakukan intervensi pada sisi pengeluaran riil per kapita serta akses pendidikan, dengan pertimbangan bahwa untuk aspek angka harapan hidup dan harapan lama sekolah rerata di DIY sudah relatif baik. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memberikan perhatian pada kecamatan-kecamatan dengan rerata IPM rendah antara lain, Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Purwosari, Ngawen, Panggang, Nglipar, Girisubo, Saptosari dan Gedangsari ⁵

5.4.2 Nilai PDRB

Nilai PDRB pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditargetkan sebesar 15.259.748,45 pada tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022). Pertumbuhan PDRB didorong antara lain oleh pelaksanaan proyek-proyek besar infrastruktur yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan Jalur Pansela, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama. Pembangunan di berbagai sektor terutama infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul selama periode 2017 – 2022.

5.4.3 Kemiskinan

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta ditargetkan sebesar 8,07% (RPJMD DIY 2017-2022). Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan DIY diharuskan untuk dapat diturunkan menjadi 7%. Maka untuk mencapai keberhasilan target sasaran provinsi yang turun menjadi 7% di tahun 2022

⁵ Indeks Pembangunan Manusia Per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, BPS DIY dan BAPPEDA DIY dalam , Kemiskinan dan Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (SEBERMAS) – Bappeda DIY.

harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang diintervensi pada tiap kabupaten/kota. Hal ini agar dapat bersinergi dan berkesinambungan antara penurunan kabupaten /kota dan penurunan provinsi.

Dalam rangka mendukung sasaran provinsi tersebut, Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 10,83. Adapun angka kemiskinan RPJMD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 adalah 15,60. Perlu dilakukan sinergi perhitungan provinsi dan Kabupaten Gunungkidul terkait angka kemiskinan. Jumlah target kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018-2022 yang tertuang di dalam RPJMD Gunungkidul adalah sebagai berikut: 18,31% (tahun 2018), 17,40% (tahun 2019), 16,50% (tahun 2020), 15,60% (tahun 2021), dengan laju sasaran penurunan kemiskinan tiap tahunnya sebesar 0,9%.

Kecamatan Saptosari, Tanjungsari, dan Gedangsari tiga kecamatan dengan status kesejahteraan terendah Kabupaten Gunungkidul (tahun 2016 berdasar RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021) perlu mendapat intervensi yang dalam hal ini melalui program-program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul antara lain :

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,
3. Program Penanggulangan Kemiskinan
4. Program Pengurangan Pengangguran

5.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2021

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut,

5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80). Pada tahun 2021, nilai IPM Kabupaten Sleman ditargetkan sebesar 83,49.

5.5.2 Nilai PDRB

Nilai PDRB pemerintah Kabupaten Sleman ditargetkan sebesar 39.531.605,34 pada tahun 2021 (RPJMD DIY 2017-2022). Proyek-proyek fisik besar dapat memberikan kontribusi besar pada pencapaian kinerja ekonomi tersebut.

Proyek-proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan *Underpass* Gejayan, Pembangunan Tol Solo-Jogja-Bawen, Pengembangan SPAM Regional, Pembangunan Stasiun *Interchange*, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017 – 2022 adalah 5,75%.

5.5.3 Kemiskinan

Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk tertinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY sehingga hal tersebut menjadi tantangan maupun peluang tersendiri untuk menurunkan angka kemiskinan. Selama kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2012-2017 angka kemiskinan Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua terbaik setelah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar 7,41 % (BPS Provinsi DIY, 2020).

Cukup baiknya prestasi yang telah dilakukan Kabupaten Sleman terkait penurunan angka kemiskinan perlu ditingkatkan kembali, bahkan memerlukan daya ungkit yang lebih besar. Tingkat kemiskinan Sleman pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,01, mengingat target angka kemiskinan yang dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 yaitu sebesar 7% pada akhir periode RPJMD (tahun 2022). Upaya kebijakan yang dapat dilakukan antara lain dengan

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
3. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya;
4. Meningkatkan pengelolaan kawasan Permukiman kumuh;
5. Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat.

5.6 Pendekatan Fokus Tematik

Pemda DIY merencanakan program kegiatan tematik yang dapat diselaraskan dengan perencanaan kabupaten/kota sebagai berikut,

5.6.1 Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan

Program/kegiatan tematik untuk Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut,

Tabel 5-1 Program/Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. Pembangunan Manusia Unggul	KESEHATAN	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Rp 37.146.810.500,00	Cakupan Jamkes Penyangga	100%	Dinas Kesehatan
2	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.800.000.000,00	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	6 Kelompok	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	Rp 75.000.000,00	Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY)	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 22.815.000.000,00	Pemutakhiran Data RTLH Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan kualitas : 1. Kab. Gunungkidul 464 unit 2. Kab. Kulonprogo 121 unit 3. Kab. Bantul 313 unit 4. Kab Sleman 67 unit 5. Kota Yogya 35 unit Pembangunan Baru : 1. Kab Gunungkidul 11 unit, 2.Kab. Kulonprogo 11 unit. 3. Kab. Bantul 54 unit 3. Kab Sleman 24 unit	1 dokumen 1000 unit PK 100 unit PB	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Pengembangan Perumahan	Rp 200.000.000,00	Rekomendasi Kebijakan PKP (Pokja)	1 laporan, rincian target pelaksanaan Kegiatan Dewan PKP dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Buku Rencana Perda RP3KP	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Rp 2.647.202.500,00	01. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	150 org	Dinas Sosial
7	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Rp 2.162.330.000,00	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia 02. Bantuan permakanaan lanjut usia terlantar 03. Fasilitas Lanjut Usia melalui Home Care 08. Bedah Kamar Lansia	1000 org 100 org 700 org 50 org	Dinas Sosial
8	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Rp 7.142.131.000,00	02. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH 03. UEP PKH Graduasi melalui BKK 06. KUBE Pengembangan 5 Kab/ Kota 7. Bimbingan lanjutan dan Modal UEP PKH Graduasi mampu melaksanakan fungsi sosial	5 Kab/ Kota 5 Kab/ Kota (825 org) 50 KUBE 450 org	Dinas Sosial

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH DISABILITAS	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rp 1.614.384.375,00	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 org	Dinas Sosial
10	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Rp 1.504.295.000,00	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 org	Dinas Sosial
11	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Rp 1.569.622.100,00	01. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 org	Dinas Sosial
						02. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 org	
12	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Rp 1.164.279.050,00	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 org	Dinas Sosial
13	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Rp 1.181.977.100,00	01. Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 anak	Dinas Sosial
						02. Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						03. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	20 anak	
14	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Rp 1.200.000.000,00	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 org	Dinas Sosial
15	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 568.500.000,00	01. Inisiasi desa prima	5 desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
						02. Pendampingan desa prima	5 desa	
						03. Pembinaan desa prima	110 desa	
						04. Hibah desa prima	2 desa prima	
						05. Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri	1 kali	
16	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	Penanganan Desa Rawan Pangan	Rp 398.775.000,00	Desa Mandiri Pangan	6 desa mandiri pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Lembaga Akses Pangan Masyarakat(LA PM)	3 Gapoktan	
17	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Rp 21.311.000,00	1. Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. 5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Rp 60.605.000,00	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kali @ 32 orang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp 1.106.511.700,00	1. Penanaman Vegetasi (Terdiri dari: Hutan Rakyat seluas 100 Ha; Penanaman Bambu seluas 15 Ha, Pengembangan Tanaman Ekowisata seluas 30 Ha dan Penanaman Kawasan Pantai seluas 30 Ha)	1. 175 Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 1,00	1. Konservasi Lahan Pantai melalui penanaman di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo (2 000 btg)	1. 5 ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Rp 13.222.000,00	3. Merti TPA Piyungan	3. 1 kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rp 156.474.999,00	1. Kajian Bidang Sosial 2. Korsiin Bidang PM, Bidang Sosial 3. Monev Bidang Sosial	2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
23	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	Rp 269.784.999,00	1. Kebijakan Bidang PP-PA 2. Kebijakan Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk 5. Pemantauan dan Evaluasi Bidang PP-PA	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 2.210.680.000,00	1. Bantuan kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 Desa/Kelurahan/Kalurahan	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
						2. Bantuan Kelembagaan TP PKK DIY	1 Lembaga	
						3. Penguatan LPMD/LPMK	1 Lembaga	
25	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	Rp 1.197.892.999,00	1. Penguatan Pokjanal Posyandu	1 Lembaga	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
						2. Meningkatkan pengelolaan Lembaga BUMDes	10 BUMDes	
						3. Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa dan Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	
26	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	Rp 200.000.000,00	1. Implementasi gotong royong model segoro amarto	8 kelurahan	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
27	1. Pembangunan Manusia Unggul	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN DAN PENDUDUK	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Rp 56.500.000,00	02. Bakti Sosial Pelayanan KB	4 kali	Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
28	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Rp 300.000.000,00	1. Pelatihan kewirausahaan Pemuda kantong kemiskinan	20 kelompok	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
29	1. Pembangunan Manusia Unggul	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGEMBAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	Rp 360.210.000,00	1. Bedah buku	1. 10 kali	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
30	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 350.000.000,00	3. produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah	7,2 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya	Rp 35.000.000,00	2. Pembentukan rintisan desa minawisata	3 Desa Minawisata	Dinas Kelautan dan Perikanan
32	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Budidaya Tanaman Pangan	Rp 238.650.000,00	Sarana prasarana rehab jalan usaha tani	30 paket	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	375 ha	
33	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan Penanganan Hasil Tanaman Perkebunan	Rp 110.629.000,00	Bimtek pengolahan pasca panen	4 kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Pengelolaan lahan dan air	2 komoditas	
34	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Rp 25.505.000,00	1. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan (30 org x 4 angkt) - Bimtek Sertifikasi Legalitas Kayu (30 orang x 2 hari x 1 angkt)	1. 150 orang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
35	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Rp 1,00	3. Peningkatan Kelas KTH	3. 4 KTH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	Rp 69.378.000,00	03. Penanaman Kayu Putih (80 Ha P0 : 10 Ha Tanaman Baru dan 70 Ha Peremajaan Tanaman, 100 Ha P1, 200 Ha P2)	03. 357.280 batang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
37	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Rp 4.104.034.935,00	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. minyak kayu putih 42.310 liter dan kayu 98 m3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	Pengembangan dan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Rp 390.061.400,00	Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 367.280 batang)	367.280 batang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Rp 1.243.000.000,00	Rehabilitasi dan Perawatan PLTH Pantai Baru, Kabupaten Bantul	1 Paket rehabilitasi dan perawatan, kapasitas 15 kw dan 20 kw	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
						Rehabilitasi dan Perawatan PLTMH Minggir, Kabupaten Sleman	1 Paket rehabilitasi dan perawatan, kapasitas 10 kw	
						Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen	
40	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI	Pendayagunaan Air Tanah	Rp 4.250.000.000,00	Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Bantul	3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
						Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul	5 unit sumur bor dan 50 unit sumur resapan	
41	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Penyelenggaraan Transmigrasi	Rp 732.632.000,00	Penyelenggaraan Transmigrasi	30 KK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Rp 820.000.000,00	02. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa bagi pemula	2.2 even	Dinas Kebudayaan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						09. Pasar Kangen	9. a. 1 even Pasar Kangen b. 1 even pentas tradisi Pasar Kangen	
43	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Rp 14.500.000,00	DISBUD SLM 1.Hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1. 4 pokmas	Dinas Kebudayaan
44	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Rp 2.964.000,00	01. pendampingan desa budaya (5 aspek)	1. 112 orang	Dinas Kebudayaan
						08. fasilitasi desa mandiri Budaya	8. 5 desa budaya	
45	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Rp 990.000,00	02. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2020 (Tahap Pengembangan)	02. 250 orang (5 lokasi @50 orang)	Dinas Kebudayaan
						03. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2019 (Tahap Kemandirian)	03. 150 orang (5 lokasi @30 orang)	
						04. Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Keistimewaan di Destinasi Wisata	04. 75 orang	
46	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Rp 2.142.616,00	3. Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri budaya 2019 (Tahap Penguatan)	3. 5 Desa	Dinas Kebudayaan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Rp 650.000.000,00	2. Pembinaan Desa Prima Mandiri Budaya	2. 10 desa prima di Desa mandiri Budaya	Dinas Kebudayaan
48	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Revitalisasi Budaya Gotong Royong untuk pemberdayaan ekonomi desa	Rp 327.000.000,00	Jumlah desa implementasi model global gotong royong	6 Desa 8 Kalurahan	Dinas Kebudayaan
49	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	Rp 231.326.000,00	3. Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						4. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen monev TPB DIY Tahun 2021	
						5. Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 aplikasi	

5.6.2 Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

Program/ kegiatan tematik untuk Penurunan Ketimpangan Wilayah dapat disajikan sebagai berikut,

Tabel 5-2 Program/Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PEKERJAN UMUM DAN PENATAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Rp 20.345.037.000,00	1. Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Provinsi a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Kulonprogo c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Gunungkidul	1. 95 Ruas Jalan (752,1 km) dan 246 Buah Jembatan (5727,8 m'). a. 19 Ruas Jalan (153,8 km) dan 57 Buah Jembatan (1645,75 m') b. 23 Ruas Jalan (175,14 km) dan 80 Buah Jembatan (2398,35 m') c. 38 Ruas Jalan (306,84 km) dan 53 Buah Jembatan (825,3m') d. 15 R	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEKERJAN UMUM DAN PENATAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rp 600.000.000,00	DED rehabilitasi jaringan pipa induk dan lateral SPALD Penyusunan RISPALD DIY	1 dokumen 1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEKERJAN UMUM DAN PENATAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Rp 300.000.000,00	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEKERJAN UMUM DAN PENATAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAN SISTEM IRIGASI	Pengembangan Jaringan Irigasi	Rp 11.250.000.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan	1500 m + 3 rumah pompa 1100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Rp 200.000.000,00	01. Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						02. Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	1 dokumen	
6	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	Penyenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Rp 46.268.760.000,00	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	166 titik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
7	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian Lingkungan Hidup	Rp 171.374.250,00	1. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	1. 12 bulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						2. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	2. 12 bulan	
8	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Rp 4.378.277.000,00	Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100%	6 org x 22 hari x 12 bulan	Dinas Perhubungan
9	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 783.513.000,00	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	SMA/K 10@100 peserta	Dinas Perhubungan

RKPD DIY 2021

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Rp 76.501.956.500,00	Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja	Penyelenggaraan Trans Jogja (95 Armada selama 1 Tahun)	Dinas Perhubungan
11	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Rp 1.598.194.000,00	Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang Di DIY Pembangunan ITS (Intelligent Transport Systems)	Dokumen yang memuat data Kinerja, Rekomendasi Penanganan Ruas Jalan dan Simpang di Provinsi DIY Terwujudnya Intelligent Transport Systems	Dinas Perhubungan
12	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 1.605.423.000,00	Jumlah Ketersediaan Operator CC Room ATCS	12 Orang Petugas Operator CC Room ATCS selama 12 Bulan	Dinas Perhubungan
13	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	Rp 204.467.000,00	Tersedianya dokumen Andalalin Terminal Jombor Tersedianya dokumen UKL/UPL Terminal Jombor	Rekomendasi Andalalin Terminal Jombor Rekomendasi UKL/UPL Terminal Jombor	Dinas Perhubungan
14	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Teknis Perikanan Tangkap	Rp 799.982.000,00	4. Master plan dan DED Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing, Gunungkidul	1 paket	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp 200.000.000,00	DED Pengembangan Wisata Patuk Gunungkidul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Patuk, Kabupaten Gunungkidul	Dinas Pariwisata
16	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	Rp 211.649.750,00	01. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman)	01. 1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Rp 75.049.539.800,00	DISBUD BTL Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1 Kali	Dinas Kebudayaan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						GK 1. Pembangunan Taman Budaya (Multiyears tahun ke-3) 2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor taman budaya 3. Tersedianya sarana dan prasarana Taman Budaya Gunungkidul 4. Tersedianya fasilitas kesenian dan kebudayaan di Taman Budaya Gunungkidul 5. Gelar Seni - Gelar Kesenian Kolosal - Gelar Seni Sepanjang Tahun (GSST)"	1. 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. - 1 kali - 5 even"	
18	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Rp 3.250.000.000,00	01. Langganan Bandwidth Pemda DIY	1. a. 75 UMKM b. 438 desa c. 253 instansi	Dinas Kebudayaan
19	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram	Rp 1.400.000.000,00	1. Sumur Bor	1 Lokasi	Dinas Kebudayaan
20	1. Pembangunan Manusia Unggul	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Rp 7.000.000.000,00	03. Sarpras Desa Budaya	3. 10 gamelan, 15 desa pakaian pengrawit, 5 Balai Budaya	Dinas Kebudayaan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2021	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Rp 120.082.000,00	01. Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	1 laporan	Biro Tata Pemerintahan
						02. Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	1 laporan	
22	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Rp 70.000.000,00	04. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	1 laporan	Biro Tata Pemerintahan
23	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Rp 150.752.000,00	Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

5.6.3 Program/ Kegiatan Tematik Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan

Program/ kegiatan tematik untuk Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan dapat disajikan sebagai berikut,

Tabel 5-3 Program/Kegiatan Tematik Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. Pembangunan Manusia Unggul	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PRASARANA SANITASI	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	Pengembangan TPST Piyungan : 1. Pembebasan lahan seluas 4,1 Ha 2. Appraisal Tanah untuk TPA Piyungan (4,1 Ha)	Rp 39.900.000,00	1 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Pembinaan Penataan Ruang	01. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	Rp 100.000.000,00	2 dokumen dalam 1 tahun	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Pengembangan Perumahan	Identifikasi kawasan perumahan rawan bencana tanah longsor	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4	1. Pembangunan Manusia Unggul	PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	Distribusi Pangan Masyarakat	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / TTI	Rp 250.000.000,00	2 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	Percepatan Realisasi Investasi	Studi Pengembangan Potensi Investasi di TDA dan KTA Prambanan-Boko	Rp 200.000.000,00	1 Dokumen	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisas i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1. Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang Gading DIY	Rp 200.000.000,00	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
7	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY	Rp 168.592.500,00	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
8	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah	Rp 219.500.000,00	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
9	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Rp 173.449.500,00	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
10	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Rp 166.172.500,00	1 dokumen	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	2. Dokumen evaluasi CSR/TSLP	Rp 110.000.000,00	1 dokumen evaluasi CSR/TSLP tahun 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian Pembangunan Daerah	2. Rencana Induk Kelitbang	Rp 148.360.000,00	1 dokumen rencana induk kelitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbang dan Pendukung	2. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2021	Rp 111.761.800,00	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					3. Laporan Monitoring evaluasi kelitbang		1 dokumen laporan monev kelitbang Tahun 2021	
					4. Sistem Informasi Hasil Penelitian		1 aplikasi	
					5. Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbang		1 dokumen rumusan bahan kebijakan kelitbang	

5.6.4 Program/ Kegiatan Tematik Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Program/ kegiatan tematik untuk Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5-4 Program/Kegiatan Tematik Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Pelatihan Institusional	Rp 7.500.000.000,00	6 paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit		35 paket	
					Pelatihan Up Skilling		15 paket	
2	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	Rp 433.257.000,00	300 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Pemagang an Tenaga Kerja	Pemagang an perusahaan bagi pencari kerja	Rp 312.846.000,00	60 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pendampingan desa preneur tahap 2 di 6 desa meningkat kemampuan dibidang manajemen , produksi, pemasaran dan desain produk	Rp 917.096.000,00	360 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB		26 akt	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	Layanan Usaha Wirausaha Baru	Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	Rp 660.000.000,00	20 WUB	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Jumlah UKM yang terfasilitasi melalui pemasaran online		350 UKM	
					Jumlah wirausaha kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta yang tertangani akibat dampak covid 19		300 UKM	
					Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis		600 UKM	
6	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sektor Riil yang di dampingi dalam penerapan pelayanan prima	Rp 265.000.000,00	30 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan		30 koperasi	
					Jumlah koperasi terdampak covid 19 peserta pelatihan (SDM dan kelembagaan) yang meningkatkan kapasitas usahanya 100 %		60 koperasi	
7	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	Pemasaran Perkoperasian	Kemitraan Koperasi Sektor Riil dengan hotel / RS / Retail	Rp 205.000.000,00	2 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Pelatihan digital marketing bagi koperasi sektor riil		30 koperasi	
					Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk koperasi (harkopnas)		Rp. 72.200.000	
8	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Jumlah produk UKM yang tersertifikasi asal	Rp 655.440.000,00	90 Halal	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi MD		20 UKM	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi UKM		12 akt	
					Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi UKM		30 UKM	
9	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Pemasaran Produk UKM	Jumlah kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern/hotel/usaha menengah dan besar	Rp 7.427.109.000,00	4 kontrak	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Jumlah UKM yang meningkatkan pengetahuannya mengenai merek dan branding produk serta mendapat fasilitasi merek		150 UKM	
					Jumlah UKM yang terfasilitasi pemasarannya melalui Galeri YIA dan Galeri Dinas		350 UKM	
					Peningkatan omset UKM di Galeri Smesco		100 UKM	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Peningkatan omset UKM peserta pameran produk UKM di DIY dan Luar DIY		5%	
10	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan koperasi dan lembaga pembiayaan	Rp 50.000.000,00	35 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan	Rp 100.000.000,00	80 kontrak	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	Promosi Investasi	Forum jejaring promosi dan informasi investasi DIY	Rp 195.000.000,00	4 rekomendasi	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Forum Kemitraan UMKM dengan investor dan dunia usaha		10 kemitraan	
13	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Teknis Perikanan Tangkap	1. Jumlah calon nelayan baru	Rp 923.606.000,00	10 orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
					2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan		120 orang	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					kenelayanan			
					3. produksi kelompok nelayan yang di bina		48 ton	
14	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap	1. Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	Rp 360.000.000,00	2 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
					4. jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan		4 kelompok	
15	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Pemasaran Hasil Perikanan	1. jumlah masyarakat yang memahami manfaat makanan ikan	Rp 977.000.000,00	3760 orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
					2. Pasar mina		4 kali	
					3. Persentase penjualan produk olahan		90 %	
16	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Teknis Perikanan Budidaya	1. Jumlah unit budidaya/ kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	Rp 309.000.000,00	15 unit pembudidaya/kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB		2 UPR	
17	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya	3. Produksi perikanan budidaya	Rp 2.200.000.000,00	100 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	Jumlah sdm pariwisata yg meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan bahasa Inggris di obyek wisata	Rp 125.000.000,00	20 orang x 4 lokasi	Dinas Pariwisata
19	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Jumlah desa wisata yang dibangun agar naik kelas pada tahun 2021	Rp 520.000.000,00	7 desa wisata yang naik kelas	Dinas Pariwisata
20	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	2. Jumlah event pariwisata nasional (Wediombono National Surfing)	Rp 350.000.000,00	1 event	Dinas Pariwisata
21	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	Pelatihan SDM Pertanian	Pelatihan Agribisnis Hortikultura	Rp 38.000.000,00	1 angkatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama 1 tahun	Rp 318.910.000,00	padi 2800 ha, jagung 75 ha, kedelai 30 ha, salak 25 ha, cabe 10 ha, bawang merah 5 ha, perkebunan 62 ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAHAN	Budidaya Tanaman Perkebunan	Pengutuhan tegakan tanaman kakao	Rp 145.640.000,00	6 ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Pelatihan dan Kemitraan Eksportir	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan yang meningkatkan kapasitasnya	Rp 110.000.000,00	40 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru yang meningkatkan kemampuannya		60 orang	
25	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta bimtek pemasaran online yang meningkatkan kemampuannya	Rp 500.000.000,00	200 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Peningkatan omset peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.187 Juta Menjadi Rp. 1.302 Juta		Rp. 115 juta	
26	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan yang meningkatkan kemampuannya	Rp 888.829.000,00	330 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah peserta Sekolah Pasar yang meningkatkan kemampuannya (2 akt x 25 orang)		50 orang	
27	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	Rp 133.000.000,00	5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi		3%	
					Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau		5%	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Jumlah peserta Pelatihan IKM Agro yang meningkatkan keterampilannya (61 akt x 20 orang)	Rp 4.451.845.000,00	1220 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah peserta Pelatihan IKM Pemula Limbah Bambu, IKM Pemula Limbah Kayu, Mebel Kayu, Mebel Bambu, IKM Pemula Olahan Umbi Umbian, IKM Pemula Olahan Roti, IKM Pemula Olahan Ikan yang meningkatkan keterampilannya (8 akt x 20 orang)		160 orang	
					Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi halal		30 IKM	
29	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kemitraan IKM Agro	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra dengan toko/retail	Rp 352.156.000,00	40 IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas Agro semula Rp. 220,8 Juta menjadi Rp. 230,8 Juta		Rp. 10 Juta	
30	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah peserta Pelatihan IKM Logam, Sandang, dan Aneka yang meningkatkan keterampilannya (38 akt x 20 orang)	Rp 2.960.861.000,00	760 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah peserta Pelatihan IKM Pakaian Jadi, kulit, kerajinan di Kab. Bantul, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul yang meningkatkan keterampilannya (3 akt x 20 orang)		60 Orang	
					Jumlah peserta Pelatihan IKM Pande Besi di Kabupaten Bantul yang meningkatkan keterampilannya (1 akt x 20 orang)		20 orang	

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah peserta Pendampingan IKM Animasi di Kab. Sleman yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan		20 IKM	
					Jumlah peserta Pendampingan IKM Sandang di Kab. Bantul yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan		30 IKM	
31	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra dengan toko/retail	Rp 281.725.000,00	25 IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas : Komponen Otomotif, alat rumah tangga, produk kulit dan Fashion semula Rp. 1.050 Juta menjadi Rp. 1.175 Juta		Rp.125 Juta	
32	2. Aktivitas Perekonomian	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	Pembentukan Kesempatan	Padat karya infrastruktur	Rp 23.968.783.000,00	110 lokasi	Dinas Tenaga Kerja dan

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mian yang Berkelanjutan		KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	an Kerja	tur Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri		500 orang	Transmigrasi
33	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	Rp 430.000.000,00	40 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	Pengendalian Inflasi Daerah	Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan	Rp 441.897.500,00	1 dokumen	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
35	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Roadmap Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui Optimalisasi Sumber Daya Desa	Rp 339.437.000,00	1 dokumen	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
36	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Kajian Pemulihan Sektor Perekonomian Terdampak Covid19	Rp 320.000.000,00	1 dokumen	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

RKPD DIY 2021

No	Prioritas	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Kegiatan 2021	Target	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi	Rp 300.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD DIY 2021

Upaya pencapaian tema pembangunan dalam RKPD DIY 2021 *“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”* dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia unggul;
2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan;
3. Penguatan Infrastruktur Strategis;
4. Pendukung Prioritas Pembangunan;

Prioritas pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan sasaran dan Program pembangunan daerah (program pemda; lintas sektor dan urusan). Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.01	PENDIDIKAN													
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga													
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 19.524.749.660,00	Rp. 15.630.055.350,00		
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	233 jenis	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.819.825.660,00	Rp. 11.312.515.350,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	66 jenis						
							03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	728 dokumen						
							04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	150 jenis						
							05. Pembelian Bendera	33 buah						
							06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	35 jenis						
							07. Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	1 tahun						
							08.Langganan Surat kabar/majalah	1 tahun						
							09. Jasa Keamanan	1 tahun						
							10. Jasa Kebersihan	1 tahun						
							11. Ristribusi Sampah	860 bulan						
							12. KIR kendaraan roda 6 (enam)	1 tahun						
							13. Pajak Kendaraan	12 unit kendaraan Roda 2 (dua), 30 unit Kendaraan roda 4(empat), 1 unit kendaraan roda 6(enam)						
							14. Barang cetakan	46055 jenis cetakan						
							15. penggandaan dan jilid	1078336 lembar dan jilid						
							16. Penyusutan arsip	15054 berkas						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							17. Pemeliharaan arsip aktif	300 berkas						
							18. surat keluar dan surat masuk	33190 lembar surat keluar dan 18605 lembar surat masuk						
							20. Sewa tanah	40 sekolah						
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Honor Pengelola Keuangan	68 orang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.237.894.000,00	Rp. 2.961.225.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Honor Pengelola Barang	107 orang						
							3. Honor Pengelola Administrasi Kepegawaian	15 orang						
							4. Honor Perencanaan Program dan Anggaran	8 orang						
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 467.030.000,00	Rp. 1.356.315.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun						
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 5.084.051.750,00	Rp. 26.304.603.000,00		
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. DED balai dikmen Kulon progo	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.124.123.750,00	Rp. 19.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Rehab SMAN 5 Yogyakarta	464 m2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	7 jenis	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 689.738.000,00	Rp. 2.900.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	10 jenis						
							3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	7 jenis						
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.444.000.000,00	Rp. 2.239.300.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Gedung UPT	5 unit						
							3. Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	8 unit						
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	24 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 513.065.000,00	Rp. 686.753.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. kendaraan roda 6 (enam)	12 unit						
							3. Kendaraan Roda 2 (dua)	4 unit						
							4. Kendaraan roda 3 (tiga)	1 unit						
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.313.125.000,00	Rp. 978.550.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun						
							3. Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun						
							4. Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun						
							5. Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun						
							6. Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun						
							7. Pemeliharaan Arsip	1 tahun						
							8. Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun						
1.01.1.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 995.337.000,00	Rp. 1.181.644.900,00		
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2021	Nilai LKjIP dari 80,65 menjadi 80,7	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Penyusunan laporan keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 708.687.000,00	Rp. 913.644.900,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Penguatan pengelolaan keuangan	272 orang						
							3. Penyusunan dan Penataan anggaran	69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN						
							4. Penyusunan APBS	APBS 2021/2022						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	296 orang						
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang Pendidikan	50 orang	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 253.150.000,00	Rp. 223.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Program dan Kegiatan SKPD	3 dokumen						
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 22.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 812.898.877.000,00	Rp. 1.056.215.079.050,00		
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	1.BOSDA Swasta Sekolah Menengah	305 sekolah swasta (95 SMA. 169 SMK) mendapatkan BOSDA .	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah dan Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 682.728.832.650,00	Rp. 800.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali	2. BOSNAS 3 jenjang Pendidikan : SD, SMP,SM,SLB	2.741 sekolah N/S (1.845 SD, 439 SMP, 161 SMA, 216 SMK dan 79 SLB) menerima BOSNAS						
					Angka Putus Sekolah	0.19%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	Kartu cerdas	13400 siswa	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah	100%	Rp. 20.263.629.000,00	Rp. 24.658.404.100,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali								
					Angka Putus Sekolah	0.19%								
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Cangkringan Depok Dlingo Galur Gamping Girimulyo Godean Imogiri Jetis Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Kraton Kretek Lendah Minggir Mlati Ngaglik Ngemplak Pajangan Pakem Panggang Patuk Pengasih Piyungan Playen Pleret Prambanan Pundong Rongkop Samigaluh Sanden Sedayu Semanu Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Srandakan	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	Operasional KKO	8 sekolah	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 40.616.000.000,00	Rp. 86.262.600.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali	Operasional Sekolah Menengah Negeri	69 sekolah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Tanjungsari Tegalrejo Temon Tempel Tepus Turi Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari	Angka Putus Sekolah	0.19%								
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul Cangkringan Depok Dlingo Gedang sari Girimulyo Girisubo Godean Jetis Kalasan Kasihan Kokap Nanggulan Ngawen Nglipar Pajangan Pandak Panjatan Pengasih Pleret Ponjong Pundong Purwosari Samigaluh Sanden Sapto sari Sedayu Sewon Seyegan Tanjungsari Temon Tempel Tepus Umbulharjo Wonosari	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	1. Operasional Sekolah Menengah Negeri	68 sekolah	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 64.479.777.000,00	Rp. 123.928.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali	2. Operasional Edutel	3 sekolah						
					Angka Putus Sekolah	0.19%	3. Operasional Sekolah Kelautan	3 sekolah						
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	1. pembinaan, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa (FIKSI)	6 medali	Dukungan terhadap capaian medali dalam komeptisi tingkat nasional dan internasional	100%	Rp. 364.129.000,00	Rp. 13.769.716.200,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali	2. pembinaan, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KPSI)	4 medali						
					Angka Putus Sekolah	0.19%	3. pembinaan Debat Bahasa	2 medali						
							4. pembinaan, Kompetisi Sains Nasional / KSN	peringkat 7 nasional						
							5. Pendidikan karakter, bela negara dan budaya anti korupsi	25 Siswa						
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	perencanaan dan monitoring DAK	3 jenjang (SMA, SMK, dan SLB)	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 57.653.000,00	Rp. 55.486.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali								
					Angka Putus Sekolah	0.19%								
1.01.1.01.01.00.15.009	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	1. Forum Kepala SMA	3 kegiatan	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 48.208.000,00	Rp. 196.172.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali	2. Forum Pengawas SMA	2 kegiatan						
					Angka Putus Sekolah	0.19%	3. Koordinasi Pokja pengembangan kurikulum	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	Sinkronisasi antara sekolah dengan dunia industri, Pengembangan Prakerin	1 dokumen	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 188.206.000,00	Rp. 1.844.700.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali								
					Angka Putus Sekolah	0.19%								
1.01.1.01.01.00.15.011	Pengelolaan Pendidikan BLUD SMK Negeri 6 Yogyakarta	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	Layanan BLUD SMK 6 Yogyakarta	1 Sekolah	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 2.027.083.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali								
					Angka Putus Sekolah	0.19%								
1.01.1.01.01.00.15.012	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 6 Yogyakarta (BLUD)	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	81.65%	Pelaksanaan BOS SMK 6 Yogyakarta	1 sekolah	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 2.125.359.350,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	42medali								
					Angka Putus Sekolah	0.19%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 15.028.404.600,00	Rp. 15.750.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sentolo	Persentase Jumlah SLB dengan Akreditasi A	58.97%	Layanan terapi , Asesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	80 anak	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 1.159.761.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Persentase Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	11medali								
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Jumlah SLB dengan Akreditasi A	58.97%	1. BOSDA SLB Swasta	70 SLB Swasta	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 4.998.243.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Persentase Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	11medali	2. Pemberian makanan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1435 siswa SLBN						
							3. Penyaluran Beasiswa Inklusi	655 siswa						
							4. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	90 siswa						
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul Danurejan Gondokusuman Pakem Playen Umbulharjo Wates Wonosari	Persentase Jumlah SLB dengan Akreditasi A	58.97%	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 8.693.108.100,00	Rp. 13.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Persentase Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	11medali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Jumlah SLB dengan Akreditasi A	58.97%	1. Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus	6 Lokasi	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 177.292.500,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Persentase Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	11medali	2. Pembinaan Pendidikan Inklusif	17 sekolah penyelenggara inklusif						
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 1.847.966.900,00	Rp. 4.408.735.000,00		
1.01.1.01.01.00.17.002	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.59%	1. Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan (Dapodik SMA, SMK, dan SLB)	3 sistem informasi	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB	100%	Rp. 531.684.900,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	61medali	2. PPDB Online	118 SMAN dan SMKN						
1.01.1.01.01.00.17.003	Penyelenggaraan Ujian	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.59%	Asesment standarisasi pendidikan daerah	1 jenjang	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	61medali								
1.01.1.01.01.00.17.004	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Banguntapan Danurejan Umbulharjo	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.59%	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	3 lembaga	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB	100%	Rp. 416.282.000,00	Rp. 908.735.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	61medali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 9.680.556.000,00	Rp. 16.827.200.000,00		
1.01.1.01.01.00.18.001	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.61%	1. Sosialisasi TPG	600 orang	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	100%	Rp. 61.598.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Pengelolaan pemberkasan TPG	163 orang						
1.01.1.01.01.00.18.002	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.61%	1. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SLB swasta dan inklusi)	313 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	100%	Rp. 9.249.974.000,00	Rp. 14.907.200.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Pemberian Insentif GTY dan PTY	1079 pendidik dan tenaga kependidikan						
							3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri						
1.01.1.01.01.00.18.003	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.61%	1. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	126 sekolah	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	100%	Rp. 368.984.000,00	Rp. 1.420.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Penilaian Angka Kredit Guru	5350 dokumen						
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 1.217.160.000,00	Rp. 5.098.761.270,00		
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	88%	1.Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	340 guru	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	100%	Rp. 444.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2.Produksi media untuk jogjabelajar.org	45 judul						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	88%	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	30 jaringan	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	100%	Rp. 773.160.000,00	Rp. 3.098.761.270,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Pengembangan Jogjabelajar	Laman dan konten jogjabelajar.jogjaprovo.go.id						
							3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	30 Lokasi						
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 6.450.293.000,00	Rp. 27.091.578.590,00		
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2113peserta	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	2080 siswa	Dukungan terhadap capaian peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik berstandar	1 jenjang	Rp. 6.450.293.000,00	Rp. 27.091.578.590,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL										Rp. 87.949.000,00	Rp. 2.519.159.500,00		
1.01.1.01.01.00.22.001	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	82.67%	1. Pembinaan OSIS dan FKPO	70 org	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP	100%	Rp. 87.949.000,00	Rp. 2.519.159.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Verifikasi Alat UKK	49 sekolah						
							3. Pendidikan Karakter Kebangsaan	35 siswa						
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN										Rp. 112.451.000,00	Rp. 3.122.443.500,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.23.001	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	86.67%			Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP	100%	Rp. 112.451.000,00	Rp. 3.122.443.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							1. Pendidikan Karakter	28 siswa						
							2. Verifikasi Alat UKK	57 sekolah						
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO										Rp. 75.432.000,00	Rp. 2.350.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.24.001	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	78.67%	1. Penguatan Pendidikan Karakter	150 orang	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP	100%	Rp. 75.432.000,00	Rp. 2.350.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							3. verifikasi UKK	36 sekolah						
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL										Rp. 89.446.000,00	Rp. 1.560.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.25.001	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	85.31%	1. Pembinaan Karakter Kebangsaan	30 sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP	100%	Rp. 89.446.000,00	Rp. 1.560.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	46 SMK						
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA										Rp. 59.476.000,00	Rp. 2.179.434.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.26.001	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	88.97%	1. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	30 Sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP	100%	Rp. 59.476.000,00	Rp. 2.179.434.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							3. Forum FKPO	30 siswa OSIS						
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA													
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga													
1.19.1.01.01.00.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 4.822.751.000,00	Rp. 4.793.470.000,00		
1.19.1.01.01.00.15.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	28%	1. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka DIY & Nasional	80 siswa/i wakil kab/kota di DIY	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	100%	Rp. 3.081.771.000,00	Rp. 3.909.856.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Bantuan Kelembagaan	2 lembaga						
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	28%	1. Pelatihan kewirausahaan Pemuda kantong kemiskinan	20 kelompok	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	100%	Rp. 1.740.980.000,00	Rp. 883.613.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)	6 SKP						
							3. Pelatihan ketrampilan/kewirausahaan Pemuda	59 kelompok						
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAH RAGA										Rp. 21.653.590.000,00	Rp. 10.464.208.000,00		
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	6medali	1. PEMBINAAN ATLET BERBAKAT (PAB)	250 orang	Dukungan terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS	100 %	Rp. 21.653.590.000,00	Rp. 10.464.208.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 899.628.490.910,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	13medali	2. Bantuan Kelembagaan	2 lembaga (KONI dan NPC)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.02	KESEHATAN													
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan													
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.081.525.000,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Belanja ATK	25 jenis	Dukungan 55.93% kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.125.866.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							02. Belanja alat listrik	5 jenis						
							03. Belanja benda pos dan pengiriman surat	1 paket						
							04. Belanja alat kebersihan	8 jenis						
							05. Logistik coldroom	1 paket						
							06. Pengisian tabung pemadam kebakaran	1 paket						
							07. belanja telepon, air, listrik,dan fax	12 bulan						
							08. Pembayaran layanan Surat Kabar	3 eksemplar						
							09. Pembayaran PBB	1 tahun						
							10. Pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							11. jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi	1 paket						
							12. jasa pest control	1 paket						
							13. KIR R4 (mobil pick up)	2 kali						
							14. Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2	1 tahun						
							15.belanja cetakan	1 paket						
							16. Belanja penggandaan	28.000 lembar						
							17. sewa Aplikasi Avaya Call Center	1 paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							18. sewa tanah Tower Antena Repiter PSC 119	1 paket						
							19. pemeliharaan alat-alat kantor	4 jenis						
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Honorarium Pegawai Honorer/ PTT	6 jenis	Dukungan% Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 858.289.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Pembayaran Honor Pengelola keuangan	12 bln						
							Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	1 th						
							Pembayaran Pengelola Kepegawaian	12 bln						
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. belanja makan minum rapat	1.3000 oh	Dukungan 9,10% Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 97.370.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. perjalanan dinas luar daerah	2. 1 tahun						
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 504.190.000,00	Rp. 52.800.000,00		
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Laptop	2 unit	Dukungan% Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 48.000.000,00	Rp. 52.800.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Pc	2 unit						
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Gedung bangunan tempat kerja	1 tahun	Dukungan19,08 % kelancaran administrasi perkantoran (uang kegiatan/uang program)	100%	Rp. 168.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan lift gudang farmasi	4 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas/operasional sebanyak 23 unit roda 4 dan 27 unit roda 2 terpelihara)	100% kendaraan dinas operasional terpelihara	Dukungan38,46% pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona	100%	Rp. 203.905.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6 jenis	Dukungan11,20 % pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	100%	Rp. 84.285.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	4 jenis						
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 32.000.000,00	Rp. 35.200.000,00		
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Terselenggaranya SMM ISO 9001: 2015	1 tahun	Terlaksananya penerapan ISO 9001 2015	80%	Rp. 32.000.000,00	Rp. 35.200.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 106.986.000,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1 dokumen laporan keuangan	1 LAPORAN	dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesaikannya laporan keuangan	100%	Rp. 5.192.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100 %	Rp. 95.205.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen						
							3. Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. 1 Paket						
							4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, dan terkini	4. 180 Materi						
							5. Buku Data Kesehatan Tahun 2019	6. 1 Dokumen						
							6. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019	7. 1 Dokumen						
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	13 program 25 kegiatan	Dukungan terhadap penatausahaan	100%	Rp. 6.589.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 2.259.810.000,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.15.001	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Balita Sehat	40.64%	01. Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100 desa	Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM sebanyak 22.8%	100%	Rp. 2.017.375.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa Sehat Mandiri	56.43%	02.Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	2365sekolah	Pembentukan Pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas 70%	100%				
							03.Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL),	96 puskesmas	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri 49.77%	100%				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04.RS dilakukan IKL, Pasar dilakukan IKL	62 RS	Puskesmas yang melakukan penjangkaran dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolahn melalui gerakan peregangn atau bermain pada jam istirahat 75%	100%				
							05.Pasar dilakukan IKL,	60 pasar	TTU yang memenuhi syarat 91%	100%				
							06.Hotel dilakukan IKL,	222 hotel						
							07.Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota						
							08. Kampanye GERMAS	5 kab/kota						
							09.Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	5 kab/kota						
							10. Penerbitan majalah Mensana	2 edisi						
							11. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat	1 paket						
							12.Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	195 unit						
							13.Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	121 Puskesmas						
							14.Jamban sehat unruk masyarakat miskin	1.500.000.000						
							15. Media Promosi Cetak	1 paket						
1.02.1.02.01.00.15.002	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Balita Sehat	40.64%	1.. Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans gizi	4 kab kota	1. Penurunan Persentase Balita Kurus (0,3 %)	100%	Rp. 242.435.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa Sehat Mandiri	56.43%	2. Sosialisasi hasil riset gizi	150 orang	2. presentase ibu hamil KEK 0,75%	100%				
							3. evaluasi PWS KIA	4 kab kota	3. Presentase kunjungan ibu hamil 4x (k4) 76%	100%				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									4.Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 88%	100%				
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 1.895.112.400,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.26%	Anak <1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80 %	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I	80 %	Rp. 606.948.400,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	80 %	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %				
							Persentase Pengamatan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 jam	100 %						
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.26%	01. Jumlah kab/kota yang melakukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	5 kab kota	01. Persentase kab/kota dengan ABJ >80 %	60 %	Rp. 1.288.164.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	83,76%	02.Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%	60 %				
							03. Jumlah klinik yang melaksanakan startegi DOTS	100 klinik	03. Persentase cakupan penemuan TB	36 %				
							04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	125 DPS	04. Persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	70 %				
							05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	35 faskes	05. API (Annual Parasite Incidence)	<11 per mil				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	5 kab kota	06. Persentase kab/kota yang memiliki 1 posbindu per desa	40 %				
							07. Jumlah kab/kota yang melakukan posbindu sesuai standar	5 kab kota	07. Persentase kab/kota yang memiliki 10 persen pandu PTM	100 %				
							08. Jumlah kab/kota yang melaksanakan PANDU PTM	5 kab/kota	08. Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	80 %				
							09. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa	5 kab kota	09. Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini sadanis dan IVA tes> 3 persen dari total WUS	40 %				
							10.Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (sadanis dan IVA test)	5 kab kota						
							11. hibah kelembagaan	500.000.000						
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 1.103.616.100,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.17.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	52.37%	01. puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan	121 Puskesmas	FKTP, FKRTL dan faskes lain memenuhi standar pelayanan	232 faskes	Rp. 1.021.448.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							02. klinik pratama mendapatkan pembinaan pelayanan	30 klinik						
							03. RS mendapatkan pembinaan pelayanan	78 Rumah Sakit						
							04. labkes mendapatkan pembinaan pelayanan	3 lab						
							05. faskes terintegrasi SPGDT	80 faskes						
							06. hibah PMI	500000000						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.17.002	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	52.37%	01.Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.	236 faskes	Rp. 82.167.600,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							02. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	3 klinik pratama						
							03. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	78 RS						
							04. Laboratorium mendapat pembinaan mutu	5 laboratorium						
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 941.948.500,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	71.98%	01. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 210 FKTP	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	84.7%	Rp. 259.021.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	81.07%	02. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	2. 41 FKTL						
							03. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan Kab/Kota	3. 3 kab/kota						
							04. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	50 RS/FKTL						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	71.98%	1. Puskesmas dan rumah sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	100 faskes	1. Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian, sediaan farmasi dan perbekkes serta pengendalian makanan	255 sarana	Rp. 682.927.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	81.07%	2. Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang mendapatkan pembinaan	30 sarana	2. Obat indikator tersedia	135 jenis				
							3. Pebekkes dan obat bufferstock	1 paket	3. Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat	60%				
							4. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	30 sarana						
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 10.856.148.900,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Mantrijeron	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	14layanan	Masyarakat memanfaatkan layanan Balabkes	13000 customer	Indeks Kepuasan Pelanggan	85%	Rp. 10.856.148.900,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 5.454.069.000,00	Rp. 7.500.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kalasan	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	66%	Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan	24 pelatihan	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	84%	Rp. 5.454.069.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS										Rp. 37.146.810.500,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	26layanan	Cakupan Jamkes Penyangga	100%	persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat	96,15%	Rp. 37.146.810.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	Cakupan Jamkes Preventif	10%						
							Cakupan Jamkes Rehabilitatif	20%						
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 24.899.296.000,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	89%	Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	Jumlah praktikan : 2.400 ; jumlah kunjungan diklat : 4.400	Rekomendasi bagi praktikan / peserta pendidikan dan pelatihan	100 %	Rp. 24.899.296.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	2%	Penanganan pasien	Rawat inap : 2.310 ; Rawat jalan : 49.200	Kepuasan pelanggan	IKM : 82 %				
					Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	88%								
					Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	78%								
					Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	72%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 107.281.512.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	64%								
					Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	79%								
					Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	84%								
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	89%								
					Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	95%								
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA										Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Rumah Sakit Paru Respira	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucsess Rate) TB	85%	Penanganan pasien RSP Respira	16.290 pasien	Indeks kepuasan pelanggan	89.69%	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Kematian Pasien > 48 Jam	1%								
					Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80kali kunjungan								
					Bed Occupancy Rate (BOR)	60%								
					Length of stay (LOS)	5Hari								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral													
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 13.014.250.000,00	Rp. 6.900.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01- 06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Listrik	70 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 9.569.750.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Alat Tulis kantor	174 jenis						
							Barang Cetakan	27 jenis						
							Belanja pengisian tabung gas	36 kali						
							Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran	44 unit						
							Jasa kebersihan kantor	1 tahun						
							Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun						
							Jasa Laundry	1 tahun						
							Jasa Pembasmi tikus	1 tahun						
							jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	104 unit : 66 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 28 unit roda 4; 7 unit roda 6						
							Jasa Surat Menyurat	7500 surat						
							Penatan Arsip	98300 arsip						
							Penggandaan	262800 lembar						
							Peralatan/perlengkapan	3 jenis						
							Solar Operasional genset	1 tahun						
							Surat Kabar/Majalah	10 SKH						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jasa Administrasi Keuangan	15 orang/12 bulan	Dukungan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.732.000.000,00	Rp. 4.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Jasa Keamanan Kantor	1 tahun (65 orang)						
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 60 kali - Golongan III, 147 kali - Golongan II, 80 kali	Dukungan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 712.500.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 28 kali - Golongan III, 39 kali - Golongan II, 9 kali						
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 9 kali - Golongan III, 7 kali - Golongan II, 2 kali						
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun (6.750 orang)						
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.555.135.000,00	Rp. 5.650.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Alat-alat studio	1 jenis	Dukungan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	6 jenis						
							Tersedianya perlengkapan kantor	6 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	6 gedung	Dukungan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan rumah jaga	2 gedung						
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	118 unit : 68 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 29 unit roda 4; 11 unit roda 6	Dukungan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan alat-alat berat	4 jenis	Dukungan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 355.135.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan alat-alat kantor	11 jenis						
							Pemeliharaan alat-alat komunikasi	9 jenis						
							Pemeliharaan perlengkapan kantor	9 jenis						
1.03.1.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 415.000.000,00	Rp. 875.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2020	1 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2020	Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja SKPDterhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Tersusunnya LKJIP TH 2020	1 dokumen LKJIP TH 2020						
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan	Dukungan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan						
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan						
							Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
							Laporan Keuangan Audited	1 laporan						
							Laporan Keuangan bulanan	12 laporan						
							Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan						
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	DPA 2022	1 dokumen	Dukungan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							RKA TH 2022	1 dokumen						
							RKA-P TH 2021	1 dokumen						
							DPA-P TH 2021	1 dokumen						
							Forum PD	1 kesepakatan						
							Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik						
							Renja SKPD TH 2022	1 dokumen						
							tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporancapaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 87.475.037.000,00	Rp. 325.200.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.66%	Peningkatan Ruas jalan Brosot - Toyan	2,00 km	Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi	100 %	Rp. 12.000.000.000,00	Rp. 200.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	69.11%								
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.66%	1. Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Provinsi a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Kulonprogo c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Gunungkidul	1. 95 Ruas Jalan (752,1 km) dan 246 Buah Jembatan (5727,8 m'). a. 19 Ruas Jalan (153,8 km) dan 57 Buah Jembatan (1645,75 m') b. 23 Ruas Jalan (175,14 km) dan 80 Buah Jembatan (2398,35 m') c. 38 Ruas Jalan (306,84 km) dan 53 Buah Jembatan (825,3m') d. 15 R	Dukungan terhadap kemantapan jalan provinsi berupa kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	100 %	Rp. 20.345.037.000,00	Rp. 25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	69.11%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.66%	Pembangunan Jalan dan Jembatan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 paket	Dukungan terhadap penambahan jaringan jalan baru berupa Kajian & Studi Pembangunan Jaringan Jalan	100%	Rp. 54.620.000.000,00	Rp. 100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	69.11%	Pembangunan Jembatan Brangjang	1 paket						
							Pembangunan Jembatan Kenet, Bantul	1 paket						
							Pembangunan jembatan jembatan Sambirejo	1 paket						
1.03.1.03.01.00.19.005	Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.66%	SPS Permohonan Hak	100 SPS	Dukungan berupa ketertiban pengelolaan aset terhadap kemantapan jalan provinsi	100 %	Rp. 510.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	69.11%								
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI										Rp. 45.195.675.000,00	Rp. 45.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.20.001	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Piyungan	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	Pengembangan TPST Piyungan : 1. Pembebasan lahan seluas 4,1 Ha 2. Appraisal Tanah untuk TPA Piyungan (4,1 Ha)	1 kawasan	Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional	100 %	Rp. 37.210.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari	Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan	1 kawasan						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Talud	1 paket						
							Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPA Piyungan	197 kVA						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.20.002	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY	100 %	Rp. 2.887.500.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 km						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100ml						
							Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm						
							Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3						
							Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	pemeliharaan terhadap peralatan sebanyak 68 unit						
1.03.1.03.01.00.20.003	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	kualitas air limbah bebas B3	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY	100 %	Rp. 2.198.175.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah	234 km						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.20.004	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	dengan standar PH berkisar 6-9	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat untuk Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY	100 %	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	pemeliharaan 1 Unit instalasi IPLT						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr						
1.03.1.03.01.00.20.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Prawirotaman	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	FS Drainase Kulur, Kab. kulonprogo	1 Paket	Dukungan pembangunan sistem saluran drainase terhadap Penanganan genangan	100 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari	Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	2 Lokasi						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi								
1.03.1.03.01.00.20.006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26300SR	Pendataan SPM bidang ke PU an (Limbah)	1 dokumen	Dukungan berupa Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terhadap Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	720ton/hari								
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi								
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Rp. 10.115.000.000,00	Rp. 34.000.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.21.001	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	92374meter	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	6 Kelompok	Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar terhadap penambahan panjang jaringan distribusi SPAM	100 %	Rp. 4.150.000.000,00	Rp. 9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	1100liter/detik	Pembebasan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro	1 lokasi booster 2 lokasi reservoir						
							Pendataan SPM bidangke PU an (Air Minum)	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.21.002	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	92374meter	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake: - Pemeliharaan Genzet dan pompa Intake (2 Genset + 4 Pompa) (1paket) - Pemeliharaan Bangunan Intake dan Kantor (1 paket)	2 paket	Dukungan berupa kegiatan pengelolaan sistem penyediaan air minum terhadap pengelolaan air curah	100 %	Rp. 5.965.000.000,00	Rp. 25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	1100liter/detik	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi	1 paket						
							Operasi dan Pemeliharaan IPA: - Pemeliharaan Instalasi dan Bangunan IPA (1 paket) - Pemeliharaan Genzet dan pompa Clearwell (1 Genset + 6 Pompa)(1 paket) - Pemeliharaan Berkala Alat-Alat Laboratorium (1 paket)	3 paket						
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan: - Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Minum Wilayah Sleman (43 km) - Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Minum Wilayah Bantul (20 km)	63 km						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Operasi dan Pemeliharaan ME : - Pemeliharaan Berkala Mekanikal Elektrikal (1 paket) - Pemeliharaan Instalasi Otomatisasi SCADA (1 paket) - Pemeliharaan Berkala Mekanikal Elektrikal (1 paket) - Pemeliharaan Instalasi Pengukur Debit (10 Unit Watermeter)(1 paket)	4 paket						
							Operasi dan Pemeliharaan Reservoir/Boster : - Pemeliharaan Genzet dan pompa Boster (6 Unit Genset + 20 Unit Pompa)	1 paket						
							Operasional Produksi : - Belanja Bahan Kimia, Alat Tulis Kantor, Alat-alat/Perlengkapan Pemeliharaan, Analisa Laboratorium, Retribusi Pajak, Bahan Bakar dan Pelumas	1 unit						
1.03.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU										Rp. 4.481.921.000,00	Rp. 60.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.22.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19.5liter/detik	DED Rehabilitasi Embung Kewenangan DIY	10 Embung (plembengan, samigaluh, plampang, blubuk, jurangjero, bimomartani, gatep, banaran, pakembinangun, temuwuh)	Dukungan untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Pengelolaan Air Baku	73.2liter/ detik	Pengelolaan sumber mata air untuk masyarakat untuk Kelompok Tani Padukuhan se Desa Bunder	1 paket						
							Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air						
1.03.1.03.01.00.22.002	Pengelolaan Air Baku	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19.5liter/detik	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi & Data Pemantauan Kualitas Air Badan Air	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar...ltr/detik, guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	100 %	Rp. 3.781.921.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Pengelolaan Air Baku	73.2liter/ detik	Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga	1 embung : embung songbolong						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	25 Embung						
							Pengelolaan Data SDA	1 Kegiatan : SISDA						
1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI										Rp. 23.287.955.000,00	Rp. 70.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	75.85%	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo	1500 m + 3 rumah pompa	Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	100 %	Rp. 12.548.418.000,00	Rp. 35.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	82.41%	Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh Ngepet Srigading Sanden	1 paket						
							Pembangunan Irigasi Dusun Manggungsari, Wonokerto, Turi	1 paket						
							Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari Wonokerto, Turi	1 paket						
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan	1100 m						
							Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi						
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	75.85%	Fasilitasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I.	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi	100 %	Rp. 10.739.537.000,00	Rp. 35.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	82.41%	Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	Gerakan Irigasi Bersih						
							Operasi Jaringan Irigasi	41 D.I.						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	4 DI : D.I. Tirtorejo , D.I Pulodadi, D.I Brongkol dan D.I Kanoman						
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 D.I.						
							Pendaftaran Persertifikatan Aset Tanah Jaringan Irigasi D.I. Blawong	50 SPS						
							Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 D.I.						
							Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi						
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	penambahan tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan masyarakat yang terlayani informasi jasa konstruksi	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	86.15%	Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	90 orang						
							Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan						
							Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang						
							Penyusunan informasi teknis bahan bangunan	12 laporan, 2.750 orang						
							tenaga ahli konstruksi bersertifikat	453 orang (363 + 90 orang)						
							Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	80 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00						
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak	800 LHU	Dukungan untuk mendukung pencapaian LHU	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	86.15%	Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan meliputi Kegiatan Pelayanan Laboratorium dan Peningkatan Kualitas Laboratorium : 1. Pelayanan Laboratorium 1.1 Pelayanan Umum (790 LHU) 1.2 Pelayanan Uji Aspiratif (10 LHU) 1.3 Pengadaan Alat & Perlengk. (100 jenis) 2. Peningkatan Kualitas Laboratorium 2.1 Kalibrasi Alat Laboratorium (50 jenis) 2.2 Pemeliharaan Alat (15 jenis) 2.3 Akreditasi(Mepertahankan ISO17025:2017) 2.3.1 Akreditasi Laboratorium (Mempertahankan ISO 17025:2017) 2.3.2 Akreditasi Parameter (Penambahan 2 parameter pengujian terakreditasi	1. 800 LHU 2. Penambahan 2 parameter pengujian terakreditasi									
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral																
1.04.1.03.01.00.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN										Rp. 21.490.000.000,00	Rp. 76.200.000.000,00					
1.04.1.03.01.00.16.001	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	43.1%	Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY)	1 Laporan	Dukungan Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	16%											
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	86.08%											

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.03.01.00.16.002	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	43.1%	Pemutakhiran Data RTLH	1 dokumen	Dukungan sebesar 4000 unit penanganan RTLH terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	100 %	Rp. 21.115.000.000,00	Rp. 75.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	16%	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan kualitas : 1. Kab. Gunungkidul 462 unit 2. Kab. kulonprogo 121 unit 3. Kab. Bantul 314 unit 4. Kab Sleman 66 unit 5. Kota Yogya 35 unit Pembangunan Baru : 1. Kab Gunungkidul 11 unit, 2.Kab. kulonprogo 11 unit. 3. Kab. Bantul 54 unit 3. Kab Sleman 24 unit	998 unit PK 100 unit PB						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	86.08%								
1.04.1.03.01.00.16.003	Pengembangan Perumahan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	43.1%	Identifikasi kawasan perumahan rawan bencana tanah longsor	1 dokumen	Dukungan berupa penyediaan terhadap Dokumen RP3 sebagai Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	16%	Rekomendasi Kebijakan PKP (Pokja)	1 laporan, rincian target pelaksanaan Kegiatan Dewan PKP dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Buku Rencana Perda RP3KP						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	86.08%								
1.04.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN										Rp. 43.765.000.000,00	Rp. 45.000.000.000,00		
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	213 titik	Dukungan berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100 %	Rp. 42.615.000.000,00	Rp. 25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik	DED PSU Permukiman	200 titik						
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	5 Titik	Peningkatan kualitas PSU pada 32 lokasi di Kawasan Strategis Propinsi	100 %	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik	Penyusunan DED PSU KSP	32 lokasi						
2	Pilihan													
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral													
2.05.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 4.424.110.000,00	Rp. 15.000.000.000,00		
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11848RT	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	1225 SR	Dukungan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan Berupa Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik	100 %	Rp. 3.985.110.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	82unit	Rehabilitasi dan Perawatan PLTH Pantai Baru, Kabupaten Bantul	1 Paket rehabilitasi dan perawatan, kapasitas 15 kw dan 20 kw						
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	60izin	Rehabilitasi dan Perawatan PLTMH Minggir, Kabupaten Sleman	1 Paket rehabilitasi dan perawatan, kapasitas 10 kw						
							Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11848RT	Pengaturan & Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan	Dukungan berupa Audit Energi terhadap Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	82unit								
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	60izin								
2.05.1.03.01.00.17.003	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11848RT	Pengawasan dan pengendalian Energi Baru Terbarukan wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 laporan berisi pengawasan dan pengendalian EBT sejumlah 157 unit PLTS Tersebar, 1 unit PLTMH, 1 unit PLTH	Dukungan Peningkatan Tertib Izin Ketenagalistrikan yang Sesuai dengan Ketentuan	100 %	Rp. 389.000.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	82unit	Pengawasan dan pengendalian Energi Baru terbarukan wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 laporan berisi pengawasan dan pengendalian EBT sejumlah 168 unit PLTS Tersebar, 2 unit PLTMH						
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	60izin	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan wilayah Bantul dan Kulon progo	1 laporan berisi hasil pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan terhadap 33 izin						
							Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 laporan berisi hasil pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan terhadap 150 izin						
							Pengelolaan Aplikasi E- Pengawasan dan E - Pelaporan perizinan Ketenagalistrikan BP3 ESDM DIY	1 aplikasi E- Pengawasan dan E - pelaporan perizinan Ketenagalistrikan						
2.05.1.03.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI										Rp. 9.583.112.000,00	Rp. 17.586.170.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.1.03.01.00.18.001	Pendayagunaan Air Tanah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	79dusun	Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Bantul	3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan	Dukungan pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah terhadap target penyediaan air bersih yang masuk kategori daerah sulit air prioritas utama	100 %	Rp. 8.325.000.000,00	Rp. 12.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%<	Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul	5 unit sumur bor dan 50 unit sumur resapan						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	60izin	Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Kulonprogo	4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan						
							Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman	3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan						
2.05.1.03.01.00.18.002	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	79dusun	Pendataan dan pencataatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Dukungan Peningkatan Tertib Izin Air Tanah yang Sesuai Dengan Ketentuan	100 %	Rp. 970.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%<	Pendataan dan pencataatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	60izin	Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen hasil pendataan pengguna air tanah belum berizin dengan target 356 titik						
							Pendataan pengguna air tanah belum berizin di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 dokumen hasil pendataan pengguna air tanah belum berizin dengan target 1379 titik						
							Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 laporan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah sesuai dengan ketentuan terhadap 53 izin						
							Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	1 laporan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah sesuai dengan ketentuan terhadap 180 izin						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengelolaan Aplikasi E- Pengawasan dan E - Pelaporan perizinan Air Tanah BP3 ESDM DIY	1 aplikasi E - pengawasan dan E - pelaporan Perizinan Air Tanah						
2.05.1.03.01.00.18.003	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	79dusun	Jasa Lainnya Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	4 unit di CAT Yogyakarta Sleman	Dukungan berupa data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah	100 %	Rp. 288.112.000,00	Rp. 4.086.170.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%<	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan kondisi fluktuasi air tanah						
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	60izin	Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	1 laporan pembinaan terhadap 60 wilayah kelurahan/desa dan laporan pelaksanaan penetapan NPA						
							Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 60 unit usaha						
2.05.1.03.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN										Rp. 1.747.200.000,00	Rp. 5.499.740.000,00		
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	33izin	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	1 laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha pertambangan	Dukungan terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	100 %	Rp. 994.200.000,00	Rp. 3.450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.7%	Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat						
							Penyusunan penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY	1 Dokumen bahan SK Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 269.549.395.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul	1 dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat						
							Rekomendasi Teknis/Persetujuan izin Usaha Pertambangan	1 laporan Rekomendasi/Persetujuan untuk 60 unit usaha pertambangan						
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	33izin	Identifikasi Penambangan Tanpa Izin di Wilayah Gunungkidul	1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin pada perbatasan Kawasan Lindung Geologi Kabupaten Gunungkidul	Peningkatan Tertib Izin Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar	100 %	Rp. 753.000.000,00	Rp. 2.049.740.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.7%	Operasional Inspektur Tambang	1 laporan berisi pengawasan teknis izin usaha pertambangan terhadap 117 izin						
							Pendataan dan penghitungan volume produksi usaha pertambangan wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 laporan berisi data volume produksi usaha pertambangan di wilayah Bantul dan Kulon Progo						
							Pendataan dan penghitungan volume produksi usaha pertambangan wilayah Sleman dan Gunungkidul	1 laporan berisi data volume produksi usaha pertambangan di wilayah Sleman dan Gunungkidul						
							Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 laporan berisi pengawasan dan pengendalian izin usaha pertambangan terhadap 59 IUP, 14 IPR						
							Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di wilayah Sleman dan Gunungkidul	1 laporan berisi pengawasan dan pengendalian izin usaha pertambangan terhadap 20 IUP, 24 IPR						
							Pengelolaan aplikasi E- Pengawasan dan E- Pelaporan Perizian Pertambangan BP3ESDM DIY	1 aplikasi E - pengawasan dan E - pelaporan Perizinan Pertambangan						
							Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3 ESDM DIY	4 kegiatan sosialisasi pengenalan aplikasi E - Pengawasan dan E- Pelaporan di Kab. Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulon progo						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.03.1.03.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.162.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00		
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Penyediaan alat tulis kantor	60 jenis	Dukungan 30,30% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 567.500.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
							03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional pembayaran pajak/STNK kendaraan	Roda 4 7 unit; Roda 2 7 unit						
							04. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	1600 m2						
							05. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	15 Jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	12 bulan						
							07. Pembayaran tagihan rekening air	12 bulan						
							08. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							09. Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							10. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	11 Jenis						
							11. Penyediaan Surat kabar	12 bulan						
							12. Penyediaan Jasa surat menyurat Pengiriman dokumen	680 dokumen						
							13. Penyediaan Jasa surat menyurat surat keluar	860 surat						
							14. Penyediaan Jasa surat menyurat surat masuk	970 surat						
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan (5 orang)	Dukungan 36,36% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 261.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Pengelola kepegawaian	12 bulan (1 orang)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Pengelola barang/pengurus barang pengguna	12 bulan (2 orang)						
							04. Pengelola keuangan	12 bulan (8 orang)						
							05 . Perencana Program	12 bulan (1 orang)						
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan (eselon III 24 kali, eselon IV 48 kali, golongan III 72 kali)	Dukungan 33,33% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 333.500.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan (eselon II 12 kali, eselon III 6 kali, eselon IV 4 kali, golongan III 3 kali)						
							03. Penyediaan makanan dan minuman rapat	1300 os						
							04. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang						
1.03.1.03.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Meja Kerja Eselon IV, Kursi Eseon IV, Meja Staf, Kursi Staf, Meja Rapat, Kursi Rapat, counterdesk	7 jenis	Dukungan 17,95% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman	1600 m2	Dukungan 7,69% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Dukungan 23,08% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit						
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 Jenis	Dukungan 5,13% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 170.000.000,00	Rp. 450.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Penyusunan bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	1 laporan	Dukungan 3,41% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Penyusunan LKJIP SKPD	Nilai LKJIP B						
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Penyusunan laporan keuangan bulanan	12 laporan	Dukungan 6,82% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Penyusunan laporan keuangan triwulan	4 laporan						
							03. Penyusunan laporan keuangan semester	2 laporan						
							04. Penyusunan laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan						
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Penyusunan DPA 2022	1 dokumen	Dukungan 86,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 390.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Penyusunan DPA-P 2021	1 dokumen						
							03. Penyusunan RKA 2022	1 dokumen						
							04. Penyusunan RKA-P 2021	1 dokumen						
							05. Renja PD 2022 dan Renja Perubahan PD 2021	2 dokumen						
							06. Forum PD	1 Laporan Berita Acara						
							07. Pengembangan website dinas	1 website						
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 dokumen	Dukungan 3,41% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.02.00.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00		
1.03.1.03.02.00.25.001	Pembinaan Penataan Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	90.09%	01. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	2 dokumen dalam 1 tahun	Dukungan 66,67% terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 90,09%	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang oleh TKPRD DIY	100% tindak lanjut dari permohonan						
							03. Pengembangan SIPR (Sistem Informasi Penataan Ruang)	1 Aplikasi						
							04. Berita Acara Perbaikan materi RDTR kabupaten	4 BWP (Bagian Wilayah Perkotaan)						
1.03.1.03.02.00.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 885.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	86.38%	01. Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen	Dukungan sebesar 33,33% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 86,38%	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Penyusunan Kajian dan Rapergub Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Sesuai Amanah Pasal 102 Perda No. 5 Tahun 2019)	1 Dokumen						
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	86.38%	1. Rekomendasi hasil evaluasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen	Dukungan sebesar 66,67% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 86,38%	100%	Rp. 485.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY	1 dokumen						
							3. Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen						
							4. Dokumen audit tata ruang	1 dokumen						
1.10	PERTANAHAN													
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.10.1.03.02.00.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 34.400.000,00	Rp. 650.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 3.451.400.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.10.1.03.02.00.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100%	Bahan penerbitan Penetapan lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum	1 dokumen	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp. 34.400.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.042.500.000,00	Rp. 2.300.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	24 jenis	Dukungan 30% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 355.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	12 bulan						
							03. Bukti Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet, PDAM	12 bulan						
							04. Dokumen hasil cetak dan penggandaan	3 jenis						
							05. Gedung kantor seluas 1.392 m2 yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							06. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Surat kabar harian	12 bulan						
							08. Alat Pencegahan COVID-19	4 jenis						
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 25% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	12 bulan						
							03. Kendaraan dinas dapat teroperasionalkan dengan baik	12 bulan						
							04. Tamu yang datang melalui front office terlayani dengan baik	12 bulan						
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 45% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 237.500.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 525.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Gedung kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	12 bulan	Dukungan 25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	9 unit	Dukungan 25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	7 unit						
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	18 jenis	Dukungan 25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	8 jenis						
1.05.1.05.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 181.000.000,00	Rp. 320.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP A	Dukungan 5.88 terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 laporan	Dukungan 15,69% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan OPD TA 2022 dan Perubahan TA 2021	10 dokumen	Dukungan 58.82 terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 96.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Kesepakatan hasil forum perencanaan OPD	1 BA						
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 19.61% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 4.188.920.000,00	Rp. 8.500.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.9angka	01. Kelompok Generasi Milenial yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	49 kelompok	Dukungan 37.50% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2.90	100%	Rp. 2.488.920.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	6 Rekomendasi						
							03. Rekomendasi dalam Pembauran Kebangsaan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	6 Rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.18.002	Pembinaan Kewaspadaan Nasional	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY (Badan Kesbangpol DIY)	Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.9angka	01. Laporan hasil koordinasi dan upaya tindak lanjut Forkopimda DIY	3 Laporan	Dukungan 62.50% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2.90	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 Laporan						
							03. Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY	1 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 Laporan						
							05. Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 Laporan						
							06. Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan kewaspadaan dini masyarakat DIY	4 Rekomendasi						
							07. Rekomendasi Forum Kemitraan di DIY	1 rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 3.120.000.000,00	Rp. 4.300.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.19.001	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.35angka	01. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	1 Laporan	Dukungan 33.33% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3.35	100%	Rp. 2.685.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Partai politik yang memperoleh pemahaman mengenai tatacara Penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku	10 Parpol						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Parpol						
							04. Perwakilan Kelompok Masyarakat (difabel, pemilih pemula, kelompok perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	300 orang						
1.05.1.05.01.00.19.002	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.35angka	01. Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di DIY	1 Laporan	Dukungan 16.67% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3.36	100%	Rp. 95.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi perkembangan politik di DIY	1 Rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.19.003	Pembinaan Organisasi Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.35angka	01. Rekomendasi Forum Ormas di DIY	1 Rekomendasi	Dukungan 50% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3.37	100%	Rp. 340.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Laporan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI										Rp. 780.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.20.001	Pembinaan Ketahanan Ekonomi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY (Badan Kesbangpol DIY)	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.89angka	01. Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi	1 Dokumen	Dukungan 40% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi sebesar 2.89	100 %	Rp. 440.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Master Plan Penguatan Ekonomi Masyarakat sekitar Bandara	1 Dokumen						
							03. Peta Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Analisa Rantai Nilai	1 Dokumen						
							04. Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi	3 Rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.20.002	Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY (Badan Kesbangpol DIY)	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.89angka	01. Laporan dan rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM	1 Rekomendasi	Dukungan 60% terhadap Skor Indkes Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya sebesar 2.89	100%	Rp. 340.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							02. Perwakilan pelajar, mahasiswa dan organisasi pemuda yang mendapat sosialisasi terkait pencegahan narkoba	200 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.837.420.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Rekomendasi P4GN	1 rekomendasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.05.1.05.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 876.427.000,00	Rp. 1.675.268.000,00		
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Benda benda Pos (Materai dan Prangko)	2 Jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 325.268.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Barang Cetakan	10 Jenis						
							03. Lembar hasil Penggandaan	50.000 Lembar						
							04. Bukti Pembayaran Langgaran Surat Kabar Harian/Majalah dan Buku	12 Bulan						
							05. Bukti Pembayaran tagihan internet, listrik, dan telepon	12 Bulan						
							06. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis						
							07. Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 2	15 Unit						
							08. Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4	19 Unit						
							09. Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan	2 Unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja										Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							dinas/operasional Roda 6							
							10. Alat Tulis Kantor	43 Jenis						
							11. Bukti Pembayaran Pajak Frekwensi Radio	1 Tahun						
							12. Penambahan Daya Listrik	1 Paket						
							13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis						
							14. Bukti Pembayaran langganan video conference	1 tahun						
					1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
							02. Keamanan Kantor Terjaga Dengan Baik	12 Bulan						
							03. Gedung kantor seluas 34.200 m2 yang terpelihara kebersihannya	12 Bulan						
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 Bulan	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 416.427.000,00	Rp. 800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan Rencana Tindaklanjut Hasil Rapat Koordinasi	12 Bulan						
1.05.1.05.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.385.563.000,00	Rp. 1.225.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya	Program 01-06	Persentase Pemenuhan	100%	01. Pos Pantau SRI (Satlinmas	1 Unit	Dukungan terhadap	100%	Rp. 914.563.000,00	Rp. 500.000.000,00	Satuan Polisi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor	Pembangunan	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rescue Istimewa) di Korwil III Parangtritis yang Terbangun		sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.				Pamong Praja	
1.05.1.05.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai RKBMD	5 Jenis	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 290.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Peralatan gedung kantor Sesuai RKBMD	4 Jenis						
							03. Mebeuler Sesuai RKBMD	3 Jenis						
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	15 Unit	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	19 Unit						
							03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	2 Unit						
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	3 Jenis	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 31.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	20 Jenis						
1.05.1.05.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN										Rp. 218.420.000,00	Rp. 289.200.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN													
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 4.920.000,00	Rp. 5.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Keuangan Sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan Bagi Pengguna Informasi	14 Laporan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 13.500.000,00	Rp. 14.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 119.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	8 Dokumen						
							03. Buku Data Satpol PP	50 Buku						
							04. Web GIS Satpol PP yang terbaru	1 Paket						
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Sesuai ROPK	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100%	Rp. 81.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									tugas dan fungsi SKPD.					
							02. Rekomendasi tindak lanjut hasil monev penyelenggaraan tibumtranmas, penegakkan perda, perdais dan/ perkara serta perlindungan masyarakat	1 Dokumen						
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT										Rp. 2.115.315.000,00	Rp. 3.085.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	70%	01. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	2 Laporan	Dukungan terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani.	100%	Rp. 244.634.000,00	Rp. 650.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	60 Laporan						
							03. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	96 Laporan						
							04. Laporan Deteksi dini gejala permasalahan masyarakat untuk penyajian data tentang situasi daerah dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Permendagri No.54 Tahun 2011)	60 Laporan						
							05. Laporan Pengamanan dan Pengendalian Masa Unjuk Rasa berlangsung	96 Laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	70%	01. Aset Pemda DIY yang terjaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	60 Titik	Dukungan terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani.	100%	Rp. 1.511.041.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							dengan kondusif di 5 Kab/Kota							
							02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	1 Tahun						
							03.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	96 Kali						
				04.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	10 Kali									
1.05.1.05.02.00.21.006	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	70%	01. Kebugaran, jiwa koors, ketrampilan, kemampuan dan kapasitas anggota Sat Pol.PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional	125 Personil	Dukungan terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 279.854.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Seragam Pakaian Dinas Satpol PP DIY	125 Stel						
1.05.1.05.02.00.21.007	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	70%	01. Rumusan Kerjasama Tibumtranmas Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dukungan terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 79.786.000,00	Rp. 135.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas	1 Dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	1 Rekomendasi						
							04. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur- Anggota FKD- MPU	2 Surat Keputusan Bersama						
1.05.1.05.02.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 412.082.000,00	Rp. 740.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	40%	01. Data Potensi Masyarakat Tentang Trantibulinmas	1 Jenis Data	Dukungan terhadap persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Berbah Depok Gamping Godean Gondokusuman Mergangsan Minggir Mlati Moyudan Pakualaman Seyegan Tegalrejo	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	40%	01. Anggota Satlinmas di Kecamatan yang Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuannya dalam memberikan perlindungan masyarakat	12 Kecamatan	Dukungan terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Rp. 362.082.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Apel Siaga Linmas	1 Kali						
1.05.1.05.02.00.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 1.343.338.000,00	Rp. 2.850.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.23.001	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	78%	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	24 Laporan	Dukungan terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 216.310.000,00	Rp. 500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	2 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 6.351.145.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	78%	01. Pelanggar Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara non yustisi	72 Laporan	Dukungan terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 883.344.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.23.003	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	78%	01. Masyarakat Rentan Pelanggar Perda dan Perkada yang Terbina	2000 orang	Dukungan terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 243.684.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1.05.1.05.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.584.196.000,00	Rp. 6.000.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	38%	Rp. 1.127.280.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Alat-Alat/ Perlengkapan kantor	15 jenis						
							03. ATK dan barang pakai habis lainnya	60 jenis						
							04. Bukti KIR kendaraan dinas operasional roda 4	5 unit						
							05. Bukti KIR kendaraan dinas operasional roda 6	9 unit						
							06. Bukti pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	12 bulan (5 unit) gedung						
							07. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	20 unit						
							08. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	18 unit						
							09. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5 jenis						
							10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10 unit						
							11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	12 bulan (1 unit) rekening air/ PDAM						
							12. Bukti pembayaran	12 bulan (8 unit) rekening						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							rekening listrik (pelanggan PLN premium)	listrik						
							13. Bukti pembayaran rekening telepon	12 bulan (12 unit) rekening telepon kabel						
							14. Bukti pembayaran surat kabar harian	12 bulan (3 jenis) surat kabar harian						
							15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	12 bulan 1 rekening internet						
							16. Bukti Mutasi balik nama kendaraan dinas operasional	1 unit						
							17. Hasil Penggandaan	100.000 lembar						
							18. Bukti Pengiriman paket	1 tahun 2 kali						
							19. Barang hasil cetak	5 jenis						
							20. Penambahan rekening listrik	2 rekening						
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan benar	12 bulan	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD DIY.	23%	Rp. 650.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Arsip Kantor Terkelola dengan Baik	12 bulan						
							03. Keamanan Kantor Terjaga dengan Baik	12 bulan						
							04. Mobilitas Pimpinan terlayani dengan baik	12 bulan						
							05. Repeater Kantor Terjaga dengan Baik	12 bulan						
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindakanjutr hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	39%	Rp. 806.916.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindakanjutr hasil rapat koordinasi	12 bulan						
1.05.1.05.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA										Rp. 2.238.638.000,00	Rp. 3.700.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	APARATUR													
1.05.1.05.03.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	14 jenis	Dukungan sebesar 20% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.	100%	Rp. 1.065.600.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	3 jenis						
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	8 unit	Dukungan sebesar 61% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.	61%	Rp. 397.590.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin yang terpelihara sesuai RKPBMMD	7 unit						
							03. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar yang terpelihara sesuai RKPBMMD	2 unit						
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Mebeleur kantor terpelihara/ terawat	8 jenis	Dukungan sebesar 39% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.	39%	Rp. 775.448.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Penataan Ruang Rapat/Lingkungan	4 jenis						
							03. Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	38 jenis						
							04. Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	23 jenis						
							05. Revitalisasi gudang logistik dan peralatan	2 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 151.525.000,00	Rp. 216.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 9% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 laporan	Dukungan 10% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan 68% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Data website BPBD DIY yang terbarukan secara kontinyu	100%						
							03. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA						
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 15.525.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 6.758.750.000,00	Rp. 7.000.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	01. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	25 Desa/Kelurahan	Dukungan 55% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 3.333.750.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	02. Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) DIY	1 dokumen						
							03. Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY	1 dokumen hasil monev pembentukan dan pengembangan Destana DIY						
							04. Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas	6 rekomendasi						
							05. Hasil Review Peta Bencana	2 Dokumen						
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	01. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang terbentuk dan terbina;	35 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	100%	Rp. 3.425.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	02. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;	150 orang (5 angkatan)						
							03. Dokumen Rencana Kontijensi gempabumi, kekeringan, banjir	2 Dokumen						
							04. Jumlah Instansi yang terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan	50 OPD/Lembaga /Institusi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bencana Nasional (HKBN) di DIY;							
							05. Panduan penyelenggaraan rumah sakit aman bencana di DIY	1 dokumen						
1.05.1.05.03.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 6.657.047.000,00	Rp. 3.413.850.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	12menit	01. Laporan Kejadian/Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	360 laporan/kejadian	Dukungan 20 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%	Rp. 937.500.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Relawan dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju	40 orang, 2 angkatan						
							03. Relawan, Aparat dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan (ICS)	35 orang (2 angkatan)						
							04. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	28 personil dan 4 perwira regu						
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Seluruh Wilayah DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	12menit	01. Blue print dan Detail Engineering Design/DED fasilitas Pusdalops	2 dokumen	Dukungan 45 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%	Rp. 2.011.827.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. EWS (Early Warning System) yang terintegrasi	1 sistem	Dukungan 45 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%				
							03. Laporan Koordinasi Klaster PB	24 laporan						
							04. Laporan operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	12 laporan						
							05. Pengelola media center dan komunitas media yang meningkat kapasitasnya	40 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.16.003	Pengelolaan Logistik Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bantul Dlingo Girimulyo Girisubo Imogiri Jetis Karangmojo Kokap Ngawen Nglipar Panjatan Pleret Ponjong Purwosari Samigaluh Semin Tanjungsari Wonosari Trirenggo Temuwuh Purwosari Jepitu Karangawen Kebon Agung Patalan Jati Ayu Hargotirto Beji Kampung Pengkol Bugel Pleret Wonolelo Kenteng Sawahan Giricahyo Girijati Kebon Harjo Ngargosari Sidoharjo Candi Rejo Banjarejo Siraman	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	12menit	01. Kelompok Masyarakat Desa yang mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	(1) 12 kelompok	Dukungan 23% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Rp. 1.218.750.000,00	Rp. 3.400.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Laporan Semeteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik	(2) 2 laporan						
							03. Hasil Update Data Logistik secara Periodik.	(3) 1 Laporan						
							04. Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana.	(4) 1000 paket						
							05. Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	(5) Seng (300), Deklit (500), Karung (10000), Sekop panjang (300), Sekop pendek (300), Bronjong (700)						
							06. Kajian Kebutuhan Logistik	(6) 1 dokumen						
							07. Logistik posko pendukung penanggulangan bencana banjir dan longsor	(6) 20 paket						
							08. Logistik penanggulangan bencana kekeringan	(8) 300 Tangki Air bersih						
							09. Jumlah unsur masyarakat dan aparat yang menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(9) 35 orang (1 angkatan)						
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	12menit	01. Aparat, relawan dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	200 orang (4 angkatan)	Dukungan 16% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 2.488.970.000,00	Rp. 3.350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Laporan Update Data Peralatan Penanggulangan Bencana secara periodik	4 laporan (Triwulanan)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 20.526.051.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Mobil Komunikasi yang siap pakai	1 jenis						
							04. Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai	25 jenis						
							05. Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan	38 jenis						
							06. Sewa gudang jembatan bailey 1 tahun	1 unit						
							07. Radio Komunikasi dalam PB yang dikelola	1 paket radio komunitas						
1.05.1.05.03.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 2.135.895.000,00	Rp. 5.800.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	80skor/nilai	01. Hasil Perhitungan DRI (Disaster Recovery Index) atau Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	1 Dokumen	Dukungan sebesar 99% terhadap pencapaian indekspemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	100%	Rp. 1.863.750.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Jumlah KK penerima/pemanfaat huntap (hunian tetap) Merapi dan Sarpras Lingkungan	5 KK						
							03. Jumlah KK yang mendapat Stimulan Perbaikan rumah	23 KK						
							04. Laporan Monev Kegiatan RR	1 Laporan						
							05. Personil Pemda DIY yang mampu melaksanakan Jitu-Pasna	35 orang						
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	80skor/nilai	01. Hasil Perhitungan DRI (Disaster Recovery Index) - Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	1 dokumen	Dukungan sebesar 1% terhadap pencapaian indekspemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	100%	Rp. 272.145.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							02. Jumlah kelompok masyarakat Penerima Stimulan Pemulihan Sosial	5 kelompok						
							03. Rancangan Pergub tentang santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Pasca Bencana	1 dokumen rancangan Pergub						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.06	SOSIAL													
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial													
1.06.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 19.742.266.002,00	Rp. 21.350.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 40 jenis; BRTPD: 41 jenis; BPRSW: 37 jenis; BRSBKL: 43 jenis; BPRSR: 48 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 28 jenis	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.879.793.878,00	Rp. 15.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Penyediaan Alat listrik dan elektronik bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 26 jenis; BPRSW: 14 jenis; BRSBKL: 10 jenis; BPRSR: 21 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 11 jenis						
							03. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BRTPD: 180 lbr; BPRSW: 200 lbr; BRSBKL: 360 lbr; BPRSR: 100 lbr; BRSPA: 100 lbr						
							04. Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 23 jenis; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 12 jenis; BRSBKL: 5 jenis; BPRSR: 12 jenis; BRSPA: 28 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRTPD: 20 bh; BPRSW: 11 bh; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 8 bh, BRRSPA 4 buah.						
							06. Pengisian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 408 tbg; BPRSW: 180 tbg; BRSBKL: 720 tbg; BPRSR: 216 tbg; BRSPA: 384 tbg; BPSTW: 672 tbg						
							07. Bibit tanaman Hias Dinas dan Balai	1 tahun						
							08. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 7 jenis; BRSBKL: 90 jns; BPRSR: 25 jenis; BRSPA: 12 jenis						
							09. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80 org; BRSPA: 125 org; BPSTW: 230 org						
							10. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 10 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 4 lok						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00

Nama OPD : Dinas Sosial															Jumlah Pagu : Rp. 50.924.450.771,00														
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan																
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan															
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)															
							11. Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan Balai	Dinas: 6 lok, BRTPD: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BRSPA: 2 lokasi; BPSTW: 1 lok																					
							12. Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan Balai	Dinas: 24 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 4 lok; BRSBKL: 16 lok; BPRSR: 22 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 28 lok																					
							13. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 48 eks; BRTPD: 24 eks BPRSW: 24 eks; BRSBKL: 24 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 48 eks; BPSTW: 48 eks																					
							14. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok																					
							15. Retribusi Sampah	Dinas: 24 bulan/ 2 lok, BRTPD: 12 bln; BPRSW: 12 bln; BRSBKL: 24 bln/ 2 lok; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln/ 2 lok; BPSTW: 24 bln/ 2 lok																					
							16. Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan Balai	Dinas: 4 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok																					
							17. Kir roda 4 dan 6 Dinas dan Balai	Dinas : 1 unit/ 2 kl ; BRSPA: 2 unit/ 4 kl																					

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							18. Pembayaran Pajak STNK roda 2/3, dan 4/6 Dinas dan Balai	Dinas : 2/3: 46 unit; 4/6: 29 unit; BRTPD: 2/3: 6 unit; 4: 4 unit; BPRSW: 2: 2 unit; 4: 2 unit; BRSBKL: 2/3: 7 unit, 4/6: 5 unit; BPRSR: 2:3 unit; 4: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 12 unit						
							19. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 5 jenis, 45 buku; 78.800 lbr; BRTPD: 6 jenis lbr; BPRSW: 5 jenis; 31.000 lbr; BRSBKL: 48 buku, 45.526 lbr; BPRSR: 8 jenis; 70 buku, 35.000 lbr; BRSPA: 10 jenis; 90.400 lbr; BPSTW: 6 jenis; 21.000 lbr						
							20. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	Dinas: 1 lok						
							21. Pakaian kerja lapangan	BRSBKL: 34 stel, BPRSR: 60 stel						
							22. Publikasi	BRTPD: 2 jenis						
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan Balai	Dinas: 7 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.519.140.224,00	Rp. 5.100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Tertib administrasi keuangan, Barang dan Kepegawaian Dinas dan Balai	12 bln						
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 4.500 os; BRTPD: 1.798 os; BPRSW: 720 os; BRSBKL: 900 os; BPRSR: 948 os; BRSPA: 400 os; BPSTW: 396 os	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 343.331.900,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	Dinas:248 op; BRTPD: 168 op; BPRSW: 66 op; BRSBKL: 90 op; BPRSR: 126 op; BRSPA: 96 op; BPSTW: 96 op						
							3. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	Dinas : 1 th						
1.06.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 8.765.752.144,00	Rp. 36.610.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pembuatan Tempat Sampah dan pembuatan dapur Dinas Induk	2 paket	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.941.250.186,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Biaya kontruksi fisik kerusakan sedang selasar penghubung 3. rehab ruang asrama werda, saluran air gorong-gorong 4. Belanja konsultasi perencanaan dan pengawas lokasi di BRTPD	1 kegt						
							3. Pembangunan Asrma (1 pkt) pada BRSBKL	1 kegt						
							4. Rehab Rumah Dinas (2 unit) dan rehab ruang Ketrampilan (2 unit) pada BPRSR	1 kegt						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan Wifi pada Dinas	1 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 466.531.958,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							3. Pengadaan Komputer PC (2 unit); Printer (2 unit); Almari (2 bh); Oven (1 bh); Kompor Gas (2 bh); Trolis Gas (1 bh); Perlengkapan permainan anak (1 pkt); pengadaan meja bakery (2 bh); Dispencer (5 bh); Pengadaan Sofa (1 bh); Penanak nasi (2 bh); Televisi (2 unit), UPS (2 unit), Kulkas (1 unit), Jam dinding (10 bh); sound sistem (1 unit), tensimeter (2bh), termometer (2bh); pada BPRSW	18 jenis						
							4. Pengadaan Note book (2 unit), Mesin pengering pakaian 1 unit, Pompa air jetpump 2 unit, freezer box 2 unit, camera 1 unit, CCTV 6 titik, Telp PABX 1 paket di BRSBKL	7 jenis						
							5. Pengadaan AC (2 unit); Kipas angin (10 bh); Pompa air (4 unit); Torn Air (4 bh); Komputer PC (3 unit); Printer laserjet (3 unit); pada BPRSR	11 jenis						
							6. Pengadaan AC (2 unit); Vacuum Cleaner (1 unit); Komputer PC (2 unit); Note book (1 bh); Filling Cabinet (1 unit); LCD Proyektor (1 unit); Keyboard musik (1 unit), Mesin cuci 2 unit pada BPSTW	7 jenis						
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Air Limbah/Kotor /Pengurasan WC Camp Assesment (10 kl); Perbaikan Saluran Air Dinas (1 pkt); Pemeliharaan Kran Kamar Mandi Dinas dan Camp Assesment (50 bh); pemeliharaan taman (1 th). Perbaikan	7 kegt	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.071.027.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							partisi Aula Barat 1 paket, Pemeliharaan Rehab Septitang kumunal 1 paket, rehab ruang isolasi 1 paket, pengecatan 1 paket pada Dinas							
							2. Penyedotan WC (5 kl); Pengecatan pagar Balai (1 lok); Perbaikan saluran air dan gorong-gorong (1 lok); Perbaikan Hydrant dan pintu asrama (1 lok); Pemeliharaan tanaman (4 jns) di BRTPD	5 kegt						
							3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jns); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 bh); Penggantian Conblok (1 pkt); pada BPRSW	3 kegt						
							4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (12 bl); Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor (60 kali), pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (12 bln) pada BRSBKL	3 kegt						
							5. Pemeliharaan Instalasi air minum (kran, keni, stop kran, sok drat dalam, pralon, TBA); pemeliharaan slot pintu, gembok, silinder, kaca; Pemeliharaan Gedung kantor (1 pkt) pada BPRSR	3 kegt						
							6. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC (16 kl); Perbaikan Saluran Air (1 unit); Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (pintu, kusen, conblok, keramik tembok sumur, asesibilitas (1 unit) pada BPSTW	3 kegt						
							7. Pemeliharaan/rehabilitasi pagar 1 paket pada BRSPA	1 keg						
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan	100%	1. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan	1 tahun	Dukungan terhadap sarana	100%	Rp. 867.828.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pembangunan	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Prasarana Aparatur		Pelumas Roda 2,3,4,6		prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
							2. Belanja Jasa Service Roda 2,3,4,6	1 tahun						
							3. Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2,3,4,6	Dinas: 60 unit; BRTPD: 8 jenis; BPRSW: 4 unit; BRSEKL: 10 unit; BPRSR: 4 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit						
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. BBM Genzet (510 lt); Pemeliharaan Alat Bermesin (Lift 1 unit & Mesin potong rumput 5 unit); pemeliharaan Alat-Alat Kantor : CPU (40 unit), Printer (35 unit), laptop (10 unit), LCD proyektor (4 unit), Mesin ketik (7 unit), Servis AC (90 unit), isi Freon (30 unit), Suku Cadang AC (10 unit), Faximile (10 unit), Pompa air (2 unit), Genzet (2 unit), Sound sistem (5 unit) pada Dinas	14 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 419.115.000,00	Rp. 510.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (1.350 lt); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (12 bln); Perbaikan komputer, printer, laptop, LCD, jaringan internet, mesin jahit (12 bln); Perbaikan AC ruangan dan pengisian freon (40 buah); Kalibrasi Alat Fisioteraphy dan alat keperawatan (12 bln) pada BRTPD	16 jenis						
							3. Pemeliharaan Alat-alat kantor (komputer, pemanas air, Pabuson, Dropcup, LCD, CCTV, gamelan, laptop,	14 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kompors Gas, kulkas, mesin ketik, Steamer, mesin jahit, faximili)							
							4. BBM Genzet (432 lt); pemeliharaan genzet (2 unit); Jet Pum (6 unit); Mesin Cuci (3 unit); AC (15 unit); Komputer (20 unit) Npte book (2 unit); Mesin Jahit (5 unit); Mesin Obras (2 unit); Kulkas (5 unit); televisi (4 unit); Wireless (2 unit) pada BRSBKL	12 jenis						
							5. BBM Mesin Potong Rumput (360 lt); BBM Genzet 720 lt); Pemeliharaan Mesin potong rumput (3 unit); genzet (2 unit); Komputer (18 kl), Laptop (16 kl); Printer (16 kl); Mesin Jahit (20 kl); Kompors gas (6 kl); Kulkas (6 kl); Mesin ketik (2 unit); Keyboard (2 kl); LCD (4 unit); CCTV (12 bin); Mesin profil kayu (2 bh); Gerenda tangan (2 bh); Boor duduk (2 bh); Mesin pasah listrik (2 bh); Compresor (3 bh); televisi (10 unit) pada BPRSR	20 jenis						
							6. BBM Genzet (655 lt); Alat kantor (11 jns); Alat Rumah Tangga (8 jns); pada BRSPA	3 macam						
							7. BBM untuk genzet dan mesin potong rumput (240 lt); Instalasi air minum (penggantian kran air) (30 bh); Alat-alat kantor (komputer, note book, faximili) (3 jns); Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas, tangga jalan) (6 jns) pada BPSTW	4 jenis						
1.06.1.06.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 34.732.000,00	Rp. 45.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya	Program 01-06	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan	100%	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian	40 org	Dukungan terhadap	100%	Rp. 34.732.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembangunan	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Angka Kredit		peningkatan kapasitas sumbedaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit					
1.06.1.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 134.761.000,00	Rp. 144.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.361.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 86.400.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan						
							03. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 5.405.040.300,00	Rp. 11.000.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	6.27%	01. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	50 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial	100%	Rp. 2.395.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Komite Penyandang Disabilitas	1 kegt						
							03.Pengasramaan Murid SLB	50 org						
							04. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	400 org						
							05. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org						
							06. Perlindungan Bagi Disabilitas melalui LKS	50 org						
							07. Ijin Pengangkatan Anak	30 org						
							08. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	100 org						
							09. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	15 org						
							10. Bantuan operasional LPA DIY, Rumah Singgah (7 lbg), YSI, PeKaPD (perkumpulan Keluarga Penyandang Disabilitas)	13 lbg						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	6.27%	01. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	150 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang terhadap Program Rehabilitasi Sosial	100%	Rp. 3.010.040.300,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	70 org						
							03. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	5 org						
1.06.1.06.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 5.946.737.000,00	Rp. 9.500.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.64%	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 org	Kontribusi Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Rp. 3.941.717.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 org						
							03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 org						
							04. Pelayanan Taman Werda	125 org untuk 6 bulan /24 kali pertemuan selama 6 bulan						
							05. Bantuan kelembagaan lansia	1 lbg (Komda Lansia)						
							06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 org						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.64%	07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2021	2000 org			Rp. 2.005.020.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							08. Bedah Kamar Lansia	50 org						
							09. Workshop Kajian Ghra Lansia DIY	1 kegt						
							10. Bimtap KPM Penerima PKH	500 orang						
							11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia melalui Forkom LKS LU DIY	5 lbg						
							12. Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lansia	5 lokasi						
							13. Workshop Komplementaritas PKH	1 kegiatan						
						02. Fasilitasi Perawatan jenasah terlantar	1 Tahun							
						03. Fasilitasi TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana	Tagana inti 40 org, Pengolah data 2 org, Petugas Penanganan OT 1 orang, Sarpras Tagana 300 org, Peningkatan kapasitas Tagana 100 org, ; Tagana masuk sekolah 5 sekolah, Tagana masuk Komunitas 5 desa							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Bantuan Air Bersih untuk penanggulangan kekeringan	750 tanki						
							05. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org						
							06. Pembentukan Kampung Siaga Bencana	1 lokasi						
							07. Buffer stock Tanggap darurat korban bencana alam dan sosial (bahan pangan dan perlengkapan)	1 Tahun						
1.06.1.06.01.00.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN										Rp. 8.353.141.700,00	Rp. 12.700.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.17.001	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	1.01%	01. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan	5 Kab/ Kota	Kontribusi Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS terhadap Program penanganan fakir miskin dalam 1 tahun atau 100 %	100%	Rp. 7.258.866.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 Kab/ Kota						
							03. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 Kab/ Kota (825 org)						
							04. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE (70 org), LKM (50 org), USEP KM (50 org)	170 org						
							05. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 Kab/ Kota						
							06. KUBE Pengembangan 5 Kab/ Kota	50 KUBE						
							7. Bimbingan lanjutan dan Modal UEP PKH Graduasi mampu melaksanakan fungsi sosial	450 org						
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	1.01%	01. Penyusunan data PMKS dan PSKS di 438 desa/kelurahan	1 dokumen	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan	100%	Rp. 1.094.275.700,00	Rp. 4.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial					
							02.Penyuluhan melalui media peragaan	12 lokasi						
							03.Penyuluhan sosial melalui media cetak	7 paket						
							04.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	40 kali (Radio dialog 23 kl, ILM 1 pkt) dan Televisi (dialog 6 kl, Liputan 8 kl, berita 15 kl)						
							05.Publikasi layanan masyarakat melalui Video dan advetorial online	6 kali						
							06.Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	36 kl						
							07. Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	200 orang						
							08. Penyuluhan Sosial di Institusi Pendidikan dan PIE	124 org						
							09.Penguatan Kapasitas Tim Penyuluh Sosial dan Tim Penyuluh Sosial Masyarakat	60 org						
							10. Koordinasi Jejaring Penyuluhan	80 orang						
1.06.1.06.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS									Rp. 1.614.384.375,00	Rp. 2.700.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup amndiri dan berfungsi sosial	27.06%	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 org	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi	100%	Rp. 1.614.384.375,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Penyandang Disabilitas					
1.06.1.06.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.504.295.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Warga Binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	46.67%	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Permpuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 org	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Penyandang Masalah Sosial	100%	Rp. 1.504.295.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 1.569.622.100,00	Rp. 2.700.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat	14.6%	01. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 org	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Gelandanagn, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	100%	Rp. 1.569.622.100,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Pelayanan Sosial Bagi Penyadang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 org						
1.06.1.06.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.164.279.050,00	Rp. 1.600.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	82.5%	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai	80 org	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial	100%	Rp. 1.164.279.050,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							PRSR		Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial					
1.06.1.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.181.977.100,00	Rp. 1.700.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	41.93%	01. Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 anak	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	100%	Rp. 1.181.977.100,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02.Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak						
							03. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	20 anak						
1.06.1.06.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dan hak-haknya	100%	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 org	Kontribusi Pelayanan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI - NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 1.707.463.000,00	Rp. 5.200.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.24.001	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat!	51.59%	01. Pemberian penghargaan bagi keluarga pahlawan, pemberian gelar pahlawan dan penghargaan satya lencana kebaktian	8 org	Dukungan terhadap Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan terhadap program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100%	Rp. 367.650.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKSN	100 org						
							03. Fasilitasi ziarah rombongan di TMP dari berbagai lembaga/ instansi di DIY maupun luar daerah	3600 org						
							04. Terwujudnya standarisasi pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP	2 lokasi						
1.06.1.06.01.00.24.002	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat!	51.59%			Kontribusi PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS terhadap Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100%	Rp. 1.339.813.000,00	Rp. 3.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							01. Bantuan Oprasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS BKKS) dan LK3 Teratai	4 lbg						
							02. Peningkatan kapasitas TKSK	78 org						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 58.324.450.771,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Pembinaan Forum PSKS dan PSKS berprestasi (Orsos/LKS, WKSBM, KT, TKSK, PSM)	5 Kab/ Kota						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.07	TENAGA KERJA													
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.188.163.000,00	Rp. 4.639.979.300,00		
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan 44% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.850.000.000,00	Rp. 2.035.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan	7 jenis						
							Barang Logistik Kantor	15 jenis						
							Bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	47 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	18 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	2 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	6 gedung						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis						
							Langganan surat kabar harian,majalah dan tabloid	2 jenis,12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet	12 bulan (1 dinas induk,2 UPTD)						
							Pemilahan arsip keuangan in aktif	1 paket						
							Penggandaan	50000 lembar						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengiriman dokumen	600 dokumen						
							Penjilidan	390 buku						
							Penyusutan arsip keuangan	4500 berkas						
							Peralatan rumah tangga	19 jenis						
							Surat keluar	440 surat						
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	31 orang	Dukungan 42% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.768.163.000,00	Rp. 1.944.979.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Kinerja 38 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	38 orang						
							Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
							Kinerja 5 orang perencanaan anggaran dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
							Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	7 orang						
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Konsultasi,koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun	Dukungan 14% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 570.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.713.068.000,00	Rp. 3.147.774.800,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	DED Rusunawa	1 dokumen	Dukungan 8% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 56.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pengadaan Peralatan kantor sesuai RKPBMMD	20 jenis	Dukungan 42% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.320.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pengadaan Perlengkapan kantor sesuai RKPBMMD	1 jenis						
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	terpeliharanya rumah dan gedung kantor	4 unit	Dukungan 13% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 377.068.000,00	Rp. 414.774.800,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas operasional roda 4 terpelihara sesuai RKPBMMD	20 unit	Dukungan 27% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 790.000.000,00	Rp. 869.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							kendaraan operasional roda 2 terpelihara sesuai RKPBMMD	43 unit						
							Kendaraan roda 6 terpelihara sesuai RKPBMMD	2 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Peralatan kantor terpelihara	18 jenis	Dukungan 10% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 290.000.000,00	Rp. 319.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 279.952.000,00	Rp. 307.947.200,00		
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Survelience ISO 9001-2015	3 sertifikat	Dukungan 94% terhadap Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 263.389.000,00	Rp. 289.727.900,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1. pengawasan ketenagakerjaan	23 orang	Dukungan 6% terhadap Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.563.000,00	Rp. 18.219.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							2. Instruktur	31 orang						
							3. penguji K3	8 orang						
							4.Mediator Ketenagakerjaan	3 orang						
							5.Pengantar kerja	4 orang						
1.07.1.07.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 463.000.000,00	Rp. 509.300.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Febuari 2021	nilai lakip dari 83.66 menjadi 84.00	Dukungan 4% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.000.000,00	Rp. 19.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 6% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Dokumen pelaksanaan anggaran	1 dokumen	Dukungan 76% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen						
							Penyusunan dokumen data Ketenagakerjaan	1 dokumen						
							Penyusunan PTKD	1 dokumen						
							Rencana Operasional/Pelaksanaan kegiatan ROPK 2021	1 dokumen						
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Dukungan 14% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 65.000.000,00	Rp. 71.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
1.07.1.07.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 7.583.600.000,00	Rp. 9.045.960.000,00		
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab/Kota	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	7.61%	Kios 3 In 1	1 layanan	Dukungan 100% Terhadap terwujudnya persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil sebesar 7.61 %	100%	Rp. 7.583.600.000,00	Rp. 9.045.960.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pelatihan Instiusional	6 paket						
							Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	35 paket						
							Pelatihan Up Skillling	15 paket						
1.07.1.07.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.468.196.000,00	Rp. 1.615.015.600,00		
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	425Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi	300 orang	Dukungan sebesar 65% terhadap terwujudnya jumlah Tenaga Kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan sebanyak 425 Orang	100%	Rp. 443.257.000,00	Rp. 487.582.700,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	87lembaga								
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	425Orang	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	60 orang	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya Jumlah Tenaga Kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan sebanyak 425 Orang	100%	Rp. 312.846.000,00	Rp. 344.130.600,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	87lembaga								
1.07.1.07.01.00.16.003	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	425Orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Dukungan 100% terhadap terwujudnya lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi sebanyak 87 lembaga	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	87lembaga	Rakor HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia)	1 kali						
1.07.1.07.01.00.16.005	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	425Orang	Pelatihan Aviation Security	20 orang	Dukungan sebesar 10% terhadap terwujudnya Jumlah Tenaga Kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan sebanyak 425 Orang	100%	Rp. 662.093.000,00	Rp. 728.302.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	87lembaga	Pelatihan Groundstaff	20 orang						
1.07.1.07.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 581.300.000,00	Rp. 639.430.000,00		
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	kab kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1588perusahaan	Bimtek Struktur dan Skala Upah	90 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1588 perusahaan	100%	Rp. 290.000.000,00	Rp. 319.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	5 kab kota						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum	5 kab kota						
							Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	182 orang						
							Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK Gub						
1.07.1.07.01.00.18.002	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	kab kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1588perusahaan	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	3 akt/90 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1588 perusahaan	100%	Rp. 291.300.000,00	Rp. 320.430.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pemantauan Perusahaan Yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	400 orang						
							Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi mediator	30 orang						
							Peringatan Hari Buruh	400 orang						
							Sidang lembaga kerjasama tripartit	6 sidang/6 kesepakatan						
							Sosialisasi Sarana HI (E-PP,WLKP Online,PKB,Suku)	3 akt/90 orang						
1.07.1.07.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN										Rp. 710.000.000,00	Rp. 781.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.19.001	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	63%	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma k3	400 perusahaan	Dukungan sebesar 60% terhadap terwujudnya persentase jumlah perusahaan nihil kecelekaan kerja sebesar 63 %	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.19.002	Pengawasan Norma Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	63%	Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya peningkatan presentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja 63 %	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 636.121.000,00	Rp. 699.733.100,00		
1.07.1.07.01.00.20.003	Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	488perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	500 orang perusahaan besar dan menengah serta 350 UMKM	Dukungan sebesar 65% terhadap terwujudnya Jumlah Perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar sebanyak 488 perusahaan	100%	Rp. 436.121.000,00	Rp. 479.733.100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pengujian Lingkungan Kerja pada perusahaan	50 UMKM dan 100 perusahaan besar menengah						
1.07.1.07.01.00.20.004	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	488perusahaan	Sertifikasi Hiperkes dan KK	180 orang	Dukungan sebesar 35% terhadap terwujudnya Jumlah Perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar sebanyak 488 perusahaan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2	Pilihan													
2.08	TRANSMIGRASI													
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
2.08.1.07.01.00.15	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA										Rp. 25.570.494.000,00	Rp. 30.239.543.400,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN													
2.08.1.07.01.00.15.002	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Pemutakhiran (Updating) informasi pasar kerja	12 bulan	Dukungan 45 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.915 orang	100%	Rp. 258.554.000,00	Rp. 284.409.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan bursa kerja	1 kali						
2.08.1.07.01.00.15.003	Pembentukan Kesempatan Kerja	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Padat karya infrastruktur	110 lokasi	Dukungan 30 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.915 orang	100%	Rp. 23.968.783.000,00	Rp. 28.477.661.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri	500 orang						
2.08.1.07.01.00.15.004	Penyelenggaraan Transmigrasi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi	30 KK	Dukungan 5% terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.915 orang	100%	Rp. 732.632.000,00	Rp. 805.895.200,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.005	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	10 lembaga	Dukungan 5% terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.915 orang	100%	Rp. 50.400.000,00	Rp. 55.440.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.006	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	40 orang	Dukungan 5% terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.915 orang	100%	Rp. 430.000.000,00	Rp. 473.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 44.193.894.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									transmigran sebanyak 10.915 orang					
2.08.1.07.01.00.15.007	Pemantauan Lembaga Penempatan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10915Orang	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	130 orang	Dukungan 5% terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran 10.915 orang	100%	Rp. 130.125.000,00	Rp. 143.137.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	100 perusahaan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk													
1.08.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.720.831.760,00	Rp. 2.486.249.300,00		
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 55%	100%	Rp. 865.154.500,00	Rp. 930.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8 Jenis						
							03. Kebersihan 2 Gedung	Kebersihan 2 Gedung (Kantor DP3AP2 DIY 3.653 m2 dan Gedung RDU 415 m2)						
							04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun						
							05. Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	4 jenis						
							06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan						
							07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun						
							08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun						
							09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							10. Penyediaan Barang Cetakan	1 tahun						
							11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar						
							12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun						
							13. Pengelolaan data dan informasi	1 tahun						
							14. Pengisian Tabung Pemadama Kebakaran	3 jenis						
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 31,41%	100%	Rp. 556.698.760,00	Rp. 635.704.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 orang						
							03. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 13,6%	100%	Rp. 298.978.500,00	Rp. 920.545.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.08.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 555.191.000,00	Rp. 609.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	1 gedung (DP3AP2 DIY 3.653 m2)	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 25,56%	100%	Rp. 191.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 35,46%	100%	Rp. 274.191.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit						
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 56 unit AC2. 2 Unit Pompa Air 3. 2 Unit Genset	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 11,41%	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 99.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 87.443.000,00	Rp. 130.000.000,00		
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 4,79%	100%	Rp. 8.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12,24%	100%	Rp. 23.443.000,00	Rp. 44.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK	8 dokumen	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 79,80%	100%	Rp. 48.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Forum OPD	1 angkatan						
							03. Berlangganan Zoom Meeting	1 tahun						
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 3,17%	100%	Rp. 8.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 1.373.928.000,00	Rp. 2.659.970.500,00		
1.08.1.08.01.00.15.002	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Seluruh DIY	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	01. Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	500 orang	Mendukung terlayannya Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 62%	100%	Rp. 920.432.000,00	Rp. 1.724.970.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Fasilitasi Pusat lembaga layanan yang menyelesaikan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.	1 lembaga (Hibah)						
							03. Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan	1 forum						
							04. Fasilitasi Gugus tugas TPPO	1 forum						
							05. Penyusunan regulasi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.15.003	Pemenuhan Hak-hak Anak	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Seluruh DIY	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	01. Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	1 dokumen	Mendukung meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebesar 38,05%	100%	Rp. 453.496.000,00	Rp. 935.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Pembinaan KLA	6 gugus tugas KLA						
							03. Monev pelaksanaan KLA di Kab/Kota	5 dokumen						
							04. Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah	12 forum						
							05. Fasilitasi Forum Anak Daerah	1 forum						
							06. Pelatihan Perlindungan Anak	30 orang						
							07. Fasilitasi TESAGA	1 jenis layanan						
							08. Penyelenggaraan HAN di DIY	1 kali						
1.08.1.08.01.00.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 1.318.036.000,00	Rp. 2.290.000.000,00		
1.08.1.08.01.00.16.001	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34,42%	01. Pelatihan PPRG di OPD Pemda DIY	37 OPD	Mendukung meningkatnya implementasi PUG di Pemda DIY sebesar 28,42%	100%	Rp. 149.963.500,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Evaluasi implementasi PUG di OPD dan Kab/Kota	37 OPD						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
1.08.1.08.01.00.16.002	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Patuk Samigaluh Turi	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.42%	01. Inisiasi desa prima	5 desa	Mendukung meningkatnya kapasitas serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan di bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial sebesar 47%	100%	Rp. 635.000.000,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Pendampingan desa prima	5 desa						
							03. Pembinaan desa prima	110 desa						
							04. Hibah desa prima	2 desa prima						
							05. Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri	1 kali						
							06. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik	1 angkatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Sosialisasi Pemahaman Gender	7 lokasi						
1.08.1.08.01.00.16.003	Pengelolaan Data Gender dan Anak	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Updating data gender dan anak.	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.42%	01. Update Data Gender dan Anak serta data perlindungan Perempuan dan Anak.	2 dokumen	Mendukung bahan pengambilan kebijakan gender dan anak sebesar 24,58%	100%	Rp. 533.072.500,00	Rp. 1.140.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan Informasi Gender dan Anak dan Sistem Data Perlindungan Perempuan dan Anak.	1 paket						
							03. Fasilitasi Organisasi Perempuan	3 organisasi						
							04. Fasilitasi Forum Pendukung PUG, PP dan PA	4 forum						
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk													
1.14.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 536.040.250,00	Rp. 2.000.000.000,00		
1.14.1.08.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	5 Kab/kota	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	01. Koordinasi Pengendalian Penduduk	2 kali	Memberikan dukungan terhadap penyebaran Informasi dan Edukasi mengenai pengendalian penduduk dan KB sebesar 63%	100%	Rp. 126.040.250,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	5 kali						
							03. Sosialisasi Juknis Kependudukan	1 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal	6 kali						
1.14.1.08.01.00.15.004	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	5 kab/Kota	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	01. Evaluasi pendewasaan usia perkawinan	1 dokumen	Memberikan dukungan terhadap strategi pengendalian penduduk sebesar 37%	100%	Rp. 410.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Bakti Sosial Pelayanan KB	4 kali						
							03. Advokasi/KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	1 paket						
							04. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Masyarakat	2 angkatan						
							05. Pendirian PIK R	3 kelompok						
							06. Pembinaan PIK R	3 kelompok						
							07. Fasilitasi FP2KRR	1 forum						
1.14.1.08.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 574.652.750,00	Rp. 1.849.352.000,00		
1.14.1.08.01.00.16.003	Pembinaan Ketananan Keluarga	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	5 kab/kota	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	01. KIE dan sosialisasi ketahanan keluarga	6 kali	Memberikan dukungan terhadap kebijakan ketahanan keluarga sebesar 35,60%	100%	Rp. 261.764.000,00	Rp. 858.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Advokasi Pendidikan Ketahanan Keluarga	3 angkatan						
							03. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	2 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 6.166.122.760,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.08.01.00.16.004	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	5 Kab/Kota	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	01. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	10 desa	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 64,40%	100%	Rp. 312.888.750,00	Rp. 991.352.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Fasilitas Bina Keluarga Sejahtera	10 desa						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.11	LINGKUNGAN HIDUP													
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.085.426.000,00	Rp. 6.027.161.300,00		
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik - induk: 7 listrik, 6 telpon, 2 air - tahura: 6 listrik, 1 air - lab: 1 listrik, 1 telp - Balai Sampah 2 listrik - BBH : 2 listrik, 2 telp - KPH: 33 listrik, 4 telpon, 19 air	01. 12 bulan	Dukungan sebesar 27,84% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 868.867.000,00	Rp. 1.357.265.968,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas - Roda 2 (induk : 90 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 unit) - Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 4 unit) - Roda 6 (1 unit)	02. 190 unit						
							03. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	03. 106 jenis & 57 jenis						
							04. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	04. 32 jenis & 10 jenis						
							05. Terlaksananya penggandaan/foto copy	05. 128.500 lembar & 20.000 lembar						
							06. Terlaksananya pengadaan barang cetakan	06. 31 jenis & 9 jenis						
							07. Tersedianya peralatan rumah tangga	07. 46 jenis & 20 jenis						
							08. Materai (6000 & 3000)	08. 1026 lembar & 390 lembar						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							09. Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	09. 12 bulan						
							10. Retribusi/pajak	10. 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Tersedianya jasa keamanan kantor	1. 12 bulan	Dukungan sebesar 50,01% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.560.661.000,00	Rp. 3.535.036.228,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya jasa pengelola arsip/perpustakaan	2. 12 bulan						
							3. Honor pengelola Barang	3. 12 bulan						
							4. Honor pengelola kepegawaian	4. 12 bulan						
							5. Honor pengelola Keuangan	5. 12 bulan						
							6. Honor pengelola Perencanaan Program	6. 12 bulan						
							7. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	7. 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1. 1 tahun (gol IV 71 kali, gol III 198 kali, gol II 76 kali) + (gol IV 12 kali, gol III 126 kali, gol II 30 kali)	Dukungan sebesar 22,14% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 655.898.000,00	Rp. 1.134.859.104,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	2. 1 tahun (eselon II 8 kali, eselon III 74 kali, gol III 3 kali) + (eselon III 3 kali, gol III 3 kali)						
							3. Tersedianya makan dan minum rapat	3. 1 tahun (2170 OS) + (270 OS)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.341.646.000,00	Rp. 4.868.838.063,00		
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. LCD/ viewer	01. 1 unit	Dukungan sebesar 6,64% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 110.736.000,00	Rp. 993.017.571,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan Komputer PC	02. 2 unit						
							03. Pengadaan Laptop/Notebook	03. 5 unit						
							04. Printer Dot matrik LQ2190	04. 1 unit						
							05. Printer Epson/Cannon	05. 2 unit						
							06. Printer Laser Jet Umum	06. 1 unit						
							07. Tangga aluminium	07. 2 buah						
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Pemeliharaan ruang Bidang P3k-LH	01. 6 unit	Dukungan sebesar 16,35% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Rp. 272.500.000,00	Rp. 1.399.897.116,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung Balai Perbenihan Kehutanan	02. 1 unit						
							03. Pemeliharaan BDH Panggang dan RPH Kepek	03. 2 unit						
							04. Pemeliharaan KM/WC bidang PPH	04. 2 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. Tambah daya kantor Balai KPH	05. 1 unit						
							06. Pemeliharaan Saluran Air Bersih	06. 1 tahun						
							07. Pemeliharaan rutin gedung DHK	07. 1 tahun						
							08. Pemeliharaan Kantor Tahura	08. 1 tahun						
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas - Roda 2 (induk : 90 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 unit) - Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 4 unit) - Roda 6 (1 unit)	190 unit	Dukungan sebesar 46,24% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 770.675.000,00	Rp. 1.953.605.294,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Pemeliharaan komputer /PC	01. 63 unit	Dukungan sebesar 11,26% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 187.735.000,00	Rp. 522.318.082,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan Note Book	02. 45 unit						
							03. Pemeliharaan pemotong rumput	03. 5 unit						
							04. Pemeliharaan AC	04. 83 unit						
							05. Pemeliharaan gergaji mesin	05. 4 unit						
							06. Jaringan internet	06. 3 unit						
							07. Pemeliharaan CCTV	07. 1 unit						
							08. Jaringan Listrik	08. 1 unit						
							09. Instalasi telepon & PABX	09. 2 unit						
							10. Pemeliharaan LCD	10. 2 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Pemeliharaan pompa air	11. 1 unit						
							12. Pemeliharaan pesawat telepon/Airphone	12. 14 unit						
							13. Perawatan Faximile	13. 1 buah						
							14. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	14. 2 unit						
							15. Perawatan mesin ketik	15. 9 unit						
							16. Filling Kabinet	16. 2 unit						
							17. Meja-Kursi Tamu	17. 1 set						
							18. Pengisian tabung pemadam kebakaran	18. 7 buah						
							19. Perawatan TV LCD	19. 1 unit						
							20. Pemeliharaan Diesel Air Balai Perbenihan Kehutanan	20. 1 unit						
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 152.191.100,00	Rp. 636.556.946,00		
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2020	1. 2 laporan LKPJ dan LPPD	Dukungan sebesar 12 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 18.172.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Tersusunnya LKJIP 2020	2. 1 laporan LKJIP 2020						
							3. Tersusunnya Laporan Tahunan 2020	3. 1 laporan						
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Dukungan sebesar 20 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%					
							2. Laporan Keuangan Semester	2. 2 Laporan keuangan Semester						
							3. Laporan Keuangan Tahunan Audited	3. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited						
							4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	4. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan						
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2022	Dukungan sebesar 48 % terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 72.293.000,00	Rp. 454.905.619,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen statistik	2. 1 dokumen statistik						
							3. Tersusunnya Renja OPD 2022 dan Renja Perubahan 2021	3. 1 dokumen Renja OPD 2022 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2021						
							4. Tersusunnya RKA Th 2022 dan DPA Th 2022	4. 2 dokumen RKA Tahun 2022 dan DPA Th 2022						
							5. Tersusunnya RKA-P Th 2021 dan DPPA Th 2021	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2021 dan DPPA Th 2021						
							6. Tersusunnya ROPK 2021	6. 1 dokumen ROPK 2021						
							7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH						
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Movev	Dukungan sebesar 21 % terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	100%	Rp. 31.726.100,00	Rp. 121.651.327,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%					
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 466.464.250,00	Rp. 3.250.000.000,00		
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	52.5%	1. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	1. 12 bulan	Dukungan 49.7 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY dan Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota pada tahun	100%	Rp. 275.824.250,00	Rp. 2.407.276.625,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	2. 12 bulan						
							3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan	3. 5 Kab/kota						
							4. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	4. 1 dokumen						
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan	52.5%	1. Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/ Kegiatan	1. 80 usaha/kegiatan	Dukungan 50.3 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan	100%	Rp. 190.640.000,00	Rp. 842.723.375,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					oleh Pemda DIY				dikeluarkan oleh Pemda DIY					
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	2. 12 bulan						
							3. Penyediaan Perlengkapan Pengawasan dan Penegakan Hukum	3. 2 jenis						
1.11.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 1.083.735.000,00	Rp. 6.714.713.600,00		
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	222Usaha/Kegiatan	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai	1. 1 dokumen	Dukungan 10,52% terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	100%	Rp. 114.004.000,00	Rp. 3.493.722.750,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	120lokasi	2. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	2. 222 usaha/kegiatan						
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	75Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	222Usaha/Kegiatan	1. Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. 5 kab/kota	Dukungan 25,31% terhadap tercapainya target penanganan pengelolaan sampah dan limbah B3 di 5	100%	Rp. 274.316.000,00	Rp. 1.506.277.250,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Kab/Kota pada tahun n					
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	120lokasi	2. Pembinaan dan Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri	2. 52 kelompok						
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	75Usaha/Kegiatan	3. Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah Mandiri di DIY	3. 1 dokumen						
							4. Kajian Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di DIY	4. 1 dokumen						
1.11.1.11.01.00.17.003	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	222Usaha/Kegiatan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Dukungan 8,74% terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	100%	Rp. 94.715.000,00	Rp. 274.713.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	120lokasi								
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	75Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.17.004	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	222Usaha/Kegiatan	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan 53 parameter	1. 12 bulan	Dukungan 55,43% terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point	100%	Rp. 600.700.000,00	Rp. 1.440.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota					
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	120lokasi	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana laboratorium lingkungan	2. 9 unit						
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	75Usaha/Kegiatan	3. Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan	3. 40 unit						
							4. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	4. 12 jenis						
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 369.920.000,00	Rp. 1.142.772.180,00		
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kali @ 32 orang	Dukungan sebesar 100 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 369.920.000,00	Rp. 1.142.772.180,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru Proklam)	2. 5 kab/ kota						
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM										Rp. 1.595.231.400,00	Rp. 7.170.490.595,00		
1.11.1.11.01.00.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	170Ha	1. Penanaman Vegetasi (Terdiri dari: Hutan Rakyat seluas 100 Ha; Penanaman Bambu seluas 15 Ha, Pengembangan Tanaman Ekowisata seluas 30 Ha dan	1. 175 Ha	Dukungan sebesar 69.2 % terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan	100%	Rp. 1.117.686.400,00	Rp. 5.835.777.105,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penanaman Kawasan Pantai seluas 30 Ha)		terkonservasi sebesar 170 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 0.1%					
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2022	2. 1 Dokumen						
							3. Penanaman Bambu	3. 1 Ha						
1.11.1.11.01.00.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	170Ha	1. Konservasi Lahan Pantai melalui penanaman di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo (2 000 btg)	1. 5 ha	Dukungan sebesar 24.4 % terhadap pencapaian target Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi pada tahun 2021	100%	Rp. 374.583.000,00	Rp. 1.035.238.490,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) di Srigading, Sanden, Bantul (8.000 batang)	2. 1 Ha						
1.11.1.11.01.00.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	170Ha	1. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan a. Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) b. Identifikasi daerah rawan gangguan c. Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan d. Patroli Gabungan Pengamanan Hutan	1. 5 BDH	Dukungan sebesar 6.4 % terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 170 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 0.1%	100%	Rp. 102.962.000,00	Rp. 299.475.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan	2. 2 angkatan @ 25 orang						
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										Rp. 17.441.012.000,00	Rp. 10.938.915.789,00		
1.11.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	720ton/hari	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Dukungan kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada	100%	Rp. 1.064.288.000,00	Rp. 1.326.315.789,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									TPA Regional dari 660 ton/hari menjadi sebesar 720 ton/hari					
							2. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit						
							3. Merti TPA Piyungan	3. 1 kali						
							4. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi	4. 2 dokumen						
1.11.1.11.01.00.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	720ton/hari	01. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	01. 10 Ha	Dukungan kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional Piyungan	100%	Rp. 16.376.724.000,00	Rp. 9.612.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	02. 1 unit						
							03. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	03. 5 unit						
							04. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	04. 36 orang						
							05. Pengadaan Perlengkapan K3	05. 6 jenis						
							06. Operasi dan Pemeliharaan peralatan TPST (9 unit)	06. 1 tahun						
							07. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	07. 2 lokasi						
							08. Hasil Uji Kualitas Air dan Udara	08. 5 Jenis						
							09. Kompensasi dampak negatif ke Desa terdampak TPA Piyungan	09. 2 desa						
							10. Penyusunan Dokumen AMDAL Pengembangan TPA	10. 1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Pengadaan alat berat : a. Buldozer b. Eksavator c. Kendaraan tanki BBM	11. a. 1 unit b. 1 unit c. 1 unit						
2	Pilihan													
2.04	KEHUTANAN													
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN										Rp. 478.191.000,00	Rp. 1.250.000.000,00		
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	90.68%	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 24 km	Dukungan 33.9 % terhadap terwujudnya persentase kawasan hutan tertata sebesar 90.68%	100%	Rp. 187.500.000,00	Rp. 517.950.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	2. 1 lokasi						
							3. Inventarisasi tanda batas kawasan hutan BDH Kulonprogo-Bantul	3. 135 Km						
							4. Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal	6. 1 paket						
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	90.68%	1. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan (30 org x 4 angkt) - Bimtek Sertifikasi Legalitas Kayu (30 orang x 2 hari x 1 angkt)	1. 150 orang	Dukungan 15.3 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 84.566.000,00	Rp. 319.440.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	2. 20 pemegang izin						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	90.68%	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Dukungan 50.8 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 206.125.000,00	Rp. 412.610.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	2. 62 orang						
							3. Peningkatan Kelas KTH	3. 4 KTH						
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG										Rp. 7.158.034.850,00	Rp. 7.980.000.000,00		
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.65%	01. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman)	01. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 39,74% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.65%	100%	Rp. 2.844.429.250,00	Rp. 3.175.350.597,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							02. Operasional Pencegahan Gangguan Keamanan Hutan dan Laporan Kerusakan	02. 2 dokumen						
							03. Penanaman Kayu Putih (80 Ha P0 : 10 Ha Tanaman Baru dan 70 Ha Peremajaan Tanaman, 100 Ha P1, 200 Ha P2)	03. 357.280 batang						
							04. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (5 Ha Tanaman Baru,10 Ha P1, 20 Ha P2)	04. 5.700 batang						
							05. Kajian Bisnis Pengelolaan Kayu Putih	05. 1 dokumen						
							06. Pembinaan KTH yang Melakukan Kemitraan Dalam Kawasan Hutan	06. 24 RPH						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.1.11.01.00.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.65%	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. minyak kayu putih 42.310 liter dan kayu 98 m3	Dukungan sebesar 60,26% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.65%	100%	Rp. 4.313.605.600,00	Rp. 4.804.649.403,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2. 2 Unit						
							3. Pemeliharaan Jalan Produksi	3. 1.000 m						
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI										Rp. 422.880.000,00	Rp. 1.100.000.000,00		
2.04.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi terkelola	76.97%	1. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1. 3,000 batang	Dukungan 50.8 % terhadap tercapainya target persentase hutan konservasi terkelola sebesar 76.97%	100%	Rp. 214.844.000,00	Rp. 469.413.824,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan arboretum	2. 5 Ha						
							3. Pemantauan dan pemeliharaan batas luar	3. 13 km						
							4. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	4. 12 bulan						
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi terkelola	76.97%	1. Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi sekolah b. Banner	1. a. 5 kali @ 50 orang b. 30 unit	Dukungan 49.2 % terhadap tercapainya target persentase hutan konservasi terkelola sebesar 76.97%	100%	Rp. 208.036.000,00	Rp. 630.586.176,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	2. 6 kelompok						
							3. Pengamanan Kawasan: a. Pembuatan sekat bakar, b. Pelatihan keamanan wisata, c.	3. 12 bulan a. 20.000 m2 b. 30 org c. 30 org d. 7 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 34.066.805.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan, d. Seragam dan kelengkapan MMP MMP							
							4. Pembersihan Lahan Bawah Tegakan	4. 10 Ha						
							5. Laporan RKL RPL Tahura	5. 2 dokumen						
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN										Rp. 472.073.400,00	Rp. 1.100.000.000,00		
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	340000batang	Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 367.280 batang)	367.280 batang	Dukungan sebesar 82.6 % terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2021	100%	Rp. 390.061.400,00	Rp. 783.775.067,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	340000batang	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan	1. 443.000 batang/ bibit; 2 sumber benih	Dukungan sebesar 17.4 % terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2021	100%	Rp. 82.012.000,00	Rp. 316.224.933,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan	2. 4 kabupaten (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman)						
							3. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih						
							4. Pembinaan dan Pengawalan Pengada dan Pengedar Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan	4. 20 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.15	PERHUBUNGAN													
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan													
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.628.563.700,00	Rp. 6.535.586.000,00		
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 bulan (induk) 12 bulan (balai)	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.284.155.500,00	Rp. 2.194.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya kebersihan kantor induk (30.624m2), terminal jombor dan terminal wates (3.027m2), tempat khusus parkir dan park and ride (696m2)	12 bulan (induk) 12 bulan (balai)						
							Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan						
							Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan Kendaraan roda 4 : 18 Unit						
							Tersedianya Kebutuhan ATK Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continous Form besar, Buku Folio isi 100 lbr, Heachmachine max 10/6, Tinta Stempel, Map gantung, Stopmap Folio, Stopmap Plastik, Snelhechter Folio, Snelhechter plastik, Isi Bolpoint Pentel, Bolpoint Top, Brip Ordner Folio, Bolpoin Pentel, CD-R, Tali Rafia sedang, Amplop Panjang Kabinet, Amplop Tanggung, Amplop Kecil, cartridge PG 810, Cartridge PG 811, Toner HP 85, Toner HP 83A, Refill Ink Colour, Hectneices 10/6, Drum Unit KX FAD4 12E, Toner KX-FAT409E, Drum unit	31 jenis (Induk) 27 Jenis (balai)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							KX-FAD93E, Toner KX-FAT92E, catridge PG47, Refill Ink Black , Binder type 200 , Paper Clips besar, Paper Clips kecil,Karbon Folio, Refill Ink Color , File box besar, Kertas Telstrook (Thermal), Binder Type 105, Binder Type 107							
							Tersedianya Bahan/ Material / peralatan/ Perlengkapan : Bendera ukuran 120x180cm,Bendera ukuran 100x150cm, Tabung CO2 Gas /Carbondioxide berat 5kg, Jagrak Bendera, Kotak P3K beserta isi,Senter Polisi LED, Pigura 10R, Umbul-umbul, Rompi (perhubungan), taplak meja, masker,	4 jenis (induk) 10 Jenis (balai)						
							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis barang cetakan dan 11 penggandaan (induk) 12 jenis barang cetakan dan 15 jenis penggandaan (balai)						
							Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan (induk) 12 bulan (balai)						
							Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	4 jenis (induk) 5 Jenis (balai)						
							Tersedianya Kebutuhan Perangko, Materai, dan Benda Pos : Perangko, Materai 3000, materai 6000	3 jenis (induk) 3 jenis (balai)						
							Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : Kabel Listrik MYM 2 x 1,5 mm,Batere tanggung, Batu batere kecil, Batu baterei besar, Circle 36 Watt, Lampu TL 40 Watt,Lampu TL 25 Watt, CFI 110/220 Volt slf 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220 VCD/ WW, kabel	7 jenis (induk) 7 jenis (balai)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							NYM 2 x 1,5 mm, Kabel roll, Terminal listrik.							
							Tersedianya peralatan rumah tangga	13 jenis (induk) 13 jenis (balai)						
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	10 orang (induk) 36 orang (balai) selama 12 bulan	Dukungan sebesar 100 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 3.774.408.200,00	Rp. 2.491.357.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	12 orang (induk) 14 orang (balai) selama 12 bulan						
							Tersedianya Jasa Pengelola Kepegawaian	2 orang (induk) 1 orang (Balai) selama 12 bulan						
							Tersedianya Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	8 orang selama 12 bulan						
							Tersedianya Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang (induk) 1 orang (balai) selama 12 bulan						
							Tersedianya Jasa Tenaga Bantu kantor	23 orang (induk) 12 orang (balai) selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 87 op (induk) 28 op (balai) Konsultasi Dalam Daerah 60 op (induk) 24 op (balai)	Dukungan sebesar 100 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 570.000.000,00	Rp. 1.850.229.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Terlaksanakannya rapat - rapat koordinasi	3500 os (induk) 638 os (balai)						
1.15.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.233.946.000,00	Rp. 1.751.495.000,00		
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terlaksananya pengadaan CCTV	1 paket (induk)	Dukungan sebesar 100 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 758.730.000,00	Rp. 163.352.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pengadaan Genset	1 buah (induk)						
							Terlaksananya pengadaan Papan Nama Instansi	30 m2 (balai)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terlaksananya pengadaan Penataan jaringan Listrik	1 paket (induk)						
							Terlaksananya pengadaan rak arsip	2 buah (balai)						
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terpeliharanya gedung kantor induk, jasa pemeliharaan/rehab gedung, terminal jombor, terminal wates, tempat khusus parkir dan park and ride	12 bulan (induk) 12 bulan (balai)	Dukungan sebesar 100 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 512.110.000,00	Rp. 663.103.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Roda 2 : 16 unit (induk) Roda 2 : 3 unit (balai) Roda 4 : 15 unit (induk) Roda 4 : 3 unit (balai) Genset : 1 unit (balai)	Dukungan sebesar 100 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 591.579.000,00	Rp. 621.157.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terlaksananya pemeliharaan LAN	12 bulan (induk/balai)	Dukungan sebesar 100 % dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 371.527.000,00	Rp. 303.883.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis (induk) 5 jenis (balai)						
							Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10 jenis (induk/balai)						
1.15.1.15.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 372.922.000,00	Rp. 520.484.000,00		
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersusunnya LKJ dan LKPJ	Dokumen yang berisi laporan Sasaran Program Pemda DIY (Urusan Perhubungan)	Dukungan sebesar 100% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Rp. 8.880.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya LKJIP	Dokumen yang berisi laporan kinerja eselon 2						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Audited	1 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 66.182.000,00	Rp. 69.491.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen						
							Tersedianya Laporan Keuangan Semester	2 dokumen						
							Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
							Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen						
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Terlaksanannya Forum Perangkat Darah	Berita acara Forum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 100% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 262.860.000,00	Rp. 402.136.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dishub 2022	Dokumen yang berisi Rencana Kerja (Renja) Dishub 2022						
							Tersedianya Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	Penyebaran Informasi melalui 4 platform media sosial						
							Tersedianya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2021	Dokumen yang berisi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2021						
							Tersedianya RKA 2022, DPA 2022, RKA-P 2021, DPA-P 2021	Dokumen yang berisi RKA 2022, DPA 2022, RKA-P 2021, DPA-P 2021						
							Tersedianya ROPK Dishub Tahun 2021	Dokumen yang berisi ROPK Dishub Tahun 2021						
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dukungan sebesar 100 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 38.857.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN										Rp. 10.176.404.000,00	Rp. 17.209.034.550,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TRANSPORTASI													
1.15.1.15.01.00.16.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.92(rasio)	Bahan Kebijakan Pengembangan Keselamatan Transportasi	1 kegiatan	Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan < 1 kejadian/km	100%	Rp. 8.032.037.000,00	Rp. 13.622.013.300,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100%	6 org x 22 hari x 12 bulan						
							Pengadaan dan Pemasangan APJ	152 Unit						
							Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	50 unit						
							Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	7 unit						
							Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	2 unit						
							Persentase EWS terpelihara sebesar 100%	1 unit						
							Persentase ketersediaan Alat Penerangan Jalan	Dari 12,40% menjadi 12,91% (setara 80 Unit)						
							Persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20%	1 Paket						
							Persentase ketersediaan suku cadang APJ listrik sebesar 5%	1 Paket						
							Persentase ketersediaan suku cadang APJ tenaga surya sebesar 19,2%	1 Paket						
							Persentase ketersediaan suku cadang rambu sebesar 3,2%	Persentase ketersediaan suku cadang rambu sebesar 3,2%						
							Persentase Tersedianya dokumen Review Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi DIY sebesar 100%	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.16.002	Penegakan Hukum Lalu Lintas	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.92(rasio)	Terlaksananya pengawasan ketertertib berlalu-lintas	Pengawasan tertib lalu lintas di Jalan Provinsi DIY selama 12 Bulan	Mempertahankan Kecepatan Jaringan Jalan kawasan	100%	Rp. 667.608.000,00	Rp. 717.087.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Antar Wilayah						prioritas di atas 20 km/jam					
							Terselenggaranya pemantauan angkutan pada liburan Hari-Hari besar	Penyelenggaraan Posko Angkutan lebaran selama 16 hari, Posko Nataru selama 8 hari serta monitoring liburan sekolah selama 15 hari						
							Terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan	Penyelenggaraan pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Kranggan, Terban, Godean dan Seturan						
1.15.1.15.01.00.16.003	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.92(rasio)	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	SMA/K 10@100 peserta	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan Provinsi < 1 kejadian/km	100%	Rp. 783.513.000,00	Rp. 2.456.837.250,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Untuk Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah	2 kali						
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	2 kali @40 peserta						
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTP	2 kali @40 peserta						
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat.	2 kali @40 peserta						
							Safety Driving for Millennial Untuk SMA	2 Kali						
							Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Di Bandara YIA	1 Paket						
							Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	Teridentifikasinya Dokumen DRK di Jalan Provinsi						
1.15.1.15.01.00.16.004	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.92(rasio)	Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa	7300 Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa selama 1 tahun	Menurunnya angka kecelakaan di jalan provinsi sebesar 0,02 kejadian/km	100%	Rp. 693.246.000,00	Rp. 413.097.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa	3051 Angkutan Umum Yang Terperiksa selama 1 tahun						
1.15.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 76.612.722.500,00	Rp. 8.534.442.000,00		
1.15.1.15.01.00.17.001	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	92%	Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja	Tersedianya petugas dan prasarana pendukung pemantauan CCTV Trans Jogja	Tersedianya layanan Angkutan Perkotaan 44% dan Angkutan AKDP 28.24%	100%	Rp. 76.501.956.500,00	Rp. 7.746.942.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	81.24%	Olah Data	1 laporan penumpang harian Trans Jogja per bulan (12 bulu laporan per tahun)						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	60%	Pemeliharaan Halte	Terpeliharanya 113 halte Trans Jogja dalam 1 tahun						
							Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja	Penyelenggaraan Trans Jogja (95 Armada selama 1 Tahun)						
							Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan	Dokumen yang memuat : 1. Kinerja Teknis 2. Kinerja Pelayanan (IKM dan SPM) 3. Evaluasi Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan						
							Tersedianya Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja	12 Laporan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja						
							Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022	Dokumen hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022						
							Terselenggaraanya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY dan Nasional	2 Orang Terpilih dari 15 Peserta DIY akan berkompetisi ditingkat nasional						
							Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi	95 Bus Trans Jogja Selama 12 Bulan						
							Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional	Dokumen Perhitungan Biaya Operasional						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022	Transjogja						
1.15.1.15.01.00.17.002	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	92%	Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	15%	Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	92%	Rp. 85.766.000,00	Rp. 525.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	81.24%								
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	60%								
1.15.1.15.01.00.17.003	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	92%	Koordinasi dan sinkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY	Dokumen Kesepakatan Progress Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	Dukungan penyiapan sarana dan prasarana angkutan perkeretaapian	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 262.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	81.24%								
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	60%								
1.15.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 3.203.617.000,00	Rp. 14.539.307.050,00		
1.15.1.15.01.00.18.001	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	60%	Ketersedian data kinerja ruas jalan dan simpang Di DIY	Dokumen yang memuat data Kinerja, Rekomendasi Penanganan Ruas Jalan dan Simpang di Provinsi DIY	Dukungan terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Rp. 1.598.194.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	73.33%	Pembangunan ITS (Intelegent Transport Systems)	Terwujudnya Intelegent Transport Systems						
							Prosentase Peran serta Kabupaten kota dalam Penilaian WTN	100 % (5 Kabupaten/kota)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Prosentasi Surat Pertimbangan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas	100 % (Seluruh Permohonan Yang Masuk)						
							Terwujudnya Bahan Kebijakan bersama mengenai Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Bahan Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
1.15.1.15.01.00.18.002	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	60%	Jumlah Ketersediaan Operator CC Room ATCS	12 Orang Petugas Operator CC Room ATCS selama 12 Bulan	Dukungan peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	100%	Rp. 1.605.423.000,00	Rp. 12.339.307.050,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	73.33%	Terlaksananya Pemeliharaan APILL ATCS	Jumlah Simpang Yang Terpelihara sebanyak 9 lokasi						
							Terlaksananya Pemeliharaan VMS	Jumlah VMS yang Terpelihara sebanyak 5 lokasi						
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN										Rp. 905.071.000,00	Rp. 47.366.345.000,00		
1.15.1.15.01.00.19.001	Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4650orang/hari	Prosentase hasil pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal, Tempat Khusus Parkir dan Park and Ride	dari 45% menjadi 75% telah dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi	Dukungan sebesar 33,95% terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 700.604.000,00	Rp. 637.145.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	830SRP	Terselenggaranya Pelayanan dan Operasional pada Tempat Khusus Parkir Beskalan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Tempat Khusus Parkir guna menunjang daya tampung kendaraan sebanyak 513 SRP						
							Terselenggaranya Pelayanan dan Operasional pada Terminal Tipe B	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Terminal Tipe B guna menunjang mobilisasi 4650 penumpang/hari						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 100.133.246.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terselenggaranya Pelayanan dan Operasional Park And Ride	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Park And Ride guna menunjang pergantian moda						
1.15.1.15.01.00.19.002	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4650orang/hari	Tersedianya dokumen Andalalin Terminal Jombor	Rekomendasi Andalalin Terminal Jombor	Dukungan sebesar 66,05 % terhadap pengembangan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 204.467.000,00	Rp. 46.729.200.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	830SRP	Tersedianya dokumen UKL/ UPL Terminal Jombor	Rekomendasi UKL/ UPL Terminal Jombor						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika													
1.16.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.424.620.000,00	Rp. 1.555.328.692,00		
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	22 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	34.26%	Rp. 542.931.000,00	Rp. 780.386.105,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Barang cetakan	8 jenis						
							03. Benda-benda Pos (Materai, Perangko)	2 jenis						
							04. Bendera	1 jenis						
							05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua)	8 unit						
							06. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	10 unit						
							07. Bukti Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							08. Bukti Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							09. Bukti pembayarn Pengiriman Dokumen	12 bulan						
							10. Dokumen hasil penggandaan	32.600 lembar						
							11. Dokumen hasil penjiilidan	78 bendel						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							12. Gedung kantor seluas 51.882m2 yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							13. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis						
							14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13 jenis						
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	36.47%	Rp. 501.720.000,00	Rp. 373.005.377,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	12 bulan						
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	29.27%	Rp. 379.969.000,00	Rp. 401.937.210,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
1.16.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 434.765.000,00	Rp. 565.504.949,00		
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	2 jenis	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	23.58%	Rp. 69.650.000,00	Rp. 70.068.051,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	3 jenis						
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	12 bulan	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD	14.29%	Rp. 119.220.000,00	Rp. 274.848.690,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terpelihara sesuai RKPBMMD	8 unit	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	17.37%	Rp. 180.145.000,00	Rp. 178.532.789,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang terpelihara sesuai RKPBMMD	10 unit						
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	4 jenis	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.93%	Rp. 65.750.000,00	Rp. 42.055.419,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	4 jenis						
1.16.1.16.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 154.431.000,00	Rp. 196.925.880,00		
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Nilai LKjIP Diskominfo DIY	Nilai LKjIP A	Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2.27%	Rp. 4.600.000,00	Rp. 5.457.274,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 Dokumen	02. Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	12.83%	Rp. 29.831.000,00	Rp. 20.553.217,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	50.77%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.279.629,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA						
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8.27%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.635.760,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 2.511.612.000,00	Rp. 1.847.696.854,00		
1.16.1.16.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	75%	01. Aduan masyarakat yang tertangani	40 aduan masuk	Dukungan terhadap pelaksanaan program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	Rp. 738.375.000,00	Rp. 496.275.582,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan	15 lembaga penyiaran						
							03. Prosentase Capaian kinerja KPID DIY	100%						
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	75%	01. Jumlah Badan Publik Yang Patuh Terhadap Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	50 Badan Publik	Dukungan terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	15%	Rp. 751.402.000,00	Rp. 384.856.519,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Jumlah Sengketa Publik yang tertangani	6 sengketa						
							03. Masyarakat ditingkat basis yang memiliki Relawan Keterbukaan Informasi	6 desa/kelurahan						
1.16.1.16.01.00.15.004	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	75%	01. Laporan bulanan pengelolaan keluhan masyarakat atas layanan Pemda DIY	12 laporan (12 bulan)	Dukungan terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	26%	Rp. 264.540.000,00	Rp. 306.779.515,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Masyarakat yang Menggunakan CoWorking Space	800 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Masyarakat Yang Menggunakan Layanan PPID Utama	400 orang						
							04. Masyarakat Yang Terlayani melalui MCAP	200 orang						
							05. Laporan Pelayanan PPID di Lingkup Pemda DIY	1 laporan						
1.16.1.16.01.00.15.005	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	75%	01. Konten media sosial/videotron	10 buah	Dukungan terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yangtertangani	15%	Rp. 757.295.000,00	Rp. 659.785.238,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Kelompok Masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran literasinya dalam memanfaatkan internet	13 lokasi (13 kelompok masyarakat)						
							03. Majalah Dinas Kominfo	400 eksemplar						
							04. Lembaga Komunikasi Sosial atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbina dan meningkat kapasitas dan perannya.	5 KIM						
							05. Kelompok Masyarakat yang terdampingi dan aktif menjadi mitra sosialisasi Hasil Pembangunan Pemerintah Melalui Pertunjukan Rakyat	5 kelompok						
							06. Modul Sosialisasi untuk Literasi Bijak Bermedia Sosial	2500 eksemplar						
							07. Media dan jumlah publikasi ILM di Radio	240 publikasi (tayang)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							08. Kelompok Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya tentang Perda TIK	5 kelompok						
1.16.1.16.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN KERUMAHANGGAAN										Rp. 564.418.000,00	Rp. 2.738.162.000,00		
1.16.1.16.01.00.16.002	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	50%	01. Aplikasi layanan publik yang terkelola	3 aplikasi	Dukungan terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	10%	Rp. 345.803.000,00	Rp. 604.610.637,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	1 dokumen rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.16.003	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	50%	01. Modul aplikasi yang terintegrasi dalam IDMC	2 modul	Dukungan terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	49%	Rp. 218.615.000,00	Rp. 2.133.551.363,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Hasil Penilaian Internal SPBE	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
1.16.1.16.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 1.055.000.000,00	Rp. 8.710.699.480,00		
1.16.1.16.01.00.17.001	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	85%	01. Jaringan Fiber Optik yang Terkelola	114 titik	Dukungan terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	90%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 7.971.173.432,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Jaringan Wireless dan VPN yang Terkelola	139 titik						
							03. NOC dan Jaringan Intranet Kompleks Kepatihan yang Terkelola	14 titik						
1.16.1.16.01.00.17.002	Pengelolaan JITV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	85%	01. Konten paket tayangan Pemda DIY	324 konten	Dukungan terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan PemdaDIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	10%	Rp. 505.000.000,00	Rp. 739.526.048,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.21	PERSANDIAN													
1.21.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.16.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN										Rp. 1.960.866.000,00	Rp. 477.760.000,00		
1.21.1.16.01.00.15.001	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan	Kecepatan informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100nilai	01. ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	80 ASN	Dukungan terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaandata dan informasi yang berbasis TIK	23%	Rp. 903.934.000,00	Rp. 309.705.612,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Email Pemerintah Daerah yang terpelihara	1 aplikasi						
							03. Laporan Insiden Keamanan Informasi	1 dokumen						
							04. Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing untuk 10 Aplikasi)	1 dokumen						
							05. Sertifikat ISO 27001 Datacenter	1 sertifikat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.16.01.00.15.002	Pengelolaan Persandian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum,	Kecepatan informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100nilai	01. Jaringan telepon PABX yang terpelihara	600 titik	Dukungan terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaandata dan informasi yang berbasis TIK	13%	Rp. 1.056.932.000,00	Rp. 168.054.388,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							02. Jumlah layanan Pemda yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 layanan						
							03. Rekomendasi Forkomsanda	1 dokumen rekomendasi						
							04. Ruang kerja pimpinan yang teramankan	44 ruangan						
							05. Upgrade dan Relokasi PABX	1 paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 8.105.712.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH													
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
1.17.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.437.750.500,00	Rp. 1.713.229.500,00		
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	15 unit	Dukungan 38% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 549.521.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pembayaran listrik 2951 Kwh	12 bulan						
							Pembayaran Telepon 3 sambungan	12 bulan						
							Pengelolaan arsip dinamis	3 jenis						
							Penggandaan	80000 lembar						
							Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran	12 bulan						
							Penyediaan ATK	30 jenis						
							Penyediaan Barang cetakan	10 jenis						
							Penyediaan Komponen Instalansi Listrik	10 jenis						
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 jenis						
							Penyediaan Restribusi sampah	12 bulan						
							Surat kabar	2 jenis						
							Surat keluar	4000 surat						
							Surat masuk	3000 surat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang	Dukungan 28% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 413.229.500,00	Rp. 413.229.500,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang						
							Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang						
							Jasa keamanan kantor	12 bulan						
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Makan dan minum sidang	2000 OS	Dukungan 34% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 475.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan						
							Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau Jawa	12 bulan						
							Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau Jawa	12 bulan						
1.17.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 951.215.000,00	Rp. 753.763.200,00		
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100%	Pengadaan Alat Studio	4 jenis	Dukungan 42% terhadap Persentase	100%	Rp. 438.763.200,00	Rp. 438.763.200,00	Dinas Koperasi dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Tata Kelola Pemerintahan		Sarana dan Prasarana Aparatur				Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Usaha Kecil Menengah	
							Pengadaan mebeleur	2 jenis						
							Pengadaan peralatan	4 jenis						
							Pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis						
							Penggadaan komputer	3 jenis						
1.17.1.17.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Atap Gedung PLUT dan Gedung Induk	1 Paket	Dukungan 27% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 280.951.800,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Lift	1 Paket						
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD	2 jenis	Dukungan 17% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 181.500.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor	6 jenis	Dukungan 5% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6 jenis						
1.17.1.17.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 201.812.000,00	Rp. 145.707.000,00		
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	82 (A)	Dukungan 2 % terhadap Persentase Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 6% terhadap Persentase Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.236.000,00	Rp. 11.236.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2022	Dukungan 79% terhadap Persentase Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 159.471.000,00	Rp. 99.471.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Pengembangan dan Pemeliharaan Website	1 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Roadmap pengembangan Sibakul Bringharjo	1 Dokumen						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2022 dan Perubahan TA.2021						
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 26.105.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU										Rp. 1.599.626.000,00	Rp. 3.633.686.700,00		
1.17.1.17.01.00.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	1079wirausaha	Jumlah Peserta pendampingan desa preneur tahap 2 di 6 desa meningkat kemampuan dibidang manajemen , produksi, pemasaran dan desain produk	360 orang	Dukungan sebesar 67% (120 wub) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2020 ke 2021 (sebesar 180 wub) semula 899 wub menjadi 1079 wub	100%	Rp. 917.096.000,00	Rp. 2.951.156.700,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB	26 akt						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	1079wirausaha	Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	20 WUB	Dukungan sebesar 33% (60 wub) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2020 ke 2021 (sebesar 180 wub) semula 899 wub menjadi 1079 wub	100%	Rp. 682.530.000,00	Rp. 682.530.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah UKM yang terfasilitasi melalui pemasaran online	350 UKM						
							Jumlah wirausaha kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta yang tertangani akibat dampak covid 19	300 UKM						
							Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM						
							Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)	1 aplikasi						
1.17.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN										Rp. 886.151.000,00	Rp. 1.223.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.18.001	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2056257Juta Rupiah	Ekspose pembinaan koperasi	4 kali	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semula 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	100%	Rp. 279.332.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi						
							Jumlah koperasi sehat	384 koperasi						
							Jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi						
1.17.1.17.01.00.18.002	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2056257Juta Rupiah	Aplikasi sistem manajemen koperasi	1 aplikasi	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semula 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	100%	Rp. 361.849.000,00	Rp. 497.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya	30 bisnis plan						
							Jumlah Koperasi Sektor Riil yang di dampingi dalam penerapan pelayanan prima	30 koperasi						
							Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan	30 koperasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah koperasi terdampak covid 19 peserta pelatihan (SDM dan kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100 %	60 koperasi						
							Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi	25 koperasi						
							Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi gerakan koperasi	1 tahun						
							Sosialisasi Perkoperasian	9 akt						
1.17.1.17.01.00.18.003	Pemasaran Perkoperasian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2056257Juta Rupiah	Jumlah media publikasi perkoperasian	4 media	Dukungan sebesar 40% (4.032 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semula 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	100%	Rp. 244.970.000,00	Rp. 426.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Kemitraan Koperasi Sektor Riil dengan hotel / RS / Retail	2 koperasi						
							Pelatihan digital marketing bagi koperasi sektor riil	30 koperasi						
							Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk koperasi (harkopnas)	Rp. 72.200.000						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 8.382.580.500,00	Rp. 11.025.458.200,00		
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Omset UKM Tahun n	91892Ribu Rupiah	Jumlah produk UKM yang tersertifikasi halal	90 Halal	Dukungan 50% terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.376 juta rupiah) dari tahun 2020 ke 2021 semula 87.516 juta rupiah menjadi 91.892 juta rupiah	100%	Rp. 699.256.500,00	Rp. 2.250.240.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
						Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi MD	20 UKM							
						Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi UKM	12 akt							
						Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi UKM	30 UKM							
						Sosialisasi Sertifikasi Produk UKM Melalui Media Elektronik	3 video							
1.17.1.17.01.00.19.004	Pemasaran Produk UKM	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Omset UKM Tahun n	91892Ribu Rupiah	Jumlah kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern/hotel /usaha menengah dan besar	4 kontrak	Dukungan 50% (2.188 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.376 juta rupiah) dari tahun 2020 ke 2021 semula 87.516 juta rupiah menjadi 91.892 juta rupiah	100%	Rp. 7.683.324.000,00	Rp. 8.775.218.200,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
						Jumlah UKM yang meningkat pengetahuannya mengenai merek dan branding produk serta mendapat fasilitasi merek	150 UKM							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah UKM yang terfasilitasi pemasarannya melalui Galeri YIA dan Galeri Dinas	350 UKM						
							Pemasaran Produk UKM	1 kali						
							Peningkatan omset UKM di Galeri Smesco	100 UKM						
							Peningkatan omset UKM peserta pameran produk UKM di DIY dan Luar DIY	5%						
1.17.1.17.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 448.000.000,00	Rp. 500.000.000,00		
1.17.1.17.01.00.20.003	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	20988075000Rp	Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan koperasi dan lembaga pembiayaan	35 koperasi	Dukungan 50% (Rp. 10.494.037.500) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.988.075.000	100%	Rp. 263.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0%	Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses pembiayaan	75 koperasi						
							Pendampingan dana bergulir	30 koperasi						
1.17.1.17.01.00.20.004	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	20988075000Rp	Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan	80 kontrak	Dukungan 50% (Rp. 10.494.037.500) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.988.075.000	100%	Rp. 185.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap	0%	UKM yang meningkat kemampuan	160 UKM						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 13.907.135.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					jumlah pembiayaan		dalam mengakses pembiayaan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Wajib															
1.18	PENANAMAN MODAL															
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal															
1.18.1.18.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.710.500.000,00	Rp. 1.855.000.000,00				
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan 48% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 850.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan		
							10. Surat keluar	12500 lembar								
							11. Bahan Bakar Genset	450 liter								
							12. Surat Masuk	14000 lembar								
							13. Materai	600 lembar								
							14. Alat tulis kantor	40 jenis								
							15. Barang cetakan	7 jenis								
							16. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	8 unit								
							17. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	2 lokasi								
							18. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	10 jenis								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							19. Paket pengiriman	12 bulan						
							2. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							20. Pemeliharaan Genset	1 unit						
							3. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan						
							4. Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan						
							5. Penggandaan dokumen	195.000 lembar						
							6. penjiilidan dokumen	100 buah						
							7. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	17 jenis						
							8. Perlengkapan/alat penanganan arsip	15 jenis						
							9. Surat kabar dan majalah	4 jenis						
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan	Dukungan 3 % terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 53.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 orang/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan						
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2450 orang	Dukungan 48% Terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 807.500.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	625 orang						
							Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
1.18.1.18.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 439.000.000,00	Rp. 555.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Alat-alat studio	1 jenis	Dukungan 23% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Pengadaan Komputer	3 jenis						
							Perlengkapan Kantor	3 jenis						
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Dukungan 34% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	8 unit (roda 2 : 2 unit dan roda 4 : 6 unit)	Dukungan 32% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Peralatan kantor terpelihara	6 jenis	Dukungan 11% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 49.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Mebelair terpelihara	4 jenis						
							Perlengkapan kantor terpelihara	2 jenis						
1.18.1.18.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 145.000.000,00	Rp. 159.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2021	Lakip Nilai A	Dukungan 10 % terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 14 % terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2022	Dukungan 69 % terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Pengembangan website	1 website "jogjainvest"						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2022 dan Perubahan 2021						
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Dukungan 7 % terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 325.000.000,00	Rp. 415.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1243628Juta Rupiah	Bahan promosi investasi	1 dokumen	Dukungan sebesar 63 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (Rp Juta) dari tahun 2020 ke 2021 semula 1.243.628 juta menjadi 1.492.353 juta rupiah	100%	Rp. 205.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Forum jejaring promosi dan informasi investasi DIY	4 rekomendasi						
							Forum Kemitraan UMKM dengan investor dan dunia usaha	10 kemitraan						
1.18.1.18.01.00.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1243628Juta Rupiah	Fasilitasi Mitra Kerjasama Luar Negeri	3 Mitra	Dukungan sebesar 37 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (Rp Juta) dari tahun 2020 ke 2021 semula 1.243.628 juta menjadi 1.492.353 juta	100%	Rp. 120.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Hospitality	2 mitra						
							Rakernis Kerjasama Luar Negeri	2 Kali						
1.18.1.18.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 400.000.000,00	Rp. 520.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	869275Juta Rupiah	Laporan LKPM meningkat dari 154 perusahaan di tahun 2020 menjadi 169 perusahaan di tahun 2021	15 perusahaan	Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya peningkatan pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN dari tahun 2020 ke 2021 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Permasalahan Penanaman Modal selesai difasilitasi	15 permasalahan						
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	869275Juta Rupiah	Studi Pengembangan Potensi Investasi di TDA dan KTA Prambanan-Boko	1 Dokumen	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya peningkatan pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN dari tahun 2020 ke 2021 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 320.000.000,00	Rp. 350.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.19.001	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	99%	Jumlah produk layanan dokumen izin dan non izin SDA dan Kesra	1000 izin dan non izin	Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2020 ke 2021 semula 97% menjadi 99%	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19.002	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	99%	Jumlah produk layanan dokumen izin dan non izin Sektor Perekonomian dan infrastruktur	1000 izin dan non izin	Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2020 ke 2021 semula 97% menjadi 99%	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN										Rp. 330.000.000,00	Rp. 370.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.20.002	Percepatan Perizinan Berusaha	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian ijin usaha	2Hari	Dokumen SOP Izin dan non izin	1 dokumen	Dukungan sebesar 70 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2020 ke 2021 semula 3 hari menjadi 2 hari	100%	Rp. 230.000.000,00	Rp. 260.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 3.669.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kajian Pengelolaan Manajemen Pelayanan Terpadu satu Pintu (manajemen plan)	1 kajian						
1.18.1.18.01.00.20.003	Pelayanan Pengaduan Perizinan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Waktu penyelesaian ijin usaha	2Hari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 ke 2021 semula 84% menjadi 85%	Dukungan sebesar 30% terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2020 ke 2021 semula 3 hari menjadi 2 hari	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Terselesaikannya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Pengaduan Perizinan selesai 100 % (dari 5 pengaduan)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.432.250.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.22	KEBUDAYAAN													
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
1.22.1.22.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.778.250.000,00	Rp. 0,00		
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Listrik dan Elektronik	15 Jenis	Dukungan 63.38% Terhadap Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	100%	Rp. 4.150.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Alat Tulis Kantor	30 Jenis						
							Barang Cetakan	7 Jenis						
							Belanja Meterai	400 Buah						
							Isi Gas tabung pemadam kebakaran	5 Jenis						
							Kebersihan Gedung Kantor	3 Gedung						
							Langganan Surat Kabar harian 2 jenis 2 ekslempar	12 bulan.						
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan	16 unit (Roda 4 : 10 unit, Roda 6 : 4 unit dan Roda 2 : 2 Unit)						
							Pembayaran Restribusi sampah	1 kali 12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.432.250.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembayaran Tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet Sewa hosting dan domain	12 bulan 1 tahun						
							Penggandaan	30.000 Lembar						
							Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis						
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Honor perencana program Pengelola Keuangan Pengelola barang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 36,95% Terhadap Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Kinerja 17 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 Tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 36.95% Terhadap Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	100%	Rp. 128.250.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.432.250.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 Tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						
1.22.1.22.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00		
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 35 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 0.57% Terhadap Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	100%	Rp. 245.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%						
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 Buah	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas/Operasional) Terpenuhi	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Alat - Alat Kantor	5 Jenis	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Peralatan dan Pelengkapan Gedung Kantor) Terpenuhi	100%	Rp. 105.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Instalasi Telepon	3 jenis						
							Jaringan Komputer	30 titik						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.432.250.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.22.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 54.000.000,00	Rp. 88.896.500,00		
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Capaian Kinerjanya Sesuai Dokumen Perencanaan	Nilai LKJIP A	Dukungan 2,5% Terhadap Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaraan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	Tersedianya Laporan keuangan SKPD	100%	Rp. 41.000.000,00	Rp. 68.750.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Terlaksananya Penyusunan : RKA-DPA, Renstra, Sistem Informasi, Statistik Budaya	1 Tahun	Tersedianya Dokumen RKA - DPA, Renstra, Statistik Budaya	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 20.146.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Alokasi Anggaran Kas 100%	Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Di Tetapkan	Kelancaran pelaksanaan Pelaporan kinerja SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.23	PERPUSTAKAAN													
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.23.1.23.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 7.776.840.580,00	Rp. 7.827.410.580,00		
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat tulis kantor	33 jenis	Dukungan 85 % terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.690.070.580,00	Rp. 6.690.070.580,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							02. Barang cetakan	5 jenis						
							03. Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit						
							04. Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	18 unit						
							05. Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit						
							06. Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							07. Keamanan Gedung Kantor	12 bulan						
							08. Kebersihan gedung kantor	12 bulan						
							09. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis						
							10. Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 12 bulan						
							11. Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan						
							12. Penggandaan	105.000 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13. Pengiriman dokumen	12 bulan						
							14. Peralatan Rumah Tangga	9 jenis						
							15. Surat keluar	6500 surat						
							16. Surat masuk	1850 surat						
							17. Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	17. 1 daftar arsip, 1 kali penyusutan						
							18. Perangko, material dan benda pos	18. 4 jenis						
							19. Alat kebersihan dan bahan pembersih	19. 13 jenis						
1.23.1.23.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. 1 tahun	Dukungan 5% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 125.940.000,00	Rp. 125.940.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Pengelolaan perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2. 1 tahun						
							3. Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3. 1 tahun						
							4. Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4. 1 tahun						
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1. 1 tahun	5. Penyediaan ekstra fooding bagi 66 orang PNS	5. 1 tahun	Rp. 960.830.000,00	Rp. 1.011.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	2. 1 tahun	Dukungan 10% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				
							3. Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	3. 1 tahun						
							4. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	4. 1 tahun						
1.23.1.23.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 9.832.531.500,00	Rp. 11.921.781.500,00		
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1. 4 jenis	Dukungan terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	75%	Rp. 6.146.026.500,00	Rp. 8.235.276.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Pengadaan interior depo arsip	2. 1 paket						
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai RKPBMĐ 5 lokasi (TRM , Unit Malioboro, RBM Sewon, GTP, Depo)	1. 4 lokasi	Dukungan terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5%	Rp. 2.599.870.000,00	Rp. 2.599.870.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Rehabilitasi Minaret	2. 1 paket						
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMĐ terpelihara	1. 7 unit	Dukungan terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5%	Rp. 577.035.000,00	Rp. 577.035.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMĐ terpelihara	2. 18 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMD terpelihara	3. 1 unit						
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD	1. 6 jenis	Dukungan terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5%	Rp. 509.600.000,00	Rp. 509.600.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD	2. 13 jenis						
							3. Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMD	3. 3 jenis						
1.23.1.23.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 163.811.000,00	Rp. 163.811.000,00		
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Surveilance ISO 9001:2015	1 kali	Dukungan 50% terhadap persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Rp. 111.171.000,00	Rp. 111.171.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1. Penilaian angka kredit arsiparis	1. 2 kali	Dukungan terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40%	Rp. 52.640.000,00	Rp. 52.640.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. penilaian angka kredit pustakawan	4. 2 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 209.362.750,00	Rp. 209.362.750,00		
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	2 Laporan	Dukungan 3% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 18.770.750,00	Rp. 18.770.750,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	2 Laporan						
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Fungsional; Laporan Semesteran/Prognosis; Laporan Keuangan Tahunan	12; 1;1	Dukungan terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	10%	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 kali	Dukungan 77% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 136.723.000,00	Rp. 136.723.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA,dan DPA	2 dokumen						
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 Program Kegiatan	Dukungan 17% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 34.869.000,00	Rp. 34.869.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 682.710.000,00	Rp. 682.710.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	59unit	Akreditasi perpustakaan	15 perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Standar	100%	Rp. 322.500.000,00	Rp. 322.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Bimtek perpustakaan	3 angkatan						
							Pengembangan aplikasi akreditasi perpustakaan	1 paket						
							Workshop Akreditasi	2 kali						
1.23.1.23.01.00.15.003	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	59unit	1. Bedah buku	1. 10 kali	Peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar	100%	Rp. 360.210.000,00	Rp. 360.210.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Forum Perpustakaan	2. Satu (1) kali						
							3. Lomba Minat Baca	3. Satu (1) kali						
							4. Workshop Karya Tulis	4. Satu (1) kali						
1.23.1.23.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 816.500.000,00	Rp. 816.532.500,00		
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	1. Alih Media	1. 10.000 lembar	Dukungan 35% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi Perpustakaan	100%	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Termite control	2. 500 M2						
							3. Alih Bahasa Asing-Indonesia	3. 100 lembar						
							4. Alih Bahasa Jawa-Latin	4. 500 lembar						
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	01. Pengolahan bahan Pustaka	01. 4.000 eks	Dukungan 65% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	Rp. 591.500.000,00	Rp. 591.532.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan E-Book	02. 500 judul						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Pengolahan E-Deposit	03. 500 eks						
							04. Pemantauan Penerbit dan Pengusaha Rekaman	04. 100 penerbit						
							05. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	05. Korespondensi 8 Lokasi						
							06. Bahan Pustaka KCKR	06. 2.000 eks						
							07. Penyusunan Bibliografi Daerah	07. 4 terbitan						
							08. Penyusunan Accessionlist	08. 1 terbitan						
							09. Penyusunan Katalog Induk Daerah	09. 1 terbitan						
1.23.1.23.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 3.530.855.000,00	Rp. 3.530.855.000,00		
1.23.1.23.01.00.17.002	Layanan Perpustakaan Menetap	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan Menetap	1. 3 lokasi	Dukungan 65% terhadap peningkatan jumlah pengunjung	100%	Rp. 2.762.435.000,00	Rp. 2.762.435.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	7perpustakaan								
1.23.1.23.01.00.17.003	Layanan Perpustakaan Ekstensi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan Sepatu Jolifa	1. Penambahan 2 anggota perpustakaan silang pinjam	Dukungan 35% terhadap peningkatan jumlah pengunjung dan penambahan 2 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	Rp. 768.420.000,00	Rp. 768.420.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	7perpustakaan	2. Layanan Keliling	2. 18 lokasi						
							3. Layanan Pojok Baca	3. 10 lokasi						
							4. Layanan Delivery Order	4. 150 transaksi						
1.24	KEARSIPAN													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.24.1.23.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 436.611.000,00	Rp. 436.611.000,00		
1.24.1.23.01.00.16.001	Pengelolaan Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	110OPD/UPTD	1.Penilaian dan Penyusutan Arsip	1. 12.000 Berkas	Dukungan 73,1 % terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100%	Rp. 291.611.000,00	Rp. 291.611.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Pengolahan arsip inaktif	2. 1.000 berkas						
							3. Pengolahan arsip Statis	3. 2.000 berkas						
1.24.1.23.01.00.16.003	Pembinaan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	110OPD/UPTD	Aplikasi pengawasan kearsipan	1 paket	Dukungan 45,39 % terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100%	Rp. 145.000.000,00	Rp. 145.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pembinaan dan Pengawasan Intrernal Kearsipan OPD-UPTD	86 instansi						
							Pengawasan Intrernal Kearsipan OPD-UPTD	86 instansi						
1.24.1.23.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP										Rp. 451.194.000,00	Rp. 451.194.000,00		
1.24.1.23.01.00.17.001	Pelestarian Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	Alih Media Arsip Tekstual dan Arsip Foto	15.000 data dan 500 foto	Dukungan 33,4 % terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100%	Rp. 151.194.000,00	Rp. 151.194.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Perawatan mandiri arsip DPAD	2.500 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.900.415.830,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.24.1.23.01.00.17.003	Layanan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	1. Layanan arsip statis	1. 500 orang	Dukungan 66,6 % terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							2. Entri data SIKS dan JIKN	2. 8.625 nomor/ berkas						
							3. Pengembangan software layanan	3. 1 paket						
							4. Naskah Sumber Arsip	4. 1 tema/judul						
							5. Pemasyarakatan arsip melalui publikasi	5. 1 kegiatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan													
2.01.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.280.826.500,00	Rp. 4.565.940.000,00		
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	alat listrik dan elektronik	12 jenis	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.994.631.500,00	Rp. 2.140.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							alat tulis kantor	50 jenis						
							Barang cetakan	14 jenis						
							Belanja penggandaan dan penjilidan	194.000 lembar dan 225 eks						
							majalah	2 jenis						
							materai	2 jenis						
							Pembayaran air bersih	1 tahun						
							pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Pembayaran tagihan listrik	12 bulan						
							pembayaran tagihan telepon	1 tahun						
							pengiriman dokumen	18 kali						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	22 unit						
							surat kabar	8 jenis						
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	6 orang	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.487.340.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang						
							Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	33 orang						
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 798.855.000,00	Rp. 924.990.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan						
							makanan dan minuman rapat	7.520 OS						
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.002.800.000,00	Rp. 3.778.800.000,00		
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Rehab kolam BAT Sendangsari (BPTPB)	1 PAKET	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Rp. 908.840.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							02. Rehab Kolam BAP Congot (BPTPB)	1 paket						
							03. Rehab Kolam Hatchery Selatan Cangkringan (BPTPB)	1 paket						
							04 Rehab kolam ikan hias Cangkringan	1 paket						
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Genset	1 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 278.680.000,00	Rp. 506.400.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							Hi-blow	8 unit						
							Kincir air	10 unit						
							Pompa air	2 unit						
							Printer	2 unit						
							Rak arsip	2 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor (INDUK)	1 paket	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 89.680.000,00	Rp. 506.400.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							02. pemeliharaan talang air (INDUK)	1 paket						
							03. Tambah Daya UK BAP Congot 22.000 volt (BPTPB)	1 unit						
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	kendaraan roda 2 terpelihara	36 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasaranaaparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 584.645.000,00	Rp. 949.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							kendaraan roda 3	4 unit						
							kendaraan roda 4	21 unit						
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	pemeliharaan jaringan internet	1 paket	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 140.955.000,00	Rp. 316.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							peralatan kantor terpelihara	7 jenis						
							perlengkapan kantor terpelihara	4 jenis						
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 173.680.000,00	Rp. 245.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2021	Nilai 84,00	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 25 kegiatan	1%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian dan kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 32.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 90.840.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							forum perencanaan OPD	1 Kali						
							Forum Rekonsiliasi Eksekutif dan Legislatif	1 kali						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen						
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 25 kegiatan	100%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 45.840.000,00	Rp. 78.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 195.225.000,00	Rp. 286.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.16.002	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	35.25milyar rupiah	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan (PPP)	70 orang	"dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 0,47 M dari tahun 2020 sebesar Rp. 34,78 M menjadi sebesar Rp. 35,25 M pada tahun 2021"	100%	Rp. 56.625.000,00	Rp. 143.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.16.003	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	35.25milyar rupiah	1. Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	50 orang	"dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 0,47 M dari tahun 2020 sebesar Rp. 34,78 M menjadi sebesar Rp. 35,25 M pada tahun 2021"	100%	Rp. 138.600.000,00	Rp. 143.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	60 orang						
							3. Penyusunan Koordinat WKOPP PPP Sadeng	1 dokumen						
2.01.2.01.01.00.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 1.149.933.600,00	Rp. 1.180.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.17.001	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Jumlah Pengawasan terpadu di laut	12 hari	"dukungan 33,33% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%"	100%	Rp. 475.796.600,00	Rp. 480.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	17 hari						
							Jumlah produk perikanan yg sesuai standar mutu	78 % (angka absolut) meta indikator : jumlah produk yg sesuai di bagi jumlah produk yg diawasi kali 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.17.003	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Danurejan Pajangan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	600.000 ekor	"dukungan 33,33 % terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%"	100%	Rp. 406.917.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.17.004	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Temon	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (1 kab)	1 dokumen	"dukungan 33,33% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%"	100%	Rp. 267.220.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 2.524.588.000,00	Rp. 2.640.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.18.001	Pengelolaan Teknis Perikanan Tangkap	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Galur Panggang Sapto sari Srandakan Temon	Produksi Perikanan Tangkap	6863ton	1. Jumlah calon nelayan baru	10 orang	kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 229,2 ton dari tahun 2020 sebesar 6.481 ton menjadi 6.863 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 1.723.588.000,00	Rp. 1.740.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan kenelayanan	120 orang						
							3. produksi kelompok nelayan yang di bina	48 ton						
							4. Master plan dan DED Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing, Gunungkidul	1 paket						
2.01.2.01.01.00.18.002	Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girisubo Sapto sari Tanjungsari	Produksi Perikanan Tangkap	6863ton	1. Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen	kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 152,8 ton dari tahun 2020 sebesar 6.481 ton menjadi 6.863 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 801.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	4 kapal						
							3. Jumlah Kapal perikanan yang di lengkapi dokumen perijinan	8 kapal perikanan						
							4. jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	4 kelompok						
2.01.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 2.192.933.500,00	Rp. 1.974.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Berbah Danurejan Gondokusuman Mlati Pajangan Panjatan Semin Seyegan Tegalrejo Umbulharjo Wirobrajan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.48kg/kapita/tahun	1. jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	1050 orang	Dukungan 62% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,16 kg/kapita/tahun dari tahun 2020 sebesar 25,21 kg/kapita/tahun menjadi 25,48 kg/kapita/tahun pada tahun 2021)	100%	Rp. 1.084.237.500,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. persentase hasil uji laboratorium produk perikanan	78%						
							3. produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah	7,2 ton						
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Banguntapan Berbah Depok Galur Gamping Gedongtengen Godean Jetis Kraton Lendah Mergangsan Minggir Mlati Moyudan Pajangan Seyegan Tegalrejo Umbulharjo Wirobrajan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.48kg/kapita/tahun	1. jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	3760 orang	Dukungan 38% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,11 kg/kapita/tahun dari tahun 2020 sebesar 25,21 kg/kapita/tahun menjadi 25,48 kg/kapita/tahun pada tahun 2021)	100%	Rp. 1.108.696.000,00	Rp. 874.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA						2. Pasar mina	4 kali			Rp. 4.086.232.000,00	Rp. 4.800.000.000,00		
							3. Persentase penjualan produk olahan	90 %						
							4. jumlah dokumen perjanjian kerjasama yg terealisasi	4 dokumen						
2.01.2.01.01.00.20.001	Pengelolaan Teknis Perikanan Budidaya	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Gedang sari Girimulyo Imogiri Kokap Lendah Nglipar Playen Samigaluh Semin Sentolo Tempel	Produksi Perikanan Budidaya	89600ton	1. Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	15 unit pembudidaya/kelompok	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2020 sebesar 89.500 ton menjadi 89.600 ton pada tahun 2021 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.570 ton; mas: 200 ton; gurami:12.830 ton; udang vaname: 3.000 ton; tawes: 235 ton; patin: 85 ton; lele: 40,100 ton; bawal: 5.000 ton; dan lainnya: 2.500 ton	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB	2 UPR						
							3. Jumlah sertifikat MPM CPIB	7 sertifikat MPM CPIB						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 20.146.218.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.20.002	Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Gedang sari Girimulyo Imogiri Kokap Lendah Nglipar Playen Samigaluh Semin Sentolo Tempel	Produksi Perikanan Budidaya	89600ton	1. Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya	2 dokumen	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2020 sebesar 89.500 ton menjadi 89.600 ton pada tahun 2021 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.570 ton; mas: 200 ton; gurami:12.830 ton; udang vaname: 3.000 ton; tawes: 235 ton; patin: 85 ton; lele: 40,100 ton; bawal: 5.000 ton; dan lainnya: 2.500 ton	100%	Rp. 3.486.232.000,00	Rp. 3.900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							2. Pembentukan rintisan desa minawisata	3 Desa Minawisata						
							3. Produksi perikanan budidaya	100 ton						
2.01.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 3.540.000.000,00	Rp. 3.630.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan Karangmojo Pengasih Sanden Temon Tepus	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	88%	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	350 sampel	Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 88 %	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan Karangmojo Pengasih Sanden Temon Tepus	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	88%	benih ikan dan Udang	29.303.977 ekor	dukungan 75% terhadap prosentase benih ikan perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 88%	100%	Rp. 3.240.000.000,00	Rp. 3.330.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							calon induk ikan	8.030 kg						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.02	PARIWISATA													
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata													
2.02.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.433.628.000,00	Rp. 1.619.554.200,00		
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat tulis kantor	58 Jenis	Dukungan 30% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 441.880.000,00	Rp. 486.068.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	9 unit/buku						
							Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 6 unit roda 4						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Jasa KIR	2 kali						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
							Majalah dan Surat Kabar	4 jenis						
							Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan						
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun						
							Penggandaan	51.000 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengiriman Dokumen	27 dokumen						
							Penyusutan arsip	10.000 arsip						
							Peralatan Rumah Tangga	22 jenis						
							Surat Keluar	27.500 surat						
							Surat Masuk	15.000 surat						
							Trophy	25 set						
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan	Dukungan 17 % terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 256.562.000,00	Rp. 282.218.200,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 orang/bulan						
							3.Bukti pembayaran honorarium pengurus barang	2 orang/bulan						
							4.Bukti pembayaran honorarium perencana program	3 orang/bulan						
							5.Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik	1 tahun	Dukungan 53% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 735.186.000,00	Rp. 851.268.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
							3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanan dengan baik	1 tahun						
							4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	4000 orang						
2.02.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 665.000.000,00	Rp. 731.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan Komputer/ Laptop (2 pc, 4 laptop)	2 jenis	Dukungan 9% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Dukungan 44% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 295.000.000,00	Rp. 324.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Jaringan Listrik dan jaringan Komputer	1 paket						
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMMD	12 unit	Dukungan 37,77% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 240.000.000,00	Rp. 264.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Mesin Generator (Genset)	3 unit						
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.Mebeleur terpelihara	2 jenis	Dukungan 11% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis						
							3.Perengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 215.000.000,00	Rp. 236.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 80 (A) menjadi 82 (A)	Dukungan 2 % terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 5% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1). Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 70% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	2). Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
							3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun; dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	3). 520.000 pengunjung						
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 23% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 1.758.538.000,00	Rp. 1.934.391.800,00		
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten dan kota di DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	7289849Orang	Dokumen Statistik Pariwisata	1 dokumen sebagai bahan penyusunan buku statistik pariwisata	Dukungan sebesar 70% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2020 ke 2021 sebesar semula 6.542.327 orang wisatawan menjadi 7.289.849 orang wisatawan	100%	Rp. 1.239.138.000,00	Rp. 1.363.051.800,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah kontak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	3 kontrak kerjasama						
							Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis						
							Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization dari jurnalis, asosiasi pariwisata luar negeri luar negeri dan media	30 ulasan yang terpublikasikan						
							Neraca Satelit Pariwisata Daerah tahun 2021	1 dokumen indikator dampak perekonomian dari sektor pariwisata						
2.02.2.02.01.00.15.002	Pelayanan Informasi Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/kota di DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	7289849Orang	1. Jumlah 8 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, tabloid pariwisata,CD pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	15.000 eksemplar	Dukungan sebesar 30% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2020 ke 2021 sebesar semula 6.542.327 orang wisatawan menjadi 7.289.849 orang wisatawan	100%	Rp. 519.400.000,00	Rp. 571.340.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	15.610 orang wisatawan						
							3. Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel)	12.000 followers						
2.02.2.02.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 1.773.100.000,00	Rp. 2.487.881.000,00		
2.02.2.02.01.00.16.002	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten dan kota di DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	21.36%	Cetak lisensi pramuwisata	500 orang	Dukungan sebesar 33% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2020 ke 2021 semula 19.61% menjadi 21.36%	100%	Rp. 654.110.000,00	Rp. 827.321.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah sdm pariwisata yg dilatih dan tersertifikasi	145 orang						
							Jumlah sdm pariwisata yg meningkat kapasitasnya melalui pelatihan bahasa inggris di obyek wisata	20 orang x 4 lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/Kota di DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	21.36%	Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2021	7 desa wisata yang naik kelas	Dukungan sebesar 67% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku parwisata dari tahun 2020 ke 2021 semula 19.61% menjadi 21.36%	100%	Rp. 1.118.990.000,00	Rp. 1.660.560.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah Forum Komunikasi Lintas Sektor	4 kali						
							Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan						
							Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2021	25 pokdarwis						
							Pelatihan dan Kemitraan kelembagaan Pelaku Pariwisata	1 akt @ 30 orang						
							Sosialisasi Sadar Wisata	1 akt @45 orang						
2.02.2.02.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 1.004.790.000,00	Rp. 1.105.269.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.17.002	Pengawasan Industri Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 Kabupaten/Kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	200UJP	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020	8 UJP (140 Usaha)	Dukungan sebesar 35% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2020 ke 2021 semula 150 UJP menjadi 200 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	Rp. 348.360.000,00	Rp. 383.196.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.17.003	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 Kabupaten/Kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	200UJP	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	6 UJP @ 30 peserta	Dukungan sebesar 65% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2020 ke 2021 semula 150 UJP menjadi 200 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100 %	Rp. 656.430.000,00	Rp. 722.073.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2021	4 UJP terdiri dari 30 usaha						
							3. Penyusunan Profil Industri Pariwisata DIY	1 Sistem Database dan 1 Dokumen						
2.02.2.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 1.595.225.000,00	Rp. 3.294.747.500,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	5 Kabupaten / Kota di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.3LOS	DED Pengembangan Wisata Kawasan Samigaluh - Girimulyo Kulon Progo	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Samigaluh-Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo	Dukungan sebesar 69% terhadap terwujudnya peningkatan peningkatkan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2020 ke 2021 sebesar (0,03 hari) semula 2.22 hari menjadi 2.30 hari	100 %	Rp. 675.000.000,00	Rp. 2.282.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Tegalrejo	1 dokumen sebagai bahan pertimbangan kelayakan pengembangan potensi wisata Kawasan Tegalrejo						
							DED Pengembangan Wisata Kawasan Dlingo - Piyungan Bantul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Dlingo-Piyungan, Kabupaten Bantul						
							DED Pengembangan Wisata Kawasan Imogiri	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Wisata Imogiri-Pleret,Bantul						
							DED Pengembangan Wisata Patuk Gunungkidul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Patuk, Kabupaten Gunungkidul						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 8.445.281.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Gondokusuman	1 dokumen sebagai bahan pertimbangan kelayakan pengembangan potensi wisata Kawasan Tegalrejo						
							Monitoring dan Evaluasi di 12 Destinasi Pariwisata	1 Dokumen Monev						
2.02.2.02.01.00.18.002	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Kabupaten Kota di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.3LOS	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event	Dukungan sebesar 31% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2020 ke 2021 (0,03 hari) semula 2.22 hari menjadi 2.30 hari	100%	Rp. 920.225.000,00	Rp. 1.012.247.500,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah event pariwisata nasional (Wediombo National Surfing)	1 event						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.09	PANGAN													
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
1.09.1.09.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN										Rp. 1.276.866.000,00	Rp. 1.320.000.000,00		
1.09.1.09.01.00.17.001	Penyediaan Cadangan Pangan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	4 Kab / 1 Kota	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Informasi Data Cadangan Pangan	12 bulan	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.734,8 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 3.737,4 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 2.200,6 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,09%)	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							NBM Sementara, NBM Tetap, Prognosa Ketersediaan Pangan, ARAM I	4 dokumen						
							Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	25 ton						
1.09.1.09.01.00.17.002	Distribusi Pangan Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Mlati Sentolo Tlogoadi Banguncipto	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Informasi harga komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan)	3 jenis data	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan	100%	Rp. 475.235.000,00	Rp. 480.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									energi dari 3.734,8 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 3.737,4 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 2.200,6 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,09%)					
							Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	1 Tahun						
							Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / TTI	2 Unit						
							Promosi Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 kali						
1.09.1.09.01.00.17.003	Penyelenggaraan Jogja Benih	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Dukungan 3% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.734,8 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 3.737,4 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 2.200,6 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,09%)	100%	Rp. 57.960.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Jaringan pasar perbenihan	1 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.17.004	Pengawasan Keamanan Pangan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	4 Kab / 1 Kota	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %	Dukungan 22% terhadap persentase peningkatan ketersediaaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.734,8 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 3.737,4 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 2.200,6 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,09%)	100%	Rp. 133.044.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	4 dokumen						
1.09.1.09.01.00.17.005	Gerakan Panganekaragaman Pangan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	4 Kab / 1 Kota	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Gerakan Panganekaragaman Pangan	12 lokasi	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.734,8 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 3.737,4 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 2.200,6 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (0,09%)	100%	Rp. 260.627.000,00	Rp. 285.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 588.772.000,00	Rp. 595.000.000,00		
1.09.1.09.01.00.18.001	Penanganan Desa Rawan Pangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Girimulyo Karangmojo Kokap Pajangan Panggang Playen Pleret Rongkop Samigaluh Seyegan Srandakan Turi Ngipak Hargomulyo Hargotirto Kalirejo Guwosari Girikarto Trimurti	Jumlah Desa Rawan Pangan	2desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan	6 desa mandiri pangan	Dukungan 70% terhadap penurunan jumlah desa rawan pangan sebanyak 2 desa dari 4 desa pada tahun 2020 menjadi 2 desa pada tahun 2021	100%	Rp. 459.050.000,00	Rp. 465.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Laporan akhir / rekomendasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	1 dokumen						
							Lembaga Akses Pangan Masyarakat(LAPM)	3 Gapoktan						
1.09.1.09.01.00.18.002	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	4 Kab / 1 Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan	2desa rawan pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Dukungan 30% terhadap penurunan jumlah desa rawan pangan sebanyak 2 desa dari 4 desa pada tahun 2020 menjadi 2 desa pada tahun 2021	100%	Rp. 129.722.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen						
							Pergub tindak lanjut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1 dokumen						
2	Pilihan													
2.03	PERTANIAN													
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
2.03.1.09.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.171.524.050,00	Rp. 4.235.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	ATK	40 Jenis	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 2.090.533.000,00	Rp. 2.155.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	3 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	1 tahun						
							Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6	1 tahun						
							Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan						
							Komponen instalasi listrik	13 macam						
							Majalah	1 macam						
							Pengelolaan naskah dinas	1 tahun						
							Peralatan rumah tangga perkantoran	8 macam						
							Pindahan UPTD BPPTDK	1 paket						
							Retribusi sampah	1 tahun						
							Surat kabar	2 macam						
							Surat keluar	12.000 surat						
							Surat masuk	6.000 surat						
2.03.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Honor pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola kepegawaian, dan perencana program	58 orang/ bulan	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 1.286.982.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 794.009.050,00	Rp. 780.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke luar daerah terlaksana dengan baik.	1 tahun						
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
2.03.1.09.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.169.614.000,00	Rp. 1.330.502.000,00		
2.03.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Instalasi Jaringan Internet UPTD BPTP	1 Paket	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 53.535.000,00	Rp. 164.780.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pemasangan teralis (BPTP)	1 Paket						
							Pengadaan AC	2 unit						
							Pengadaan Pompa air	1 unit						
							Pengadaan Printer	2 unit						
2.03.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemasangan Listrik UPTD BPTP Gesikan	1 Paket	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 268.839.000,00	Rp. 295.722.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Gedung A lantai 1	1 Paket						
							Pemeliharaan instalasi listrik di UPTD BPSDMP	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan kandang di UPTD BPPTDK Unit Ngipiksari	1 Paket						
							Perbaikan eternit plafon UPTD BPSDMP	1 Paket						
2.03.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	205 unit	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 765.015.000,00	Rp. 785.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan berkala Peralatan gedung/ perkantoran (komputer, laptop, mesin tik, AC, LCD dan genset)	6 jenis	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 82.225.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan berkala perlengkapan/ gedung perkantoran	1 paket						
2.03.1.09.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 30.200.000,00	Rp. 31.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.200.000,00	Rp. 31.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 106.184.000,00	Rp. 165.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang capaian	Nilai LKJ IP: A (dari 82,20 menjadi 83)	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan	100%	Rp. 2.940.000,00	Rp. 3.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Pemerintahan	Pangan	Capaian Kinerja dan Keuangan		kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2021		pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Pangan	
2.03.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Forum OPD	1 kali	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 62.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							RKT, Renja, RKA, DPA, pengelolaan data dan sistem informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2022 dan perubahan TA. 2021						
2.03.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 29.244.000,00	Rp. 29.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 820.985.400,00	Rp. 635.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.16.006	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	75%	Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	1 dokumen	Dukungan sebesar 40% terhadap target peningkatan pengetahuan dan	100%	Rp. 463.905.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									keterampilan SDM pertanian dari skor 74 di tahun 2020 menjadi 75 di tahun 2021					
							Forum agropreneur penyuluh dengan petani milenial	4 kab 1 kota						
							Partisipasi PENAS	1 kali						
							Programa Penyuluhan	1 dokumen						
							Temu Tugas Penyuluh	1 kali						
2.03.1.09.01.00.16.007	Pelatihan SDM Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	75%	Pelatihan agribisnis biofarmaka bagi petani andalan	1 angkatan	Dukungan sebesar 60% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dari skor 74 di tahun 2020 menjadi 75 di tahun 2021	100%	Rp. 357.080.400,00	Rp. 365.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pelatihan agribisnis itik bagi petugas.	1 angkatan						
							Pelatihan agribisnis kakao bagi petani andalan.	1 angkatan						
							Pelatihan agribisnis kopi bagi petugas.	1 angkatan						
							Pelatihan Agribisnis padi sehat bagi petugas.	1 angkatan						
							Pelatihan agribisnis pisang bagi petugas.	1 angkatan						
							Pelatihan Agribisnis Hortikultura	1 angkatan						
							Pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi penyuluh swadaya, petani andalan, dan KWT.	1 angkatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 9.849.585.000,00	Rp. 11.664.555.000,00		
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab	Produksi Tanaman Pangan	2313255ton	Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	60 hektar (Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unitx 15 ha)	Dukungan 88% terhadap peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 205 ton dari 2.313.050 ton pada tahun 2020 menjadi 2.313.255 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 3.256.885.000,00	Rp. 4.536.555.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Sarana prasarana rehab jalan usaha tani	30 paket						
							Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	375 ha						
2.03.1.09.01.00.18.005	Pertanian Terpadu Jogja Agro Techno Park	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Nanggulan	Produksi Tanaman Pangan	2313255ton	Operasional JATP	1 Tahun	Dukungan 2% terhadap peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 205 ton dari 2.313.050 ton pada tahun 2020 menjadi 2.313.255 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.18.006	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan Penanganan Hasil Tanaman Pangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Produksi Tanaman Pangan	2313255ton	Penerapan sistem pertanian organik (komoditas padi)	1 kelompok	Dukungan 10% terhadap peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 205 ton dari 2.313.050 ton pada tahun 2020 menjadi 2.313.255 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 3.592.700.000,00	Rp. 3.978.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Sarana pertanian yang dapat dipenuhi	132 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi	17 lokasi						
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA										Rp. 1.647.440.000,00	Rp. 1.995.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Produksi Hortikultura	401150ton	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura (cabe, bawang merah, aneka sayuran, tanaman buah, anggrek, biofarmaka, dan stroberi)	166 ha	Dukungan 95 % terhadap peningkatan produksi hortikultura sebesar 1.600 ton dari 399.550 ton pada tahun 2020 menjadi 401.150 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 1.480.000.000,00	Rp. 1.825.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.19.004	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan Penanganan Hasil Hortikultura	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Produksi Hortikultura	401150ton	Doksistu penerapan jaminan mutu komoditas hortikultura	1 dokumen	Dukungan 5 % terhadap peningkatan produksi hortikultura sebesar 1.600 ton dari 399.550 ton pada tahun 2020 menjadi 401.150 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 167.440.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah Kebun yang teregeistrasi dan Surveillance (salak, cabe, srikaya, bawang merah, dan buah naga)	500 sertifikat						
							Temu kemitraan	1 angkatan						
2.03.1.09.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 14.334.259.000,00	Rp. 19.738.500.000,00		
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Populasi Ternak	626885AU (Animal Unit)	Penambahan populasi ternak domba	414 ekor (18 ekor x 23 kelompok)	Dukungan 80% terhadap peningkatan populasi ternak sebesar 2.011 AU dari 624.874 AU pada tahun 2020 menjadi 626.885 AU pada tahun 2021	100%	Rp. 13.542.000.000,00	Rp. 18.930.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							penambahan populasi ternak kambing	1.656 ekor (18 ekor x 92 kelompok)						
							Penambahan populasi ternak sapi perah	10 ekor (10 ekor x 1 kelompok)						
							Penambahan populasi ternak sapi potong	564 ekor (6 ekor x 94 kelompok)						
							Penambahan populasi ternak unggas	18.400 ekor (800 ekor x 23 klp)						
							Pengembangan pengolahan pupuk organik	18 kelompok						
							Tersedianya pakan ternak	12 Kelompok						
2.03.1.09.01.00.20.005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Populasi Ternak	626885AU (Animal Unit)	Jumlah fasilitasi obat dan vaksin	2.500 botol	Dukungan 15% terhadap peningkatan populasi ternak sebesar 2.011 AU dari 624.874 AU pada tahun 2020 menjadi 626.885 AU pada tahun 2021	100%	Rp. 705.749.000,00	Rp. 720.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	7 lokasi						
2.03.1.09.01.00.20.006	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Populasi Ternak	626885AU (Animal Unit)	Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	1 sertifikat	Dukungan 5% terhadap peningkatan populasi ternak sebesar 2.011 AU dari 624.874 AU pada tahun 2020 menjadi 626.885 AU pada tahun 2021	100%	Rp. 86.510.000,00	Rp. 88.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Meningkatnya kompetensi pengelola hewan qurban	50 orang						
							Terjaminnya daging hewan qurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)	5 wilayah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 4.439.711.000,00	Rp. 4.548.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.21.004	Produksi Bibit Ternak	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	96%	Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor	Dukungan 60 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 96% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 3.568.851.000,00	Rp. 3.658.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	825.000 kg/tahun						
							Semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis						
2.03.1.09.01.00.21.005	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	96%	Hasil uji penyakit hewan	7.500 sampel	Dukungan 40% terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 96% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 870.860.000,00	Rp. 890.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Hasil Uji sampel produk asal hewan	450 sampel						
							Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	4 ruang lingkup						
2.03.1.09.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 725.527.000,00	Rp. 743.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Dukungan 66 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pangan aman dari serangan OPT Tanaman Pangan seluas 216.478 ha dan 2% lahan aman dari DPI seluas 4.557 Ha dari luas total tanaman)	95%	Rp. 574.745.000,00	Rp. 585.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama 1 tahun	padi 2800 ha, jagung 75 ha, kedelai 30 ha, salak 25 ha, cabe 10 ha, bawang merah 5 ha, perkebunan 62 ha						
							Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang	20 ha						
							Tersedianya agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis						
2.03.1.09.01.00.22.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Dukungan 34 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pangan aman dari serangan OPT Tanaman Pangan seluas 216.478 ha dan 2% lahan aman dari DPI seluas 4.557 Ha dari luas total tanaman)	100%	Rp. 150.782.000,00	Rp. 158.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar	67 kecamatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							rekomendasi							
							Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen						
							Rekomendasi tingkat residu pada produk	85 rekomendasi						
2.03.1.09.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 1.214.873.000,00	Rp. 1.261.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	2 Kabupaten	Produksi Perkebunan	69153ton	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP (4 klp, 9 kali @ 25 org)	24 ha	Dukungan 3% terhadap peningkatan produksi perkebunan sebesar 138 ton dari 69.015 ton pada tahun 2020 menjadi 69.153 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 505.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Kelembagaan Petani Tembakau	3 kelompok						
2.03.1.09.01.00.23.005	Budidaya Tanaman Perkebunan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	2 Kabupaten	Produksi Perkebunan	69153ton	Budidaya Tanaman Perkebunan 3 komoditas (nilam, cengkeh, kelapa)	15 ha	Dukungan 75% terhadap peningkatan produksi perkebunan sebesar 138 ton dari 69.015 ton pada tahun 2020 menjadi 69.153 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 359.650.000,00	Rp. 368.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan tanaman perkebunan (kakao, kopi, teh)	12,5 ha						
							Pengutuhan tegakan tanaman kakao	6 ha						
2.03.1.09.01.00.23.006	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan Penanganan Hasil Tanaman Perkebunan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten	Produksi Perkebunan	69153ton	Bimtek pengolahan pasca panen	4 kelompok	Dukungan 20% terhadap peningkatan produksi perkebunan sebesar 138 ton dari 69.015 ton	100%	Rp. 181.629.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									pada tahun 2020 menjadi 69.153 ton pada tahun 2021					
							Penerapan standar mutu hasil perkebunan	2 kelompok						
							Pengelolaan lahan dan air	2 komoditas						
							Temu kemitraaan pelaku usaha perkebunan	80 orang						
2.03.1.09.01.00.23.007	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan Penanganan Hasil Tanaman Perkebunan (cukai)	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten	Produksi Perkebunan	69153ton	Fasilitasi sarpras dan PPHP komoditas tembakau	2 kelompok	Dukungan 2% terhadap peningkatan produksi perkebunan sebesar 138 ton dari 69.015 ton pada tahun 2020 menjadi 69.153 ton pada tahun 2021	100%	Rp. 173.594.000,00	Rp. 178.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							SL PPHP Komoditas Tembakau	60 orang						
2.03.1.09.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN										Rp. 1.368.768.000,00	Rp. 1.406.500.000,00		
2.03.1.09.01.00.24.004	Produksi Benih Tanaman Pangan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BP3MBTP	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	89%	Produksi Benih Tanaman Pangan	- Benih Padi 76.200 kg; - Benih Jagung 2.500 kg; - Benih Kedelai 1.800 kg; - Benih Kacang tanah 700 kg; - Benih Kacang hijau 700 kg.	Dukungan sebesar 40 % terhadap benih tanaman pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 89 % (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	100%	Rp. 710.293.000,00	Rp. 730.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.24.005	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BP3MBTP	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	89%	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	- Benih cabe 35 kg; - Benih tomat 35 kg; - Jamur edibel 4.300 botol; - Bibit tanaman buah 3.000 batang, - Benih tanaman hias 1.200 batang; - benih Strawberry 1.000 batang; - benih anggur 10 batang.	Dukungan 35 % terhadap benih tanaman pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 89 % (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	100%	Rp. 554.803.000,00	Rp. 570.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Rehab kubung unit Ngipiksari	1 paket						
2.03.1.09.01.00.24.006	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BP3MBTP	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	89%	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Penyediaan benih unggul perkebunan (kakao 5.000 batang dan kelapa 2.500 batang)	Dukungan 25 % terhadap benih tanaman pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 89 % (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat dijual mdibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	100%	Rp. 103.672.000,00	Rp. 106.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFI KASI BENIH PERTANIAN										Rp. 174.514.000,00	Rp. 179.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kab / 1 Kota	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	800hektar	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	430 ha	Dukungan 70% terhadap peningkatan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan	100%	Rp. 124.720.000,00	Rp. 128.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 41.918.822.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									perkebunan seluas 100 ha dari 700 ha pada tahun 2020 menjadi 800 ha pada tahun 2021					
2.03.1.09.01.00.25.002	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	UPTD BP3MBTP	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	800hektar	Rekomendasi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	19 rekomendasi	Dukungan 30% terhadap peningkatan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan seluas 100 ha dari 700 ha pada tahun 2020 menjadi 800 ha pada tahun 2021	100%	Rp. 49.794.000,00	Rp. 51.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.06	PERDAGANGAN													
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.06.2.06.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 775.873.000,00	Rp. 3.100.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.15.002	Pelatihan dan Kemitraan Eksportir	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	321.06Ribu US\$	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan yang meningkat kapasitasnya	40 orang	Dukungan sebesar 20% (1,26 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2% (6,3 Ribu US\$) semula 314,76 Ribu US\$ menjadi 321,06 Ribu US\$	100%	Rp. 127.905.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru yang meningkat kemampuannya	60 orang						
							Jumlah SKA yang diterbitkan	10.000 SKA						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.15.003	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	321.06Ribu US\$	Jumlah kontrak kerjasama dengan buyers yang dihasilkan dari Temu bisnis	2 kontrak kerjasama	Dukungan sebesar 80% (5 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2% (6,3 Ribu US\$) semula 314,76 Ribu US\$ menjadi 321,06 Ribu US\$	100%	Rp. 647.968.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Operasional Pokja KADIN	1 Tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, TEI) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajina Kulit (tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajinan Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, TEI: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 313,6 Ribu US\$ menjadi 488,6 Ribu US\$)	175 Ribu US\$						
2.06.2.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 1.543.840.000,00	Rp. 3.600.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.16.002	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2.25milyar rupiah	Jumlah peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya	200 orang	Dukungan 95% (sebesar 285 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 15,38% (300 juta rupiah) dari tahun 2020 ke 2021 semula 1,95 milyar rupiah menjadi 2,25 milyar rupiah	100%	Rp. 655.011.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Operasional Dekranas	1 Tahun						
							Pengembangan layanan pemasaran online melalui Aplikasi Jogjaplaza	1 Aplikasi						
							Peningkatan omzet peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.187 Juta Menjadi Rp. 1.302 Juta	Rp. 115 juta						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2.25milyar rupiah	Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan yang meningkat kemampuannya	330 orang	Dukungan 5% (15 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 15,38% (300 juta rupiah) dari tahun 2020 ke 2021 semula 1,95 milyarmenjadi 2,25 milyar rupiah	100%	Rp. 888.829.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta bimtek PKL yang meningkat kemampuannya (9 akt x 20 orang)	180 orang						
							Jumlah peserta Sekolah Pasar yang meningkat kemampuannya (2 akt x 25 orang)	50 orang						
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 309.897.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.5%	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Dukungan 50% (sebesar 0,25%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,05% semula 5,55 % menjadi 5,50 %	100%	Rp. 133.819.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%						
							Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5%						
2.06.2.06.01.00.17.002	Perlindungan Konsumen	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.5%	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	750 barang	Dukungan 50% (sebesar 0,25%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,05% semula 5,55 % menjadi 5,50 %	100%	Rp. 176.078.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	26 sengketa						
2.07	PERINDUSTRIAN													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.07.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.235.625.000,00	Rp. 2.600.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat tulis kantor	62 jenis	Dukungan 46 % terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.040.000.000,00	Rp. 1.338.439.647,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	16 jenis						
							Bukti pembayaran jasa pengelolaan arsip	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	2 unit						
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	19 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	19.678 m2						
							Komponen instalasi listrik/penerangan	16 jenis						
							Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							Penggandaan	143.000 lembar						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung						
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 jenis						
							Surat kabar	2 jenis						
							Surat Keluar	8450 surat						
							Surat Masuk	3400 surat						
2.07.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Dukungan 35 % Terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 780.000.000,00	Rp. 809.285.663,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	19 orang/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium Penyusun Program	3 Orang / Bulan						
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Makan dan minum sidang	6.000 OS	Dukungan 19 % Terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 415.625.000,00	Rp. 452.274.690,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan						
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan						
2.07.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 535.000.000,00	Rp. 904.791.100,00		
2.07.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pengadaan Komputer	3 jenis	Dukungan 19 % terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 216.721.100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Pengadaan Mebeler	2 Jenis						
							Pengadaan Peralatan	1 jenis						
							Pengadaan Perlengkapan	3 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara	3 jenis	Dukungan 21 % terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 284.420.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	19 unit	Dukungan 43% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.000.000,00	Rp. 289.485.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Mebeleur terpelihara	1 jenis	Dukungan 17 % terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 114.165.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis						
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis						
2.07.2.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 324.571.000,00	Rp. 350.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 2% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.593.792,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Dukungan 3% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.900.000,00	Rp. 13.187.583,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1. Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 88% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 284.171.000,00	Rp. 303.612.676,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	2. Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
							3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	3. Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Jumlah peserta Sosialisasi SIINAS yang meningkat pemahamannya	4. 650 orang						
2.07.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7% terhadap Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 26.605.949,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 270.431.000,00	Rp. 1.200.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	27produk ATG	Jumlah Prototype Alat Tepat Guna yang dihasilkan	3 ATG	Dukungan Terhadap Terwujudnya Jumlah pelayanan Jasa kemasan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 5% (52.289 pesanan) semula 1.045.786 pesanan ke 1.098.075 pesanan)	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	3 Layanan						
							Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	4 ATG						
							Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.18.002	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	27produk ATG	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.098.075 unit pesanan yang terlayani	Dukungan Terhadap Terwujudnya Jumlah pelayanan Jasa kemasan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 5% (52.289 pesanan) semula 1.045.786 pesanan ke 1.098.075 pesanan)	100%	Rp. 70.431.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	90 layanan						
2.07.2.06.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp. 8.236.587.000,00	Rp. 13.100.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.19.001	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Produksi IKM	13503514Rp Juta	Jumlah peserta Pelatihan IKM Agro yang meningkat keterampilannya (61 akt x 20 orang)	1220 orang	Dukungan sebesar 2.808.731 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2021 sebesar 13.503.514 juta rupiah	100%	Rp. 4.521.845.000,00	Rp. 6.100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah peserta Pelatihan IKM Pemula Limbah Bambu, IKM Pemula Limbah Kayu, Mebel Kayu, Mebel Bambu, IKM Pemula Olahan Umbi Umbian, IKM Pemula Olahan Roti, IKM Pemula Olahan Ikan yang meningkat keterampilannya (8 akt x 20 orang)	160 orang						
							Jumlah peserta Pendampingan IKM Garam	2 Kelompok						
							Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi halal	30 IKM						
2.07.2.06.01.00.19.002	Kemitraan IKM Agro	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Produksi IKM	13503514Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra dengan toko/retail	40 IKM	Dukungan sebesar 3.213.836 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2021 sebesar 13.503.514 juta rupiah	100%	Rp. 352.156.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas Agro semula Rp. 220,8 Juta menjadi Rp. 230,8 Juta	Rp. 10 Juta						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Produksi IKM	13503514Rp Juta	Jumlah desain/rancangan produk baru (perangkat lunak/aplikasi) dari lomba	6 Aplikasi	Dukungan sebesar 2.808.731 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2021 sebesar 13.503.514 juta rupiah	100%	Rp. 3.080.861.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Pelatihan IKM Logam, Sandang, dan Aneka yang meningkat keterampilannya (38 akt x 20 orang)	760 orang						
							Jumlah peserta Pelatihan IKM Animasi di Kab. Sleman yang meningkat keterampilannya	20 IKM						
							Jumlah peserta Pelatihan IKM Pakaian Jadi, kulit, kerajinan di Kab. Bantul, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul yang meningkat keterampilannya (3 akt x 20 orang)	60 Orang						
							Jumlah peserta Pelatihan IKM Pande Besi di Kabupaten bantul yang meningkat keterampilannya (1 akt x 20 orang)	20 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah peserta Pendampingan IKM Animasi di Kab. Sleman yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	20 IKM						
							Jumlah peserta Pendampingan IKM Sandang di Kab. Bantul yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	30 IKM						
2.07.2.06.01.00.19.004	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13503514Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra dengan toko/retail	25 IKM	Dukungan sebesar 1.512.394 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2021 sebesar 13.503.514 juta rupiah	100%	Rp. 281.725.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, alat rumah tangga, produk kulit dan Fashion semula Rp. 1.050 Juta menjadi Rp. 1.175 Juta)	Rp.125 Juta						
2.07.2.06.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Rp. 225.380.000,00	Rp. 500.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 14.457.204.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.20.001	Edukasi dan Advokasi HKI	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	150unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	90 Orang	Dukungan 50% (15 HKI) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 30 HKI semula 120 HKI menjadi 150 HKI	100%	Rp. 105.647.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.20.002	Pelayanan Pendaftaran HKI	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	150unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang mendapat sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (Merk sebanyak 90 IKM dan Co Branding sebanyak 30 IKM)	120 IKM	Dukungan 50% (15 HKI) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 30 HKI semula 120 HKI menjadi 150 HKI	100%	Rp. 119.733.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.532.122.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
4.01.4.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.509.232.000,00	Rp. 8.500.000.000,00		
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Bukti pembayaran General Check Up Gubernur dan Wakil Gubernur beserta istri	4 orang	Dukungan 30% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 885.950.000,00	Rp. 1.680.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							02. Bukti pembayaran sewa angkutan darat	1 tahun						
							03. Karangan bunga	60 buah						
							04. Makanan dan minuman Gubernur dan Wagub	12 bulan						
							05. Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel						
							06. Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel						
							07. Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel						
							08. Souvenir/cinderamata	5 jenis						
							09. Trophy	2 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.532.122.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 10% terwujudnya adminsitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.534.000,00	Rp. 20.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindakanljut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 60% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.572.748.000,00	Rp. 6.800.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 22.890.000,00	Rp. 30.000.000,00		
4.01.4.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 dokumen	Dukungan 25% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.825.000,00	Rp. 10.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.532.122.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran, dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 25% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.204.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. n+1 dan Perubahan TA. n	4 dokumen	Dukungan 25% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.181.000,00	Rp. 8.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 25% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.680.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.12.4.01.02.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Rp. 481.110.000,00	Rp. 985.380.000,00		
1.12.4.01.02.01.15.001	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.17%	01. Blanko KIA	10.000 keping	Dukungan sebesar 75.67% terhadap Presentase Kepemilikan Dokumen Penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	100%	Rp. 263.610.000,00	Rp. 656.920.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	50 dokumen						
							03. Masyarakat yang sadar adminduk	600 orang						
							04. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	200 KTP, 100 KIA						
							05. Lembaga yang Dikoordinasi dan Bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	5 lembaga						
							06. Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	2 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Masyarakat yang memahami Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	600 orang						
1.12.4.01.02.01.15.002	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.17%	01. Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	3 instansi	Dukungan sebesar 24,32% terhadap Presentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	Rp. 217.500.000,00	Rp. 328.460.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	2 konten						
							03. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	1 dokumen						
							04. Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
4.01.4.01.02.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 685.628.000,00	Rp. 1.290.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Barang Cetakan	13 Jenis	Dukungan sebesar 12.33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 110.918.000,00	Rp. 190.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	7 Unit						
							03. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	5 Unit						
							04. Jasa Surat-menyurat	3 Jenis						
							05. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Jenis						
							06. Alat Tulis Kantor	34 Jenis						
							07. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis						
							08. Dokumen hasil penggandaan	50000 Lembar						
							09. Tabung pemadam kebakaran yang terisi	11 Tabung						
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 132.960.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 bulan	Dukungan sebesar 77,92% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 441.750.000,00	Rp. 950.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	12 bulan						
4.01.4.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 249.495.000,00	Rp. 425.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	3 Jenis	Dukungan sebesar 39,02% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 55.275.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	1 Jenis						
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMĐ	7 unit	Dukungan sebesar 14,63% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 141.500.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMĐ	5 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBM	12 bulan	Dukungan sebesar 7,31% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rp. 52.720.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 94.122.000,00	Rp. 100.223.574,00		
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Terukurnya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	100%	Rp. 6.200.000,00	Rp. 6.900.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 laporan	Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 4.380.000,00	Rp. 8.400.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan sebesar 88,61% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 76.980.000,00	Rp. 75.423.574,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA						
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	100%	Dukungan sebesar 4,38% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 6.562.000,00	Rp. 9.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA										Rp. 1.428.582.000,00	Rp. 1.305.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembanqn	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	01. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 laporan	Dukungan sebesar 33,18% terhadap Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Rp. 320.217.000,00	Rp. 745.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 laporan						
							03. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.01.22.002	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Indonesia	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	01. Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY	1 laporan	Dukungan sebesar 66,81% terhadap Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Direspon dengan Kebijakan	100%	Rp. 1.108.365.000,00	Rp. 560.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 naskah perjanjian						
							03. Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	5 rekomendasi						
							04. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 Surat Keputusan Bersama						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN, DAN KECAMATAN										Rp. 273.000.000,00	Rp. 782.332.000,00		
4.01.4.01.02.01.23.001	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	41.3%	01. Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	1 laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Desa Tertinggal yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	100%	Rp. 136.500.000,00	Rp. 586.749.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	1 laporan						
4.01.4.01.02.01.23.002	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	41.3%	01. Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	1 laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Desa Tertinggal yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	100%	Rp. 136.500.000,00	Rp. 195.583.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY	1 laporan						
4.01.4.01.02.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH										Rp. 256.575.000,00	Rp. 582.270.000,00		
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	OPD DIY, kab/kota, dan instansi vertikal	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	01. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	3 usulan draft/SK	Dukungan sebesar 32,37% terhadap Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan yang Direspon dengan Kebijakan	100%	Rp. 80.325.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 3.468.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020	1 laporan						
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	01. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen	Dukungan sebesar 67,62% terhadap Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Rp. 176.250.000,00	Rp. 382.270.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							02. Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	1 dokumen						
							03. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY	1 dokumen						
							04. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	1 laporan						
							05. Toponimi unsur warisan budaya	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum													
4.01.4.01.02.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 623.987.000,00	Rp. 546.515.026,00		
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	51 Jenis	Dukungan terhadap 33% terhadap capaian Admnsitrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 97.960.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Arsip Dokumen Hukum	2 Dokumen						
							03. Barang Cetakan	13 Jenis						
							04. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	2 Unit						
							05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	3 Unit						
							06. Komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis						
							07. Penggandaan	25.000 Lembar						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							08. Pengiriman Surat/Paket	12 bulan						
							09. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Jenis						
							10. Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian 1 jenis	12 bulan						
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 Bulan	Dukungan 33% terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 79.960.000,00	Rp. 87.956.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	Dukungan 34% terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 446.067.000,00	Rp. 298.559.026,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 Bulan						
4.01.4.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 217.765.000,00	Rp. 308.998.663,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan Kantor sesuai RKPBMMD	3 Jenis	Dukungan 33% terhadap capaian meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 87.500.000,00	Rp. 178.998.663,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan Kantor sesuai RKPBMMD	2 Jenis						
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang dipelihara sesuai RKPBMMD	2 Unit	Dukungan 33%terhadap capaian meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 56.590.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKPBMMD	3 Unit						
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Fumigasi Ruang Perpustakaan	360 m2 x 2 Kali	Dukungan 33% terhadap capaian meningkatnya sarana dan prasarana apatarur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 73.675.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	5 Jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMd	2 Jenis						
4.01.4.01.02.02.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 19.297.000,00	Rp. 49.885.765,00		
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai : LKJIP : A	Dukungan 25% terhadap capaian Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.588.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 25% terhadap capaian penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.918.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA 2022 dan Perubahan TA 2021	5 Dokumen	Dukungan 25% terhadap capaian penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.405.000,00	Rp. 30.885.765,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Forum Perencanaan OPD	1 BA						
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 25% terhadap capaian penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.386.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 860.025.000,00	Rp. 1.060.313.670,00		
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	01. Rancangan Keputusan Gubernur	50 Rancangan Keputusan Gubernur	Dukungan 50% terhadap capaian presentase rancangan produk hukum yang berkualitas	100%	Rp. 823.669.000,00	Rp. 910.313.670,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Rancangan Peraturan Daerah	6 Rancangan Peraturan Daerah						
							03. Rancangan Peraturan Gubernur	20 Rancangan Peraturan Gubernur						
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	01. Rekomendasi terhadap review produk hukum daerah	5 rekomendasi	Dukungan 50% terhadap capaiam persentase rancangan produk hukum yang berkualitas	100%	Rp. 36.356.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA										Rp. 379.775.000,00	Rp. 418.040.000,00		
4.01.4.01.02.02.16.001	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	01. Rekomendasi hasil konsultasi produk hukum dan rancangan produk hukum kabupaten/kota	35 Rekomendasi	Dukungan 50% terhadap capaian persentase kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	100%	Rp. 94.425.000,00	Rp. 112.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.16.002	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	01. Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	5 Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	Dukungan 50% terhadap pencapaian persentase kewenangan, substansi materi dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	100%	Rp. 285.350.000,00	Rp. 306.040.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Nomor Register	30 Nomor Register						
							03. Rekomendasi Fasilitasi	30 Rekomendasi Fasilitasi						
4.01.4.01.02.02.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 338.134.000,00	Rp. 155.328.732,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.17.001	Penyebarluasan Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	01. Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	1.100 Buku	Dukungan 50% terhadap capaian persentase produk hukum daerah yang terpublikasikan	100%	Rp. 231.460.000,00	Rp. 328.732,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan	1.100 Buku						
4.01.4.01.02.02.17.002	Digitalisasi Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	01. Produk hukum yang diunggah (diupload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 file	Dukungan 50% terhadap capaian produk hukum daerah yang terpublikasikan	100%	Rp. 106.674.000,00	Rp. 155.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 2.451.767.000,00	Rp. 1.515.693.600,00		
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	01. Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Dukungan 50% terhadap capaian persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 303.242.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							02. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur						
							03. Laporan RAN HAM	1 Dokumen						
4.01.4.01.02.02.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	01. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja LO DIY	1 Dokumen	dukungan 50% terhadap capaian Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 2.148.525.000,00	Rp. 915.693.600,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.890.750.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Laporan hasil penyelesaian penanganan kasus perdata, tata usaha negara dan pendampingan hukum 2021	1 Dokumen						
							03. Putusan permasalahan hukum litigasi	1 Dokumen						
							04. Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 Laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual													
4.01.4.01.02.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 472.550.000,00	Rp. 645.000.000,00		
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	38 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 105.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan	6 jenis						
							Barang Penggandaan	50000 lembar						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit						
							Buku Referensi/Peraturan Perundangan	7 jenis						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis						
							Sewa Tanaman Hias	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Surat Kabar dan majalah	1 tahun						
							Surat Keluar	5500 surat						
							Surat Masuk	2160 surat						
4.01.4.01.02.08.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Kinerja Caraka 1 orang	1 tahun	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 136.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Kinerja KPA 1 orang, PPTK 4 orang, PPK 1 orang dan Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
							Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
							Kinerja Pengemudi 1 orang	1 tahun						
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 236.550.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 332.500.000,00	Rp. 327.000.000,00		
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pengadaan Interior Gedung	1 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 210.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Pengadaan Mebeulair	1 jenis						
							Pengadaan Peralatan Komputer	4 jenis						
							Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 jenis						
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ terpelihara	2 unit	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 96.500.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ terpelihara	4 unit						
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMĐ Terpelihara	10 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 93.100.000,00	Rp. 93.800.000,00		
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2021	Skor A	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 4.600.000,00	Rp. 4.800.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 10.500.000,00	Rp. 11.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022	1 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 68.000.000,00	Rp. 68.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022	1 dokumen						
							Forum OPD	1 dokumen						
							Kinerja Petugas Perencana 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2021	1 dokumen						
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN										Rp. 19.552.000.000,00	Rp. 44.250.000.000,00		
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2dokumen	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kehidupan Beragama	1 dokumen	Dukungan terhadap rumusan bahan kebijakan pengelolaan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4lembaga								
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2dokumen	Penyelenggaraan Pesparawi Tingkat Daerah	12 Kategori Perlombaan	Dukungan 25% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 475.000.000,00	Rp. 31.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4lembaga								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2dokumen	Hari Besar Keagamaan 5 Agama	8 kali	Dukungan 75% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 19.027.000.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4lembaga	Hibah kepada BAZNAS DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada Kevikepan DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada PGI DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada PHDI DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada PW Muhammadiyah DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada PW NU DIY	1 lembaga						
							Hibah kepada Walubi DIY	1 lembaga						
							Hibah untuk tempat ibadah	510 tempat ibadah						
							Pengelola Informasi Pembinaan Mental Rohani	1 orang						
							Pengiriman TPHD	Sesuai Ketentuan						
							Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI	12 kali						
							Petugas Pengelola Data Hibah Keagamaan	5 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 475.000.000,00	Rp. 800.000.000,00		
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	Kajian Kebijakan Optimalisasi Germas dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat menghadapi Wabah/Pandemi	1 dokumen	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Kegiatan Posbindu PTM Satriya	6 Layanan						
							Laporan Kegiatan Germas DIY	1 dokumen						
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	4 dokumen						
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	2 dokumen						
4.01.4.01.02.08.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	3 dokumen	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	3 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyusunan Kajian Kebijakan Kesiapan Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Pemulihan Pasca COVID-19	1 dokumen						
4.01.4.01.02.08.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp. 350.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
4.01.4.01.02.08.50.001	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Budaya	1 dokumen	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Reaktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya, Adat-Istiadat, Bahasa, Seni dan Tradisi Luhur	1 dokumen						
							Laporan Penyusunan Strategi Pemajuan, Pengelolaan dan Pengembangan Museum di DIY	1 dokumen						
							Laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan Bencana	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 21.275.150.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.50.002	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2dokumen	Kajian Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana	1 dokumen	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Pembinaan Prestasi Olahraga	1 dokumen						
							Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari instansi lingkungan Pemerintah Daerah DIY	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam													
4.01.4.01.02.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 471.540.450,00	Rp. 506.042.000,00		
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 84.528.000,00	Rp. 84.528.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	2 jenis						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit						
							Buku ekonomi dan keuangan	5 buku						
							Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku						
							Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis						
							Majalah	1 jenis 12 bulan						
							Penggandaan	80000 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peralatan Kebersihan Kantor	15 jenis						
							Surat Kabar	4 jenis						
							Surat Keluar	1000 surat						
							Surat Masuk	3000 surat						
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 42.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengadministrasi kepegawaian	12 bulan						
							Bukti pembayaran honorarium Pengelola Barang	12 bulan						
							Bukti pembayaran honorarium Perencana program dan Kegiatan	12 bulan						
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Hidangan rapat koordinasi	150 os	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 345.012.450,00	Rp. 379.514.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan						
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan						
							Makanan dan minuman rapat	1000 os						
4.01.4.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 192.065.000,00	Rp. 192.065.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Komputer PC	1 unit	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 84.500.000,00	Rp. 84.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Laptop	1 unit						
							LCD Viewer	1 unit						
							Scanner F4	3 unit						
							Vertical Blind	75 m2						
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpelihara	4 unit	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 89.815.000,00	Rp. 89.815.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit						
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.750.000,00	Rp. 17.750.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 94.961.000,00	Rp. 94.961.000,00		
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2021	Nilai LAKIP : A dengan nilai 80,00	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.860.000,00	Rp. 1.860.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 15 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.984.000,00	Rp. 3.984.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 85.213.000,00	Rp. 85.213.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Pengembangan Website	1 paket						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen						
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.904.000,00	Rp. 3.904.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 856.240.000,00	Rp. 900.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 516.803.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen						
							Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pendukung Pengendalian Inflasi	1 Aplikasi						
4.01.4.01.02.03.34.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Laporan Kinerja KUR	1 dokumen	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitasperekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 339.437.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Roadmap Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui Optimalisasi Sumber Daya Desa	1 dokumen						
4.01.4.01.02.03.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 1.150.035.000,00	Rp. 1.182.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rumusan Kebijakan Rekrayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Kajian Pemulihan Sektor Perekonomian Terdampak Covid19	1 dokumen	Dukungan sebesar 30% terhadap Rumusan Kebijakan Rekrayasa Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	100%	Rp. 1.150.035.000,00	Rp. 1.182.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1 dokumen						
							Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	1 dokumen						
4.01.4.01.02.03.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN										Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.39.001	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.464.841.450,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.39.002	Penyusunan Kebijakan Green Economic	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Hijau di DIY	1 Dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan													
4.01.4.01.02.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 652.015.000,00	Rp. 869.782.000,00		
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar	2500 surat	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 87.797.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk	2500 surat						
							3.Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Tersedianya Alat Tulis Kantor : 1. Amplop panjang 2. Toner HP 3. Kertas HVS Kuarto 70 gr 4. Kertas HVS Folio 70 gr 5. Kertas HVS Kuarto 80 gr 6. Kertas HVS Folio 80 gr 7. Tinta Ink Refill Black Botol 8. Tinta Ink Refill Color Botol 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Faksimili 13. Lem Kental Besar 14. Kertas Casing 15. Binder tipe 560 16. Binder tipe 260 17. Paperclips 18. Pulpen 19. Boks Arsip 20. Hechneices Max 24/6 21. Isi Balpoin 22. Batere Kecil 23. Batere Sedang 24. Buku Batik 1/2 Folio 25. Refill Catridge 85 A 26. Refill Catridge 35 A 27. Refill Catridge 12 A	27 jenis						
							5. Tersedianya Barang Cetakan 1. Amplop persegi putih 2. Amplop coklat berkop 3. Amplop coklat berkop (34x25 cm) 4. Amplop coklat berkop (46x35 cm) 5. Buku Tanda Bukti Pengeluaran (Bend 26) 6. Stopmap Berkop 7. Snelhecter berkop 8. Lembar Daftar Pengendali 9. Kartu Lembar Disposisi 10. Kartu Kendali Keluar	10 jenis						
							6. Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi	42016 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1. LED A60 10/13 W 2. LED A60 7W 3. Rol Kabel 15 meter 4. Terminal Kuningan 4LB 5. Kabel Listrik	5 jenis						
							8. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 1. Baygon Spray 2. Kapur Barus 3. Kaset Karpet 4. Kit Black Magic 5. Pewangi Kamar Mandi Kamper Toilet 6. Pewangi Ruangan 7. Sikat WC 8. Sikat Kamar Mandi 9. Tissue Basah Besar 10. Tissue Toilet 11. Tissue 12. Sapu 13. Sabun cuci piring 14. Sabun cair botol pump	14 jenis						
							9. Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun	3 jenis						
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian	12 bulan, 13 orang	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 44.400.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	1 tahun, 25 orang x 65 kali	Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 519.818.000,00	Rp. 574.782.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun - Eselon III/Golongan IV, 5 kali - Eselon IV, 6 kali - Golongan III, 22 kali						
							3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun - Eselon II, 1 orang 13 kali - Eselon III/Golongan IV, 12 kali - Eselon IV, 11 kali - Golongan III, 17 kali						
							4. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun - Eselon II, 1 orang 3 kali - Eselon III/Golongan IV, 4 kali - Eselon IV, 1 kali - Golongan III, 1 kali						
4.01.4.01.02.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 171.155.000,00	Rp. 368.451.530,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. PC 2. Printer Scanner F4 3. Lemari Arsip 4. Filling Kabinet	4 jenis	Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 34.520.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebsar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 112.820.000,00	Rp. 133.451.530,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1. Pemeliharaan Standing AC 2. Pemeliharaan AC 3. Pengisian Freon	3 jenis	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 23.815.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1. Komputer 2. Mainboard PC 3. Mainboard Notebook 4. Laptop/Notebook 5. Printer 6. Harddisk 7. Mesin ketik 8. LCD Proyektor 9. Perawatan CCTV 10. UPS/Stabilizer 11. Kamera 12. Battery Laptop	12 jenis						
4.01.4.01.02.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 52.451.000,00	Rp. 205.031.250,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Tersusunnya LKJIP	1 laporan	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.607.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD	1 laporan						
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	12 bulan	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.637.000,00	Rp. 19.215.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Tersedianya Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
							Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited	1 laporan						
							Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
							Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan						
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersusunnya Renja Biro PIWP2	1 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 24.525.000,00	Rp. 150.758.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tersusunnya RKA dan DPA	1 dokumen						
							Tersusunnya RKA-P dan DPA-P	1 dokumen						
							Tersusunnya ROPK	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD	100%	Rp. 9.289.000,00	Rp. 25.451.250,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 536.380.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	1. Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	12 bulan	Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 347.840.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 Lap Triwulan dan 1 Lap Tahunan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	1. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2 kali	Dukungan 20% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 44.678.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Rakor UKPBJ	1 kali						
							3. Terlaksananya pelayanan konsultasi PBJ dan Advokasi	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.28.003	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	Pengembangan Website UKPBJ	1 paket	Dukungan 30% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 143.862.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pemblayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 368.592.500,00	Rp. 800.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	80%	1. Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang - Gading DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 80 %	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 575.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	80%	Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 80 %	100%	Rp. 168.592.500,00	Rp. 225.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 370.252.000,00	Rp. 700.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan	3. Penguatan Infrastruktur	1.1.5. Menurunnya	Badan Kepegawaian	Persentase Rumusan	71%	Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap	100%	Rp. 219.500.000,00	Rp. 475.000.000,00	Biro Pengembangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan					Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan														
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	71%	Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 80 %	100%	Rp. 150.752.000,00	Rp. 225.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 339.622.000,00	Rp. 1.036.800.000,00		
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 173.449.500,00	Rp. 700.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 2.490.467.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.32.002	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	3. Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen Laporan Fasilitas KPBU	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Rp. 166.172.500,00	Rp. 336.800.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi													
4.01.4.01.02.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 598.969.000,00	Rp. 640.931.027,00		
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat tulis kantor	31 jenis	Dukungan sebesar 10,44% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 66.517.000,00	Rp. 100.931.027,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Barang cetakan	6 jenis						
							03. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	3 unit						
							04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	5 unit						
							05. Bukti pembayaran pengiriman dokumen	1 paket						
							06. Bukti pembayaran sewa tanaman hias	5 buah 12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Dokumen hasil penggandaan	22.800 lembar						
							08. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis						
							09. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13 jenis						
							10. Surat kabar harian	1 jenis 12 bulan						
							11. Tabung pemadam kebakaran yang terisi	2 tabung						
							12. Bukti pembayaran langganan aplikasi rapat dalam jaringan	1 akun 10 bulan						
4.01.4.01.02.05.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 13,64% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	Rp. 86.940.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan terhadap 75,92% administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 445.512.000,00	Rp. 390.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 265.476.000,00	Rp. 159.801.849,00		
4.01.4.01.02.05.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	7 jenis	Dukungan 27,55% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 112.936.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMD	3 unit	Dukungan terhadap 27,42% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 97.480.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMD	5 unit						
							03. Spet/Pengecatan Kendaraan Operasional Roda 4	5 unit						
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMD	8 jenis	Dukungan terhadap 15,49% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 55.060.000,00	Rp. 44.801.849,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 62.510.000,00	Rp. 128.378.129,00		
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP : A	Dukungan 5,40% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.375.000,00	Rp. 9.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran, tepat waktu dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 10,81% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.760.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan 76,11% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 47.575.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA						
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 7,68% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 16.378.129,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI										Rp. 312.582.000,00	Rp. 725.036.000,00		
4.01.4.01.02.05.19.001	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	78%	01. Dokumen Reviu Road Map Reformasi Birokrasi	1 (satu) dokumen	Dukungan 87,91% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%	Rp. 229.743.000,00	Rp. 525.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	1 (satu) laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.05.19.002	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	78%	01. Dokumen LKjIP dan PK	37 dokumen	Dukungan 12,09% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%	Rp. 82.839.000,00	Rp. 200.036.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Berita Acara serah terima LKjIP dan PK	1 BA						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.05.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI										Rp. 923.763.000,00	Rp. 1.408.420.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	01. Aplikasi E SHBJ/SB yang terpelihara	1 aplikasi	Dukungan 55,12% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 509.144.000,00	Rp. 288.420.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
				Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat			02. Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub						
				Biro Hukum Biro Organisasi			03. Rapergub SB	1 Rapergub						
				Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas			04. Rapergub SHBJ	1 Rapergub						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.05.21.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	01. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	15 inovasi	Dukungan 44,88% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 414.619.000,00	Rp. 1.120.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							02. Jumlah Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi						
							03. Rekomendasi hasil Monev Survei Kepuasan Masyarakat:	95 unit pelayanan publik						
							04. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.163.300.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol													
4.01.4.01.02.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.372.121.000,00	Rp. 8.985.450.000,00		
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat tulis kantor	60 jenis	Dukungan 45% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 5.248.715.000,00	Rp. 5.700.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	29 unit						
							03. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 3	1 unit						
							04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	41 unit						
							05. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 6	2 unit						
							06. Bukti pembayaran rekening air, telepon dan listrik	12 bulan						
							07. Cetak kalender	4 jenis						
							08. Cetakan Umum	27 jenis						
							09. Keamanan kantor terjaga dengan baik	12 bulan						
							10. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	12 bulan						
							11. Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis						
							12. Pembayaran KIR kendaraan dinas / operasional	3 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13. Penggandaan	77.500 lembar						
							14. Pengiriman dokumen	12 bulan						
							15. Surat kabar harian 3 jenis	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 20% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.870.000,00	Rp. 80.450.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 35% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.047.536.000,00	Rp. 3.205.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	160 orang				
							03. Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	12 bulan						
							04. Pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.657.150.000,00	Rp. 4.200.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan sesuai RKBMD	9 jenis	Dukungan 25% terhadap pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 189.615.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan sesuai RKBMD	1 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan	Dukungan 25% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.457.060.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Gedung bersejarah yang dipelihara sesuai RKPBU	12 bulan						
							03. Gedung tempat kerja yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan						
							04. Pagar Kapatihan yang terpelihara	3.266 m2						
							05. Rumah dinas jabatan yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan						
							06. Taman Komplek Kapatihan yang terpelihara	9.750 m2						
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Biaya retribusi parkir	12 bulan	Dukungan 25% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Kelengkapan kendaraan	21 jenis						
							03. Kendaraan dinas / operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	29 unit						
							04. Kendaraan dinas/ operasional roda 3 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	1 unit						
							05. Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	40 unit						
							06. Kendaraan dinas/ operasional roda 6 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	2 unit						
							07. Kendaraan tidak bermotor (sepeda roda dua)	10 unit						
							08. Pengecatan kendaraan	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. BBM untuk operasional genset	1 tahun	Dukungan 25% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 210.475.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor	53 m3						
							03. Pemeliharaan instalasi air minum/bersih	533 m3						
							04. Pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan						
							05. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBMĐ	11 jenis						
							06. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBMĐ	10 jenis						
4.01.4.01.02.06.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 137.790.000,00	Rp. 35.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP A	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pentausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran, dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mednukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.100.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	6 dokumen	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 120.970.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Forum Perencanaan OPD	1 BA						
							03. Update system	1 aplikasi						
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.720.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHANGGAAN										Rp. 1.350.008.000,00	Rp. 3.285.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	84skor	01. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dan indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.255.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.25.002	Penyediaan sarana dan prasarana kerumahtanggaan pimpinan dan tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	84skor	01. Alat-alat / perlengkapan	21 jenis	Dukungan 30% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 95.008.000,00	Rp. 285.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Bukti pembayaran pengisian tabung gas 12 kg	60 kali						
							03. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis						
							04. Pengisian tabung pemadam kebakaran	30 buah						
4.01.4.01.02.06.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.136.600.000,00	Rp. 3.750.500.000,00		
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	84skor	01. Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub., Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 40% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 441.600.000,00	Rp. 1.550.500.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	84skor	01. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	12 upacara	Dukungan 60% terhadap skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.695.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	36 kali						
4.01.4.01.02.06.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 880.480.000,00	Rp. 2.533.470.000,00		
4.01.4.01.02.06.27.001	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	295214pengunjung	01. Buku foto KDH & WKDH	6 buah	Dukungan 60% terhadap peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 583.970.000,00	Rp. 1.533.470.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.534.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Buku kerja	700 eksemplar						
							03. Informasi yang tersebarluaskan melalui 4 jenis media	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.27.002	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	295214pengunjung	01. Laporan Analisis Media Management (IMM)	48 laporan	Dukungan 40% terhadap tercapainya peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 296.510.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							02. Laporan kegiatan Forum Literasi Medsos bagi ASN	2 laporan						
							03. Laporan kegiatan kemitraan Pemda DIY dgn Media Massa	1 laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 4.988.572.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													
1.13.4.01.02.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 435.600.600,00	Rp. 730.000.000,00		
1.13.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Surat Masuk	2160 surat	Dukungan 21,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 42.573.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Surat keluar	3000 surat						
							3. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit						
							4. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	2 unit						
							5. Alat Tulis Kantor	43 jenis						
							6. Barang Cetakan	7 jenis						
							7. Barang Penggandaan	15000 lembar						
							8. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis						
							9. Surat Kabar	2 jenis						
1.13.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Honor Pengelola Keuangan dan pengelolaan barang 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Dukungan 12,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 43.116.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. honor Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 4.988.572.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Makanan dan Minuman Sidang	12 bulan	Dukungan 65,87% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 349.911.600,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan						
							3. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan						
1.13.4.01.02.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 172.845.000,00	Rp. 373.000.000,00		
1.13.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Almari	3 unit	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 91.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Filling Cabinet	2 unit						
							3. Komputer PC	5 unit						
							4. Printer	3 unit						
							5. Scanner	1 unit						
1.13.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ terpelihara	4 unit	Dukungan 12,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelncaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 67.365.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Kendaraan dinas/opersional roda 2 sesuai RKPMD terpelihara	2 unit						
1.13.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMĐ Terpelihara : 5 jenis	5 Jenis	Dukungan 49,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.480.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
1.13.4.01.02.07.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 45.294.000,00	Rp. 63.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 4.988.572.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU)	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.720.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
1.13.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program dan 16 kegiatan	100%	Dukungan 12,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.606.000,00	Rp. 9.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
1.13.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Dokumen Renja 2021	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 31.233.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. DPA 2021	1 dokumen						
							3. ROPK 2020	1 dokumen						
1.13.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.735.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
1.13.4.01.02.07.17	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 726.260.000,00	Rp. 1.350.000.000,00		
1.13.4.01.02.07.17.004	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4buah	1. Kajian Bidang Sosial	2 Dokumen	1. Rumusan kebijakan Bidang sosial yang tersusun	2 Dokumen	Rp. 456.475.000,00	Rp. 700.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Korsi Bidang PM, Bidang Sosial	2 Laporan	2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Bidang PM, Bidang Sosial	2 Laporan				
							3. Monev Bidang Sosial	1 Laporan	3. Monev Bidang Sosial yang terlaksana	1 Laporan				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 4.988.572.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.4.01.02.07.17.005	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4buah	1. Kebijakan Bidang PP-PA	1 Dokumen	1. Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang PP-PA	1 Dokumen	Rp. 269.785.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Kebijakan Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	2. Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Dokumen				
							3. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PP-PA	1 Laporan	3. Terkoordinasinya kegiatan Bidang PP-PA	1 Laporan				
							4. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Laporan	4. Terkoordinasinya kegiatan Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Laporan				
							5. Pemantauan dan Evaluasi Bidang PP-PA	1 Laporan	5.Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Bidang PP-PA	1 Laporan				
							6. Pemantauan dan Evaluasi Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Laporan	6. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	1 Laporan				
1.13.4.01.02.07.18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 3.408.573.000,00	Rp. 6.900.000.000,00		
1.13.4.01.02.07.18.002	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	1. Bantuan kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 Desa/Kelurahan/Kalurahan	1.TMMD 15 Desa/Kelurahan/Kalurahan	15 Desa/Kelurahan/Kalurahan	Rp. 2.210.680.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Bantuan Kelembagaan TP PKK DIY	1 Lembaga	2. TP PKK 1 Lembaga	1 Lembaga				
							3. Penguatan LPMD/LPMK	1 Lembaga	3. LPMD/ LPMK	1 Lembaga				
							4. Penguatan TP PKK	1 Lembaga	4. TP PKK DIY	1 Lembaga				
							5. Perumusan bahan kebijakan	1 dokumen						
1.13.4.01.02.07.18.003	Pembinaan pengelola lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	1. Penguatan Pokjanal Posyandu	1 Lembaga	Dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	4 lembaga	Rp. 1.197.893.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat											Jumlah Pagu : Rp. 4.988.572.600,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Meningkatkan pengelolaan Lembaga BUMDes	10 BUMDes						
							3. Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa dan Kelurahan	6 Desa/Kelurahan						
							4. Perumusan Bahan Kebijakan	1 dokumen						
1.13.4.01.02.07.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 200.000.000,00	Rp. 350.000.000,00		
1.13.4.01.02.07.19.001	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Danurejan Gedongtengen Gondomanan Jetis Kraton Mantrijeron Ngampilan Umbulharjo	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	8Desa/Kelurahan	1. Implementasi gotong royong model segoro amarto	8 kelurahan	Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model segoro amarto	8 kelurahan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							2. Perumusan Bahan Kebijakan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah													
4.01.4.01.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 966.699.000,00	Rp. 1.948.975.000,00		
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	43 jenis	Dukungan 56,96% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 570.627.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							02. Barang cetakan	10 jenis						
							03. Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan						
							04. Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan						
							05. Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan						
							06. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Bukti pembayaran pengisian tabung gas	6 kali						
							08. Bukti pembayaran retribusi kebersihan kantor	12 bulan						
							09. Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan						
							10. Bukti Pengiriman	12 bulan						
							11. Gedung kantor seluas 7.292,5 m2 yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							12. Jumlah materi yang digandakan	80.000 lembar						
							13. Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor	8 jenis						
							14. Surat kabar 2 jenis	12 bulan						
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 5,82% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 59.820.000,00	Rp. 548.975.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 37,22% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 336.252.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
4.01.4.01.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 312.209.000,00	Rp. 635.210.000,00		
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	1 jenis	Dukungan 3,12% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 288.210.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	3 unit	Dukungan 24,77% terhada persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 198.419.000,00	Rp. 82.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	2 unit	Dukungan 8,82% terhada persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 80.670.000,00	Rp. 235.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	9 unit						
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	3 jenis	Dukungan 2.02% terhada persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 8.120.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	6 jenis						
4.01.4.01.04.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 18.160.000,00	Rp. 67.500.000,00		
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 20,10% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 3.650.000,00	Rp. 3.650.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 30,07% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 5.460.000,00	Rp. 7.800.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan 34,42% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 6.250.000,00	Rp. 52.550.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan hasil Forum OPD	1 Berita Acara						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 15,41% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 2.800.000,00	Rp. 3.500.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 290.771.000,00	Rp. 568.450.000,00		
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	87%	Indeks tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	87 angka indeks	Dukungan 39,08% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Bdan Penghubung Daerah	100%	Rp. 121.971.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.43.004	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	87%	FGD bersama dengan BANHUBDA se Indonesia dan masyarakat DIY di Jakarta	2 kali	Dukungan 60,92% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	100%	Rp. 168.800.000,00	Rp. 118.450.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Halal Bihalal Masyarakat Yogyakarta di Jakarta dengan Gubernur DIY	1 kali						
							Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA										Rp. 823.134.000,00	Rp. 1.150.000.000,00		
4.01.4.01.04.00.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta dan Tangerang	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	87(angka indeks)	Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair, Pekan Raya Indonesia dan Pameran Diaspora	87 angka indeks	Dukungan 96,56% terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	100%	Rp. 805.334.000,00	Rp. 1.080.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	88(angka indeks)								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 2.410.973.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	87(angka indeks)	Indeks ketertarikan sampel audience promosi seni dan budaya daerah terhadap Yogyakarta	88 angka indeks	Dukungan 3,44% terhadap peningkatan promosi potensi dan seni budaya daerah	100%	Rp. 17.800.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	88(angka indeks)								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.02	SEKRETARIAT DPRD													
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD													
4.02.4.01.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.914.898.000,00	Rp. 8.852.582.200,00		
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional sebanyak 33 unit yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	47,13 %	Rp. 3.616.615.000,00	Rp. 3.978.276.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Alat Tulis Kantor	17 jenis						
							03. Barang cetakan	15 jenis						
							04. Bukti pembayaran GCU pimpinan dan anggota DPRD	1 Tahun						
							05. Bukti pembayaran rekening air 1 sat sambungan sebanyak 300m3 yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
							06. Bukti pembayaran rekening listrik 2 sat sambungan 375 Kwh (197.500 VA & 147.000 VA) yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Bukti pembayaran rekening telepon sebanyak 6 sambungan yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
							08. Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
							09. Bukti pembayaran SMS gateway untuk 1 nomor telephone yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
							10. Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							11. Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu	12 paket						
							12. Jumlah materi yang digandakan	5 jenis						
							13. Keamanan kantor terjaga dengan baik	12 bulan						
							14. Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	7 jenis						
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	8,16 %	Rp. 626.560.000,00	Rp. 689.216.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	44,71 %	Rp. 2.671.723.000,00	Rp. 4.185.089.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
4.02.4.01.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.312.768.000,00	Rp. 1.201.824.800,00		
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Peralatan kantor sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	2,17 %	Rp. 24.200.000,00	Rp. 26.620.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	6750 m2	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	17,75 %	Rp. 395.200.000,00	Rp. 192.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	12 unit	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	54,60 %	Rp. 609.147.000,00	Rp. 670.061.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	21 unit						
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	2 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPĐ	25,48 %	Rp. 284.221.000,00	Rp. 312.643.100,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	5 jenis						
4.02.4.01.06.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 160.273.000,00	Rp. 176.300.300,00		
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPĐ	10,99 %	Rp. 17.622.000,00	Rp. 19.384.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPĐ	26,58 %	Rp. 42.593.000,00	Rp. 46.852.300,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	39,96 %	Rp. 64.041.000,00	Rp. 70.445.100,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Laporan Hasil Forum OPD	1 Berita Acara						
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	22,47 %	Rp. 36.017.000,00	Rp. 39.618.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.4.01.06.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										Rp. 10.816.757.000,00	Rp. 30.407.889.050,00		
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	Dukungan terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	15%	Rp. 1.010.648.000,00	Rp. 1.869.080.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.15.002	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	01. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	3 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	40%	Rp. 6.555.485.000,00	Rp. 24.505.514.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kerja DPRD	1 dokumen						
							03. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kerja komisi	4 dokumen						
							04. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kunker ke LN	1 dokumen						
							05. Program Kerja DPRD	2 Keputusan DPRD						
							06. Rancangan poduk hukum yang dibahas2	8 Bahan Acara						
4.02.4.01.06.00.15.003	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	01. Pandangan Umum Fraksi	69 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	15%	Rp. 2.302.157.000,00	Rp. 2.532.372.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Pendapat Akhir Fraksi	69 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Surat Rekomendasi Fraksi	56 dokumen						
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	01. Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Dukungan terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	30%	Rp. 948.467.000,00	Rp. 1.500.921.950,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Nota kesepakatan bersama KUA - PPAS 2022	1 Bahan Acara						
							03. Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2021	1 Bahan Acara						
							04. Persetujuan bersama Raperda APBD 2022	1 Bahan Acara						
							05. Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan 2021	1 Bahan Acara						
							06. Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020	1 Bahan Acara						
4.02.4.01.06.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 5.283.402.000,00	Rp. 8.056.846.160,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.16.001	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	01. Draft Raperda/Raperdais Inisiatif (4 NA, 4 draft raperda inisiatif), dan Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	10 draft	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	60%	Rp. 628.630.000,00	Rp. 2.282.775.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Konsep Raperwan, Konsep Rakepwan, Konsep Rakeppim, Konsep Rakep BK	148 dokumen						
4.02.4.01.06.00.16.002	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	01. Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	2 Kajian	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	20%	Rp. 2.220.552.000,00	Rp. 3.129.447.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	2 dokumen						
4.02.4.01.06.00.16.003	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	01. Peraturan perundangan sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah yang disosialisasikan	6 peraturan perundang-undangan	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	20%	Rp. 2.434.220.000,00	Rp. 2.644.623.960,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Perda yang disosialisasikan	4 Perda						
4.02.4.01.06.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 9.893.088.000,00	Rp. 14.293.165.700,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.01.06.00.18.001	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	87%	01. Kemitraan Wartawan	4 laporan	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	30%	Rp. 2.766.627.000,00	Rp. 3.785.560.350,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten						
4.02.4.01.06.00.18.002	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	87%	01. Audiensi/Dengar pendapat DPRD dengan masyarakat	22 laporan	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	30%	Rp. 3.410.582.000,00	Rp. 4.689.541.450,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							02. Forum diskusi dan seminar kaukus parlemen perempuan	4 laporan						
							03. Reses DPRD (3 kali)	3 laporan						
							04. Sarasehan dan Gathering	24 laporan						
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	87%	01. Pelayanan keprotokolan kepada pimpinan DPRD	15 laporan	Dukungan terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	30%	Rp. 3.696.400.000,00	Rp. 5.136.637.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 34.381.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Penyediaan pakaian sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	305 stel						
							03. Rapur DPRD yang terselenggara	6 kali						
							04. Tingkat kepuasan tamu DPRD yang terlayani	70%						
4.02.4.01.06.00.18.004	Pengelolaan Data dan TI	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	87%	Layanan Data PPID	3 jenis	Dukungan capaian Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran	10%	Rp. 19.479.000,00	Rp. 681.426.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.03	INSPEKTORAT													
4.03.4.01.07.00	Inspektorat													
4.03.4.01.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.384.060.000,00	Rp. 1.830.328.430,00		
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Pembelian Materai	320 lembar	Dukungan 33.84% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 250.964.000,00	Rp. 430.710.911,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Alat tulis kantor	21 jenis						
							03. Barang cetakan	7 jenis						
							04. Bukti pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit						
							05. Bukti pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit						
							06. Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							08. Jumlah materi yang digandakan	71.360 lembar						
							09. Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis						
							10. Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah						
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 18.19% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 666.574.000,00	Rp. 449.617.519,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 47.96% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 466.522.000,00	Rp. 950.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
4.03.4.01.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 19.879.534.000,00	Rp. 5.336.980.047,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Gedung tempat kerja	100%	Dukungan 63,92% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 19.489.982.000,00	Rp. 1.077.290.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Data dukung pembangunan gedung tempat kerja	100%						
4.03.4.01.07.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Alat studio sesuai RKBMD	1Jenis	Dukungan 38,96% terhadap tercapainya meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.474.000,00	Rp. 3.823.940.047,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKBMD	4 Unit	Dukungan 8,84% terhadap terwujudnya meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 319.328.000,00	Rp. 350.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan Dinas / operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKBMD	13 Unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	7 Jenis	Dukungan 2.21% terhadap terwujudnya meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 59.750.000,00	Rp. 85.750.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	2 Jenis						
4.03.4.01.07.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 352.491.000,00	Rp. 523.889.000,00		
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	01. Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui bimtek	6 angkatan @75 orang	Dukungan 98.20% terhadap terwujudnya meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 335.139.000,00	Rp. 506.017.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	15 orang						
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	01. Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun	75 orang	Dukungan 5,50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.352.000,00	Rp. 17.872.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Jumlah karya tulis Pejabat Fungsional Tertentu dalam 1 tahun	4 karya tulis						
4.03.4.01.07.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 183.630.000,00	Rp. 262.221.226,00		
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP A	Dukungan 1.23% terhadap terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.558.000,00	Rp. 5.242.675,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	15 dokumen	Dukungan 2.34% terhadap terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.336.000,00	Rp. 59.880.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	6 Dokumen Perencanaan	Dukungan 94,34% terhadap terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 169.776.000,00	Rp. 186.753.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							02. Laporan hasil Forum OPD	1 Berita Acara						
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 2.08% terhadap terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.960.000,00	Rp. 10.345.551,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.4.01.07.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN										Rp. 6.479.769.000,00	Rp. 8.012.017.340,00		
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	01. Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	1 LHE	Dukungan 74,06% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian setara sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 5.162.056.000,00	Rp. 5.885.914.340,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%	02. Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	37 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%	03. Laporan Evaluasi SAKIP OPD	37 LHE						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	04. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP						
							05. Laporan hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD	37 Laporan						
							06. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan						
							07. Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY	1 Laporan						
							08. Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum pengantaran RAPBD TA 2022	37 Laporan						
							09. Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	1 Laporan						
							10. Laporan Telaah Sejawat Kabupaten / Kota	1 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Telaah Sejawat Antar Inspektorat Propinsi	1 Laporan						
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	01. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT 2022	1 SK Gubernur	Dukungan 12.08% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 434.084.000,00	Rp. 957.582.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%	02. Laporan hasil pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2020	1 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%	03. Laporan hasil monev Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	04. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan						
							05. Laporan hasil Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
							06. Laporan Survey Penilaian Integritas	1 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan						
4.03.4.01.07.00.16.003	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Dukungan 2.32% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 50.244.000,00	Rp. 184.654.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%								
4.03.4.01.07.00.16.004	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	01. Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 Laporan	Dukungan 1.43% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 63.911.000,00	Rp. 113.495.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%	02. Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan	2 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%								
4.03.4.01.07.00.16.005	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi temuan hasil pengawasan	2 Laporan	Dukungan 0.38% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 15.246.000,00	Rp. 33.894.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 28.279.484.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.16.006	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	88%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	90 LHP	Dukungan 9.72% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	Rp. 754.228.000,00	Rp. 836.478.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	88%								
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 697.586.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan													
4.01.4.01.02.09.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 315.981.000,00	Rp. 380.000.000,00		
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan 18,46% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 60.300.000,00	Rp. 70.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							02. Barang cetakan	16 jenis						
							03. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit						
							04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit						
							05. Buku/Kepustakaan	1 tahun						
							06. Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	1 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 697.586.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07.Bukti Pembayaran Langganan Majalah 2 jenis	12 bulan						
							08. Penggandaan	20000 lembar						
							09. Peralatan Rumah Tangga	4 jenis						
							10. Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian 2 Jenis	12 bulan						
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 16,10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 52.600.000,00	Rp. 60.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 65,44% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 203.081.000,00	Rp. 250.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
4.01.4.01.02.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 360.305.000,00	Rp. 568.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 697.586.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	5 jenis	Dukungan 58,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 188.445.000,00	Rp. 350.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda dua yang dipelihara sesuai RKPBMMD	7 unit	Dukungan 38,67% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 158.660.000,00	Rp. 200.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara sesuai RKPBMMD	9 unit						
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	3 jenis	Dukungan 3,22% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 13.200.000,00	Rp. 18.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 21.300.000,00	Rp. 24.500.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 697.586.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 22,54% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 5.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	12 dokumen	Dukungan 19,25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 4.100.000,00	Rp. 5.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.09.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	2 dokumen	Dukungan 25,82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							02. Forum Perencanaan OPD	1 Berita Acara						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 697.586.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 32,39% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 6.900.000,00	Rp. 7.500.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	STATISTIK													
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
1.20.4.02.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 447.662.000,00	Rp. 2.117.500.000,00		
1.20.4.02.01.00.16.001	Penyediaan Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	1. Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen Analisis ICOR DIY	Dukungan 100% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%	100%	Rp. 246.012.000,00	Rp. 1.336.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	71%	2. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY						
							3. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik						
							4. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.4.02.01.00.16.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	1. Update Aplikasi Jogjadataku	1 aplikasi 1 dokumen	Dukungan 100% terhadap persentase tingkat kepuasan pelanggan sebesar 70%	100%	Rp. 201.650.000,00	Rp. 781.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	71%	2. Fasilitasi Satu Data Indonesia : a. Bimtek Proyeksi Data b. Dokumen Proyeksi Data	2 kali 1 dokumen						
							3. Pengumpulan dan penyajian data statistik	1 paket konten data jogja dataku						
							4. Pengumpulan dan penyajian data spasial	1 paket konten data geospasial						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.04	PERENCANAAN													
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
4.04.4.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.642.505.000,00	Rp. 3.195.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.Surat kabar	6 jenis	Dukungan 20,01% terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 445.610.000,00	Rp. 625.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							10.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Barang cetakan	24 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Penggandaan surat- surat/dokumen lainnya	99.636 lbr						
							12.Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan, 10 line						
							13.Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: Pembersihan kantor BAPPEDA DIY dan BPPSD DIY	12 bulan, bangunan gedung 3,711 m2, halaman 350 m2, taman 100 m2						
							14.Penyediaan Alat Tulis Kantor: Alat tulis kantor	122 jenis						
							15.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 jenis						
							16.Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	36 jenis						
							2.Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat keluar	5500 surat						
							3.Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat masuk	6.000 surat						
							4.Penyediaan Jasa surat menyurat : Pengiriman dokumen	120 kali						
							5.Penyediaan Jasa surat menyurat : benda pos (materai)	1.800 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6.Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : Penataan Arsip	175 boks						
							7.Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks						
							8.Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	3 unit						
							9.Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit						
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Dukungan 2,45 % terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 207.495.000,00	Rp. 98.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya penyusunan program anggaran dan pelaporan	12 bulan, 3 orang						
							3. Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan, 15 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan, 3 orang						
							5. Terlaksananya pengelolaan barang	12 bulan, 3 orang						
							6. Tersedianya tenaga bantu (keamanan dan pengemudi)	12 bulan, 3 orang						
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	12 bulan, 4032 os	Dukungan 77,54% terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 989.400.000,00	Rp. 2.471.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan						
							3.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan						
							4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)	12 bulan						
							5. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu :- Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian						
							6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : Penerbitan Journal	1 kali penerbitan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu:- Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	1 kali						
4.04.4.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 759.523.000,00	Rp. 994.530.000,00		
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan rak arsip	10 unit	Dukungan 24,91 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 335.983.000,00	Rp. 325.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							10. Pengadaan meja kerja	4 unit						
							11. Pengadaan kursi kerja	4 unit						
							2. Pengadaan komputer PC	10 unit						
							3. Pengadaan komputer notebook	5 unit						
							4. Pengadaan printer	9 unit						
							5. Pengadaan Hardisk Internal	5 unit						
							6. Pengadaan UPS	5 unit						
							7. Pengadaan LCD/Viewer	2 unit						
							8. Pengadaan perekam suara (recorder)	2 unit						
							9. Pengadaan mesin faksimili	1 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Gedung kantor terpelihara	2 unit	Dukungan 21,72 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara : 2. Kendaraan dinas roda 2	3 unit	Dukungan 35,42 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 232.865.000,00	Rp. 382.830.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional terpelihara : 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit						
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Dukungan 13,94 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 100.675.000,00	Rp. 156.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							10. Pemeliharaan AC split	52 unit						
							11. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit						
							12. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah						
							13. Pemeliharaan Almari	11 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							14. Pemeliharaan Filling cabinet	10 buah						
							15. Pemeliharaan Meja kursi tamu	1 set						
							16. Pemeliharaan meja kerja	10 unit						
							17. Pemeliharaan kursi kerja	11 unit						
							18. Pemeliharaan kamera	1 unit						
							2. Pemeliharaan Generator set	1 unit						
							3. Pemeliharaan Komputer PC	50 unit						
							4. Pemeliharaan Printer	25 unit						
							5. Pemeliharaan Komputer note book	14 unit						
							6. Pemeliharaan LCD proyektor	6 unit						
							7. Pemeliharaan Sound system	5 unit						
							8. Pemeliharaan Faksimile	2 unit						
							9. Pemeliharaan CCTV	1 unit						
					4.04.4.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2020	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2020	Dukungan 3,62% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 12.365.000,00	Rp. 19.468.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen LKjIP tahun 2020						
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Laporan Keuangan Semester	2 dokumen laporan keuangan semester	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 27.300.000,00	Rp. 32.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 dokumen laporan keuangan tahunan gabungan						
							3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Audited	1 dokumen laporan keuangan tahunan gabungan audited						
							4. Laporan Keuangan bulanan	12 dokumen laporan keuangan bulanan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. RKA-P 2021	1 Dokumen RKA-P 2021	Dukungan 87,41 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 205.380.000,00	Rp. 470.072.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							10. Pengembangan sistem informasi internal	1 aplikasi						
							11. Update Website Bappeda DIY	1 aplikasi						
							2. RKA 2022	1 Dokumen RKA 2022						
							3. DPA-P 2021	1 Dokumen DPA-P 2021						
							4. DPA 2022	1 Dokumen DPA 2022						
							5. Renja Perangkat Daerah 2022	1 Dokumen Renja PD 2022						
							6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2021	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2021						
							7. ROPK Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen ROPK PD 2021						
							8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2021	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2021						
							9. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2022						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan	Dukungan 3,01 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 12.032.000,00	Rp. 16.193.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik						
							3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan						
4.04.4.02.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.394.335.200,00	Rp. 3.819.743.260,00		
4.04.4.02.01.00.15.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen RKPD 2022 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2022	Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	Rp. 2.260.729.200,00	Rp. 3.600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen RKPDP 2021 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2021	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%				
							3. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 aplikasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Dokumen background Study Sebagai Bahan Rancangan Teknokratis RPJMD DIY Tahun 2022-2026	1 dokumen Background Study Sebagai Bahan Rancangan Teknokratis RPJMD DIY Tahun 2022- 2026						
							5. Fasilitas Penyusunan Renstra	1 dokumen Rapergub Renstra						
							6. Fasilitas Penyusunan Renja	1 dokumen Rapergub Renja						
4.04.4.02.01.00.15.004	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2022 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2022	1.Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas 2.Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100% 100%	Rp. 133.606.000,00	Rp. 219.743.260,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 345.575.000,00	Rp. 920.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.16.001	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	89.13%	1.Dokumen Bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan tahun 2021 dan tahun 2022	Dukungan 45,65 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 89,13%	100%	Rp. 232.575.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020	1 dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020						
							3.Dokumen bahan Perencanaan Tahun 2023	1 Dokumen bahan perencanaan Tahun 2023						
							4.Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	1 dokumen hasil Monev RAD PG 2015-2019						
							5. Kajian Penyusunan RAD PG DIY	1 dokumen						
4.04.4.02.01.00.16.002	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	89.13%	1.Dokumen Bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha tahun 2021 dan tahun 2022	Dukungan 54,35% Terhadap Prosentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 89,13%	100%	Rp. 113.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2.Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2020	1 dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2020						
							3.Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2023	1 dokumen bahan perencanaan Tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 543.926.000,00	Rp. 1.369.652.000,00		
4.04.4.02.01.00.17.001	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	92.41%	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM tahun 2022 dan 2021	Dukungan 42,08% terhadap presentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 92,41%	100%	Rp. 80.125.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2020	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2023	1 dokumen bahan perencanaan tahun 2023						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.17.002	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	92.41%	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2022 dan 2021	Dukungan 44,39% terhadap presentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 92,41%	100%	Rp. 122.475.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2020	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2023	1 dokumen bahan perencanaan tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.17.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	92.41%	1. Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda	1 dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda	Dukungan 13,53% terhadap presentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 92,41%	100%	Rp. 341.326.000,00	Rp. 609.652.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi CSR/TSLP	1 dokumen evaluasi CSR/TSLP tahun 2021						
							3. Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2021						
							4. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen monev TPB DIY Tahun 2021						
							5. Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 aplikasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 138.320.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.18.001	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	85.71%	1.Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA PPAS Tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM tahun 2021 dan 2022	Dukungan 54,29 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 85,71 %	100%	Rp. 71.800.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2020	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra SubbidangPerhubung an, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2023	1 dokumen bahan perencanaan tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.18.002	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	85.71%	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2021	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dan 2022	Dukungan 45,71 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 85,71 %	100%	Rp. 66.520.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2020	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2023	1 dokumen bahan perencanaan tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 250.178.000,00	Rp. 785.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.19.001	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91.55%	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2021.	1 Dokumen Bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021 dan 2022	Dukungan kegiatan 61,76 % Terhadap Prosentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91,55%	100%	Rp. 123.638.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2020	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2023	1 Dokumen bahan perencanaan tahun 2023						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.19.002	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91.55%	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2021.	1 Dokumen Bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021 dan 2022	Dukungan kegiatan 38,24 % Terhadap Prosentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91,55%	100%	Rp. 126.540.000,00	Rp. 135.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020						
							3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2023	1 Dokumen bahan perencanaan Tahun 2023						
4.04.4.02.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.033.242.000,00	Rp. 3.495.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	91%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2020 (1 dokumen) dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW I-III 2021 (3 dokumen)	4 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1.Dukungan 50% terhadap persentase capaian kegiatan OPD sebesar 91% 2.Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100% 100%	Rp. 1.718.242.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	10. Update aplikasi Sengguh	1 aplikasi Sengguh						
							2. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2020	1 dokumen Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2020						
							3. Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY : - Semester 2 Tahun 2020 - Semester 1 Tahun 2021	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY						
							4. Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2020	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2020						
							5. Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2020 dan Tahun 2021	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY						
							6. Laporan evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2020	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2020						
							7. Laporan evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Tahun 2020 dan Tahun 2021	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota						
							8. Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2020	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda						
							9. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan	1 dokumen Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	91%	1.Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2020	1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2020	1. Dukungan 50% terhadap persentase capaian kegiatan OPD sebesar 91% 2. Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100% 100%	Rp. 315.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	2.Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2020	1 dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2020						
							3.Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2021	1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur						
							4.Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2020	1 dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)						
							5.Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun 2020) dan TW I-III (Tahun 2021)	4 dokumen Laporan Kinerja APBN						
							6.Penyserahan DIPA APBN 2022	1 kali						
					4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
4.07.4.02.01.00.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 422.621.800,00	Rp. 766.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 9.234.965.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	90%	1. Dokumen hasil penelitian dengan tema : a. perwujudan visi DIY sebagai pusat pariwisata terkemuka tahun 2025 b. pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi covid-19	2 dokumen hasil penelitian	Dukungan 60% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	100%	Rp. 232.460.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Rencana Induk Kelitbangan	1 dokumen rencana induk kelitbangan						
4.07.4.02.01.00.16.003	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	90%	1. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2021	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2021	Dukungan 40% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	100%	Rp. 190.161.800,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2021	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2021						
							3. Laporan Monitoring evaluasi kelitbangan	1 dokumen laporan monev kelitbangan Tahun 2021						
							4. Sistem Informasi Hasil Penelitian	1 aplikasi						
							5. Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan	1 dokumen rumusan bahan kebijakan kelitbangan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.05	KEUANGAN													
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset													
4.05.4.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 10.977.999.000,00	Rp. 12.597.631.000,00		
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat tulis kantor	20 jenis	Dukungan 63% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.914.980.000,00	Rp. 7.408.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Arsip keuangan in aktif	5.000 berkas						
							03. Barang cetakan	15 jenis						
							04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan bermotor R2	28 unit						
							05. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan bermotor R6	1 jenis						
							06. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan R4	29 unit						
							07. Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							08. Bukti Pembayaran surat kabar harian, majalah dan tabloid sebanyak 4 jenis	12 bulan						
							09. Bukti pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan						
							10. Bukti pengiriman dokumen	12 bulan						
							11. Bukti sewa peralatan sanitasi	12 bulan						
							12. Bukti sewa tanaman	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13. Gedung kantor seluas 686.528 m2 yang terpelihara kebersihannya	12 bulan						
							14. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis						
							15. Penggandaan	817.800 lembar						
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 24,5% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.819.460.000,00	Rp. 2.689.631.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	Dukungan 11,80% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.243.559.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan						
4.05.4.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.904.750.000,00	Rp. 7.563.136.500,00		
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01 Mebeleur sesuai RKBMD	2 jenis	Dukungan 40,36% terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 1.371.570.000,00	Rp. 3.180.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis						
							03. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	10 jenis						
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Depo yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	1 unit	Dukungan13,45 terhadap pemenuhan sarana prasarana aparatrur	100%	Rp. 860.700.000,00	Rp. 1.369.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	7 unit						
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	28 unit	Dukungan 10,23% terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 807.630.000,00	Rp. 905.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	29 unit						
							03. Kendaraan dinas/ operasional roda 6 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	1 unit						
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Jaringan yang dipelihara sesuai RKPBMMD	4 jenis	Dukungan 9, 04% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 1.864.850.000,00	Rp. 2.109.136.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Peralatan kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	22 jenis						
							03. Perlengkapan kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	9 jenis						
4.05.4.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 151.430.000,00	Rp. 208.000.000,00		
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja dan IKU)	Nilai LKjIP " A"	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 9.720.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 dokumen	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 23.880.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA.2022 dan Perubahan TA.2021	8 dokumen	Dukungan 50% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 97.980.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Forum Perencanaan OPD	1 berita acara						
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 10% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 19.850.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 1.122.800.000,00	Rp. 2.278.900.000,00		
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	01. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun n-1 disusun paling lambat bulan Februari dan bulan Agustus Tahun n	2 dokumen	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	Rp. 700.600.000,00	Rp. 1.778.900.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Laporan keuangan Pemda DIY Tahun n-1 Unaudited selesai bulan Maret Tahun n	1 dokumen						
							03.Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun n selesai bulan Juli Tahun n	1 dokumen						
							04. RaPerda dan RaPergub Pertanggungjawaban APBD Tahun n-1 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun n sesuai dengan Perda PAPBD	1 dokumen						
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	01. Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 3 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan)	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 3 hari)	Dukungan 60% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	Rp. 422.200.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 374.630.000,00	Rp. 954.630.000,00		
4.05.4.03.01.00.17.001	Pengendalian Belanja Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	01. Dokumen SP2D belanja langsung diterbitkan paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan syah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, Sektor Sarana dan Prasarana dan sektor Sosbud	9.000 dokumen SP2D	Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	Rp. 210.390.000,00	Rp. 790.390.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	01. Dokumen SP2D belanja tidak langsung gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud	1.200 dokumen SP2D	Dukungan 40% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	Rp. 164.240.000,00	Rp. 164.240.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud	200 dokumen SP2D						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud	200 dokumen SP2D						
							04. Hasil Rekonsiliasi anggaran non kas dengan PT Taspen dan BPJS	3 dokumen berita acara hasil rekonsiliasi						
4.05.4.03.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 1.145.970.000,00	Rp. 2.061.370.000,00		
4.05.4.03.01.00.18.001	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	01. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah raperda APBD Kab/Kota tahun n+1 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun n+1	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dukungan 20% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 397.570.000,00	Rp. 1.221.370.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kab/Kota tahun n diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun n	5 Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda PAPBD Kabupaten / Kota						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Tahun n-1 diterima secara lengkap Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019.	5 Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD kabupaten / Kota						
4.05.4.03.01.00.18.002	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	01. Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara pada PA dan KPA	5 Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara PA dan KPA	Dukungan 40%terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 80.400.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Kepgub tentang penunjukan PA dan KPA diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pergub tentang Sisdur Pengelolaan keuangan Daerah	5 Kepgub tentang penunjukan PA/KPA						
							03. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri)	6 Pergub tentang Pengelolaan Keuangan BLUD						
4.05.4.03.01.00.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	01. BUMD Expo	1 kegiatan	Dukungan 40% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 668.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Dana Bergulir BUKP (rekening pembiayaan)	Rp.10.000.000.000						
							03. Deviden BUMD	BUMD : deviden Tahun buku 2019 Rp95.336.062.563,26 menjadi Rp51.422.615.584,00 di Tahun Buku 2020						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Deviden BUKP	Thn buku 2019 : a. deviden Rp6.025.001.568,23.b. dana Pembinaan Rp315.743.815,39. c. Jasa Produksi Rp236.807.861,54. Thn 2020 menjadi: a. Deviden sebesar Rp3.869.553.435,67. b. Dana pembinaan sebesar Rp205.313.167,91.c. Jasa Produksi sebesar Rp153.984.87						
							05. Kajian Investasi BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen kajian						
							06. Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP Tahun Buku n-1	1 Keputusan Gubernur						
							06. Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP Tahun Buku n-1	1 Keputusan Gubernur						
							07. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan BUKP Tahun Buku n-1	1 Keputusan Gubernur						
							08. Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku (Tahun n) berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT n+1 selambat-lambatnya akhir November	1 Keputusan Kepala BPKA						
							09. Naskah Akademik Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen Naskah Akademik						
							10. Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 20,66%						
							11. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Air Bersih (rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00.						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							12. Penyertaan Modal pada PT AMI (rekening pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00.						
							13. Penyertaan Modal pada PT Bank BPD DIY (rekening pembiayaan)	Rp145.000.000.000,00 (kekurangan 2019) Rp121.040.000.000,00 (kekurangan 2020). Rp244.667.000.000,00 (sesuai Perda untuk 2021) Sehingga total sebesar Rp510.707.000.000,00.						
							14. Recruitment Calon Direktur BUMD Air Bersih	1 kegiatan						
4.05.4.03.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 2.235.810.000,00	Rp. 3.663.000.000,00		
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	58.08%	01. Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah sebagai berikut: - PAD : Rp 1.910.191.159.271,- - Dana transfer : Rp 2.344.523.676.800,- - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp 1.518.197.997.310,-	Pendapatan daerah sebesar Rp 5.772.912.833.381,99	Dukungan 30% terhadap meningkatnya pendapatan daerah	100%	Rp. 98.720.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	58.08%	01. Pendapatan Asli Daerah (PAD): - Pendapatan Pajak Rp 1.697.975.210.629,- - Pendapatan Retribusi Rp 34.230.998.530,01 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 101.811.469.050,06 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 76.173.481.062,92	PAD sebesar Rp 1.910.191.159.271,-	Dukungan 70% terhadap meningkatnya pendapatan daerah	100%	Rp. 2.137.090.000,00	Rp. 3.543.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Laporan dana transfer sesuai undanag-undang yang berlaku: 1). Laporan DAK, 2). Laporan DBH-CHT, 3). Laporan DID, 4). Laporan BID, 5) Laporan Dana Keistimewaan, 6). Lembar konfirmasi transfer (triwulan, semester, dan pertahap)	20 dokumen tepat waktu sesuai PMK 121/2018 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfrer ke daerah dan dana desa						
4.05.4.03.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD										Rp. 8.339.072.000,00	Rp. 10.433.400.000,00		
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Pendapatan daerah dari PKB Kota Yogyakarta terdiri dari:Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit, Sepeda motor 389.968 unit	PKB naik sebesar Rp 24.590.949.515,- semula 2020 Rp 139.348.713.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 163.939.662.515,- (tahun 2021)	Dukungan Rp 228.188.318.915,- terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kota Yogyakarta	100%	Rp. 1.205.962.000,00	Rp. 1.050.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta terdiri dari :Sedan 994 unit, Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit	BBNKB naik sebesar Rp 19.274.596.400,- semula Rp 44.974.060.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 64.248.656.400.-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000. WP	1 dokumen data status kepemilikan kendaraan bermotor	Dukungan Rp 2.100.000.000,- terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kota Yogyakarta	100%	Rp. 487.250.000,00	Rp. 570.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.300.000.000,00						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari:Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit, Sepeda motor 389.968 unit	PKB naik sebesar Rp 25.127.980.149,- semula Rp 142.391.883.000,- menjadi Rp 167.519.863.149,- (tahun 2021)	Dukungan Rp 261.484.854.469,- terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 1.194.440.000,00	Rp. 1.685.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari :Sedan 994 unit, Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit	BBNKB naik sebesar Rp 28.189.491.320,- semula Rp Rp 65.775.500.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 93.964.991.320,- (tahun 2021)						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 14.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan kendaraan bermotor	Dukungan Rp 225.000.000,- terhadap kenaikan pendapatan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 323.650.000,00	Rp. 525.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sejumlah 5.000 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki sebesar Rp. 863.250.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah	03. Pendapatan dariPajak Air Permukaan (PAP)	Rp 79.860.000						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus / microbus 322 unit, Truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit, sepeda motor 150.575 unit	PKB naik sebesar Rp 8.636.653.979,- semula Rp 48.941.039.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 57.577.692.979,- (tahun 2021)	Dukungan Rp 86.718.393.065,- terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo	100%	Rp. 703.960.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, microbus/bus 18 unit, Truck 177 unit, pick up 470 unit, sepeda motor 15.151 unit	BBNKB naik sebesar Rp 8.742.210.086,- semula Rp 20.398.490.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 29.140.700.086,- (tahun 2021)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 9.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM	Dukungan Rp 112.530.00,- terhadap target kenaikan pajak daerah di KPPD KULonprogo	100%	Rp. 284.950.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan dari Pendapatan Air Permukaan (PAP)	Rp123.783.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah	03. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM	Rp 850.000.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Pajak Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (Umum) 74 unit, Micro bus (pribadi) 131 unit, Micro bus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pickup (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (Umum) 13 unit, Sepeda motor(pribadi) 168.000 unit, sedan (dinas) 5 unit, Jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit, sepeda motor (dinas) 1.082 unit.	PKB naik sebesar Rp 10.028.685.121,- semula Rp 56.829.215.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 66.857.900.121,- (tahun 2021)	Dukungan Rp 96.644.122.043,-. terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul	100%	Rp. 1.250.450.000,00	Rp. 1.533.400.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, Micro bus (pribadi) 34 unit, Micro bus (umum) 8 unit, Truck (pribadi) 249 unit, Pickup (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, pick up (Umum) 3 unit, Sepeda motor(pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, Jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, micro bus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit.	BBNKB naik sebesar Rp 8.935.866.922,- semula Rp 20.850.355.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 29.786.221.922,- (tahun 2021)						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Laporan hasil pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM	Dukungan Rp 147.741.000,- terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul	100%	Rp. 545.550.000,00	Rp. 770.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.800 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki sebesar Rp1.747.872.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah	03. Pendapatan dariPajak Air Permukaan (PAP)	Rp 147.741.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah	04. Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM dari Data perkiraan piutang KBM : Rp 18.000.000,-	Rp17.200.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01.Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari: Sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, Truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit, sepeda motor 666.052 unit	PKB naik sebesar 49.628.006.786,- semula Rp 281.225.375.000,- (tahun 2020) menjadi 330.853.381.786,- (tahun 2021)	Dukungan Rp 490.715.148.658,- terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	100%	Rp. 1.562.330.000,00	Rp. 2.040.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Balik Nama Kendaraan Bermotor :Sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, Truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit	BBNKB naik sebesar Rp 47.958.526.872,- Rp 111.903.240.000,- (tahun 2020) menjadi Rp 159.861.766.872,- (tahun 2021)						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	33886438542Rupiah	01. Laporan hasil pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data data potensi yang belum mendaftar sejumlah 38.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan kendaraan bermotor	Dukungan Rp 600.000.000,- kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	100%	Rp. 780.530.000,00	Rp. 760.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	35033162653Rupiah	02. Pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp 600.000.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	11557445990Rupiah	03. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki 38.000 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki sebesar Rp 6.106.719.000,-						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	11028178432Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	69836655988Rupiah								
4.05.4.03.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 3.810.794.000,00	Rp. 4.079.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	01. DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun n ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun n	76 dokumen DPA OPD	Dukungan 60% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD Dukungan 60% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100% 100%	Rp. 3.089.993.000,00	Rp. 3.200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	02. Perda APBD Tahun n+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku,	1 dokumen Perda APBD TA.2022						
							03. Pergub Penjabaran APBD Tahun n+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen Pergub Penjabaran APBD TA.2022						
							04. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	120 dokumen SPD PA/KPA						
							04. SPD PA/KPA diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD Tahun n yang telah disyahkan; SPD triwulanan dikeluarkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai)	SPD PA/KPA (120 dokumen)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	120 dokumen SPD PA/KPA						
							06. KUA PPAS tahun 2022	1 Dokumen KUA PPAS tahun 2022						
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	01. Perda Perubahan APBD Tahun n ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	Perda Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)	Dukungan 40% terhadap kesesuaian program kegiatan antara KUPA PPAS dengan APBD Dukungan 40% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100% 100%	Rp. 720.801.000,00	Rp. 879.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	02. Pergub Penjabaran Perubahan APBD Tahun n ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)						
							03.DPPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD Tahun n ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun n	DPPA (130 dokumen)						
							04. SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun n yang telah disahkan	SPD (120 dokumen)						
							05. KUPA-PPASP tahun 2021	1 dokumen KUPA-PPASP						
4.05.4.03.01.00.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 2.993.000.000,00	Rp. 3.250.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.28.001	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	01. Bangunan gedung kantor yang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 unit bangunan gedung	Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 408.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinasyang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur	10 kendaraan roda 2 dan 5 kendaraan roda 4						
							03. Peralatan dan perlengkapan kantor yang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 jenis peralatan dan perlengkapan						
4.05.4.03.01.00.28.002	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kab/Kota se DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	01. Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	2 laporan tepat waktu	03. Dukungan 40% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 385.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen Surat Keputusan tentang RKBMD yang tepat waktu						
4.05.4.03.01.00.28.003	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	01. Hasil Penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Rp 424.512.806,-	Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Pensertifikatan bidang tanah BMD	7 dokumen						
							03. Rumah dinas yang siap untuk dioperasikan	5 unit						
							04. Terbitnya polis asuransi BMD (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 jenis polis asuransi BMD						
4.05.4.03.01.00.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 550.000.000,00	Rp. 830.000.000,00		
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	85.71%	01. Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)	10 dokumen kajian pemanfaatan	Dukungan 60% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 36.606.255.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	85.71%	01. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah	6 dokumen laporan penilaian BMD	Dukungan 40% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							02. Laporan penilaian BMD dalam rangka potensi aset BMD	1 dokumen laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan																	
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah																	
4.06.4.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.489.960.000,00	Rp. 4.450.000.000,00						
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat Tulis Kantor	65 jenis	Dukungan 27 % terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 982.695.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan				
							02. Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian/Majalah dan Buku	12 bulan										
							03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	12 bulan										
							04. Bukti Pembayaran Pengiriman Dokumen	1 tahun										
							05. Bukti Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio	1 tahun										
							06. Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air	12 bulan										
							07. Dokumen Hasil Cetak	20 jenis										
							08. Fumigasi ruang arsip	2 ruang										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							09. Tabung Pemadam Kebakaran yang Terisi	25 tabung						
							10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
							11. Arsip dinamis SKPD yang terkeola	6 bidang						
							12. Dokumen Hasil Penggandaan	60000 lbr						
							13. Alat Kebersihan	19 jenis						
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi Perkantoran yang Terselesaikan dengan Baik dan Tepat Waktu	12 bulan	Dukungan 24 % terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 863.095.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	12 bulan						
							03. Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik	12 bulan						
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Laporan dan rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 bulan	Dukungan 48 % Terhadap Terwujudnya Administarsi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.644.170.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Tamu	12 bulan						
4.06.4.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.473.360.000,00	Rp. 2.060.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan Kantor sesuai RKBMD	10 jenis	Dukungan 27 % Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 679.520.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	4 jenis						
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan	Dukungan 52 % Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.295.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Terpelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan	Dukungan 6 % Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 159.910.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang Terpelihara sesuai RKPBMĐ	12 bulan						
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan Kantor sesuai RKPBMĐ	30 jenis	Dukungan 14 % Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 338.930.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Mebeleur sesuai RKPBMĐ	3 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 205.000.000,00	Rp. 219.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP A	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi	14 laporan	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 73 % Terhadap Terwujudnya Penatusahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Perencanaan OPD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Tahun Anggaran 2021	10 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	100%	Dukungan 7 % Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 2.285.973.000,00	Rp. 3.850.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	83%	01. Aplikasi Si Seksi (CAT)	1 paket	Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	100%	Rp. 1.871.023.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	91.3%	02. Formasi Pegawai Tahunan	1 dokumen						
							03. Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	3500 orang						
							04. Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	83%	01. Aplikasi Layanan Kepegawaian (Portal Aplikasi Kepegawaian Berbasis Mobile Application, Sistem Informasi Presensi mobile OPD Non Satuan Pendidikan)	2 aplikasi	Dukungan 100% Terhadap Prosentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	100%	Rp. 414.950.000,00	Rp. 850.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	91.3%	02. ID Card PNS Pemda DIY	800 ID Card						
							03. Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan						
							04. Mesin Presensi Terpelihara dengan Baik	150 mesin						
4.06.4.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 7.120.173.000,00	Rp. 9.000.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.16.001	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	83%	01. ASN yang Mendapat Beasiswa Tugas belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas	Beasisawa S3 : 2 orang, S2 : 20 orang, S1 : 98 orang, D4 : 110 orang	Dukungan 81 % Terhadap 83 % Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 5.800.813.000,00	Rp. 6.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. ASN yang Peserta Ujian Dinas dan PI	260 org						
							03. Ijin Dinas Luar Negeri	50 surat						
							04. Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD)	1 laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. Surat Perintah Tugas Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis/Fungsional yang Dikirim ke Diklat	Pelatihan (PKN Tk. II: 5 org, PKA: 15 org, PKP: 25 org, T/F: 200 orang)						
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	83%	01. Kajian Manajemen ASN	1 dokumen	Dukungan 19 % Terhadap 83 % Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 1.319.360.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana	200 SK						
							03. SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS	75 SK						
							04. SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah	150 SK						
							05. SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Fungsional	100 SK						
							06. SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	2 SK						
4.06.4.04.01.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 1.235.015.000,00	Rp. 3.250.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	01. ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti MTQ Tk. Nasional (Musabaqoh, Tartil & khot)	3 cabang lomba	Dukungan 82 % Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 92 %	100%	Rp. 1.018.212.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP	250 PNS						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya	450 orang						
							04. Pertandingan Olahraga ASN Pemda DIY	5 cabang lomba						
							05. PNS dan Naban yang Terfasilitasi JKK/JKM	10 orang						
4.06.4.04.01.00.17.002	Penegakan Disiplin Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	01. Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	350 surat	Dukungan 18 % Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 92 %	100%	Rp. 216.803.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. PNS yang paham pengisian LHKPN	150 PNS						
							03. PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	200 orang						
							04. Terseselaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus						
4.06.4.04.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 1.105.654.000,00	Rp. 1.245.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	80nilai	01. Aplikasi Arsip	1 aplikasi	Dukungan 37 % Terhadap Nilai Survei Kepuasan dari Pelaynan Kepegawaian (B (80))	100%	Rp. 405.282.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Perorangan/Sinkronisasi Letak Dokumen Fisik dan Elektronik	1 paket						
							03. Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	300 kartu						
							04. Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. Sosialisasi dokumen elektronik	240 Org (OPD, UPT, Sekolah)						
							06. Survei Kepuasan Masyarakat	1 laporan						
							07. Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	500 SK						
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	80nilai	01. Jumlah Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu	700 PNS	Dukungan 63 % Terhadap Nilai Survei Kepuasan dari Pelaynan Kepegawaian (B (80))	100%	Rp. 700.372.000,00	Rp. 745.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Akurat dan Tepat Waktu	1000 PNS						
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 1.379.976.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	49.76%	01. Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling kelompok	50 orang	Dukungan 69 % Terhadap 49,76 % kompetensi individu yang terpetakan	100%	Rp. 949.421.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi	20 orang						
							03. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	320 orang						
							04. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	108 orang						
							05. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	200 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 19.295.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	49.76%	01. ASN yang paham akan proses Sertifikasi Kompetensi	30 orang	Dukungan 31 % Terhadap 49,76% kompetensi individu yang terpetakan	100%	Rp. 430.555.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							02. Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 Kabupaten/Kota						
							03. Kemitraan kerjasama Pengukuran	40 orang						
							04. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	2 laporan						
							05. Pejabat Fungsional DIY yang tersertifikasi kompetensi	30 orang						
							06. Perjanjian kerja sama pengukuran kompetensi	10 PKS						
							07. SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	20 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan													
4.06.4.04.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.667.528.950,00	Rp. 3.362.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Alat - Alat perlengkapan	6 Jenis	Dukungan 27 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 743.360.000,00	Rp. 1.097.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. ATK	20 jenis						
							03. Barang Cetakan	13 jenis						
							04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	12 bulan						
							05. Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4	1 unit						
							06. Bukti pembayaran pengiriman dokumen	1 tahun						
							07. Bukti pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan						
							08. Bukti Transfer Non Tunai	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							09. Dokumen Hasil Penggandaan	65.000 lembar						
							10. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis						
							11. Retribusi sampah	12 bulan						
							12. Tabung Pemadam Kebakaran yang Terisi	5 tabung						
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 40 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.080.720.000,00	Rp. 765.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	12 bulan						
							03. Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik	12 bulan						
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Karya Tulis	1 laporan	Dukungan 33 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 843.448.950,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 bulan						
							03. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan						
							05. SDM Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 964.794.000,00	Rp. 3.375.500.000,00		
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor sesuai RKBMD	4 jenis	Dukungan 12 % terhadap terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 113.244.000,00	Rp. 260.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBM	12 bulan	Dukungan 55 % terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 533.910.000,00	Rp. 2.860.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBM	6 Unit	Dukungan 15 % terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 140.640.000,00	Rp. 145.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBM	7 Unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	01. Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBM	6 jenis	Dukungan 18 % terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 177.000.000,00	Rp. 110.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBM	2 jenis						
4.06.4.04.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 142.630.000,00	Rp. 193.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP A	Dukungan 5 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 Laporan	Dukungan 16 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 23.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Dokumen perencanaan SKPD TA 2022 dan Perubahan TA 2021	7 Dokumen	Dukungan 59 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 84.630.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 Berita Acara						
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 20 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 28.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 3.527.465.000,00	Rp. 9.224.129.125,00		
4.06.4.04.02.00.20.001	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	15%	01. Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II	60 orang	Dukungan 38 % terhadap 15 % ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %	Rp. 1.343.785.000,00	Rp. 2.015.677.500,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	15%	01. Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar sebanyak 2 angkatan	80 orang	Dukungan 21 % terhadap 15 % ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %	Rp. 743.680.000,00	Rp. 3.744.976.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	15%	01. Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 angkatan	40 orang	Dukungan 21 % terhadap 15 % ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 740.000.000,00	Rp. 740.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	15%	01. Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 1 angkatan	40 orang	Dukungan 20 % terhadap 15 % ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 2.723.475.625,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 444.212.000,00	Rp. 2.010.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	16.7%	01. Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Media Informasi	30 orang	Dukungan 81 % terhadap 16,7 % ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %	Rp. 359.704.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi	30 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknologi Informasi Komunikasi	30 orang						
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	16.7%	01. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Sosio Kultural	30 orang	Dukungan 19 % terhadap 16,7 % ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %	Rp. 84.508.000,00	Rp. 360.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 93.686.000,00	Rp. 327.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	87%	01. Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan	6 Berita Acara Kesepakatan	Dukungan 71 % terhadap 87 % Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100 %	Rp. 66.246.000,00	Rp. 242.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Laporan Monitoring Diklat Kemitraan	1 Laporan						
4.06.4.04.02.00.22.004	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	87%	01. Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional	1 rekomendasi	Dukungan 29 % terhadap 87 % Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100 %	Rp. 27.440.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							02. Mentor yang memahami peran dan tugas dalam memberikan pendampingan peserta diklat kepemimpinan/Latsar	40 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 8.556.637.950,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
4.06.4.04.02.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 716.322.000,00	Rp. 1.156.370.000,00				
4.06.4.04.02.00.23.001	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	80indeks survei	01. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (Kurikulum dan Modul)	1 kurikulum dan 1 modul	Dukungan 20 % Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (80)	100 %	Rp. 146.000.000,00	Rp. 198.750.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan		
4.06.4.04.02.00.23.002	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	80indeks survei	01. Laporan audit eksternal ISO 9001 - 2015	1 laporan	Dukungan 48 % terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (80)	100 %	Rp. 343.910.000,00	Rp. 687.620.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan		
									02. Laporan hasil evaluasi pasca diklat	4 laporan						
									03. Laporan Penjaminan Mutu Diklat	1 laporan						
									04. Sertifikat ISO 9001 - 2015	1 sertifikat						
4.06.4.04.02.00.23.003	Penelitian Kediklatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	80indeks survei	01. Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Hasil Kajian	2 laporan	Dukungan 25 % terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (80)	100 %	Rp. 180.000.000,00	Rp. 195.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan		
4.06.4.04.02.00.23.004	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	80indeks survei	01. Bahan pustaka yang terpelihara	12.730 buku	Dukungan 6 % terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (80)	100 %	Rp. 46.412.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan		
									02. Buletin Diklat	4 edisi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY (KEISTIMEWAAN)													
3.02.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
3.02.4.01.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN										Rp. 3.853.338.000,00	Rp. 4.000.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY DAN OPD KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	72%	Kajian Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan	1 Dokumen	Dukungan 53% terhadap capaian persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100%	Rp. 1.697.768.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021	2 Dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	1 Dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2023	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.15.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	DIY	Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	72%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan	4 Dokumen	Dukungan 40% terhadap capaian Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan sebesar 69 %	100%	Rp. 2.155.570.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
					Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100%								
3.02.4.01.01.00.17	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp. 8.791.209.000,00	Rp. 8.761.208.000,00		
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87.5%	Laporan Evaluasi Lembaga Non Struktural	1 Laporan	Dukungsn sebesar 12,5 terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	47 Rapergub						
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87.5%	Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Rekomendasi	Dukungan sebesar 12,5% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	Dokumen analis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	dukungan sebesar 12,5 % terhadap prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen Evaluasi Jabatan	1 Dokumen						
							Dokumen kualifikasi jabatan	1 Dokumen						
							Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.17.005	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	GUNUNG KIDUL Dokumen review standar operasional prosedur dan tata naskah dinas Kelembagaan Keistimewaan	2 Dokumen	Dukungan 50 % terhadap capaian Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sebesar 87 %	100%	Rp. 1.092.208.000,00	Rp. 1.125.208.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							KABUPATEN BANTUL Dokumen monitoring pelaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen						
							KABUPATEN GUNUNGKIDUL Dokumen monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli Dokumen evaluasi Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	1 Dokumen 1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							KABUPATEN KULON PROGO Jumlah ASN yang memahami kelembagaan Asli Dokumen monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli	80 orang 1 Dokumen						
							KABUPATEN SLEMAN Dokumen monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen						
							KOTA YOGYAKARTA Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli Dokumen Monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen 1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.17.006	Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	KABUPATEN BANTUL - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1 Peraturan	Dukungan sebesar 5% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 785.277.000,00	Rp. 590.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							KABUPATEN Gunungkidul - Jumlah peserta yang tersosialisasi tentang produk hukum terkait Keistimewaan	200 Peserta						
							KABUPATEN SLEMAN Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1 Peraturan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	20 kajian produk hukum						
3.02.4.01.01.00.17.007	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	Data usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2022	1 Dokumen	Dukungan 12,5% terhadap persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	100%	Rp. 971.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2023	1 Dokumen						
							Laporan monitoring dan evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun 2021	1 Laporan						
3.02.4.01.01.00.17.008	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon / Kemantren	5 Laporan	Penerapan Keistimewaan di Kalurahn dan Kapanewon di 4 Kabupaten serta Kemantren di Kota dan 1 Kabupaten telah sesuai dengan Tindak lanjut Pergub 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan	100%	Rp. 2.341.447.000,00	Rp. 2.046.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.17.009	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KAB/KOTA DI DIY	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87.5%	KABUPATEN GUNUNGKIDUL Jumlah lurah dan pamong Kalurahan yang memahami Kelembagaan Asli Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1.861 lurah/pamong kelurahan 1 Raperbup	Dukungan 30 % untuk tercapainya kelembagaan yang proporsional 87 %	100%	Rp. 1.001.277.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							KABUPATEN KULON PROGO Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan Jumlah pamong Kalurahan yang memahami Kelembagaan Asli	1 Raperbup 87 orang						
							KABUPATEN SLEMAN Dokumen monitoring pelaksanaan kelembagaan, tugas, dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan urusan keistimewaan	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN										Rp. 3.452.000.000,00	Rp. 3.000.000.001,00		
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Agen perubahan yang meningkat kapasitasnya	213 Agen	Dukungan sebesar 30% terhadap tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	2 Dokumen						
							Pemenang kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan	9 KBP						
							Pemenang lomba Paduan Suara Mars Pemda DIY dan MArS SATRIYA	3 Pemenang						
							Rencana Aksi (action plan) tahunan Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						
							Upgrade aplikasi SATRIYA	1 Aplikasi						
3.02.4.01.01.00.18.002	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Sleman	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Laporan monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Laporan	Dukungan 10 % terhadap capaian tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY sebesar 78 %	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Pelaksanaan Budaya Pemerintahan	1 Laporan						
3.02.4.01.01.00.18.003	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kota Yogyakarta	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN	Dukungan 10 % terhadap Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY sebesar 78 %	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Laporan Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Laporan						
							Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.004	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Agen perubahan Budaya Pemerintahan Satriya	100 ASN	Dukungan 5 % terhadap capaian Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY sebesar 80 %	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						
							Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.005	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kulon Progo	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	78 Orang	Dukungan 5 % terhadap capaian Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY sebesar 80 %	100%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN dan Pamong Kalurahan yang meningkat pemahamannya	150 Orang						
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pejabat Struktural yang meningkat kapasitasnya dalam manajemen perubahan	51 Orang						
3.02.4.01.01.00.18.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Asisten Agen perubahan	159 PNS	Dukungan 10 % terhadap capaian Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY sebesar 80 %	100%	Rp. 208.160.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN dan Pamong Kalurahan yang meningkat pemahamannya	150 PNS/Pamong Kalurahan						
							Kelompok Budaya Pemerintahan yang terfasilitasi kegiatannya	47 KBP						
							Laporan Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Laporan						
							Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.007	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Antar Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	Jumlah ASN mutasi yang memahami keistimewaan DIY	500 orang (5 angkatan)	Dukungan sebesar 10% terhadap tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 573.840.000,00	Rp. 900.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.18.008	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78.6%	ASN Pemda DIY yang mengikuti Internalisasi Keistimewaan	120 Orang	Dukungan 100% terhadap 100% pemahaman ASN tentang Keistimewaan	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN yang mengikuti Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK)	60 Orang						
							ASN yang mengikuti Diklat Tata Naskah Bahasa Jawa dan Tata Busana gagrag Yogyakarta	30 Orang						
3.02.4.01.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA										Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewan	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	76indeks	Bahan Rekomendasi Kepada Parampara Praja	21 Dokumen	Dukungan 100% terhadap indeks kepuasan layanan kepada Parampara Praja	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA										Rp. 820.000.000,00	Rp. 920.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.21.001	Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY dan OPD Kabupaten Kota	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	90%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan 60% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang berkualitas	100%	Rp. 570.000.000,00	Rp. 570.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	1 Dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2023	1 Dokumen						
							Roadmap Keistimewaan Urusan Kelembagaan	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.21.002	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD Pemda DIY dan OPD Kabupaten Kota	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	90%	Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4 Dokumen	Dukungan 40% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 485.000.000,00	Rp. 753.615.500,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.22.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	90%	Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusaan kebudayaan tahun 2022	1 Dokumen	Dukungan 60% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100%	Rp. 270.000.000,00	Rp. 388.415.500,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2021	2 Dokumen						
							Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusaan kebudayaan tahun 2023	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.22.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	90%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4 Dokumen	Dukungan 40% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100 %	Rp. 215.000.000,00	Rp. 365.200.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG										Rp. 1.240.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.23.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	90%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	2 Dokuemn	Dukungan 30% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Pertanahan yang berkualitas	100%	Rp. 370.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	1 Dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2023	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.23.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	90%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan	4 dokumen	Dukungan 20% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY DAN OPD KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	90%	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan 30% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas	100%	Rp. 370.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 22.041.547.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2.Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2022	1 Dokumen						
							3.Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2023	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.23.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	OPD DIY DAN OPD KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	90%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang	4 Dokumen	Dukungan 20% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN										Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 2.046.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.24.001	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95%	1. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksanaan Keistimewaan	1 Dokumen	Dukungan 100% terhadap Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 2.046.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Laporan hasil rapat Forum Desentralisasi Asimetris	1 Laporan						
							3. Buku Infografis pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2021	35 Eksemplar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.03	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)													
3.03.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
3.03.1.22.01.00.15	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN										Rp. 42.306.908.740,00	Rp. 65.667.275.000,00		
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	BTL : 1. Peringatan Peristiwa Sejarah 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten 3. Kajian Sejarah Lokal 4. Lawatan Sejarah 5. Sarasehan Sejarah	1.3 event 2.1 event 3. 3 dokumen 4. 2 kali 5. 1 event	-	-	Rp. 10.056.492.760,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	GK 1. Kajian Sejarah Lokal 2. Lawatan Sejarah 3. Peringatan Peristiwa Bersejarah 4. Publikasi Literasi Sejarah 5. Cerdas Cermat Sejarah	1. 3 buku 2. 15 angkatan 3. 4 even 4. 3 even 5. 1 kali						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	Induk: 1. Kajian Sejarah Lokal 2. Lawatan sejarah 3. Peringatan Peristiwa Bersejarah 4. Cerdas Cermat Sejarah 5. Pembinaan Komunitas Sejarah	Induk: 1. 3 dokumen 2. 2 Event 3. 28 event 4. 1 event 5. 6 komunitas						
							KOTA : 1.Kajian Sejarah 2.Lawatan Sejarah 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah 4. Peringatan Hari-hari Sejarah	1. 3 Kajian 2. 1 event 3. 1 event 4. 3 event						
							KP 1. Napak tilas sejarah 2. Penulisan buku sejarah lokal (Puncak Sejarah Suroloyo, Sejarah Jalan Kawijo, dan 12 Kecamatan Kabupaten Kulon Progo) 3. Lomba cerdas cermat sejarah	1. 1 kali 2. 3 dokumen 3. 1 kali						
							SLM 1. Penulisan Sejarah Lokal 2. Lomba penulisan sejarah 3. Pemeliharaan Tetenger	1. 3 Kajian 2. 1 Kali 3. 15 Tetenger						
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	DISBUD BANTUL 1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra tingkat Kabupaten Bantul 2. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY 3. Pembinaan Sastra 4. Lawatan Sastra 5. Gelar Macapat Massal 6. Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan 7. Sastrawan Masuk Sekolah 8. Festival Sastra Yogyakarta (Joglifest) 9. Gelar Sastra Bantul 10. Pawiyatan Pranatacara	1. 8 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 2 judul buku 7. 3 kali 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali	-	-	Rp. 5.731.708.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	DISBUD GK 1. Pelatihan Bahasa dan sastra 2. Kompetisi Bahasa dan Sastra 3. Buku Sastra Budaya 4. Publikasi Bahasa dan Sastra 5. Pergelaran Macapat 6. Lawatan Sastra 7. Sarasehan Penggiat Sastra	1. 9 even 2. 9 even 3. 1 buku 4. 1 even 5. 4 kali 6. 1 kali 7. 4 kali						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	DISBUD KP 1. Macapat Rutin 2. Macapat Massal 3. Pembinaan Sastra Jawa (Geguritan, Pranata Adicara, Sesorah) 4. Lomba Bahasa Sastra Kulon Progo 7 jenis (Sesorah, Geguritan, Alih Aksara, Puisi, Macapat,Mendongeng Bhahasa Jawa, Panembrama)	1. 12 kali 2. 2 kali 3. 1 kali 4. 1 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							DISBUD SLEMAN 1. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa 2. Gelar Mocopat Tingkat Kecamatan 3. Gelar Mocopat Tingkat Kabupaten 4. Gelar Mocopat Massal 5. Lomba Sesorah (umum) 6. Lomba Mendongeng bahasa Jawa tingkat SMP 7. Lomba Geguritan tingkat SD 8. Lomba Mocopat Tingkat SMA 9. Lomba Alih Aksara 10. Lomba Cerkak tingkat SMA 11. Lomba Pranata Cara	1. 3 Kali 2. 34 kali 3. 10 kali 4. 1 Kali 5. 1 Kali 6. 1 Kali 7. 1 Kali 8. 1 Kali						
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Lokasi di DIY	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	01. Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1. 1 event	-	-	Rp. 13.782.262.580,00	Rp. 26.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	02. Registrasi Koleksi Museum	2. 5 Museum						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	03. Pendampingan Edukator Museum	3. 17 Museum						
							04. Pameran Museum	4. 6 event						
							05. Wajib Kunjung Museum	5. 40.000 Peserta						
							06. Lomba Cerdas Cermat Museum	6. 1 event						
							07. Kajian Permuseuman	7. 5 dokumen						
							08. Rapat Kerja Permuseuman	8. 1 kali						
							09. Pemilihan Duta Museum	9. 36 Orang Duta Museum						
							10. Jumpa Sahabat Museum	10. 40 kali						
							11. Pelatihan SDM Permuseuman	11. 4 kali						
							12. Jogja Museum Expo	12. 1 event						
							DISBUD BTL 1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY 3. Kajian Museum di Bantul 4. Promosi Museum Bantul 5. Jumpa Sahabat Museum 6. Fasilitasi Komunitas Museum	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 dokumen 4. 2 kali 5. 5 kali 6. 10 kali						
							DISBUD KP 1. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman 2. Wajib Kunjung Museum	1. 1 kali 2. 5 kali						
							DISBUD SLM 1.Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Kabupaten/Kota 2021 2.Promosi Museum Promosi Museum dalam bentuk travel dialog 3. Pameran Museum 4. Wajib Kunjung Museum 5. Pentas Seni Sabtu Minggu 6. Pentas Seni Hari Libur 7. Sosialisasi Museum Masuk Sekolah 8. Pameran Temporer 9. Sosialisasi dan Promosi 10. Sarasehan 11.. Festival Museum	1. 1 even 2. 14 Museum 3. 1 kali (MTF) 4. 15 Kali / Siswa TK 5. 40 kali 6. 15 kali						
		GK 1. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	1. 1 kali											
		KOTA 1. Fasilitasi Komunitas Museum 3. Lomba Cerdas Cermat Permuseuman 3. Sarasehan Permuseuman 4. Jumpa Sahabat Museum 5. Jogja Museum Expo	1. 1 Event 2. 1 Komunitas 3. 1 Kali 4. 4 event 5. 1 Event											

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.15.004	Pemeliharaan Bahasa dan Sastra	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Lokasi di DIY	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	01. Kompetisi Bahasa dan Sastra	1. 9 Jenis lomba	-	-	Rp. 5.836.444.900,00	Rp. 16.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	02. Pergelaran karya Bahasa dan Sastra	2. 22 kali mocopatan						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	03. Promosi dan Publikasi Bahasa dan Sastra	3. 2 Jenis Terbitan						
							04. Temu Karya Sastra	4. 150 orang						
							05. Pengiriman Peserta Kongres Bahasa Jawa (Jateng)	5. 100 orang						
							06. Buku Sastra Budaya	6. 3 Judul Buku						
							07. Lawatan Sastra	7. 1 Event						
							08. fasilitasi Pentas Sastra	8. 12 Kali						
							KOTA "1. Kompetisi Bahasa dan sastra 2. Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra 3. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa 4. Festival Sastra Yogyakarta	1. 8 Jenis lomba 2. 15 kali 3. 8 Kali 4. 1 event						
3.03.1.22.01.00.15.005	Pengembangan Bahasa Sastra	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	01. Pengembangan Kethoprak Kekinian	1. 4 Kali Workshop	-	-	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 6.284.250.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	02. Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa	2. 4 kali workshop						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	03. Festival Sastra Yogyakarta (Joglitfest)	3. 1 even						
3.03.1.22.01.00.15.006	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	13sumber sejarah	02. Olimpiade Pahlawan	2. 320 org	mendukung pelestarian bahasa Jawa untuk memberikan inspirasi tentang upaya keaksaraan sebagai fondasi gerakan membangun manusia berkarakter dan berbudaya damai.	100 %	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 4.883.025.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	12karya	03. Pemeliharaan Tetenger dan Gapura	3. 6 lokasi						
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.65rasio	04.Gerbang Praja (sarasehan dan Penyuluhan)	4. 30 lokasi						
							05. Gelar Prasajo (Gladi Aksoro Pranoto Subosito Jowo)	5. 46 lok						
							DINSOS 01. Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan	1. 500 org						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.16	PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO										Rp. 20.454.891.000,00	Rp. 18.810.220.000,00		
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.8indeks	01. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	1. 100 kali	1. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo 2. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo 3. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo 4. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo 5. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo 6. Edukasi Komunitas Museum 7. Alih Media Koleksi 8. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum 9. Branding Museum Sonobudoyo 10. Bioskop Sonobudoyo 11. Pameran Regional 12. Digitalisasi Buku Perpustakaan 13. Penataan Koleksi Storage Unit II 14. Atraksi Pendukung Koleksi Museum 15. Pagelaran Wayang Orang	1. 100 kali 2. 2 kali pameran 3. 2 kali pameran 4. 4 kali pameran 5. 1 kali 6. 5 kali 7. 1 naskah 8. 50 buah koleksi kayu, 100 buah koleksi senjata, 50 buah koleksi logam, 50 buah koleksi kain, 2 buah Lukisan 9. 1 paket penguatan branding, 500 buku	Rp. 6.363.901.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	80.16%	02. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	2. 2 kali pameran						
							03. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	3. 2 kali pameran						
							04. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	4. 4 kali pameran						
							05. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	5. 1 kali						
							06. Edukasi Komunitas Museum	6. 5 kali						
							07. Alih Media Koleksi	7. 1 naskah						
							08. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	8. 50 buah koleksi kayu, 100 buah koleksi senjata, 50 buah koleksi logam, 50 buah koleksi kain, 2 buah Lukisan						
							09. Branding Museum Sonobudoyo	9. 1 paket penguatan branding, 500 buku, 1 billboard, 500 leaflet						
							10. Bioskop Sonobudoyo	10. 800 kali						
							11. Pameran Regional	11. 3 kali						
							12. Digitalisasi Buku Perpustakaan	12. 50.000 lembar						
							13. Penataan Koleksi Storage Unit II	13. 9.000 koleksi						
							14. Atraksi Pendukung Koleksi Museum	14. 390 kali						
							15. Pagelaran Wayang Orang	15. 100 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	di DIY	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.8indeks	01. Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo	1. 1 paket	1. Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo 2. Pemeliharaan CCTV 3. Pemeliharaan AC 4. Pengadaan koleksi/replika 5. Pengadaan property storage 6. Pemeliharaan Fire Alarm	1. 1 paket 2. 1 paket 3. 140 unit 4. 1 paket 5. 73 unit 6. 1 paket	Rp. 14.090.990.000,00	Rp. 10.810.220.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	80.16%	02. Pemeliharaan CCTV	2. 1 paket						
							03. Pemeliharaan AC	3. 140 unit						
							04. Pengadaan koleksi/replika	4. 1 paket						
							05. Pengadaan property storage	5. 73 unit						
							06. Pemeliharaan Fire Alarm	6. 1 paket						
3.03.1.22.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA										Rp. 83.772.242.080,00	Rp. 145.471.264.000,00		
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	lokasi di DIY	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	14.18%	01. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	1. 25 CB	1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB 2. Pemberian Legalitas WBCB 3. Pembinaan Pelestarian WBCB 4. Penelitian WBCB 5. Pengelolaan WBCB 6. Publikasi Pelestarian WBCB	1. 25 CB 2. 25 WBCB 2a. Penetapan WBCB (TACB DIY) 10 WBCB 2b. Penyusunan Regulasi WBCB (1 Draft) 2c. Rekomendasi WBCB (DP2WB DIY) 10 rekomendasi 3. 1 kali 4. 6 Bangunan/situs/kawasan 4a. Kajian WBCB 3 bangunan/situs/kawasan 4b. Perencanaan Teknis WBCB 3	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 41.660.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Pemberian Legalitas WBCB	2. 25 WBCB 2a. Penetapan WBCB (TACB DIY) 10 WBCB 2b. Penyusunan Regulasi WBCB (1 Draft) 2c. Rekomendasi WBCB (DP2WB DIY) 10 rekomendasi						
							03. Pembinaan Pelestarian WBCB	3. 1 kali						
							04. Penelitian WBCB	4. 6 Bangunan/situs/kawasan 4a. Kajian WBCB 3 bangunan/situs/kawasan 4b. Perencanaan Teknis WBCB 3 bangunan/situs/kawasan						
							05. Pengelolaan WBCB	5. 2 Badan Pengelola						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Publikasi Pelestarian WBCB	6a. Buletin Mayangkara 2 edisi 6b. Travel Heritage 2 lokasi 6c> Penerbitan buku Pelestarian 2 judul						
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	14.18%	01. Rehabilitasi WBCB	1. 5 WBCB (Bangunan Aset Kraton ,Bangunan Aset Pura Pakualaman , Bangunan Aset Pemerintah, Bangunan Aset Masyarakat)	1. Rehabilitasi WBCB 2. Perawatan WBCB 3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB 4. akuisisi bangunan dan lahan	1. a. Bangunan Aset Kraton (4 bangunan) b. Bangunan Aset Pura Pakualaman (1 bangunan) c. Bangunan Aset Pemerintah (2 bangunan) d. Bangunan Aset Masyarakat (1 bangunan) 2. a. Bangunan dan situs WBCB (9 bangunan) b. Juru Pelihara (2 kali Bimtek dan 35 juru	Rp. 71.972.827.880,00	Rp. 98.867.904.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Perawatan WBCB	2. a. Bangunan dan situs WBCB (11 bangunan) b. Juru Pelihara (35 juru pelihara)						
							03. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	3. 5 Kawasan wbcB (Pleret, Pthok Negoro. Situs Pleret Pathok Negoro, Mlangi, Ketandan, Kotagedhe dan Sumbu Filosofis)						
							04. World Heritage Day	4. 1 event						
							DISBUD BTL 1. Penetapan Cagar Budaya 2. Rehab Cagar Budaya 3. Kajian Warisan Budaya Benda	1. 20 Rekomendasi CB 2. 2 cagar budaya 3. 3 dokumen						
							DISBUD KP 1. Pemasangan plakat bangunan CB di KP 2. Rekomendasi TACB 3. Kajian Kawasan Boro	1. 1 paket 2. 25 naskah 3. 1 paket						
							DISBUD SLM 1. Registrasi Nasional 2. Tim Ahli Cagar Budaya 3. Penyiap Bahan Rekomendasi 4. Kemah Budaya 5. Pembinaan dan penghargaan warisan budaya rumah tradisional 6. Sosialisasi Cagar Budaya	1. 11 Bulan 2. 25 Rekomendasi 3. 2 org x 11 bln 4. 1 event 200 siswa 5. 5 Rumah						
							GK 1. Kajian TACB 2. Studi Teknis 3. Studi Kelayakan 4. Wajib Kunjung Situs 5. Promosi Cagar Budaya 6. Pemeliharaan Objek Cagar Budaya 7. Publikasi Cagar Budaya	1. 20 Rekomendasi 2. 2 kali 3. 1 kali 4. 5 kali 5. 2 kali Gowes 6. 10 bangunan 7. 1 tahun						
							KOTA 1. Penetapan WBCB (TACB Kota Yogyakarta) 2. Rekomendasi Pelestarian WBCB (TP2WB Kota Yogyakarta) 3. Travel Heritage 4. Rehab BCB dan BWB 5. Publikasi Pusat Informasi Kalang 6. Kajian Warisan Budaya	1. 20 Naskah 2. 120 Rekomendasi 3. 1 Kali 4. 2 bangunan 5. 1 paket 6. 2 Dokumen						
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	14.18%	01. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. 1 kali	Dukungan 4,52 % Terhadap Capaian Presentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan dengan target 12,21 %	100 %	Rp. 5.799.414.200,00	Rp. 4.943.360.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	2. 1 even						
							03. Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	3. 4 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							BIRO INSFIL 1. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan Geohéritage DIY 2. Monev Pengelolaan Geohéritage DIY 3. Kajian Rencana Induk Pengembangan Geohéritage DIY 4. Film Dokumenter Geohéritage DIY	1. 8 (delapan) kali, @50 orang 2. 1 (satu) Dokumen Laporan Monev Pengelolaan Geohéritage DIY 3. 1 (satu) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Geohéritage DIY 4. 20 (dua puluh) Film Dokumenter Geohéritage DIY						
							BPBD DIY : DED untuk Mitigasi Bencana melalui Penguatan Struktur Bangunan Cagar Budaya DIY	1 Dokumen						
3.03.1.22.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA										Rp. 97.782.766.800,00	Rp. 144.075.000.000,00		
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	10.29%	DISBUD BTL Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1 Kali	-	-	Rp. 82.662.766.800,00	Rp. 119.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2Taman	DISBUD KP 1. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman Budaya 2. Pengadaan Sarana Prasarana : - Genset - Mebeler dan Alat Perkantoran - Peredam Suara Akustik dan Rock Wall Exhibition - Alat Pemadam Kebakaran - Colt Pick-Up 3. Kulon Progo Manekowarno 4. Art for Children Kulon Progo 5. Pentas Band 6. Pentas Ketoprak 7. Pentas Sendratari 8. Pentas Seni Sepanjang Tahun	1. 12 bulan 2. - 2 unit - 1 paket - 1 unit - 5 buah - 1 unit 3. 1 event 4. 180 kali 5. 5 kali 6. 5 kali 7. 5 kali 8. 32 kali						
							DISBUD SLM 1. Sayembara DED Taman Budaya Sleman 2. Penyusunan DED Taman Budaya (dilaksanakan oleh DPUPKP)	1. 1 kali 2. 1 dokumen						
							GK 1. Pembangunan Taman Budaya (Multiyears tahun ke-3) 2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor taman budaya 3. Tersedianya sarana dan prasarana Taman Budaya Gunungkidul 4. Tersedianya fasilitas kesenian dan kebudayaan di Taman Budaya Gunungkidul 5. Gelar Seni - Gelar Kesenian Kolosal - Gelar Seni Sepanjang Tahun (GSST)"	1. 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. - 1 kali - 5 even"						
3.03.1.22.01.00.18.002	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	10.29%	01. Bimbingan Seni Anak	1. 30 kali, 1 kali pentas	-	-	Rp. 15.120.000.000,00	Rp. 25.075.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2Taman	02. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa bagi pemula	2. 2 even						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03. Terselenggaranya Pentas Seni di Taman Budaya	3. 1 even (seni sepanjang tahun) 10 kali, 1 event (musik malam 10 KALI)						
							04. Temu Karya Taman Budaya	4. 1 kali (Pontianak)						
							05. Edisi Majalah Matajendela	5. 2000 eksemplar majalah						
							06. Buku seni yang terdistribusikan	6. 1500 buku (3 judul)						
							07. Pendokumentasian	07. 15						
							08.Publikasi kegiatanTaman Budaya	8. 2 jenis media publikasi (IT, media cetak)						
							09. Pasar Kangen	9. a. 1 even Pasar Kangen b. 1 even pentas tradisi Pasar Kangen						
							10. Pemeliharaan Taman Budaya	10. 1 unit lift barang						
							11. Pembangunan Gedung Kesenian Tahap I (Konstruksi Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Tahap 1 Struktur dan Kantor Lantai 1)	11. 1 gedung						
							12. Penyajian (even seni masyarakat)	12. 300 even						
3.03.1.22.01.00.19	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 41.656.357.200,00	Rp. 28.943.360.000,00		
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	25jumlah pelayanan	01. Sarpras perkantoran	1. 20 jenis (perkantoran dan persiapan Balai)	Lancarnya aktivitas perkantoran di Dinas Kebudayaan DIY dan KPA	100 %	Rp. 9.700.000.000,00	Rp. 4.943.360.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Pemeliharaan	2. 1 jenis						
							03. Kendaraan Pameran Keliling Museum	3. 1 Unit						
							04. Sarpras Permuseuman	4. 36 set komputer						
							05. Pengadaan Tata Pamer Museum	5. 2 Unit						
							BANHUBDA DIY : Pemeliharaan Gedung Adat	1 Jenis						
							DISBUD KP Belanja hibah alat kesenian	1. 6 paket gamelan besi 2. 6 paket pakaian jathilan 3. 6 paket alat musik hadrah						
3.03.1.22.01.00.19.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	25jumlah pelayanan	01. Gamelan Kuningan	1. 20 gamelan	Lancarnya Aktivitas Perkantoran di Dinas Kebudayaan dan KPA	100 %	Rp. 14.860.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. perunggu	2. 5 gamelan						
							03. Pakaian seni	3. 65 set						
							04. Alat seni	4. 55 set						
							05. Gamelan Besi	5. 20 Gamelan						
							DISBUD SLM 1.Hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1. 4 pokmas						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	25jumlah pelayanan	01. Langganan Bandwidth Pemda DIY	1. a. 75 UMKM b. 438 desa c. 253 instansi	Tersedianya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebesar 100% untuk peningkatan kapasitas media informasi digital dan pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu	100 %	Rp. 17.096.357.200,00	Rp. 19.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. CCTV dan Peralatan Wifi Acces Point Malioboro terpelihara	2. 30 CCTV; 10 AP						
							03. Peralatan Videotron terpelihara	3. 2 unit						
							04. Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC terpelihara	4. 2 ruang						
							05. Network Operations Center (NOC) dan Jaringan Kepatihan terpelihara	5. 23 lokasi						
							06. Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal	6. 50 lokasi						
							07. Cyber Security Festival	7. 1 kegiatan						
							08. Pengembangan sarana pengamanan Siber Pemda DIY	8. 1 Paket						
							09. Pelatihan dan Pendampingan untuk lokasi WIFI Pemberdayaan Masyarakat	9. 60 lokasi						
							10. Pembuatan Konten Tentang Keistimewaan Yogyakarta	10. 12 produk video						
							11. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masterplan JSP	11. 1 Dokumen						
							12. Kajian Pengembangan Digital Creative Park	12. 1 Dokumen						
							13. Pemeliharaan E-Payment tempat wisata	13. 1 Alat						
							14. Pagelaran TIK	14. 1 Pagelaran						
							15. Sosialisasi JSP dan JSA	15. 6 Kali						
							16. JSP Data Warehouse	16. 1 Aplikasi						
3.03.1.22.01.00.20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 5.350.000.000,00	Rp. 11.000.000.000,00		
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibanding jumlah seluruh program dan kegiatan	99.08%	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1 Dokumen	Dukungan 16,67Terhadap capaian realisasiPelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan dengan target 99,06 %	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n	30kerjasama								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibanding jumlah seluruh program dan kegiatan	99.08%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urisan Kebudayaan TW I, II, II dan IV	4 Dokumen	Dukungan 10,00 % terhadap Capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan dengan terget 99,08 %	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n	30kerjasama								
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Lokasi di DIY	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibanding jumlah seluruh program dan kegiatan	99.08%	01. pentas MSO	1. 1 event (seleksi, pelatiham musik dan workshop, pentas)	Dukungan 73,33 % Realisasi jumlah kerjasama dengan Mitra Budaya dengan Target 20 Kerjasama	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n	30kerjasama	02. Penguatan Organisasi	2. 10 kali						
							03. Kemitraan	3. 1 kali						
							04. Residensi	4. 10 orang						
							05. Karnval Pencak Silat	5. 1 event						
							06. Sumonar	6. 1 event						
3.03.1.22.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN										Rp. 5.226.000.000,00	Rp. 6.704.475.000,00		
3.03.1.22.01.00.23.002	Pengelolaan Arsip Bemilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	1200Berkas	01. Perawatan dokumen arsip Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan JPU dengan penghilangan asam dan laminasi, Mickrofilm JAPENDI	1. 8000 lembar , 8000 buah	Bertambahnya khasanah Arsip hasil Alih Tulisan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1	Rp. 2.890.500.000,00	Rp. 4.147.200.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Pameran Kearsipan	2. 2 kali						
							03. Restorasi Arsip Kartografi (1)	3. 500 lembar						
							04. Pengolahan arsip tekstual Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman (2)	4. 2500 berkas arsip tekstual						
							05. Fasilitasi Restorasi Perawatan Mandiri	5. 750 lembar						
							06. Dokumentasi Sejarah Lisan	6. 1 dokumen						
							07. Alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari Jawa ke Latin	7. 1750 lembar						
							08. Alih bahasa Arsip Kraton Yogyakarta (Tahun 2014) dari Jawa ke Indonesia	8. 335 lembar						
							09. Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip	9. 1 tema						
							10. Cetak manuskrip hasil akuisisi dari British Library (3	10. 3 judul, @ 2 eksemplar						
							11. Alih Media arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	11. 40.000 data/ lembar						
							12. Wisata Sadar Arsip Puro PA, Kraton Yogyakarta dan Diorama Kearsipan	12. 1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.23.003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	1200Berkas	01. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1. 5 desa	1.Pemberdayaan masyarakat desa melalui perpustakaan, Pengelolaan perpustakaan sesuai standar perpustakaan 2.Bertambahnya usia arsip dan bahan pustaka serta kemudahan dalam memanfaatkan arsip dan bahan pustaka 3. Pengolahan Bahan Pustaka Koleksi Keraton Siap Layan Dukungan terhadap capaian jumlah Arsip/Naskah kuno Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi dibandingkan dengan target capaian	100 %	Rp. 2.335.500.000,00	Rp. 2.557.275.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Perawatan bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten	2. 100.000 eks						
							03. Fumigasi ruang arsip dan perpustakaan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	3. 2.808,602 m3						
							04. Termitt control ruang arsip dan perpustakaan di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	4. 731 m2						
							05. Perbaikan buku rusak koleksi Kraton	5. 1000 buku						
							06. Pengolahan bahan Pustaka Koleksi Perpustakaan Keraton	6. 2000 eks						
							07. Bedah naskah-naskah kuno koleksi langka DPAD DIY	7. 10 naskah						
							08. Kotak Pelindung	8. 1500 buku						
							09. Library Tour untuk Pelajar di Ghratama Pustaka dan Lomba Literasi Budaya Jawa	9. 10 kali						
3.03.1.22.01.00.24	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA										Rp. 26.696.692.400,00	Rp. 11.500.000.000,00		
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	46.74%	01. Misi Kesenian Pelajar	01. 1 kontingen	-	-	Rp. 7.568.692.400,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Gladi Kawruh	02. 8 episode						
							03. Ngudar Kawruh Tembang	03. 10 episode						
							04. Gerakan Seniman Masuk Sekolah	04. 20 sekolah, 4 jenjang						
							05. Penyusunan peta jalan pendidikan berbasis budaya	05. 1 dokumen						
							06. Yogyakarta Teachers’ Learning	06. 10 guru						
							07. Yogyakarta Young Leader (Pertukaran pelajar ke Victoria Melbourne)	07. 30 siswa						
							08. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah	08. SMK N/S 217, SMA N/S 168, SLB N/S 70						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							09. Festival Budaya Pendidikan Khusus	09. 79 SLB						
							10. ToT Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Bagi Guru	10. 3 Angkatan						
							11. Pengembangan Model PAUD	11. Pelayanan PAUD Percontohan 3 lembaga (KB Bina Buah Hati; TPA Bina Buah Hati; TPA Amongputra Kepatihan)						
							DIKPORA GK Guru mampu mengimplementasikan muatan lokal membuatik	30 sekolah @2 guru						
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	46.74%	Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan budaya 3 prodi, rehab gedung dan perlengkapan	- 3 Prodi (Kriya Kulit; Tari; dan Karawitan) - 1 Unit (Rehab gedung latihan mandiri)	-	-	Rp. 5.200.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.24.004	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	46.74%	01. Penyediaan peralatan auditorium SMKN 2 Kasihan	01. 4 jenis peralatan	-	-	Rp. 13.928.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Penyediaan mebelair auditorium SMKN 2 Kasihan	02. 3 jenis mebelair						
							03. Penyediaan perlengkapan auditorium SMKN 2 Kasihan	03. 1 jenis perlengkapan						
							04. Rehab SMKN 3 Kasihan	04. 1 unit museum, galery dan MEP						
							05. Laboratorium Seni dan Budaya	05. 2 lab seni dan budaya						
							06. Alat Kesenian Gamelan	06. 3 set gamelan						
3.03.1.22.01.00.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA										Rp. 39.249.907.000,00	Rp. 60.150.000.000,00		
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	01. Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	1. 8 desa	-	-	Rp. 3.050.485.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							02. Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	2. 21 desa						
							03. Lumbung Mataraman Expo	3. 12 bulan						
							04. Lomba Lumbung Mataraman	4. 12 bulan						
							05. Pasar produk Lumbung Mataraman	5. 2 kab						
							DINAS PERTANIAN SLM 1. Pembinaan KWT lumbung mataraman 2. Pelatihan Lumbung mataraman	1. 4 Kelompok 2. 4 Angkatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	DINPAR 1).Event Skala Lokal : Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Pameran Sekaten, Bergodho Keprajuritan Kraton, Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara, Festival Desa Wisata Tingkat DIY, Gelar Potensi dan Pesona Desa/ Kampung Wisata, Pembinaan dan Pendampingan Dimas Diajeng, Bakti Saka Pariwisata, Management event 2). Event Skala Nasional : Jelajah Alam Kawasan Mangunan Imogiri, Royal Mataram Festival, Festival Geopark, Love n Laugh Festival, Simfoni Keroncong Pelesir, Festival Reog Jathilan, Ngayogjazz, Jogja Fashion Carnival, Parade Gamelan Nusantara, Malioboro Night Festival, Jogja Heboh Fashion Carnival, Jogja Tourism Day, Keroncong Kotagede, Jogja Forum Festival 3). Event Skala Internasional : Jogja Batik Carnival, Jogja International Street Performance, Jogja International Heritage Walk, Jogja Day, Asia Tri Jogja, Festival Layang Layang Internasional	1).17.500 peserta 2). 17.000 peserta 3). 6.800 peserta	-	-	Rp. 20.746.613.500,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							DINPAR BTL 1. Festival Lampion 2. Festival Fashion Street 3. Njlajah Bantul Milang Kori	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan						
							DINPAR GK: Even atraksi wisata dalam rangka liburan di kawasan ODTW	3 event di 3 ODTW						
							DINPAR SLEMAN : 1. Atraksi Seni Event Khusus 2. Pemasangan Seni instalasi di desa wisata	1. 10 kali 2. 5 desa wisata						
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	DISPERINDAG DIY 1. Fasilitas sertifikasi produk biofarmaka (PIRT dan HALAL) 2. Pameran Batik Jogja 3. Pameran Gelar Batik Nusantara 4. Jogja Fashion Week 5. Pembangunan Workshop Gamelan 6. Pameran Seni Kriya 7. Pesta Rakyat Jogja Heboh 8. Pelayanan HKI produk budaya Yogya 9. Pameran Kraton 10.Temu Kemitraan Produk Khas Jogja	1. 10 IKM 2. 150 IKM 3. 10 IKM 4. 150 IKM 5. 1 UNIT 6. 150 IKM 7. 150 IKM produk ekspor dan kuliner 8. 12 paket, 5 kelas, 150 IKM 9. 1 kali 10. 1 kali	-	-	Rp. 11.889.255.500,00	Rp. 22.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							DISPERINDAG GK : 1. Gelar Potensi 120 UMKM Gunungkidul 2 Lomba Desain Batik Pengembangan Motif Walang	1. 1 event 2. 6 Nominasi Pemenang						
							Disperindag SLEMAN : Sekolah Pasar Rakyat	2 Pasar Rakyat						
3.03.1.22.01.00.25.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kesehatan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	BTL Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	10 Puskesmas	-	-	Rp. 1.213.553.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							DINKES DIY 1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Perawat RS dan Puskesmas terlatih Akupresur 6. Dokter RS Puskesmas Terlatih Jamu/Herbal 7. Terkoordinasi (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan Layanan Kesehatan Tradisional 8. Pengembangan Yankestrad Di Tempat Pariwisata 9. Komitmen Asosiasi Kesehatan Tradisional	1. 2 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 3 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 1 Dokumen						
3.03.1.22.01.00.25.006	Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	1. Sumur Bor	1 Lokasi	Sumur Bor	1 Lokasi	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 6.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.22.01.00.25.008	Pengembangan Budaya Bahari	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.13%	1. Gelar Produk Perikanan dan Kelautan (Pameran produk kelautan dan perikanan; lomba masak ikan tingkat provinsi; lomba mewarnai dan menggambar tingkat SD)	1. 1 kali	-	-	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Penumbuhan Desa Pesisir (Sosialisasi Desa Pesisir; Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan dan Pelatihan Perikanan Tangkap)	2. 1 buah						
							3. Penumbuhan Jiwa Bahari (Sosialisasi Budaya Bahari; Seminar Penumbuhan Jiwa Bahari; Bersih Pantai; Sepeda Bahari; Lomba Mancing; Lomba Produktivitas Nelayan, dan Kemah Bahari)	3. 1 Paket						
3.03.1.22.01.00.26	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA										Rp. 285.892.245.780,00	Rp. 64.720.000.000,00		
3.03.1.22.01.00.26.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	01. pendampingan desa budaya (5 aspek)	1. 112 orang	-	-	Rp. 26.000.000.000,00	Rp. 42.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	02. Peningkatan SDM	2. 450 orang						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	03. Sarpras Desa Budaya	3. 10 gamelan, 15 desa pakaian pengrawit, 5 Balai Budaya						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	04. Maestro Masuk Desa	4. 3 Maestro untuk 3 desa						
							05. gelar Potensi	5 . 3 even (8 kali even desa, 112 even di bandara, 8 kali even selasa wagen)						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Akreditasi Desa Budaya	6. 1 Kali						
							07. Fasilitas Upacara Adat	7. 56 desa						
							08. fasilitas desa mandiri Budaya	8. 5 desa budaya						
3.03.1.22.01.00.26.002	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	DISBUD BTL 1.Rintisan Desa Budaya 2. Workshop Perfilman Rintisan Desa Budaya 3. Festival Rintisan Desa budaya	1. 10 desa 2. 1 kali 3. 1 kali	-	-	Rp. 5.762.894.380,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	DISBUD GK : Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	22 desa						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	DISBUD KOTA YK 1. Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) 2. Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) 3. Digitalisasi Profil Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	3 kali 1 kali 1 dokumen						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	DISBUD KP 1. Gelar Potensi Desa Kantong Budaya 2. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 3. Pengadaan Gamelan Besi 4. Pembinaan Rintisan Desa Budaya dan Desa Kantong Budaya	1. 52 Desa 2. 21 desa 3. 25 set 4. 6 hari						
							DISBUD SLM 1. Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi 2. Sarasehan dan dialog Kecamatan Pusat pemajuan Kebudayaan	1. 32 Desa 2. 5 Kecamatan						
3.03.1.22.01.00.26.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	A. Pembinaan Seni Rupa 1. Lomba Lukis DIY Kyoto 2..Workshop dan Lomba Komik 3.Moekti 4.ARTJOG 5.Jogja Street Sculpture Project 6. Pekan Seni Grafis Yogyakarta	A. Pembinaan Seni Rupa 1. 150 orang 2.100 orang 3. 4 sekolah SLB DIY 4.1 Event 5.1 Event 6.1 Event	-	-	Rp. 14.668.135.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	B.Pembinaan Seni Pertunjukan 1.Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMII) 2.Audisi dan Pengiriman GBN 3.Aubade 4. Festival Tingkat Nasional Kemendikbud (tari, teater musik) 5.Pengiriman Parade Teater TMII 6. Pekan Budaya Tionghoa 7. Pengiriman Festival Sriwijaya	B. Pembinaan Seni Pertunjukan 1.1 kali 2.1 kali 3.1 Event 4.3 Event 5.1 Event 6. 1 event 7. 1 kali						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	C.Pembinaan Perfilman 1.Pembuatan Film 2.Pemutaran Film di Desa / Kelurahan dan Bioskop Jum'at 4.Workshop dan Festival Pengembangan Perfilman	C.Pembinaan Perfilman 1. 5 kali 2. 75 kali 3. 3 kali,						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	DISBUD BTL: 1.Lomba Lukis Kyoto-DIY 2. Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop pembuatan Film, Lomba Film)	1. 300 peserta 2. 100 peserta						
							DISBUD KP 1. Lomba Lukis DIY -Kyoto 2. Pembinaan Senirupa 3. Pameran Seni Rupa Rupaku 4.Sekolah Film 5. Festival Film se Jawa-Bali	1. 1 event 2. 1 hari 3. 1 hari 4.1 kelompok 5. 1 kali						
							DISBUD SLM 1. Apresiasi Masyarakat terhadap seni budaya konteporer dan tradisi . 2. Lomba Lukis Kyoto DIY	1. Pembinaan sanggar (10 Kelompok) 2.Lomba Lukis Kyto DIY 300 perserta						
							GK 1. Seleksi Lomba Lukis DIY-Kyoto 2. Pembinaan Seni Perfilman di Gunungkidul	1. 400 orang 2. 20 film						

1009

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							GK Penghargaan untuk pelestari seni dan budaya	8 penerima (Seniman dan Budayawan)						
							KOTA: Penghargaan Seniman, Budayawan, Pelestari Warisan Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	6 Orang untuk semua kategori						
3.03.1.22.01.00.26.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1. Pentas Seni	1. 1 even	-	-	Rp. 10.357.480.540,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Pameran	2. 3 event pameran						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3. Pawai	3. 1 even pawai						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4. pasar seni	4. 1 even pasar seni						
							DISBUD BTL 1. Pentas Seni 2. Pawai Seni 3. Pasar seni	1. 6 kali 2. 2 kali 3. 1 kali						
							DISBUD KP 1. Pameran Seni 2. Pawai Seni 3. Pentas Seni	1. 1 event 2. 1 kali 3. 5 kali						
							DISBUD SLM Dukungan untuk: 1. Pentas Seni 2. Pawai Seni 3. Pasar Seni	1. 4 Kelompok 2. 5. Kelom[pok 3. 1 Kali						
							GK 1. FKY Gunungkidul 2. Dukungan untuk FKY DIY (pentas seni, pawai, dan pasar seni)	1 even 1 even						
							KOTA: Pentas Seni FKY Tingkat Kota Dukungan untuk FKY Tingkat DIY : Pawai Pasar Seni Pentas Seni	5 hari - 1 hari 18 hari 2 kali						
3.03.1.22.01.00.26.007	Gelar Budaya Jogja	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1.Gelar Budaya Catur Sagatra.	1. 1 Event	-	-	Rp. 26.413.291.120,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2.Festival Berjenjang DIY (karawitan, Langencarito, Sendratari, Ketoprak, Teater)	2. 5 Event						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3.Festival Antar Sanggar Se-DIY (Tari).	3. 1 Event						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4.Jogja Gamelan Festival.	4. 1 Event						
							5.Pergelaran Tari Klasik Gaya Yogyakarta (Wayang Wong, Menak)	5. 2 Event						
							6.Pekan Budaya Diffabel.	6. 1 Event						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Pembinaan Tari	7. 1 even						
							DISBUD BTL 1. Pengiriman Festival Jathilan ke DIY 2. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten Bantul 3. Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY 4. Pengiriman Sendratari ke DIY 5. Pengiriman Festival Reyog Keprajuritan ke DIY 6.Festival Teater Tingkat Kabupaten Bantul 7. Pengiriman Festival Teater ke DIY 8. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten Bantul 9. Pengiriman Festival Karawitan ke DIY 10. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY 11. Festival Keroncong 12. Festival Paseban	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali 11. 1 kali 12. 1 kali						
							DISBUD KP 1. Pembinaan Kethoprak 2. Pembinaan Langen Carita 3. Pembinaan Dalang 4. Festival Padhang Mbulan 5. Pengiriman Kontingen Festival Sendratari 6. Kolosal Api di Bukit Menoreh 7. Sendratari Sugriwo Subali 8. Menoreh Art Festival (Menoreh Carnival & Kulon Progo Fashion Day Carnival)	1. 1 kegiatan 2.1 kegiatan 3. 1 kegiatan 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 event 7. 3 kali 8. 1 paket						
							DISBUD SLM 1. Festival Garis Imajiner	1. 1 Event						
							GK 1. Pembinaan Kethoprak 2. Pembinaan Langen Carita 3. Pengiriman Tim Seni Sendratari daerah tingkat DIY 4. Pembinaan Teater Tradisi 5. Pembinaan Festival Reog dan Jathilan (Dhaksinarga Festival) 6. Pembinaan Festival Campursari Gunungkidul (Dhaksinarga Festival) 7. Pembinaan Karawitan	1. 1 even 2. 1 even 3. 1 tim 4. 1 even 5. 1 even 7. 1 even 8. 1 even						
							KOTA: 1. Sekar Rinonce 2. Festival Kethoprak Tingkat Kota 3. Festival Karawitan Tingkat Kota 4. Festival Langen Carita Tingkat Kota 5. Festival Teater Tingkat Kota 6. Pengiriman Festival Tingkat DIY (Sendratari, Teater, Langencarita, Kethoprak, Karawitan)	1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event 4. 1 event 5. 1 event 6. 5 jenis						
3.03.1.22.01.00.26.008	Publikasi seni budaya dan daerah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	01. Ketoprak Sayembara	1. 20 event	-	-	Rp. 9.090.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	02. Citra Jogja	2. 12 event						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	03. Jogja Semesta	3. 10 event						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	04. Kuncung Bawuk	4. 24 event						
							05. Angkringan	5. 12 event						
							06. Muhibah Budaya	6. 3 kali						
							07. Majalah Budaya	7. 12 Edisi						
							08. Ketoprak Radio	8. 5 even						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							09. Digitalisasi Film	9. 10 film						
							10. liputan budaya	10. 150 kali terbit						
							11. Sarasehan Media Budaya	11. 10 kali						
							12. pasar Budaya	12. 48						
							13. Launching agenda budaya	13. 1 kali						
							14. ketoprak lintas generasi	14. 5 even						
							15. ketoprak tobong	15. 5 even						
							16. Ketoprak mataram	16. 5 even						
							17. Promosi Budaya	17. 2 kali terbit/tayang						
							18. wayang kancil	18. 10 kali						
							19. Kompetisi sosmed	19. 12 even						
							20. dialog Budaya	20. 11 kali						
							21. reaktualisasi arsip dan pustaka	21. 11 kali						
							DISBUD BTL 1. Publikasi Melalui Media Elektronik 2. Publikasi Melalui Media Cetak 3. Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	1. 5 kali 2. 2 kali 3. 1 dokumen						
							DISBUD KP Siaran TV Outdoor dan Indoor	7 event						
							DISBUD SLM 1. Siaran Langsung Radio 2. Talk Show TV Lokal 3. Liputan TV Lokal 4. Publikasi radio 5. Penerbitan nomor induk kebudayaan 6. Dokumentasi kebudayaan 7. Majalah bahasa Jawa 8. sosialisasi tata nilai budaya lokal sleman	1. 6 kali 2. 4 kali tayang 3. 2 kali tayang 4. 20 kali tayang 5. 100 kelompok 6. 10 Kali 7. 2 Edisi 8. 3 Kali						
					3.03.1.22.01.00.26.009	Selendang Sutera	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Gelar Budaya Etnis	2. 5 hari						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3. Karnaval Budaya	3. 1 kali						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4. Kemah Budaya	4. 3 hari						
							5. Pentas Enkulturas Budaya	5. 1 kali						
							6. Jelajah Budaya	6. 1 kali						
							7. Pentas Seni Budaya Nusantara	7. 1 kali						
3.03.1.22.01.00.26.010	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1. Puncak Ritual Wayang Kulit Kepatihan	1. 1kali	-	-	Rp. 6.263.613.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2. 3 kali						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3. Festival Upacara Adat	3. 1 kali						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4. Gelar Adat Tradisi, dan Penghayat ke Luar Daerah	4. 4 kali						
							5. Fasilitasi Puncak Ritual Masyarakat dan Kelompok Penghayat	5. 20 kali						
							6. Lomba Permainan Tradisional	6. 1 kali						
							DISBUD BTL: Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2 kali						
							DISBUD KP 1. Nyadran Agung 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan 3. Peningkatan SDM Upacara Adat	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali						
							DISBUD SLM 1. Upacara Adat yang merupakan Kalender Event Kabupaten 2. Kegiatan Tradisi yang bersifat keagamaan 3. Fasilitas dan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan 4. Tradisi Ruwahan/Sadranan 5. Pengiriman Bregada Narakarya ke Kraton Yogyakarta 6.Terlaksananya Festival Alat transportasi Tradisional	1. 12 Event (Bekaka,Mbah Demang,Batok Bolu,Wonolelo,Labuhan Merapi,Tuk Sibedug,Mbah Bregas,Tunggul Wulung,Merti Bumi Kaliurang, Ngrowod,Saparan Kwagon, Tunggul Arum) 2. 3 Lokasi						
							GK 1. Sarasehan dan Jamasan Tosan Aji 2. Gelar Upacara Adat Labuhan 3. Fasilitasi Kegiatan MLKI	1. 1 kali 2. 1 kali 3 3 kali						
		KOTA: 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY 2. Jamasan Pusaka 3. sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) 4. Gelar upacara Adat dan Tradisi	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 10 kali											
3.03.1.22.01.00.26.011	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	01. Pentas Pembinaan Wayang Gagrak Yogyakarta: 1. Pentas Wayang Klasik di sasono Hinggil Yk 2. Pentas Represantasi Pembinaan Pedalangan 3. Pentas Pengembangan Pedalangan 4. Muhibah Budaya ke Luar DIY 5. wayang wong gagrak Jogja	A. 1. 12 kali 2. 12 kali 3. 10 kali 4. 3 Kali 5. 5 kab/kota	-	-	Rp. 22.608.857.200,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	02. PEMBINAAN PEDALANGAN: 1. Workshop Pedalangan 2. Sarasehan Pedalangan 3. Seleksi Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY dan Pengiriman Tingkat Nasioal	B. 1. 15 kali 2. 10 kali 3. 2 event						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	03. Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Nilai Budaya DIY 1. Sosialisasi Tata Nilai 2. Pelatihan Tata Nilai Budaya DIY	C. 1. 5 Kab/Kota 2. 5 kab/kota						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	04. WARISAN BUDAYA TAK BENDA 1. Pencatatan, Inventarisasi , Penetapan 2. Perayaan WBTB di DIY 3. Perayaan WBTB di Jakarta 4. JIHF 5. Perayaan Hari Wayang Dunia 6. Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang dan Keris	D. 1. 6 Dokumen (DIY dan 5 kab/kota) 2. 1 event 3. 1 even 4. 1 event 5. 1 event 6. DIY dan 5 kab/kota						
							05. Penguatan Dewan Kebudayaan	E. Fasilitasi DK DIY 1 Tahun						
							DISBUD BTL: 1. Jumlah Pagelaran Wayang Kulit 2. Jumlah Pembinaan Wayang Kulit 3. Festival Dalang Cilik dan Remaja Tk. Kabupaten dan DIY 4. Kajian Warisan Budaya Tak Benda 5. Festival Olahraga Tradisional 6. Pengembangan Tari Nini Thowong 7. Sarasehan DKB	1. 20 kali 2. 2 kali 3. 2 kali 4. 1 dokumen 5. 1 kali 6. 4 kali 7. 8 kali						
							DISBUD KP 1. Wayang Masuk Sekolah 2. Pengembangan Kethoprak Lesung	1. 12 kali 2. 12 kali						
							DISBUD SLM 1. Dewan Kebudayaan Sleman 2. Pembinaan Wayang Kulit 3. Revitalisasi Seni 4. Festival Kesenian Sleman 5. Festival Dalang Anak dan Dalang Muda Tk Kabupaten 6. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Muda Tk DIY 7. Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa 8. Repertoar Tari HUT Kabupaten Sleman 9. Pentas di Area Publik 10. Pentas di Gedung Kesenian	1. 2 rekomendasi 2. 20 event 3. 1 Materi Seni 4. 21 Grup 5. 2 Kali 6. 1 Event 7. 20 kali						
							GK 1. Kajian WBTB Gunungkidul 2. Perayaan WBTB 3. Tata Nilai Budaya 4. Festival Permainan Tradisional 5. Pembinaan Pedalangan 6. Pentas ketoprak 7. Pagelaran Sholawat Jawa 8. Pagelaran Hadrah 9. Pagelaran Toklik 10. Penguatan Dewan Kebudayaan	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 20 bimtek 4. 1 kali 5. 6 even 6. 4 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 2 kali						
							KOTA: 1. Pagelaran Wayang 2. Fes. Dalang Anak Tk.Kota 3. Fes. Dalang Remaja Tk. Kota 4. Rumaket (Ruang Masyarakat untuk Ketemu) 5. Kajian Warisan Budaya Tak Benda 6. Diseminasi Nilai Budaya 7. Pembuatan Film Animasi nilai budaya	1. 3 event 2. 1 event 3. 1 event 4. 1 kali 5. 2 dokumen 6. 2 kali 7. 1 film						
					3.03.1.22.01.00.26.012	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	DISBUD DIY Pentas Seni Budaya	380 kelompok						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	DISBUD KP 1. Promosi Budaya Jemparringan Mataraman 2. Promosi Permainan Nglarak Blarak : 3. Fasilitasi Saka Widya Budaya Bhakti : 4. Pentas Fasilitasi Forum Seni Budaya 5. Pentas Penggiat Seni Budaya 6.. Pentas Kelompok Seni Budaya	1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event 4. 15 forum 5. 15 Kali 6. 30 kali						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	DISBUD SLM Fasilitasi Kesenian	1. 150 Kelompok						
							GK 1. Gelar Seni Budaya di Hari Jadi Gunungkidul 2. Karawitan Jumat Legi 3. Jogedan Jumat Legen 4. Gelar Seni Tradisi	1. 5 hari 2. 10 kali 3. 10 kali 4. 40 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kota: 1. Pentas Godhong Apa-apa 2. Jemparingan	1. 6 kali 2. 1 kali						
3.03.1.22.01.00.26.013	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kraton dan Pura	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	1 tahun	-	-	Rp. 105.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%								
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa								
3.03.1.22.01.00.26.014	Gelar Seni Budaya Daerah	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Penghubung Daerah	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	01.Ketoprak	1. 3 event	-	-	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	02. Ketoprak Luar TMII	2. 1 event						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	03. Wayang Kulit Dalang Lokal	3. 2 event						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	04. Wayang Kulit Dalang Senior	4. 1 event						
							05. Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram	5. 2 event						
							06. Ekspresi Seni Tradisi Siaran Live Karawitan	6. 4 event						
							07. Pementasan Tari Luar TMII	7. 1 event						
							08. Pementasan Tari Dalam TMII	8. 2 event						
							09. Pementasan Tari Dalam TMII	9. 2 event						
							10. Lomba Tari di Yogyakarta	10. 1 event						
							11. Silaturahmi dengan Bpk. Gubernur DIY	11. 1 event						
							12. Kuliner Nusantara	12. 1 event						
							13. Pesona Budaya Nusantara	13. 1 event						
							14. Pementasan Operet Anak	14. 1 event						
							15. Gelar Seni Budaya	15. 1 event						
							16. Workshop karawitan Internasional	16. 1 event						
							17. Diklat Ketoprak, Tari, Karawitan	17. 1 event						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							18. Evaluasi Belajar Diklat	18. 1 event						
							19. Campursari	19. 3 event						
							20. Gelar Potensi Seni Budaya	20. 1 event						
							21. Gelar Citra Budaya	21. 1 event						
							22. Wayang Kulit HUT Paguyuban IKG	22. 1 event						
							23. Drama Tari Golek Menak	23. 1 event						
							24. Upacara Bergada Prajurit Kraton Yogyakarta	24. 11 event						
3.03.1.22.01.00.26.015	Pembinaan Jagawarga	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	KESBANGPOL BANTUL Terbentuknya Kelompok Jaga Warga	17 dusun	-	-	Rp. 2.198.798.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	KESBANGPOL DIY 1. Jumlah kelompok jaga warga terbina dan mampu menjalankan fungsinya 2. Pembinaan/Pendampingan/Pengembangan Kapasitas Jaga Warga 3. Rakor Movev	1. 400 kelompok jagawarga 2. 20 kali 3. 5 kab						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	KESBANGPOL GK 1. desa yang membentuk jaga warga	7 Kelompok Jaga Warga						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa								
3.03.1.22.01.00.26.016	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	01. Pelatihan SDM dan Lembaga WIsata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2021	01. 250 orang (5 lokasi @50 orang)	-	-	Rp. 1.279.040.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	02. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2020 (Tahap Pengembangan)	02. 250 orang (5 lokasi @50 orang)						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	03. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2019 (Tahap Kemandirian)	03. 150 orang (5 lokasi @30 orang)						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	04. Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Keistimewaan di Destinasi Wisata	04. 75 orang						
							DISPAR GK : Workshop Pengelolaan Desa Wisata	2 kali						
3.03.1.22.01.00.26.017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1. Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri budaya 2021 (Tahap Penumbuhan)	1. 5 Desa	-	-	Rp. 2.142.616.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri budaya 2020 (Tahap Pengembagan)	2. 5 Desa						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3. Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri budaya 2019 (Tahap Penguatan)	3. 5 Desa						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4. Pameran Produk UMKM Desa Mandiri Budaya	4. 1 Event						
							5. Pameran Produk UMKM	5. 10 kali						
3.03.1.22.01.00.26.018	Pengembangan Ekonomi Perempuan	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1. Peningkatan ekonomi keluarga di lokasi desa mandiri budaya	1. 2 desa mandiri budaya	-	-	Rp. 650.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Pembinaan Desa Prima Mandiri Budaya	2. 10 desa prima di Desa mandiri Budaya						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa								
3.03.1.22.01.00.26.019	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi (Grebeg syawal, grebeg besar, grebeg mulud, mubeng beteng, labuhan merapi, parangkusumo, syawalan abdi dalem dan syawalan prajurit)	1. 8 kali	-	-	Rp. 10.270.600.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%	2. Festival Kraton Nusantara	2. 1 kali						
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp	3. Workshopp dan Festival Bergodo	3. 1 kali						
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa	4. Solo Menari	4. 1 kali						
							DISBUD BTL 1. Jumlah Peristiwa Budaya - Hari Jadi Kabupaten Bantul - HUT RI - Kirab Apel Budaya Santri - Pentas wayang Akhir Tahun 2.Merti Dusun 3. Upacara Adat Tradisi	1. 4 kali 2. 22 kali 3. 15 kali						
							DISBUD KP 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi 2. Kontingen Festival Upacara Adat Kab.KP 3. Gebyar Pasar Tradisional	1. 76 kali 2. 1 kali 3. 1 paket						
							DISBUD SLM 1. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya Masyarakat 2. Pelatihan Komunitas Bregada Prajurit Tradisional	1. 65 (65=45 adat tradisi 20 lembaga) 2. 3 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 648.388.011.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							GK 1. Fasilitasi Upacara Adat 2. Fasilitasi Pramuka Widiya Bhakti Budaya 3. Sarasehan Kebudayaan	50 kali 4 kali 2 kali						
3.03.1.22.01.00.26.021	Revitalisasi Budaya Gotong Royong untuk pemberdayaan ekonomi desa	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Desa	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	Jumlah desa implementasi model global gotong royong	6 Desa 8 Kalurahan	Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model global gotong royong sebesar 100%	100 %	Rp. 327.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%								
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa								
3.03.1.22.01.00.26.022	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1. Pembangunan Manusia Unggul	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	DIY	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	29.67%	Terbentuknya kader Pembauran budaya di DIY	150 mahasiswa	Terbentuknya kader pembauran budaya di DIY	500 orang	Rp. 241.762.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	2%								
					Jumlah kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	390klp								
					Jumlah Desa Mandiri Budaya tahun n	15Desa								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)													
3.04.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.04.1.03.02.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 27.029.808.000,00	Rp. 4.850.000.000,00		
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	1. Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1 Dokumen	Dukungan 7,42% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 12.619 bidang	100%	Rp. 23.523.142.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen	10. Pemberkasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kab. Kulon Progo	100 Bidang						
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah	11. Pendaftaran Tanah Desa di BPN Kab. Kulon Progo	300 Bidang						
							12. Peta Bidang Tanah Desa di Kab. Kulon Progo	166 Bidang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							13. Penegasan Batas Desa Di Kab. Kulon Progo: - Pembuatan Peta Batas Desa - Berita Acara Kesepakatan - Pembuatan Pilar Batas Desa - pemasangan Pilar Batas Desa	5 Desa						
							14. Penegasan Batas Desa Di Kab. Gunung Kidul : - Pembuatan Peta Batas Desa - Berita Acara Kesepakatan - Pembuatan Pilar Batas Desa - pemasangan Pilar Batas Desa	14 desa						
							15. Pendaftaran Tanah Desa di BPN Kab. Gunung Kidul	500 Bidang						
							16. Peta Bidang Tanah Desa di Kabupaten Gunungkidul	500 Bidang						
							17. - Pembuatan Patok Bidang Tanah Desa di Kab. Gunung Kidul - Pemasangan Patok Bidang Tanah Desa di Kab. Gunung Kidul	10 Desa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							18. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN Kab. Gunung Kidul	1107 Bidang						
							19. Pendaftaran Tanah Desa di BPN Kab. Bantul	1000 Bidang						
							2. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di BPN Kota Yogyakarta	100 Bidang						
							20. Peta Bidang Tanah Desa di Kab. Bantul	500 Bidang						
							21. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN Kab. Bantul	500 Bidang						
							22. - Pembuatan Patok Bidang Tanah Desa di Kab. Bantul - Pemasangan patok bidang Tanah Desa di Kab. Bantul	10 Desa						
							23. Penegasan Batas Desa: - Pembuatan Peta Batas Desa - Berita Acara Kesepakatan - Pembuatan Pilar Batas Desa - pemasangan Pilar Batas Desa	5 Desa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Identifikasi 75 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta.	1 Dokumen						
							4. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN Kab. Sleman	300 Bidang						
							5. Pendaftaran Tanah Desa di BPN Kab. Sleman	800 bidang						
							6. Peta Bidang Tanah Desa di Kab. Sleman	500 Bidang						
							7. - Pembuatan Patok Bidang Tanah Desa di Kab. Sleman - Pemasangan Patok Bidang Tanah Desa di Kab. Sleman	10 Desa						
							8. Penegasan Batas Desa di Kab. Sleman : - Pembuatan Peta Batas Desa - Berita Acara Kesepakatan - Pembuatan Pilar Batas Desa - pemasangan Pilar Batas Desa	5 Desa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							9. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di BPN Kab. Kulon Progo	100 Bidang						
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	10.000 lembar	Dukungan 22,86% terhadap Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 52 dokumen	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	1. Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang telah bersertifikat	4944 Bidang	Dukungan 7,42% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 17.619 bidang	100%	Rp. 706.666.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen	2. Pengelolaan Basis Data Pertanahan dan Sistim Informasi Pertanahan - Updating Data Spasial Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah bersertifkkat dalam sistim informasi pertanahan - Klarifikasi Data pertanahan	- 4944 Bidang - 20 Desa						
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.15.004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	OPD DIY dan Kasultanan dan Kadipaten	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Meningkatnya pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 0,85% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 12.619 bidang	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.005	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	1. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	1 Dokumen	Dukungan % Terhadap Prosentasi kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen	2. Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan tanah	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.006	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	1. Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan	dokumen bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan	Dukungan 1 % terhadap meningkatnya tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	12619bidang tanah	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	1 dokumen	Dukungan 3,13% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudahdidaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanahkadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	52dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	50bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 3.316.440.000,00	Rp. 1.900.000.000,00		
3.04.1.03.02.00.16.001	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten tanah desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	peningkatan fasilitas penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1. Rekomendasi kepala DPTR DIY tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%	Dukungan% terhadap Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti berupa terbitnya Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang disampaikan kepada Gubernur hingga mencapai 100%	100%	Rp. 1.421.250.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	5000bidang tanah	2. Rekomendasi Kepala DPTR DIY tentang Ijin Pemanfaatan Tanah Desa	100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	15.31%	3. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	100%						
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	4. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Sleman	100%						
							5. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	100%						
							6. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di kabupaten Kulonprogo	100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di kabupaten Gunungkidul	100%						
3.04.1.03.02.00.16.002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	OPD DIY dan OPD Kabupaten/ Kota	peningkatan fasilitas penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1. Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	100%	1. Terlaksananya fasilitas penanganan permasalahan di DIY	1. 100%	Rp. 1.895.190.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	5000bidang tanah	2. Tersedianya data permasalahan tanah desa di 20 Desa	1 Dokumen permasalahan tanah desa di 20 Desa	2. Tersedianya data permasalahan Tanah Desa yang harus diselesaikan	2. 26 desa				
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	15.31%	3. Rekomendasi Walikota/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	100%						
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	4. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi)	1 Putusan Pengadilan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 30.346.248.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kab. Sleman	3 Desa						
							6. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kab. Bantul	5 Desa						
							7. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kab. Gunungkidul	5 Desa						
							8. Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kab. Kulonprogo	3 Desa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)													
3.05.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.05.1.03.02.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 5.891.088.000,00	Rp. 6.200.000.001,00		
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	40%	a.Tersedianya Matek RRTR : 1. Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi 2. Satuan Ruang Strategis Sokoliman 3. Satuan Ruang Strategis Girigondo 4. Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret 5. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan b.Tersedianya Peta Dasar, Tematik, dan Rencana 1. Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi 2. Satuan Ruang Strategis Sokoliman 3. Satuan Ruang Strategis Girigondo 4. Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret 5. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan c.Tersedianya Validasi Peta Dasar, Tematik, dan Rencana dari BIG 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; 2. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates; 3. Satuan Ruang	Tersedianya 5 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya	Dukungan % terhadap capaian	100%	Rp. 3.641.088.000,00	Rp. 4.200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul1. Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi 2. Satuan Ruang Strategis Sokoliman 3. Satuan Ruang Strategis Girigondo 4. Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret 5. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan							
							Penyusunan bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi	2 dokumen bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi(Temon - Prambanan, Pantai Selatan)						
3.05.1.03.02.00.15.002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Parangtritis dan Gumuk pasir Kabupaten Bantul	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	40%	RTBL Perbukitan Parangtritis	1 dokumen	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	40%	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Dukungan % terhadap capaian	100%	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	1 Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	40%	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan melalui: a. Sosialisasi b. Update SIPR	a. 4 desa; b. 1 sistem	Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.15.005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	40%	1. Bahan usulan program dan kegiatan urusan tata ruang 2021 2. Bahan usulan program dan kegiatan urusan tata ruang 2022 3. Bahan usulan program dan kegiatan urusan tata ruang 2023	1. 2 dokumen (Perubahan I dan II); 2. 1 dokumen; 3. 1 dokumen	Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 736.513.803.000,00	Rp. 18.035.137.507,00		
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	operasional dan pemeliharaan kebersihan kawasan Tugu Golong Gilig, Jl. Mangkubumi dan Jl. Pangurakan dan Alun-alun Utara secara fisik selama 12 bulan a. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan b. prasarana pendukung kawasan	Sarana dan prasarana kawasan	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 34.602.693.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan Malioboro	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km						
							Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan mangkubumi-pangurakan a. street furniture b. vegetasi c. pemolesan teraso/pedestrian d. air e. peralatan pendukung tenaga pemeliharaan f. prasarana pendukung kawasan	1. terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan mangkubumi-pangurakan						
							Operasional Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	Terjaganya fungsi Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra						
							Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	1 Dokumen Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan Dalam Rangka Penataan dan Pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten						
							Pedestrian Jalan Senopati	2400 m2						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro): 1. Petugas Jogo Margo 72 org 2. Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis 3. Sarana pendukung operasional petugas Jogo Margo (seragam 72 stel serta jas hujan 72 buah)	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis						
							Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	Terjaganya fungsi toilet titik nol						
							Penyusunan Dokumen Amdal, Andalalin dan Larap Plengkung Gading - Panggung Krapyak	Tersedianya Dokumen Amdal, Andalalin dan Larap Plengkung Gading - Panggung Krapyak						
							Rehab dan Pembangunan Gedung Kantor	1 unit						
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Perbukitan Menoreh	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	DED Jembatan di Ruas Jalan Temon - Borobudur (Kawasan Bedah Menoreh) - Fly Over Kebonrejo (560 M)	Tersedianya Jembatan di Ruas Jalan Temon - Borobudur (Kawasan Bedah Menoreh) - Fly Over Kebonrejo (560 M)	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 15.958.727.000,00	Rp. 18.035.137.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							DED Jembatan di Ruas Jalan Temon - Borobudur (Kawasan Bedah Menoreh) - Jembatan (5 buah/110 M)	Tersedianya DED Jembatan di Ruas Jalan Temon - Borobudur (Kawasan Bedah Menoreh) - Jembatan (5 buah/110 M)						
							Peningkatan Kapasitas Jalan Slanden - Bolon	1000 m						
							Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Bedah Menoreh (Temon - Borobudur)	Tersedianya Dokumen Lingkungan Jalan Bedah Menoreh (Temon - Borobudur)						
							Terlaksananya tahapan persiapan pengadaan tanah ruas Temon Borobudur (bedah Menoreh)	2 segmen						
3.05.1.03.02.00.16.008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	DED Jembatan di Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo - Jembatan (2 buah)	Tersedianya DED Jembatan di Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo - Jembatan (2 buah)	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 225.954.910.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pengadaan lahan ruas jalan prambanan-lemah abang	terbebaskan lahan ruas jalan prambanan-lemah abang tahap I 135.495m2						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perkotaan Yogyakarta	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (gramedia - Bethesda)	4400 m2	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 20.374.743.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang Ngalang (2.370 Km)	terlaksananya pembangunan ruas jalan dan jembatan Tawang - Ngalang (2,37 km)	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 86.475.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.03.02.00.16.011	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen Garongan - Congot (85.917 dari 138.504.38 m2)	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS Segmen Ngremang - Congot (garongan congot) seluas 85.917 dari 138.504.38 m2	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 350.370.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Tepus - Jerukwudel & Ngremang - Garongan di Kulon Progo	Terbayarnya SPS Tanah JJLS						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.16.017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	Penyusunan Dokumen IPL Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi - Planjan	Terbitnya IPL Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi - Planjan	Dukungan % terhadap	100%	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Girijati - Legundi	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Girijati - Legundi						
							Proses Pensertifikatan Tanah JJLS bidang (splitzing, ukur gabung dan permohonan hak)	Terbayarnya 399 SPS Splitzing & 110 SPS Ukur Gabung, 110 SPS Permohonan Hak Tanah JJLS						
3.05.1.03.02.00.16.018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Wates	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	18.61%	Penyusunan dokumen andalalin pembangunan terminal bus wates	1 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap pengembangan simpul transportasi dan perparkiran	100	Rp. 577.730.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Penyusunan dokumen UKL UPL pembangunan terminal bus wates	1 dokumen						
3.05.1.03.02.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS										Rp. 7.316.479.000,00	Rp. 2.529.234.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.03.02.00.17.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	65%	1. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis 2. Penyusunan dokumen keterpaduan program pada satuan ruang kawasan strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1. 1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang pada SRS; 2. 1 dokumen keterpaduan program pada SRS	Dukungan sebesar 50% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Rp. 6.616.479.000,00	Rp. 1.829.234.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							1. Terjaganya pemanfaatan Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis di Pantai Selatan Gunungkidul, Samas- Parangtritis, Gunung Merapi, Makam Girigondo dan Pantai Selatan Kulonprogo 2. Tertolongnya korban laka laut, gunung dan waduk pada Satuan Ruang Strategis di Pantai Selatan Gunungkidul, Samas- Parangtritis, Gunung Merapi, dan Pantai Selatan Kulonprogo	1. 1 laporan 2. 1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 749.721.370.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis: 1. Raker Permasalahan Pelanggaran Tata Ruang 2. Patroli di Kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis 3. Pembinaan terhadap pelanggaran pemanfaatan Tata Ruang pada Kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis 4. Operasi/Penertiban	1. 2 Kali; 2. 10 Bulan; 3. 2 Kali; 4. 47 Kali						
3.05.1.03.02.00.17.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	OPD DIY dan OPD Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	65%	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Dukungan Sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar ...%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,08	79,92 (pesimis); 80,46 (moderat); 81 (optimis)	81,40	79,74 (pesimis); 80,93 (moderat); 82,12 (optimis)	81,68	79,42 (pesimis); 81,40 (moderat); 83,37 (optimis)
2	Indeks Gini	0,3776	0,450 (pesimis); 0,432 (moderat); 0,414 (optimis)	0,3705	0,456 (pesimis); 0,438 (moderat); 0,420 (optimis)	0,3635	0,466 (pesimis); 0,441 (moderat); 0,416 (optimis)

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
					(optimis)		(optimis)
3	Persentase Angka Kemiskinan	9,11%	14,76 (pesimis); 12,57(moderat); 10,38 (optimis)	8,07%	13,41(pesimis); 11,22(moderat); 9,04 (optimis)	7,00%	13,27 (pesimis); 10,17(moderat); 7,08 (optimis)
4	Indeks Pemberdayaan gender	70,12	65,93 (pesimis); 70,04 (moderat); 74,15 (optimis)	70,22	64,30 (pesimis); 70,19 (moderat); 76,09 (optimis)	70,32	62,42 (pesimis); 70,35 (moderat); 78,29 (optimis)
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11.72%	11.72%	11.99%	11.99%	12.04%	12.04%
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,29%	0,66 (pesimis); 2,39 (moderat); 5,44 (optimis)	5,31%	3,27 (pesimis); 4,79 (moderat); 6,32 (optimis)	5,34%	3,29 (pesimis); 4,82 (moderat); 6,36 (optimis)
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,44	62,44	64,18	64,38	66,15	66,15
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5%	78%	81%	79,5%	82.5%	81%
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69%	35,60%	49,03%	39,72%	54,44%	49,12%
10	Indeks	0,4524	0,4738	0,4506	0,4740	0,4489	0,4743

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	Williamson		(pesimis); 0,4588 (moderat); 0,4439 (optimis)		(pesimis); 0,4579 (moderat); 0,4420 (optimis)		(pesimis); 0,4570 (moderat); 0,4399 (optimis)
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	A	A	A	A	A
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan	73,91	75	82,61	80	86,96	85
14	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419	11.728	17.619	15.188	21.877	18.877

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
Urusan Pendidikan							
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,22	n/a	58,30	n/a	58,41	n/a
2	Rata-rata hasil ujian	58,02	n/a	58,16	n/a	58,29	n/a

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	nasional SMK						
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,63%	98,63%
4	Capaian APK pendidikan Menengah	98,41	98,41	99,05	99,05	99,74	99,74
5	Capaian APK pendidikan khusus	83,36	83,36	84,93	84,93	86,50	86,50
	Urusan Kesehatan						
1	Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	68,86%	69,08%	70,87%	70,99%	73,12%	73,28%
3	Persentase Pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	65%	65%	70%	70%	75%	75%
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan kesehatan Paru	77,2%	77,2%	78,9%	82,9%	81,3%	84,6%
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	92,47%	97,61%	93,36%	97,69%	94,25%	97,79%
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	90,49%	91,30%	92,30%	93,68%	94,14%	94,58%
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	84,75%	84,75%	85,50%	85,50%	86,25%	86,25%
4	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	71,41%	70,61%	79,42%	71,61%	87,81%	73,61%
5	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	35,38%	31,60%	40,42 %	36,94%	44,49 %	40,90%
6	Peningkatan aksesibilitas Jalan	96,74%	97,74%	98,22%	98,82%	100%	99%
7	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	73,10%	72,80%	85,90%	86,35%	99,57%	99,57%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase Penduduk yang menempati tempat	96,16%	97,09%	96,83%	98,42%	97,50%	97,82%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	tinggal yang layak						
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,99	3,04	3,3	3,05	3,01	3,06
2	Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan	340	331	350	332	360	333
3	Indeks Ketahanan Daerah	74	74 (2,9)	77	77 (3,1)	80	80 (3,3)
Urusan Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42,17%	34,76%	43,08%	42,21%	44,28%	44,28%
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang	51,58%	33,44%	51,59%	51,59%	51,60%	51,60%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial						
Urusan Tenaga Kerja							
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	1575	1115	2100	2100	2625	2625
2	Jumlah kesempatan kerja	2.061.962	1.993.810	2.104.824	2.040.790	2.149.001	2.134.750
3	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	30	30	40	40	50	50
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45
Urusan Pangan							
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,52	94,80	90,82	94,10	91,12	94,70

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	39,74%	40,79%	39,19%	40,62%	38,65%	40,27%
Urusan Pertanahan							
1	persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	59,45%	54,9%	73,16%	64,22%	88,67%	81,17%
Urusan Lingkungan Hidup							
1	persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	94,39 %	98,70%	97,02 %	99,85%	100 %	100 %
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Jumlah instansi lembaga yang	10	10	13	13	15	15

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	memanfaatkan data kependudukan dan NIK						
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Umur menikah pertama perempuan	24.40	24,40	24.40	24,40	24.40	24,40
2	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98.00%	98,00%	98.00%	98,00%	98.00%	98,00%
Urusan Perhubungan							
1	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan tingkat pelayanan jalan	45,54%	47.92%	46.17%	48.54%	49,79%	49.79%
Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Peringkat Keterbukaan Informasi	6	13	5	12	4	11

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	Bagi Badan Publik level Provinsi						
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Omzet koperasi (Rp Juta)	3.734.809	3.672.342	3.753.483	3.762.172	3.772.250	3.846.658
2	Omzet UKM (Rp Milyar)	10.906	8,087	11.124	8,896	11.347	10,230
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	0,3%	0,3%	0,4%	0,40%	0,4%	0,4%
Urusan Penanaman Modal							
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	40.633.132,-	40.633.132	42.664.788,-	42.664.788	44.798.028,-	44.798.028
2	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat	84	84	85	85	85	85
Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	10,9%	10,9%	11,5%	11,5%	11,8%	11,8%
2	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 9 POPWIL	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 2 POPWIL	n/a	Peringkat 8 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL
Urusan Statistik							
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan	100%	90%	100%	95%	100%	100%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	n daerah						
2	Tingkat kepuasan pelanggan	70	70	71	71	72	72
Urusan Kebudayaan							
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	668	648	718	698	768	748
2	meningkatkan kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	6,27 %	6,10%	6,89 %	6,85%	7,40 %	7,42%
3	peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional ydi Taman Budaya	7,79 %	7,56%	10,29 %	12,35%	12,79 %	13,14%
4	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	4,44 %	2,54%	4,60 %	2,58%	4,75 %	2,64%
5	jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	10	5	15	5	20	5
Urusan Perpustakaan							
1	Persentase	25%	18%	26%	19%	27%	20%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan						
2	Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindakkan juti kerjasama	6	5	7	6	8	7
Urusan Kearsipan							
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	6850	3500	7300	4000	7500	4500
Urusan Pariwisata							
1	spending money wisatawan	8.123.974,-	2.800.000,-	8.498.797,-	2.850.000,-	8.830.595,-	3.500.000,-
2	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	10.446.367,-	6.142.121,-	11.073.149,-	6.704.860,-	11.737.538,-	7.937.638,-
Urusan Pertanian							
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB	7.183.372,-	7.007.297,-	7.255.205,-	7.038.479,-	7.327.757,-	7.101.121,-

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
Urusan Kehutanan							
1	nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	749.480,-	749.480,-	756.975,-	756.975,-	764.545,-	764.545,-
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral							
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	98,14%	99,99%	99,70%	99,99%	100,00%	100%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan	71	90	93	100	115	119
Urusan Perdagangan							
1	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB DIY	8.955.393,-	8.600.000,-	9.403.163,-	9.030.000,-	9.873.321,-	9.841.500,-
Urusan Perindustrian							
1	Nilai Industri Pengolahan dalam PDRB DIY	13.143.131	13.000.000	13.668.856	13.520.000,-	14.215.611	14.060.000
Urusan Kelautan dan Perikanan							
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY	325.357	292.822	328.611	295.750	331.897	300.707
2	Peningkatan Status Kawasan Konservasi	60%	30%	80%	60%	100%	80%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
Perencanaan Pembangunan							
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	84,50%	84,50%	85,00%	85,00%	85,50%	85,50%
Keuangan							
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	6.453.519.026	2.826.714.875	6.704.805.116	2.968.050.618	6.967.568.518	3.116.453.149
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase kualitas manajemen SDM Aparatur	81,50%	81,50%	83,00%	83,00%	85,00%	85,00%
2	Akreditasi Badan Diklat	92	91	92	91	93	93
Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	70%	65%	90%	70%	100%	80%
Pengawasan							
1	Persentase penyelesaian LHP (Tindak	85%	85%	88%	88%	90%	90%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	Lanjut Hasil Pemeriksaan)						
Sekretariat Dewan							
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD	85%	85%	87%	87%	90%	90%
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96,00%	96,00%	96,50%	96,50%	96,50%	96,50%
Sekretariat Daerah							
1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	90%	100%	95%	100%	100%	100%
2	Persentase bahan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	Manusia yang menjadi rumusan kebijakan						
3	Persentase bahan kebijakan pengelolaan pembangunan masyarakat yang menjadi rumusan kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokoleraan, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan	87%	87%	88%	88%	88%	88%
5	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	16	16	23	23	31	31
6	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
7	Persentase Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	80,5%	80,5%	81,5%	81,5%	83%	83%
9	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi bidang infrastruktur daerah dan pembangunan berkelanjutan yang	65%	56%	80%	68%	80%	75%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1						
11	Persentase rumusan bahan Kebijakan yang mernjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	84%	84%	92%	92%	100%	100%
12	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	4	1	4	4	4	4
13	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	3	4	3	4	3
14	Skor Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah	84	84	86	86	88	88

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020	Review Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Review Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)	Review Target Kinerja RPJMD pada akhir periode (Tahun 2022)
	daerah						
15	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan kaperda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Peningkatan kualitas layanan kaperda	88	88	89	89	90	90
17	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	98,1	98	98,1	98,1	98,2	98,2
18	Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Prosedur	-		-		100	

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun keempat RPJMD 2017-2022 yang merupakan pelaksanaan tahapan RPJPD periode ketiga dan keempat. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2021, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021 perlu diupayakan secara kolektif dengan semangat Budaya Kerja “SATRIYA⁶” *Sawiji* (bersatu padu-menyatu terpadu), *Greget* (gigih, semangat, kerja keras dan dinamis), *Sengguh* (percaya diri), *Ora Mingkuh* (konsisten bertanggungjawab terhadap semua keputusan)⁷ segenap aparatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2021 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶ Budaya kerja SATRIYA (Selaras, Akal budi Luhur, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional) bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yang menjiwai semangat kerja aparatur Pemda DIY. Budaya kerja SATRIYA telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

⁷ *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* merupakan filosofi yang berasal dari *sesanti* luhur dari pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono I kepada seluruh Ksatriya Mataram Jogja dalam menjalankan dharma bakti kepada negara

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X